



Peraturan Gubernur
Nomor 023 Tahun 2025

RKPD



2026

Provinsi Kalimantan Selatan



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 023 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa Pemerintah Provinsi harus mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan arah dan prioritas pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 000.8.2.6/3586/Bangda tanggal 26 Juni 2025, perlu untuk ditindaklanjuti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 342) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 51);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
28. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024;

29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 3);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
33. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 12);
34. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 056 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 015 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 56);
35. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahunan sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD Daerah terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II
PROGRAM PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Pasal 2

- (1) Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dilaksanakan sesuai dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.
- (2) Rincian dari program pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dalam bentuk visi dan misi Gubernur yang dituangkan dalam RPJM Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 serta memperhatikan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026.

Pasal 4

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:

- Bab I Pendahuluan;
- Bab II Gambaran umum kondisi Daerah;
- Bab III Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- Bab IV Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- Bab V Arah Kebijakan pembangunan kabupaten/kota;
- Bab VI Rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- Bab VII Kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- Bab VIII Penutup.

Pasal 5

- (1) RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.
- (2) Renja PD ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah setelah disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) Buku Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juni 2025
GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHIDIN

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 30 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,

ttd

MUHAMMAD SYARIFFUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025 NOMOR 23

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-5
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-10
1.4 Maksud Dan Tujuan	I-11
1.5 Sistematika Dokumen RKPD	I-12
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	II-1
2.3 Kondisi Umum Daerah	II-1
2.3.2 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.3.3 Potensi Pengembangan Wilayah	II-25
2.3.4 Wilayah Metropolitan Banjarbakula	II-25
2.3.5 Wilayah Rawan Bencana	II-28
2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-31
2.4.2 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-31
2.5 Aspek Pelayanan Umum	II-68
2.5.2 Layanan Urusan Wajib	II-68
2.5.3 Layanan Urusan Pilihan	II-154
2.5.4 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah	II-177
2.6 Aspek Daya Saing Daerah	II-178
2.6.2 Daya Saing Berdasarkan Pilar IDSD (BRIN)	II-178
2.6.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah	II-184
2.6.4 Fokus Iklim Investasi dan Pelayanan Publik	II-190
2.6.5 Fokus Sumber Daya Manusia	II-192
2.6.6 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur	II-193
2.6.7 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-196
2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD	II-209
2.7.2 Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2023	II-209
2.7.3 Evaluasi Realisasi RKPD Sampai dengan Tahun 2024	II-227
2.8 Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan dengan isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah	II-234
2.8.2 Permasalahan Pokok Pembangunan di Kalimantan Selatan	II-239
2.8.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	II-245
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	III-96
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	III-96
3.2 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2024	III-97
3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	III-98
3.2.2 Share Perekonomian (Struktur Ekonomi Daerah)	III-102
3.2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi	III-105
3.2.4 PDRB Per Kapita	III-113
3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-116
3.2.6 Indeks Modal Manusia (IMM)	III-118
3.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka	III-118
3.2.8 Tingkat Kemiskinan	III-120
3.2.9 Gini Rasio	III-123
3.2.10 Gas Rumah Kaca	III-125
3.2.11 Inflasi	III-128
3.2.12 ICOR (Incremental Capital Output Ratio)	III-130

3.2.13	Indeks Williamson	III-135
3.2.14	Ekonomi Berkelanjutan.....	III-137
3.2.15	Ekonomi Hijau	III-137
3.2.16	Ekonomi Biru	III-142
3.2.17	Input Output Hijau	III-145
3.3	Tantangan Dan Peluang Perekonomian Kedepan	III-151
3.3.1	Gambaran Dan Prospek Perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan Tahun 2025-2026.....	III-151
3.4	Tantangan dan Prospek Perekonomian Kalimantan Selatan 2025-2026: Analisis Komprehensif Pada Aspek Kemiskinan dan Pengangguran	III-157
3.4.1	Kondisi dan Dinamika Kemiskinan di Indonesia 2025-2026.....	III-157
3.5	Proyeksi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025-2026	III-162
3.5.1	Tujuan Proyeksi Perekonomian	III-163
3.5.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi.....	III-163
3.5.3	PDRB Per Kapita	III-166
3.5.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	III-167
3.5.5	Indeks Modal Manusia (IMM)	III-168
3.5.6	Tingkat Pengangguran Terbuka	III-168
3.5.7	Tingkat Kemiskinan.....	III-169
3.5.8	Gini Rasio.....	III-172
3.5.9	Gas Rumah Kaca (GRK)	III-174
3.5.10	Indeks Williamson	III-174
3.5.11	Sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	III-176
3.6	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026.....	III-177
3.6.1	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional.....	III-178
3.6.2	Sasaran Pembangunan Tahun 2026	III-182
3.6.3	Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kalimantan Selatan	III-184
3.7	Arah Kebijakan Keuangan Daerah	III-188
3.7.1	Arah Kebijakan Pendapatan Daerah	III-189
3.7.2	Pendapatan Asli Daerah	III-98
3.7.3	Pendapatan Transfer.....	III-99
3.7.4	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	III-101
3.8	Arah Kebijakan Belanja Daerah	III-102
3.8.1	Belanja Operasi.....	III-98
3.8.2	Belanja Modal	III-99
3.8.3	Belanja Transfer.....	III-101
3.9	Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	III-101
3.9.1	Penerimaan Pembiayaan	III-98
3.10	Pengeluaran Pembiayaan	III-99
3.11	Arah Kebijakan Alternatif Pembiayaan Daerah	III-101
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	IV-1
4.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan	IV-2
4.1.1	Penelaahan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional.....	IV-2
4.1.2	Penelaahan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah	IV-6
4.1.3	Penelaahan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim	IV-16
4.2	Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026	IV-21
4.2.1	Isu Strategis Pembangunan	IV-21
4.2.2	Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026	IV-24
4.2.3	Pokok-Pokok Pikiran DPRD	IV-25
4.2.4	Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2026.....	IV-27
4.2.5	Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD 2026 dan RKP 2026	IV-80
4.3	Tahapan Proses Perencanaan	IV-71
4.3.1	Orientasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.....	IV-71
4.3.2	Forum Konsultasi Publik	IV-71
4.3.3	Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Selatan	IV-72

4.3.4	Musrenbang RKPD Tahun 2025	IV-73
4.3.5	Forum Lintas Perangkat Daerah	IV-73
4.3.6	Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD	IV-74
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA	V-1
5.1	Indikator Makro Kabupaten/ Kota	V-1
5.1.1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	V-1
5.1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	V-5
5.1.3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	V-8
5.1.4	Persentase Penduduk Miskin	V-12
5.1.5	Indeks Gini	V-18
5.1.6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	V-21
5.1.7	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)	V-24
5.1.8	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan	V-1
5.2	Kebijakan Pembangunan Kewilayahan	V-2
5.2.1	Arah Kebijakan Kewilayahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan	V-5
5.2.2	Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan Pembagian Klaster	V-14
5.2.3	Analisa Layanan Kawasan	V-27
5.2.4	Proyek Prioritas Kalsel	V-37
5.3	ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA	V-52
5.3.1	Kota Banjarmasin	V-52
5.3.2	Kota Banjarbaru	V-54
5.3.3	Kabupaten Banjar	V-55
5.3.4	Kabupaten Tanah Laut	V-57
5.3.5	Kabupaten Tanah Bumbu	V-58
5.3.6	Kabupaten Kotabaru	V-60
5.3.7	Kabupaten Tapin	V-62
5.3.8	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	V-64
5.3.9	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	V-65
5.3.10	Kabupaten Hulu Sungai Utara	V-67
5.3.11	Kabupaten Balangan	V-69
5.3.12	Kabupaten Tabalong	V-71
5.3.13	Kabupaten Barito Kuala	V-72
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	VI-1
6.1	Tema, Prioritas, dan Sub Prioritas Pembangunan Tahun 2026	VI-1
6.1.1	Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026	VI-2
6.2	Program Prioritas Daerah	VI-11
6.3	Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan	VI-25
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	VII-1
7.1	Indikator Makro Daerah	VII-2
7.2	Indikator Kinerja Utama	VII-3
7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah	VII-5
BAB VIII	PENUTUP	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Visi-Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	I-1
Tabel 1.2	Daftar Dokumen yang memiliki hubungan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	I-10
Tabel 2.1	Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024	II-2
Tabel 2.2	Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2023	II-6
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai Barito	II-10

Tabel 2.4	Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai Cengal Batulicin.....	II-11
Tabel 2.5	Daerah Aliran Sungai (DAS) pada WS Pulau Laut.....	II-12
Tabel 2.6	Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel	II-14
Tabel 2.7	Kondisi Iklim di Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2024.....	II-14
Tabel 2.8	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan	II-15
Tabel 2.9	Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-17
Tabel 2.10	Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.11	Penduduk Menurut Jenis Kelamin. Sex Ratio. dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-20
Tabel 2.12	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024.....	II-21
Tabel 2.13	Persentase Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan, Agustus 2022 – Agustus 2024.....	II-22
Tabel 2.14	Persentase Penduduk Usia 7-23 Tahun Menurut Jenis Kelamin. Kelompok Umur Sekolah. dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-23
Tabel 2.15	Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan 2021 – 2023.....	II-30
Tabel 2.16	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)	II-32
Tabel 2.17	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah).....	II-33
Tabel 2.18	PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2020–2024 (Miliar Rupiah) Menurut Pengeluaran	II-34
Tabel 2.19	Distribusi Persentase PDRB Prov. Kalsel Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024	II-34
Tabel 2.20	Capaian Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024..	II-35
Tabel 2.21	Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024..	II-35
Tabel 2.22	(Seri 2010) Laju Indeks Implisit PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020 - 2024	II-37
Tabel 2.23	Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024	II-38
Tabel 2.24	Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024...	II-39
Tabel 2.25	Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2020-2024)	II-40
Tabel 2.26	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 ..	II-41
Tabel 2.27	Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2020-2024.....	II-41
Tabel 2.28	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024.....	II-42
Tabel 2.29	Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2020 s.d. 2024 (Rupiah)	II-43
Tabel 2.30	Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020 s.d. 2024 (Rupiah).....	II-43
Tabel 2.31	Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2020 s.d. 2024 (Rupiah).....	II-44
Tabel 2.32	Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-45
Tabel 2.33	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024 ..	II-46
Tabel 2.34	Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-46
Tabel 2.35	Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.36	Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-49
Tabel 2.37	Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2020-2024.....	II-52
Tabel 2.38	Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi(AKB), dan Angka Kematian Neonatal (AKN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022–2024.....	II-53
Tabel 2.39	Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-54
Tabel 2.40	Penyakit Tidak Menular Tahun 2024.....	II-55

Tabel 2.41	Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan.....	II-56
Tabel 2.42	Persentase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2024	II-57
Tabel 2.43	Data Status Gizi Balita (0-59 Bulan) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-57
Tabel 2.44	Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-58
Tabel 2.45	Jumlah Ibu Hamil Tahun 2021 sd 2024 di Kalimantan Selatan	II-58
Tabel 2.46	Capaian Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024.....	II-59
Tabel 2.47	Perkembangan pengeluaran perkapita di Pulau Kalimantan Tahun 2020 - 2024	II-60
Tabel 2.48	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2020-2024	II-61
Tabel 2.49	Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.....	II-61
Tabel 2.50	Lokasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian di Kalimantan Selatan (Pengukuran 2022-2023)	II-62
Tabel 2.51	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2020-2024.....	II-63
Tabel 2.52	Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024...	II-64
Tabel 2.53	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa) di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.....	II-65
Tabel 2.54	Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-66
Tabel 2.55	Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan.....	II-66
Tabel 2.56	Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024	II-69
Tabel 2.57	Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.....	II-69
Tabel 2.58	Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024	II-70
Tabel 2.59	Jumlah Sekolah, Murid dan Guru serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024.....	II-70
Tabel 2.60	Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 dan 2024	II-72
Tabel 2.61	Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024.....	II-72
Tabel 2.62	Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-73
Tabel 2.63	Data Terkait Rasio Konektivitas Provinsi Tahun 2024	II-76
Tabel 2.64	Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2022.....	II-79
Tabel 2.65	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan.....	II-80
Tabel 2.66	Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan <i>One Map</i> Irigasi pada Tahun 2019	II-80
Tabel 2.67	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023	II-81
Tabel 2.68	Data Capaian Air Minum Prov Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024.....	II-81
Tabel 2.69	Time Series Capaian Akses Layanan Air Minum Kabupaten/kota Tahun 2021 – 2024.....	II-82
Tabel 2.70	Kapasitas Distribusi Layanan SPAM Banjarbakula Prov Kalsel.....	II-84
Tabel 2.71	Data Distribusi layanan SPAM Banjarbakula	II-84
Tabel 2.72	Kondisi Pencapaian Cakupan Akses Air Limbah Domestik Layak Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024	II-85
Tabel 2.73	Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan 2024	II-88
Tabel 2.74	Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2024	90
Tabel 2.75	Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2024.....	91
Tabel 2.76	Jumlah Pekerjaan Konstruksi Tahun 2021 sd 2024 Provinsi Kalimantan Selatan	92
Tabel 2.77	Data Penanganan Permukiman Kumuh Dan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	92
Tabel 2.78	Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 ...	94
Tabel 2.79	Data peningkatan kualitas RTLH dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahun 2019-2023.....	94
Tabel 2.80	Penanganan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	95
Tabel 2.81	Data Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	95

Tabel 2.82	Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 s.d 2024	97
Tabel 2.83	Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Selatan.....	97
Tabel 2.84	Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan	98
Tabel 2.85	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten/Kota Thn 2020 sd 2024	99
Tabel 2.86	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan	100
Tabel 2.87	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan	100
Tabel 2.88	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten/Kota Tahun 2024	101
Tabel 2.89	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan	102
Tabel 2.90	Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020-2023 Provinsi Kalimantan Selatan.....	102
Tabel 2.91	Produksi Pangan di Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024.....	II-103
Tabel 2.92	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun	II-104
Tabel 2.93	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024	II-105
Tabel 2.94	Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-106
Tabel 2.95	Tabel target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026	II-108
Tabel 2.96	Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut	II-110
Tabel 2.97	Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut tahun 2024	II-110
Tabel 2.98	Sebaran Indikatif Areal Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Gambut tahun 2024 ..	II-111
Tabel 2.99	Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2024	II-112
Tabel 2.100	Tabel capaian nilai IKL Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-113
Tabel 2.101	Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel sampai dengan Tahun 2024	II-118
Tabel 2.102	Parameter Indeks Kualitas Air (IKA).....	II-120
Tabel 2.103	Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-127
Tabel 2.104	Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan	II-128
Tabel 2.105	Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-132
Tabel 2.106	Trayek dan Tarif Bus AKAP Tahun 2025	II-133
Tabel 2.107	Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula Tahun 2024	II-134
Tabel 2.108	Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-136
Tabel 2.109	Perkembangan Penumpang dan Barang Pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	II-137
Tabel 2.110	Perkembangan Penumpang Berangkat dengan angkutan udara di Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-137
Tabel 2.111	Perkembangan Penumpang Datang dengan Angkutan Udara di Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-138
Tabel 2.112	Persebaran Desa Bebas <i>Blank Spot</i> dan Desa <i>Blank Spot</i> 2024.....	II-139
Tabel 2.113	Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Terakhir 2019 - 2022	II-140
Tabel 2.114	Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-142
Tabel 2.115	Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-143
Tabel 2.116	Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-143
Tabel 2.117	Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.	II-143
Tabel 2.118	Rekap Data UMKM Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan	II-144
Tabel 2.119	Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-144
Tabel 2.120	Jumlah Proyek. Rencana. dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2024 PMA dan PMDN	II-145
Tabel 2.121	Jumlah Atlet PPLP dan Atlet PPLPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sd 2024 .	II-146
Tabel 2.122	Perbandingan Indeks Kebudayaan Nasional dengan Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023	II-148
Tabel 2.123	Warisan Budaya Takbenda Indonesia Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan.....	II-149

Tabel 2.124	Data Cagar Budaya Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-151
Tabel 2.125	Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya.....	II-151
Tabel 2.126	Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2023-2024 Provinsi Kalimantan Selatan	II-153
Tabel 2.127	Luas Panen. Produksi. serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021-2024	II-155
Tabel 2.128	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Tahun 2019 – 2024	II-156
Tabel 2.129	Skor Minimal Cadangan Pangan Pemerintah CPP Provinsi Tahun 2019 – 2024	II-156
Tabel 2.130	Skor Pola Pangan Tingkat Konsumsi Tahun 2019 – 2024.....	II-156
Tabel 2.131	Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2022 – 2024	II-157
Tabel 2.132	Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2022 – 2024	II-157
Tabel 2.133	Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019 - 2024 Provinsi Kalimantan Selatan	II-158
Tabel 2.134	Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024	II-159
Tabel 2.135	Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2023 - 2024	II-160
Tabel 2.136	Jumlah Ternak Besar. Ternak Kecil. dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024	II-162
Tabel 2.137	Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021-2024	II-162
Tabel 2.138	Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2022-2024 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-162
Tabel 2.139	Perkembangan Jumlah Rumah Tangga. Produksi. dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2011-2024	II-164
Tabel 2.140	Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-166
Tabel 2.141	Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Produksi IPHHK-IPHHK Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-166
Tabel 2.142	Sebaran Titik Panas/Hotspot di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024.....	II-167
Tabel 2.143	Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024	II-168
Tabel 2.144	Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024	II-169
Tabel 2.145	Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024	II-170
Tabel 2.146	Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Selatan s.d Desember 2024	II-171
Tabel 2.147	Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2021-2024 Provinsi Kalimantan Selatan	II-172
Tabel 2.148	Data Kunjungan Wisnus Wisman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2024	II-172
Tabel 2.149	Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-173
Tabel 2.150	Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-174
Tabel 2.151	Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan..	II-174
Tabel 2.152	Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024	II-175
Tabel 2.153	Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Selatan .	II-175
Tabel 2.154	Lokasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian di Provinsi Kalimantan Selatan (Pengukuran 2022-2023)	II-177
Tabel 2.155	Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Tahun 2020-2024.....	II-178
Tabel 2.156	Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022	II-181
Tabel 2.157	Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2023 - 2024.....	II-182
Tabel 2.158	Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi di Pulau Kalimantan dan Indonesia Tahun 2023-2024	II-187
Tabel 2.159	Perkembangan impor 10 komoditi dengan volume tertinggi di Kalimantan Selatan Tahun 2023.....	II-189
Tabel 2.160	Tabel PMTB Provinsi Kalimantan Selatan	II-191
Tabel 2.161	Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan sd Tahun 2023.....	II-199
Tabel 2.162	Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK.....	II-201
Tabel 2.163	Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota	

	Berdasarkan Analisis	II-203
Tabel 2.164	Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Batas Administrasi Kabupaten s.d Analisis Terakhir Tahun 2020.....	II-206
Tabel 2.165	Rekapitulasi Hasil Realisasi Keuangan dan Fisik RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2024.....	II-210
Tabel 2.166	Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-215
Tabel 2.167	Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan SD TW1 Tahun 2025.....	II-227
Tabel 2.168	Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel.....	II-245
Tabel 3.1	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha ADHB dan ADHK Tahun 2022 - 2024 (Milyar Rupiah)	III-98
Tabel 3.2	PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran ADHB dan ADHK Tahun 2022 - 2024 (Milyar Rupiah)	III-101
Tabel 3.3	LPE dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024 Menurut Lapangan Usaha (Persen).....	III-107
Tabel 3.4	LPE dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 Menurut Pengeluaran (Persen)	III-108
Tabel 3.5	Kondisi Indeks Modal Manusia Kalimantan Selatan 2018 – 2023	III-118
Tabel 3.6	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kalimantan Selatan 2022 – 2024 (Persen)...	III-127
Tabel 3.7	Indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dan 2023	III-140
Tabel 3.8	Asumsi - Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2025.....	III-156
Tabel 3.9	LPE dan SOG beserta Proyeksi PDRB Pengeluaran Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2026 (Persen).....	III-163
Tabel 3.10	LPE dan SOG beserta Proyeksi PDRB Lapangan Usaha Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 (Persen).....	III-164
Tabel 3.11	Proyeksi/Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026 ..	III-166
Tabel 3.12	Proyeksi/Target PDRB Per Kapita Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026	III-167
Tabel 3.13	Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026.....	III-167
Tabel 3.14	Proyeksi/Target Indeks Modal Manusia Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026.....	III-168
Tabel 3.15	Proyeksi/Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026.....	III-169
Tabel 3.16	Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026.....	III-172
Tabel 3.17	Proyeksi/Sasaran Gini Rasio Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026	III-173
Tabel 3.18	Proyeksi/Target Penurunan Intensitas Emisi GRK Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026.....	III-174
Tabel 3.19	Proyeksi/Target Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026.....	III-174
Tabel 3.20	Proyeksi/Target Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026.....	III-176
Tabel 3.21	Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025	III-176
Tabel 3.22	Kesepakatan Indikator Makro Daerah Dalam Rakortek Tahun 2025	III-177
Tabel 3.23	Tabel Pendapatan Daerah Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 – 2026 (Rp).....	III-96
Tabel 3.24	Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026	III-98
Tabel 3.25	Pendapatan Transfer Pemda Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2026	III-100
Tabel 3.26	Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemda Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2026.....	III-102
Tabel 3.27	Belanja Daerah Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp).....	III-98
Tabel 3.28	Belanja Operasi Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp).....	III-99
Tabel 3.29	Belanja Modal Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp)	III-100
Tabel 3.30	Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp) ..	III-101
Tabel 3.31	Belanja Transfer Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp).....	III-101
Tabel 3.32	Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 – 2026 (Rupiah)	III-98
Tabel 3.33	Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 – 2026 (Rupiah)	III-98
Tabel 3.34	Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	

	TA 2023 – 2026 (Rupiah)	III-100
Tabel 4.1	Target Indikator Makro Daerah Tahun 2026	IV-8
Tabel 4.2	Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029.....	IV-9
Tabel 4.3	Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan.....	IV-17
Tabel 4.4	Persandingan Target dan Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan.....	IV-18
Tabel 4.5	Pengurangan Emisi GRK Kalimantan Selatan Terverifikasi Tahun 2020 - 2022	IV-21
Tabel 4.6	Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	IV-23
Tabel 4.7	Persandingan Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029 dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026.....	IV-24
Tabel 4.8	Penelaahan Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan	IV-25
Tabel 4.9	Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan Program Prioritas pada RKPD tahun 2026	IV-29
Tabel 4.10	Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026.....	IV-61
Tabel 4.11	Keselarasn Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026	IV-71
Tabel 4.12	Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kewilayahan RKP Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	IV-71
Tabel 5.1	Kategori Capaian IPM Kabupaten/ Kota	V-2
Tabel 5.2	Capaian IPM Kabupaten/KotaTahun 2023-2024	V-4
Tabel 5.3	Kategori Capain LPE Kabupaten/ Kota	V-6
Tabel 5.4	Kategori Capain TPT Kabupaten/ Kota.....	V-8
Tabel 5.5	TPT Kabupaten/ Kota Tahun 2022 - 2024	V-11
Tabel 5.6	Kategori Capain Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota	V-13
Tabel 5.7	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2022 - 2024	V-14
Tabel 5.8	Kategori Capain Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota	V-19
Tabel 5.9	Indeks Gini Kabupaten/ Kota Tahun 2021 - 2023	V-20
Tabel 5.10	Kategori Capain IKLH Kabupaten/ Kota.....	V-22
Tabel 5.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tahun 2022 - 2024.....	V-23
Tabel 5.12	Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/ Kota Tahun 2024	27
Tabel 5.13	Penurunan Emisi GRK Tahun 2022 (Ton CO2/eq)	V-2
Tabel 5.14	Pembagian Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Selatan	V-5
Tabel 5.15	Kebijakan dan Strategi Kawasan Metropolitan Banjarbakula	V-14
Tabel 5.16	Proyek Strategis	V-37
Tabel 5.17	Target Indikator Kinerja Makro kabupaten/kota se- Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.....	V-74
Tabel 6.1	Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026.....	VI-12
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Makro Daerah	VII-2
Tabel 7.2	Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.....	VII-3
Tabel 7.3	Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	VII-9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah	I-2
Gambar 1.2	Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi	I-4
Gambar 1.3	Kerangka Waktu Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.....	I-4
Gambar 2.1	Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan	II-3
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kalsel terhadap wilayah sekitar, ALKI 1 dan ALKI 2	II-4
Gambar 2.3	Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan	II-5
Gambar 2.4	Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan	II-8
Gambar 2.5	Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan	II-9
Gambar 2.6	Wilayah Sungai (WS) Barito dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	II-10

Gambar 2.7	Wilayah Sungai (WS) Cengal-Batulicin dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	II-12
Gambar 2.8	Wilayah Sungai (WS) Pulau Laut dan Daerah Aliran Sungai (DAS)	II-13
Gambar 2.9	Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-18
Gambar 2.10	Grafik Jumlah Penduduk Kalsel di Kab dan Kota Tahun 2024.....	II-19
Gambar 2.11	Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	II-21
Gambar 2.12	Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2023	II-24
Gambar 2.13	Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-29
Gambar 2.14	Umur Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024. Serta UHH Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-51
Gambar 2.15	Kasus Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-52
Gambar 2.16	Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-53
Gambar 2.17	Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024.....	II-59
Gambar 2.18	Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan. 2020-2024.....	II-65
Gambar 2.19	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2023... ..	II-68
Gambar 2.20	Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-74
Gambar 2.21	Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2024.....	II-74
Gambar 2.22	Jumlah Kefarmasian dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024	II-75
Gambar 2.23	Grafik Capaian Air Minum (%) Prov Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024	II-82
Gambar 2.24	Grafik Capaian Akses Layanan Air Minum 13 Kabupaten/kota Tahun 2021 – 2024	II-83
Gambar 2.25	Capaian Air Limbah Domestik Akses Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-85
Gambar 2.26	Capaian Akses Air Limbah Domestik Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2024	II-86
Gambar 2.27	Capaian Akses Persampahan kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan	II-89
Gambar 2.28	Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani Tahun (2018–2023)	93
Gambar 2.29	Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 s.d Tahun 2024	II-105
Gambar 2.30	Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan	II-109
Gambar 2.31	Nilai Indeks Kualitas Lahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024.....	II-113
Gambar 2.32	Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan.....	II-133
Gambar 2.33	Perkembangan Transportasi Udara Tahun 2024.....	II-139
Gambar 2.34	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024	II-153
Gambar 2.35	Kerangka pengukuran IDSD 2024.....	II-179
Gambar 2.36	Skor IDSD Nasional Tahun 2022	II-180
Gambar 2.37	Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022	II-181
Gambar 2.38	Ringkasan Komponan EV-Digital Competitiveness Index 2022.....	II-183
Gambar 2.39	Ringkasan Komponan EV-Digital Competitiveness Index Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022.....	II-184
Gambar 2.40	Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Maret 2024	II-187
Gambar 2.41	Grafik Perkembangan NTUP Provinsi Kalimantan Selatan s.d Maret Tahun 2024	II-188
Gambar 2.42	Peta Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2018	II-196
Gambar 2.43	Peta Status Pangan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021	II-200
Gambar 2.44	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi	II-202
Gambar 2.45	Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Batas Administrasi Kabupaten.....	II-204
Gambar 2.46	Peta Status Air Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-207
Gambar 2.47	Status Air Analisis Provinsi Kalimantan Selatan.....	II-208
Gambar 2.48	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021- Agustus 2024	II-231
Gambar 2.49	Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024.....	II-231
Gambar 2.50	Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024.....	II-233
Gambar 3.1	Share PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (Persen)	III-103
Gambar 3.2	Share PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (Persen).....	III-104
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi	

	di Kalimantan Tahun 2011 – 2024 (persen).....	III-111
Gambar 3.4	Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Orang/Tahun)	III-113
Gambar 3.5	PDRB Per Kapita Indonesia dan Provinsi Tahun 2024 (USD per Kapita)	III-115
Gambar 3.6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024.....	III-117
Gambar 3.7	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan Tahun 2012 – 2024 (persen).....	III-119
Gambar 3.8	Persentase Penduduk Miskin, (Maret dan September) Tahun 2019 - 2024	III-121
Gambar 3.9	Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016–September 2024.....	III-124
Gambar 3.10	Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 – 2024 (Persen).....	III-129
Gambar 3.11	ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2024	III-132
Gambar 3.12	Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2024	III-136
Gambar 3.13	Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2023.....	III-138
Gambar 3.14	Indeks Ekonomi Biru Indonesia 2023.....	III-142
Gambar 3.15	Capaian pilar Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia 2023	III-143
Gambar 3.16	Pengganda Output Sektor Prioritas dan Non Prioritas	III-147
Gambar 3.17	Pengganda Kesempatan Kerja Sektor Prioritas dan Non Prioritas	III-148
Gambar 3.18	Multiplier Emisi CO ₂ Sektor Prioritas dan Non Prioritas	III-150
Gambar 3.19	Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di Kalsel (2025 – 2026) dalam Tiga Skenario ...	III-170
Gambar 3.20	Arahan Presiden Prabowo untuk Target Pertumbuhan Ekonomi 8,0 Persen	III-178
Gambar 3.21	Pertumbuhan Menuju 8,0 Persen Indonesia	III-178
Gambar 3.22	Tema dan Sasaran RKP Tahun 2026	III-181
Gambar 3.23	Sasaran dan Tema Pembangunan Wilayah RKP Tahun 2026.....	III-183
Gambar 3.24	Arah Kebijakan Dan Lokasi Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029	III-184
Gambar 3.25	Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2026	III-185
Gambar 3.26	Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	III-187
Gambar 3.27	Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	III-188
Gambar 4.1	Kerangka Pikir Perumusan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	IV-2
Gambar 4.2	Tema Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	IV-13
Gambar 4.3	Sepuluh Janji Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2030	IV-13
Gambar 4.4	Konsep Pembagian Klaster Kewilayahan Kalimantan Selatan dan Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis.....	IV-15
Gambar 4.5	Diagram capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	IV-17
Gambar 4.6	Diagram capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024	IV-17
Gambar 4.7	Capaian pengurangan GRK Kalimantan Selatan tahun 2010 - 2022	IV-21
Gambar 4.8	Dokumentasi Orientasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	IV-71
Gambar 4.9	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan FKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.....	IV-72
Gambar 4.10	Dokumentasi Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Musrenbang Penyusunan RKPD.....	IV-72
Gambar 4.11	Dokumentasi Musrenbang RKPD Tahun 2025 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026	IV-73
Gambar 4.12	Dokumentasi pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	IV-73
Gambar 4.13	Dokumentasi Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD	IV-74
Gambar 5.1	Analisis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2024	V-3
Gambar 5.2	Sebaran Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2024.....	V-4
Gambar 5.3	Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota.....	V-5
Gambar 5.4	Analisis Kuadran Capaian LPE dan Share Perekonomian Kabupaten/Kota	V-7
Gambar 5.5	Analisis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota	V-9
Gambar 5.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 menurut Kabupaten/Kota.....	V-10
Gambar 5.7	Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota	V-12

Gambar 5.8	Analisis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota	V-14
Gambar 5.9	Indeks Komposit FGT Tahun 2023	V-15
Gambar 5.10	Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota	V-16
Gambar 5.11	Peta Analisa Geostatistik Resiko Stunting dari Analisa Data Pensasaran P3KE- Kemenko PMK	V-17
Gambar 5.12	Analisa Geostatistik Data Presentase Stunting 2024 dari Puskesmas	V-18
Gambar 5.13	Analisis Kuadran Capaian Indeks Gini dan Laju Perubahan Indeks Gini Kabupaten/Kota	V-20
Gambar 5.14	Peta Indeks Gini Kabupaten/Kota	V-21
Gambar 5.15	Analisis Kuadran Capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH Kabupaten/ Kota Tahun 2022-2024	V-23
Gambar 5.16	Peta IKLH Kabupaten/Kota	V-24
Gambar 5.17	Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota	V-1
Gambar 5.18	Peta Potensi Pertanian dan Perkebunan Kalsel	V-3
Gambar 5.19	Peta Sebaran Destinasi Wisata dan Geosite	V-4
Gambar 5.20	Peta Kewilayahan Kalimantan Selatan	V-8
Gambar 5.21	Peta Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan	V-10
Gambar 5.22	Peta Struktur Ruang (RTRWP KALSEL 2023-2042)	V-11
Gambar 5.23	Peta Cakupan Layanan Sistem Perkotaan	V-12
Gambar 5.24	Peta Proyeksi Kepadatan Jalan Nasional dan Provinsi Tahun 2024	V-13
Gambar 5.25	Peta Klaster A - Banjarbakula	V-19
Gambar 5.26	Peta Pengembangan Kewilayahan Zona Banjarbakula	V-20
Gambar 5.27	Peta Klaster B - Wilayah Banua Anam	V-21
Gambar 5.29	Peta Arahkan Pusat Kegiatan, Potensi dan Distribusi Klaster Banua Anam	V-23
Gambar 5.30	Peta Klaster C - Wilayah Pesisir dan Industri	V-24
Gambar 5.31	Peta DAS dan Geomorfologi Wilayah Saijaan Bersujud	V-25
Gambar 5.33	Peta Sistem Perkotaan	V-28
Gambar 5.34	Peta Cakupan Layanan Fasilitas Persampahan	V-28
Gambar 5.35	Gambar 5. 1 Peta Daerah Irigasi	V-29
Gambar 5.36	Peta Cakupan Layanan Lumbung Padi	V-30
Gambar 5.37	Cakupan Layanan Pabrik Perkebunan	V-31
Gambar 5.38	Analisa Layanan Kawasan Proyek Strategis	V-32
Gambar 5.39	Analisa Layanan Kawasan Proyek Strategis Dalam Sekala 100 Km	V-33
Gambar 5.40	Road Network Analisis Proyek Strategis	V-34
Gambar 5.41	Peta Jangkauan Layanan Pendidikan	V-35
Gambar 5.42	Cakupan Layanan Puskesmas	V-36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 (Permendagri 86/2017) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam hal ini, RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini merupakan dokumen perencanaan Pembangunan daerah yang menjabarkan rencana kerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode Tahun 2026.

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk Tahun 2026 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran ke-satu dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan RPJMD ini, maka Visi-Misi pembangunan daerah yang diacu pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini adalah Visi-Misi yang dicantumkan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Visi-Misi yang dimaksud dijelaskan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Visi-Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

VISI	KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN
Misi	1. Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia 2. Pembangunan Infrastruktur yang Handal 3. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah 4. Penguatan Ketahanan terhadap Perubahan Iklim 5. Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudh dan Cepat

Namun dalam tahun 2026 ini merupakan masa transisi sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMD tahun 2025-2029. Mengingat dokumen RPJMD tersebut masih dalam proses

finalisasi dan penetapan, maka penyusunan RKPD Tahun 2026 ini turut mengacu pada rancangan RPJMD 2025–2029 yang disusun melalui proses Forum Perangkat Daerah sebagaimana diarahkan dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 000.7.2.2/00116/BAPPEDA/2025, untuk menjaga kesinambungan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah.

Selanjutnya penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini secara proses dilakukan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Sementara itu, substansinya disusun melalui pendekatan holistik-tematik, integratif, dan spasial.

Proses dan tahapan penyusunannya tetap mengacu pada tiga dasar hukum utama, yaitu dua undang-undang dan satu peraturan menteri, yakni Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Mengacu pada dasar hukum tersebut, maka Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini wajib memperhatikan dan mempedomani dokumen perencanaan yang disusun oleh Pemerintah Pusat serta dokumen perencanaan jangka menengah dan dokumen rencana tata ruang yang disusun oleh Pemerintah Daerah. Adapun dokumen yang dimaksud adalah RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional yang disusun oleh Pemerintah Pusat serta RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042.



Sumber : Bappenas RI, 2025

Gambar 1.1 Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Pusat - Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2045 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2025-2045. Kemudian secara imperatif RPJPD tersebut dijabarkan ke dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029. RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029 pada tahun pertama.

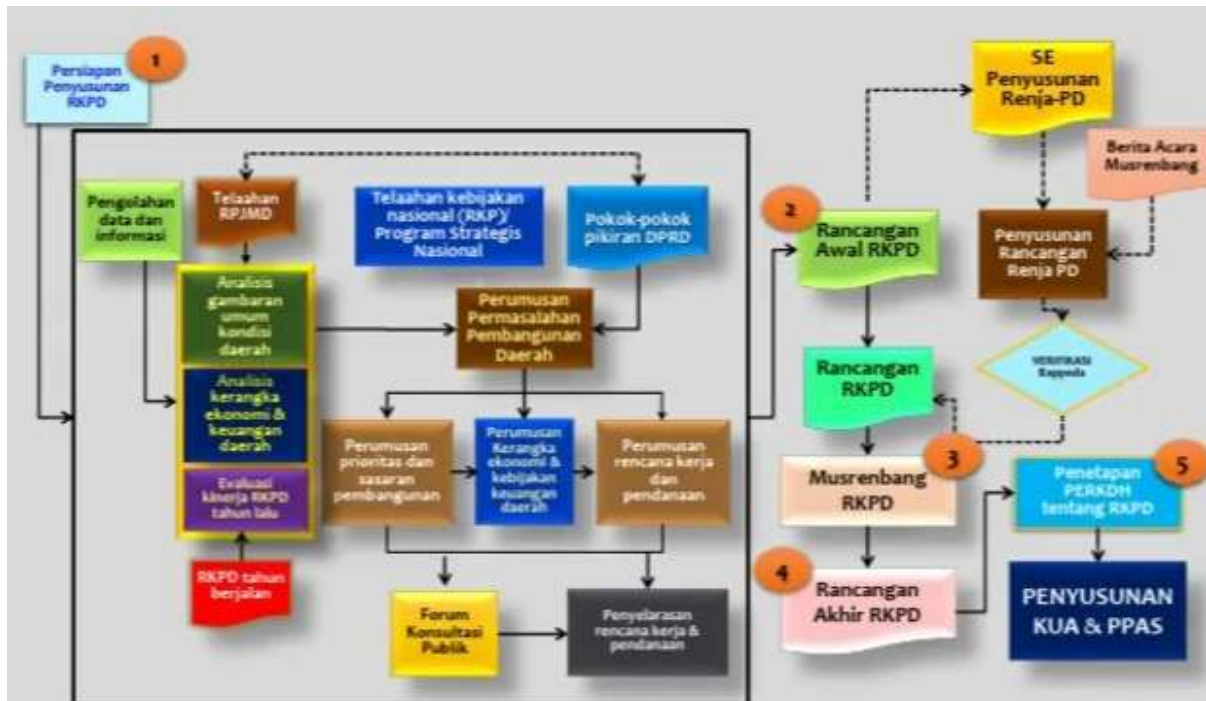
Selain itu, penyusunan Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini dipengaruhi oleh berbagai dinamika yang terjadi baik secara lokal di Kalimantan Selatan, secara nasional, dan secara global. Adapun dinamika yang dimaksud meliputi ancaman ketahanan budaya, perubahan iklim, konflik global dan kondisi geopolitik, perubahan iklim, ancaman resesi dan perlambatan ekonomi serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Selain itu, ada dinamika lain yang dirumuskan menjadi isu strategis utama dalam yang berpengaruh penting dalam penyusunan dokumen ini yaitu sebagai berikut.

1. Struktur perekonomian daerah berkelanjutan yang belum kuat.
2. Posisi strategis Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan.
3. Daya saing sumber daya manusia yang masih rendah.
4. Pengelolaan lingkungan hidup dan mitigasi kebencanaan yang belum optimal
5. Optimalisasi penyediaan infrastruktur dasar dan ekonomi berbasis kewilayahan.
6. Belum efektifnya peningkatan tata kelola pemerintahan.

Dengan memperhatikan dinamika dan isu strategis yang ada, maka tema pembangunan yang ditetapkan pada RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini adalah **Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional**.

Dokumen perencanaan ini akan diformalkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan yang selanjutnya akan menjadi instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah serta pedoman dokumen-dokumen anggaran. Adapun dokumen anggaran yang dimaksud adalah Kerangka Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam menuju penyusunan KUA dan PPAS tersebut, maka tahapan dan proses penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 digambarkan pada Gambar 1.2 berikut.



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Gambar 1.2 Alur Proses Penyusunan RKPD Provinsi

Proses penyusunan RKPD Tahun 2026 melibatkan partisipasi masyarakat maupun pemangku kepentingan serta perangkat daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk memastikan bahwa Rencana Kerja sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Adapun kerangka waktu penyusunan RKPD Tahun 2026 adalah sebagaimana pada Gambar 1.3 berikut :

*Provinsi
Kalimantan Selatan*



Sumber : Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Gambar 1.3 Kerangka Waktu Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

1.2 Dasar Hukum

Peraturan dan perundangan yang terkait sebagai Dasar Hukum Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 8)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
14. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
15. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045.
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
23. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6881);
24. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

25. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
27. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Tambahan Di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Pada Sub Bidang Energi Baru Terbarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20);
29. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 206);
30. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
31. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 mengatur tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula meliputi Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut;
32. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029.
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
43. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021 - 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398) ;
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
45. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025;
46. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026;
47. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
48. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
49. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2025-2029;
50. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

51. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
52. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2042;
53. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045.
54. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 012 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
55. Peraturan Gubernur Nomor 020 s/d 056 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan;
56. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 057 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021 - 2026;
57. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 059 Tahun 2024 Tentang Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial;

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 memiliki hubungan yang terkait dengan dokumen-dokumen lain baik dengan dokumen antar tingkat pemerintahan, maupun dengan dokumen antar periode. Hubungan tersebut ada karena Dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 perlu memedomani dan memerhatikan dokumen-dokumen lain untuk memastikan terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan berkesinambungan. Adapun daftar dokumen dan sifat hubungannya dijelaskan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Daftar Dokumen yang memiliki hubungan dengan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

NO	DOKUMEN	HUBUNGAN
1	Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026	Penyusunan RKPD berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional
2	Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042	Penyusunan serta penetapan lokasi Program dan Kegiatan pada RKPD memperhatikan dan mempertimbangkan pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan pada RTRW.
3	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi	RKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJMD yang berfungsi menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.

	Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029	
4	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045	RKPD merupakan penjabaran teknis dari RPJPD yang berfungsi menjadi dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 1 (satu) tahunan.
5	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Penyusunan RKPD memperhatikan langkah dan target yang ditetapkan pada Dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
6	Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial Provinsi Kalimantan Selatan	Penyusunan RKPD memperhatikan pembagian klaster di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan rencana pengembangan wilayah dalam penentuan arah kebijakan.

1.4 Maksud Dan Tujuan

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP Tahun 2026 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan daerah, prioritas pembangunan, serta rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai jembatan antara dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dengan penganggaran tahunan (APBD), sehingga mampu menjamin konsistensi dan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan dokumen RKPD 2026 adalah untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, terpadu, dan responsif terhadap tantangan strategis daerah. Dengan mengusung tema **“Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional”**,

1. Memperkuat kapasitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan talenta digital serta kewirausahaan.
2. Mengembangkan sektor-sektor unggulan daerah seperti pertanian, perikanan, industri hilirisasi, dan pariwisata berbasis potensi lokal untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.
3. Mendukung terwujudnya Kalimantan Selatan sebagai pusat distribusi regional, melalui peningkatan konektivitas infrastruktur, sistem logistik, dan kemudahan rantai pasok antarwilayah.

Dengan landasan tersebut, RKPD 2026 menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

1.5 Sistematika Dokumen RKPD

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 terbagi menjadi 8 Bab dengan memedomani sistematika yang diatur pada Permendagri 86/2017.

Penyusunan Dokumen RKPD Tahun 2026 terdiri dari 8 bab yang sistematikanya dengan mengacu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negetri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (PERDA) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan inilah selanjutnya RKPD Tahun 2026 disusun dengan sistematika, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat penjelasan tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen perencanaan lainnya, maksud dan tujuan serta sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONBABBISI DAERAH

Memuat Gambaran Umum Kondisi Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan, dan Realissi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Permasalahan Pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah untuk pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun 2026 akan datang.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat tujuan dan sasaran pembangunan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta inovasi pembangunan Kalimantan Selatan.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Memuat indikator makro Kabupaten/Kota, Kebijakan Pembangunan Kewilayahan, dan Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota yang secara terpadu dan

komprehensif dengan melibatkan pemangku kepentingan yang ada di wilayah kabupaten/kota.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit prioritas dan sub prioritas RKPD Tahun 2026, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan beserta pendanaan yang diperlukan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berisi tentang penetapan Indikator Makro Daerah, Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Daerah pada akhir tahun perencanaan

BAB VIII PENUTUP



RKPD
2026
Provinsi
Kalimantan Selatan

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.3 Kondisi Umum Daerah

Gambaran umum Provinsi Kalimantan Selatan menjelaskan tentang aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun hal ini memberikan pemahaman awal tentang apa, bagaimana, dan sejauh mana keberhasilan pembangunan daerah yang telah dilakukan selama ini, dan/atau mengidentifikasi faktor-faktor atau berbagai aspek yang nantinya perlu ditingkatkan untuk optimalisasi pencapaian keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.2 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi pada bagian ini membahas lingkup geografi dari aspek fisik wilayah yang mencakup topografi, geologi, hidrologi, iklim, dan tutupan lahan. Aspek fisik wilayah tersebut mengkaji fenomena alam yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan dimana fenomena tersebut terjadi secara alamiah.

2.3.2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Provinsi Kalimantan Selatan dibentuk pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956. Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 kabupaten dan 2 kota dengan Ibu Kota Provinsi berada di Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru ditetapkan sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus pusat pemerintahan semenjak tahun 2015 sebagian besar aktivitasnya berpindah ke Kota Banjarbaru.

Provinsi Kalimantan Selatan merupakan daerah yang memiliki keanekaragaman hayati melimpah. Hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk asli maupun para perantau untuk mengembangkan wilayahnya sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah Pulau Kalimantan bagian selatan. Sebagai tindak lanjut dalam pengembangan wilayah administrasi, maka dibentuk Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 14 Agustus 1950 sebagai bagian administrasi resmi dari Pulau Kalimantan berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1956.

- 114°19' 13" hingga 116° 33' 28" Bujur Timur

- 1°21' 49" hingga 4°10'14" Lintang Selatan

Adapun wilayah Provinsi Kalimantan Selatan secara administratif seperti yang terlihat pada gambar 2.1 berbatasan dengan :

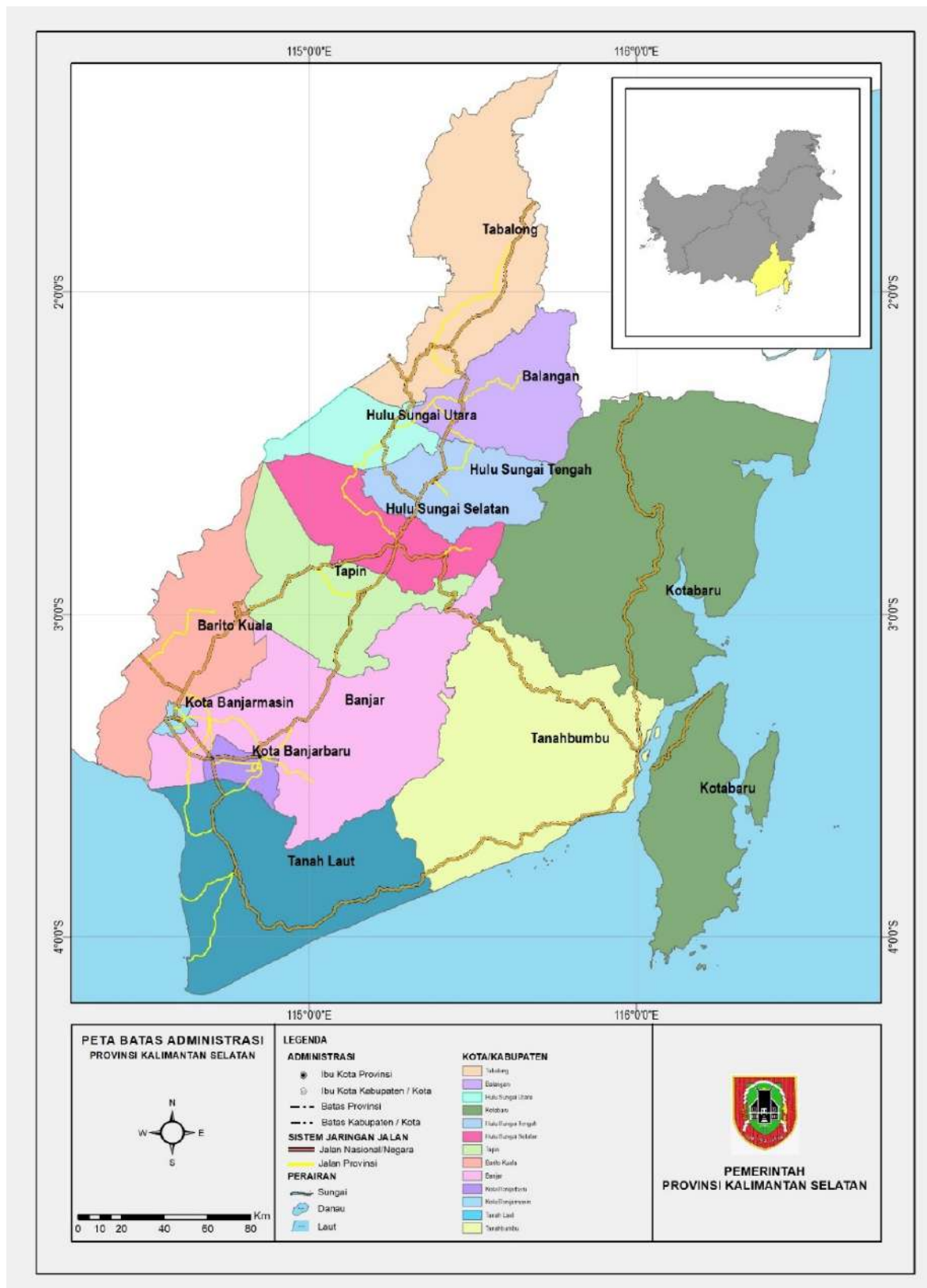
- Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah,
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makasar,
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa, dan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Timur.

Luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mencapai 38.744,23 km² yang terbagi habis ke dalam 13 kabupaten/kota yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 kota dengan pusat pemerintahan yang sekaligus merupakan ibu kota yakni Kota Banjarbaru. Adapun Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 156 kecamatan dan 2.015 desa dan 144 kelurahan dengan rincian sebagaimana pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, dan Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024

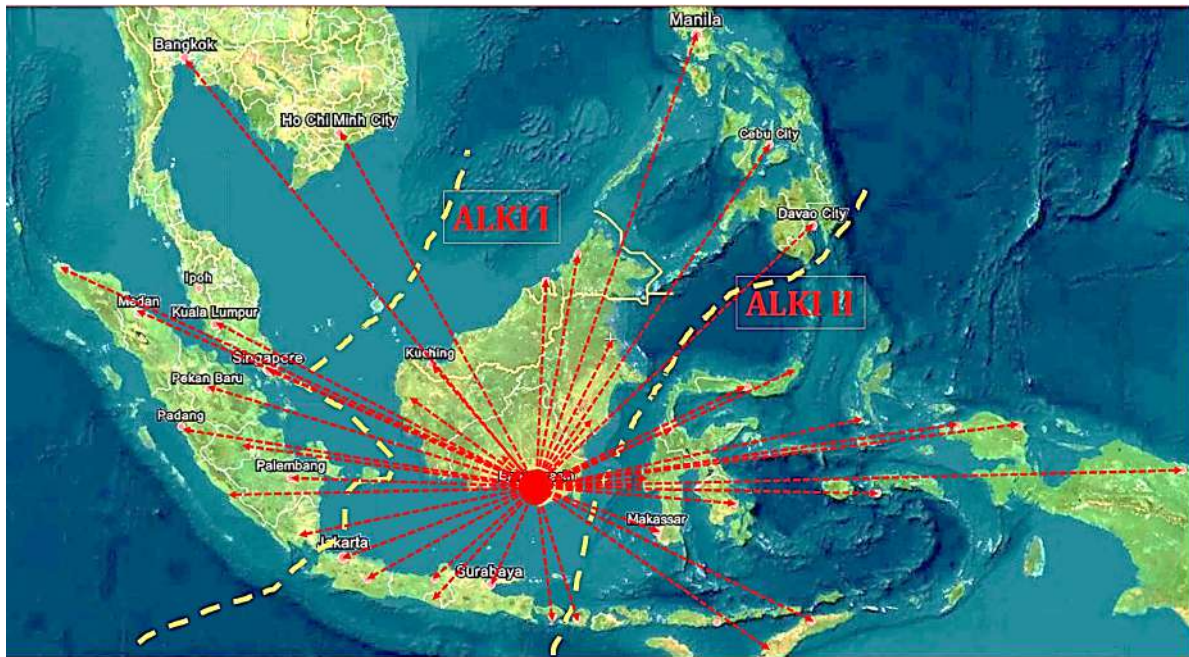
KABUPATEN/KOTA	LUAS (KM ²)	KECAMATAN	DESA	KELURAHAN
Tanah Laut	3.840,20	11	135	5
Kotabaru	9.480,17	22	202	4
Banjar	4.588,42	20	290	13
Barito Kuala	2.430,62	17	201	6
Tapin	2.156,98	12	135	9
Hulu Sungai Selatan	1.691,62	11	148	4
Hulu Sungai Tengah	1.468,77	11	169	8
Hulu Sungai Utara	940,19	10	219	5
Tabalong	3.473,07	12	131	10
Tanah Bumbu	4.888,23	12	149	5
Balangan	1.828,51	8	156	3
Banjarmasin	98,37	5	52	52
Banjarbaru	305,15	5	20	20
Kalimantan Selatan	37.190,30	156	2.015	144

Sumber: BPS Prov Kalsel Tahun 2025



Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2022



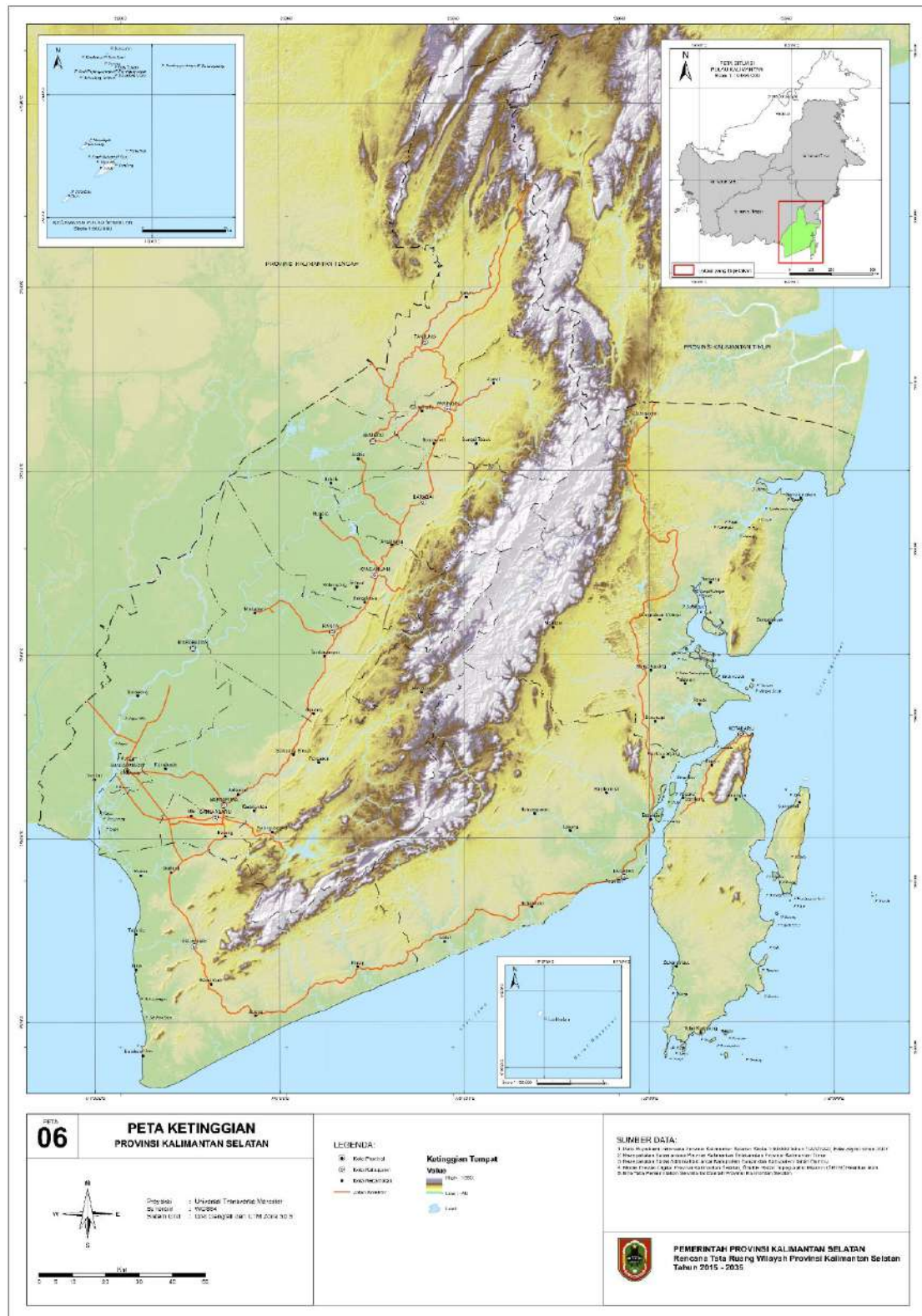
Gambar 2.2 Peta Wilayah Kalsel terhadap wilayah sekitar, ALKI 1 dan ALKI 2

Sumber : Google Earth, diolah Tahun 2024

Dibandingkan dengan wilayah provinsi lain di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai luas wilayah yang paling kecil, yakni hanya 6,98% dari luas pulau Kalimantan. Hal ini memudahkan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur sampai ke pelosok, sehingga memiliki peluang pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan.

2.3.2.2 Topografi

Kondisi topografi Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kemiringan lahan yang landai (2-8%) pada bagian barat dan timurnya. Sementara kemiringan lahan yang terjal umumnya berada pada bagian tengah, yaitu disekitar Pegunungan Meratus dimana kemiringan lahan bisa >40%. Sedangkan jika dilihat dari sisi ketinggian wilayah, 27,33% wilayah berada pada ketinggian 25-100 meter di atas permukaan laut dan 23,57% wilayah berada pada ketinggian >100 meter di atas permukaan laut. Lebih jelasnya mengenai Klasifikasi topografi ini dapat dilihat pada Gambar 2.3 dan Tabel 2.2.



Gambar 2.3 Peta Topografi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Tabel 2.2 Luas Wilayah Berdasarkan Kelas Lereng/Kemiringan dan Kelas Ketinggian dari Permukaan Laut Tahun 2023

KELERENGAN/KETINGGIAN	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
Kelas Lereng (%)	3.753.052	100,00
2	1.497.096	39,89
2-8	1.010.881	26,93
8-15	300.198	8,00
15-25	378.628	10,09
25-40	335.054	8,93
>40	231.195	6,16
Kelas Ketinggian (m)	3.753.052	100,00
0-7 m	888.171	23,66
> 7-25 m	954.322	25,43
> 25-100 m	1.025.655	27,33
> 100-500 m	675.254	17,99
> 500-1.000 m	165.905	4,42
> 1.000 m	43.745	1,16

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Wilayah Kalimantan Selatan banyak dialiri sungai seperti Sungai Barito, Sungai Riam Kanan, Sungai Riam Kiwa, Sungai Balangan, Sungai Batang Alai, Sungai Amandit, Sungai Tapin, Sungai Kintap, Sungai Batulicin, Sungai Sampanahan, dan sebagainya. Umumnya sungai-sungai tersebut berpangkal pada Pegunungan Meratus dan bermuara di Laut Jawa dan Selat Makasar.

Berdasarkan kondisi topografi yang relatif datar ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

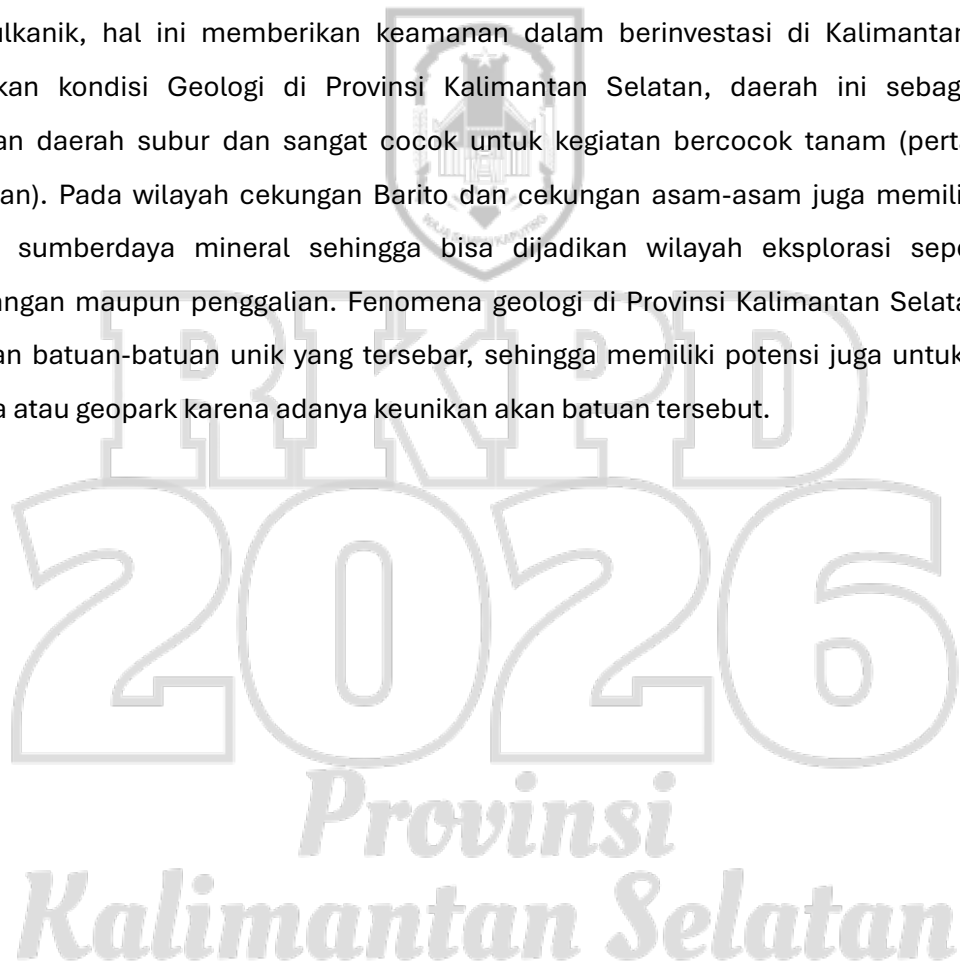
2.3.2.3 Geologi

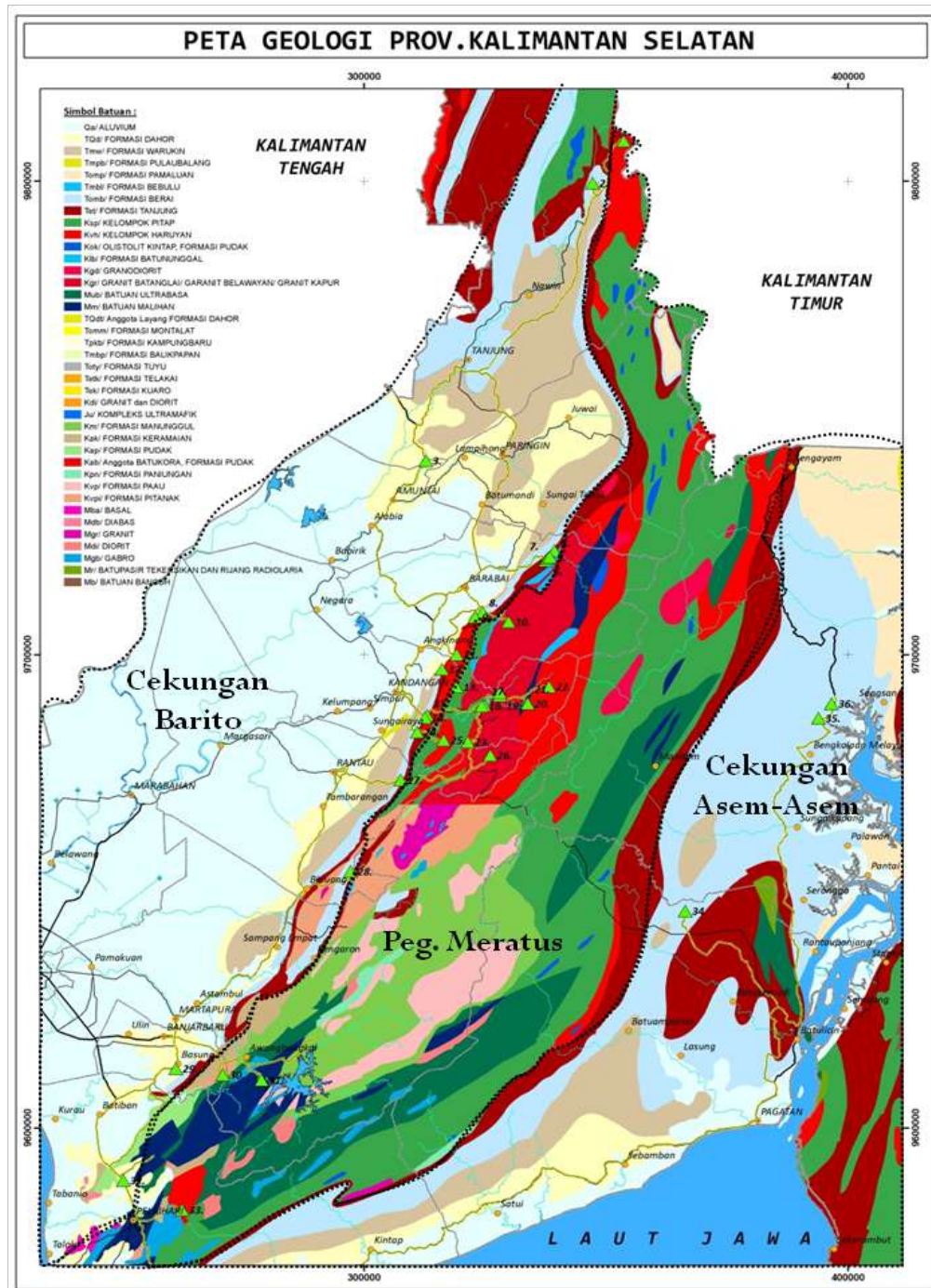
Bentang alam pegunungan di daratan Provinsi Kalimantan Selatan ini, didominasi oleh Pegunungan Meratus dengan puncak tertinggi dicapai oleh Gunung Batu Besar (1.892 mdpl), membentang dengan arah barat daya – timur laut mulai dari Pelaihari (Kabupaten Tanah Laut) di bagian barat daya hingga ke daerah Kabupaten Tabalong di bagian utara.

Selain itu, di Pulau Laut bentang alam pegunungan ini menempati Gunung Sebatung di Kotabaru yang mencapai ketinggian 676 mdpl. Sementara itu bentang alam dataran luas yang mendominasi Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di bagian barat (Dataran S. Barito) dan di bagian timur (Dataran Pagatan-Batulicin). Dua dataran ini dipisahkan oleh jalur Pegunungan Meratus karena sungai-sungai beserta anak-anak sungai yang mengalir di kedua dataran tersebut berhulu di jalur Pegunungan Meratus.

Berdasarkan Peta Geologi Bersistem Indonesia berskala 1 : 250.000, yang disusun dan diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Geologi, Bandung, diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Selatan terdiri atas 4 (empat) Lembar Peta Geologi, yaitu Peta Geologi Lembar Banjarmasin, Peta Geologi Lembar Amuntai, Peta Geologi Lembar Sampanahan, dan Peta Geologi Lembar Kotabaru, dengan daerah pemetaan disusun oleh berbagai jenis batuan berumur muda (Kuarter) hingga berumur tua (Yura).

Secara geologi, Provinsi Kalimantan Selatan tidak dilalui jalur lempeng tektonik baik luar maupun dalam sehingga relatif aman dari bencana gempa bumi tektonik dan bencana gunung berapi vulkanik, hal ini memberikan keamanan dalam berinvestasi di Kalimantan Selatan. Berdasarkan kondisi Geologi di Provinsi Kalimantan Selatan, daerah ini sebagian besar merupakan daerah subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan). Pada wilayah cekungan Barito dan cekungan asam-asam juga memiliki potensi kekayaan sumberdaya mineral sehingga bisa dijadikan wilayah eksplorasi seperti untuk pertambangan maupun penggalian. Fenomena geologi di Provinsi Kalimantan Selatan ini juga melahirkan batuan-batuan unik yang tersebar, sehingga memiliki potensi juga untuk dijadikan ekowisata atau geopark karena adanya keunikan akan batuan tersebut.





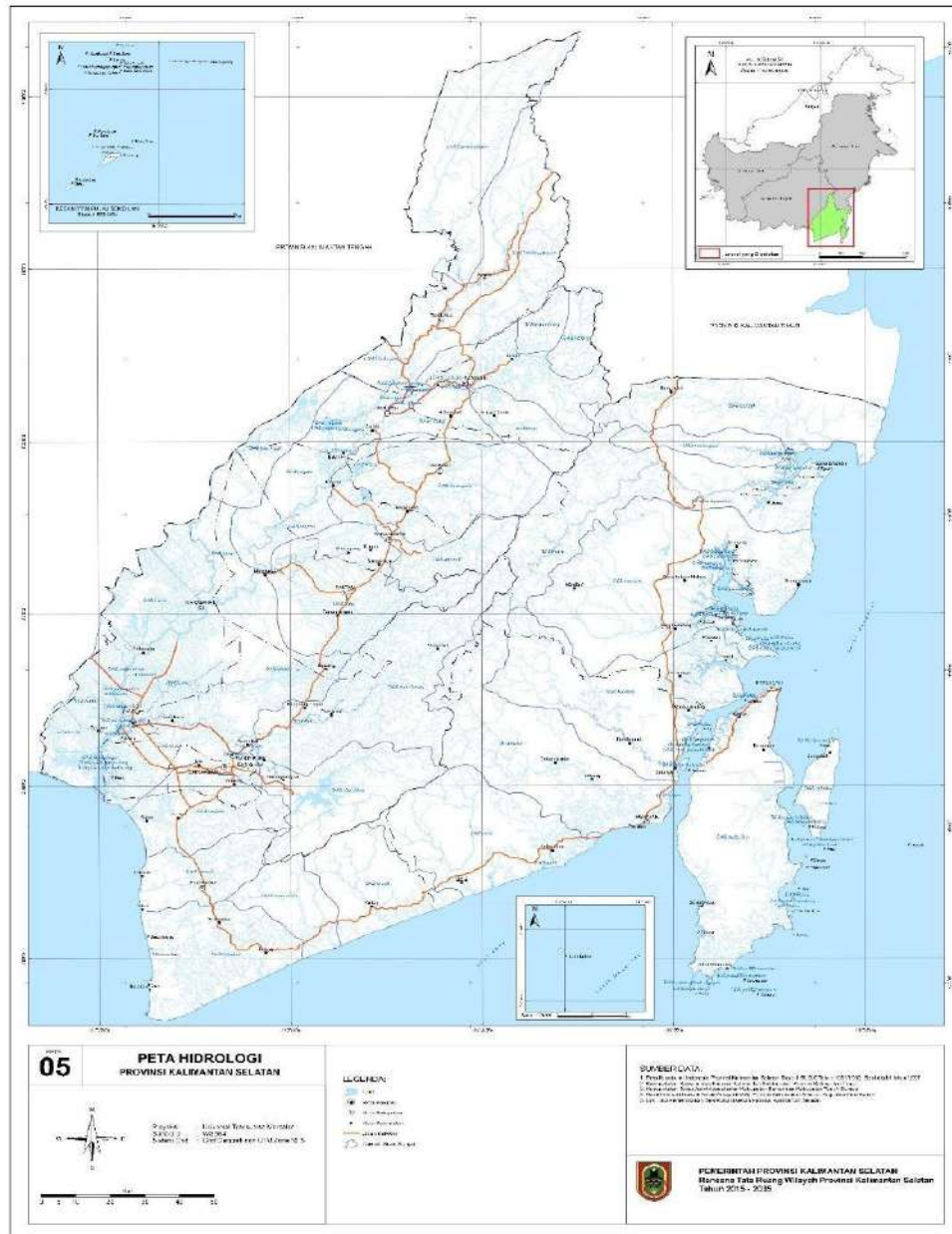
Gambar 2.4 Peta Geologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Geopark Meratus (2020)

2.3.2.4 Hidrologi

Kalimantan selatan mempunyai 3 (Tiga) Wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai (WS) Barito Kewenangan Balai Wilayah Sungai, Wilayah sungai (WS) Cengail Batulicin Kewenangan Provinsi, Wilayah Sungai Pulau Laut Kewenangan Kabupten Kotabaru. Berdasarkan kondisi Hidrologi ini Kalimantan Selatan memiliki pontesi pengembangan sumber daya air yang potensial karena

dipegaruhi dari curah hujan, topografi pegunungan meratus dan keberadaan Sungai yang membagi masing-masing wilayah kabupaten/kota. Lebih jelasnya mengenai Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan ini dapat dilihat pada Gambar 2.5.



Gambar 2.5 Peta Hidrologi Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan, 2018

Adapun Wilayah Sungai (WS) Barito yang menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai Kalimantan III secara deleniasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai secara deleniasi mempunyai 3 (tiga) Daerah Aliran Sungai (DAS) mencakup 5 Kabupaten/kota yaitu Kota

Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut. Untuk lebih detailnya terlihat pada Tabel 2.3 dan Gambar 2.6 dibawah ini.

Tabel 2.3 Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai Barito

NO.	NAMA DAS	LUAS (KM ²)
1	Barito	60425,46
2	Maluka	924,57
3	Tabanio	873,87

Sumber: Permen PUPR No. Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai



Gambar 2.6 Wilayah Sungai (WS) Barito dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

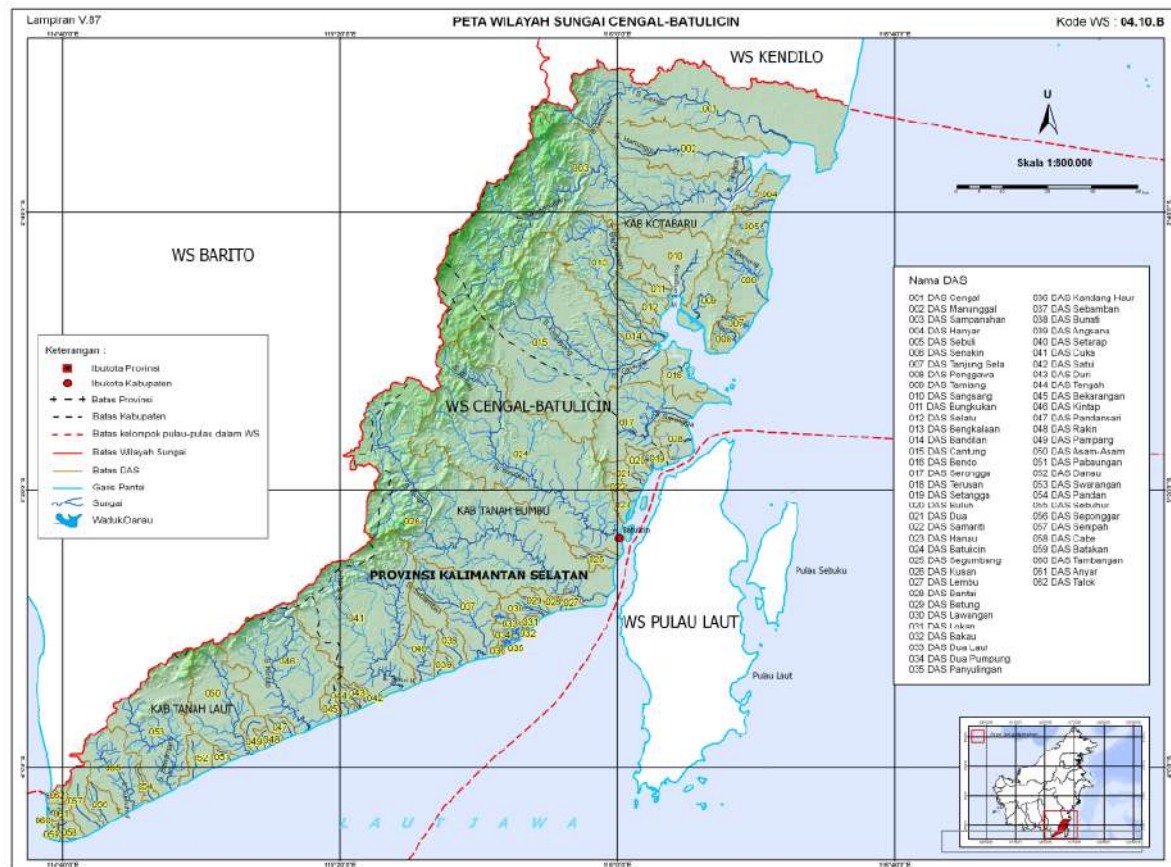
Sumber: Permen PUPR No. Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai

Untuk Wilayah Sungai (WS) Cengal Batulicin yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan secara deleniasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai mempunyai 62 (Enam Puluh Dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) mencakup 3 (Tiga) Kabupaten yaitu Kabuapten Tanah Laut, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru (Bagian Pulau Kalimantan) untuk lebih detailnya terlihat pada Tabel 2.4 dan Gambar 2.7.

Tabel 2.4 Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai Cengal Batulicin

NO	NAMA DAS	LUAS (KM ²)	NO	NAMA DAS	LUAS (KM ²)
1	Angsana	27,26	32	Lokan	9,82
2	Anyar	20,16	33	Manunggal	462,04
3	Asam Asam	512,83	34	Pabaungan	25,32
4	Bakau	5,21	35	Pampan	42,20
5	Bandilan	42,40	36	Pandan	24,31
6	Bantal	26,10	37	Pandansari	32,05
7	Batakan	14,59	38	Panyulangan	3,41
8	Batulicin	1.381,42	39	Penggawa	44,75
9	Bekarangan	29,44	40	Rakin	22,41
10	Bendo	103,88	41	Samiriti	38,76
11	Bengkalaan	418,11	42	Sampanahan	1.791,97
12	Betung	29,32	43	Sangsang	261,51
13	Buluh	63,24	44	Satui	17,59
14	Bunati	120,00	45	Sebuhur	224,39
15	Bungkukan	46,35	46	Sebuli	70,60
16	Cabe	31,83	47	Segumbang	46,32
17	Cantung	1.465,45	48	Selatu	97,44
18	Cengal	1.177,74	49	Sembamban	337,96
19	Cuka	937,74	50	Senakin	231,68
20	Danau	67,29	51	Senipah	78,34
21	Dua	40,41	52	Seponggar	65,07
22	Dua Laut	34,46	53	Serongga	345,25
23	Dua Pumpung	24,65	54	Setangga	33,02
24	Duri	25,40	55	Setarap	129,07
25	Hanau	33,10	56	Swarangan	375,32
26	Hanyar	63,04	57	Talok	22,03
27	Kandanghaur	5,59	58	Tambangan	7,82
28	Kintap	670,16	59	Tamiang	166,12
29	Kusan	1.735,52	60	Tanjungsele	34,03
30	Lawangan	49,34	61	Tengah	37,26
31	Lembu	17,75	62	Terusan	77,82

Sumber: Permen PUPR No. Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai



Gambar 2.7 Wilayah Sungai (WS) Cengal-Batulicin dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sumber: Permen PUPR No. Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai

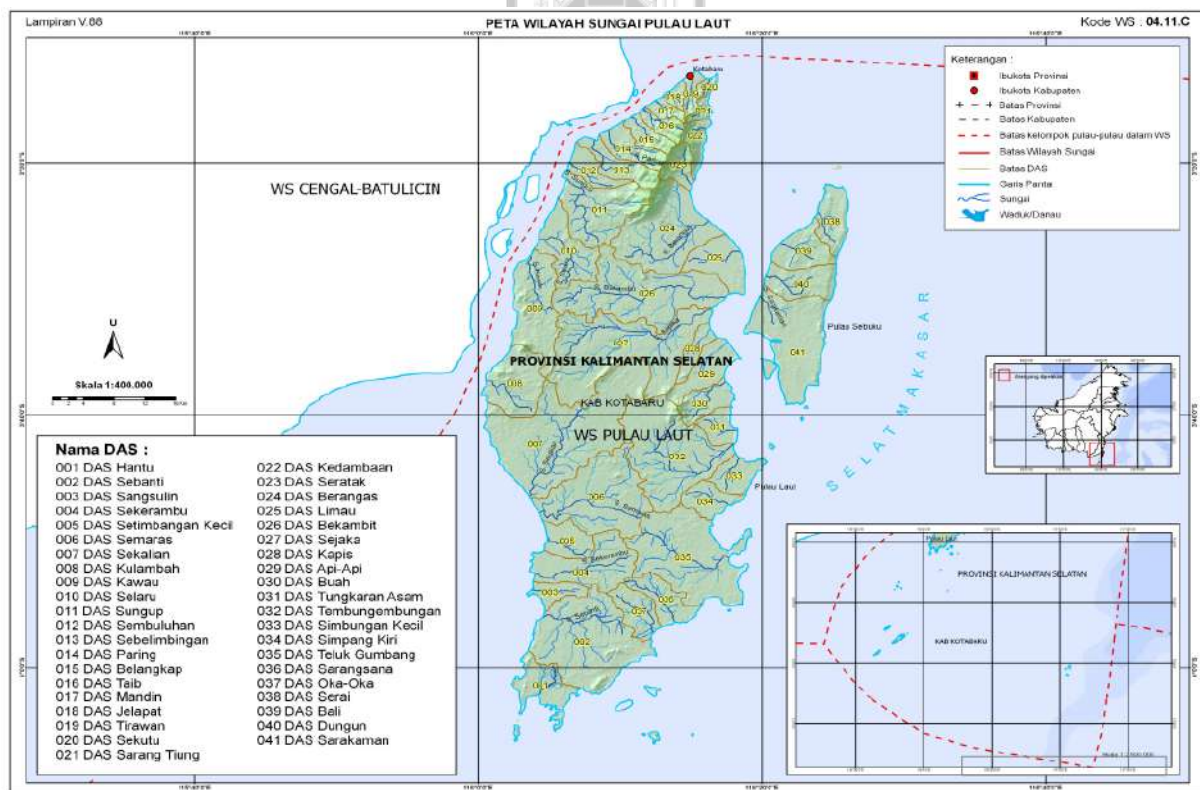
Untuk Wilayah Sungai (WS) Pulau Laut yang menjadi kewenangan Kabupaten Kotabaru secara deleniasi berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai mempunyai 41 (Empat Puluh satu) Daerah Aliran Sungai (DAS) mencakup 1 (Satu) Kabupaten yaitu Kabupaten Kotabaru (Bagian Pulau Laut) untuk lebih detailnya terlihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.8:

Tabel 2.5 Daerah Aliran Sungai (DAS) pada WS Pulau Laut

NO	NAMA DAS	NO	NAMA DAS
1	DAS Hantu	21	DAS Kedambaan
2	DAS Sebanti	22	DAS Seratak
3	DAS Sangsulin	23	DAS Berangas
4	DAS Sekerambu	24	DAS Limau
5	DAS Setimbangan Kecil	25	DAS Bekambit
6	DAS Semaras	26	DAS Sejaka
7	DAS Sekalian	27	DAS Kapis
8	DAS Kulambah	28	DAS Api-Api
9	DAS Kawau	29	DAS Buah
10	DAS Selaru	30	DAS Tungkaran Asam

NO	NAMA DAS	NO	NAMA DAS
11	DAS Sungup	31	DAS Tembungembungan
12	DAS Sembuluhan	32	DAS Simbungan Kecil
13	DAS Sebelimbingan	33	DAS Simpang Kiri
14	DAS Paring	34	DAS Teluk Gumbang
15	DAS Belangkap	35	DAS Sarangsana
16	DAS Taba	36	DAS Oka-Oka
17	DAS Mandin	37	DAS Serai
18	DAS Jelapat	38	DAS Bali
19	DAS Tirawan	39	DAS Dungun
20	DAS Sekutu	40	DAS Sarakaman

Sumber: Permen PUPR No. Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai



Gambar 2.8 Wilayah Sungai (WS) Pulau Laut dan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Sumber: Permen PUPR No. Nomor 04/PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan penetapan Wilayah Sungai

Adapun luasan Daerah Aliran Sungai (DAS) berdasarkan data yang bersumber dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Selatan pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan lingkup Pola Wilayah Sungai Barito, Pola Wilayah Sungai Cengal-Batulicin dan Pola Wilayah Sungai Pulau Laut untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 2.6.

Tabel 2.6 Pembagian Luas DAS Kabupaten/Kota di Prov. Kalsel

KABUPATEN/KOTA	LUAS (HA)
Tanah Laut	38.050.887
Kotabaru	92.738.847
Banjar	45.778.543
Barito Kuala	22.640.090
Tapin	21.662.117
Hulu Sungai Selatan	17.225.787
Hulu Sungai Tengah	14.169.582
Hulu Sungai Utara	8.622.199
Tabalong	29.515.527
Tanah Bumbu	50.147.199
Balangan	18.519.277
Banjarmasin	995.388
Banjarbaru	3.292.425
Kalimantan Selatan	363.357.868

Sumber: BP DAS Barito (2022)

2.3.2.5 Meteorologi dan Klimatologi

Berdasarkan tabel 2.7 pada Stasiun Meteorologi Syamsuddin Noor Banjarbaru, untuk kondisi iklim di Kalimantan Selatan tahun 2023 hingga 2024, Kalimantan Selatan mengalami perubahan iklim yang cukup mencolok. Peningkatan suhu rata-rata dari 27,49°C pada tahun 2023 menjadi 27,53°C pada tahun 2024, disertai dengan kenaikan kelembaban dari 81,11% menjadi 84,09%. Jumlah curah hujan meningkat signifikan dari 2.170 mm menjadi 2.790,8 mm, dengan jumlah hari hujan yang juga melonjak dari 181 hari menjadi 297 hari. Sementara itu, kecepatan angin rata-rata menurun dari 3,77 knot menjadi 1,97 knot, dan tekanan udara menunjukkan sedikit peningkatan dari 1.007,58 mb menjadi 1.007,94 mb. Rata-rata penyinaran matahari harian sedikit berkurang dari 5,6 jam menjadi 5,12 jam, menunjukkan bahwa tahun 2024 cenderung lebih basah dan lembap dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.7 Kondisi Iklim di Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2024

VARIABEL IKLIM/CUACA/TAHUN	MINIMUM	MAKSIMUM	RATA-RATA
Temperatur (°C)			
Tahun 2023	19,40	37,60	27,49
Tahun 2024	21,00	36,20	27,53
Kelembaban (%)			
Tahun 2023	28,00	100	81,11
Tahun 2024	44,00	100	84,09
Kecepatan Angin (knot)			
Tahun 2023	-	33,00	3,77
Tahun 2024	-	17,00	1,97

VARIABEL IKLIM/CUACA/TAHUN	MINIMUM	MAKSIMUM	RATA-RATA
Tekanan Udara (mb)			
Tahun 2023	1.001,50	1.013,70	1.007,58
Tahun 2024	1.001,40	1.013,20	1.007,94
Jumlah Curah Hujan (mm/thn)			
Tahun 2023			2.170,00
Tahun 2024			2.790,80
Jumlah Hari Hujan (hari)			
Tahun 2023			181
Tahun 2024			297
Rata-rata harian penyinaran matahari (jam)			
Tahun 2023			5,6
Tahun 2024			5,12

Sumber: Kalsel Dalam Angka, 2025

Secara umum Provinsi Kalimantan Selatan di dominasi tipe iklim C2 (Schmidt & Ferguson) yang meliputi wilayah hampir seluruh Kabupaten/kota kecuali Kabupaten Tabalong, sebagian Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru. Hal ini mengindikasikan bahwa di Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh kelas tipe iklim yang agak basah, dipengaruhi oleh adanya vegetasi hutan rimba dan juga sedikit pengaruh dari angin laut. Menurut klasifikasi iklim oleh oldeman, maka tipe iklim C lebih cocok untuk tanaman padi sekali dan tanaman palawija dua kali setahun.

2.3.2.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari 12 jenis. Dengan jenis penggunaan lahan terluas adalah hutan seluas 1.109.500,41 ha (29.62 %), dan yang terkecil sungai/danau/waduk/telaga seluas 38.809,01 ha (1,04%). Persentase penggunaan lahan yang produktif pada tahun 2020 sekitar 60,26 % dari seluruh luas lahan, meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 dengan luas lahan produktif sebesar 50,77%. Hal ini menandakan bahwa sebagian besar lahan di Kalimantan Selatan sudah termanfaatkan, dengan demikian dibutuhkan optimalisasi pemanfaatan lahan untuk mendukung pengembangan wilayah. Luas wilayah menurut jenis penggunaan lahan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana pada Tabel 2.8.

Tabel 2.8 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Provinsi Kalimantan Selatan

PENGUNAAN LAHAN	TOPONIM	LUAS (HA)	PERCENTAGE
Badan Air	A	31.203,81	0,8%
Belukar	B	373.931,59	10,1%
Bandara/Pelabuhan	Bdr	700,68	0,0%
Belukar Rawa	Br	209.897,59	5,7%
Hutan Mangrove Primer	Hmp	10.721,33	0,3%
Hutan Mangrove Sekunder	Hms	49.095,14	1,3%
Hutan Lahan Kering Primer	Hp	48.666,23	1,3%
Hutan Rawa Sekunder	Hrs	2.979,09	0,1%

Hutan Lahan Kering Sekunder	Hs	685.295,78	18,5%
Hutan Tanaman	Ht	128.056,76	3,4%
Pertambangan	Pb	103.825,92	2,8%
Pertanian Lahan Kering Campur	Pc	557.113,17	15,0%
Perkebunan	Pk	830.367,06	22,4%
Permukiman	Pm	73.988,85	2,0%
Pertanian Lahan Kering	Pt	121.070,31	3,3%
Rawa	Rw	38.060,00	1,0%
Sawah	Sw	378.326,41	10,2%
Tanah Terbuka	T	29.274,88	0,8%
Tambak	Tm	34.474,55	0,9%
Transmigrasi	Tr	5.338,37	0,1%
TOTAL		3.712.387,52	100%

Sumber: KLHK Tahun 2022



Tabel 2.9 Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaan Lahan Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

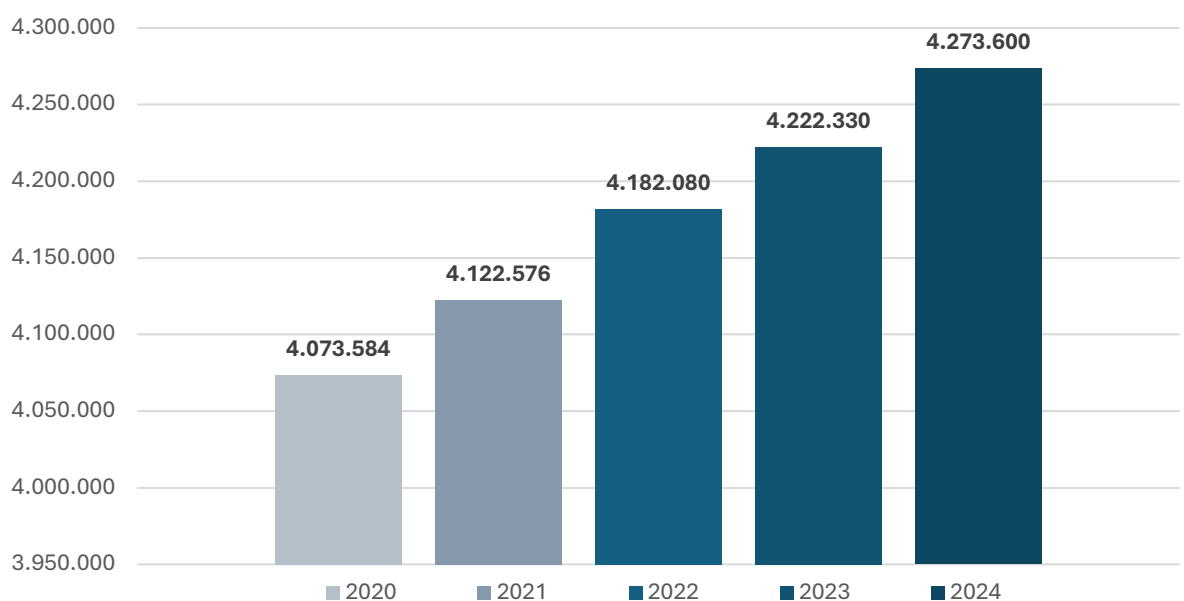
Penggunaan Lahan/Kabupaten/Kota	BALANGAN	BANJAR	BANJARBARU	BANJARMASIN	BARITO KUALA	HULU SUNGAI SELATAN	HULU SUNGAI TENGAH	HULU SUNGAI UTARA	KOTABARU	TABALONG	TANAH BUMBU	TANAH LAUT	TAPIN	(blank)	Grand Total
Bandara/Pelabuhan			106,50						394,50	57,48	74,20	68,18		6,39	707,25
Hutan Lahan Kering Primer	9.766,86	5.277,62				3.275,97	12.259,16		13.504,31	652,13		3.937,63			48.673,68
Hutan Lahan Kering Sekunder	33.931,41	84.070,71				1.493,71	19.968,98		255.001,12	132.668,36	128.223,47	28.494,77	3.370,97	183,82	687.407,33
Hutan Mangrove Primer					84,00				10.327,69		168,46	147,11		117,80	10.845,05
Hutan Mangrove Sekunder					1.170,12				42.011,30		3.535,89	2.390,21		422,83	49.530,36
Hutan Rawa Sekunder					213,62			192,42	186,71	2.532,05					3.124,80
Hutan Tanaman	1.980,23	40.539,72				288,84			25.505,38	6.554,64	29.297,52	16.710,04	6.862,16	54,85	127.793,37
Lahan Terbuka	930,54	6.116,24	312,87		102,15	1.703,52	212,82	203,33	7.211,70	1.974,68	4.952,40	6.532,43	523,52	27,99	30.804,18
Perkebunan	20.081,35	78.512,48	1.801,01		67.556,09	20.812,89	585,42	5.469,27	240.843,34	56.895,08	139.402,95	118.481,78	75.656,81	322,94	826.421,40
Permukiman	2.392,38	7.252,67	10.314,60	5.180,71	3.551,84	1.853,67	4.306,80	2.907,51	6.812,11	5.620,08	10.540,21	9.286,25	3.807,42	66,19	73.892,44
Permukiman Transmigrasi					923,05				2.167,05	372,22	1.524,45	352,39			5.339,16
Pertambangan	10.300,40	7.954,42	1.886,91			1.973,06	189,87		16.740,40	9.386,72	27.582,15	17.988,50	7.461,44	3,22	101.467,09
Pertanian Lahan Kering	3.456,79	27.035,91	2.578,70	484,24	13.035,85	4.111,19	6.227,97	655,09	29.073,72	6.511,69	12.762,25	9.061,80	6.413,18	11,25	121.419,63
Pertanian Lahan Kering Campur	61.985,69	78.009,20	2.772,44	102,43	5.936,09	37.371,62	52.078,80	2.817,68	101.942,84	51.362,33	65.161,25	71.277,08	26.837,27	312,93	557.967,67
Rawa						6.553,67	4.360,42	25.176,88	155,71	403,96	1.054,97	343,15		629,15	38.677,91
Sawah	9.371,72	64.651,59	7.622,41	3.035,62	113.178,69	42.629,76	31.798,44	14.073,40	4.103,67	11.028,19	6.551,12	34.735,79	35.064,25	151,26	377.995,91
Semak Belukar	25.992,56	38.704,44	513,14			14.993,58	15.702,62		137.153,65	56.222,63	38.200,84	39.195,72	8.698,84	137,51	375.515,52
Semak Belukar Rawa	2.579,46	12.118,53	2.606,69	360,04	23.251,99	31.844,33	9.592,64	38.468,41	14.709,05	4.431,75	9.896,41	20.563,34	39.605,23	2.438,34	212.466,20
Tambak		892,81			4.118,25				18.257,82	90,13	7.527,19	3.586,55		107,38	34.580,12
Tubuh Air	81,95	7.614,23		674,16	9.013,86	816,61	69,88	723,23	7.152,11	542,77	1.971,50	761,60	1.292,81	2.341,47	33.056,19
(blank)	-	88,60			536,77			61,86	2.312,70		168,53	263,64			3.432,11
Grand Total	182.851,32	458.839,18	30.515,26	9.837,21	242.672,36	169.722,43	157.353,82	90.749,08	935.566,86	347.306,89	488.595,76	384.177,98	215.593,89	7.335,32	3.721.117,37

Sumber: PUPR Provinsi Kalsel Bidang tata ruang tahun 2023-2042

Provinsi
Kalimantan Selatan

2.3.2.7 Jumlah Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Selama periode lima tahun terakhir, pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan mengalami tren peningkatan populasi setiap tahunnya. Berdasarkan data BPS, hasil sensus jumlah penduduk pada tahun 2020, tercatat sebanyak 4.073.584 jiwa. Angka ini meningkat menjadi 4.122.576 jiwa pada tahun 2021. Kenaikan terus berlanjut di tahun 2022 dengan jumlah penduduk sebesar 4.182.080 jiwa, menunjukkan adanya pertumbuhan yang konsisten dari tahun sebelumnya. Tren positif ini dilanjutkan pada tahun 2023 dengan jumlah penduduk mencapai 4.222.330 jiwa, dan puncaknya terjadi pada tahun 2024 dengan total 4.273.600 jiwa, dapat dilihat pada gambar 2.9.



Gambar 2.9 Jumlah Pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Jika dihitung secara keseluruhan, terjadi peningkatan penduduk sebanyak 200.016 jiwa dalam lima tahun terakhir, atau rata-rata pertumbuhan sekitar 1% per tahun. Pertumbuhan yang relatif stabil ini mencerminkan dinamika demografi yang sehat, namun juga mengindikasikan perlunya perencanaan pembangunan yang terukur, khususnya dalam penyediaan infrastruktur, layanan publik, serta penyerapan tenaga kerja.

Dengan proyeksi tren yang terus meningkat, pemerintah daerah diharapkan dapat merespons dengan kebijakan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan, serta menjaga kualitas hidup masyarakat di tengah peningkatan jumlah penduduk.

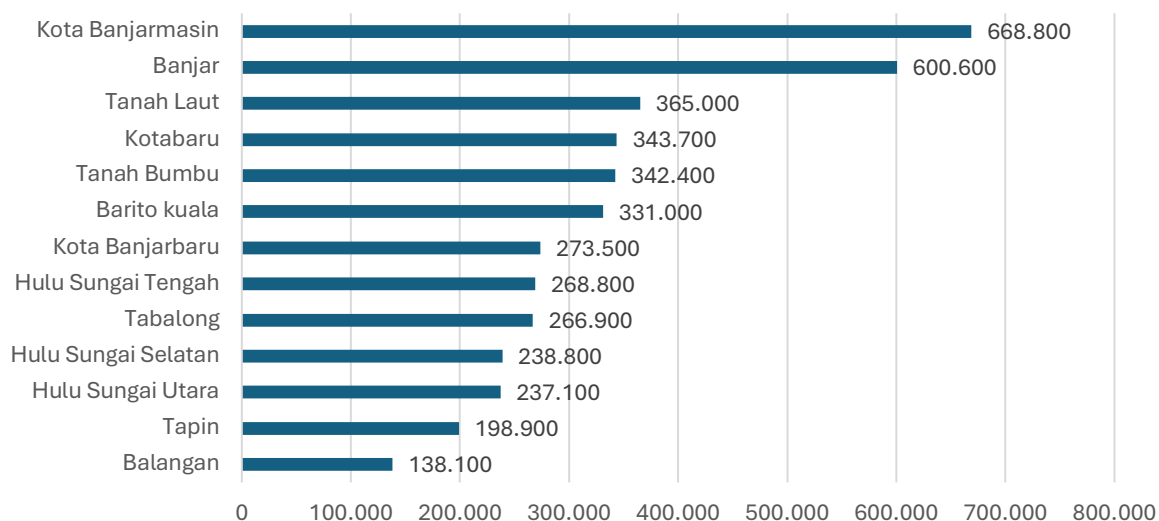
Adapun rincian persebaran jumlah penduduk menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jumlah Penduduk di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PENDUDUK				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	348.966	354.340	361.044	360.920	365.000
Kotabaru	325.622	329.483	334.158	339.060	343.700
Banjar	565.635	572.109	579.910	591.510	600.600
Barito kuala	313.021	316.963	321.769	600.640	331.000
Tapin	189.475	191.801	194.628	196.470	198.900
Hulu Sungai Selatan	228.006	229.960	232.212	235.990	238.800
Hulu Sungai Tengah	258.721	260.754	263.061	266.190	268.800
Hulu Sungai Utara	226.727	228.831	231.290	234.520	237.100
Tabalong	253.305	256.903	261.353	263.400	266.900
Tanah Bumbu	322.646	328.146	335.079	337.340	342.400
Balangan	130.355	132.213	134.512	136.110	138.100
Kota Banjarmasin	657.663	662.320	667.489	666.440	668.800
Kota Banjarbaru	253.442	258.753	265.575	268.100	273.500
KALIMANTAN SELATAN	4.073.584	4.122.576	4.182.080	4.222.330	4.273.600

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Secara spesifik, Kabupaten Banjar menjadi daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di tingkat kabupaten, yaitu 600.600 jiwa pada tahun 2024, diikuti oleh Tanah Laut (365.000 jiwa) dan Kotabaru (343.700 jiwa). Sementara itu, Kota Banjarmasin tetap menjadi kota dengan jumlah penduduk tertinggi, mencapai 668.800 jiwa pada tahun 2024, disusul oleh Kota Banjarbaru dengan 273.500 jiwa. Sebagaimana terlihat pada Gambar 2.10



Gambar 2.10 Grafik Jumlah Penduduk Kalsel di Kab dan Kota Tahun 2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah penduduk 4.273.600 jiwa dengan kepadatan rata-rata 115 jiwa/km² di tahun 2024. Kota Banjarmasin menjadi daerah terpadat dengan 6.798 jiwa/km², diikuti oleh Kota Banjarbaru dengan 896 jiwa/km². Sementara itu, Kabupaten Kotabaru memiliki kepadatan terendah, yaitu 36 jiwa/km², karena luas wilayahnya yang paling besar (9.480,17 km²). Rincian jumlah penduduk menurut wilayah, jenis kelamin, dan kepadatan penduduk di Kalimantan Selatan seperti terlihat pada Tabel 2.11.

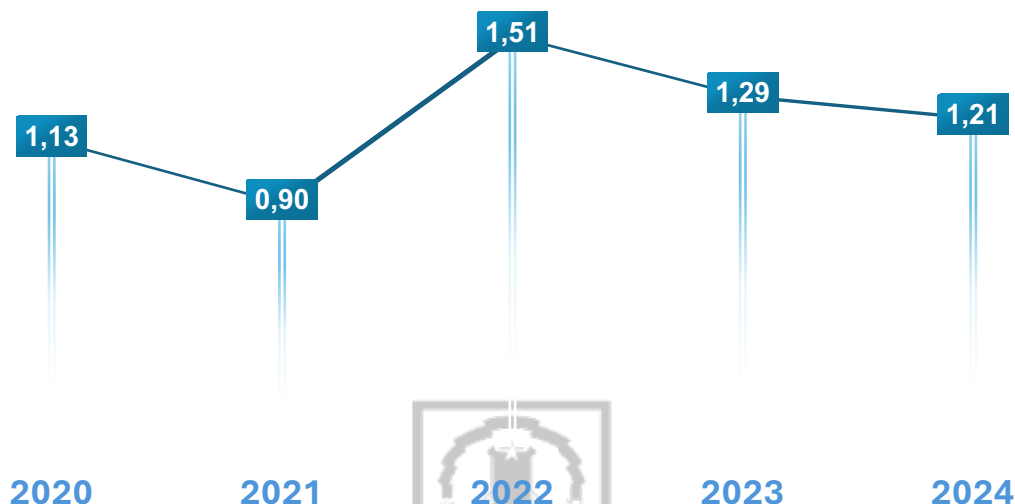
Tabel 2.11 Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kepadatan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KABUPATEN/ KOTA	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	SEX RATIO	LUAS WILAYAH (KM2)	KEPADATAN PENDUDUK(JIWA/KM2)
Tanah Laut	365.000	104,63	3.840,20	95
Kotabaru	343.700	105,94	9.480,17	36
Banjar	600.600	101,87	4.588,42	131
Barito Kuala	331.000	102,66	2.430,62	136
Tapin	198.900	102,12	2.156,98	92
Hulu Sungai Selatan	238.800	101,03	1.691,62	141
Hulu Sungai Tengah	268.800	101,3	1.468,77	183
Hulu Sungai Utara	237.100	100,19	940,19	252
Tabalong	266.900	102,77	3.473,07	77
Tanah Bumbu	342.400	104,69	4.888,23	70
Balangan	138.100	102,27	1.828,51	76
Kota Banjarmasin	668.800	100,14	98,37	6798
Kota Banjarbaru	273.500	100,83	305,15	896
KALIMANTAN SELATAN	4.273.600	102,27	37.190,30	115

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2025)

2.3.2.8 Pertumbuhan Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Pertumbuhan penduduk Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi dalam lima tahun terakhir seperti pada Gambar 2.11. Pada tahun 2020, laju pertumbuhan penduduk adalah 1.13%, dan pada tahun 2024, angka ini sedikit meningkat menjadi 1.21%. Perubahan ini mengindikasikan bahwa selama periode lima tahun, terdapat percepatan dalam laju pertumbuhan penduduk di Kalimantan Selatan, walaupun terjadi fluktuasi pada tahun-tahun antaranya. Jika dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun jumlah penduduk di tahun 2024 mengalami peningkatan sebesar 1.21 persen, namun pertumbuhannya cukup melambat dibanding tahun 2023 yang tumbuh sebesar 1.29 persen.



Gambar 2.11 Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: BPS Kalimantan Selatan 2024

Pada tahun 2024, laju pertumbuhan penduduk di berbagai kabupaten/kota di Kalimantan Selatan menunjukkan variasi seperti yang dapat dilihat pada Tabel 2.12, tetapi sebagian besar mengalami perlambatan dibandingkan puncak pertumbuhan yang dicatat pada tahun-tahun sebelumnya. Kota Banjarbaru mencatat laju pertumbuhan tertinggi di tahun 2024 dengan 2.00 persen, meskipun ini melambat dari puncaknya di tahun 2022 yang sebesar 2.71 persen. Sebaliknya, Kota Banjarmasin memiliki pertumbuhan terendah pada tahun yang sama dengan hanya 0.35 persen dimana kondisi tersebut juga melambat dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.12 Laju pertumbuhan Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2020-2024

KABUPATEN /KOTA	JUMLAH PENDUDUK (%)					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	1,38	1,48	1,54	1,89	2,34	1,12
Kotabaru	1,63	-4,85	1,19	1,42	2,80	1,36
Banjar	1,39	-3,81	1,14	1,36	3,15	1,54
Barito kuala	1,15	-0,18	1,26	1,52	2,94	1,44
Tapin	1,21	-0,99	1,23	1,47	2,52	1,22
Hulu Sungai Selatan	1,06	-4,08	0,86	0,98	2,42	1,19
Hulu Sungai Tengah	1,13	-5,03	0,79	0,88	1,99	0,96
Hulu Sungai Utara	1,27	-4,57	0,93	1,07	2,31	1,11
Tabalong	1,40	-0,40	1,42	1,73	2,73	1,32
Tanah Bumbu	2,42	-10,42	1,70	2,11	3,09	1,49
Balangan	1,48	-0,82	1,43	1,74	3,02	1,47
Kota Banjarmasin	1,10	-7,19	0,71	0,78	0,81	0,35
Kota Banjarbaru	2,79	-3,53	2,10	2,64	4,01	2
KALIMANTAN SELATAN	1,47	-4,02	1,20	1,44	1,24	1,21

Sumber: BPS Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: Garis kemiskinan merupakan kondisi data Maret

2.3.2.9 Penduduk Menurut Lapangan Pekerjaan

Persentase penduduk bekerja pada sektor pertanian mengalami penurunan yang signifikan di mana proporsi pekerja di sektor ini menurun dari 32,41 persen pada Agustus 2022 menjadi 29,20 persen pada Agustus 2024. Tren ini menunjukkan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor jasa, yang dalam periode yang sama menunjukkan pertumbuhan yang stabil. Sektor ini mengalami peningkatan sekitar 3,66 persen poin selama periode Agustus 2022 sampai dengan Agustus 2024. Dinamika ini mengindikasikan bahwa sektor jasa semakin menjadi kekuatan dominan dalam perekonomian dan pasar tenaga kerja, dan mencerminkan pergeseran struktur perekonomian menuju perekonomian berbasis jasa dan menjauh dari sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan manufaktur. Pergeseran tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti urbanisasi, kemajuan teknologi, dan teknologi pertanian yang semakin meningkat.

Proporsi penduduk bekerja pada sektor pertanian relatif menurun seiring berjalannya waktu, seperti yang terlihat pada tabel 2.13 Meskipun terjadi penurunan, sektor pertanian tetap memegang peran penting dalam pasar tenaga kerja. Sebaliknya, sektor manufaktur menunjukkan tren yang lebih bervariasi. Sektor manufaktur secara keseluruhan mengalami penurunan, terutama di subsektor industri yang turun dari 8,14 persen pada Agustus 2022 menjadi 7,66 persen pada Agustus 2024.

Tabel 2.13 Persentase Penduduk Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Pekerjaan, Agustus 2022 – Agustus 2024

LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA	AGUSTUS 2022	AGUSTUS 2023	AGUSTUS 2024
Pertanian	32,41	29,47	29,20
Manufaktur	18,25	18,54	17,80
Pertambangan	4,14	4,64	4,52
Industri	8,14	8,43	7,66
Listrik, Gas & Air	0,54	0,65	0,51
Bangunan	5,43	4,93	5,11
Jasa-Jasa	49,34	51,99	53,00
Perdagangan	25,87	27,54	27,93
Angkutan dan Pergudangan	4,25	4,59	4,06
Keuangan & Jasa Perusahaan	2,47	2,63	3,13
Jasa Kemasyarakatan	16,74	17,23	17,88
TOTAL	100,00	100,00	100,00

Sumber: Indikator Pasar Tenaga Kerja Prov. Kalsel Agustus 2024

2.3.2.10 Penduduk Menurut Usia Sekolah

Penduduk usia sekolah yang menerima layanan pendidikan di Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencapai 99,34% untuk usia 7-12 tahun, 91,55% untuk usia 13-15 tahun, 74,18%

untuk usia 16-18 tahun dan 26,23% untuk tingkat perguruan tinggi. Secara rinci Persentase penduduk menurut jenis kelamin yang menerima layanan pendidikan sebagaimana tabel 2.14.

Tabel 2.14 Persentase Penduduk Usia 7-23 Tahun Menurut Jenis Kelamin. Kelompok Umur Sekolah. dan Partisipasi Sekolah di Kalimantan Selatan Tahun 2024

JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR SEKOLAH	TIDAK/ BELUM PERNAH SEKOLAH (%)	MASIH SEKOLAH (%)	TIDAK SEKOLAH LAGI (%)
Laki-laki			
7-12	0,66*	99,34	-
13-15	NA	91,55	8,12
16-18	NA	74,18	25,73
19-23	NA	26,23	73,21
7-23	0,48*	73,50	26,03
Perempuan			
7-12	0,73*	99,27	-
13-15	NA	95,90	3,94
16-18	NA	70,41	29,49
19-23	NA	32,89	67,08
7-23	0,34*	76,24	23,42
Laki-laki dan Perempuan			
7-12	0,7*	99,30	-
13-15	NA	93,70	6,05
16-18	NA	72,31	27,59
19-23	NA	29,45	70,24
7-23	0,41*	74,86	24,73

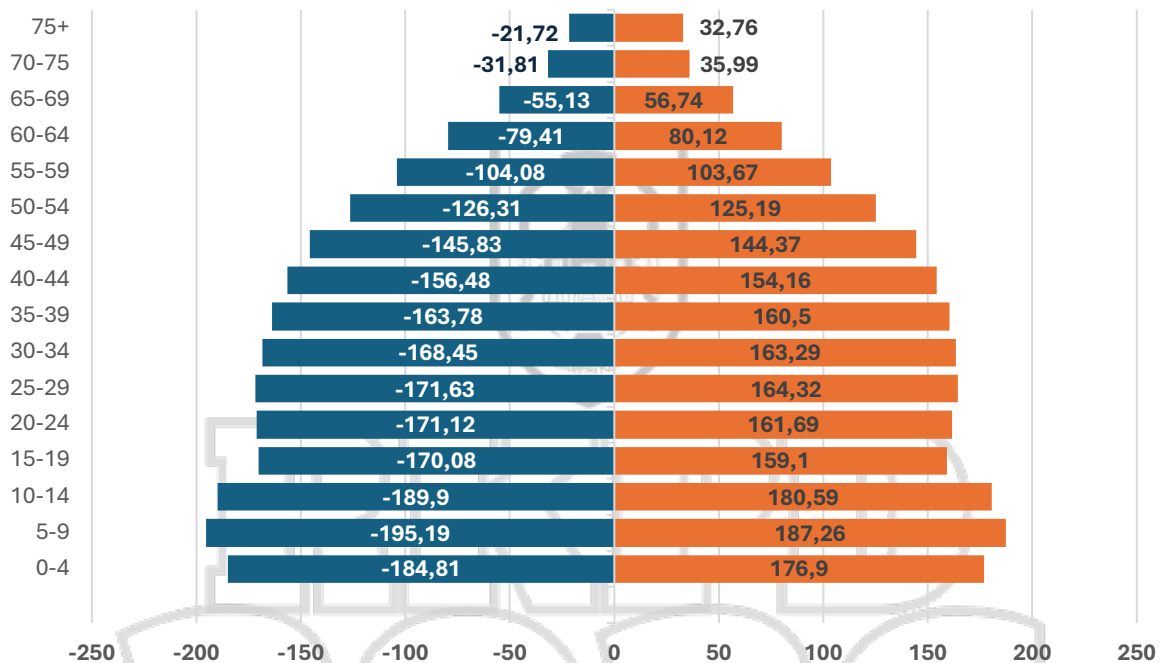
Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2025

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tingkat sekolah dasar (7-12 tahun) hampir tidak terjadi perbedaan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan. Namun, usia menengah pertama (13-15 tahun) terjadi disparitas antara laki-laki sebesar 91,55 dan perempuan sebesar 95,90, begitu pula dengan usia sekolah menengah atas (16-18 tahun), laki-laki sebesar 74,18 dan perempuan sebesar 70,41 serta usia perguruan tinggi (19-23 tahun) di mana persentase Perempuan yang sekolah lebih tinggi dari pada Laki-laki.

2.3.2.1 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Selatan

Piramida penduduk menggambarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin. Piramida penduduk ini berguna untuk menganalisis produktivitas penduduk dan bonus demografi. Piramida penduduk Kalimantan Selatan tahun 2024 memperlihatkan sebagian besar penduduk Kalimantan Selatan berada dalam kelompok usia produktif (15-64 tahun) yaitu sebesar 68.21%. sedangkan penduduk lanjut usia (65 ke atas) sebesar 5.25%. dan penduduk usia

0-14 tahun sebesar 26.53%. Kondisi Penduduk Kalimantan Selatan memperlihatkan bahwa sebenarnya Provinsi Kalimantan Selatan telah berada pada posisi bonus demografi. Bonus demografi merupakan suatu keadaan di mana penduduk yang masuk ke dalam usia produktif jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk usia tidak produktif. Usia produktif yang dimaksud adalah berkisar antara 15 hingga 64 tahun.



Gambar 2.12 Perbandingan Jumlah Penduduk berdasarkan Umur di Kalimantan Selatan Tahun 2023

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa 1 orang usia non produktif ditanggung oleh 2 sampai 3 orang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa potensi tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Selatan akan mampu mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan jika bonus demografi ini dapat dimanfaatkan dengan baik, pada sisi lain jika tidak terkelola dengan baik akan menjadi beban.

Manfaat bagi perekonomian Kalimantan Selatan dengan usia produktif lebih banyak dari usia non produktif dalam bonus demografi yang dimanfaatkan dengan baik akan membuat jumlah tabungan dari penduduk produktif semakin besar. sehingga perekonomian daerah semakin bertumbuh. Manfaat lainnya adalah terbentuknya generasi emas yang diartikan sebagai penerus yang kreatif dan mampu memikul tanggung jawab serta membangun daerah yang diperoleh melalui pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

2.3.3 Potensi Pengembangan Wilayah

Berbicara tentang konsep pengembangan potensi Provinsi Kalimantan Selatan. secara konsep kewilayahan akan dibagi menjadi 3 wilayah besar yang terdiri atas 11 Kabupaten dan 2 Kota. pembagian ini dibuat berdasarkan identifikasi kesamaan karakteristik daerah masing-masing Kabupaten/Kota. Adapun pembagian kewilayahan ini antara lain:



Pengembangan potensi tersebut didasarkan pada kesamaan karakteristik daerah serta latar belakang yang sama baik dari segi sumber mata pencaharian, potensi lahan, ketersediaan tenaga kerja, serta factor lainnya.

2.3.4 Wilayah Metropolitan Banjarbakula

Pada tahun 2019 Pemerintah Pusat memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kertanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, di Provinsi Kalimantan Timur. Adapun peluang yang dapat menguntungkan adalah adanya potensi ekonomi yang akan saling membutuhkan antara IKN dengan kawasan Metropolitan di Banjarbakula. Konsep Perkotaan Wilayah Metropolitan Banjarbakula yang akan menjadi kawasan Metropolitan di Provinsi Kalimantan Selatan nantinya akan menjadi titik inti pusat aktifitas penduduk perkotaan. Dengan adanya tahapan dalam fase pengembangan IKN baru tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat merespon dan menyediakan kebutuhan untuk menghadapi lonjakan urbanisasi dan pengembangan wilayah tersebut.

2.3.4.1 Wilayah Banua Anam

Kawasan ini memiliki Potensi pada sektor Pertanian. Perkebunan dan Pariwisata dalam kaitannya untuk mendukung fungsi kawasan sebagai Kawasan Strategis Provinsi dan Pusat Kegiatan. pengembangan ekonomi diarahkan sebagai berikut:

1. Pembangunan diarahkan untuk tercapainya tingkat **kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan** dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong:
 - a. Pencapaian taraf hidup ekonomi masyarakat yang tinggi
 - b. Pencapaian pemerataan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat
 - c. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha
 - d. Penurunan jumlah penduduk miskin
 - e. Penguatan kemampuan fiskal daerah yang mandiri
2. Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya **pertanian berkelanjutan** dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong:
 - a. Penetapan kawasan konservasi dan rehabilitasi lingkungan hidup (habitat) sumberdaya pertanian.
 - b. Jaminan bagi perluasan lahan pertanian. peningkatan ketersediaan saprodi dan infrastruktur pendukung bagi peningkatan produktifitas
 - c. Jaminan ketahanan pangan dan taraf hidup petani yang layak
 - d. Pengolahan hasil perkebunan lebih lanjut agar tercipta nilai tambah dan jaringan pemasaran yang lebih luas dan kompetitif
 - e. Reorientasi agribisnis disertai sistem informasi pasar dan jaminan mutu produk
 - f. Pengembangan sentra-sentra agribisnis dalam suatu kawasan terpadu secara luas
3. Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi **sumberdaya alam** dan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong:
 - a. Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian
 - b. Pengembangan pola kemitraan
 - c. Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat
 - d. Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
 - e. Pengembangan sumber daya mineral. batubara. air. tanah dan mitigasi bencana alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
 - f. Pembangunan diarahkan untuk terwujudnya pemanfaatan barang dan jasa **hasil hutan** secara arif dan bijaksana dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas

- g. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional sekaligus mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, lindung, dan produksi (kayu, non kayu, jasa) untuk mencapai anfaat sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang melalui terbentuknya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Produksi, Lindung dan Konservasi
 - h. Melakukan pembangunan hutan secara lestari melalui pendekatan *forest resource management* dengan memperhatikan keanekaragaman manfaat dan hasil hutan, kondisi fisik kawasan dan kepentingan para pihak.
 - i. Revitalisasi industri kehutanan yang dikembangkan sesuai konsep pengelolaan hutan lestari dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada prinsip efesiensi, ramah lingkungan, variasi produk, nilai tambah, jaminan pasokan dan akses pasar, dan mampu bersaing secara global.
 - j. Pengkajian neraca sumberdaya alam dan optimalisasi PDRB-termasuk PDRB hijau melalui pengelolaan hutan secara lestari pada unit IUPHHK hutan alam dan hutan tanaman (indusrti dan rakyat) serta peningkatan produk non kayu (*non timber forest product*) dan percepatan mekanisme perdagangan karbon
 - k. Pengembangan insentif dan reward bagi perusahaan dan masyarakat yang mampu mengelola hutan sesuai prinsip-prinsip kelestarian
4. Pembangunan diarahkan untuk optimalisasi **sumberdaya alam** dan dengan berbagai kebijakan yang pada dasarnya dapat mendorong :
- a. Pengembangan agribisnis modern berbasis SDA pertanian
 - b. Pengembangan pola kemitraan
 - c. Pengembangan pola produksi berbasis masyarakat
 - d. Pengembangan sumber daya energi alternatif dan energi baru terbarukan yang mendukung pembangunan berkelanjutan
 - e. Pengembangan sumber daya mineral, batubara, air, tanah dan mitigasi bencana alam yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

2.3.4.2 Kawasan Saijaan Bersujud

Kawasan ini memiliki tiga kawasan inti dimana peran masing-masing adalah sebagai kawasan industri, Kawasan pelabuhan bongkar muat dan hankam serta Kawasan ekonomi khusus. Namun perlu juga diketahui bahwa terdapat Pulau Sebuku dan Pulau Laut yang daerahnya merupakan penghasil dari batubara dan binih beji yang biasanya menjadi komoditi penting ekspor bahan industri ke wilayah lain. Sebagai core dari kawasan paling selatan, maka

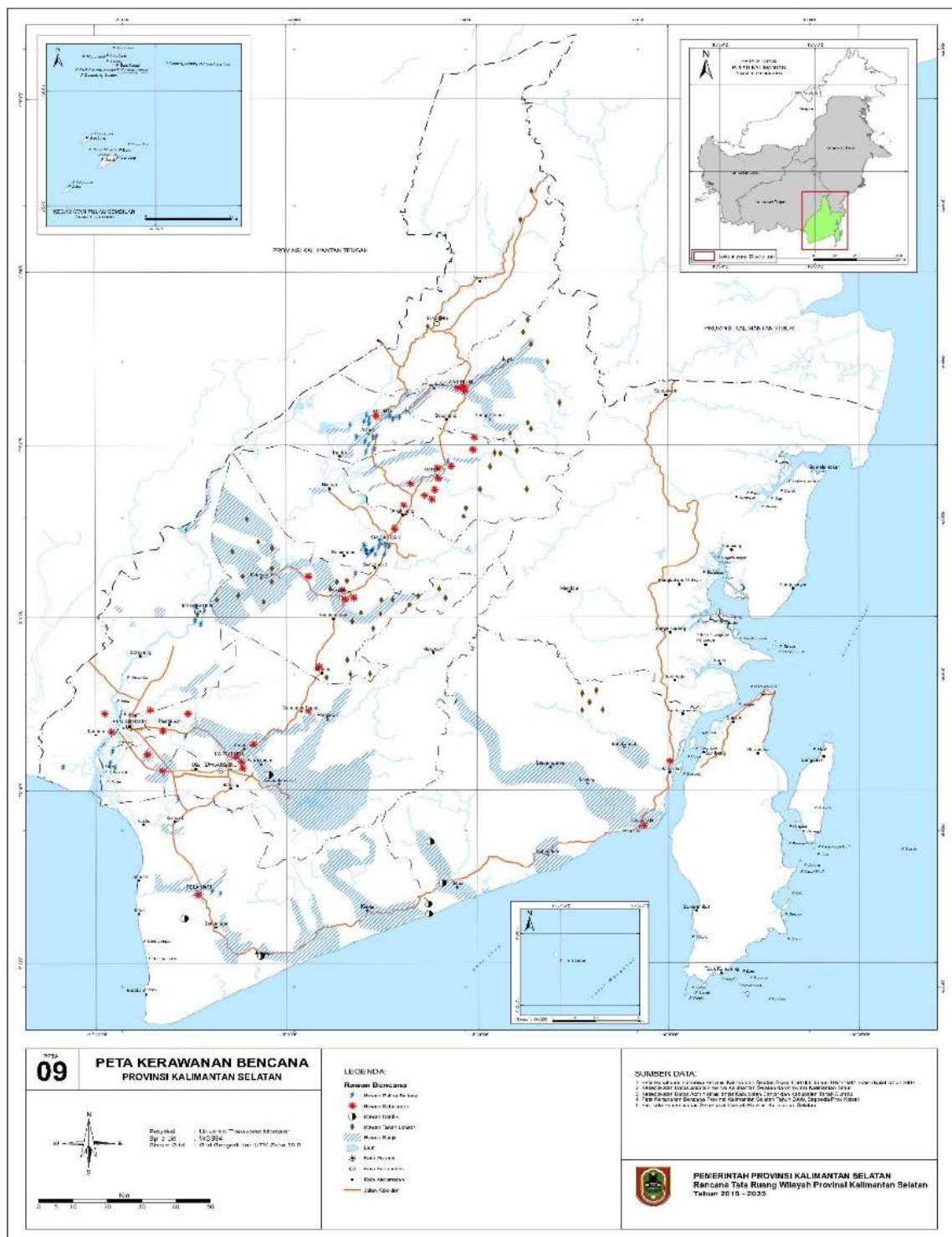
memungkinkan menjadi Maritim Center yang akan menjadi gerbang masuk barang logistik yang akan di distribusikan ke wilayah IKN. KI Batulicin berperan sebagai titik kumpul barang dari Pelabuhan Kotabaru. Pulau Sebuku dan Pulau Laut dan Mekar Putih sebelum didistribukan ke IKN. Pelabuhan Stagen di Kotabaru berperan sebagai titik bongkar muat barang yang akan dikirimkan ke IKN melewati KI Batulicin (maka akan dibutuhkan semacam warehouse) dan adanya hankam sebagai Langkah untuk mengantisipasi adanya barang ilegal yang melalui jalur ALKI II. Sedangkan KEK Mekar Putih akan banyak berperan dalam kegiatan ekonomi wilayah yang menjadi Maritim Center di Provinsi Kalimantan Selatan. Keempat titik kawasan ini perlu dihubungkan dengan suatu jaringan jalan yang akan memudahkan proses distribusi baik itu dengan jalan baru atau jembatan. Secara ekonomi Kawasan Industri&Pesisir akan diarahkan pengembangannya sebagai Industri Ekstraksi dan Bahan Setengah Jadi Bahan baku industri besar.

2.3.5 Wilayah Rawan Bencana

Bencana yang pernah terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi di seluruh wilayah khususnya di daerah rawan dan berisiko. Bencana tersebut juga dapat mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi masyarakat. pemerintah ataupun swasta. bahkan tidak sedikit jiwa yang terancam. Dengan demikian, perlu adanya upaya pengurangan risiko bencana yang berpotensi terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan.

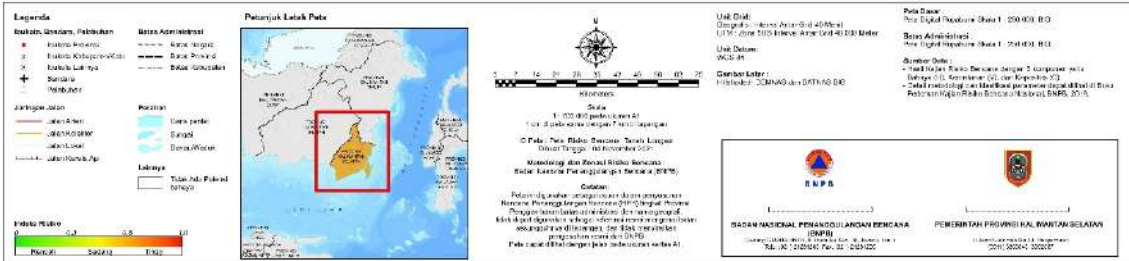
Potensi bencana yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat dari bencana yang pernah terjadi ataupun yang belum pernah terjadi. Berdasarkan DIBI tercatat 8 (delapan) jenis kejadian bencana yang pernah terjadi yaitu bencana banjir, banjir bandang, kekeringan, tanah longsor, gelombang ekstrem dan abrasi, kebakaran hutan dan lahan, epidemi dan wabah penyakit serta cuaca ekstrem.

*Provinsi
Kalimantan Selatan*



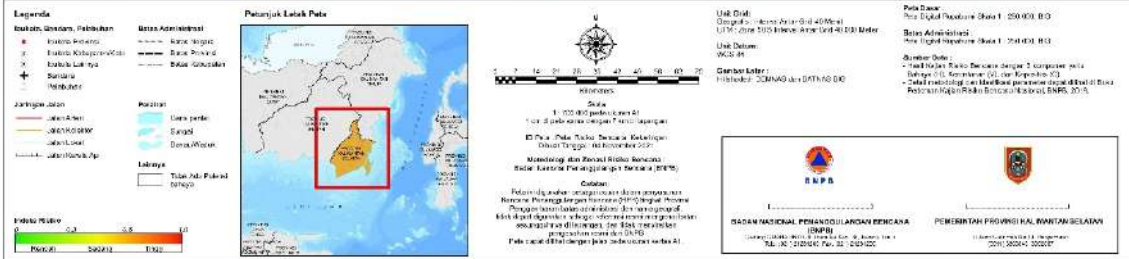
Gambar 2.13 Peta Rawan Bencana Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPBD Prov. Kalimantan Selatan, 2024



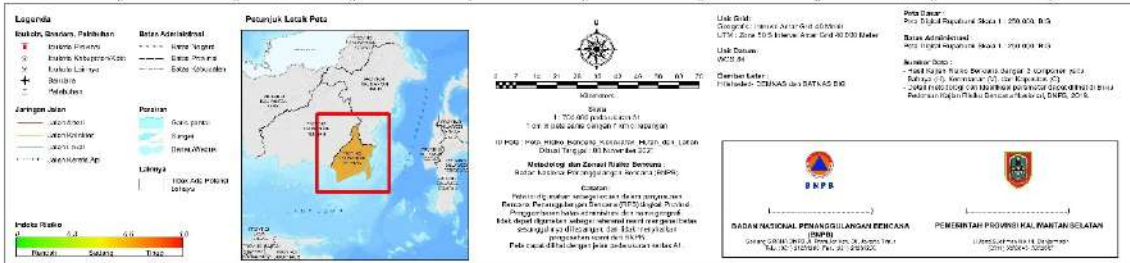
Gambar 2.14 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor Di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPBD Prov. Kalimantan Selatan. 2024



Gambar 2.15 Peta Risiko Bencana Kekeringan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPBD Prov. Kalimantan Selatan. 2024



Gambar 2.16 Peta Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan Di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPBD Prov. Kalimantan Selatan, 2024



Gambar 2.17 Peta Risiko Bencana Banjir Di Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: BPBD Prov. Kalimantan Selatan. 2024



RKPD 2026

*Provinsi
Kalimantan Selatan*



RKPD 2026

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

Tabel 2.15 Data Bencana Banjir di Kalimantan Selatan 2021 – 2023

KAB/KOTA	2022				2023				2024			
	FREKUENSI KEJADIAN	TERDAMPAK		RUMAH TERENDAM	FREKUENSI KEJADIAN	TERDAMPAK		RUMAH TERENDAM	FREKUENSI KEJADIAN	TERDAMPAK		RUMAH TERENDAM
		KK L	JIWA L			KK L	JIWA L			KK L	JIWA L	
BARITO KUALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BANJARMASIN	0	0	0	0	6	1.025	3.864	846	0	1.025	3.864	846
BANJARBARU	10	986	3710	1154	1	24.459	77.438	20.619	1	24.459	77.438	20.619
BANJAR	3	11741	12285	10987	7	1.433	5.489	1.402	0	1.433	5.489	1.402
TAPIN	3	74	176	74	4	3.241	7.028	3.205	2	3.241	7.028	3.205
HULU SUNGAI SELATAN	1	2	6	2	6	7.133	20.234	1.292	0	7.133	20.234	1.292
HULU SUNGAI TENGAH	25	3724	11225	2905	4	29.754	88.082	24.254	1	29.754	88.082	24.254
HULU SUNGAI UTARA	17	6824	21087	5918	7	1.983	6.181	1.906	1	1.983	6.181	1.906
BALANGAN	35	2485	7728	2294	6	1.030	3.192	930	2	1.030	3.192	930
TABALONG	12	1747	4457	1666	1	3.521	10.722	3.427	0	3.521	10.722	3.427
TANAH LAUT	9	2988	9074	2389	1	2.183	6.893	1.937	0	2.183	6.893	1.937
TANAH BUMBU	7	125	417	125	1	12	37	12	11	12	37	12
KOTABARU	1	6	16	6	2	221	810	336	0	221	810	336
TOTAL	123	30702	70181	27520	46	75.995	229.970	60.166	18	75.995	229.970	60.166

Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Provinsi
Kalimantan Selatan



RKPD 2026

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

2.4 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Sub Bab Aspek Kesejahteraan Masyarakat memberikan gambaran perkembangan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Selatan. Sub bab ini menjelaskan perkembangan kesejahteraan masyarakat dalam dua fokus. yaitu fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta fokus kesejahteraan sosial. fokus seni budaya dan olahraga

2.4.2 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Sub bab fokus kesejahteraan dan pemerataan menyajikan data yang memuat indikator-indikator perekonomian. Tujuan sajian data tersebut adalah untuk menggambarkan secara makro kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat serta kondisi pemerataan-ketimpangan perekonomian daerah.

2.4.2.1 Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah selama periode waktu tertentu. yang dalam hal ini adalah Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam data PDRB dapat tergambar ukuran ekonomi dan pasar suatu wilayah serta potensi dan kesehatan ekonomi. Data PDRB kemudian dapat diturunkan untuk menggambarkan pertumbuhan ekonomi dan pasar di suatu wilayah serta menggambarkan ukuran relatif dengan wilayah lain.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator penting yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Di Kalimantan Selatan. PDRB mencerminkan nilai total barang dan jasa yang diproduksi di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu. biasanya satu tahun.

- Sektor Pertanian:

Kalimantan Selatan memiliki potensi besar di sektor pertanian. khususnya pada komoditas kelapa sawit. karet. dan padi. Sektor ini sering menjadi penyumbang utama dalam PDRB.

- Sektor Pertambangan dan Penggalan:

Wilayah ini kaya akan sumber daya alam. terutama batu bara. Pertambangan dan penggalan menjadi sektor yang sangat berkontribusi terhadap PDRB Kalimantan Selatan.

- Sektor Industri Pengolahan:

Pertumbuhan industri pengolahan, termasuk pengolahan hasil tambang dan pertanian, juga memberikan kontribusi signifikan. Pabrik pengolahan minyak kelapa sawit, pabrik karet, dan industri pengolahan batu bara adalah beberapa contohnya.

- Sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran:

Perkembangan sektor perdagangan dan jasa, seperti hotel dan restoran, turut mendukung peningkatan PDRB. Kota-kota seperti Banjarmasin menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa di Kalimantan Selatan.

- Sektor Jasa:

Peningkatan sektor jasa, termasuk transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan, juga memberikan kontribusi penting. Infrastruktur yang berkembang membantu pertumbuhan ekonomi wilayah ini.

Tantangan dalam Pertumbuhan PDRB:

- Ketergantungan pada Sumber Daya Alam:

Tingginya ketergantungan pada sektor pertambangan membuat PDRB rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketika harga batu bara turun, pertumbuhan ekonomi dapat terpengaruh secara signifikan.

- Diversifikasi Ekonomi:

Perlu adanya diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Pengembangan sektor pariwisata dan industri kreatif bisa menjadi salah satu solusi.

- Pembangunan Infrastruktur:

Infrastruktur yang memadai sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Jalan, pelabuhan, dan fasilitas transportasi lainnya perlu terus ditingkatkan.

Terkait PDRB menurut lapangan Usaha di Kalimantan Selatan selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.16.

Tabel 2.16 PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	18.399,41	18.614,34	18.884,18	19.510,14	20.350,74
Pertambangan dan Penggalian	31.906,41	33.226,73	35.088,49	36.171,09	37.270,51
Industri Pengolahan	16.298,91	17.277,92	17.850,03	18.387,03	19.282,69
Pengadaan Listrik dan Gas	163,76	171,40	184,86	199,86	213,35519
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	572,86	601,69	630,96	660,54	691,98345
Konstruksi	10.075,35	10.364,04	10.812,57	11.469,97	12.150,43
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi	11.972,12	12.320,82	13.202,32	14.017,15	14.908,08

Mobil dan Sepeda Motor					
Transportasi dan Pergudangan	7.773,29	7.919,63	9.298,00	10.344,24	10.934,10
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.628,49	2.705,83	2.966,30	3.241,51	3.503,16
Informasi dan Komunikasi	5.510,90	5.908,86	6.319,21	6.734,37	7.187,32
Jasa Keuangan dan Asuransi	4.316,33	4.367,68	4.384,93	4.762,90	5.099,81
Real Estate	3.144,11	3.318,73	3.513,45	3.735,36	3.948,94
Jasa Perusahaan	806,23	835,41	898,3	966,41	1032,7912
Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.033,24	7.144,27	7.182,47	7.391,99	7.905,77
Jasa Pendidikan	6.117,21	6.211,32	6.429,09	6.656,62	6.985,64
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.629,63	2.893,56	3.047,17	3.220,53	3.399,82
Jasa lainnya	1.516,09	1.542,36	1.646,94	1.761,26	1.891,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	130.864,32	135.424,59	142.339,28	149.230,96	149.230,96

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2025. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.17 PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2020	2021	2022	2023*	2024**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	25.799,22	26.863,97	28.680,49	30.678,59	33.119,22
Pertambangan dan Penggalian	32.753,24	42.459,25	80.558,30	83.006,97	84.512,20
Industri Pengolahan	24.217,73	26.810,22	28.577,38	28.948,75	31.410,22
Pengadaan Listrik dan Gas	274,73	294,97	320,96	350,72	379,20
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	805,80	855,21	912,80	985,41	1.061,25
Konstruksi	14.803,23	15.742,37	17.233,32	18.847,73	20.321,36
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	18.730,12	19.936,38	22.758,70	26.026,96	28.179,44
Transportasi dan Pergudangan	11.796,12	12.126,64	15.596,14	19.072,75	20.816,06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.846,09	4.030,64	4.506,71	5.003,67	5.534,47
Informasi dan Komunikasi	7.032,16	7.586,35	8.298,94	8.936,22	9.656,89
Jasa Keuangan dan Asuransi	6.569,43	6.933,86	7.461,55	8.261,30	8.924,72
Real Estate	4.352,93	4.687,63	5.072,21	5.523,69	5.992,36
Jasa Perusahaan	1.309,54	1.379,20	1.543,08	1.746,13	1.923,83
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	11.397,08	11.731,82	12.024,81	12.864,24	14.276,42
Jasa Pendidikan	9.093,30	9.464,28	9.932,27	10.537,98	11.513,29
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.984,44	4.508,16	4.864,99	5.297,09	5.756,06
Jasa lainnya	2.396,87	2.471,45	2.755,99	3.103,81	3.441,88
PDRB	179.162,02	197.882,42	251.098,65	269.192,02	286.818,87

Sumber: BPS Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2025

Tabel 2.18 PDRB Provinsi Kalimantan Selatan 2020–2024 (Miliar Rupiah) Menurut Pengeluaran

KOMPONEN		ADHK TAHUN 2020 – 2024					ADHB TAHUN 2020 – 2024				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,91	62,60	65,86	69,28	72,99	87,61	90,90	103,22	113,38	122,63
2	Pengeluaran Konsumsi LNPR	1,25	1,26	1,32	1,43	1,63	1,94	2,01	2,19	2,51	2,93
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	13,40	13,90	13,81	14,47	15,18	22,34	23,70	24,60	26,76	30,03
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	30,09	30,35	31,94	33,74	35,26	44,96	46,44	51,63	56,53	61,22
5	Perubahan Inventori	52,35	68,14	-5,50	-9,72	-4,17	70,57	95,34	-8,59	-1,4	-6,91
6	Net Ekspor Barang dan Jasa	24,16	27,25	29,96	31,38	32,11	22,24	34,74	70,32	71,56	70,70
PDRB		130,86	135,42	142,34	149,23	156,76	180,56	179,15	192,58	251,25	269,29

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2025. BPS Provinsi Kalimantan Selatan.

2.4.2.2 Struktur Perekonomian Daerah

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2024 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalian sebesar 29,47 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,55 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 10,95 persen. Peranan ketiga lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 51,97 persen. Sisanya sebesar 48,03 persen berbagi nilai pada 14 kategori lapangan usaha lainnya, seperti yang terlihat pada tabel 2.19.

Tabel 2.19 Distribusi Persentase PDRB Prov. Kalsel Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

LAPANGAN USAHA	TAHUN (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14,40	13,58	11,42	11,40	11,55
Pertambangan dan Penggalian	18,28	21,46	32,08	30,84	29,47
Industri Pengolahan	13,52	13,55	11,38	10,75	10,95
Pengadaan Listrik dan Gas	0,15	0,14	0,12	0,13	0,13
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,26	7,96	6,86	7,00	7,09
Konstruksi	10,45	10,07	9,06	9,67	9,82
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,38	2,91	7,15	6,17	6,36
Transportasi dan Pergudangan	6,58	6,13	6,21	7,09	7,26
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,15	2,04	1,79	1,86	1,93
Informasi dan Komunikasi	3,93	3,83	3,31	3,32	3,37
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,67	3,50	2,97	3,07	3,11
Real Estate	2,43	2,37	2,02	2,05	2,09
Jasa Perusahaan	0,73	0,70	0,61	0,65	0,67

LAPANGAN USAHA	TAHUN (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Administrasi Pemerintahan. Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,36	5,93	4,79	4,78	4,98
Jasa Pendidikan	5,08	4,78	3,96	3,91	4,01
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,22	2,28	1,94	1,97	2,01
Jasa lainnya	1,34	1,25	1,10	1,15	1,20
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2025. BPS Kalsel

2.4.2.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan barang dan jasa (produk) yang dihasilkan pada suatu waktu tertentu di wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan peningkatan ukuran ekonomi, peningkatan ukuran pasar serta secara tidak langsung menggambarkan peningkatan kapasitas produksi.

Capaian Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan dibandingkan dengan pertumbuhan regional Kalimantan dan nasional selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.20

Tabel 2.20 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024

WILAYAH	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	-1,82	4,8	5,07	4,46	4,9
Kalimantan Timur	-2,90	2,55	4,48	6,22	6,17
Kalimantan Selatan	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05
Kalimantan Tengah	-1,41	3,59	6,45	4,14	4,46
Kalimantan Utara	-1,09	3,99	5,32	6,22	4,57
NASIONAL	-2,07	3,70	5,31	5,05	5,03

Sumber : <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>

Pada tabel diatas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi regional Kalimantan menjanjikan dan lebih tinggi dari pertumbuhan nasional secara umum. Namun, ada perbedaan dalam pertumbuhan antar provinsi, dan pemahaman tentang dinamika ekonomi masing-masing provinsi sangat penting untuk perencanaan pembangunan yang tepat.

Adapun capaian pertumbuhan ekonomi selama 5 (lima) tahun terakhir di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 2.21.

Tabel 2.21 Capaian Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	-1,95	3,47	5,12	4,78	5,01
Kota Baru	-1,88	3,35	4,58	4,29	5,34
Banjar	-1,96	3,21	4,48	4,35	4,76
Barito Kuala	-1,06	3,17	3,59	4,07	5,02

KABUPATEN/KOTA	TAHUN (PERSEN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tapin	-1,49	3,43	4,91	4,88	4,89
Hulu Sungai Selatan	-1,19	4,19	4,02	5,27	5,15
Hulu Sungai Tengah	-1,01	3,01	3,92	4,11	4,95
Hulu Sungai Utara	-0,66	3,21	4,08	4,51	4,43
Tabalong	-2,5	3,27	5,29	4,9	4,87
Tanah Bumbu	-1,39	4,23	5,45	4,84	4,82
Balangan	-2,47	3,27	5,24	4,17	4,15
Banjarmasin	-1,88	3,41	5,69	5,62	5,63
Banjar Baru	-1,83	3,33	7,93	6,81	6,71
KALSEL	-1,81	3,48	5,11	4,84	5,05

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2025

Pertumbuhan ekonomi lazimnya diikuti dengan beberapa manfaat pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi karena pada dasarnya terjadi peningkatan pendapatan per kapita.
2. Penurunan pengangguran karena terjadi peningkatan kapasitas produksi.
3. Peningkatan basis pendapatan asli daerah karena terjadi peningkatan pendapatan per kapita yang mengikuti peningkatan konsumsi.

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka Tahun 2023. BPS Provinsi Kalimantan Selatan

Menurut hasil perhitungan BPS, Pada tahun 2020-2024 perekonomian Kalimantan Selatan cenderung mengalami fluktuasi pertumbuhan. Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) mengalami kontraksi sebesar -1,82%, sampai dengan tahun 2022 naik menjadi 5,11%, namun pada tahun 2023 LPE turun menjadi 4,84% dan naik kembali pada tahun 2024 menjadi 5,05%.

Perekonomian Kalimantan Selatan berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku tahun 2024 mencapai Rp 269.29 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 156.76 triliun.

Perekonomian Kalimantan Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen dibanding tahun 2023 (c-to-c). Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 8,07 persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 13,61 persen.

Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan IV-2024 terhadap triwulan IV-2023 mengalami pertumbuhan sebesar 5,15 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 9,35

persen. Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRT mengalami pertumbuhan tertinggi, sebesar 6,91 persen.

Perekonomian Kalimantan Selatan triwulan IV-2024 terhadap triwulan III-2024 (q-to-q) mengalami kontraksi sebesar -0,27 persen. Dari sisi produksi, lapangan usaha Konstruksi mengalami pertumbuhan tertinggi, mencapai 11,69 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dialami oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, sebesar 21,45 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 masih didominasi oleh komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang mencakup hampir separuh PDRB Kalimantan Selatan yaitu sebesar 42,76 persen; diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 21,35 persen; Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 10,47 persen; dan Net Ekspor sebesar 24,65 persen.

Pada tabel 2.22 dibawah ini terlihat bahwa selama periode 2020 hingga 2024, laju Indeks Implisit PDRB Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan fluktuasi yang signifikan antar komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga mengalami tren positif dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 7,92% pada tahun 2022, meskipun melambat pada tahun 2024 menjadi 2,65%. Konsumsi pemerintah juga menunjukkan peningkatan tajam pada tahun 2024 sebesar 7,15%. Sementara itu, sektor ekspor dan impor barang dan jasa mengalami volatilitas tinggi, di mana ekspor sempat tumbuh pesat pada tahun 2021 dan 2022, namun kembali berkontraksi tajam pada tahun 2023 dan 2024. Secara keseluruhan, laju Indeks Implisit PDRB mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebesar 20,73% sebelum menurun menjadi 1,43% pada tahun 2024. Data ini mencerminkan dinamika perekonomian daerah yang dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal maupun domestik.

Tabel 2.22 (Seri 2010) Laju Indeks Implisit PDRB Provinsi Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran (Persen) Tahun 2020 - 2024

KOMPONEN PENGELUARAN	LAJU INDEKS IMPLISIT PDRB MENURUT PENGELUARAN				
	2020	2021	2022	2023	2024
	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH
Konsumsi Rumah Tangga	1.01	2.61	7.92	4.43	2.65
Konsumsi LNPRT	1.11	2.41	4.05	5.60	2.70
Konsumsi Pemerintah	3.4	2.28	4.53	3.60	7.15
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	1.3	2.43	5.63	4.10	3.17
Ekspor Barang dan Jasa	-10.05	25.86	33.86	-12.55	-7.75
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-11.27	21.96	19.00	-16.54	-9.43
PDRB	1.06	6.73	20.73	2.26	1.43

2.4.2.4 Perkembangan Inflasi

Pada Desember 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 1,95 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,14. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Tanah Laut sebesar 2,90 persen dengan IHK sebesar 106,63 dan terendah terjadi di Kabupaten Kotabaru sebesar 0,26 persen dengan IHK sebesar 106,82.

Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sepuluh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,46 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,15 persen; kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,43 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,63 persen; kelompok kesehatan sebesar 3,91 persen; kelompok transportasi sebesar 1,83 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,28 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,62 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 1,73 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 10,48 persen. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks, yaitu: kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,18 persen.

Komoditas yang dominan memberikan andil/sumbangan inflasi y-on-y pada Desember 2024, antara lain: emas perhiasan, tarif parkir, ikan gabus, minyak goreng, sigaret kretek mesin, ikan patin, tarif rumah sakit, bawang merah, udang basah, ikan papuyu, terong, kue kering berminyak, sepeda motor, mobil, sewa rumah, kopi bubuk, cumi-cumi, nasi dengan lauk, es, dan bawang putih. Sedangkan komoditas yang memberikan andil/sumbangan deflasi y-on-y, antara lain: beras, cabai rawit, bensin, cabai merah, pepaya, ikan peda, baju musim wanita, sabun detergen bubuk dan air kemasan.

Tabel 2.23 Inflasi Kab/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024

INFLASI	2020	2021	2022	2023	2024
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
Kalimantan Selatan	1.68	2.55	6.99	0.18	1.95
Kotabaru	1.44	2.68	8.65	0.54	0.26
Tanjung	2.05	2.43	5.01	0.44	2.24
Kota Banjarmasin	1.67	2.54	6.98	0.12	1.98
Tanah Laut	-	-	-	-	2.9
Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	1.11

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2025

2.4.2.5 Gini Rasio

Koefisien Gini menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran. Semakin tinggi nilai koefisien, maka semakin tinggi tingkat ketimpangan, dan semakin tidak merata tingkat pengeluaran antar penduduk di suatu wilayah pengamatan. Sebaliknya, semakin rendah nilai koefisien, maka semakin rendah tingkat ketimpangan dan semakin merata tingkat pengeluaran penduduk. Nilai 1 menunjukkan ketimpangan sempurna, sementara nilai 0 menunjukkan pemerataan pengeluaran sempurna.

Perkembangan tingkat ketimpangan di Kalimantan Selatan periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.24 berikut.

Tabel 2.24 Gini Ratio Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	GINI RASIO				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	0.250	0.232	0.263	0.259	0.257
Kotabaru	0.287	0.306	0.331	0.316	0.316
Banjarnegara	0.322	0.344	0.300	0.297	0.296
Barito Kuala	0.277	0.284	0.289	0.312	0.258
Tapin	0.274	0.289	0.291	0.281	0.272
Hulu Sungai Selatan	0.300	0.275	0.260	0.293	0.260
Hulu Sungai Tengah	0.285	0.331	0.228	0.225	0.288
Hulu Sungai Utara	0.319	0.378	0.301	0.271	0.251
Tabalong	0.346	0.288	0.337	0.284	0.276
Tanah Bumbu	0.300	0.281	0.292	0.280	0.300
Balangan	0.298	0.277	0.266	0.258	0.309
Kota Banjarmasin	0.342	0.350	0.330	0.370	0.218
Kota Banjarbaru	0.381	0.361	0.341	0.321	0.347
Kalimantan Selatan	0.332	0.325	0.309	0.313	0.300
INDONESIA	0.385	0.381	0.381	0.388	0.381

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Tabel 2.24 ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan Provinsi Kalimantan Selatan lebih rendah daripada tingkat ketimpangan Indonesia. Dengan kata lain, fakta ini menunjukkan bahwa pengeluaran penduduk di Provinsi Kalimantan Selatan cenderung lebih merata daripada pengeluaran penduduk secara nasional. Berdasarkan data terakhir per September tahun 2024. Indeks Ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Wilayah)

Selain Gini Rasio, keadaan ketimpangan juga dapat ditunjukkan oleh Indeks Williamson. Jika Gini Ratio menunjukkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk, maka Indeks Williamson dapat menyajikan tingkat ketimpangan regional. Dalam hal ini, Indeks Williamson menyajikan ketimpangan tingkat produksi antar wilayah sehingga Indeks Williamson Provinsi Kalimantan

Selatan menunjukkan ketimpangan PDRB antar Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan.

Untuk melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan digunakan Indeks Williamson. Perhitungan Indeks Williamson Kalimantan Selatan didasarkan pada data PDRB per kapita dan jumlah penduduk di kabupaten/kota. Semakin Indeks Williamson mendekati angka 0, maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin kecil. Sedangkan semakin mendekati angka 1 maka ketimpangan pembangunan ekonomi semakin besar. Hasil pengukuran dari Indeks Williamson dikelompokkan ke dalam tiga kategori. yaitu :

- Indeks Williamson < 0.4 = tingkat ketimpangan rendah
- $0.4 < \text{Indeks Williamson} < 0.5$ = tingkat ketimpangan sedang (moderat)
- Indeks Williamson > 0.5 = tingkat ketimpangan tinggi

Nilai Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam kategori tingkat ketimpangan rendah. Pada kurun waktu tahun 2020 – 2024. Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi yaitu dari 0.395 menjadi 0.493. Pertumbuhan rata-rata Indeks Williamson dalam kurun waktu 2020-2024 mengalami kenaikan sebesar 0.105. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang semakin menurun. Kecenderungan penurunan Indeks Williamson diharapkan dapat menjadi indikator pemerataan wilayah yang semakin baik.

Tabel 2.25 Indeks Williamson Kalimantan Selatan (2020-2024)

INDIKATOR	INDEKS WILLIAMSON (%)					PERTUMBUHAN RATA-RATA (%/TAHUN)
	2020	2021	2022	2023	2024	
Indeks Williamson	0.395	0.409	0.509	0.504	0.493	0.102
Kategori Ketimpangan	Rendah	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	

Sumber : BPS. Data diolah (2024)

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya-upaya tepat sasaran pada lokasi dengan ketimpangan ekonomi cukup tinggi. Hal ini perlu menjadi perhatian karena meskipun ada daerah-daerah di Kalimantan Selatan yang maju secara ekonomi tetapi masih terdapat daerah-daerah yang relative tertinggal yang memerlukan pemberdayaan ekonomi dan dukungan sarana dan prasarana wilayah. sehingga ketimpangan antar wilayah tidak semakin tidak melebar.

2.4.2.1 Fokus Kesejahteraan Sosial

Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan ditinjau dari faktor-faktor kesejahteraan non-ekonomi. Salah satu indikator yang dapat mewakili kondisi kesejahteraan ini adalah Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) dengan seluruh komponen-komponen penyusunnya. Dalam pembahasan IPM akan tergambar kondisi pendidikan, kondisi kesehatan serta kondisi daya beli yang secara kumulatif dapat mewakili kualitas sumber daya manusia. Namun demikian sub bab ini akan lebih fokus menggambarkan kondisi pendidikan dan kondisi kesehatan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagai tambahan, Sub Bab Fokus Kesejahteraan Sosial juga menguraikan kondisi ketenagakerjaan.

2.4.2.2 Angka Kemiskinan. Tingkat Kemiskinan. dan Garis Kemiskinan

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas, Penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Maret 2024 hanya berjumlah 183.31 ribu jiwa atau setara dengan 4.11 persen dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Persentase penduduk miskin nasional pada Tahun 2024 mencapai 9.03%. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan memperlihatkan tren yang menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2021 dimana persentase penduduk miskin mencapai 4.83 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Adapun jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada tahun 2020-2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.26 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		TAHUN	INDONESIA	
	JUMLAH (RIBU JIWA)	PERSENTASE		JUMLAH (RIBU JIWA)	PERSENTASE
2024	183.31	4.11	2024	25.219.20	9.03
2023	188.93	4.29	2023	25.898.55	9.36
2022	195.70	4.49	2022	26.161.16	9.54
2021	208.11	4.83	2021	27.542.77	10.14
2020	187.87	4.38	2020	26.424.02	9.78

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: Garis kemiskinan merupakan kondisi data Maret

Tabel 2.27 Kondisi Kemiskinan Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penduduk Miskin (P0)	4.38	4.83	4.49	4.29	4.11
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	187.87	208.11	195.70	188.93	183.31

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: Garis kemiskinan merupakan kondisi data Maret

Sementara itu, jumlah dan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sd 2024 berdasarkan kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.28 berikut.

Tabel 2.28 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Se Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK MISKIN (JIWA)			PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (%)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
TANAH LAUT	13.541	13.222	13.404	3,86	3,73	3,74
KOTABARU	15.065	15.322	15.978	4,3	4,32	4,45
BANJAR	16.711	14.773	14.461	2,79	2,44	2,36
BARITO KUALA	15.055	14.707	14.044	4,75	4,6	4,36
TAPIN	6.982	6.224	6.554	3,6	3,19	3,33
HULU SUNGAI SELATAN	10.804	9.607	8.144	4,54	4,01	3,38
HULU SUNGAI TENGAH	16.144	16.008	16.027	5,92	5,84	5,81
HULU SUNGAI UTARA	15.497	15.018	13.929	6,49	6,25	5,75
TABALONG	15.243	15.153	14.968	5,87	5,77	5,64
TANAH BUMBU	17.216	17.172	14.677	4,26	4,12	3,41
BALANGAN	7.825	7.074	6.680	5,83	5,22	4,87
KOTA BANJARMASIN	34.009	33.467	33.376	4,74	4,63	4,58
KOTA BANJAR BARU	11.610	11.181	11.065	4,17	3,92	3,79
KALIMANTAN SELATAN	195.702	188.928	183.307	4,49	4,29	4,11

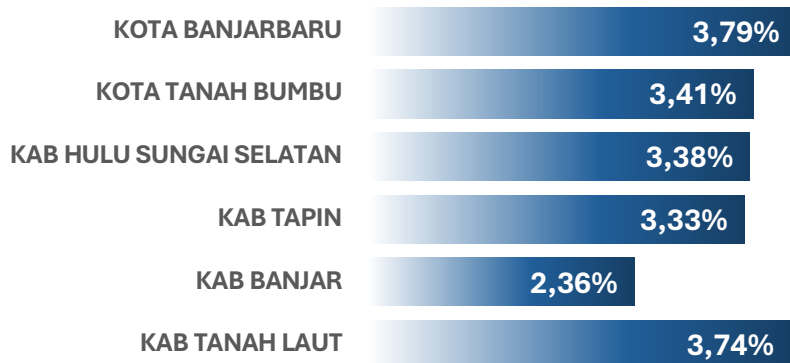
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: Garis kemiskinan merupakan kondisi data Maret

Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 33.38 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 6.55 ribu jiwa.

Walaupun jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin adalah yang paling banyak, namun secara persentase Kota Banjarmasin bukan wilayah yang persentase penduduk miskinnya tertinggi. Persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin hanya 4.58 persen, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang persentase penduduk miskinnya mencapai 5.81 persen. Adapun persentase penduduk miskin terendah ada di Kabupaten Banjar dengan nilai 2.36 persen.

Jika membandingkan dengan persentase penduduk miskin secara provinsi yang mempunyai nilai 4.11 persen, maka hanya ada enam Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten/kota yang dimaksud adalah sebagai berikut.



Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS, garis kemiskinan dapat didefinisikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Berdasarkan definisi tersebut, penduduk yang pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Adapun perkembangan Garis Kemiskinan di Kalimantan Selatan serta Garis Kemiskinan Berdasarkan Tempat Tinggal Penduduk dan Kabupaten/Kota disajikan pada tabel – tabel berikut.

Tabel 2.29 Garis Kemiskinan Kalimantan Selatan Tahun 2020 s.d. 2024 (Rupiah)

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN	
	GARIS KEMISKINAN	PERUBAHAN
2020	497.262	40.040
2021	519.150	21.888
2022	553.073	33.923
2023	604.266	51.193
2024	632.739	28.473

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: Garis kemiskinan merupakan kondisi data Maret

Tabel 2.30 Garis Kemiskinan Menurut Tempat Tinggal Tahun 2020 s.d. 2024 (Rupiah)

TAHUN	KALIMANTAN SELATAN		INDONESIA	
	PERKOTAAN	PERDESAAN	PERKOTAAN	PERDESAAN
2020	508.852	495.715	471.822	433.281
2021	527.240	517.293	489.848	450.185
2022	588.472	572.917	521.494	484.209
2023	613.880	594.141	569.299	525.050
2024	643.008	621.494	601.871	556.874

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: Garis kemiskinan merupakan kondisi data Maret

Tabel 2.31 Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota 2020 s.d. 2024 (Rupiah)

KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Selatan	497.262	519.150	553.073	604.266	632.739
Tanah Laut	522.845	537.854	575.061	620.532	670.062
Kotabaru	466.121	481.452	505.601	556.962	592.230
Banjar	462.375	482.867	514.991	561.521	589.165
Barito Kuala	340.526	355.160	375.707	417.110	437.579
Tapin	446.577	459.160	484.113	516.532	561.101
Hulu Sungai Selatan	528.622	494.203	516.857	547.855	583.549
Hulu Sungai Tengah	417.778	425.438	444.331	475.655	513.950
Hulu Sungai Utara	488.237	501.994	526.919	561.429	597.894
Tabalong	531.180	542.800	573.018	615.912	637.132
Tanah Bumbu	513.803	530.568	557.500	619.249	643.652
Balangan	441.488	453.928	476.190	508.157	528.104
Banjarmasin	543.546	606.330	651.383	708.617	743.872
Banjarbaru	652.030	653.556	692.830	753.899	781.405

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: Garis kemiskinan merupakan kondisi data Maret

Tabel di atas menunjukkan bahwa garis kemiskinan kabupaten/kota yang tertinggi pada tahun 2024 adalah Kota Banjarbaru mencapai Rp 781.405 per kapita. sedangkan Garis Kemiskinan yang paling rendah yaitu Kabupaten Barito Kuala sebesar Rp 437.579 per kapita.

2.4.2.3 Indeks Kedalaman Dan Keparahan Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan mengindikasikan jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan mengindikasikan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (Suhariyanto dalam mediaindonesia.com, 2020).

Dengan kata lain, Indeks Kedalaman Kemiskinan menunjukkan jarak pengeluaran penduduk untuk melepas kategorinya sebagai penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks. semakin jauh jarak pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan dan semakin jauh juga pengeluaran yang harus ditambah agar penduduk tersebut mampu melepas kategori penduduk miskin.

Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan terjadinya ketimpangan atau perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin timpang

pengeluaran di antara penduduk miskin dan semakin besar jurang perbedaan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Data mengenai Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan ditampilkan pada Tabel 2.32 berikut :

Tabel 2.32 Persentase Penduduk Miskin (P0). Tingkat Kedalaman Kemiskinan (P1). dan Tingkat Keparahan Kemiskinan (P2) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN	PERSENTASE PENDUDUK MISKIN (P0)	TINGKAT KEDALAMAN KEMISKINAN (P1)	TINGKAT KEPARAHAN KEMISKINAN (P2)
2020	4,38	0,70	0,16
2021	4,83	0,67	0,13
2022	4,49	0,63	0,133
2023	4,29	0,614	0,158
2024	4,11	0,571	0,116

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2025

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa selama periode 2020 hingga 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 4,38 persen pada tahun 2020 menjadi 4,11 persen pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan hasil positif dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah daerah. Selain itu, tingkat kedalaman kemiskinan (P1) dan tingkat keparahan kemiskinan (P2) juga mengalami fluktuasi namun tetap menunjukkan penurunan secara umum, masing-masing mencapai 0,571 dan 0,116 pada tahun 2024. Capaian ini mengindikasikan perbaikan kualitas hidup penduduk miskin dan semakin menurunnya kesenjangan pengeluaran di antara kelompok masyarakat miskin.

2.4.2.4 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi salah satu indikator pembangunan yang mempunyai cakupan yang sangat luas dalam menunjukkan pencapaian pembangunan manusia serta kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, IPM menjadi salah satu indikator yang cukup mewakili kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah.

Kalimantan Selatan menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dari tren Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024 dengan peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM Kalimantan Selatan sebesar 73.09 dan berhasil mencapai 75.19 pada tahun 2024 dimana terjadi peningkatan total sebesar 2.10 poin selama lima tahun.

Tabel 2.33 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Regional Kalimantan dan Nasional Tahun 2020-2024

PROVINSI	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	68.76	68.99	69.71	70.47	71.19
Kalimantan Tengah	72.62	72.81	73.17	73.73	74.28
Kalimantan Selatan	73.09	73.45	74.00	74.66	75.19
Kalimantan Timur	75.94	76.60	77.36	78.20	78.79
Kalimantan Utara	71.00	71.57	72.21	72.88	73.41
NASIONAL	72.81	73.16	73.77	74.39	75.02

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Kalimantan Selatan secara konsisten berada dalam kategori tinggi dan selalu melampaui IPM nasional Indonesia. Pencapaian ini menandakan bahwa kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum lebih baik daripada rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya.

Dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lain, IPM Kalimantan Selatan tahun 2024 yang mencapai 75.19 berada pada posisi kedua setelah Kalimantan Timur yang memimpin dengan nilai tertinggi di pulau Kalimantan, yaitu 78.79 pada tahun 2024. Sementara Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah memiliki nilai IPM yang lebih rendah dibanding Kalimantan Selatan.

Jika memperhatikan IPM berdasarkan wilayah, maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2024 nilai IPM kedua kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Nilai IPM Kota Banjarbaru 81.65 dan Kota Banjarmasin adalah 80.53. Kedua wilayah tersebut masuk dalam kategori IPM yang sangat tinggi. Sementara itu, sebelas kabupaten lainnya telah masuk dalam kategori IPM tinggi. Adapun nilai IPM terendah ada di Kabupaten Barito Kuala dengan nilai 71.40. Adapun rincian nilai IPM berdasarkan wilayah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.34 Indeks Pembangunan Manusia dan Indeks Penyusunnya Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KABUPATEN/KOTA	UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR ¹ (TAHUN)	HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	PENGELUARAN PER KAPITA PER TAHUN YANG DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH)	IPM
Tanah Laut	74.64	12.43	7.94	12.595	73.42
Kotabaru	73.88	12.08	7.56	12.929	72.42
Banjar	73.55	13.04	7.95	13.683	74.41
Barito Kuala	72.52	12.56	7.92	11.168	71.40
Tapin	74.72	12.34	8.15	13.163	74.06

KABUPATEN/KOTA	UMUR HARAPAN HIDUP SAAT LAHIR ¹ (TAHUN)	HARAPAN LAMA SEKOLAH (TAHUN)	RATA-RATA LAMA SEKOLAH (TAHUN)	PENGELUARAN PER KAPITA PER TAHUN YANG DISESUAIKAN (RIBU RUPIAH)	IPM
Hulu Sungai Selatan	72.82	12.48	8.09	14.150	73.95
Hulu Sungai Tengah	72.60	12.31	8.35	13.176	73.33
Hulu Sungai Utara	72.49	13.21	7.78	10.981	71.74
Tabalong	74.76	12.92	9.15	13.097	75.97
Tanah Bumbu	74.44	12.61	8.43	13.026	74.50
Balangan	73.87	13.09	8.13	12.325	73.83
Kota Banjarmasin	75.07	14.01	10.35	15.714	80.53
Kota Banjarbaru	75.11	14.86	11.00	14.927	81.65
KALIMANTAN SELATAN	74.18	12.87	8.62	13.399	75.19

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan : 1 Umur Harapan Hidup saat Lahir dari hasil Long Form SP2020

Pada tahun 2024, terjadi peningkatan dalam IPM yang didorong oleh semua aspek penyusunnya dengan penekanan pada standar hidup yang layak. Namun, terdapat perlambatan dalam pertumbuhan semua indikator dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, pertumbuhan umur harapan hidup saat lahir melambat dari 0.37 persen menjadi 0.28 persen, harapan lama sekolah melambat dari 0.31 persen menjadi 0.08 persen, rata-rata lama sekolah dari 1.06 persen menjadi 0.82 persen, dan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang sebelumnya 3.88 persen, melambat menjadi 3.44 persen.

Salah satu permasalahan pembangunan SDM di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik Pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah mencapai 8.62 tahun dimana meningkat 0.07 tahun dibanding tahun sebelumnya. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan IPM sehingga RLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

Belum optimalnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan seberapa tinggi atensi masyarakat terhadap pendidikan sesuai usia sekolah pada umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka semakin tinggi pula masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku pendidikan. Namun secara umum, semakin tinggi usia sekolah maka angka partisipasi sekolah juga semakin rendah mengingat makin banyak hambatan dalam mengikuti jenjang pendidikan seperti biaya, cakupan sekolah, hingga masalah

sosial lainnya. Nilai APS di SMU/SMK/MA/Paket C Kalimantan Selatan yang masih rendah (72.31). paralel dengan nilai RLS yang hanya 8.62 tahun. Rendahnya nilai APS ini menunjukkan banyaknya hambatan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat. Rendahnya nilai APS ini juga dapat tergambar bahwa ketersediaan masyarakat yang berpeluang untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi juga sedikit. sehingga sedikit pula ketersediaan tenaga kerja yang ahli dan terampil.

2.4.2.1 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (ARLS)

Salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia adalah dimensi pendidikan. Ada berbagai indikator yang dapat mengukur kualitas sumber daya manusia dari segi dimensi pendidikan, salah satunya adalah Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLS). Indikator ini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Adapun objek pengukuran indikator ini adalah penduduk yang berusia 25 tahun ke atas. Maka dari itu, ARLS dapat menunjukkan rata-rata lama sekolah yang telah ditempuh oleh penduduk yang berusia 25 tahun ke atas.

Pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari peningkatan kualitas pendidikan. Seseorang dengan pendidikan tinggi akan memiliki peluang yang besar dalam hidupnya dibandingkan dengan orang yang berpendidikan lebih rendah, misalnya di bidang pekerjaan. Peningkatan kualitas pendidikan juga akan mendorong perbaikan di bidang lain seperti tingkat kesehatan yang lebih baik dan kesejahteraan secara ekonomi. Mengingat begitu pentingnya pendidikan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, melalui berbagai program pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan, juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan pendidikan, pemerataan sarana dan prasarana pendidikan, serta peningkatan kualitas tenaga pengajar. Dimensi pengetahuan/pendidikan pada IPM dibentuk oleh 2 (dua) indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 (tujuh) tahun ke atas, sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah meningkat 0,35, sementara RLS meningkat juga sebesar 0,33 tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, meningkatnya HLS menunjukkan peningkatan tahun bersekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak usia 7 (tujuh) tahun di masa mendatang.

Pada tahun 2024, HLS di Provinsi Kalimantan Selatan telah mencapai 12.87 tahun yang berarti bahwa anak-anak usia 7 (tujuh) tahun memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan

hingga lulus SMA atau hingga menempuh jenjang D1. Data perkembangan ARLS dan HLS di Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.35 dan 2.36.

Tabel 2.35 Angka Rata-rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	7.88	7.89	7.9	7.92	7.94
Kotabaru	7.43	7.46	7.47	7.55	7.56
Banjar	7.35	7.52	7.71	7.94	7.95
Barito Kuala	7.34	7.55	7.63	7.74	7.92
Tapin	7.76	7.77	7.95	8.05	8.15
Hulu Sungai Selatan	7.75	7.76	7.79	7.86	8.09
Hulu Sungai Tengah	8	8.01	8.28	8.29	8.35
Hulu Sungai Utara	7.53	7.75	7.76	7.77	7.78
Tabalong	9.1	9.11	9.12	9.14	9.15
Tanah Bumbu	7.96	7.97	8.25	8.3	8.43
Balangan	7.55	7.69	7.85	8.03	8.13
Kota Banjarmasin	9.95	10.2	10.21	10.24	10.35
Kota Banjarbaru	10.95	10.96	10.98	10.99	11
KALIMANTAN SELATAN	8.29	8.34	8.46	8.55	8.62

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2025

2.4.2.1 Angka Harapan Lama Sekolah (AHLs)

Berikut tersaji data Tabel 2.36 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut

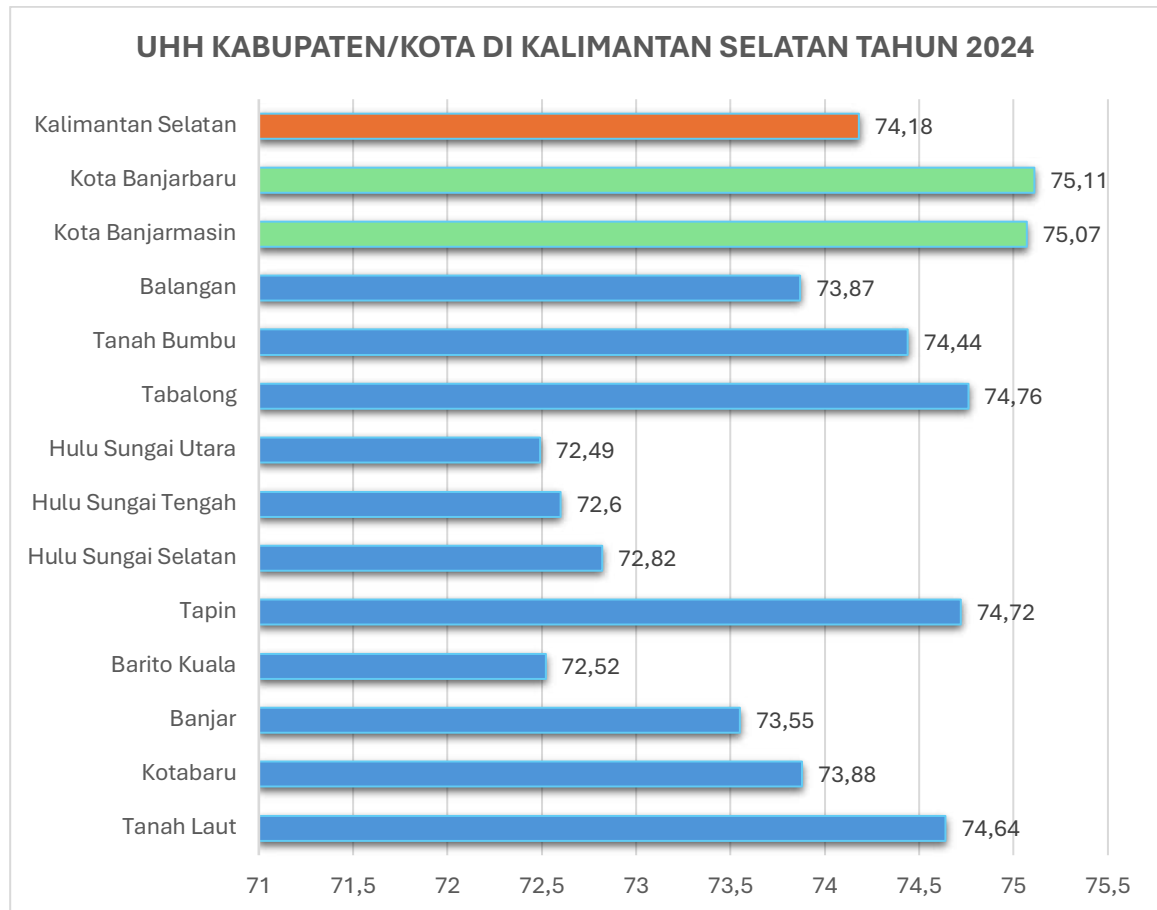
Tabel 2.36 Angka Harapan Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	12.01	12.31	12.32	12.41	12.43
Kotabaru	11.93	11.95	12.06	12.07	12.08
Banjar	12.44	12.73	13.02	13.03	13.04
Barito Kuala	12.39	12.40	12.54	12.55	12.56
Tapin	11.94	11.95	12.04	12.33	12.34
Hulu Sungai Selatan	12.17	12.38	12.4	12.46	12.48
Hulu Sungai Tengah	12.20	12.21	12.22	12.24	12.31
Hulu Sungai Utara	12.91	12.92	12.93	13.19	13.21
Tabalong	12.72	12.89	12.9	12.91	12.92
Tanah Bumbu	12.37	12.48	12.49	12.6	12.61
Balangan	12.46	12.47	12.61	12.82	13.09
Kota Banjarmasin	13.93	13.94	13.95	13.97	14.01
Kota Banjarbaru	14.81	14.82	14.83	14.85	14.86
KALIMANTAN SELATAN	12.52	12.81	12.82	12.86	12.87

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan 2025

2.4.2.1 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur Harapan Hidup (UHH). SIRUSA BPS menyebutkan bahwa UHH dapat mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. UHH didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Adapun perkembangan UHH di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Gambar 2.14 berikut.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Selatan, 2025.

Provinsi
Kalimantan Selatan



Gambar 2.18 Umur Harapan Hidup (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional Tahun 2020-2024. Serta UHH Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sumber : Dinas Kesehatan, 2025

Gambar 2.14 menunjukkan bahwa UHH Kalimantan Selatan mengalami sedikit fluktuasi setiap tahun, pada tahun 2022 menurun sebesar 0,23 dari tahun 2021 menjadi 73,2 ; tahun 2023 meningkat dan 2024 UHH Kalimantan Selatan menjadi 74,18, menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2024 diharapkan dapat mempunyai peluang hidup hingga usia 74,18 tahun.

Jika dibandingkan dengan nasional, pada Gambar 2.14 menunjukkan bahwa UHH Kalimantan Selatan masih berada di bawah UHH nasional. Dengan kata lain, derajat kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan masih berada di bawah rata-rata seluruh penduduk Indonesia. Data UHH berdasarkan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa masyarakat wilayah kota di Kalimantan Selatan memiliki derajat kesehatan yang lebih baik daripada masyarakat di kabupaten. Namun, perbedaan derajat kesehatan di wilayah kota dengan kabupaten tidak mencolok seperti perbedaan indikator pendidikan.

Kedua kota di Kalimantan Selatan memiliki nilai UHH lebih baik dibanding 11 kabupaten lain. Nilai UHH di Banjarbaru dan Banjarmasin adalah 75,11 tahun dan 75,07 tahun. Nilai tersebut tidak terlalu berjarak dibanding Kabupaten Tabalong dan Tapin yang memiliki UHH dengan nilai UHH yang tinggi yaitu 74,76 dan 74,72. Adapun kabupaten yang memiliki nilai UHH paling rendah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan nilai 72,49.

Adapun perkembangan nilai UHH selama 5 tahun pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2.37 berikut.

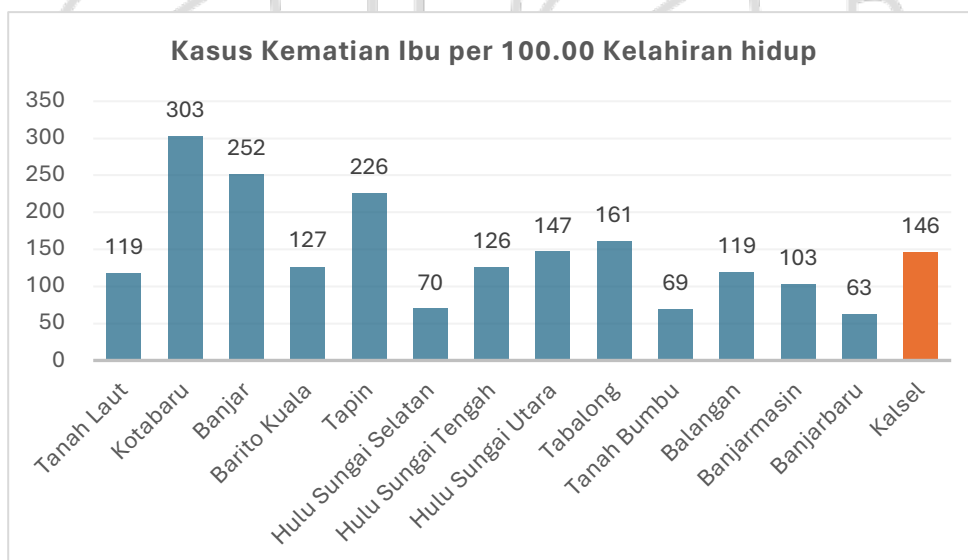
Tabel 2.37 Umur Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun) Provinsi Kalimantan Selatan. 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	73.81	73.95	74.21	74.46	74.64
Kota Baru	73.21	73.31	73.55	73.76	73,88
Banjar	72.49	72.7	73.04	73.33	73,55
Barito Kuala	71.37	71.56	71.94	72.28	72,52
Tapin	73.92	74.09	74.39	74.47	74,72
Hulu Sungai Selatan	71.64	71.78	72.15	72.52	72,82
Hulu Sungai Tengah	71.46	71.66	72	72.33	72,60
Hulu Sungai Utara	71.22	71.5	71.89	72.21	72,49
Tabalong	73.99	74.09	74.45	74.63	74,76
Tanah Bumbu	73.72	73.82	74.06	74.28	74,44
Balangan	73.02	73.15	73.42	73.69	73,87
Kota Banjarmasin	74.21	74.36	74.6	74.88	75,07
Kota Banjarbaru	74.3	74.4	74.64	74.9	75.11
KALIMANTAN SELATAN	73.28	73.43	73.7	73.97	74.18

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2025

2.4.2.2 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) menunjukkan derajat kesehatan reproduksi masyarakat di suatu wilayah. Informasi yang didapat dari AKI dapat dimanfaatkan untuk pengembangan program peningkatan kesehatan reproduksi. Adapun data mengenai AKI di Kalimantan Selatan dapat terlihat pada Gambar berikut.



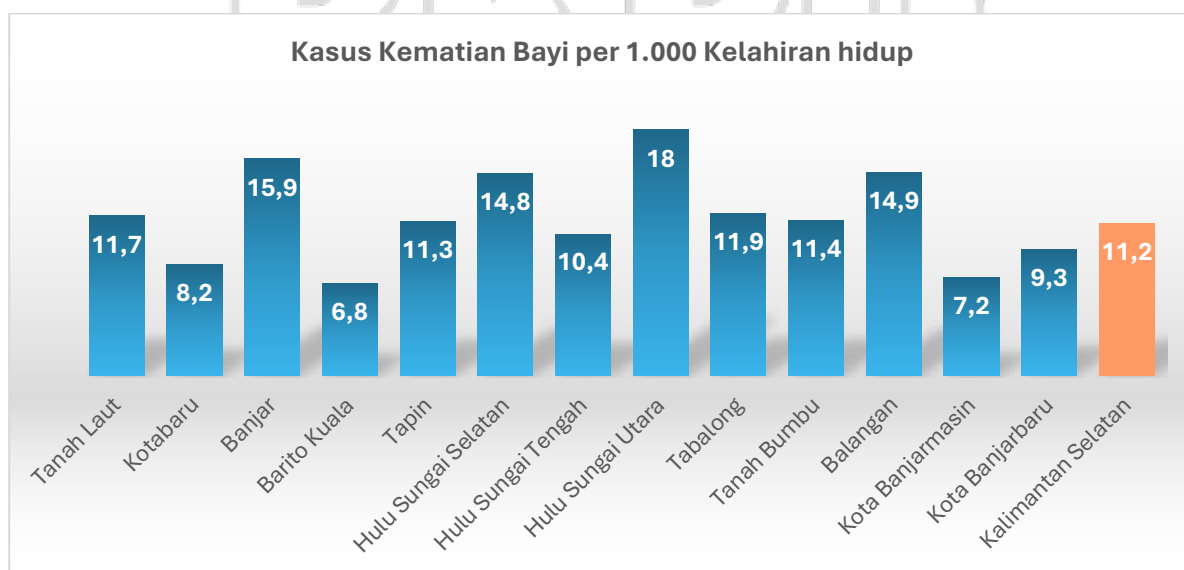
Gambar 2.19 Kasus Kematian Ibu di Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan. 2024

Gambar 2.15 menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) tertinggi pada tahun 2024 terjadi di Kabupaten Kotabaru, yaitu 303 kasus. artinya terdapat 303 kematian ibu dalam 100.000 kelahiran. Kondisi AKI terendah di kota Banjarbaru sebesar 63 kasus.

2.4.2.3 Angka Kematian Bayi dan Balita

Perkembangan AKB di Kalimantan Selatan selama kurun waktu tahun 2022-2024 menunjukkan angka yang fluktuatif, pada periode 2022 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan dari 10 menjadi 11,7 per 1.000 kelahiran, sedangkan periode 2023 sampai dengan 2024 tren menurun dari 11,7 per 1.000 kelahiran menjadi 11,2 pada tahun 2024. Beberapa penyebab kematian bayi di samping penyakit seperti ISPA (infeksi saluran pernapasan akut), panas tinggi hingga diare antara lain disebabkan keracunan kehamilan, pendarahan saat persalinan, berat badan lahir rendah serta faktor lainnya. Pendampingan kelas ibu hamil di puskesmas dan rumah sakit, meningkatnya kunjungan pemeriksaan ibu hamil di fasilitas pelayanan kesehatan serta optimalisasi peran Posyandu berkontribusi dalam penurunan kasus kematian bayi di Kalimantan Selatan.



Gambar 2.20 Kasus Kematian Bayi di Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan, 2025

Tabel 2.38 Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Neonatal (AKN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2022–2024

KABUPATEN/KOTA	AKI			AKB			AKN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Tanah Laut	50	158	119	10	10,2	11,7	8	7,6	9,1
Kotabaru	212	321	303	9	5,3	8,2	9	4,4	6,8

KABUPATEN/KOTA	AKI			AKB			AKN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Banjar	199	123	252	13	14,3	15,9	10	12,8	14,4
Barito Kuala	72	143	127	11	9,8	6,8	9	8,1	5,6
Tapin	303	252	226	12	19,4	11,3	8	16,5	7,9
Hulu Sungai Selatan	90	94	70	17	18,2	14,8	14	15,7	13,7
Hulu Sungai Tengah	79	141	126	17	14,1	10,4	14	14,1	9,2
Hulu Sungai Utara	241	197	147	21	19,7	18,0	16	17,4	15,5
Tabalong	135	87	161	9	10,7	11,9	8	9,5	10,3
Tanah Bumbu	76	61	69	8	8,4	11,4	7	6,4	9,5
Balangan	147	259	119	9	15,5	14,9	8	9,3	14,9
Kota Banjarmasin	129	136	103	1	8,2	7,2	1	6,9	6,5
Kota Banjarbaru	108	87	63	7	12,1	9,3	6	12,1	7,0
KALIMANTAN SELATAN	137	145	146	10	11,7	11,2	8	10,0	9,6

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

2.4.2.1 Tingkat Kesakitan

Tingkat kesakitan terdiri dari akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Penyakit menular adalah infeksi yang disebabkan mikroorganisme virus, bakteri, jamur dan parasit. Ciri penyakit menular adalah dapat berpindah ke orang lain yang sehat sehingga menyebabkan orang yang tadinya sehat menjadi sakit. Sedangkan Penyakit Tidak Menular (PTM) adalah penyakit bukan disebabkan oleh penularan vektor, virus atau bakteri, namun lebih banyak disebabkan oleh perilaku dan gaya hidup. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah stroke, penyakit jantung koroner, kanker, diabetes melitus, penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dan gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan. Berikut perkembangan penyakit menular di Kalimantan Selatan dari tahun 2020-2024.

Tabel 2.39 Perkembangan Penyakit menular di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Case Detection Rate (CDR) TB	%	17	23,7	49	60,7	82,9
2	Succes Rate TB	%	64	76,7	81,4	80,40%	73,6
3	Prevalensi HIV-Aids Kelompok Resiko Tinggi	angka	0,04	0,083	-	89	N/A
4	Annual Paracite Incidence (API) Malaria < 1	angka	0,13	0,09	0,12	0.072	0,007
5	Prevalensi Kusta	angka	0,3	0,22	0,3	84	0,42

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Persentase Kab/Kota yang eliminasi Rabies	%	15,4	15,3	23,07	83.85	76,9
7	Persentase cakupan pengobatan massal Filariasis terhadap jumlah penduduk endemis	%	92,5	96,9	0/ selesai	96,9	N/A

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Berbagai penyakit tidak menular (PTM) turut mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat. termasuk masyarakat Kalimantan Selatan. Ada 16 penyakit tidak menular yang tercatat diidap oleh masyarakat dalam Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas). Perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat meningkatkan risiko kematian akibat PTM. Adapun rincian PTM yang diidap oleh masyarakat Kalimantan Selatan disajikan pada Tabel 2.40 berikut:

Tabel 2.40 Penyakit Tidak Menular Tahun 2024

KABUPATEN	JUMLAH PENYAKIT TIDAK MENULAR	
	HIPERTENSI	DIABETES
Tanah Laut	27.964	4.287
Kotabaru	55.898	3.735
Banjjar	40.356	6.800
Barito Kuala	20.785	2.783
Tapin	20.240	3.178
Hulu Sungai Selatan	70.005	3.044
Hulu Sungai Tengah	20.421	2.104
Hulu Sungai Utara	22.626	4.423
Tabalong	16.943	3.424
Tanah Bumbu	27.151	5.782
Balangan	10.488	2.979
Banjarmasin	55.863	14.355
Banjarbaru	17.733	4.605
KALIMANTAN SELATAN	406.473	61.499

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2025

Tabel 2.41 Kasus Penyakit Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Penyakit di Provinsi Kalimantan

KABUPATEN/ KOTA	ANGKA PENEMUAN TB	ANGKA KEBERHASILAN PENGOBATAN	JUMLAH KASUS BARU AIDS	PENEMUAN KASUS BARU KUSTA PER 100.000 PENDUDUK	ANGKA KESAKITAN MALARIA PER 1.000 PENDUDUK	ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK	MALARIA	TB PARU	PNEUMONIA	KUSTA	CAMPAK	DIARE	DBD	AIDS + HIV		IMS
														KASUS BARU	KASUS KUMULATIF	
Tanah Laut	672	529	45	8	0,1	0,15	34	692	676	150	33	2100	549	56	89	6
Kotabaru	751	512	22	23	0,07	0,054	25	723	201	294	29	2014	186	80	79	2
Banjar	1048	897	71	17	0,11	0,091	64	1237	2950	279	25	4409	549	107	407	28
Barito Kuala	363	296	6	12	0,01	0,026	2	393	483	138	7	2339	86	103	18	1
Tapin	259	213	15	10	0,04	0,08	8	280	951	84	11	1817	156	87	27	1
Hulu Sungai Selatan	389	324	25	8	0,03	0,113	5	459	1364	99	11	1605	270	114	173	0
Hulu Sungai Tengah	665	548	18	13	0,03	0,131	7	798	5014	84	11	2974	351	110	139	8
Hulu Sungai Utara	525	413	31	13	0,01	0,04	2	435	2399	207	0	2550	96	66	133	0
Tabalong	503	415	45	7	0,22	0,013	57	1016	1049	111	7	2200	36	532	107	0
Tanah Bumbu	515	290	66	9	0,05	0,127	21	488	399	120	7	1833	434	267	379	12
Balangan	262	264	10	14	0,1	0,108	14	755	1505	246	5	1964	149	1927	34	5
Kota Banjarmasin	2769	1724	260	9	0,04	0,09	32	2581	2017	147	32	7646	60	0	2814	108
Kota Banjarbaru	730	563	74	3	0,1	0,15	29	773	1898	36	5	3187	409	0	381	82
KALIMANTAN SELATAN	9451	6988	688	146	0,91	1,173	300	10630	20906	1,995	183	36,638	3,331	3449	4780	253

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

2.4.2.2 Status gizi Masyarakat

Status gizi masyarakat Kalimantan Selatan yang perlu mendapat perhatian mencapai 1.19 % dari jumlah penduduk Kalimantan Selatan. Angka ini terdistribusi dari anemia gizi, gizi kurang dan gizi buruk. Jika kondisi ini terjadi terus menerus dan terakumulasi maka akan meningkatkan prevalensi stunting. Anemia Gizi meskipun sudah mengalami penurunan namun masih menjadi masalah terbesar bagi perempuan khususnya remaja putri dan Ibu hamil. Pada tahun 2024, persentase gizi kurang pada balita adalah 5.3%, gizi buruk pada balita sebesar 0.6% dan stunting sebesar 9,4%. Gizi kurang dan buruk tidak hanya terjadi pada balita saja, tetapi juga terjadi pada anak dan usia di atas 5 tahun dan dewasa yang memiliki riwayat penyakit kronis. Tabel berikut menggambarkan status gizi masyarakat Kalimantan Selatan khususnya berkaitan dengan remaja putri, ibu hamil dan balita.

Tabel 2.42 Persentase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota, 2024

KABUPATEN/KOTA	GIZI BURUK	GIZI KURANG	STUNTING
Tanah Laut	0,7	4,4	5,6
Kotabaru	0,5	4,8	6,8
Banjar	1,8	8,7	24,6
Barito Kuala	1,1	6,1	9,1
Tapin	0,8	5,2	12,6
Hulu Sungai Selatan	0,4	6,6	5,1
Hulu Sungai Tengah	0,5	7,6	9,3
Hulu Sungai Utara	0,1	10,1	18,7
Tabalong	0,7	7,9	7,9
Tanah Bumbu	0,3	2,7	2,7
Balangan	0,4	7,4	16,4
Kota Banjarmasin	0,1	1,3	3,0
Kota Banjarbaru	0,5	3,9	8,9
Kalimantan Selatan	0,6	5,3	9,4

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (Data E-PPGBM)

Tabel 2.43 Data Status Gizi Balita (0-59 Bulan) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	2024		
		SSGI		
		BB/U	TB/U	BB/TB
1	Tanah Laut			
2	Kotabaru	15,3	18,3	6,9
3	Banjar	22,4	26,6	12,2
4	Barito Kuala	14,2	12,3	9,4
5	Tapin	13,6	11,1	8,3
6	Hulu Sungai Selatan			

NO.	KABUPATEN/KOTA	2024		
		SSGI		
		BB/U	TB/U	BB/TB
7	Hulu Sungai Tengah			
8	Hulu Sungai Utara	23,1	20,3	10,6
9	Tabalong			
10	Tanah Bumbu	13,8	17,2	5,6
11	Balangan		13	
12	Banjarmasin	19,1	19,8	13,3
13	Banjarbaru	14,7	13,5	7,1
	Kalimantan Selatan	17,4	22,9	9,1

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan *4 Kabupaten Masih Belum Rilis SSGI

Tabel 2.44 Perkembangan Status Gizi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Prevalensi anemia gizi	%	20.13	17.4	16.4	14.44	14.44
2	Prevalensi Balita Gizi Kurang	%	10.45	10.02	7.20	6.8	17.4
3	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	1.45	1.19	1.0	0.7	9.1
4	Prevalensi Stunting	%	12.6	15.3	9.60	24.6	22.9

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Jumlah Ibu Hamil, Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, Kurang Energi Kronis (KEK), dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021–2024 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.45 Jumlah Ibu Hamil Tahun 2021 sd 2024 di Kalimantan Selatan

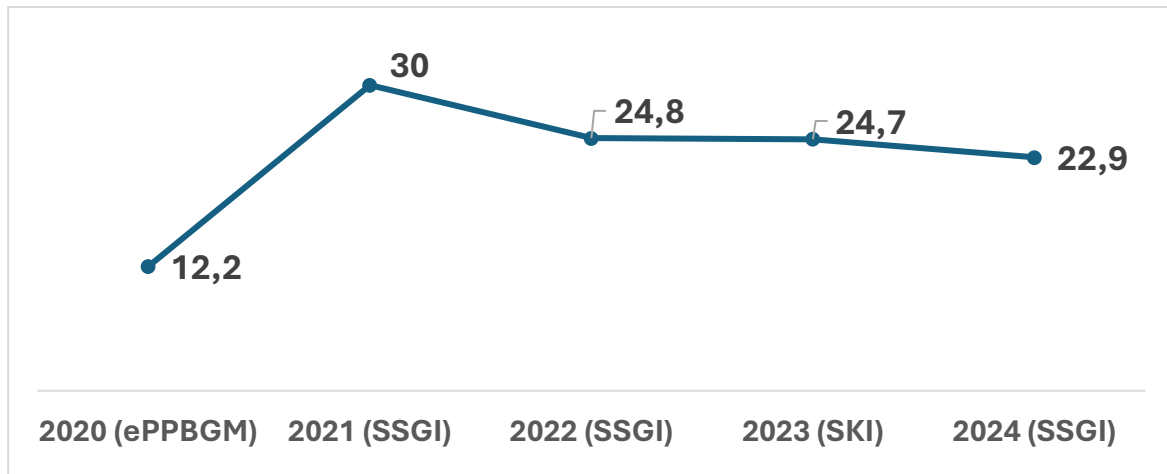
TAHUN	JUMLAH IBU HAMIL	MELAKUKAN KUNJUNGAN K1	MELAKUKAN KUNJUNGAN K4	MELAKUKAN KUNJUNGAN K6	KURANG ENERGI KRONIS (KEK)	MENDAPAT ZAT BESI (FE)
2021	80.006	76.108	65.481	-	7.889	32.074
2022	80.323	63.788	62.643	51.726	6.290	51.072
2023	80.619	45.673	44.458	36.941	6.366	55.562
2024	77.944	57.462	56.724	52.936	7.018	55.767

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Tumbuh kembang jasmani anak-anak dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di masa depan baik langsung maupun tidak langsung. Salah satu masalah yang berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak-anak adalah stunting. yaitu masalah nutrisi yang dialami sejak bayi.

Permasalahan stunting menjadi permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan berbagai program bidang kesehatan, prevalensi

stunting di Kalimantan Selatan dapat menunjukkan grafik yang membaik. Ini tercermin dari tingkat prevalensi balita di Kalimantan Selatan yang nilainya menurun, seperti yang terlihat pada grafik berikut :



Gambar 2.21 Grafik Perkembangan Prevalensi Stunting Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

Sumber : Dinas Kesehatan Prov. Kalsel, 2025

Perkembangan nilai stunting berdasarkan perhitungan ditahun 2023 menggunakan SKI, pada tahun 2024 menggunakan SSGI, rincian berdasarkan Kabupaten/Kota disajikan pada Tabel 2.46 berikut.

Tabel 2.46 Capaian Stunting di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024

KABUPATEN / KOTA	CAPAIAN STUNTING (%)	
	SKI TAHUN 2023	SSGI TAHUN 2024
Balangan	33,4	13
Banjar	30,1	26,6
Banjarbaru	12,4	13,5
Banjarmasin	26,5	19,8
Barito Kuala	15,9	12,3
Hulu Sungai Selatan	25,4	0
Hulu Sungai Tengah	13	0
Hulu Sungai Utara	36	20,3
Kotabaru	20,1	23,2%
Tabalong	18,1	0
Tanah Bumbu	25,1	17,2
Tanah Laut	41,7	0
Tapin	14,4	11,1
KALIMANTAN SELATAN	24,7	22,9

Catatan : Terdapat 4 Kabupaten yang belum rilis terkait SSGI Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

2.4.2.3 Rata rata Pengeluaran Perkapita

Pengeluaran perkapita masyarakat di suatu daerah menentukan tingkat/ kemampuan daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa yang pada akhirnya akan mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selama periode 2020-2024 pengeluaran perkapita Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang meningkat dari Rp. 12.953.000 menjadi Rp. 13.399.000. mengalami peningkatan 3.44% atau sebesar Rp. 446.000. Lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.47 Perkembangan pengeluaran perkapita di Pulau Kalimantan Tahun 2020 - 2024

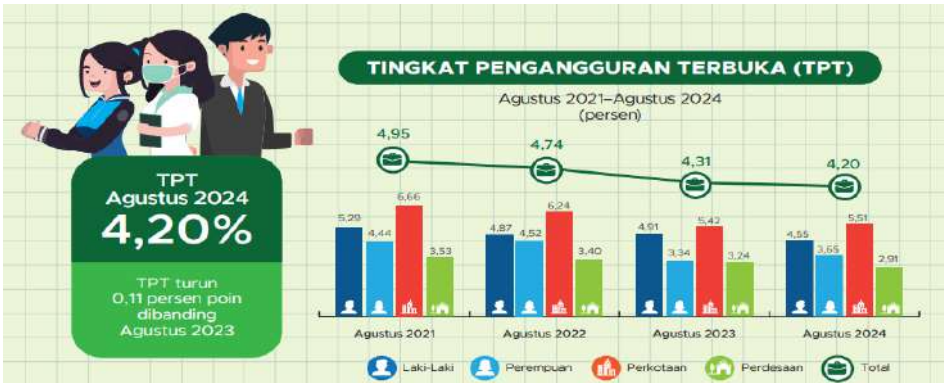
PROVINSI	2020	2021	2022	2023	2024
Kalimantan Barat	8.930	8.974	9.355	9.810	10.321
Kalimantan Tengah	11.154	11.182	11.458	11.878	12.303
Kalimantan Selatan	12.032	12.143	12.469	12.953	13.399
Kalimantan Timur	11.728	12.116	12.641	13.202	13.793
Kalimantan Utara	8.756	9.075	9.350	9.734	10.197
INDONESIA	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

Sumber: Badan Pusat Statistik Tahun 2025

Berdasarkan tabel di atas bahwa rata-rata pengeluaran perkapita tertinggi selama kurun waktu 2020-2024 adalah Provinsi Kalimantan Selatan, masing-masing Rp.12.953.000 untuk tahun 2023 dan Kalimantan Timur Rp. 13.202.000 tahun 2023. Sedangkan rata-rata pengeluaran perkapita terendah adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Utara, sebesar Rp. 9.810.000 dan Rp. 9.734.000.

2.4.2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 seperti yang terlihat pada gambar 2.18 sesuai hasil Sakernas pada Agustus adalah 4.20 persen. Angka tersebut masih lebih rendah daripada TPT Indonesia sebesar 4.91 persen.



Gambar 2.18. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kalimantan Selatan Agustus 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2024

Berdasarkan Tabel 2.48. menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan nilai TPT tertinggi pada 2024 adalah Kota Banjarmasin 6.56 persen. Kabupaten Tanah Bumbu 6.37 persen. dan Kabupaten Kotabaru 6.05 persen.

Tabel 2.48 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	TPT (PERSEN)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	3.57	3.52	4.17	3.58	3.43
Kotabaru	4.96	5.57	6.70	6.08	6.05
Banjar	3.87	3.98	2.72	2.73	2.71
Barito Kuala	2.93	3.22	3.63	3.42	3.41
Tapin	3.73	4.96	4.15	3.93	3.86
HSS	2.24	2.44	2.29	2.12	2.11
HST	3.90	3.76	3.35	3.26	3.20
HSU	4.49	4.80	4.64	3.85	3.73
Tabalong	3.07	3.43	4.46	3.60	3.44
Tanah Bumbu	6.95	6.83	6.89	6.56	6.37
Balangan	2.46	2.44	3.98	2.70	2.69
Banjarmasin	8.32	8.47	6.96	6.70	6.56
Banjarbaru	5.54	5.70	5.47	5.01	4.93
KALIMANTAN SELATAN	4.74	4.95	4.74	4.31	4.20

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Catatan: TPT tahunan yang tercatat adalah hasil Sakernas Agustus

Tabel 2.49 Kondisi Ketenagakerjaan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

TAHUN BULAN	2020		2021		2022		2023		2024	
	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS	FEB	AGS
TPT (Persen)	3.67	4.74	4.33	4.95	4.2	4.74	3.95	4.31	3.89	4.20
Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (ribu orang)	2.26 9.34	2.18 6.97	2.19 5.82	2.21 9.39	2.12 9.30	2.19 6.25	2.16 1.29	2.17 3.26	2.18 3.30	2.22 2.53
Jumlah Penduduk Pengangguran/ Mencari Kerja (ribu orang)	83. 34	103. 65	95. 00	109. 97	89. 47	104. 03	85. 30	93. 58	84. 91	93. 26

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

Salah satu isu yang mengemuka dalam ketenagakerjaan adalah pengangguran. Di satu sisi pengangguran dapat terkait dengan masalah kualitas sumber daya manusia. di sisi lain pengangguran juga dapat menggambarkan ketidakcocokan keterampilan dan kebutuhan industri. Selain itu. masalah pengangguran kemudian dapat mendorong ekspansi ekonomi. masalah ini menjadi krusial untuk dituntaskan karena berpotensi menimbulkan masalah sosial dan meningkatkan tingkat kriminalitas.

2.4.2.5 Transmigrasi

Melalui program transmigrasi dapat mendukung tujuan pembangunan nasional dan daerah yakni pemerataan jumlah penduduk. dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu. program transmigrasi berperan dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka melalui pembukaan lapangan kerja baru. yang umumnya pada sektor informal. Kalimantan Selatan memiliki lokasi Eks unit pemukiman transmigrasi yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten. yaitu Tanah Laut (24 unit), Barito Kuala (21 unit), Banjar (11 unit), Balangan (3 unit), Tanah Bumbu (17 unit), Kotabaru (25 unit), Tabalong (10 unit), Tapin (10 unit) dan Hulu Sungai Utara (5 unit). Sedangkan lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan adalah di Kabupaten Barito Kuala. (Nama Kawasan: Cahaya Baru). dan Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian. yaitu Kawasan Transmigrasi Gula Habang (Kabupaten Balangan) dan Kawasan Transmigrasi Sebamban (Kabupaten Tanah Bumbu). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.50 Lokasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian di Kalimantan Selatan (Pengukuran 2022-2023)

NO.	KAWASAN	KABUPATEN	PENGUKURAN 2022		PENGUKURAN 2023	
			IPK TRANS	STATUS	IPK TRANS	STATUS
1	Sebamban	Tanah Bumbu	52.47	Mandiri	51.91	Mandiri
2	Gula habang	Balangan	40.13	Berkembang	35.87	Berkembang
3	Cahaya Baru	Barito Kuala	62.76	Mandiri	70.00	Mandiri

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, 2024

2.4.2.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistik, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu daerah.

Tingginya TPAK menunjukkan tingginya pasokan tenaga kerja yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Adapun rincian TPAK Kalimantan Selatan berdasarkan Kabupaten/Kota pada periode 2020-2024 ditunjukkan pada berikut:

Tabel 2.51 Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kalimantan Selatan Menurut Kabupaten/Kota Selama Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK) (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	72.03	72.27	70.92	69.76	73.03
Kotabaru	64.68	67.50	63.96	69.61	65.8
Banjar	72.55	70.84	69.91	64.00	71.03
Barito Kuala	74.61	75.48	70.74	70.21	73.46
Tapin	70.17	70.31	70.31	71.89	68.12
HSS	73.15	69.25	69.55	70.17	75.77
HST	71.15	70.20	67.63	74.91	74.53
HSU	70.08	71.41	69.35	71.97	73.89
Tabalong	69.27	71.49	72.32	75.34	74.17
Tanah Bumbu	70.16	68.29	64.75	72.94	67.35
Balangan	76.50	75.38	72.54	68.57	76.91
Banjarmasin	62.07	63.19	63.15	73.16	63.93
Banjarbaru	66.82	65.95	62.46	66.16	67.23
KALIMANTAN SELATAN	69.33	69.26	67.55	67.18	70.22

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2025

Rendahnya TPAK salah satunya disebabkan oleh ketidaksesuaian pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja dunia usaha.

2.4.2.7 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja merupakan semua orang yang berumur 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja mengalami tren yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Kalimantan Selatan. Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 942.544 orang, naik sebanyak 292 orang dibanding Tahun 2023 sebanyak 942.252 orang. Untuk lebih detailnya dari tahun 2020 – 2024 bisa di lihat Tabel 2.50.

Tabel 2.52 Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tanah Laut	70.601	71.005	75.490	80.881	73.170
Kotabaru	85.915	80.329	90.468	89.146	86.176
Banjar	120.461	129.838	135.093	131.001	129.586
Barito Kuala	58.546	57.371	69.236	68.217	65.527

KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tapin	42.810	43.244	43.618	43.276	47.440
Hulu Sungai Selatan	47.609	55.062	55.056	44.395	43.498
Hulu Sungai Tengah	58.459	60.954	66.852	56.215	51.658
Hulu Sungai Utara	51.792	50.043	54.235	42.636	45.654
Tabalong	57.647	54.244	53.422	52.133	50.577
Tanah Bumbu	82.527	90.783	104.421	74.324	78.740
Balangan	22.341	23.676	26.929	26.542	23.222
Kota Banjarmasin	202.576	198.806	201.261	168.927	181.354
Kota Banjar Baru	66.148	69.769	79.005	64.559	65.942
KALIMANTAN SELATAN	967.432	985.124	1.055.086	942.252	942.544

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2025

2.4.2.8 Jumlah Penduduk Bekerja

Jumlah Penduduk Bekerja di Kalimantan Selatan merujuk pada jumlah individu yang aktif secara ekonomi di provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Ini mencakup orang-orang yang terlibat dalam berbagai jenis pekerjaan, termasuk pekerja formal di sektor publik dan swasta, pekerja informal seperti pedagang kaki lima, pekerja lepas, serta orang-orang yang mencari pekerjaan atau berusaha sendiri.

Pentingnya data tentang jumlah penduduk yang bekerja di Kalimantan Selatan adalah untuk memahami dinamika ekonomi di wilayah tersebut, mengukur tingkat ketenagakerjaan, mengevaluasi keberhasilan program-program pembangunan ekonomi, dan merencanakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja lokal. Analisis terperinci tentang jumlah penduduk yang bekerja dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan, pengusaha, dan pihak lain yang terlibat dalam pengembangan ekonomi regional.

Ketenagakerjaan menjadi era disrupsi terutama di wilayah Kalimantan Selatan, sebuah era dimana terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran yang secara fundamental mengubah semua sistem, tatanan dan *landscape* yang ada ke cara-cara baru. Pada Tahun 2024 Penduduk angkatan kerja di Kalimantan Selatan yang tercatat bekerja ada 2.222.532 Orang, mengalami peningkatan di banding Tahun 2023, yaitu 2.173.257 Orang. Lebih jelasnya bisa di lihat jumlah penduduk bekerja pada tahun 2020 sampai 2024 pada Tabel 2.53.

Tabel 2.53 Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa) di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

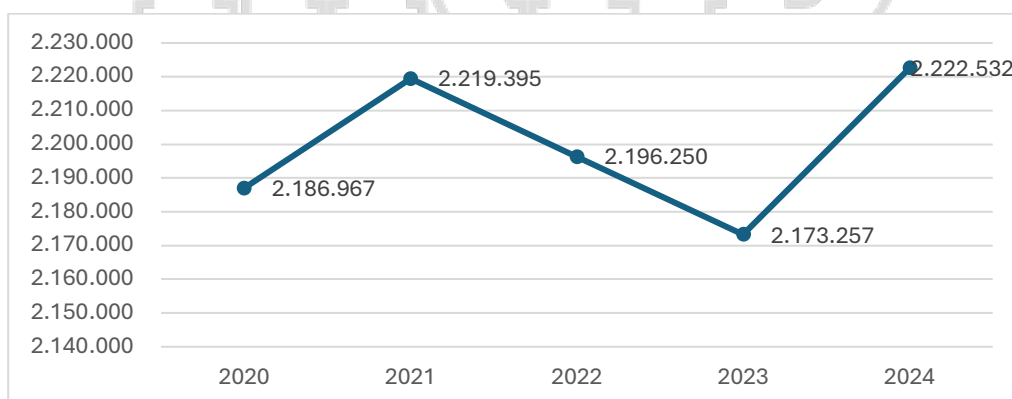
KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA (JIWA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tanah Laut	181.827	185.049	184.133	185.267	198.160
Kotabaru	157.363	166.820	160.542	158.481	165.767
Banjar	318.377	315.484	313.933	308.675	317.696
Barito Kuala	172.056	176.573	167.411	174.489	181.384

KABUPATEN	JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA (JIWA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus	Agustus
Tapin	100.696	102.432	103.316	101.793	101.375
Hulu Sungai Selatan	129.734	124.003	125.724	132.575	135.988
Hulu Sungai Tengah	144.168	143.604	139.658	144.311	151.187
Hulu Sungai Utara	121.288	124.971	122.700	130.259	129.184
Tabalong	129.928	136.032	139.542	140.493	145.224
Tanah Bumbu	194.029	195.502	191.835	162.122	162.460
Balangan	72.717	72.475	71.143	72.350	77.348
Banjarmasin	331.562	341.335	344.840	330.278	321.488
Banjar Baru	133.222	135.115	131.473	132.164	135.271
KALIMANTAN SELATAN	2.186.967	2.219.395	2.196.250	2.173.257	2.222.532

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2025

2.4.2.9 Tenaga Kerja

Pembangunan ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan fokus pada upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja. Berbagai kebijakan yang terkait dengan peningkatan Angka Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) dan menekan usia penduduk usia 15 tahun hingga 24 tahun masuk dalam angkatan kerja. Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.18 dan Tabel 2.54.



Gambar 2.22 Jumlah angkatan kerja (Jiwa) Provinsi Kalimantan Selatan, 2020-2024

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2025

Gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan dari tahun 2020 sampai dengan 2024 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 jumlah angkatan kerja sebanyak 2.186.967 jiwa meningkat menjadi 2.219.395 jiwa pada 2021, namun pada tahun 2022 dan 2023 terus turun menjadi 2.173.257 jiwa. Namun pada tahun 2024 jumlah angkatan kerja meningkat menjadi 2.222.532. Terjadi peningkatan sebanyak 35.565 jiwa selama kurun waktu 5 Tahun.

Jika dilihat pada tabel 2.54, maka angkatan kerja terbanyak pada tahun 2024 ada di Kota Banjarmasin yang mencapai 321.488 jiwa; sedangkan yang terendah adalah di Kabupaten Balangan, yaitu sebanyak 77.348 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.54 Perkembangan Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENDUDUK ANGKATAN KERJA (JIWA)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	181.827	185.049	184.133	185.267	198.160
Kota Baru	157.363	166.820	160.542	158.481	165.767
Banjar	318.377	315.484	313.933	308.675	317.696
Barito Kuala	172.056	176.573	167.411	174.489	181.384
Tapin	100.696	102.432	103.316	101.793	101.375
Hulu Sungai Selatan	129.734	124.003	125.724	132.575	135.988
Hulu Sungai Tengah	144.168	143.604	139.658	144.311	151.187
Hulu Sungai Utara	121.288	124.971	122.700	130.259	129.184
Tabalong	129.928	136.032	139.542	140.493	145.224
Tanah Bumbu	194.029	195.502	191.835	162.122	162.460
Balangan	72.717	72.475	71.143	72.350	77.348
Banjarmasin	331.562	341.335	344.840	330.278	321.488
Banjarbaru	133.222	135.115	131.473	132.164	135.271
KALIMANTAN SELATAN	2.186.967	2.219.395	2.196.250	2.173.257	2.222.532

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan 2025

2.4.2.10 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat ikut menangkal pengaruh buruk bebas dan pesatnya arus informasi serta globalisasi. Pelestarian seni dan budaya serta nilai-nilai luhur di dalam kandungannya diharapkan dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan. Adapun Jenis Seni Budaya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

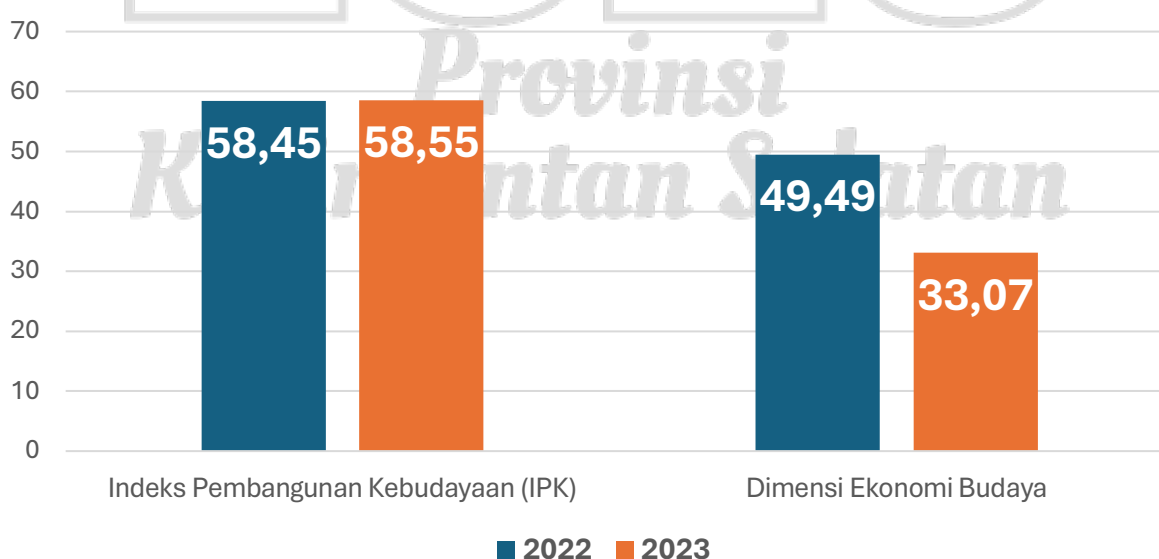
Tabel 2.55 Berbagai Seni Budaya di Kalimantan Selatan

JENIS SENI BUDAYA	SENI BUDAYA DI KALIMANTAN SELATAN
Teater Tradisi/Teater Rakyat	Mamanda. Madihin. Wayang Gung. Abdul Mulk Loba. Kuda Gepang. Cerita Damarwulan. Tantayungan. Wayang Kulit. Teater Tutar.
Seni Musik	Kuriding. Karung-karung. Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak

JENIS SENI BUDAYA	SENI BUDAYA DI KALIMANTAN SELATAN
Sinoman Hadrah dan Rudat	Sinoman Hadrah dan Rudat bersumber dari budaya yang dibawa oleh pedagang dan penda'wah Islam dari Arab dan Persia dan berkembang campur menjadi kebudayaan pada masyarakat pantai pesisir Kalimantan Selatan hingga timur
Seni Tari	Tari Tradisi : Balian. Gantar. Bakanjar. Babangai
	Tari Klasik : Baksa Kambang. Topeng. Radap Rahayu
	Tari Rakyat : Japin Sisit. Tirik Lalan. Gambut. Kuda Gepang. Rudat dll
Seni Sastra	Kuriding. Karung-karung Panting. Kintunglit. Bumbung. Suling Bambu. Musik Tiup. Salung Ulin. Kateng Kupak.
	Syair : Hikayat. Sejarah. Keagamaan
	Pantun : Biasa. Kilat. Bakait
Seni Rupa	Ornamen. Topeng dan Patung
Keterampilan	Maayam dinding palupuh. maulah atap. wantilan. maulah gula habang. maulah dodol kandangan. maulah apam barabai. maulah sasapu ijuk. manggangan. maulah wadai. maulah urung katupat. maayam janur banjar. Dll

Sumber: Dari Berbagai Sumber

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) merupakan instrumen yang disusun bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bappenas dan BPS. IPK ini diperlukan untuk mengukur capaian pembangunan kebudayaan ditingkat nasional dan daerah sesuai dengan amanat UU no 5 tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Tahun 2023 di Kalimantan Selatan sebesar 58.55%, meningkat jika dibanding tahun 2022, seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.23 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) di Kalimantan Selatan Tahun 2022 - 2023

Sumber : data.kemdikbud.go.id/

Nilai Dimensi Ekonomi Budaya Kalimantan Selatan sesuai gambar diatas pada tahun 2023 adalah 33,07, menurun sebesar 16,42 jika dibanding tahun 2022.

2.5 Aspek Pelayanan Umum

Pada aspek pelayanan umum mencakup fokus pelayanan urusan wajib dan fokus pelayanan urusan pilihan. Kondisi pelayanan wajib dapat dilihat dari pelayanan umum pada berbagai aspek sesuai dengan klasifikasi urusan yang tertera dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2.5.2 Layanan Urusan Wajib

Urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang harus diselenggarakan oleh pemerintah daerah karena berkaitan dengan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar. Secara umum, penyelenggaraan pelayanan dasar Provinsi Kalimantan Selatan memang sudah menunjukkan adanya perbaikan di setiap periodenya, namun masih perlu adanya peningkatan terutama sarana prasarana penunjang pendidikan. Sementara pelayanan non dasar sebagian besar belum menunjukkan kinerja yang membanggakan karena dalam beberapa urusan wajib non dasar ini belum memiliki NSPK.

2.5.2.1 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Capaian keberhasilan pendidikan di Kalimantan Selatan yang diukur berdasarkan angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kalimantan Selatan diukur berdasarkan capaian sebagai berikut:

a) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kalimantan Selatan secara umum menunjukkan perkembangan meningkat selama tahun 2020-2024. APS untuk jenjang SD/MI/Paket A sudah hampir mencapai 100%, artinya hampir seluruh penduduk Kalimantan Selatan yang masuk dalam kelompok usia SD/MI/Paket A masih bersekolah atau tercatat sebagai peserta didik. Sementara APS untuk jenjang SMP/MTs/Paket B sudah lebih 90%. Yang paling rendah adalah APS jenjang SMA/SMK/MA/Paket C yang masih di bawah 75%.

APS pada jenjang SMP/MTs/Paket B dan jenjang SMA/SMK/MA/Paket C belum sebaik APS pada jenjang SD/MI/Paket A. Namun demikian, APS pada kedua jenjang tersebut mengalami

peningkatan nilai secara terus menerus pada tahun 2020-2024. Adapun data rinci mengenai APS di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.56 dibawah.

Tabel 2.56 Pencapaian APS pada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Paket A	99,48	99,38	99,43	99,30	99,30
SMP/MTs/Paket B	93,04	93,5	94,01	94,12	93,7
SMU/SMK/MA/ Paket C	69,38	69,31	69,88	69,95	72,31

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel (Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalsel Tahun 2025)

b) Angka Partisipasi Kasar

Secara umum, Angka Partisipasi Kasar (APK) di Kalimantan Selatan cukup baik dan terus mengalami peningkatan. Namun, nilai APK di jenjang SD/MI/Paket A yang menurun bukan mengindikasikan bahwa terjadi kemunduran kualitas sumber daya dan partisipasi penduduk usia SD/MI/Paket A. Penurunan nilai APK tersebut berpotensi terjadi karena semakin sesuainya usia penduduk saat menempuh pendidikan jenjang SD/MI/Paket A. Secara sederhana, bisa saja terjadi pengurangan anak-anak usia dini yang bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A atau terjadi pengurangan anak-anak yang mengalami pengulangan kelas. Adapun data APK Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2020-2024 disajikan pada Tabel 2.57 berikut.

Tabel 2.57 Pencapaian APK ada Semua Jenjang dan Jenis Pendidikan di Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Paket A	103,02	101,49	101,93	102,83	102,83
SMP/MTs/Paket B	98,26	98,2	107,2	107,29	107,29
SMU/SMK/MA/Paket C	93,36	92,57	98,1	99,17	99,17

Sumber: dokumen Prov. Kalsel 2025

c) Angka Partisipasi Murni

Menurut Sistem Informasi Rujukan Statistika (SIRUSA) BPS, Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan persentase penduduk usia sekolah yang sudah dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai pada jenjang pendidikannya. Walaupun secara umum nilai APM Kalimantan Selatan berfluktuasi. namun nilai APM di jenjang SMU/SMK/MA/Paket C cukup menggembirakan

karena selalu mengalami peningkatan cukup drastis. Adapun data APM Kalimantan Selatan pada periode Tahun 2020 - 2024 disajikan pada Tabel 2.58 berikut.

Tabel 2.58 Pencapaian APM ada Semua Jenjang Dan Jenis Pendidikan Di Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
SD/MI/Paket A	92,77	92,22	93,28	93,42	93,42
SMP/MTs/Paket B	72,46	70,58	79,57	78,76	78,76
SMU/SMK/MA/Paket C	66,04	62,71	67,03	67,43	67,43

Sumber: Badan Pusat Statistik Prov. Kalsel (Buku Statistik Kesejahteraan Rakyat Kalsel Tahun 2025)

Fasilitas dasar pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dikatakan lebih dari cukup dengan ketersediaan sekolah maupun kuantitas tenaga pengajar yang dapat dilihat pada Tabel 2.59.

Tabel 2.59 Jumlah Sekolah, Murid dan Guru serta Indikatornya di Provinsi Kalimantan Selatan 2020-2024

TAMAN KANAK KANAK			
TAHUN	SEKOLAH (UNIT)	MURID (ORANG)	GURU (ORANG)
2020	2.435	96.206	10525
2021	2.483	88.548	10.304
2022	2.509	93.661	10.396
2023	2.509	93.661	10.396
2024	2.557	95.253	7.860
SEKOLAH DASAR			
TAHUN	SEKOLAH (UNIT)	MURID (ORANG)	GURU (ORANG)
2020	2.929	376.084	30.685
2021	2.938	365.957	29.872
2022	2.915	356.919	30.182
2023	2.915	356.919	30.182
2024	2.927	350.769	27.816
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA			
TAHUN	SEKOLAH (UNIT)	MURID (ORANG)	GURU (ORANG)
2020	615	112.479	9.724
2021	619	112.915	9.417
2022	625	111.622	9.359
2023	627	112.789	9.500
2024	637	114.565	9.043
SEKOLAH MENENGAH ATAS			
TAHUN	SEKOLAH (UNIT)	MURID (ORANG)	GURU (ORANG)
2020	195	67.723	4.833

2021	202	66.914	4.789
2022	205	66.465	5.033
2023	207	66.465	5.036
2024	211	69.869	4.930
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN			
TAHUN	SEKOLAH (UNIT)	MURID (ORANG)	GURU (ORANG)
2020	126	59717	3.943
2021	127	61.515	4.039
2022	126	55.319	4.142
2023	128	55.438	4.128
2024	126	56.654	4.102

Sumber: BPS Kalimantan Selatan. 2024

Jika melihat analisis berikutnya berupa rasio murid terhadap guru, maka angka ini akan menggambarkan tingkat perbandingan murid terhadap guru sebagai asumsi dasar kecukupan jumlah guru di suatu wilayah terhadap jumlah murid yang mengenyam pendidikan. Semakin tinggi rasio murid terhadap guru maka beban mengajar guru semakin berat, sehingga memungkinkan kualitas mengajar menurun, begitu juga sebaliknya. Namun analisis awal ini harus juga diperhatikan terkait distribusi penempatan hingga kualitas guru yang mengajar apakah sudah memenuhi standar kualifikasi atau belum.

Jika dilihat dari rasio murid terhadap guru secara umum, Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tenaga pengajar yang lebih dari cukup seperti yang terlihat pada Tabel 2.59. Namun dalam persebarannya perlu diperhatikan kualitas tenaga pendidik dan kependidikannya agar kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan yang berkualitas dapat terealisasi.

Pada jenjang yang lebih tinggi, di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat perguruan tinggi negeri yakni Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari, Politeknik Kesehatan (Poltekkes Banjarmasin) dan Politeknik Negeri Banjarmasin. Selain itu, terdapat juga perguruan tinggi swasta sebanyak 46 unit dan akademi swasta sebanyak 22.

2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan sedang dalam masa pengembangan dimana tahun 2024 telah ada 43 unit rumah sakit umum, 3 rumah sakit khusus, 6 rumah sakit bersalin, 242 puskesmas, 4.040 Posyandu dan 326 klinik kesehatan. Namun, kendala infrastruktur dan sarana prasarana penunjang pembangunan kesehatan tersebut masih belum maksimal sehingga terjadi disparitas derajat kesehatan antar wilayah di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun kondisi prasarana kesehatan sebagaimana pada Tabel 2.60.

Tabel 2.60 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, 2023 dan 2024

KABUPATEN/KOTA	RUMAH SAKIT UMUM		RUMAH SAKIT KHUSUS		RUMAH SAKIT BERSALIN		PUSKESMAS		KLINIK/BALAI KESEHATAN		POSYANDU	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Tanah Laut	3	3	–	–	1	1	22	22	11	15	282	282
Kotabaru	2	2	–	–	–	–	28	28	23	27	289	291
Banjarnegara	5	5	1	1	1	1	25	25	12	18	574	589
Barito Kuala	1	1	–	–	–	–	19	19	3	8	383	385
Tapin	2	2	–	–	–	–	13	13	11	14	225	226
Hulu Sungai Selatan	4	4	–	–	1	1	21	21	6	8	303	305
Hulu Sungai Tengah	1	1	–	–	–	–	19	19	7	8	368	368
Hulu Sungai Utara	2	2	–	–	–	–	13	13	7	7	340	340
Tabalong	2	2	–	–	–	–	18	18	30	34	283	290
Tanah Bumbu	2	2	–	–	1	1	14	14	25	30	208	207
Balangan	1	1	–	–	–	–	12	12	3	2	197	196
Kota Banjarmasin	9	9	2	2	2	2	28	28	77	99	395	395
Kota Banjarbaru	9	9	–	–	–	–	10	10	29	56	165	166
KALIMANTAN SELATAN	43	43	3	3	6	6	242	242	244	326	4012	4040

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu adanya tenaga kesehatan yang mendukung sarana dan prasarana kesehatan yang dapat membantu pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, pada tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 632 dokter spesialis, 1443 dokter umum, 492 dokter gigi, 10234 tenaga keperawatan, 5943 Bidan, 2655 tenaga kefarmasian dan 1088 Kesehatan Masyarakat dan 656 Kesehatan Lingkungan.

Tabel 2.61 Jumlah Dokter Spesialis, Dokter Umum, dan Dokter Gigi Menurut Sarana Pelayanan Kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan, 2024

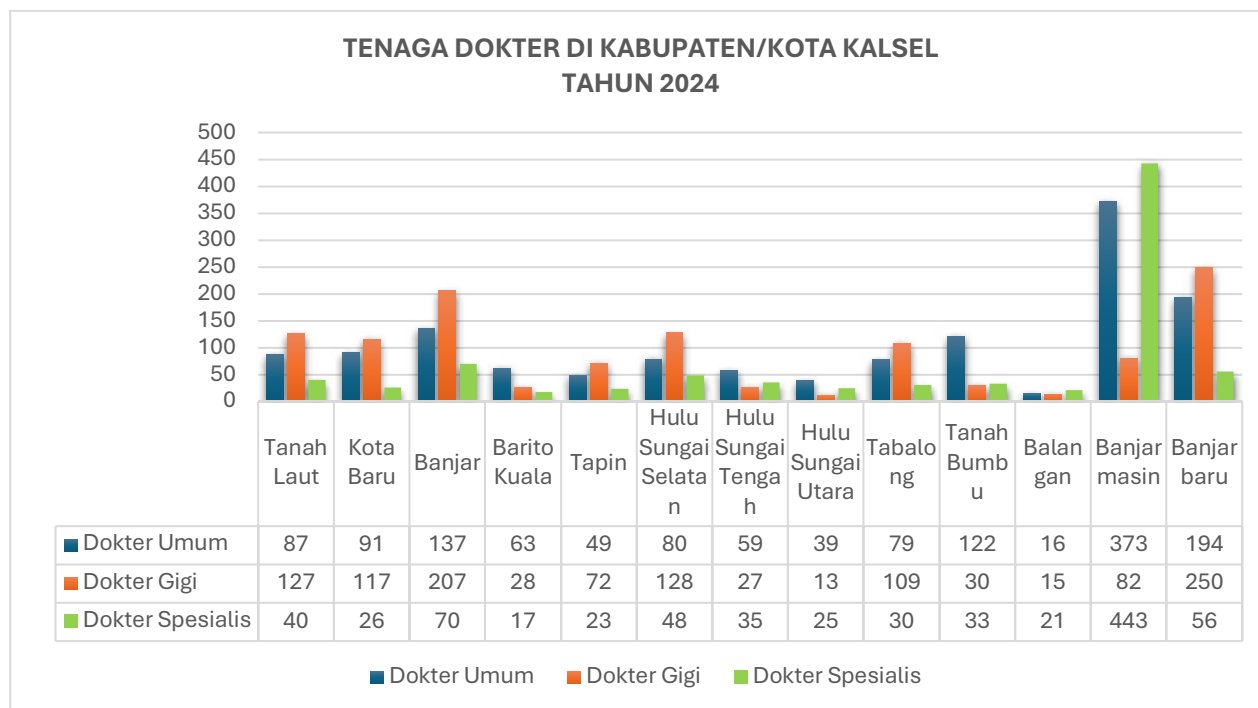
SARANA PELAYANAN KESEHATAN	DOKTER SPESIALIS	DOKTER UMUM	DOKTER GIGI
Puskesmas	0	585	300
Rumah Sakit	632	858	192
JUMLAH	632	1443	492

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2.62 Jumlah Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024

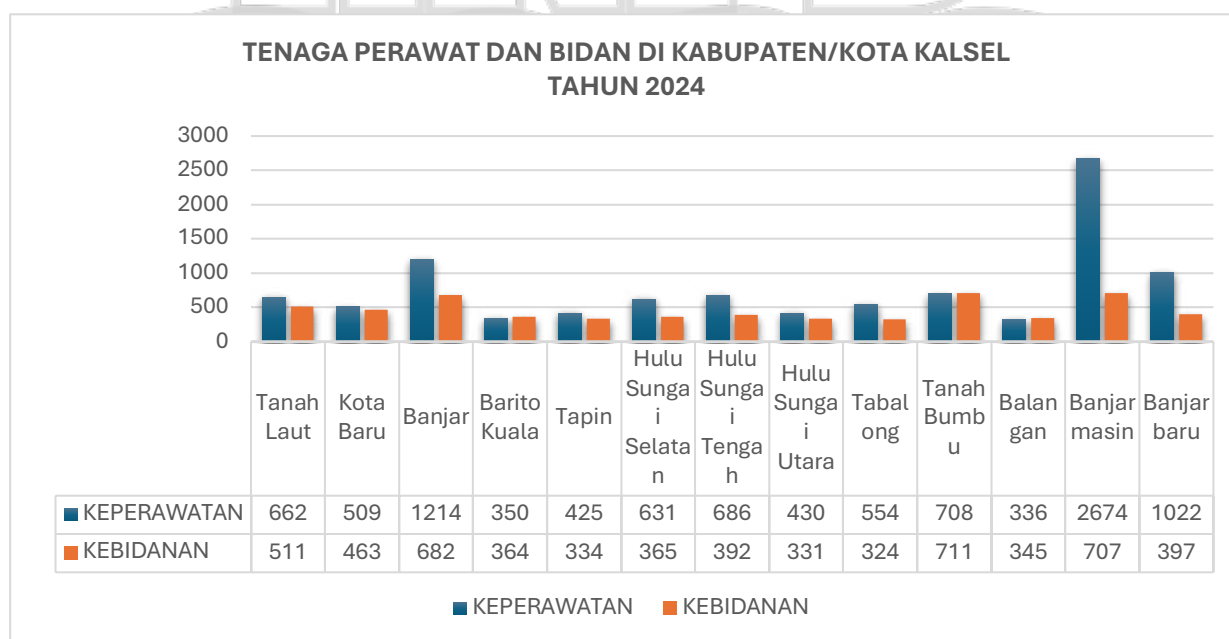
KABUPATEN/ KOTA	TENAGA MEDIS	PSIKOLOGI KLINIS	TENAGA KEPERAWATAN	TENAGA KEBIDANAN	TENAGA KEFARMASIAN	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN	TENAGA GIZI	TENAGA KETERAPIAN FISIK	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA	TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL
Tanah Laut	165	4	662	511	155	52	56	75	9	75	118	0
Kotabaru	146	0	509	463	147	126	56	84	4	55	83	0
Banjar	271	9	1214	682	244	116	70	126	25	150	204	0
Barito Kuala	108	0	350	364	69	51	31	49	3	40	56	0
Tapin	96	1	424	334	104	58	35	55	8	64	80	0
Hulu Sungai Selatan	164	7	631	365	170	57	39	84	9	112	107	0
Hulu Sungai Tengah	140	2	691	411	134	69	53	83	8	68	103	0
Hulu Sungai Utara	78	2	465	340	96	66	42	81	6	57	87	0
Tabalong	139	1	555	324	158	50	39	59	18	73	114	0
Tanah Bumbu	186	1	708	711	159	81	25	57	8	52	110	0
Balangan	71	0	328	336	83	52	33	37	4	52	66	0
Kota Banjarmasin	979	16	2674	707	782	184	104	177	63	317	532	0
Kota Banjarbaru	334	6	1023	395	354	126	73	83	49	178	267	0
KALIMANTAN SELATAN	2877	49	10234	5943	2655	1088	656	1050	214	1293	1927	0

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 2025



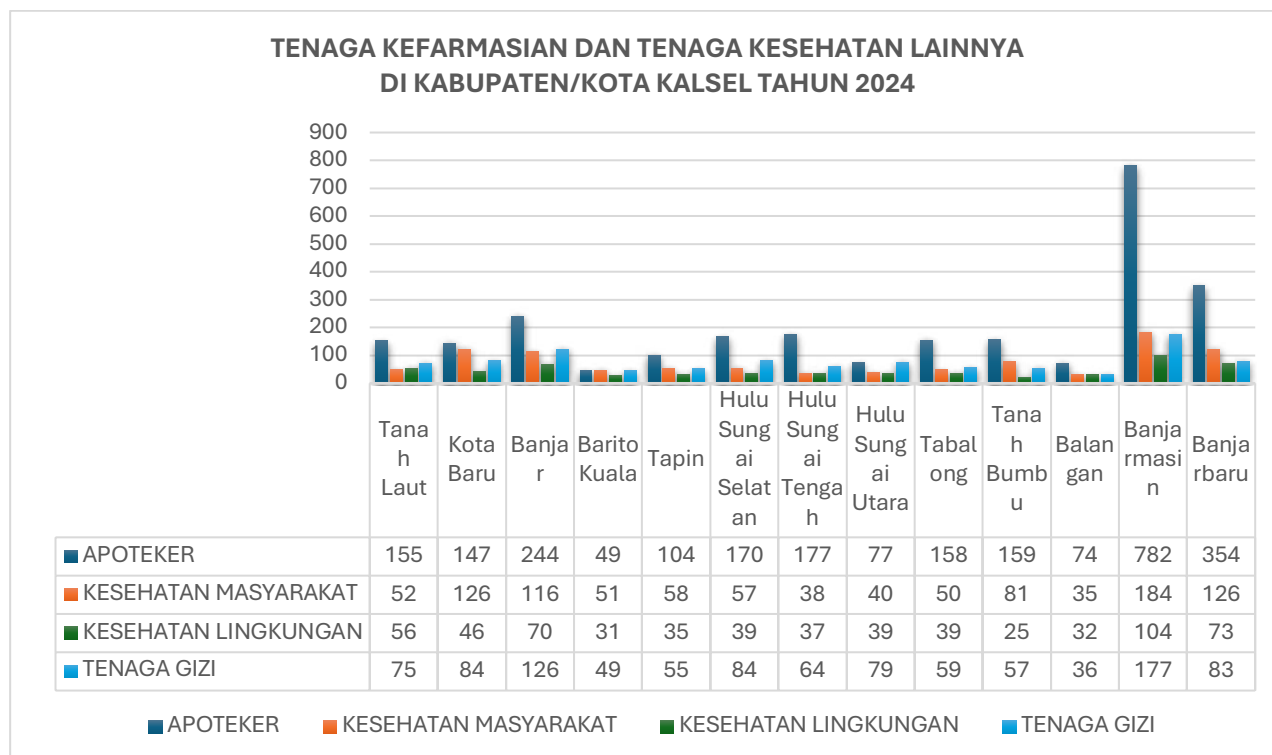
Gambar 2.24 Jumlah Tenaga Dokter di Kabupaten/Kota Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2025



Gambar 2.25 Jumlah Tenaga Keperawatan dan Bidan di Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan 2025



Gambar 2.26 Jumlah Kefarmasian dan Tenaga Kesehatan di Kabupaten/Kota Tahun 2024

Sumber: Dinas Kesehatan Prov. Kalimantan Selatan, 2025

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang meliputi pelaksanaan kegiatan pada bidang jalan, jembatan, irigasi, pengelolaan sumberdaya air, air minum, sanitasi, bangunan gedung, bangunan dan lingkungannya, penataan ruang, pertanahan, dan jasa konstruksi.

a) Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

Konektivitas merupakan hal penting yang mendukung daya tahan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Konektivitas mencakup pada beberapa elemen yang salah satunya merupakan aksesibilitas. Ketersediaan infrastruktur konektivitas yang memadai memberikan implikasi dalam peningkatan mobilitas manusia dan barang, dimana aktivitas ini berpengaruh besar terhadap kelancaran pergerakan logistik. Sehingga secara langsung maupun tidak langsung, pergerakan ini mampu meningkatkan aktivitas ekonomi, serta mempersempit ketimpangan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Tabel 2.63 Data Terkait Rasio Konektivitas Provinsi Tahun 2024

NO	PUSAT KEGIATAN	NAMA PUSAT KEGIATAN YANG TERHUBUNG	JUMLAH JALAN EKSISTING
1	PKN Banjarmasin	Terminal Tipe A	1
		Pelabuhan Trisakti Banjarmasin	1
		PKW Marabahan	1
		PKW Martapura	1
2	Terminal Tipe A	PKN Banjarbaru dan Perkotaan Martapura	1
		Bandar Udara Syamsuddin Noor	1
		PKL Pelaihari	1
3	Pelabuhan Trisakti Banjarmasin (Utama)	PKN Banjarbaru dan Perkotaan Martapura	1
4	Bandar Udara Syamsuddin Noor (Pengumpul)	PKN Banjarbaru dan Perkotaan Martapura	1
5	PKN Banjarbaru dan Perkotaan Martapura	PKW Martapura	1
		Geopark - Geosite Intan Cempaka	1
		PKL Mentewe	1
		Geopark - Geosite Tahura dll	1
		PKL Simpang Empat Banjar	1
6	PKW Marabahan	Pelabuhan Margasari Baru (Pengumpul)	1
		PKL Tabukan	0
		Terminal Tipe A	1
7	PKW Martapura	PKL Simpang Empat Banjar	1
8	PKL Simpang Empat Banjar	PKL Rantau	1
		PKL Rantau	0
9	PKL Rantau	PKL Kandangan	1
		Bendungan Tapin	1
10	PKL Kandangan	PKW Amuntai	1
		Pelabuhan Margasari	1
		PKL Mentewe	1
		PKL Barabai	1
		KSPN Loksado	1
11	Pelabuhan Margasari Baru (Pengumpul)	PKL Rantau	2
		PKW Amuntai	1
12	PKL Barabai	PKL Paringin	1
		PKW Amuntai	1
13	PKW Amuntai	PKL Kelua	1
		PKL Paringin	1
14	PKL Kelua	PKL Tanjung	1
15	PKL Paringin	PKL Tanjung	1
16	PKL Tanjung	KI Seradang	1
		PKL Jaro	1

NO	PUSAT KEGIATAN	NAMA PUSAT KEGIATAN YANG TERHUBUNG	JUMLAH JALAN EKSISTING
		Bandara Kambitin (Rencana)	0
17	PKL Jaro	KSP (KPI Seradang)	1
18	PKL Pelaihari	Wisata Takisung (KSP Pesisir)	1
		Wisata Batakan (KSP Pesisir)	1
		KSP (KI Jorong dan Sekitarnya)	1
19	KSP (KI Jorong dan Sekitarnya) dan Pelabuhan Pelaihari/Swarangan (Pengumpun)	Pelabuhan Satui (Pengumpul)	1
20	Pelabuhan Satui (Pengumpul)	Wisata Angsana (KSP Pesisir)	1
21	Wisata Angsana (KSP Pesisir)	Pelabuhan Pagatan (Pengumpun)	1
22	Pelabuhan Pagatan (Pengumpun)	PKL Simpang Empat-Batulicin, Bandar Udara Bersujud, Pelabuhan Simpang Empat	1
23	PKL Simpang Empat-Batulicin, Bandar Udara Bersujud, Pelabuhan Simpang Empat	KEK Mekar Putih dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih	0
		KSP (Kawasan Sekitar Industri Batulicin)	1
24	PKL Mentewe	PKL Simpang Empat-Batulicin, Bandar Udara Bersujud, Pelabuhan Simpang Empat	1
			1
25	KSP (Kawasan Sekitar Industri Batulicin)	KSP (KEK Setangga) dan Pelabuhan Setangga	1
		PKL Sengayam	1
26	PKW Kotabaru	KEK Mekar Putih dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih	1
		Bandara Gusti Sjamsir Alam (Pengumpul) dan Pelabuhan Stagen	1
27	PKL Sengayam	Pelabuhan Tanjung Batu	0
		Pelabuhan Gunung Batu Besar	0
28	Bandara Gusti Sjamsir Alam (Pengumpul) dan Pelabuhan Stagen	KEK Mekar Putih dan Pelabuhan Internasional Mekar Putih	1
29	Wisata Pasar Terapung (Geopark Meratus)	PKL Pelaihari	1
	TOTAL		54

Sumber: Bappeda Prov Kalsel, 2025

Penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup kewenangan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional, berdasarkan data kemandapan jalan yang dihimpun dari kementerian PUPR kemandapan jalan Nasional tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan untuk panjang jalan Nasional Sepanjang 1204.2 Km dengan jalan mantap sepanjang 1159.8 Km dan jalan Belum Mantap sepanjang 44.4 Km dengan persentase jalan mantap sebesar 96.31 %

Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0150/KUM/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan yang semula 756.12 km menjadi 927.41 km dengan kondisi mantap 82.04 % pada Tahun 2024 dengan Panjang jalan mantap sebesar 760.84 Km dan masih ada sebesar 166.57 Km kondisi belum mantap. Adapun capaian kondisi jalan mantap Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah diatas target Nasional yaitu 75% untuk kondisi mantap jalan daerah Kewenangan Provinsi.

b) Sumber Daya Air

Wilayah Sungai (WS) di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2015. terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah sungai yaitu :

1. WS Barito. merupakan wilayah sungai kewenangan nasional yang dengan luas wilayah 80.370.98 Km². terdiri dari DAS Kapuas. DAS Barito. DAS Maluka. dan DAS Tabanio.
2. WS Cengal – Batulicin. merupakan wilayah sungai kewenangan provinsi dengan luas wilayah 14.546.47 Km². terdiri dari 62 Sub DAS dengan luas DAS terbesar adalah DAS Sampanahan.
3. WS Pulau Laut. merupakan wilayah sungai kewenangan kabupaten. dengan luas wilayah 2.023.76 Km². terdiri dari 71 Sub DAS

Pengelolaan sumber daya air di Provinsi Kalimantan Selatan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air yang terpadu. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas menjadi salah satu hal penting untuk menjaga kondisi kestabilan pengelolaan sumber daya air yang terpadu untuk memberikan optimalisasi dalam pemenuhan infrastruktur dasar. Salah satu upaya pengelolaan adalah melalui pembangunan infrastruktur ketahanan kebencanaan yaitu pengelolaan pengendali daya rusak air sebagai salah satu upaya meminimalkan dampak kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya bencana yang disebabkan oleh daya rusak air.

DAS Barito merupakan DAS terbesar di Kalimantan Selatan dengan luas sebesar 1.866.785 Ha atau 49.61% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. DAS ini terdiri dari 25 Sub DAS. dengan Sub DAS utama yaitu Sub DAS Barito Hilir Sub DAS Alalak Sub DAS Martapura Sub DAS Negara. Sub DAS Balangan Sub DAS Tabalong dan Sub DAS Batang Alai. Pada awal Tahun 2020. intensitas hujan yang tinggi sampai pada kategori ekstrim terjadi pada wilayah DAS Barito yang

menyebabkan kenaikan genangan air dan kenaikan debit air sungai yang drastis. sehingga berdampak pada terjadinya banjir besar di 11 kabupaten/kota .

Pada DAS Cengal – Batulicin yang merupakan bagian dari WS kewenangan provinsi memiliki permasalahan dominan setiap tahunnya berupa kejadian banjir/genangan dengan ketinggian bervariasi pada wilayah hilir aliran sungai. Adapun pada tahun 2019 kondisi banjir terparah terjadi di daerah Kecamatan Kusan Hulu yang mengalami genangan seluas 10.097 Ha. seperti yang terlihat pada Tabel 2.64.

Tabel 2.64 Luasan Banjir/Genangan di DAS kewenangan Provinsi Tahun 2022

NAMA DAS	LUAS DAS (HA)	GENANGAN	
		LUAS (HA)	KECAMATAN
DAS Swarangan	375.32	31.23	Jorong
DAS Asam-asam	512.83	1.371.08	Jorong. Batu Ampar
DAS Kintap	670.16	8.189.81	Jorong. Kintap
DAS Cuka	17.59	693.60	Satui
DAS Sebamban	337.96	3.760.37	Sungai Loban. Kuranji. Satui. Angsana
DAS Kusan	1.735.52	21.951.25	Sungai Loban. Kuranji. Kusan Hilir. Kusan Hulu. Batulicin
RTLHDAS Batulicin	1.381.42	0.00	Mentewe. Batulicin. Simpang Empat. Karang Bintang
DAS Cantung	1.465.45	0.00	Kelumpang Hulu
DAS Sampanahan	1.791.97	0.00	Sungai Durian
DAS Cengal	1.177.74	0.00	Pamukan Utara. Pamukan Selatan
TOTAL	9.465.96	35.997.34	

Sumber: Kementerian PUPR. 2022

Adapun bentuk pengelolaan sumber daya air lainnya adalah terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi. yang dimaksud dengan irigasi adalah usaha penyediaan. pengaturan. dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan. irigasi rawa. irigasi air bawah tanah. irigasi pompa. dan irigasi tambak. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi. air irigasi. manajemen irigasi. kelembagaan pengelolaan irigasi. dan sumber daya manusia. Sedangkan. daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jaringan irigasi dalam hal ini meliputi saluran. bangunan. dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan. pembagian. pemberian. penggunaan. dan pembuangan air irigasi.

Adapun luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total $\pm$ 359.595 Ha. dengan persentase 18.53% merupakan kewenangan pusat. 15.85% kewenangan provinsi. dan 55.62% merupakan kewenangan kabupaten/kota.

Tabel 2.65 Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI di Kalimantan Selatan

KEWENANGAN	LUAS AREA (HA)	PERSENTASE	JUMLAH DI/DR
Pusat	106.039	29.65%	22
Provinsi	56.295	15.74%	24
Kabupaten/Kota	195.234	54.60%	633
TOTAL	357.568	100.00%	679

Sumber: Permen PUPR maNomor 14/PRT/M/2015

Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya ssws. Kerusakan irigasi ini antara lain disebabkan oleh usia infrastruktur irigasi. gangguan alam (Benca Alam). maupun pengelolaan irigasi yang kurang optimal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak pada produksi pangan di Kalimantan Selatan. Peningkatan Infrastruktur irigasi harus menjadi perhatian bersama guna untuk menjadikan Kalimantan Selatan dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik di daerah dan nantinya Kalimantan Selatan juga mampu menjadi penyuplai pangan untuk mendukung Ibu Kota Negera (IKN) Indonesia

Tabel 2.66 Pembagian Kewenangan Pengelolaan DI/DIR di Kalimantan Selatan berdasarkan One Map I

KEWENANGAN	LUAS AREA (HA)	PERSENTASE	JUMLAH DI/DR
Pusat	106.039	29.65%	22
Provinsi	56.295	15.74%	24
Kabupaten/Kota	195.234	54.60%	633
TOTAL	357.568	100.00%	679

Sumber: Permen PUPR maNomor 14/PRT/M/2015

Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan

irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya ssws. Kerusakan irigasi ini antara lain disebabkan oleh usia infrastruktur irigasi. gangguan alam (Benca Alam). maupun pengelolaan irigasi yang kurang optimal. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus karena akan berdampak pada produksi pangan di Kalimantan Selatan. Peningkatan Infrastruktur irigasi harus menjadi perhatian bersama guna untuk menjadikan Kalimantan Selatan dapat memenuhi kebutuhan pangan domestik di daerah dan nantinya Kalimantan Selatan juga mampu menjadi penyuplai pangan untuk mendukung Ibu Kota Negera (IKN) Indonesia.

Tabel 2.67 Indeks Kinerja Sistem Irigasi Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024

KEWENANGAN	UTAMA	TERSIER	GABUNGAN
Provinsi	43.15	24.50	37.69

Sumber : ePAKSI. 2024

Sebagai upaya penyediaan sumber air baku di kabupaten/kota untuk menjaga keseimbangan antara laju pertumbuhan penduduk dengan penyediaan air bersih, diperlukan alternatif-alternatif penyediaan air baku, antara lain melalui pembangunan infrastruktur sumber daya air antara lain bendungan/bendung, embung dan tampungan-tampungan air lainnya.

a. Capaian Akses Layanan Air Minum Provinsi Kalimantan Selatan

Akses Layanan Air minum Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2021 s.d 2024 terdiri dari jaringan Perpipaan dan bukan Jaringan Perpipaan, dengan grafik tersaji pada gambar berikut :

Tabel 2.68 Data Capaian Air Minum Prov Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024

NO	TAHUN	LAYANAN %
1	2021	74.17
2	2022	81.43
3	2023	83.50
4	2024	84.25

Sumber Data: DPUPR, 2024



Gambar 2.27 Grafik Capaian Air Minum (%) Prov Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024

Sumber Data: DPUPR, 2024

Berdasarkan gambar diatas, Capaian Akses Layanan air minum Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 74,17% sampai dengan tahun 2024 sebesar 84,25%, menunjukkan bahwa trend capaian akses air minum di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perbaikan dan trend Positif dalam pelaksanaan kegiatan layanan akses air minum.

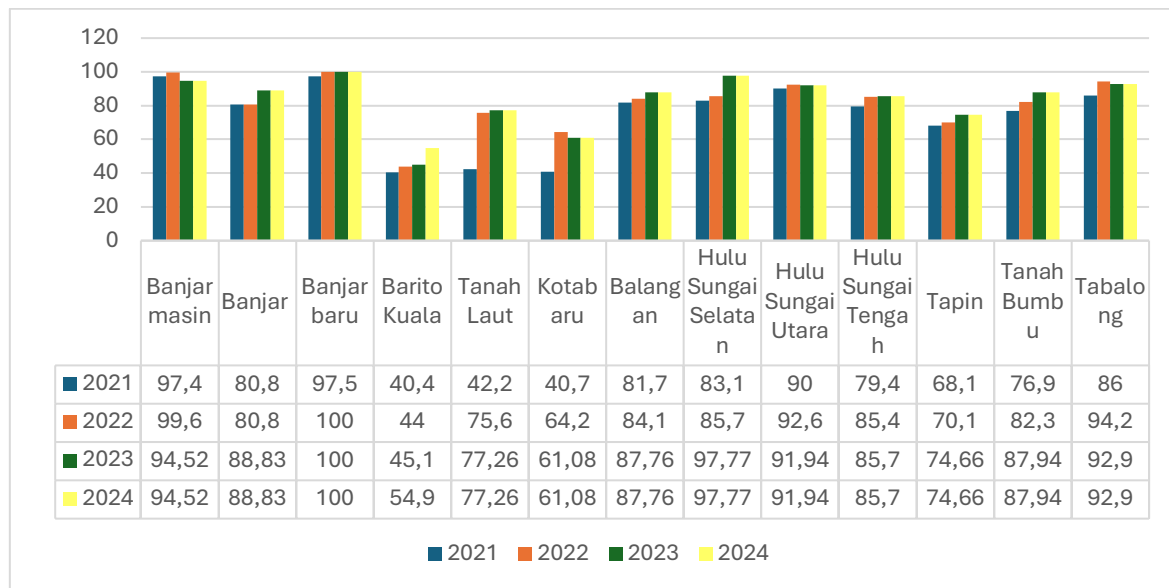
b. Capaian Akses Layanan Air Minum 13 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

Adapun Capaian Akses layanan air minum di 13 Kabupaten kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.69 Time Series Capaian Akses Layanan Air Minum Kabupaten/kota Tahun 2021 – 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN			
		2021	2022	2023	2024
1	Banjarmasin	97.4	99.6	94.52	94,52
2	Banjar	80.8	80.8	88.83	88,83
3	Banjarbaru	97.5	100	100	100
4	Barito Kuala	40.4	44	45.1	54,9
5	Tanah Laut	42.2	75.6	77.26	77,26
6	Kotabaru	40.7	64.2	61.08	61,08
7	Balangan	81.7	84.1	87.76	87,76
8	Hulu Sungai Selatan	83.1	85.7	97.77	97,77
9	Hulu Sungai Utara	90	92.6	91.94	91,94
10	Hulu Sungai Tengah	79.4	85.4	85.7	85,7
11	Tapin	68.1	70.1	74.66	74,66
12	Tanah Bumbu	76.9	82.3	87.94	87,94
13	Tabalong	86	94.2	92.9	92,9

Sumber Data: Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan, 2024



Gambar 2.28 Grafik Capaian Akses Layanan Air Minum 13 Kabupaten/kota Tahun 2021 – 2024

Sumber Data: DPUPR, 2024

Seperti yang dapat dilihat pada Tabel dan Gambar diatas, sebagian besar Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan, pada 8 Kabupaten Capaian Akses Layanan Air Minum dibawah angka 90% yaitu Kabupaten Banjar, Barito Kuala, Tanah Laut, Kotabaru, Balangan, Hulu Sungai Tengah, Tapin dan Tanah Bumbu. Adapun angka ini adalah angka yang dihimpun pada tahun 2024 dengan permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten/Kota dalam meningkatkan akses layanan air minum sebagai berikut :

- Sumber air baku yang kualitasnya rendah (tercemar dan berlumpur).
- Sumber air baku yang turun kuantitasnya di musim kemarau.
- Kondisi sarana prasarana jaringan perpipaan yang sudah lama dan rusak.
- Angka kebocoran yang cukup tinggi > 24%.
- Biaya produksi yang tinggi.
- Tarif yang masih rendah.
- Masyarakat yang masih lebih suka memakai Bukan Jaringan Perpipaan dibanding Jaringan Perpipaan .
- Uji kualitas dari pemeriksa eksternal yang belum memadai.
- Pemenuhan jam operasional masih di bawah 24 jam.
- Untuk mencapai tingkat layanan aman masih diperlukan peran pemerintah daerah dan Pemerintah Pusat khususnya dalam menambah kuota uji kualitas di tingkat pelanggan

Adapun akses capaian air minum yang dihimpun terkait pendataan diatas dari dinas PUPR Provinsi Kalimantan Selatan ini hanya berbicara pada hasil akhir untuk air minum dengan standar

layak dimana untuk akses air minum dengan standar aman diperlukan pendataan yang di verifikasi oleh hasil laboratorium kesehatan dengan 19 (Sembilan Belas) variabel standar baku mutu berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan, dimana sampel pengujian air diambil secara langsung di sambungan rumah.

c. Pengelolaan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Banjarbakula

Provinsi Kalimantan Selatan melalui Pelayanan SPAM Regional Banjarbakula telah melakukan layanan air baku dan air curan kepada 5 Kabupaten/kota yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, Banjar dan Kabupaten Barito Kuala. Adapun Layanan SPAM Banjarbakula sebagai berikut:

Tabel 2.70 Kapasitas Distribusi Layanan SPAM Banjarbakula Prov Kalsel

NO.	INFRASTRUKTUR	KAPASITAS
1	Intake Karang Intan	1200 L/detik
2	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pinus I	250 L/detik
3	Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pinus II	500 L/detik

Sumber Data: Balai Pengelolaan Air Minum Banjarbakula Prov.Kalsel

Tabel 2.71 Data Distribusi layanan SPAM Banjarbakula

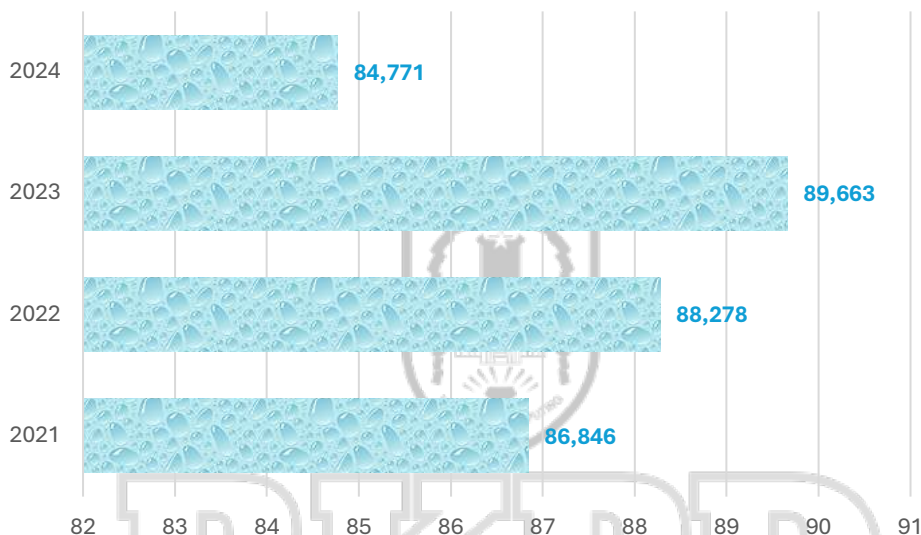
NO	INFRASTRUKTUR	LAYANAN AIR BAKU (L/DET)	KOMITEM RENCAN PENYERAPAN AIR BAKU (L/DET)	LAYANAN AIR CURAH (L/DET)	KOMITMEN RENCANA PENYERAPAN AIR CURAH (L/DET)
	Layanan Regional	1200		750	
1	PTAM Intan Banjar	170		330	270
2	PTAM Banua Berkah (Kab Tanah Laut)			30	120
3	PTAM Bandarmasih	250	200		
	Total	420	200	360	390
	IDEL SPAM Banjarbakula	580		390	

Sumber Data: DPUPR, 2023

Pemerintah Provinsi Kalimantan memiliki wewenang dalam melakukan distribusi air minum secara regional kepada kabupaten kota di lingkup Banjarbakula, dimana BPAM Banjarbakula melakukan pengolahan air yang diambil dari Intek Karang Intan untuk dilakukan pengolahan air secara aman berdasarkan baku mutu air yang di atur berdasarkan peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan dan dilakukan distribusi air kepada offtaker PT.AM di lingkup Banjarbakula dan mereka yang akan mendistribusikan kepada pelanggan melalui sambungan rumah tangga.

d. Pencapaian Akses Sanitasi

Ruang lingkup sanitasi pada sektor pekerjaan umum meliputi pengelolaan limbah rumah tangga, sistem jaringan pengelolaan IPAL komunal, dan seterusnya. Pada sisi lingkungan, sanitasi juga terkait dengan persampahan mulai dari rumah tangga hingga TPST, dan lain-lain.



Gambar 2.29 Capaian Air Limbah Domestik Akses Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2025

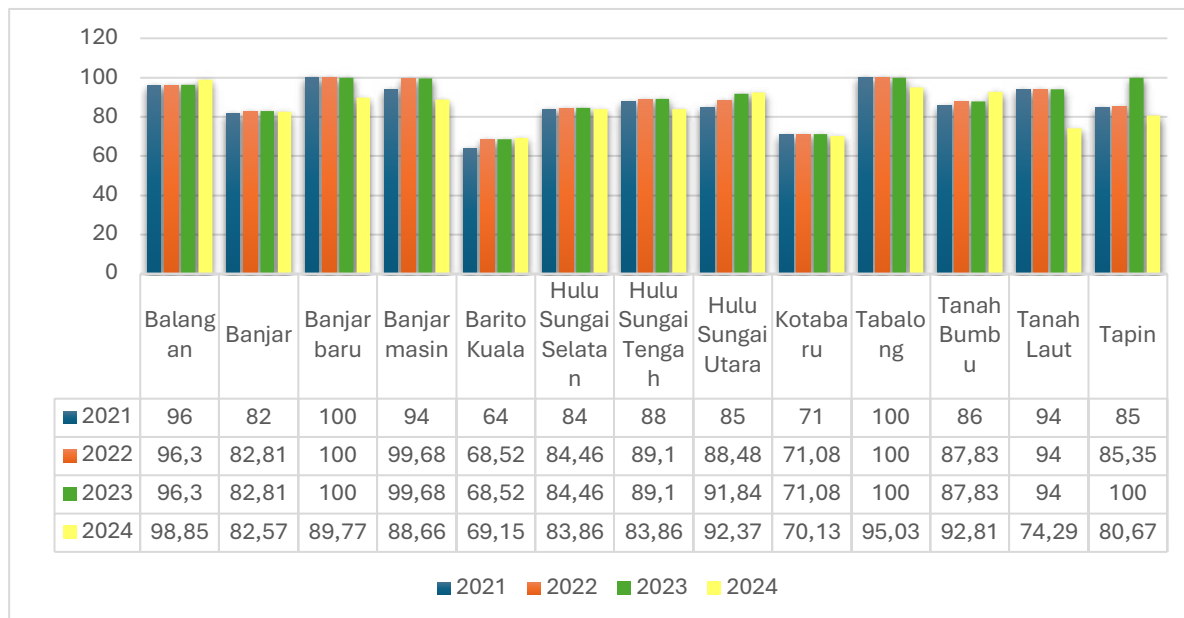
Berdasarkan Gambar, capaian akses air limbah domestik layak Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sebesar 84,771% naik sebesar 4,892% dari capaian tahun 2023 sebesar 84,771 %. Dari grafik dapat dilihat bahwa trend pencapaian akses capaian air limbah domestik di Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan setiap.

Tabel 2.72 Kondisi Pencapaian Cakupan Akses Air Limbah Domestik Layak Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2024

KAB/KOTA	PENCAPAIAN CAKUPAN AIR LIMBAH DOMESTIK AKSES LAYAK			
	2021	2022	2023	2024
Balangan	96	96,3	96,3	98,85
Banjar	82	82,81	82,81	82,57
Banjarbaru	100	100	100	89,77
Banjarmasin	94	99,68	99,68	88,66
Barito Kuala	64	68,52	68,52	69,15
Hulu Sungai Selatan	84	84,46	84,46	83,86
Hulu Sungai Tengah	88	89,1	89,1	83,86
Hulu Sungai Utara	85	88,48	91,84	92,37
Kotabaru	71	71,08	71,08	70,13
Tabalong	100	100	100	95,03
Tanah Bumbu	86	87,83	87,83	92,81

KAB/KOTA	PENCAPIAN CAKUPAN AIR LIMBAH DOMESTIK AKSES LAYAK			
	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	94	94	94	74,29
Tapin	85	85,35	100	80,67
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	86,846	88,278	89,663	84,771

Sumber Data : DPUPR Provinsi Kalsel, 2025



Gambar 2.30 Capaian Akses Air Limbah Domestik Layak Kab/Kota se-Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber: DPUPR Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Bedasarkan data akses Air Limbah Domestik Kabupaten/kota yang dihimpun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024, data tersebut fokus pendataan pada akses sanitasi Layak dimana standar sanitasi layak berdasarkan ketentuan memiliki kloset menggunakan leher angsa dan memiliki tempat pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem air limbah (SPAL)/ terpusat .

Adapun yang masih menjadi perhatian adalah standar pada tahun 2025- 2045 akses sanitasi berubah yang awalnya memiliki standar layak menjadi akses rumah tangga dengan sanitasi aman yang mana memiliki syarat dilaukan penyedotan setidaknya sekali dalam 3-5 tahun terakhir dan diolah dalam Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), ini menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk fokus dalam pengelolaan limbah domestik yang terjadwal dengan skema Penyedotan Lumpur Tinja Terjadwal.

e. Pembangunan Infrastruktur Pengelolaan Persampahan

Sampah merupakan salah satu permasalahan kompleks yang dihadapi oleh masyarakat. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya perlu

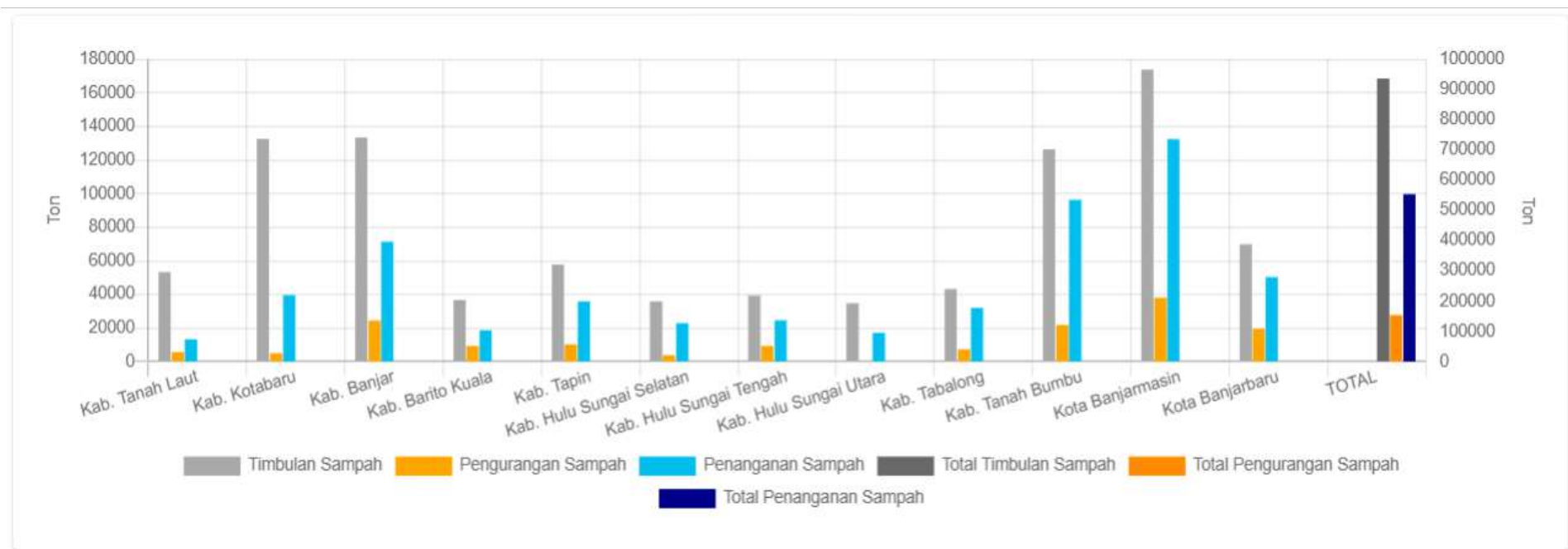
didukung dengan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.



Tabel 2.73 Realisasi Pengelolaan Persampahan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan 2024

N O	KABUPATEN/ KOTA	TIMBULAN SAMPAH (TON/TAHUN)	PENGURANGA N SAMPAH (TON/TAHUN)	% PENGURANGA N SAMPAH	PENANGANA N SAMPAH (TON/TAHUN)	% PENANGANA N SAMPAH	SAMPAH TERKELOLA (TON/TAHUN)	% SAMPAH TERKELOLA	DAUR ULANG SAMPAH (TON/TAHUN)	BAHAN BAKU SAMPAH (TON/TAHUN)	RECYCLIN G RATE
		A	B	B/A	C	C/A	B+C	(B+C)/A	D	E	(D+E)/A
1	Kab. Tanah Laut	53161.08	5559.41	10.46	13207.71	24.83	18767.11	35.3	2051.4	1270.04	6.24
2	Kab. Kotabaru	66175.43	2411.76	3.64	19672.04	29.72	22081.79	33.37	2079.85	11.14	3.16
3	Kab. Banjar	133381.04	24368.64	18.27	17166.25	12.87	41534.89	31.14	3358.9	3300.03	5
4	Kab. Barito Kuala	36602.1	9103.09	24.89	20467.71	55.92	29570.79	80.78	1708.2	1384.07	8.45
5	Kab. Tapin	28892.38	5098.42	17.65	17809.81	61.64	22908.23	79.29	4881.59	340.91	18.07
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	35624.29	3652.76	10.25	22726.73	63.8	26379.49	74.05	2714.16	2469.23	14.55
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	39180.56	9118.98	23.27	24468.31	62.43	33587.29	85.7	8645.96	6056	37.63
8	Kab. Hulu Sungai Utara	34609.15	14.66	0.04	17014.8	49.16	17029.45	49.2	1044.88	58	3.18
9	Kab. Tabalong	43092.79	7223.4	16.76	31874.01	73.98	39097.41	90.74	7370	170	17.54
10	Kab. Tanah Bumbu	63206.32	10786.53	17.07	40786.66	64.52	51573.2	81.61	10655.36	87	17
11	Kota Banjarmasin	173647.25	37910.53	21.83	132237.25	76.15	170147.78	97.98	8381.66	337.19	5.01
12	Kota Banjarbaru	69690.95	19471.52	27.94	50193.7	72.02	69665.22	99.96	16049.97	144.68	23.24

Sumber : Sistem Informasi Persampahan Nasional Tahun 2024



Gambar 2.31 Capaian Akses Persampahan kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber : Sistem Informasi Persampahan Nasional Tahun 2024

Provinsi
Kalimantan Selatan

Salah satu infrastruktur yang telah dibangun untuk mendukung akses persampahan adalah melalui pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Regional Banjarbakula yang merupakan pelayanan persampahan dengan sistem Sanitary Landfill yang melayani 2 Kota dan 3 Kabupaten yang tercakup di dalam Kawasan Strategis Nasional Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. TPA Regional Banjarbakula memiliki total luas area 32 Ha dan telah dikembangkan seluas 11 Ha. Kapasitas yang mampu ditampung oleh TPA ini sebesar 275 ton/hari. Untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan persampahan terutama pada kawasan perkotaan Banjarbakula, direncanakan pembangunan incinerator serta pengoperasian Fasilitas Limbah B3 (Oli Bekas).

c) Penataan Bangunan dan Lingkungan

Penataan bangunan dan lingkungan adalah serangkaian kegiatan yang diperlukan sebagai bagian dari upaya pengendalian pemanfaatan ruang, terutama untuk mewujudkan lingkungan binaan, baik di perkotaan maupun di perkampungan, khususnya wujud fisik bangunan gedung dan lingkungannya. Data yang tersedia sampai dengan tahun 2024 Jumlah bangunan gedung baik pemerintahan maupun yang non pemerintahan yang telah terbangun sampai saat ini berjumlah 24 bangunan. Dengan detail Pembangunan Baru sebanyak 25 gedung, Rehabilitasi sebanyak 10 Gedung dan Perencanaan 24 Gedung.

Tabel 2.74 Jumlah Bangunan Gedung Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dari Tahun 2024

Keterangan	Tahun
	2024
Pembangunan Baru	25
Rehabilitasi	10
Perencanaan	24

Sumber : DPUPR Prov Kalsel, 2024

d) Penataan Ruang

Sesuai dengan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang tujuan penyelenggaraan penataan ruang adalah untuk mencapai kondisi ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kondisi ruang tersebut dapat dipenuhi melalui proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar di dalam pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia di wilayahnya dengan tetap memelihara dan menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku termasuk di

dalamnya mengenai penataan ruang. Wewenang pemerintah daerah dalam hal penataan ruang adalah menyelenggarakan penataan ruang daerahnya yang didalamnya terdapat unsur perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 – 2035 telah dilegalisasi dalam Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2015 tanggal 25 September 2015. Pada Tahun 2021. RTRWP Kalimantan Selatan memasuki masa revisi dan pada Tahun 2022 berada pada tahapan penetapan perda hasil revisi pada tahap proses pembahasan di Dewan dan akan disusul dengan Proses evaluasi provinsi sebelum dapat ditetapkan sebagai Perda. Proses yang Panjang harus ditempuh menyesuaikan dengan ketentuan tahapan sesuai dengan amanat Undang-Undang Cipta Kerja dan turunannya.

Pemerintah provinsi juga berkewajiban melaksanakan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan penataan ruang kabupaten/kota di wilayahnya. Sampai dengan tahun 2021 dari 13 Kabupaten/Kota yang telah menjadi Peraturan Daerah sebanyak 13 Kabupaten/kota dan pada tahun 2021 terdapat 2 Kabupaten/Kota yang telah melakukan Revisi RTRW Kabupaten Kota dan telah ditetapkan ke dalam Perda yaitu Kota Banjarmasin dan Kabupaten Banjar. untuk Kota Banjarbaru sedang pada tahap yang sama dengan status RTRW Provinsi yaitu berada pada tahap proses pembahasan di Dewan dan akan disusul dengan Proses evaluasi provinsi sebelum dapat ditetapkan sebagai Perda. sedangkan 10 kabupaten lainnya saat ini sedang pada tahap revisi.

Tabel 2.75 Status RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2024

NO.	PROVINSI/ KABUPATEN /KOTA	PERDA YANG MASIH BERLAKU	STATUS PERDA
1	Provinsi Kalimantan Selatan	Perda Nomor 6 Tahun 2023	Perda
2	Kota Banjarmasin	Perda Nomor 06 Tahun 2021	Perda
3	Kota Banjarbaru	Perda Nomor 13 Tahun 2014	Proses Penetapan Perda Hasil Revisi
4	Kabupaten Banjar	Perda Nomor 4 Tahun 2021	Perda
5	Kabupaten Barito Kuala	Perda Nomor 6 Tahun 2012	Proses Revisi
6	Kabupaten Tanah Laut	Perda Nomor 5 Tahun 2024	Perda
7	Kabupaten Tanah Bumbu	Perda Nomor 5 Tahun 2023	Perda
8	Kabupaten Kotabaru	Perda Nomor 11 Tahun 2011	Proses Revisi
9	Kabupaten Tabalong	Perda Nomor 3 Tahun 2023	Perda
10	Kabupaten Balangan	Perda Nomor 24 Tahun 2013	Proses Revisi
11	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Perda Nomor 12 Tahun 2012	Proses Revisi
12	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Perda Nomor 13 Tahun 2016	Proses Revisi
13	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Perda Nomor 3 Tahun 2014	Proses Revisi
14	Kabupaten Tapin	Perda Nomor 10 Tahun 2014	Proses Revisi

Sumber : DPUPR Prov Kalsel. 2024

e) Bina Konstruksi

Jumlah rata-rata paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di pemerintahan Kalimantan Selatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah sebanyak 6894 paket kegiatan. jumlah ini mencakup pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan yang dibagi kedalam 4 urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, seperti yang terlihat pada tabel Data jumlah pekerjaan di Tabel 2.76 di bawah ini :

Tabel 2.76 Jumlah Pekerjaan Konstruksi Tahun 2021 sd 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

URUSAN	2021	2022	2023	2024
Cipta Karya	720	140	231	46
Tata Bangunan	2140	69	324	40
Bina Marga	1859	155	218	91
Sumber Daya Air	709	115	25	12

Sumber : DPUPR Prov Kalsel. 2024

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.

a) Luas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Kalimantan Selatan

Dalam pelaksanaannya dilakukan review terhadap kondisi kumuh yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi seluas 10-15 Ha. Untuk tahun 2023 telah dilaksanakan updating data luasan kumuh kewenangan provinsi yang dijadikan sebagai baseline dalam pelaksanaan tahun – tahun berikutnya. Adapun data luasan kawasan permukiman dan permukiman kumuh di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.79.

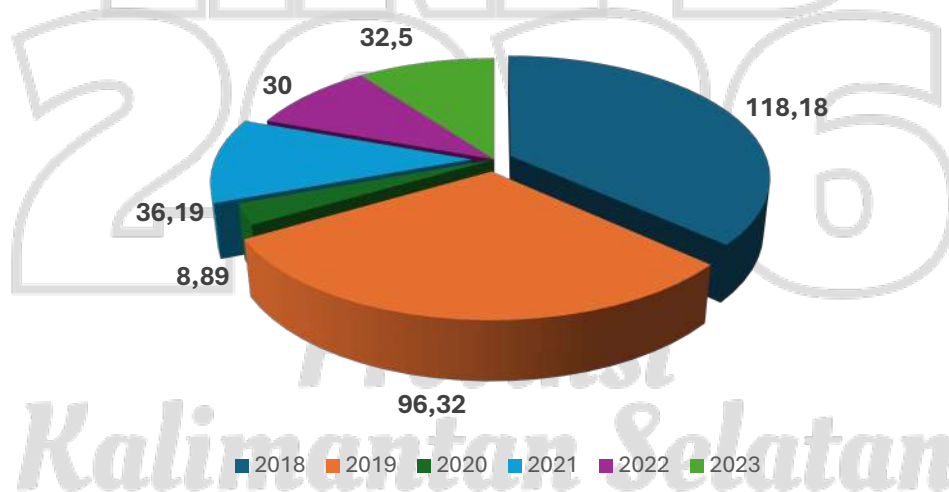
Tabel 2.77 Data Penanganan Permukiman Kumuh Dan Rencana Penanganan Kawasan Kumuh Kewenangan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO.	KAB./ KOTA	LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALSEL	LUASAN KUMUH KEWENANGAN PROVINSI	CAPAIAN KUMULATIF DARI TAHUN	LUASAN KUMUH TARGET TAHUN 2024 S/D 2026	SISA
			(UPDATE)	2018-2023		TARGET KUMUH
1	Tanah Laut	7.106.23	33.93	30.84	2	1.09
2	Kotabaru	6.835.91	35.54	14.64	5	15.9
3	Banjar	8.418.63	92.67	42.52	14.3	35.85
4	Barito Kuala	9.126.03	60.77	36.48	5.5	18.79
5	Tapin	6.930.55	23.11	21.36	1.3	0.45

NO.	KAB./ KOTA	LUASAN KAWASAN PERMUKIMAN PROV. KALSEL	LUASAN KUMUH KEWENANGAN PROVINSI	CAPAIAN KUMULATIF DARI TAHUN	LUASAN KUMUH TARGET TAHUN 2024 S/D 2026	SISA
			(UPDATE)	2018-2023		TARGET KUMUH
6	Hulu Sungai Selatan	916.18	64.5	37.64	21	5.86
7	Hulu Sungai Tengah	979	80.28	17.13	11.3	51.65
8	Hulu Sungai Utara	1.595.64	66.11	24	2	40.11
9	Tabalong	7.310.30	148.69	31.25	16	101.44
10	Tanah Bumbu	8.050.09	94.16	22.71	5	66.45
11	Balangan	3.404.27	14.85	14.6	-	0.25
12	Banjarmasin	4.434.00	41.46	21.5	20.16	-
13	Banjarbaru	1.728.97	35.44	7.4	-	28.04
	TOTAL (HA)	66.835.80	791.51	322.07	103.75	365.88

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalimantan Selatan 2024

Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha yang menjadi kewenangan Provinsi sampai dengan tahun 2023 sudah mencapai 322.07 Ha dan luasan kumuh target tahun 2024 s/d 2026 sebesar 103.75 Ha.



Gambar 2.32 Data Luasan Kumuh yang Sudah di Tangani Tahun (2018–2023)

Sumber Data: Dinas PRKP Prov. Kalsel tahun 2024

Rumah tidak layak huni atau yang biasa disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan rumah layak huni. Biasanya, RTLH memiliki konstruksi bangunannya tidak handal, luasnya tidak sesuai standar hunian per orang, serta tidak menyehatkan dan/atau membahayakan bagi penghuninya. Dari baseline data tahun 2021 jumlah data RTLH sebanyak 43.921 unit dan untuk penanganan RTLH Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan tahun 2023

telah menangani sebanyak 13.891 unit dan sisa penanganan sebanyak 30.030 unit. Data tersaji sebagai berikut :

Tabel 2.78 Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

#	PENANGANAN RTLH	BASLINE RTLH 2021 (UNIT)	PENANGANAN RTLH 2022 (UNIT)	PENANGANAN RTLH 2023 (UNIT)	SISA PENANGANAN (UNIT)
1	Kalimantan Selatan	43.921	8.772	5.119	30.030

Sumber Data : Renstra Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2023

Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) dan rehabilitasi rumah korban bencana dengan dana APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 -2023. sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 2.79 Data peningkatan kualitas RTLH dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Tahun 2019-2023

NO	KABUPATEN/KOTA	PK-RTLH				REHAB RUMAH KORBAN BENCANA	
		2019	2020	2022	2023	2022	2023
1	Banjarmasin		11		20		
2	Banjarbaru		11	10	10		
3	Banjar			10	80	30	125
4	Tapin	53		10	20		
5	HSS			10	20		
6	HST		11	10	20	45	25
7	HSU	23	11	10	20		
8	Balangan	30		10	10	11	5
9	Tabalong		11	10	20		
10	Barito Kuala	50	11	10	20	25	75
11	Tanah Laut	50		10	20	25	30
12	Tanah Bumbu	50		10	10		
13	Kotabaru		11	10	10		
	JUMLAH	256	77	120	280	136	260

Sumber Data : Dinas PRKP Prov. Kalimantan Selatan 2023

Berdasarkan tabel di atas data peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) tahun 2019 -2023 sebanyak 733 buah. sedangkan Rehab rumah korban bencana di tahun 2022 – 2023 sebanyak 396 buah.

Selain penanganan perumahan dan Kawasan permukiman kumuh juga dilaksanakan penanganan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) di Kawasan permukiman diluar Kawasan kumuh. Sampai dengan tahun 2023 telah dilaksanakan penanganan PSU yang rata-rata adalah

penanganan jalan lingkungan. Data pelaksanaan sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel 2.82 berikut:

Tabel 2.80 Penanganan PSU di Kawasan permukiman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

NO.	KABUPATEN/KOTA	JENIS KOMPONEN	SATUAN (METER)	JUMLAH PERMUKIMAN YANG DITANGANI (UNIT)
1	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2018	Jalan	7.800	1.557
2	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun. 2019	Jalan	7.421.5	1.493
3	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2020	Jalan dan PSU	2.053.4	433
4	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2021	Jalan	3.908.52	867
5	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2022	Jalan	5.770.1 / 9.471	1.575 / 200
6	Penanganan PSU Permukiman di Kabupaten/Kota Tahun 2023	Jalan	14.294	175
TOTAL			44.948.42	4.725

Sumber: Disperkim Prov. Kalimantan Selatan 2023

5. Dinas Perhubungan

Dalam rangka mendukung Provinsi Kalimantan Selatan sebagai gerbang Logistik untuk alur pelayaran Laut, Sungai dan Danau. Penting untuk memperhatikan fakto - faktor pendukung Trasportasi yang baik dan Infrastruktur Pendukung seperti Pelabuhan dan dermaga yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun data teknis Pelabuhan dan dermaga yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan Sebagai berikut :

Tabel 2.81 Data Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

NO	PELABUHAN	PEMILIK	PENGELOLA	JENIS PELABUHAN	HIRARKI PELABUHAN
1	Pelabuhan Banjarmasin	Pelindo	Pelindo	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut	Pelabuhan Utama (Angkutan Laut)
2	Pelabuhan Batulicin	Pelindo	Pelindo	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut	Pelabuhan Pengumpan (Angkutan Laut)
3	Pelabuhan Kotabaru	Pelindo	Pelindo	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut	Pelabuhan Pengumpan (Angkutan Laut)
4	Pelabuhan Martasiri	Kemenhub	KSOP Kotabaru Batulicin	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut	Pelabuhan Lokal (Angkutan Laut)
5	Pelabuhan Marabatuan	Kemenhub	KSOP Kotabaru Batulicin	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut	Pelabuhan Lokal (Angkutan Laut)
6	Pelabuhan Pelaihari / swarangan	Kemenhub	KUPP Kintap	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Laut	Pelabuhan Lokal (Angkutan Laut)

NO	PELABUHAN	PEMILIK	PENGELOLA	JENIS PELABUHAN	HIRARKI PELABUHAN
7	Pelabuhan Penyeberangan Batu lacin	PT.ASDP	PT.ASDP	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Kelas II (Angkutan Penyeberangan)
8	Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Serdang	PT.ASDP	PT.ASDP	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Kelas II (Angkutan Penyeberangan)
9	Pelabuhan Penyeberangan Stagen	PT. BRK	PT. BRK	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Kelas II (Angkutan Penyeberangan)
10	Pelabuhan Penyeberangan Tarjun	PT. BRK	PT. BRK	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Kelas II (Angkutan Penyeberangan)
11	Pelabuhan Penyeberangan Pulau Laut Timur	Dishub Kotabaru	Dishub Kotabaru	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Kelas II (Angkutan Penyeberangan)
12	Pelabuhan Penyeberangan Sebuku	Dishub Kotabaru	Dishub Kotabaru	Pelabuhan Laut yang Melayani Angkutan Penyeberangan	Kelas II (Angkutan Penyeberangan)
13	Dermaga Banjarraya	Dishub Kota Banjarmasin	Dishub Kota Banjarmasin	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
14	Dermaga Pasar Baru	Dishub Kota Banjarmasin	Dishub Kota Banjarmasin	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
15	Dermaga Pasar Lima	Dishub Kota Banjarmasin	Dishub Kota Banjarmasin	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
16	Dermaga Penyeberangan Alalak	Dishub Kota Banjarmasin	Dishub Kota Banjarmasin	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
17	Dermaga Penyeberangan Banjarraya	Dishub Kota Banjarmasin	Dishub Kota Banjarmasin	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
18	Dermaga Penyeberangan Sungai Saka Kajang	Dishub Batola	Dishub Batola	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
19	Dermaga Penyeberangan Jelapat	Dishub Batola	Dishub Batola	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
20	Dermaga Penyeberangan Sungai Gampa	Dishub Batola	Dishub Batola	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
21	Dermaga Penyeberangan Pendalaman Baru	Dishub Batola	Dishub Batola	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
22	Dermaga Marabahan	Dishub Batola	Dishub Batola	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
23	Dermaga Kuripan	Dishub Batola	Dishub Batola	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
24	Dermaga Tabukan	Dishub Batola	Dishub Batola	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
25	Dermaga Margasari	Dishub Tapin	Dishub Tapin	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
26	Dermaga Nagara	Dishub HSS	Dishub HSS	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
27	Dermaga Danau Panggang	Dishub HSU	Dishub HSU	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
28	Dermaga Paminggir	Dishub HSU	Dishub HSU	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)
29	Dermaga Pamukan Utara	Pemda Kotabaru	Pemda Kotabaru	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)

NO	PELABUHAN	PEMILIK	PENGELOLA	JENIS PELABUHAN	HIRARKI PELABUHAN
30	Dermaga Pamukan Selatan	Pemda Kotabaru	Pemda Kotabaru	Pelabuhan Sungai dan Danau	- (Sungai dan Danau)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan 2023

6. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat telah menunjukkan kemajuan, meskipun masih mengandung berbagai kelemahan. Berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban yang dihadapi saat ini sudah dapat diatasi secara cepat dan tepat oleh pemerintah, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.82 Kondisi Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 s.d 2024

URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah tindak pidana	5.206	4.973	5.016	6.375	5.951
Jumlah tindak pidana yang diselesaikan	83,39	78,56	41,63	5,342	5,098
Persentase tindak pidana diselesaikan (%)	16,61	21,44	58,37	83,79	85,66
Jumlah resiko terkena tindak pidana	196	118	122	164	153

Sumber: Polda Kalimantan Selatan, 2025

Tabel 2.83 Capaian Kinerja Urusan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2019-2023 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	%	100	100	100	100	100
2	Menurunnya ancaman kriminal di prov. Kalimantan Selatan	%	100	100	100	100	100
3	Meningkatnya peran Satlinmas dan Damkar	%	100	100	100	100	100
4	Persentase Peningkatan jumlah desa/kelurahan rawan bencana yang memperoleh	%	100	100	100	100	100

Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalimantan Selatan 2024

7. Sosial

Pembangunan pelayanan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan telah menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Kondisi ini dapat dilihat pada berbagai program yang dikembangkan seperti peningkatan kapasitas pelayanan sosial dalam panti maupun di luar panti. pengembangan program Pembangunan Keluarga Harapan. pengembangan keberdayaan kesejahteraan sosial dan penguatan kelembagaan kesejahteraan sosial.

Perkembangan penyelesaian permasalahan sosial di masyarakat baik itu terkait anak/orang tua terlantar hingga tunawisma dapat dilihat dari perkembangan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.84 Capaian Kinerja Urusan Sosial Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

#	INDIKATOR KINERJA	SATU AN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	25,40	33,50	NA	NA	NA
2	Persentase PPKS yang mandiri	%	NA	16,87	23,60	22,95	20,51
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83,66	85,04	82,16	86,28	97,4
4	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	%	3,99	4,89	17,21	36,92	37,29
5	Persentase fasilitas sarana dan prasarana kesejahteraan sosial yang terpeliharaan dengan baik	%	100	100	100	100	100
6	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	>100	>100	>100	>100	>100
7	Persentase KPM PKH yang telah graduasi	%	8,03	6,84	1,50	2,00	14,89
8	Persentase Anak terlantar yang mandiri	%	0,58	1,46	1,46	12,69	15,68
9	Persentase Tuna Sosial yang mandiri	%	2,89	2,59	3,40	9,24	33,90
10	Persentase Penyandang disabilitas yang mandiri	%	1,70	1,13	1,35	5,09	7,46
11	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	0,30	0,95	1,92	3,37	8,76
12	Persentase fakir miskin yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	6,36	NA	NA	NA	NA
13	Persentase fakir miskin yang terentaskan	%	NA	3,64	8,27	3,37	3,90
14	Jumlah makam pahlawan dalam kondisi baik	buah	5	5	6	6	6

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Perkembangan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020–2024 menggambarkan dinamika kebutuhan pelayanan sosial di Kalimantan Selatan selama lima tahun terakhir. Perkembangan jumlah PPKS tersebut mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 491.555 jiwa, kemudian pada 2021 meningkat signifikan menjadi 1.266.719 jiwa yang berarti terjadi perubahan sebesar lebih dari 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun 2022 mengalami penurunan yaitu menjadi sebanyak 639.598 jiwa sementara tahun 2023 mengalami sedikit kenaikan yaitu 646.001 jiwa, sebelum akhirnya mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2024 yaitu tercatat sebanyak 226.466 jiwa.

Perubahan jumlah PPKS tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), adanya program perlindungan sosial pasca pandemi COVID-19, penambahan atau pengurangan intervensi bantuan sosial, maupun kondisi sosial ekonomi masyarakat di Kalimantan Selatan. Di Tahun 2021 mengalami peningkatan yg cukup tinggi karena disebabkan pada tahun tersebut selain karena dampak covid 19 juga terjadi bencana banjir hampir diseluruh 13 Kabupaten/kota, sehingga jumlah PPKS untuk jenis korban bencana alam meningkat.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa kebutuhan pelayanan kesejahteraan sosial di Kalimantan Selatan masih cukup tinggi dan memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah, baik dalam hal peningkatan jumlah program, pemerataan pelayanan, maupun penguatan kapasitas kelembagaan untuk memastikan bahwa PPKS mendapatkan layanan yang memadai.

Indikator Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 tercatat sebesar 62,93, dengan variasi capaian antar kabupaten/kota yang menunjukkan dinamika pembangunan keluarga di daerah. Capaian tertinggi terdapat di Kota Banjarbaru (66,02) dan Kabupaten Tabalong (67,10), sementara capaian terendah berada di Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala (60,84).

Secara umum, capaian IPK tersebut masih berada pada kategori sedang, yang menandakan perlunya penguatan program pembangunan keluarga, terutama dalam dimensi ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Pencapaian antar wilayah menunjukkan masih adanya kesenjangan, di mana beberapa kabupaten/kota telah menunjukkan kemajuan cukup signifikan, sedangkan sebagian lainnya masih berada di bawah rata-rata provinsi. Hal ini mengindikasikan pentingnya intervensi kebijakan yang lebih spesifik dan terarah sesuai dengan kebutuhan lokal masing-masing daerah.

Untuk tahun 2026, arah kebijakan pembangunan keluarga di Provinsi Kalimantan Selatan difokuskan pada:

1. Peningkatan kualitas ketahanan keluarga melalui penguatan nilai-nilai moral, agama, dan sosial budaya yang mendukung keharmonisan rumah tangga.
2. Penguatan kemandirian keluarga melalui peningkatan akses pendidikan, keterampilan, dan ekonomi produktif berbasis keluarga.

3. Peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga melalui penyediaan layanan kesehatan, perlindungan anak, serta dukungan psikososial.
4. Pemerataan capaian IPK antar daerah dengan memperhatikan daerah yang masih berada di bawah rata-rata provinsi melalui pendampingan, fasilitasi program, dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan demikian, target pembangunan keluarga diharapkan mampu mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Keluarga secara lebih merata, sehingga dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

No	Kab/Kota	2024
1	KABUPATEN TANAH LAUT	62,64
2	KABUPATEN KOTABARU	61,43
3	KABUPATEN BANJAR	60,84
4	KABUPATEN BARITO KUALA	60,84
5	KABUPATEN TAPIN	62,62
6	KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	63,9
7	KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH	62,9
8	KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	64,42
9	KABUPATEN TABALONG	67,1
10	KABUPATEN TANAH BUMBU	63,57
11	KABUPATEN BALANGAN	64,71
12	KOTA BANJARMASIN	62,38
13	KOTA BANJARBARU	66,02
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		62,93

Sumber: BKKBN tahun 2024

2.5.2.2 Urusan Wajib Terkait Pelayanan Non-Dasar

1. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalimantan Selatan pada tahun 2024, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan di Kalimantan Selatan tercatat sebanyak 267 kasus, meningkat dari 209 kasus pada tahun 2023. Ini berarti terjadi peningkatan sebesar 27,75% dalam satu tahun terakhir. Pada tabel 2.87 dapat dilihat bahwa angka kekerasan tertinggi tahun 2024 ditemukan di Kota Banjarmasin (56 kasus), Kabupaten Barito Kuala (35 korban) dan Hulu Sungai Selatan (25 korban).

Pada tabel 2.88 dapat dilihat bahwa jenis kekerasan yang paling dominan adalah kekerasan psikis (115 kasus) dan kekerasan fisik (79 kasus), serta masih tingginya kekerasan seksual (36 kasus) yang sebagian besar terjadi dilingkungan domestik dan tempat kerja. Di sisi lain, kekerasan juga menyasar kelompok perempuan dengan berbagai tingkat pendidikan, termasuk korban yang berlatar belakang pendidikan SMA (73 korban), perguruan tinggi (51 korban), hingga yang tidak pernah sekolah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap perempuan tidak hanya terjadi karena faktor pendidikan atau ekonomi, tetapi juga karena lemahnya perlindungan struktural dan budaya patriarki yang masih kuat. Permasalahan ini memerlukan perhatian lintas sektor, melalui upaya peningkatan kapasitas layanan pengaduan, pendampingan korban, dan edukasi publik akan menjadi prioritas dalam RKPD 2026. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan memperluas akses keadilan serta layanan sosial secara merata di seluruh kabupaten/kota.

Peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat dalam beberapa tahun terakhir bukan semata-mata mencerminkan bertambahnya jumlah kekerasan yang terjadi, tetapi juga menandakan meningkatnya kesadaran dan keberanian korban untuk melapor. Hal ini merupakan hasil dari berbagai upaya sosialisasi, edukasi, dan penguatan layanan perlindungan perempuan yang dilakukan oleh pemerintah, lembaga masyarakat, serta media.

Dulu, banyak kasus kekerasan tidak pernah tercatat karena korban merasa takut, malu, atau tidak percaya bahwa laporannya akan ditindaklanjuti. Namun kini, dengan semakin terbukanya akses terhadap layanan pengaduan seperti UPTD PPA, hotline pengaduan, serta keberadaan pendamping dan shelter, korban merasa lebih didengar dan dilindungi. Ini mendorong lebih banyak perempuan untuk berani melaporkan kekerasan yang mereka alami. Dengan kata lain, angka yang meningkat ini adalah “fenomena gunung es” yang mulai mencair, menunjukkan bahwa kekerasan yang sebelumnya tersembunyi kini mulai tampak di permukaan. Maka, kenaikan ini harus dibaca sebagai indikator positif dari keberhasilan advokasi, edukasi, dan sistem pelaporan kekerasan, meskipun tentu tetap menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan pencegahan secara menyeluruh.

Tabel 2.85 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan di Kabupaten/Kota Thn 2020 sd 2024

NO.	KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tanah Laut	8	8	12	22	15
2	Kotabaru	2	6	6	1	7
3	Banjar	10	25	10	11	24
4	Barito Kuala	10	9	28	28	35

5	Tapin	3	1	3	3	8
6	Hulu Sungai Selatan	1	2	10	19	25
7	Hulu Sungai Tengah	0	10	16	13	20
8	Hulu Sungai Utara	4	9	9	10	13
9	Tabalong	5	12	13	20	19
10	Tanah Bumbu	6	9	9	1	12
11	Balangan	9	5	8	3	4
12	Banjarmasin	24	38	68	52	56
13	Banjarbaru	6	10	18	26	29
14	Provinsi Kalimantan Selatan	88	144	210	209	267

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Tabel 2.86 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Jenis Kekerasan

NO	JENIS KEKERASAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Fisik	43	70	97	79	79
2	Psikis	51	95	115	115	115
3	Seksual	12	19	35	36	36
4	Eksplorasi	0	0	4	1	1
5	Trafficking	0	2	7	1	1
6	Penelantaran	12	30	24	27	27
7	Lainnya	7	9	34	28	28
	KALIMANTAN SELATAN	125	225	316	287	287

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Tabel 2.87 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan

NO	JENIS KEKERASAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	TK	0	0	1	0	0
2	NA	5	23	60	36	84
3	Tidak/Belum Pernah Sekolah	2	3	8	32	11
4	SD	7	15	9	10	17
5	SMP	11	19	29	16	31
6	SMA	34	52	62	52	73
7	Perguruan Tinggi	30	32	50	64	51
	TOTAL	89	144	219	210	267

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Meskipun perlindungan terhadap anak terus menjadi prioritas pembangunan sosial di Kalimantan Selatan, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, tahun 2024 menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak masih menjadi permasalahan yang mengkhawatirkan. Tercatat sebanyak 580 anak menjadi korban kekerasan di seluruh kabupaten/kota, dengan rasio kasus sebesar 4,2 per 10.000

anak. Kota Banjarmasin mencatat jumlah korban tertinggi (126 anak), disusul oleh Banjarbaru (61 anak) dan Hulu Sungai Selatan (83 anak), yang juga memiliki rasio kekerasan tertinggi mencapai 11,2 per 10.000 anak.

Sebagian besar korban telah mendapatkan layanan, namun distribusi jenis layanan masih belum merata dan cenderung menurun. Misalnya, hanya 76 anak yang memperoleh layanan kesehatan pada tahun 2024, menurun signifikan dibandingkan 240 anak pada tahun 2022. Demikian pula, akses terhadap bantuan hukum dan penegakan hukum mengalami penurunan, yang mengindikasikan adanya keterbatasan kapasitas sistem perlindungan anak, baik dari sisi sumber daya manusia maupun kelembagaan.

Permasalahan ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kekerasan terhadap anak belum sepenuhnya sistemik dan menyeluruh. Tantangan utama meliputi rendahnya deteksi dini, terbatasnya layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial, serta belum optimalnya pelibatan masyarakat dan tokoh agama dalam pemulihan psikososial korban. Oleh karena itu, dibutuhkan intervensi terpadu, peningkatan kapasitas layanan berbasis komunitas, serta sinergi antara pemerintah, dunia pendidikan, dan masyarakat dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak.

Tabel 2.88 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten/Kota Tahun 2024

NO	KAB/KOTA	PENDUDUK ANAK	KORBAN ANAK	KASUS ANAK	RASIO (PER 10.000 PENDUDUK)	KORBAN ANAK YANG DILAYANI
1	Tanah Laut	121.062	32	31	2,6	32
2	Kotabaru	112.477	32	31	2,8	32
3	Banjar	184.778	56	53	3,0	56
4	Barito Kuala	102.897	43	42	4,2	43
5	Tapin	64.097	23	22	3,6	23
6	Hulu Sungai Selatan	73.944	83	76	11,2	83
7	Hulu Sungai Tengah	83.600	28	26	3,3	28
8	Hulu Sungai Utara	76.705	23	23	3,0	23
9	Tabalong	89.080	38	32	4,3	38
10	Tanah Bumbu	126.164	25	25	2,0	25
11	Balangan	46.871	10	10	2,1	10
12	Banjarmasin	216.673	126	126	5,8	126
13	Banjarbaru	94.794	61	53	6,4	61

14	Provinsi Kalimantan Selatan	1.393.142	580	550	4,2	580

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Tabel 2.89 Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Menurut Jenis Layanan yang Diberikan

NO	JENIS LAYANAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengaduan	45	120	306	261	267
2	Kesehatan	45	71	240	153	76
3	Bantuan Hukum	8	18	62	57	22
4	Penegakan Hukum	8	7	24	18	3
5	Rehabilitasi Sosial	27	5	14	11	1
6	Reintegrasi Sosial	3	7	7	11	-
7	Pemulangan	5	2	25	13	2
8	Pendampingan Tokoh Agama	4	0	9	6	2
	TOTAL	141	230	678	530	373

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2025

Tabel 2.90 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2020-2023 Provinsi Kalimantan Selatan

NO.	INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0.528	0.525	0.514	0.507	0.486

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Tahun 2024

Provinsi
Kalimantan Selatan

2. Pangan

Ketahanan pangan di Kalimantan Selatan menghadapi tantangan serius akibat fluktuasi dan tren penurunan produksi pada sejumlah komoditas strategis dalam lima tahun terakhir. Data Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa produksi padi, sebagai bahan pangan utama, mengalami penurunan drastis dari 1,15 juta ton pada tahun 2020 menjadi hanya 875 ribu ton pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan potensi kerentanan terhadap ketersediaan pangan pokok.

Hal serupa juga terjadi pada produksi daging, yang sempat menyentuh 145.219 ton pada tahun 2020, namun turun menjadi 91.311 ton pada tahun 2023, meskipun kembali meningkat di tahun 2024 menjadi 128.930 ton. Komoditas lain seperti telur juga menunjukkan tren tidak stabil, dan produksi susu justru menurun tajam dari 171.039 liter pada tahun 2020 menjadi hanya 55,58 liter di tahun 2024. Penurunan produksi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti gangguan iklim, alih fungsi lahan pertanian, rendahnya adopsi teknologi pertanian, serta terbatasnya dukungan infrastruktur dan pembiayaan bagi petani dan peternak. Kondisi ini berdampak pada ketahanan pangan daerah, terutama dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan masyarakat.

Permasalahan ini menuntut perhatian serius dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan program revitalisasi pertanian dan peternakan, peningkatan produktivitas berbasis teknologi, perlindungan lahan pangan berkelanjutan, serta penguatan rantai pasok dan cadangan pangan daerah

Tabel 2.91 Produksi Pangan di Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024

PENINGKATAN PRODUKSI	SATUAN	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
Tanaman Pangan (padi)	Ton	1.150.307	1.016.314	819.419	875.546	
Daging	Ton/Th	145.219.64	117.146.62	113.735.75	91.311.41	128.930.64
Telur	Ton/Th	114.892.58	125.196.87	129.757.04	139.409.66	120.857.26
Susu	liter/Th	171.039.23	111.768.21	132.089.70	104.99	55.58

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan 2024

3. Lingkungan Hidup

Menurunnya kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting sebagai dampak pertumbuhan ekonomi dan tekanan jumlah penduduk. Hal yang sering sulit untuk dijawab adalah apakah kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan berada dalam kondisi baik, sedang, atau buruk. Sejak tahun 2009,

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengembangkan suatu indeks lingkungan berbasis provinsi yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada periode tertentu. Indeks ini diterjemahkan dalam angka yang menerangkan apakah kualitas lingkungan berada pada kondisi baik, atau sebaliknya. Berikut ini klasifikasi penjelasan kualitatif dari angka indeks lingkungan hidup.

Tabel 2.92 Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun

INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP	
Sangat baik	$90 \leq x < 100$
Baik	$70 \leq x < 90$
Sedang	$50 \leq x < 70$
Kurang	$25 \leq x < 50$
Sangat kurang	$0 \leq x < 25$

Pembagian kategori penjelasan kualitatif ini didasarkan pada sebaran angka dalam perhitungan indeks. Kategori penjelasan kualitatif ini dijadikan dasar pembuatan kebijakan dengan menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami bagi publik. Dalam fungsinya sebagai pendukung kebijakan, indeks dapat membantu penentuan skala prioritas yang disesuaikan dengan derajat permasalahan lingkungan hidup.

Indeks kualitas lingkungan hidup provinsi Kalimantan Selatan merupakan salah satu isu yang sangat penting untuk mengidentifikasi sumber permasalahan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup antara lain dengan melakukan penanaman pohon dan berbagai proyek strategis lainnya. Hal ini telah dituangkan sesuai dengan Misi Gubernur Kalimantan Selatan yang Keempat yaitu Penguatan terhadap Perubahan Iklim yang diselaraskan dengan tema RKPD tahun 2026, yaitu Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional yang mengandung makna Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, kedaulatan dan swasembada pangan dan energi melalui perwujudan peran Kalimantan Selatan dalam sistem logistik regional dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026, maka kebijakan pembangunan daerah terkait dengan lingkungan hidup masuk dalam prioritas daerah keempat, yaitu Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kapasitas Mitigasi Serta Penanganan Bencana. Hal ini untuk menjawab menjawab isu strategis Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Masih terjadinya

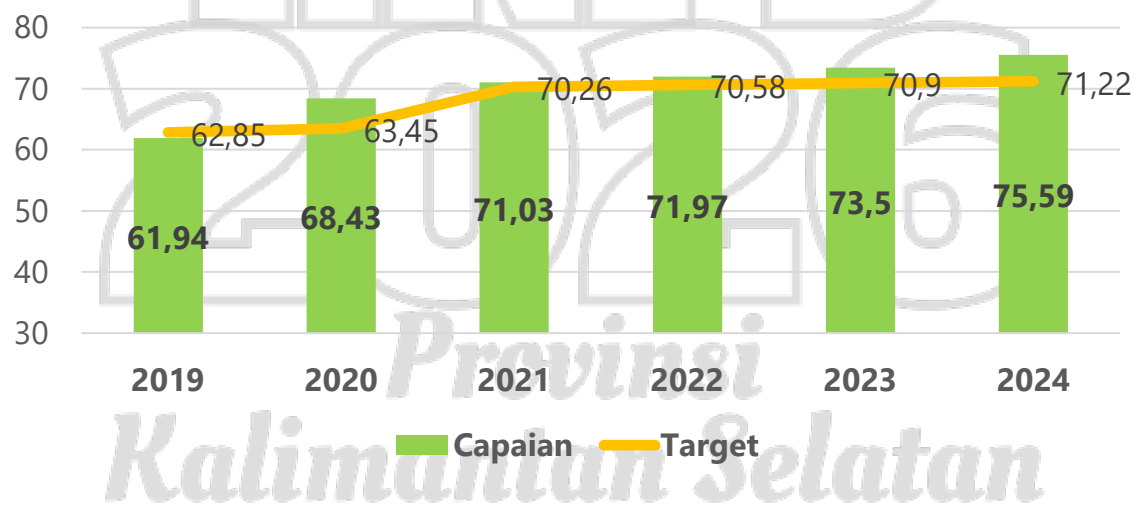
kerusakan lingkungan (pencemaran air, lubang tambang dan deforestasi) serta belum optimalnya mitigasi bencana banjir dan kebakaran hutan lahan dengan melakukan berbagai program kegiatan guna menunjang perbaikan lingkungan.

Upaya yang telah dilakukan memberikan dampak positif terhadap perbaikan lingkungan hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya nilai Indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan. Predikat IKLH Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 berada pada predikat BAIK mengalami peningkatan sebesar 1.53 dan mencapai target. data tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.93 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024

JENIS	TAHUN					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas LH	61.94	68.43.00	71.03.00	71.97	73.50.00	75.59.00
Tutupan Lahan	46.78	48.48.00	50.26.00	50.52.00	55.64	52
Kualitas Air	55.31.00	51.67	54.75	54.63	92.85	56.08.00
Kualitas Udara	88.78	88.93	89.15.00	89.52.00	52.64	96.41.00

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2024



Gambar 2.33 Grafik Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 s.d Tahun 2024

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2025

Pada tabel 2.59, Capaian Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 menunjukkan hasil positif secara umum, dengan nilai provinsi mencapai 75,59, melampaui target sebesar 71,22 dan berada pada kategori “Baik”. Namun demikian, masih terdapat ketimpangan capaian antar kabupaten/kota. Beberapa daerah masih berada pada kategori “Sedang”, bahkan ada yang belum mencapai target, seperti Barito Kuala

(64,02 dari target 64,42) dan Hulu Sungai Selatan (67,39 dari target 71,00). Kota Banjarmasin dan Banjarbaru, dua wilayah perkotaan utama, juga hanya meraih kategori “Sedang” meski telah mencapai target numerik. Hal ini menandakan adanya tekanan lingkungan hidup yang lebih tinggi di wilayah perkotaan maupun kawasan pertanian intensif. Ketimpangan ini mencerminkan adanya perbedaan kapasitas pengelolaan lingkungan antar daerah, termasuk dalam hal pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah, konservasi sumber daya alam, serta mitigasi perubahan iklim. Selain itu, lemahnya koordinasi antar sektor dan keterbatasan data serta pemantauan lingkungan turut menjadi faktor penghambat.

Permasalahan ini menuntut penguatan kebijakan perlindungan lingkungan yang lebih merata dan responsif, peningkatan kapasitas kelembagaan di tingkat daerah, serta harmonisasi program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mencapai kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan setara di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel 2.94 Capaian IKLH Provinsi Kalimantan Selatan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET	CAPAIAN	KETERCAPAIAN TARGET	RATING
1	Balangan	68.48	70.80	Ya	BAIK
2	Banjar	62.58	74.59	Ya	BAIK
3	Barito Kuala	64.42	64.02	Tidak	SEDANG
4	H.S.Selatan	71.00	67.39	Tidak	SEDANG
5	H.S.Tengah	65.16	71.67	Ya	BAIK
6	H.S.Utara	62.71	66.50	Ya	SEDANG
7	Kotabaru	67.60	76.09	Ya	BAIK
8	Tabalong	71.90	73.98	Ya	BAIK
9	Tanah Bumbu	72.03	74.92	Ya	BAIK
10	Tanah Laut	68.57	68.57	Ya	SEDANG
11	Tapin	65.22	66.11	Ya	SEDANG
12	Banjarbaru	59.87	66.84	Ya	SEDANG
13	Banjarmasin	58.46	58.72	Ya	SEDANG
	PROV.KALSEL	71.22	75.59	YA	BAIK

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2025



Gambar 2.1 Capaian IKLH Prov Kalsel dan Kab/Kota Tahun 2024

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 202

a) Gas Rumah Kaca

Permasalahan emisi GRK di Kalimantan Selatan bersumber dari kegiatan produksi dan penggunaan energi, kegiatan kehutanan dan perubahan tutupan lahan, kegiatan pertanian, perkebunan dan peternakan dan kegiatan pengelolaan limbah domestik dan industri. Sebagai acuan dalam kegiatan pemantauan, evaluasi dan pelaporan (PEP) diperlukan proyeksi-ulang tingkat emisi rujukan (REL. *Reference Emission Level*) hingga tahun 2030.

Tingkat emisi rujukan agregat tahun 2030 mencapai 38.437 Gg CO₂-eq. Pangsa emisi rujukan 2030 ini berasal dari bidang energi dan transportasi sebesar 24.341 Gg CO₂-eq (63.3%), bidang kehutanan dan perubahan tutupan lahan 4.598 Gg CO₂-eq (12.0%), bidang pertanian 7.759 Gg CO₂-eq (20.2%) dan pengelolaan limbah domestik dan industri sebesar 1.739 Gg CO₂-eq (4.5%).

Skenario Rencana Aksi Daerah untuk menurunkan emisi GRK dibuat berdasarkan dokumen RPJP 2005-2025 dan RPJMD 2016-2021 Provinsi Kalimantan Selatan dan Rencana Strategis SKPD terkait. Berdasarkan skenario dimaksud, target penurunan emisi GRK agregat tahun 2030 adalah 7.682 Gg CO₂-eq atau 19.99% dari tingkat emisi rujukan tahun 2030 sebesar 38.437 Gg CO₂-eq. Target ini masih di bawah target nasional 29.0%. Untuk mendongkrak target penurunan memenuhi atau bahkan melampaui target nasional tersebut, diperlukan upaya peningkatan rencana aksi melalui partisipasi para pihak pada setiap sektor atau bidang yang berkontribusi pada penurunan emisi GRK di Kalimantan Selatan.

Adapun target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 pada misi Kelima Menjaga Kelestarian Lingkungan

Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana dengan sasaran menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca adalah sebagai berikut:

Tabel 2.95 Tabel target penurunan emisi GRK Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

SASARAN	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA TAHUN					KONDISI AKHIR RPJMD
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Menjaga Kelestarian Lingkungan Hidup dan Memperkuat Ketahanan Bencana										
Menurunnya Emisi Gas Rumah Kaca	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	%	16.5	18.0	21.0	22.2	24.6	26.6	28.9	28.9

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026

Peningkatan emisi GRK terutama dipicu oleh perubahan tutupan lahan. Perubahan tutupan lahan di masa mendatang berkontribusi sangat penting dalam hal penurunan emisi GRK agregat di Kalimantan Selatan.

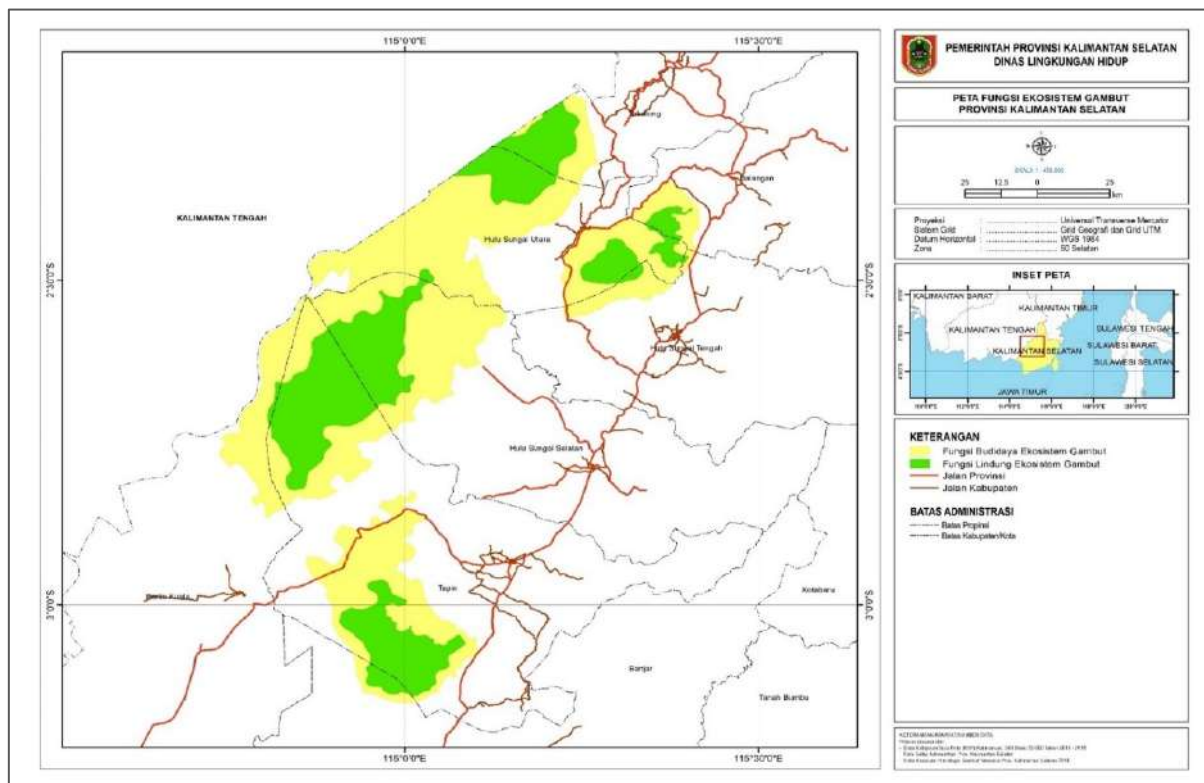
b) Ekosistem Gambut

Ekosistem gambut menjadi isu penting dalam permasalahan Perubahan tutupan lahan, sehubungan nilai dan fungsi lingkungannya antara lain sebagai pengendali perubahan iklim global karena kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Gambut Indonesia menyimpan karbon sebesar 46 GT (atau 46×10^9 ton), sehingga memiliki peran yang cukup besar sebagai penjaga iklim global. Ekosistem Gambut mampu mengatur tata air dan penyeimbang iklim (penyimpan karbon). Menurut Agus dkk (2013), dengan ketebalan gambut Kalimantan Selatan yang dominan sekitar $<0,5 - >3$ meter, kerapatan karbon 60 kg C/m^3 (kematangan gambut hemik), dan luasan gambut 238.609 hektar, perkiraan total karbon yang tersimpan pada tanah gambut di Kalimantan Selatan adalah sekitar 27-36 Gt.

Lahan gambut mampu menyimpan air dalam jumlah yang sangat besar. Kalimantan Selatan dengan luas lahan gambut sekitar 238.609 hektar, diperkirakan volumenya adalah sekitar $447,9 \text{ milyar m}^3$ dan potensinya menyimpan air sekitar $14,9 \text{ juta hektar} \times 3 \text{ meter} \times (0,8 \text{ atau } 0,9) = 358,3 - 403,1 \text{ milyar m}^3$ (Dariah dan Maswar, 2014). Secara ekologis, peran pengatur tata air lahan menjadi penting baik pada saat musim kemarau maupun musim hujan. Selain itu, dengan adanya air yang tersimpan di dalamnya dapat berperan dalam menghambat oksidasi pirit (FeS_2) yang berada pada lapisan tanah mineral di bawah lapisan gambut dalam upaya untuk mengurangi kemasaman tanah dan keracunan tanaman (Dariah dan Maswar, 2014).

Potensi jasa lingkungan lain yang penting yaitu jasa pengaturan populasi, baik flora dan fauna di Ekosistem Gambut. Gangguan atau ketidakseimbangan jumlah populasi flora dan fauna akan berimplikasi selain pada ekosistem gambut itu sendiri juga pada ekosistem lain di sekitarnya dan fungsi-fungsi sosial, ekonomi, dan fungsi lingkungan lainnya.

Secara spasial sebaran fungsi ekosistem gambut berdasarkan fungsi lindung dan fungsi budidaya di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada Gambar 2.30.



Gambar 2.34 Peta Fungsi Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: Dokumen RPPEG Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Kawasan ekosistem gambut ditentukan berdasar pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.129/MENLHK/ SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Kesatuan Hidrologis Gambut. Kawasan ini memiliki fungsi lindung dan fungsi budidaya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017 tentang Penetapan Peta Fungsi Ekosistem Gambut.

KHG di Provinsi Kalimantan Selatan meliputi luas 238.609 hektar. Keseluruhan KHG, yang masuk ke dalam fungsi lindung sekitar 80.691 hektar (34%) dan fungsi budidaya sekitar 157.918 hektar (66%). Dengan demikian, maka seluruh ekosistem gambut yang masuk ke dalam kawasan KHG selain berupa tanah gambut, bergambut, dan juga tanah mineral masuk dalam areal KHG.

Tabel 2.96 Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Lindung Ekosistem Gambut

NAMA KHG	PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN. PENELITIAN. ILMU PENGETAHUAN. PENDIDIKAN (HA)	PEMANFAATAN PENELITIAN. ILMU PENGETAHUAN. PENDIDIKAN (HA)	JUMLAH
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	1.924,69	6.887,37	8.812,07
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	767,48	16.326,58	17.094,07
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	12.547,14	25.817,70	38.364,84
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	297,56		297,56
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	16.193,27	2,06	16.195,33
Grand Total	31.730,15	49.033,72	80.763,87

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel. 2025-2025

Tabel 2.97 Sebaran Indikatif Areal Pemanfaatan Fungsi Budidaya Ekosistem Gambut tahun 2024

NAMA KHG	PEMANFAATAN FUNGSI BUDIDAYA EKOSISTEM GAMBUT (HA)				JUMLAH
	KAWASAN UNTUK NON KEHUTANAN	KAWASAN UNTUK PEMANFAATAN HUTAN BERBASIS MASYARAKAT	KAWASAN UNTUK PERLINDUNGAN HUTAN ALAM DAN EKOSISTEM GAMBUT	PEMANFAATAN FUNGSI BUDIDAYA LAINNYA	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai				21.992,48	21.992,48
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak				30.731,01	30.731,01
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	16.159,32		6.633,07	50.808,75	73.601,14
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura			2.148,58	88.300,93	90.449,51
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	18.266,73	350,48	51,18	7.536,07	26.204,47
GRAND TOTAL	34.426,05	350,48	8.832,83	199.369,24	242.978,61

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel. 2025-2025

Tabel 2.98 Sebaran Indikatif Areal Mitigasi Perubahan Iklim dari Ekosistem Gambut tahun 2024

NAMA KHG	FUNGSI BUDIDAYA					FUNGSI LINDUNG					JUMLAH
	MITIGASI PRIORITAS II	PENINGKATAN STOK KARBON PRIORITAS	PENINGKATAN STOK KARBON PRIORITAS II	PENINGKATAN STOK KARBON PRIORITAS III	TOTAL	MITIGASI PRIORITAS II	PENINGKATAN STOK KARBON PRIORITAS I	PENINGKATAN STOK KARBON PRIORITAS II	PENINGKATAN STOK KARBON PRIORITAS III	TOTAL	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	16.586,73		527,32	4.878,43	21.992,48	1.572,37	1.025,80	5.861,58	352,32	8.812,07	30.804,54
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	4.805,96	38,23	2.103,40	23.783,42	30.731,01	1,31	5.609,31	10.717,28	766,18	17.094,07	47.825,08
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	44.020,79	30,35	8.286,86	21.263,14	73.601,14	7.671,39	8.812,95	17.004,75	4.875,75	38.364,84	111.965,99
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	61.505,93		4.699,20	24.244,38	90.449,51	261,72			35,84	297,56	90.747,08
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	27.779,62	2,31	176,39	1.726,97	29.685,28	13.859,44		2,06	2.333,83	16.19533	45.880,61
GRAND TOTAL	154.699,03	70,89	15.793,17	75.896,34	246.459,42	23.366,23	15.448,05	33.585,67	8.363,92	80.763,87	327.223,29

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel. 2025-2055

Reduksi emisi karbon menjadi isu utama dalam pengendalian perubahan iklim. khususnya dalam bidang mitigasi yang memiliki target total reduksi emisi pada tahun 2030 sebesar 29%-41%. Ekosistem Gambut menjadi penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca. khususnya karbon karena diperkirakan lahan gambut dapat menyimpan 550 giga ton karbon. atau setara dengan dua kali jumlah simpanan karbon di berbagai jenis hutan non-gambut. Juga diperkirakan 25% karbon terestrial tersimpan di lahan gambut. dan jumlah ini jauh lebih besar dibandingkan dengan ekosistem hutan hujan tropis. bahkan untuk kondisi ekosistem yang masih berupa hutan alam. Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel 2.101 berikut.

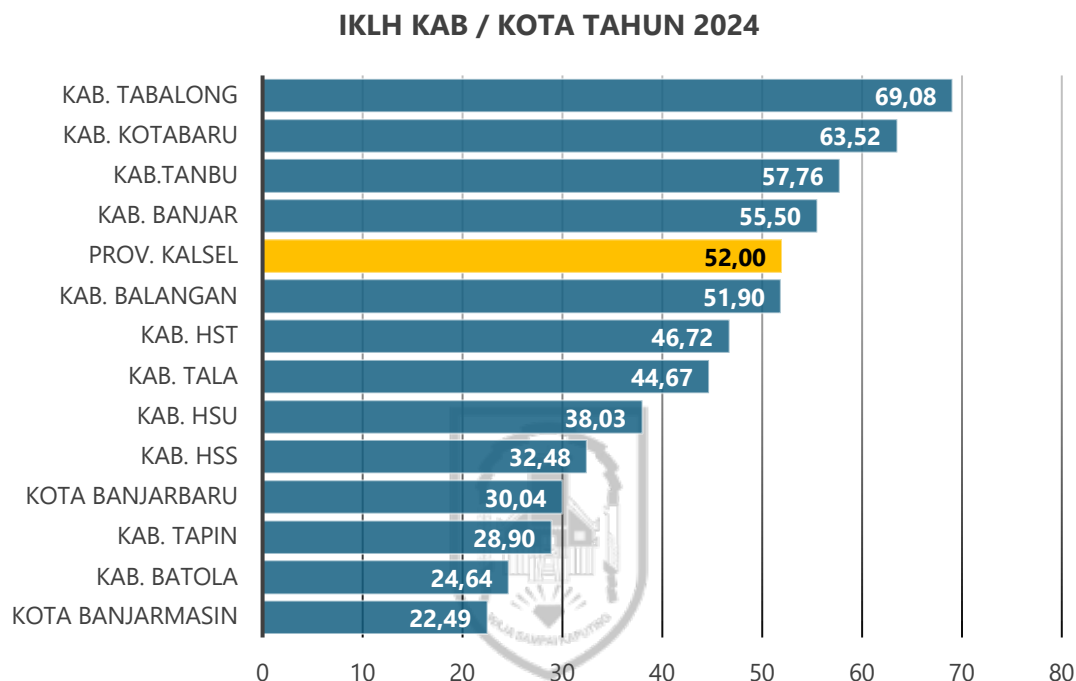
Tabel 2.99 Sebaran Indikatif Areal Pencegahan Kerusakan Ekosistem Gambut tahun 2024

NAMA KHG	FUNGSI BUDIDAYA (HA)	FUNGSI LINDUNG (HA)	JUMLAH
	KATEGORI II: PENCEGAHAN PRIORITAS II	KATEGORI II: PENCEGAHAN PRIORITAS II	
KHG Sungai Balangan - Sungai Batangalai	16.586,73	1.572,37	18.159,10
KHG Sungai Barito - Sungai Alalak	4.805,96	1,31	4.807,27
KHG Sungai Barito - Sungai Tapin	44.020,79	7.671,39	51.692,18
KHG Sungai Maluka - Sungai Martapura	61.505,93	261,72	61.767,65
KHG Sungai Utar - Sungai Serapat	27.779,62	13859,44	41.639,05
Grand Total	154.699,03	23366,23	178.065,25

Sumber: Dok RPPEG Prov Kalsel. 2025-2055

c) Kualitas Tutupan Lahan

Kualitas tutupan lahan Provinsi Kalimantan Selatan pada kategori sedang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai indeks kualitas tutupan lahan pada tahun 2024 dengan nilai 52.00 dimana 4 Kab/Kota dari 13 Kab/Kota Prov.Kalsel mencapai target IKL Tahun 2024. dengan trend nilai sebagai berikut.



Gambar 2.35 Nilai Indeks Kualitas Lahan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Sumber:DLH Kalimantan Selatan 2024

Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) merupakan fungsi dari IKTL dan IKEG. Kualitas Ekosistem Gambut sangat dipengaruhi oleh keberadaan Kanal dan kejadian kebakaran. Terjadinya kebakaran dan pembangunan Kanal akan mengurangi luas Tutupan Lahan di Kesatuan Hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Kondisi tersebut menjadi satu variabel yang harus dipertimbangkan dalam menghitung Tutupan Lahan. Memperhatikan hal tersebut, maka variable data dalam IKEG merupakan actor koreksi dalam menghitung nilai IKL. Faktor koreksi tersebut selanjutnya disebut dengan DKK yaitu luas tutupan hutan dan tutupan belukar yang terdampak kanal dan kebakaran di kesatuan hidrologis Gambut baik yang berada pada fungsi lindung maupun fungsi budi daya. Capaian IKLH Provinsi Kalimantan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.100 Tabel capaian nilai IKL Provinsi/Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET	CAPAIAN	KETERCAPAIAN TARGET	RATING
1	Balangan	57.36	51.90	Tidak	SEDANG
2	Banjar	56.78	55.50	Tidak	SEDANG
3	Barito Kuala	27.97	24.64	Tidak	SANGAT KURANG
4	H.S.Selatan	52.50	32.48	Tidak	KURANG
5	H.S.Tengah	44.79	46.72	Ya	KURANG

NO	KABUPATEN/KOTA	TARGET	CAPAIAN	KETERCAPAIAN TARGET	RATING
6	H.S.Utara	37.80	38.03	Ya	KURANG
7	Kotabaru	63.58	63.52	Tidak	SEDANG
8	Tabalong	67.50	69.08	Ya	SEDANG
9	Tanah Bumbu	62.23	57.76	Tidak	SEDANG
10	Tanah Laut	41.88	44.67	Ya	KURANG
11	Tapin	31.02	28.90	Tidak	KURANG
12	Banjarbaru	32.45	30.04	Tidak	KURANG
13	Banjarmasin	31.20	22.49	Tidak	SANGAT KURANG
	PROV.KALSEL	54.04	52.00	TIDAK	SEDANG

Sumber: DLH Kalimantan Selatan 2024

Kalimantan Selatan untuk Indeks kualitas lahan mengalami peningkatan nilai IKL dari Tahun 2022 dari 50.52 menjadi pada tahun 2023 menjadi 52.08 dan pada 2024 menurun menjadi 52,00 sehingga mencapai target IKL. Selaras dengan hal tersebut. capaian persentase luas tutupan lahan di tahun 2023 masih belum mencapai target yang ditetapkan. Adanya alih fungsi lahan akibat kegiatan permukiman, perkebunan, pertanian, industri, pertambangan dan lain-lain menyumbang penurunan luas tutupan lahan. Penurunan ini dipercepat dengan adanya illegal logging dan pertambangan ilegal di beberapa kabupaten/kota. Upaya-upaya revegetasi yang dilakukan stakeholder terkait memerlukan waktu hingga pertumbuhan vegetasi di suatu lahan dapat dianggap sebagai tutupan lahan berdasarkan analisis citra satelit.

d) Isu Prioritas Lingkungan Hidup

Berdasarkan hasil kajian KLHS dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 s.d Tahun 2026 didapatkan beberapa Isu prioritas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan antara lain Pengelolaan persampahan, Kualitas Air Sungai yang Rendah, Luas Lahan Kritis yang berpotensi terus meningkat, potensi keanekaragaman hayati belum terkelola secara optimal, potensi kerusakan ekosistem mangrove dan terumbu karang di wilayah pesisir serta perubahan iklim

e) Pengelolaan Persampahan

Belum optimalnya pengelolaan persampahan dan limbah B3 antara lain disebabkan oleh:

1. Masih perlu pengembangan fasilitas pengelolaan sampah di TPA Regional Banjarbakula.
2. Beberapa kab/kota dinilai tidak layak dibangun TPA, karena seluruh wilayahnya berada di lahan basah (Kota Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara).

3. Banyaknya ditemukan TPS liar
4. Masih banyak kegiatan usaha penghasil Limbah B3 yang belum mengintegrasikan Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 dan Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 kedalam Persetujuan Lingkungan.
5. Masih banyak ditemukan Fasilitas Pelayanan Kesehatan terutama Puskesmas atau Klinik Kesehatan yang belum memiliki Fasilitas TPS Limbah B3 yang sesuai dengan Permen LHK No. 56 Tahun 2015. Sedangkan untuk timbulan Limbah B3 infeksius wajib untuk dikelola 2 x 24 Jam apabila tidak disimpan di ruangan berpendingin dibawah 0 derajat.

Terkait dengan pengelolaan persampahan, masih kurangnya Sumber Daya Manusia untuk pengelolaan persampahan, circular economy dalam pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik. Perlu banyak upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah. Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dilihat dari banyaknya ditemukan TPS liar. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum taat hukum berkenaan dengan Perda yang berisikan larangan membuang sampah, serta kesadaran dan peran serta masyarakat untuk mengelola sampahnya sendiri masih sangat kurang. Kurangnya partisipasi dari Desa/Kelurahan/Kecamatan/ Kabupaten selaku pemangku wilayah dalam hal pengelolaan lingkungan dimana memiliki kewajiban untuk mengelola lingkungannya.

Permasalahan sampah di provinsi kalimantan selatan sudah diperkuat dengan Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya-upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data LAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 persentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 61,99%.

a. Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3)

Permasalahan sampah di provinsi kalimantan selatan sudah dilaksanakan sesuai Kebijakan Dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Kalimantan Selatan (JAKSTRADA) namun demikian upaya -upaya yang berkenaan dengan pengelolaan sampah yang terdiri dari pengurangan dan penanganan masih belum optimal, berdasarkan data SIPSN pada tahun 2021 target pengelolaan sampah kalimantan selatan 97% dengan realisasi 78,31%.

Target Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga tahun 2021 sebesar 24% dengan realisasi 14,57%. kondisi ini dapat terlihat di lapangan sampah masih

berserakan pada wilayah tertentu yang ini memerlukan peran serta masyarakat didalam pengelolaan sampah. Sedangkan target Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis Rumah Tangga sebesar 74% dengan realisasi 63,74%, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah.

Sebagaimana data SIPSN Potensi timbulan sampah tahun 2021 di Provinsi Kalimantan selatan sebanyak 320.220,74Ton/Tahun,dengan Jumlah pengurangan sampah sebanyak 46.666,46 Ton/Tahun melalui kegiatan pembatasan timbulan sampah, sampah termanfaatkan di sumber sampah dan sampah didaur ulang di sumber.

Kegiatan Pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 14,57%, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Indikator kedua pada kinerja kedua mengembangkan program dan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah yaitu presentase penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga terealisasi 63,74 %, indikator ini baru dibuat kebijakannya berdasarkan peraturan presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Kalimantan Selatan, seperti banyak wilayah lain di Indonesia, menghadapi tantangan serius dalam hal pengelolaan sampah. Masalah persampahan di wilayah ini berdampak luas pada lingkungan, kesehatan masyarakat, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Berikut adalah narasi mengenai masalah persampahan

Sampah plastik menjadi salah satu masalah utama. Plastik yang sulit terurai menumpuk di TPA, mencemari lingkungan, dan mengancam ekosistem, terutama perairan. Sampah plastik sering kali ditemukan mencemari sungai dan laut, yang berakibat pada kerusakan habitat alami dan penurunan kualitas air.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan. Penumpukan sampah dapat menjadi sarang bagi berbagai penyakit dan mengundang hewan pengerat serta serangga. Pembakaran sampah yang tidak terkendali juga berkontribusi pada polusi udara.

Masalah persampahan di Kalimantan Selatan memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta perlu bekerja sama dalam mengembangkan sistem pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Dengan kesadaran yang lebih tinggi dan inovasi yang tepat, Kalimantan Selatan dapat mengatasi tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

f) Kualitas Air Sungai Yang Rendah

Hasil pemantauan kualitas air sungai provinsi Kalimantan Selatan tahap pertama sampai dengan Tahun 2024 pada 38 titik pantau, ditemukan parameter-parameter yang dominan tidak memenuhi baku mutu berdasarkan Peraturan pemerintah RI No.22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lampiran VI untuk Kelas I antara lain BOD, Fecal coli, Total coliform, DO, COD, TSS, Cl bebas, dan Besi (Fe). Parameter lain yang tidak memenuhi baku mutu antara lain : H₂S, Fenol, Sianida (CN), pH, Mangan (Mn).



Tabel 2.101 Status Mutu Air Sungai Provinsi Kalsel sampai dengan Tahun 2024

NO	NAMA SUNGAI	TITIK PANTAU	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) TAHAP I TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) TAHAP II TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) RATA-RATA TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) RATA-RATA SUNGAI TAHUN 2024
1	Martapura	Desa Tambak Anyar Ilir	Cemar Ringan (2,86)	Cemar Ringan (2,10)	Cemar Ringan (2,48)	Cemar Ringan (2,37)
2		Desa Sungai Rangas Tengah	Cemar Ringan (3,75)	Cemar Ringan (1,75)	Cemar Ringan (2,75)	
3		Kel. Sungai Lulut	Cemar Ringan (3,63)	Memenuhi (0,55)	Cemar Ringan (2,09)	
4		Kel. Basirih	Cemar Ringan (2,65)	Cemar Ringan (1,63)	Cemar Ringan (2,14)	
5	Irigasi	Desa Sungai Landas	Cemar Ringan (3,50)	Memenuhi (0,64)	Cemar Ringan (2,07)	Cemar Ringan (2,31)
6		Intake PDAM	Cemar Ringan (1,80)	Cemar Ringan (2,31)	Cemar Ringan (2,06)	
7		Desa Sungai Tabuk Kota	Cemar Ringan (2,43)	Cemar Ringan (3,16)	Cemar Ringan (2,80)	
8	Riam Kanan	Desa Pingaran Ulu	Cemar Ringan (2,64)	Cemar Ringan (1,89)	Cemar Ringan (2,27)	Cemar Ringan (2,27)
9	Riam Kiwa	Desa Astambul Kota	Cemar Ringan (3,16)	Cemar Ringan (2,57)	Cemar Ringan (2,87)	Cemar Ringan (2,87)
10	Negara	Desa Jarang Kuantan	Cemar Ringan (3,21)	Cemar Ringan (1,68)	Cemar Ringan (2,45)	Cemar Ringan (2,72)
11		Desa Teluk Mesjid	Cemar Ringan (3,32)	Memenuhi (0,67)	Cemar Ringan (2,00)	
12		Desa Durait Hulu	Cemar Ringan (3,01)	Cemar Ringan (2,45)	Cemar Ringan (2,73)	
13		Desa Hakurung	Cemar Ringan (3,96)	Cemar Ringan (2,41)	Cemar Ringan (3,19)	
14		Desa Tumbukan Banyu	Cemar Sedang (5,03)	Memenuhi (0,54)	Cemar Ringan (2,79)	
15		Desa Bajayau-Daha	Cemar Ringan (3,65)	Cemar Ringan (1,81)	Cemar Ringan (2,73)	
16		Desa Margasari	Cemar Ringan (3,86)	Cemar Ringan (2,03)	Cemar Ringan (2,95)	
17		Desa Sei. Putting	Cemar Ringan (3,30)	Cemar Ringan (2,33)	Cemar Ringan (2,82)	

NO	NAMA SUNGAI	TITIK PANTAU	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) TAHAP I TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) TAHAP II TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) RATA-RATA TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) RATA-RATA SUNGAI TAHUN 2024
18		Desa Keladan	Cemar Ringan (3,44)	Cemar Ringan (2,23)	Cemar Ringan (2,84)	
19	Tapin	Desa Baringin A	Cemar Ringan (4,30)	Memenuhi (0,73)	Cemar Ringan (2,52)	Cemar Ringan (2,52)
20	Barabai	Desa Alat	Cemar Ringan (2,73)	Memenuhi (0,83)	Cemar Ringan (1,78)	Cemar Ringan (2,67)
21		Desa Pagat	Cemar Ringan (3,27)	Cemar Ringan (2,05)	Cemar Ringan (2,66)	
22		Desa Pajukungan	Cemar Ringan (3,55)	Cemar Ringan (3,18)	Cemar Ringan (3,37)	
23		Desa Kasarangan	Cemar Ringan (3,45)	Cemar Ringan (2,26)	Cemar Ringan (2,86)	
24	Amandit	Desa Muning Baru	Cemar Ringan (4,94)	Cemar Ringan (1,51)	Cemar Ringan (3,23)	Cemar Ringan (3,23)
25	Maluka	Kelurahan Bangkal	Cemar Ringan (3,21)	Cemar Ringan (2,15)	Cemar Ringan (2,68)	Cemar Ringan (2,91)
26		Desa Pandahan	Cemar Ringan (4,16)	Cemar Ringan (1,63)	Cemar Ringan (2,90)	
27		Desa Padang Luas	Cemar Ringan (3,99)	Cemar Ringan (2,33)	Cemar Ringan (3,16)	
28	Balangan	Desa Tabuan	Cemar Ringan (3,29)	Cemar Ringan (3,16)	Cemar Ringan (3,23)	Cemar Ringan (2,69)
29		Desa Paringin Kota	Cemar Ringan (3,17)	Cemar Ringan (1,68)	Cemar Ringan (2,43)	
30		Desa Hilir Pasar	Cemar Ringan (3,16)	Cemar Ringan (1,67)	Cemar Ringan (2,42)	
31	Tabalong	Desa Suput	Cemar Ringan (4,33)	Cemar Ringan (2,30)	Cemar Ringan (3,32)	Cemar Ringan (2,84)
32		Desa Pamarangan Kiwa	Cemar Ringan (3,31)	Cemar Ringan (2,58)	Cemar Ringan (2,95)	
33		Desa Halangan	Cemar Ringan (2,59)	Cemar Ringan (1,91)	Cemar Ringan (2,25)	
34	Batulicin	Desa Sela Selilau	Cemar Ringan (4,33)	Cemar Ringan (2,55)	Cemar Ringan (3,44)	Cemar Ringan (2,79)
35		Desa Maju Makmur	Memenuhi (0,51)	Cemar Ringan (2,47)	Cemar Ringan (1,49)	
36		Desa Maju Bersama	Cemar Ringan (4,43)	Cemar Ringan (2,43)	Cemar Ringan (3,43)	
37	Cantung	Desa Banua Lawas	Cemar Ringan (4,65)	Cemar Ringan (2,55)	Cemar Ringan (3,60)	Cemar Ringan (3,00)

NO	NAMA SUNGAI	TITIK PANTAU	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) TAHAP I TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) TAHAP II TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) RATA-RATA TAHUN 2024	STATUS MUTU AIR DAN NILAI IP (KELAS II) RATA-RATA SUNGAI TAHUN 2024
38		Desa Sungai Kupang	Cemar Ringan (1,85)	Cemar Ringan (2,19)	Cemar Ringan (2,02)	
39		Desa Karang Payau	Cemar Ringan (4,24)	Cemar Ringan (2,52)	Cemar Ringan (3,38)	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Berdasarkan tabel diatas. dapat disajikan gambaran persentase titik pantau yang tidak memenuhi baku mutu beserta indikasi sumber pencemarnya disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.102 Parameter Indeks Kualitas Air (IKA)

NO	PARAMETER	PERSENTASE DATA TIDAK MEMENUHI BM PER PARAMETER %	INDIKASI SUMBER PENCEMAR
1	BOD *	89,74	Limbah organik dari aktivitas rumah tangga seperti limbah makanan dan minuman, detergen (sabun), aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan, sisa pakan ikan
2	Total coliform	57,69	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia, kotoran hewan ternak lainnya, jasad makhluk hidup seperti burung mati, serta bakteri dari limbah rumah tangga
3	DO *	26,92	BOD dan COD tinggi maka DO menjadi rendah
4	COD *	25,64	Limbah organik baik dari aktivitas rumah tangga maupun industri, aplikasi pupuk pada kegiatan pertanian, limbah peternakan
5	Fecal coli *	19,23	Bakteri yang berasal dari dari kotoran manusia dan kotoran hewan mamalia

NO	PARAMETER	PERSENTASE DATA TIDAK MEMENUHI BM PER PARAMETER %	INDIKASI SUMBER PENCEMAR
6	TSS *	11,54	Kikisan atau erosi tanah dipengaruhi musim hujan, aktivitas galian C, pertambangan batubara, perkebunan sawit
7	pH*	2,56	Air hujan, limbah industri pertambangan batubara

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Keterangan = (*) parameter IKA

RKPD
2026
Provinsi
Kalimantan Selatan

Dengan kompleksitas persoalan tersebut bahwa sumber pencemar yang terindikasi dari berbagai sector yakni dari sector pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, dan domestik, maka diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan serta pemulihan Sungai di Provinsi Kalimantan Selatan harus melalui pendekatan pengelolaan yang komprehensif dan terintegrasi dari hulu hingga hilir oleh seluruh pemangku kepentingan.

g) Luas Lahan Kritis yang Berpotensi Terus Meningkat

Secara teori banjir dan bencana akibat banjir dapat terjadi karena faktor alamiah maupun pengaruh aktivitas manusia terhadap alam dan lingkungannya. Faktor alamiah yang utama yaitu elemen meteorologi, topografi, hidrologi, perubahan penggunaan lahan dan areal konservasi juga dapat memperbesar peluang terjadinya aliran permukaan (Afdhalia & Oktariza, 2019). Banjir secara umum juga terbagi menjadi dua dari faktor penyebabnya, yaitu banjir fluvial yang disebabkan karena limpahan air dari sungai (kadang disebut juga dengan banjir bandang) dan banjir pluvial yang disebabkan karena tingginya run-off (aliran permukaan) dan curah hujan ekstrim pada suatu lokasi.

Identifikasi Faktor Penyebab:

a. Anomali Curah Hujan

Berdasarkan klasifikasi curah hujan bulanan, Bulan Januari di Provinsi Kalimantan Selatan menjadi salah satu bulan paling basah pada bagian barat pegunungan Meratus, sehingga potensi air limpasan di daratan cukup tinggi.

b. Morfologi Daratan

Pada daratan landai genangannya akan lama surut tetapi daya rusaknya kecil, sedangkan daratan yang terjal daya rusak tinggi tetapi genangannya akan cepat surut dikarenakan mengikuti alur gravitasi dari hulu.

c. Pasang Laut

Terjadi pasang laut maksimum yang menambah lamanya durasi rendaman banjir di dataran karena air tidak bisa mengalir ke laut. Kondisi topografi di wilayah yang terendam banjir Januari 2021 ini umumnya berada di bagian hilir dengan ketinggian dibawah 12,5 mdpl. Wilayah pesisir di Kalimantan Selatan yang memiliki ketinggian 1 mdpl berpotensi mengalami banjir rob.

d. Sedimentasi Sungai

Dampak dari sedimentasi adalah kapasitas daya tampung sungai yang semakin menurun seiring dengan bertambahnya sedimen di dalam sungai, sehingga ketika air limpasan (runoff) tinggi dan akan dibuang ke outlet berupa sungai akan

tidak tertampung lagi. Hal inilah yang mengakibatkan meluapnya air sungai dan menggenangi kawasan permukiman, persawahan atau sekitarnya.

e. Alih Fungsi Lahan

Berdasarkan peta perubahan guna lahan antara 2011 dan 2020 terlihat jelas adanya perubahan guna lahan dari kawasan berhutan (hutan lindung, hutan produksi, hutan rawa/gambut) serta kawasan pertanian lahan kering menjadi kawasan perkebunan dan permukiman. Hal ini terjadi di DAS Barito, khususnya DTA pada kajian ini. Alih fungsi lahan khususnya menjadi pertanian lahan kering, perkebunan sawit dan pertambangan yang berakibat infiltrasi rendah, sehingga air limpasan di permukaan semakin banyak berpotensi terjadi banjir.

Dalam pengelolaan Keanekaragaman Hayati, arah kebijakan konservasi kehati yaitu :

- Meningkatkan kepedulian upaya pelestarian Kehati sosialisasi/ pencerahan);
- Memperlambat, mengurangi/menghentikan laju kerusakan/degradasi dan kepunahan Kehati, diiringi upaya rehabilitasi serta implementasi prinsip pemanfaatan berkelanjutan;
- Meningkatkan keberdayaan pranata kelembagaan, kebijakan, dan penegakan hukum;
- Mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, IPTEK dan melestarikan kearifan lokal;
- Implementation of 3 Goals of the Convention on Biological Diversity (conservation, sustainable use, and benefit sharing). Indonesia has ratified CBD in 1994 (Act No. 5/1994);
- Implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans (IBSAP), 2003 – 2020;
- Mewujudkan keadilan, keseimbangan peran/kepentingan dan memperkecil potensi konflik;.

Perencanaan Konservasi Kehati skala Provinsi

- Pengumpulan data flora dan fauna in-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data flora dan fauna ex-situ terkait konservasi sumber daya alam
- Pengumpulan data terkait lekat-lahan yaitu konservasi sumber daya alam yang ditanam dalam pekarangan Pengumpulan data ekosistem penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan terkait konservasi sumber daya alam.

Jasa lingkungan pada habitat bumi ditentukan oleh keberadaan faktor endogen dan dinamika faktor eksogen yang dicerminkan dengan dua komponen yaitu kondisi ekoregion dan

penutup lahan (landcover/ landuse) sebagai penaksir atau proxy. Oleh karena itu diperlukan proses transformasi data dari ekoregion dan penutup lahan menjadi nilai jasa lingkungan.

Menurut sistem klasifikasi jasa lingkungan dari Millenium Ecosystem Assessment (2005), jasa lingkungan dikelompokkan menjadi empat fungsi layanan, yaitu jasa penyediaan (provisioning), jasa pendukung (supporting) dan jasa kultural (cultural) serta jasa pengaturan (regulating).

Berdasarkan hasil analisis jasa lingkungan dari Dinas Lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 terdapat 20 jasa lingkungan yang disajikan sebagai berikut:

- Jasa Lingkungan Penyediaan Pangan
- Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih
- Jasa Lingkungan Penyedia Serat
- Jasa Lingkungan Penyedia Sumber Daya Genetik
- Jasa Lingkungan Pengatur Kualitas Udara
- Jasa Lingkungan Pengatur Iklim
- Jasa Lingkungan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Bencana Alam
- Jasa Lingkungan Pemurnian Air dan Pengolahan Limbah
- Jasa Lingkungan Pengaturan Aliran Air dan Banjir
- Jasa Lingkungan Penyerbukan Alami
- Jasa Lingkungan Pengendalian Hama
- Jasa Lingkungan Estetika
- Jasa Lingkungan rekreasi
- Jasa Lingkungan Warisan Budaya
- Jasa Lingkungan Warisan geologi
- Jasa Lingkungan Regenerasi Tanah dan Pemeliharaan
- Jasa Lingkungan Pendukung Siklus Hara
- Jasa Lingkungan Pendukung Produksi Primer
- Jasa Lingkungan Pendukung Habitat dan Keanekaragaman

Keanekaragaman hayati di Provinsi Kalimantan Selatan beragam jenis, dikarenakan kawasan hutan Provinsi Kalimantan Selatan banyak dijadikan cagar alam dan kawasan konservasi sehingga masih terjaga ekosistemnya. Flora Vegetasi yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan cukup banyak jenisnya, baik di kawasan taman nasional, wisata, hutan lindung maupun hutan produksi. diketahui bahwa setidaknya terdapat ratusan jenis tumbuhan, mulai dari pohon, liana, vegetasi bawah, dan lain-lain. Adapun beberapa contoh

tanaman khas Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Durian, Tebu, Kasturi, Rambutan, Langsung dll. Selain itu Provinsi Kalimantan Selatan juga memiliki fauna khas yang dilindungi.

Fauna/satwa liar yang terdapat di kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan tersebar di berbagai habitat di berbagai wilayah, hutan lindung di Pegunungan Meratus. Jenis fauna khas Kalimantan Selatan yang dapat dipetakan sebarannya yaitu Bekantan, Burung, Orang Utan.

Dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk dan intensifnya kegiatan pembangunan dari beragam sektor di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, antara lain pertambangan, industri, pelabuhan, perkebunan, pertanian, pemukiman, perikanan, pariwisata berkonsekuensi terhadap peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Kompleksitas pembangunan di wilayah pesisir jika tidak diantisipasi secara hati-hati, dikhawatirkan mengganggu dan mengancam kelangsungan pemanfaatan sumber daya dan keberlanjutan ekosistem yang dapat menyangga kehidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Beberapa contoh ancaman nyata, misalnya perubahan ekosistem pesisir akibat reklamasi pantai, konversi lahan, penebangan hutan *mangrove*, tumpahan minyak (*oil spill*) dari pelabuhan, maupun pencemaran limbah dari berbagai kegiatan pembangunan dan rumah tanggapenduduk.

Terkait dengan jenis pemanfaatan lahan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kalimantan Selatan dan pengaruhnya terhadap lingkungan pesisir dan perairan, maka isu dan permasalahan pokok yang teridentifikasi adalah terkait dengan ekologi, berupa potensi ancaman kerusakan ekosistem pesisir dan kehidupan biota laut yang hidup di sekitarnya.

Hal ini disebabkan karena secara ekologi laut merupakan tempat bermuaranya semua yang ada di darat baik melalui rembesan air hujan maupun mengalir melalui sungai-sungai yang cukup banyak bermuara di Selat Laut, Selat Sebuku maupun daratan Kalimantan. Akibatnya wilayah ini menjadi tempat terakumulasinya segala sesuatu baik limbah industri dan domestik, penambangan, perkebunan, sedimen tersuspensi dan lain sebagainya. Hal ini sebagaimana ditunjukkan dengan kondisi perairan di lokasi studi yang memiliki tingkat kecerahan yang cukup rendah (dominan <50%) dan kekeruhan akibat sedimen tersuspensi sampai pada jarak 10-15 km dari garis pantai, baik di wilayah muara Sungai Barito (pesisir Kabupaten Banjar dan Barito Kuala) yang dampaknya sampai di wilayah Tanjung Selatan Kabupaten Tanah Laut, perairan Selat Laut (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru), Selat Sebuku maupun wilayah utara Kabupaten Kotabaru (daratan utama Kalimantan).

Pertambangan batu bara yang dilakukan secara terbuka menyebabkan perubahan bentang lahan yang ekstrem. Penggalan lapisan batu bara yang terletak di bawah lapisan tanah dan lapisan lain menghasilkan lubang-lubang galian yang tidak dapat sepenuhnya ditutup kembali. Selain itu penimbunan lubang galian walaupun telah diupayakan menggunakan prinsip

pengembalian lapisan tanah sebagai penutup terakhir pada waktu penataan lahan namun tetap saja menghasilkan kondisi lahan dengan material yang berbeda dibanding aslinya. Lapisan tanah yang dikembalikan sebagai lapisan penutup sudah tercampur aduk antara lapisan tanah atas dan bawah atau lapisan dari horizon A, B bahkan C, sehingga secara kimia terjadi pencampuran sifat-sifat yang dimiliki oleh masing-masing horizon tersebut. Secara fisik jelas sangat berbeda dari kondisi awalnya karena terjadi perusakan struktur. Dengan kata lain tanah hasil penutupan kembali pada lokasi pertambangan batu bara memiliki Bobot Isi (BI) yang rendah. Dalam hal ini maka porositas lapisan tanah hasil penutupan kembali menjadi sangat kecil dengan akibat permeabilitas dan aerasi menjadi sangat buruk.

Potensi kerusakan lahan lain yang mungkin terjadi di areal pertambangan batu bara ialah terpotongnya drainase alamiah akibat perubahan bentang lahan. Dalam penataan kembali maka hal ini perlu dipertimbangkan. Kerusakan lahan lainnya ialah berupa erosi dan kemungkinan longsor. Untuk itu maka stabilisasi lereng dan recontouring merupakan bagian dari perencanaan penutupan tambang.

Sebagian besar masyarakat nelayan dan petambak menduga bahwa kegagalan usaha mereka tidak terlepas dari dampak kegiatan penambangan di wilayah hulu dan transportasi di sepanjang daerah aliran sungai maupun perubahan iklim global.

Dari kegiatan pertanian dan perkebunan di daratan, kelebihan unsur hara dari sisa-sisa pupuk bisa menyebabkan suburnya alga di lepas pantai dan mengganggu keseimbangan ekosistem pesisir, pada gilirannya bisa menyebabkan kematian biota laut secara massal. Sedangkan buangan residu pestisida dari pertanian dan perkebunan melalui aliran sungai dapat menyebabkan keracunan dan kematian biota laut.

Badan Informasi Geospasial mencatat bahwa luas Hutan Mangrove di Indonesia adalah 3,2 juta hektar (Ha). Jumlah itu merupakan 19% (2005) dari seluruh ekosistem sejenis di dunia, dan diperkirakan pada tahun 2013 luas Hutan Mangrove di Indonesia sudah jauh berkurang. Namun walau bagaimanapun, luasan hutan mangrove Indonesia relatif masih dianggap yang paling luas di dunia, sehingga meletakkan Indonesia sebagai penyangga ekosistem mangrove terpenting di dunia.

Kerusakan mangrove di sebagian wilayah pesisir Kalimantan Selatan dominan diakibatkan oleh aktivitas manusia seperti alih fungsi lahan untuk industri, pelabuhan, perikanan, perkebunan, pertambangan. Selain itu diakibatkan oleh pengaruh alam terutama gelombang.

Hasil analisis terhadap tekanan ekosistem mangrove di pesisir Kalimantan Selatan menunjukkan dalam kategori tekanan sangat tinggi mencapai 6596,56 Ha atau 9,84%, kategori tinggi 137.34,87 Ha (20,50%), sedangkan kategori rendah masih yang terbesar yakni 24.692,24 Ha

(36,85%). Secara wilayah kecamatan, Batulicin semua dalam kategori sangat tinggi, untuk semua kategori tinggi terdapat di Kecamatan Bumi Makmur, Pulau Laut Barat dan Pulau Laut Tanjung Selayar. Beberapa wilayah yang memiliki tekanan tinggi >50% terdapat di Kecamatan Takisung, Kurau, Satui dan Pulau Laut Kepulauan. Wilayah ini disebabkan karena semakin tingginya aktivitas konversi lahan di sekitarnya terutama, pelabuhan, perkebunan, perikanan tambak dan permukiman.

4. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pembinaan kependudukan dan catatan sipil yang dilaksanakan pada tingkat Provinsi Kalimantan Selatan adalah dalam rangka membantu program pemerintah dalam rangka menuju identitas tunggal. Kegiatan yang dilakukan hanya terkait dengan upaya sosialisasi standarisasi pemenuhan hak-hak sipil masyarakat seperti KTP, KK dan lain sebagainya. Upaya pembinaan ini diarahkan pada upaya percepatan bagi kabupaten/kota mencapai identitas tunggal tersebut. Dalam mendukung pelaksanaan urusan kependudukan dan catatan sipil. Kabupaten Kota juga menetapkan regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Inventarisasi peraturan terkait penyelenggaraan urusan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.103 Capaian Kinerja Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Usia ≥17 Tahun atau Sudah Kawin yang Mempunyai KTP	%	92.00	96.40	97.99	98.9	71.10
2	Persentase Ketersediaan Data Informasi Kependudukan Skala Provinsi	%	100.00	100.00	100.00	100	100
3	Persentase Kabupaten yang melaporkan data-data kependudukan	%	0.00	76.90	92.30	100	100
4	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.50	1.41	0.71	*NA	1.22
5	Usia Kawin Pertama	%	0.00	33.94	33.97	*NA	20.9
6	Persentase Kader GSI Aktif. (indikator kinerja yang dimaksud tidak ada)	%	0.00	0.00	0.00	*NA	
7	Persentase BKB Aktif	%	97.00	80.85	0.00	*NA	99.10
8	Perentase Sub PPKBD Aktif	%	75.00	69.75	0.00	*NA	99.11

*NA : Indikator dimaksud sudah berpindah pada Dinas PPPA dan KB per maret 2023 menyesuaikan dengan perubahan SOTK baru.

Sumber: Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB Prov. Kalimantan Selatan 2025

Tabel 2.104 Inventarisasi Peraturan Perundangan terkait Pelaksanaan Urusan Administrasi Kependudukan dan Capil di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	NOMOR DAN JUDUL PERATURAN
1	Balangan	Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Penduduk dan Akta Pencatatan Sipil
2	Banjarnegara	Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor : 02 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Perbup No. 17 tahun 2014 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akta Capil
3	Barito Kuala	Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan
4	Hulu Sungai Selatan	Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dan SOP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5	Hulu Sungai Tengah	Peraturan Daerah Nomor : Peraturan Daerah Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten No 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP Dan Akta Catatan Sipil
6	Hulu Sungai Utara	Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor : 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Hulu Sungai Utara
7	Kotabaru	Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 112 Tahun 2020 tentang Pedoman Percepatan Pelayanan Kepemilikan Akta Kelahiran di Kabupaten Kotabaru Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	Tabalong	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2015 Tanggal 15 Desember 2015 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perbup Nomor 06 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2015 tanggal 18 Mei 2016
9	Tanah Bumbu	Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10	Tanah Laut	Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Tapin	Peraturan Daerah Kab. Tapin No. 2 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan
12	Kota Banjarbaru	Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
13	Kota Banjarmasin	Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Sumber : Disdukcapil Kabupaten/Kota, 2025

Pada tingkat kabupaten/kota telah dikembangkan sistem pelayanan terpusat pada kantor/lembaga yang menangani catatan sipil. sementara untuk beberapa kabupaten telah membagi kewenangannya kepada kantor kecamatan guna mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Pelimpahan kewenangan ini hanya berlaku untuk pembuatan KTP. sedangkan untuk KK, akte kelahiran dan lain sebagainya masih di kantor catatan sipil.

Secara kelembagaan semua kabupaten/kota sudah memenuhi persyaratan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Namun secara kualitas perlu adanya peningkatan dari berbagai sisi seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang lebih memadai baik secara kuantitas dan secara kualitas. Hal ini mengingat tantangan yang masih cukup besar terutama terkait dengan upaya sosialisasi dan penyadaran masyarakat akan pentingnya identitas pada umumnya dan identitas tunggal pada khususnya.

5. k

Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) adalah salah satu Upaya pembangunan Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) telah memberikan peran nyata untuk meningkatkan pendapatan keluarga yaitu dalam bentuk pelatihan kewirausahaan bagi kader-kader PKK.

Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) telah dilaksanakan penguatan masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber Ekonomi melalui simpan pinjam kelompok perempuan. Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Pasar Desa melalui pemberian bantuan stimulan dan pelatihan bagi pengurus. Jumlah kelompok simpan pinjam bagi perempuan dan Badan Usaha Milik Desa sudah dikembangkan di 13 kabupaten dengan hasil cukup baik

Di bidang pemerintahan desa telah pula dilaksanakan pembinaan pembangunan desa seperti perencanaan desa dalam rangka menyusun RPJM desa, peningkatan kapasitas pelayanan desa dan kualitas aparatur dan kepala desa, agar memiliki kemampuan dalam mengelola sistem manajemen desa baik pemerintahan maupun keuangan desa. Berkaitan dengan hal ini telah dibina seluruh desa dengan pola pembinaan melalui percontohan yang kemudian dikembangkan oleh kabupaten sesuai kondisi dan potensi yang ada pada desa yang bersangkutan.

1. Indeks Desa (ID)

Tahun 2024 menandai 1 (satu) dekade Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang menjadi tonggak sejarah babak baru pendekatan pembangunan desa. Kemajuan pembangunan desa selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terbilang pesat. Transformasi pembangunan desa secara holistik ini yang akan terus dilanjutkan melalui kebijakan pembangunan desa dalam rangka Indonesia Emas

2045. Pembangunan desa dalam Indonesia Emas 2045 dititikberatkan pada pengarusutamaan pembangunan desa yang bersifat lintas sektor dan lintas aktor, menuju kemandirian desa.

Indeks Desa diharapkan dapat menjadi indikator tunggal dalam mengukur kinerja pembangunan desa di Indonesia. Indeks Desa dipergunakan dalam RPJPN 2025 -2045 untuk mengukur kemandirian desa melalui 6 (enam) dimensi, yaitu: Layanan Dasar, Sosial, Ekonomi; Lingkungan; Aksesibilitas, dan Tata Kelola Pemerintahan Desa.

Dimensi dan indikator dari Indeks Desa disusun berdasarkan kaidah - kaidah statistika dengan tetap mengacu pada prinsip berbagi-pakai dan interoperabilitas data. Indeks Desa diharapkan menjadi acuan utama penetapan target pembangunan desa dalam dokumen perencanaan nasional, daerah, hingga desa mulai dari RPJPN 2025-2045, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD hingga RKPDDes; pengalokasian Dana Desa; maupun penyusunan kebijakan pembangunan desa lainnya. Bersama, mari mengawal pemanfaatan Indeks Desa demi Desa Mandiri menuju Indonesia Emas 2045.

Indeks Desa (ID) disusun dengan landasan bahwa peningkatan kemandirian desa yang berkelanjutan merupakan proses akumulasi dari dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa.

Keenam Dimensi menjadi mata rantai yang saling memperkuat yang mampu menjamin keberlanjutan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pembangunan Desa dimaknai sebagai proses untuk meningkatkan kapabilitas penduduk dalam mengelola dan memanfaatkan potensi yang terdapat di desa.

Paradigma pembangunan yang mengedepankan pembangunan manusia didasarkan pada ruang dimensi layanan dasar, dimensi sosial, dimensi ekonomi, dimensi lingkungan, dimensi aksesibilitas dan dimensi tata kelola pemerintahan Desa. Dalam penyusunan ID 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator.

1. Aspek dimensi layanan dasar terdiri sub dimensi pendidikan, sub dimensi kesehatan, dan sub dimensi utilitas dasar dengan 13 indikator;
2. Aspek dimensi sosial terdiri sub dimensi aktivitas dan sub dimensi fasilitas Masyarakat dengan 8 indikator;

3. Aspek dimensi ekonomi terdiri dari sub dimensi produksi desa dan sub dimensi fasilitas pendukung ekonomi dengan 12 indikator;
4. Aspek dimensi lingkungan terdiri dari sub dimensi pengelolaan lingkungan dan sub dimensi penanggulangan bencana dengan 5 indikator;
5. Aspek dimensi aksesibilitas terdiri dari sub dimensi kondisi akses jalan dan sub dimensi kemudahan akses dengan 5 indikator;
6. Aspek tata kelola pemerintahan desa terdiri dari sub dimensi kelembagaan dan pelayanan desa dan sub dimensi tata kelola keuangan desa dengan 5 indikator.

Pengumpulan data dilakukan melalui survei desa sebanyak jumlah desa hasil penetapan dari Kementerian Dalam Negeri, yang kemudian diolah untuk menghitung nilai dari setiap dimensi, subdimensi dan indikator. ID dihitung dengan menggunakan metode kuantitatif, di mana setiap indikator pembentuk Sub Dimensi serta Dimensi diberi bobot tertentu berdasarkan tingkat kepentingan kewenangan desa, pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Hasil akhirnya adalah penetapan status kemajuan dan kemandirian desa serta memberikan rekomendasi kementerian/lembaga, pemerintah daerah, atau pemerintah desa.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Nilai Maksimal	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian
1	Nilai Dimensi tata kelola pemerintahan desa	Angka	65,73	80	68,11	65,29	95,86
2	Nilai Dimensi Ekonomi	Angka	107	160	110,5	117	105,88
3	Nilai Dimensi Layanan Dasar	Angka	126	170	127,67	141,35	110,72
4	Nilai Dimensi Sosial	Angka	57	85	58,83	69,09	117,44
5	Nilai Dimensi Lingkungan	Angka	63	90	67,5	63,68	94,34
6	Nilai Dimensi Aksesibilitas	Angka	43	50	44,17	44,57	100,91
TOTAL			461,73	635	476,78	500,98	105,08

2. Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan untuk menghasilkan dokumen fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP)

Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Provinsi Kalimantan Selatan bertujuan untuk dapat mempercepat pembangunan antar desa sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam suatu wilayah Kabupaten atau Kota. Pembangunan Kawasan Perdesaan harus memperhatikan beberapa hal, seperti mengembangkan potensi melalui penetapan tematik pada Kawasan Perdesaan, mempertimbangkan keserasian Pembangunan antar Kawasan, mempertimbangkan keterpaduan dan keberlanjutan Pembangunan. Selain itu Pembangunan Kawasan Perdesaan juga bertujuan untuk menghidupkan Wilayah Metropolitan Banjarmasin (WMB) dan Wilayah Gerbang Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) melalui pemenuhan ketahanan pangan dari Kawasan Perdesaan yang telah dibentuk dan diprioritaskan.

Kegiatan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan yang dilakukan sebagai bagian dari kinerja Seksi Pembangunan Sarana dan Prasarana Kawasan Perdesaan, pada tahun 2024 ini menghasilkan 9 (Sembilan) Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan, terdiri dari 3 (Tiga) Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah ditetapkan menjadi Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) pada RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) tahun 2025-2029 yaitu RPKP Kawasan Agrowisata Hortikultura di Kecamatan Upau dan Haruai Kabupaten Tabalong, RPKP Kawasan Agrominapolitan di Kecamatan Martapura dan Martapura Barat Kabupaten Banjar, dan RPKP Kawasan Pertanian Terpadu di Kecamatan Kusan Tengah Kabupaten Tanah Bumbu. Sedangkan yang lainnya terdapat 6 Dokumen Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yang telah dibentuk yaitu RPKP Kawasan Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Tapin, RPKP Kawasan Pertanian Terpadu Kabupaten Tanah Bumbu, RPKP Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terpadu di Kabupaten Barito Kuala, RPKP Kawasan Produksi Makanan Ringan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, RPKP Kawasan

Agrosilvopastura di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan RPKP Kawasan Pertanian dan Perkebunan di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 3.59 Rekapitulasi Kegiatan Fasilitas Pembangunan Kawasan Perdesaan

Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2024

KABUPATEN	LOKASI	TEMATIK KAWASAN	KETERANGAN
Tabalong	Kecamatan Upau dan Kecamatan Haruai	Kawasan Agrowisata Hortikultura	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) RPJMN 2025-2029
Banjar	Kecamatan Martapura dan Martapura Barat	Kawasan Agrominapolitan	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) RPJMN 2025-2029
Tanah Bumbu	Kecamatan Kusan Tengah	Kawasan Pertanian Terpadu	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP) RPJMN 2025-2029
Tapin	Kecamatan Tapin Tengah	Kawasan Pertanian dan Perkebunan	Proses Pendampingan oleh Provinsi
Tanah Bumbu	Kecamatan Angsana	Kawasan Pariwisata Terpadu	Proses Pendampingan oleh Provinsi
Barito Kuala	Kecamatan Anjir Pasar	Kawasan Pertanian Tanaman Pangan Terpadu	Proses Pendampingan oleh Provinsi
Hulu Sungai Selatan	Kecamatan Simpur	Kawasan Produksi Makanan Ringan	Proses Pendampingan oleh Provinsi
Hulu Sungai Tengah	Kecamatan Batu Benawa	Kawasan Agrosilvovastora	Proses Pendampingan oleh Provinsi
Kotabaru	Pulau Laut Timur	Kawasan Pertanian dan Perkebunan	Proses Pendampingan oleh Provinsi

Sumber: Data diolah Bidang Pengembangan Kawasan Perdesaan, 2024

3. Klasifikasi Pemeringkatan BUM Desa Tahun 2024

Pemeringkatan (Klasifikasi) BUM Desa adalah suatu proses evaluasi formal dan sistematis yang dilakukan oleh otoritas terkait untuk menentukan tingkat

kinerja, kapasitas kelembagaan, dan keberlanjutan usaha BUM Desa. Proses ini menggunakan indikator terukur yang mencakup aspek tata kelola, manajemen usaha, dampak sosial, dan kontribusi ekonomi terhadap desa.

Tujuan utama dari pemeringkatan ini bersifat multi-dimensi:

1. Pengukuran Kinerja: Menetapkan status ex ante dan ex post BUM Desa sebagai dasar penilaian keberhasilan program pengembangan ekonomi desa.
2. Perumusan Kebijakan: Menyediakan data valid untuk merancang intervensi kebijakan yang terarah dan tepat sasaran, seperti program pendampingan, alokasi permodalan, dan penguatan regulasi.
3. Pengakuan dan Akuntabilitas: Memberikan pengakuan resmi atas pencapaian BUM Desa sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan.

Mekanisme pemeringkatan BUM Desa umumnya didasarkan pada seperangkat parameter yang mencerminkan fungsi fundamental BUM Desa. Meskipun bobot dan skor dapat bervariasi, parameter utama meliputi:

1. Aspek Kelembagaan (Legalitas dan Organisasi): Penilaian terhadap kelengkapan dokumen pendirian, struktur organisasi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
2. Aspek Manajemen Usaha (Operasional dan Keuangan): Evaluasi terhadap unit usaha yang dijalankan, kinerja keuangan (profitabilitas, likuiditas, dan solvabilitas), serta mekanisme perencanaan bisnis.
3. Aspek Dampak dan Jaringan: Penilaian kontribusi BUM Desa terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pengembangan jejaring kemitraan usaha.

Sistem klasifikasi BUM Desa di Provinsi Kalimantan Selatan, yang mereplikasi kerangka nasional, membagi BUM Desa ke dalam empat kategori berdasarkan rentang skor yang diperoleh:

1. Kategori Perintis (Skor < 55)

BUM Desa yang baru berdiri atau yang masih menghadapi kendala fundamental. Kategori ini mencerminkan organisasi yang baru memiliki legalitas dasar, unit usaha belum berjalan optimal, dan tata kelola keuangannya masih sederhana atau belum tercatat secara akurat.

BUMDesa kategori ini membutuhkan intervensi intensif berupa penyusunan dokumen kelembagaan, pelatihan dasar manajerial, dan identifikasi potensi usaha yang layak (*feasibility study*).

2. Kategori Pemula (Skor 55–69)

Karakteristik: BUM Desa yang telah memiliki unit usaha berjalan, namun skala usahanya masih kecil, dan efisiensi operasionalnya belum optimal. Tata kelola mulai dibentuk, tetapi belum sepenuhnya konsisten atau profesional. BUMDesa kategori ini membutuhkan program pendampingan peningkatan kapasitas SDM, penguatan akses permodalan skala kecil, dan penataan ulang administrasi keuangan.

3. Kategori Berkembang (Skor 70–85)

Karakteristik: BUM Desa yang telah menunjukkan kinerja usaha yang stabil dan menguntungkan. Kelembagaan telah tertata baik, memiliki diversifikasi unit usaha, dan mulai memberikan kontribusi kepada PADes. BUMDesa kategori ini membutuhkan dukungan untuk pengembangan jejaring kemitraan strategis, peningkatan skala investasi, dan penguatan aspek manajemen risiko agar dapat berdaya saing di pasar yang lebih luas.

4. Kategori Maju (Skor > 85)

Karakteristik: Merupakan tingkat tertinggi klasifikasi, dicapai oleh BUM Desa yang telah mandiri secara finansial, memiliki tata kelola profesional dan transparan, serta memberikan kontribusi signifikan dan berkelanjutan kepada PADes dan kesejahteraan masyarakat. BUM Desa kategori Maju didorong untuk menjadi pusat pembelajaran (*center of excellence*) dan agent of development di tingkat desa, serta dapat direkomendasikan untuk mengakses skema pembiayaan yang lebih besar.

Berdasarkan teori pemeringkatan BUM Desa, dominasi kategori Perintis merefleksikan adanya keterbatasan mendasar dalam aspek tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan skala ekonomi usaha, yang menuntut intervensi kebijakan yang lebih terfokus untuk mendorong transisi ke fase perkembangan selanjutnya.

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH DESA		KLASIFIKASI NILAI

				JML BUM DESA	Perintis (< 55)	Pemula (55-69)	Berkembang (70-85)	Maju (>85)
1		2	3	4	6	7	8	9
1	TANAH LAUT	11	130	124	50	34	38	2
2	KOTABARU	22	198	185	180	1	1	3
3	BANJAR	20	277	236	175	25	33	3
4	BARITO KUALA	17	195	195	149	22	24	0
5	TAPIN	12	126	126	63	13	43	7
6	HULU SUNGAI SELATAN	11	144	144	133	7	4	0
7	HULU SUNGAI TENGAH	11	161	156	89	25	42	0
8	HULU SUNGAI UTARA	10	214	171	134	13	24	0
9	TABALONG	12	121	120	105	5	7	3
10	TANAH BUMBU	12	144	143	109	0	23	11
11	BALANGAN	8	154	105	93	4	8	0
JUMLAH		146	1864	1705	1280	149	247	29

Hasil rekapitulasi penilaian klasifikasi BUM Desa Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 mengidentifikasi ada 1.705 unit BUM Desa yang tersebar di 11 kabupaten, menunjukkan bahwa mayoritas signifikan (75%) masih terkonsentrasi pada kategori Perintis (1.280 unit). Komposisi ini, yang diikuti oleh kategori Pemula (9%), Berkembang (14%), dan Maju (hanya 2%), mengindikasikan bahwa secara agregat, BUM Desa di provinsi ini masih berada pada fase inisiasi dalam siklus hidup organisasinya.

6. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dilihat dari cakupan kepesertaan KB di Kalimantan Selatan, masih memerlukan upaya keras. demi menuju masyarakat yang sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari kondisi kepesertaannya sampai dengan tahun 2023 terus membaik.

Dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas pada fase bonus demografi tahun 2025 – 2035, diperlukan upaya pemberdayaan keluarga secara menyeluruh. Salah satu strategi penting adalah menjaga keseimbangan angka kelahiran total atau Total Fertility Rate (TFR) pada tingkat ideal. Angka kelahiran yang terlalu tinggi dapat menimbulkan tekanan terhadap daya dukung lingkungan dan berdampak pada rendahnya kualitas SDM akibat keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan gizi. Sebaliknya, jika TFR terlalu rendah, dapat memicu berbagai konsekuensi negatif, seperti

penurunan jumlah penduduk usia produktif, meningkatnya beban ketergantungan, dan potensi pertumbuhan penduduk yang negatif. Kondisi ini tentu akan berimplikasi pada aspek sosial dan ekonomi, termasuk perlambatan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya beban jaminan sosial di masa depan. Oleh karena itu, pengendalian angka kelahiran secara berimbang menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berkelanjutan serta terciptanya generasi unggul yang mampu memanfaatkan bonus demografi secara optimal.

Grand Design Pembangunan Kependudukan sebenarnya sudah terbentuk di hampir 13 kab/kota pada Prov. Kalimantan Selatan. namun alasan belum maksimalnya pelaksanaan penyusunan GDPK dikarenakan terkendala dengan regulasi dan perlu adanya penyesuaian dengan visi dan misi bupati terpilih dalam pilkada dan GDPK belum menjadi prioritas bagi kab/kota.

Berdasarkan data *Unmed Need* di Kalimantan Selatan sebesar 10.8% menunjukkan bahwa memang masih banyak PUS yang ingin berKB namun belum terlayani. Hal ini disebabkan oleh banyak factor. antara lain karakteristik demografi. social ekonomi. akses dan kualitas pelayanan.

Berdasarkan hasil Laporan Indeks Kinerja Utama BKKBN tahun 2023. dapat dilihat bahwa capaian mCPR di Kalimantan Selatan sebesar 518.050 Jiwa Angka ini menunjukkan bahwa kesertaan berKB PUS di Kalimantan Selatan sudah cukup tinggi. hanya memang pilihan yang kontrasepsi yang digunakan masih yang non MKJP.

Untuk menanggulangi hal tersebut. Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan menjalin kerja sama dengan mitra kerja yaitu IBI dan TNI serta BKKBN juga menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi selalu ada.

Masih tinggi PUS yang putus ber KB disebabkan karena :

- a) Tingginya minat PUS untuk menggunakan KB Non MKJB. Capaian KB MKJP di Kalimantan Selatan masih rendah berkisar 11.02% berdasarkan data Laporan Statistik Rutin BKKBN. sampai dengan bulan September 2023
- b) Kurangnya KIE dari Pengelola Program KB
- c) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang KB MKJP

Rendahnya tingkat penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) masih menjadi tantangan dalam upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di berbagai wilayah, termasuk di Provinsi Kalimantan Selatan. Sejumlah hambatan yang memengaruhi kondisi antara lain adalah faktor usia, lokasi tempat tinggal perempuan, tingkat pendidikan, dukungan pasangan, jenis pekerjaan, serta status ekonomi. Hambatan – hambatan tersebut berdampak pada terbatasnya akses dan pemanfaatan layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas.

Rendahnya adopsi MKJP dapat berkontribusi pada tingginya angka kelahiran dan pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Jika tidak diantisipasi, hal ini akan berdampak pada kualitas pengasuhan anak dalam keluarga. Ketika orang tua dengan jumlah anak yang banyak tidak mampu memberikan perhatian dan pengasuhan yang optimal, maka beresiko menghasilkan generasi yang kurang berkualitas dari segi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai upaya perlu dilakukan secara terpadu. Diantaranya adalah pemberian subsidi layanan MKJP bagi masyarakat miskin, pengembangan model asuransi khusus untuk layanan MKJP, serta peningkatan edukasi kepada masyarakat secara masif, inovatif, kreatif, dan terukur. Disamping itu, peningkatan kapasitas dan keterampilan tenaga kesehatan juga perlu dilakukan secara berkala guna mendukung pelayanan yang optimal.

Pengendalian pertumbuhan penduduk dapat dilakukan dengan memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi serta program keluarga berencana (KB). Peningkatan peran KB mandiri juga perlu di dorong, sehingga diharapkan proporsi pengguna metode kontrasepsi.

Kondisi Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Peningkatan kualitas keluarga melalui program Keluarga Berencana (KB) terus menjadi perhatian penting Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 hasil pemutakhiran pendataan keluarga, persentase peserta KB aktif (PA) yang menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Kalimantan Selatan tercatat sebesar **9,4 persen**.

Capaian ini mencerminkan adanya variasi tingkat penggunaan MKJP antar kabupaten/kota. Beberapa daerah menunjukkan capaian relatif tinggi, seperti Kota Banjarbaru (**13,1 persen**), Kabupaten Tabalong (**12,2 persen**), Kabupaten Tanah Bumbu (**12,2 persen**), dan Kabupaten Balangan (**11,2 persen**). Sementara itu, beberapa daerah masih berada di bawah rata-rata provinsi, di antaranya Kabupaten Hulu Sungai Tengah (**4,7 persen**), Kabupaten Tapin (**6,1 persen**), serta Kabupaten Banjar (**6,8 persen**).

Tingginya capaian di beberapa daerah menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah, peran tenaga lini lapangan, serta kesadaran masyarakat yang semakin meningkat dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang yang dinilai lebih efektif dan berkelanjutan. Namun demikian, rendahnya capaian di beberapa kabupaten masih menjadi tantangan yang memerlukan perhatian, khususnya dalam hal penyediaan akses

layanan kesehatan reproduksi, peningkatan sosialisasi, serta penguatan koordinasi lintas sektor.

Dalam konteks perencanaan pembangunan tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menekankan pentingnya peningkatan capaian peserta KB aktif MKJP sebagai bagian dari strategi menurunkan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) dan memperkuat ketahanan keluarga. Upaya yang akan ditempuh antara lain melalui peningkatan kualitas pelayanan KB, pemenuhan tenaga kesehatan terlatih, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam program KB.

Dengan demikian, peningkatan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang diharapkan dapat mendukung terwujudnya visi pembangunan daerah dalam mewujudkan **keluarga yang berkualitas, sehat, sejahtera, dan berdaya saing** di Kalimantan Selatan.

PERSENTASE PESERTA KB AKTIF (PA) METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP)

NO	PROVINSI/KAB/KOTA	Persentase Peserta KB Aktif (PA) Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
1	Provinsi Kalimantan Selatan	9.4
2	Kabupaten Banjar	6.8
3	Kabupaten Barito Kuala	8.0
4	Kabupaten Balangan	11.2
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	4.7
6	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	8.1
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	10.8
8	Kabupaten Tabalong	12.2
9	Kabupaten Tanah Bumbu	12.2
10	Kabupaten Tanah Laut	9.5
11	Kabupaten Tapin	6.1
12	Kabupaten Kotabaru	10.6
13	Kota Banjarbaru	13.1
14	Kota Banjarmasin	10.5

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, 2025

Sub-Bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana

1. Upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk dan peningkatan kualitas keluarga di Kalimantan Selatan terus diarahkan pada penguatan program Keluarga Berencana (KB) dengan menekankan penggunaan metode kontrasepsi modern, khususnya Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Berdasarkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2024 yang bersumber dari BKKBN, capaian **persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR)** di Provinsi Kalimantan Selatan mencapai **75,87 persen** atau sebanyak **522.971 pasangan usia subur (PUS)** dari total **689.262 PUS**.
2. Meskipun capaian mCPR tersebut relatif tinggi dan menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kesertaan ber-KB dengan metode modern, proporsi penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) masih perlu ditingkatkan. Data menunjukkan bahwa secara rata-rata provinsi, **persentase peserta KB aktif MKJP baru mencapai 9,4 persen**, dengan variasi antar kabupaten/kota. Capaian tertinggi tercatat di Kota Banjarbaru (**13,1 persen**), Kabupaten Tabalong dan Tanah Bumbu (masing-masing **12,2 persen**), serta Kabupaten Balangan (**11,2 persen**). Sementara itu, beberapa daerah masih rendah, seperti Kabupaten Hulu Sungai Tengah (**4,7 persen**), Kabupaten Tapin (**6,1 persen**), dan Kabupaten Banjar (**6,8 persen**).
3. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat Kalimantan Selatan relatif tinggi dalam menggunakan metode kontrasepsi modern, namun preferensi terhadap MKJP masih rendah di beberapa wilayah. Padahal, penggunaan MKJP dinilai lebih efektif, efisien, serta berkontribusi terhadap keberlanjutan program pengendalian jumlah dan jarak kelahiran.
4. Sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana akan menekankan strategi sebagai berikut:
5. **Peningkatan aksesibilitas layanan KB** dengan memperluas ketersediaan tenaga kesehatan terlatih dan fasilitas pelayanan MKJP hingga tingkat desa/kelurahan.
6. **Penguatan sosialisasi dan edukasi masyarakat** terkait manfaat penggunaan MKJP, terutama di daerah dengan capaian rendah.
7. **Integrasi program KB dengan layanan kesehatan dasar** dan program ketahanan keluarga sehingga tercipta sinergi lintas sektor.

8. **Penguatan advokasi dan kemitraan** dengan tokoh masyarakat, organisasi perempuan, serta tenaga lini lapangan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi keluarga.
9. Dengan upaya tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menargetkan peningkatan capaian peserta KB aktif MKJP sebagai bagian dari strategi menekan angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR), memperkuat ketahanan keluarga, serta mewujudkan **keluarga berkualitas, sehat, dan sejahtera** sebagai pondasi pembangunan daerah menuju visi Kalimantan Selatan yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.



Prov : KALIMANTAN SELATAN

TABEL 11
JUMLAH PESERTA KB AKTIF
BULAN : DES - 2024



RKPD
2026
Provinsi
Kalimantan Selatan

KODE	KABUPATEN	JUMLAH PESERT	METODE KONTRASEPSI									METODE KONTRASEPSI
			SUNTIK	PIL	KONDOM	IMPLAN	IUD	VASEKTOMI	TUBEKTOMI	MAL	TOTAL	
1	2	3=12+13	4	5	6	7	8	9	10	11	12=Σ(4-11)	13
01	TANAH LAUT	47211	25383	15306	598	3818	805	47	1115	16	47088	123
02	KOTABARU	37774	19862	13153	652	2917	474	14	552	10	37634	140
03	BANJAR	77637	41606	29194	828	3815	1197	40	708	24	77412	225
04	BARITO KUALA	42295	19908	18194	580	1845	1010	76	562	7	42182	113
05	TAPIN	26968	15534	8537	246	1911	306	13	347	3	26897	71
06	HULU SUNGAI SELATAN	30743	13375	13841	381	2025	393	16	622	32	30685	58
07	HULU SUNGAI TENGAH	31551	11774	17259	383	1578	222	14	250	11	31491	60
08	HULU SUNGAI UTARA	28179	14263	10188	366	2130	597	49	495	11	28099	80
09	TABALONG	35536	16568	13605	744	2860	743	73	795	13	35401	135
10	TANAH BUMBU	43278	25005	11891	420	3857	1172	49	729	27	43150	128
11	BALANGAN	20772	9951	7961	218	1830	358	13	295	26	20652	120
12	KOTA BANJARMASIN	67477	37521	21254	1406	3058	2854	66	1103	14	67276	201
13	KOTA BANJARBARU	33550	19002	8337	1360	2027	2002	14	584	8	33334	216
JUMLAH TOTAL		522971	269752	188720	8182	33671	12133	484	8157	202	521301	1670

Sumber: New Siga BKKBN Tahun 2024

Provinsi
Kalimantan Selatan

TABEL 10
JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR (PUS) BULAN : DES - 2024

KODE	KABUPATEN	JUMLAH PUS	KESERTAAN JAMINAN KESEHATAN				TIDAK MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN
			JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN)			NON JKN	
			JKN-PBI	JKN-NON PBI	TOTAL		
1	2	3	4	5	6=4+5	7	8
01	TANAH LAUT	61375	27657	14091	41748	1982	17645
02	KOTABARU	51821	7299	12124	19423	3670	28728
03	BANJAR	101157	15739	13982	29721	2694	68742
04	BARITO KUALA	53574	12237	9320	21557	1059	30958
05	TAPIN	34966	8406	5449	13855	1426	19685
06	HULU SUNGAI SELATAN	38836	25780	4516	30296	484	8056
07	HULU SUNGAI TENGAH	39912	26155	5460	31615	653	7644
08	HULU SUNGAI UTARA	37076	22207	5832	28039	272	8765
09	TABALONG	47257	17537	14362	31899	2566	12792
10	TANAH BUMBU	61201	22175	16356	38531	1794	20876
11	BALANGAN	26497	14773	3942	18715	864	6918
12	KOTA BANJARMASIN	90305	14183	26617	40800	4891	44614
13	KOTA BANJARBARU	45285	7715	17244	24959	2348	17978
JUMLAH TOTAL		689262	221863	149295	371158	24703	293401

Sumber: New Siga BKKBN Tahun 2024

Provinsi
Kalimantan Selatan

7. Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM.49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (SISTRANAS), sasaran dalam sistranas yaitu terwujudnya penyelenggaraan transportasi yang efektif atau dapat diartikan memiliki aksesibilitas yang tinggi. Jaringan pelayanan transportasi dapat menjangkau seluas mungkin wilayah nasional dalam rangka perwujudan wawasan nusantara dan ketahanan nasional. Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat dan ASDP), laut, udara dan perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan darat, laut, udara.

Pemerintah dalam membuat peraturan yang mengatur tentang transportasi umum mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yang menjelaskan bahwa pemerintah membangun dan mengembangkan sarana dan prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ramah lingkungan. Dinas Perhubungan sendiri mengatur tentang peraturan lalu lintas dan sistem transportasi, pemberian ijin trayek, uji kir angkutan yang layak jalan, pemberian marka jalan, penyediaan halte dan jaringan sarana dan prasarana lainnya. Kualitas fasilitas angkutan umum yang tersedia masih rendah dikarenakan kurang tegasnya penegakan hukum terhadap penyelenggara jasa angkutan umum untuk melakukan peremajaan terhadap usia angkutan lebih dari 10 tahun. Hal inilah yang menjadi salah satu pemicu banyaknya moda angkutan umum mengalami penurunan performance dan pada akhirnya penumpang beralih kepada penggunaan kendaraan pribadi.

Pertumbuhan yang terus berlanjut, jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Kalimantan Selatan diproyeksikan mengalami peningkatan signifikan. Setelah pada tahun 2023 jumlahnya tercatat sebesar 721.183 unit, diperkirakan pada akhir tahun 2024 jumlahnya dapat mencapai sekitar 874.036 unit. Puncaknya, pada akhir tahun 2025, total jumlah kendaraan bermotor diproyeksikan akan menembus angka satu juta, yaitu mencapai sekitar 1.026.889 unit.

Sejalan dengan eskalasi jumlah kendaraan, emisi gas buang sebagai sumber utama polusi udara di kota-kota besar juga diperkirakan terus meningkat. Kontribusi sektor transportasi terhadap polusi udara di wilayah urban diperkirakan masih berada pada rentang yang signifikan, yakni sekitar 60-70%, bahkan berpotensi lebih tinggi seiring bertambahnya volume kendaraan di jalan.

a) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Provinsi Kalimantan Selatan terdapat 2 tipe yaitu tipe A (kewenangan pusat) sebanyak 1 terminal dan tipe B (kewenangan provinsi) sebanyak 6 terminal. Berikut merupakan sejumlah terminal yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.105 Data Terminal Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO.	TIPE TERMINAL	NAMA TERMINAL	LOKASI	AKSESIBILITAS
1	Terminal Tipe A	Gambut Barakat	Kab. Banjar	Sebagai titik simpul transportasi keluar masuk Wilayah Regional Kalimantan yang berfungsi melayani kendaraan umum antar kota antar provinsi (AKAP)
2	Terminal Tipe B	Terminal Km 6 Kayuh Baimbai	Kota Banjarmasin	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Trisakti, Bandara Syamsudin Noor serta menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
3	Terminal Tipe B	Terminal Tanah Bumbu	Kabupaten Tanah Bumbu	Sebagai titik simpul akses menuju Pelabuhan Laut Batulicin. Pelabuhan Penyeberangan ke Kotabaru menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
4	Terminal Tipe B	Terminal Kotabaru	Kabupaten Kotabaru	Sebagai titik simpul akses menuju Tanah Bumbu- Tanah Laut- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
5	Terminal Tipe B	Terminal Hulu Sungai Utara	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Sebagai titik simpul akses menuju Tanjung – Barabai-Kandangan – Rantau – Martapura- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan
6	Terminal Tipe B	Terminal Tabalong	Kabupaten Tabalong	Sebagai titik simpul akses menuju Paringin- Barabai- Kandangan- Rantau- Martapura- Banjarmasin dan menghubungkan beberapa daerah antar kota dalam provinsi (AKDP) di wilayah Kalimantan Selatan

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan. Tahun 2024

b) Bus Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP)

Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) merupakan layanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota pada provinsi yang berbeda dengan menggunakan kendaraan bus umum dan terikat dengan trayek angkutan. Bus AKAP memiliki jadwal yang tetap. pelayanan yang cepat. dilayani oleh bus umum. tersedia terminal tipe A pada awal pemberangkatan. persinggahan dan terminal tujuan.



Gambar 2.36 Bus AKAP Prov. Kalimantan Selatan

Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan. 2024

Trayek yang dilalui Bus AKAP sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.106 Trayek dan Tarif Bus AKAP Tahun 2025

NO.	PERUSAHAAN OTOBUS	TRAYEK	KELAS	TARIF (RP)	JUMLAH ARMADA
1	PT. DAMRI (Persero)	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberang (Via Batulicin)	Business	340.000	4 Unit
2	PO. Pulau Indah Jaya	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberangan (Via Tanjung)	Business	330.000	24 Unit
			Executive	420.000	
3	PO. Samarinda Lestari	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberangan (Via Tanjung)	Business	330.000	17 Unit
			Executive	420.000	
4	PO. Bintang Mas	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Terminal Batu Ampar – Terminal Samarinda Seberangan (Via Tanjung)	Business	330.000	7 Unit
5	PO. Yessoe Travel	Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Terminal WA. Gara(Palangkaraya)	Hiace/Executive	170.000	
		Terminal KM.17 GambutBarakat – Sampit (Via Palangkaraya)	Executive	300.000	
		Terminal KM.17 GambutBarakat – Pangkalan Bun	Hiace/Executive	400.000	
		Terminal KM.17 GambutBarakat – Lamandau	Executive	480.000	
6	PO. Logos Trijaya Sentosa	Terminal KM. 17 Gambut Barakat – Termina WA. Gara (Palangkaraya)	Economy	120.000	
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Sampit (ViaPalangkaraya)	Economy	220.000	
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Sampit – PangkalanBun	Economy	280.000	
7	PO. Yuliana Bersaudara Makmur Jaya	Terminal KM.17 Gambut Barakat – Muara Teweh	Economy	140.000	
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Tamiang Layang	Economy	100.000	
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Ampah	Economy	110.000	
		Terminal KM.17 Gambut Barakat – Kandui / Patas	Economy	130.000	

Sumber: BPTD XV Kalimantan Selatan. 2025

c) Bus Rapid Transit Banjarbakula

Bus Rapid Transit (BRT) merupakan sistem transit massal berbasis bus yang memberikan mobilitas cepat, nyaman dan berbiaya rendah dalam pelayanannya sebagai angkutan dalam perkotaan. BRT menggunakan jalur khusus dan pelayanan prima terhadap pengguna yang pada dasarnya adalah mengadaptasi karakteristik kinerja dan keandalan pelayanan dari sistem transit modern berbasis dengan biaya yang lebih rendah.

Tabel 2.107 Koridor Pelayanan BRT Banjarbakula Tahun 2024

NO.	KORIDOR	RUTE KORIDOR
1.	Koridor I	Km.0 Banjarmasin – Lambung Mangkurat – Jl. A. Yani – Terminal Km 6 Banjarmasin – Terminal Km 17 Gambut Barakat (Pulang Pergi)
2.	Koridor II	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Jl. A. Yani – Terminal Banjarbaru (Pulang Pergi)
3.	Koridor III	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Simpang 3 Trikora/A. Yani – Jl. Trikora – Simpang 3 Cempaka – Jl. Cempaka – Terminal Banjarbaru – Martapura (Pulang Pergi)
4.	Koridor IV	Handil Bakti Barito Kuala – Jl. Hasan Basri – Jl. Sultan Adam – Jl. Syarif Hidayatullah – Jl. Veteran – Jl. Pramuka – Terminal Km 6 Banjarmasin (Pulang Pergi)
5.	Koridor V	Terminal Km 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. Gubernur Soebarjo – Pelabuhan Trisakti (Pulang Pergi)
6.	Koridor VI	Handil Bakti – Jl. Trans Kalimantan – Jl. (Banjarmasin – Marabahan) – Terminal Marabahan (Pulang Pergi)
7.	Koridor VII	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Liang Anggang – Jl. A. Yani – Bentok (Pulang Pergi)
8.	Koridor VIII	Bentok – Bati-Bati – Tambang Ulang – Pelaihari (Pulang Pergi)
9.	Koridor IX	Terminal Km. 17 Gambut Barakat – Bandara Syamsudin Noor (Pulang Pergi)

Sumber: Dinas Perhubungan Prov. Kalimantan Selatan. 2024

d) Angkutan Sungai dan Laut

a. Angkutan Sungai

Provinsi Kalimantan Selatan yang terkenal sebagai provinsi yang memiliki jumlah sungai yang banyak dan digunakan sebagai jalur transportasi sejak zaman dahulu hingga sekarang akan sangat memiliki kerawanan akan terjadinya kecelakaan di sungai. Pengawasan lalu lintas sungai dilakukan dalam rangka menciptakan kenyamanan dan kelancaran pengguna lalu transportasi sungai. Sesuai dengan undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran setiap kapal wajib memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal yang meliputi : keselamatan kapal, pengawakan kapal, manajemen keselamatan pengoperasian kapal dan pencegahan pencemaran dari kapal; pemuatan, dan status hukum kapal. Tetapi pada kenyataannya penegakan hukum terhadap pengawasan dan pengendalian lalulintas perairan sungai belum

secara maksimal dilaksanakan. karena luasnya cakupan wilayah pengawasan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin. Kabupaten Banjar. Kabupaten Barito Kuala. dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Berikut merupakan data eksisting pelabuhan yang status kepemilikan dan pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel 2.108 Data Eksisting Pelabuhan di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO	NAMA PELABUHAN	LOKASI PELABUHAN	STATUS ASET/ KEPEMILIKAN	OPERATOR	KONDISI PELABUHAN	AKTIVITAS DI PELABUHAN
1	Negara	Kab. HSS	Kab. HSS	UPTD	Baik	Penumpang & Barang
2	Dermaga Sungai di Lok Baintan	Kab. Banjar	Kab. Banjar	-	N/A	N/A
3	Dermaga Alalak	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang & Barang
4	Dermaga Jelapat	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang & Barang
5	Dermaga Banjarraya	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	UPTD	Baik	Penumpang & Barang
6	Dermaga Saka Kajang	Kab. Batola	Kab. Batola	UPTD	Baik	Penumpang & Barang
7	Pasar Baru	Kota Banjarmasin	Kota Banjarmasin	-	Baik	Penumpang & Barang

Sumber Data : Dinas Perhubungan Prov/Kab/Kota. Tahun 2024

b. Angkutan Laut

Menurut penghitungan angka sementara, jumlah penumpang angkutan laut antarpulau dalam negeri yang berangkat melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada bulan Agustus 2024 sebesar 12.876 orang, naik sebesar 43,00 persen dibandingkan dengan penumpang yang berangkat pada bulan Juli 2024 yang berjumlah 9.004 orang. Pada bulan Agustus 2024, penumpang yang datang melalui Pelabuhan Trisakti Banjarmasin sebesar 15.819 orang, turun sebesar 4,88 persen dibanding dengan penumpang yang datang pada bulan Juli 2024 yang berjumlah 16.630 orang. Jumlah barang yang dimuat di Pelabuhan Trisakti pada bulan Agustus 2024 sebesar 7.180.239 ton atau naik sebesar 5,74 persen dibanding barang yang dimuat bulan Juli 2024 sebesar 6.790.600 ton. Jumlah barang yang dimuat pada bulan Agustus 2024 naik sebesar 5,81 persen jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2023 yang berjumlah 6.786.268 ton. Untuk barang yang dibongkar, pada bulan Agustus 2024 terjadi kenaikan sebesar 9,42 persen,

dimana jumlah barang yang dibongkar sebesar 11.220.421 ton, sedangkan pada bulan Juli 2024 jumlah barang yang dibongkar sebesar 10.254.512 ton. Jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, yaitu Agustus 2023, terjadi kenaikan sebesar 6,64 persen, dimana pada bulan tersebut jumlah barang yang dibongkar sebesar 10.521.697 ton.

Tabel 2.109 Perkembangan Penumpang dan Barang Pelayaran dalam negeri di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin

URAIAN	SATUAN	AGUSTUS 2023	JULI 2024	AGUSTUS 2024	PERSENTASE PERUBAHAN	
					AGUSTUS 2024 TERHADAP JULI 2024	AGUSTUS 2024 TERHADAP AGUSTUS 2023
PENUMPANG						
Berangkat	orang	13282	9004	12876	43.00	-3.06
Datang	orang	14064	16630	15819	-4.88	12.48
BARANG						
Muat	ton	6786268	6790600	7180239	5.74	5.81
Bongkar	ton	10521697	10254512	11220421	9.42	6.64

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan

e) *Transportasi Angkutan Udara*

Jumlah penumpang yang berangkat melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2024 sebesar 136.812 orang atau mengalami kenaikan sebesar 0,68 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat bulan Juli 2024 yang berjumlah 135.893 orang. Bila dibandingkan dengan jumlah penumpang yang berangkat pada bulan Agustus 2023 yang mengangkut 114.746 orang, terjadi kenaikan sebesar 19,23 persen. Penumpang yang berangkat melalui Bandara Udara Syamsudin Noor pada bulan Agustus 2024 sebesar 134.329 orang, naik sebesar 0,92 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang bulan Juli 2024 yang mengangkut 133.107 orang. Pada Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru pada bulan Agustus 2024 terdapat 726 orang penumpang yang berangkat, sedangkan di bulan sebelumnya sebesar 983 orang. Pada Bandara Bersujud Batulicin jumlah penumpang yang berangkat bulan Agustus 2024 sebesar 1.757 orang, sedangkan jumlah penumpang pada bulan sebelumnya adalah sebesar 1.803 orang. Bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2023, jumlah penumpang yang berangkat melalui Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 20,76 persen, Bandara Gusti Syamsir Alam turun sebesar 20,74 persen, dan Bandara Bersujud Batulicin turun sebesar 32,29 persen.

Tabel 2.110 Perkembangan Penumpang Berangkat dengan angkutan udara di Kalimantan Selatan Tahun 2024

BANDARA	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)			PERSENTASE PERUBAHAN	
	AGUSTUS 2023	JULI 2024	AGUSTUS 2024	AGUSTUS 2024 TERHADAP JULI 2024	AGUSTUS 2024 TERHADAP AGUSTUS 2023
Syamsudin Noor	111235	133107	134329	0.92	20.76
Gusti Syamsir Alam	916	983	726	-26.14	-20.74
Bersujud	2595	1803	1757	-2.55	-32.29
TOTAL	114746	135893	136812	0.68	19.23

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan, 2024

Jumlah penumpang yang datang melalui bandara di Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Agustus 2024 turun sebesar 12,87 persen, dimana jumlah penumpang yang datang pada bulan Agustus 2024 sebesar 137.292 orang sedangkan penumpang yang datang pada bulan Juli 2024 sebesar 157.574 orang. Bila dibandingkan dengan Agustus 2023, jumlah penumpang yang datang naik sebesar 20,39 persen, yang mana pada bulan Agustus 2023 tersebut penumpang yang datang sebesar 114.038 orang.

Penumpang yang datang di Bandara Udara Syamsudin Noor pada bulan Agustus 2024 sebesar 134.656 orang atau turun sebesar 12,99 persen dibandingkan dengan jumlah penumpang yang datang pada bulan Juli 2024 sebesar 154.759 orang. Pada Bandara Gusti Syamsir Alam Kotabaru, jumlah penumpang yang datang pada bulan Agustus 2024 adalah sebesar 640 orang, sedangkan pada bulan sebelumnya penumpang datang sebesar 896 orang. Penumpang yang datang di Bandara Bersujud Batulicin, bulan Agustus 2024 sebesar 1.996 orang, sedangkan jumlah penumpang datang pada bulan Juli 2024 adalah sebesar 1.919 orang. Bila dibandingkan dengan bulan Agustus 2023, jumlah penumpang yang datang di Bandara Syamsudin Noor naik sebesar 21,76 persen, Bandara Gusti Syamsir Alam turun sebesar 13,98 persen, dan Bandara Bersujud turun sebesar 26,16 persen.

Tabel 2.111 Perkembangan Penumpang Datang dengan Angkutan Udara di Kalimantan Selatan Tahun 2024

BANDARA	JUMLAH PENUMPANG (ORANG)			PERSENTASE PERUBAHAN	
	Agustus 2023	Juli 2024	Agustus 2024	Agustus 2024 terhadap Juli 2024	Agustus 2024 terhadap Agustus 2023
Syamsudin Noor	110591	154759	134656	-12.99	21.76
Gusti Syamsir Alam	744	896	640	-28.57	-13.98
Bersujud	2703	1919	1996	4.01	-26.16
TOTAL	114038	157574	137292	-12.87	20.39

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan



Gambar 2.37 Perkembangan Transportasi Udara Tahun 2024

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Prov. Kalimantan Selatan

8. Komunikasi dan Informatika

Blank spot merupakan kondisi di mana suatu tempat tidak tersentuh atau tidak terlingkupi oleh sinyal komunikasi, baik untuk komunikasi analog seperti jaringan telepon atau komunikasi digital seperti jaringan internet. Bila suatu tempat terjadi *blank spot*, maka komunikasi dua arah menjadi terhambat.

Berdasarkan data sampai dengan tahun 2024 sebaran desa bebas *blank spot* dan desa *blank spot* sebagaimana tercantum pada Tabel 2.103, ada 9 kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang masih memiliki desa *blank spot*. Area *blank spot* terbesar berada di Kabupaten Tanah Bumbu dengan jumlah desa *blank spot* mencapai 42 desa. Untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, dan Kabupaten Tapin secara keseluruhan sudah bebas *blank spot*.

Tabel 2.112 Persebaran Desa Bebas *Blank Spot* dan Desa *Blank Spot* 2024

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	DESA BEBAS BLANK SPOT s.d. 2024	DESA BLANKSPOT s.d. 2024
1	Kabupaten Tanah Laut	135	111	24
2	Kabupaten Hulu Sungai Utara	219	214	5
3	Kabupaten Tapin	135	135	0
4	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	148	133	15

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA	DESA BEBAS BLANK SPOT s.d. 2024	DESA BLANKSPOT s.d. 2024
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	169	155	14
6	Kabupaten Barito Kuala	201	162	39
7	Kabupaten Kotabaru	202	187	15
8	Kabupaten Tabalong	131	131	0
9	Kabupaten Tanah Bumbu	144	102	42
10	Kabupaten Banjar	290	276	14
11	Kabupaten Balangan	154	138	16
12	Kota Banjarmasin	52	52	0
13	Kota Banjarbaru	20	20	0
TOTAL		2000	1816	184

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

Dari data tersebut di atas untuk Kabupaten Tabalong, dari 131 Desa sudah terlayani jaringan Telekomunikasi, namun ada 7 desa yang masih tidak terlayani Jaringan Internet (4G) yang artinya desa tersebut masih menggunakan jaringan 2G.

Peningkatan teknologi sistem telekomunikasi seluler melalui penempatan Base Transceiver Station (BTS) merupakan upaya dalam mengurangi blank spot area dan memaksimalkan cakupan area terlayani pada suatu wilayah. Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum pada Tabel 2.104, pada tahun 2019 terdapat sebanyak 1.675 unit BTS, meningkat pada tahun 2020 menjadi 1.716 unit BTS, dan pada tahun 2021 menjadi 1.853 unit BTS. Pada Tahun 2021 dari 13 kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan, jumlah unit BTS terbanyak tersebar di Kota Banjarmasin sebanyak 296 unit, sedangkan jumlah yang terkecil berada di Kabupaten Balangan dengan jumlah BTS sebanyak 55 unit.

Tabel 2.113 Jumlah BTS di Provinsi Kalimantan Selatan s.d Tahun Terakhir 2019 - 2022

NO	NAMA KABUPATEN / KOTA	2019	2020	2021	2022
1	Kab. Tanah Laut	202	187	204	204
2	Kab. Kotabaru	133	133	83	83
3	Kab. Banjar	254	254	254	254
4	Kab. Barito Kuala	106	95	123	123
5	Kab. Tapin	85	85	85	85
6	Kab. Hulu Sungai Selatan	89	89	78	78
7	Kab. Hulu Sungai Tengah	76	78	76	76
8	Kab. Hulu Sungai Utara	52	52	65	65
9	Kab. Tabalong	244	244	244	244
10	Kab. Tanah Bumbu	163	163	158	158
11	Kab. Balangan	52	52	55	55
12	Kota Banjarmasin	114	179	296	296
13	Kota Banjarbaru	105	105	132	132
PROV. KALIMANTAN SELATAN		1675	1716	1853	1853

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, 2023

Berdasarkan data kepemilikan akses internet di masyarakat, jumlah desa/kelurahan yang memiliki fasilitas internet dan pelanggan telepon kabel semakin meningkat setiap tahunnya. Hal ini merupakan dampak dari tingginya jumlah pengguna internet di masa sekarang dengan banyaknya usaha yang menggunakan jasa online.

Dalam hal penyediaan informasi penyelenggaraan daerah telah dilakukan monitoring opini dan aspirasi publik serta monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi Pemerintah Daerah. Khusus untuk monitoring Opini telah dilakukan pengelolaan aduan masyarakat melalui sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang di Kalimantan Selatan lebih dikenal dengan istilah LAPORPAMAN.

Sedangkan dalam hal penyebaran informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dilakukan melalui media komunikasi publik dan media layanan informasi publik yang tersedia antara lain: melalui Radio LPPL Abdi Persada FM , portal berita Media Center dan layanan PPID serta melalui media komunikasi luar ruang Videotron sebanyak 2 (dua) unit.

Informasi yang disebarluaskan terdiri dari informasi pembangunan dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan pemerintah provinsi, baik itu menyangkut pendidikan, sosial dan budaya, hukum, kriminalitas, ekonomi, pariwisata, olahraga dan kesehatan. Khusus untuk layanan PPID Informasi yang dikecualikan, informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. Layanan PPID baru beroperasi pada tahun 2019 dikarenakan sebelumnya PPID melekat pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019. Adapun media informasi Videotron baru dioperasikan dari tahun 2019 sedangkan tahun sebelumnya masih dalam tahap pemasangan dan penyesuaian, sehingga data informasi yang dihimpun dimulai sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dapat di akses.

9. Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah

Salah satu penunjang perekonomian masyarakat mikro adalah koperasi yang merupakan wadah kegiatan produktif masyarakat dalam mengembangkan dan memberdayakan perekonomian rakyat. Pada tahun 2024 jumlah koperasi di Provinsi Kalimantan Selatan sebanyak 3.087 unit yang sebagian besar merupakan jenis koperasi pegawai negeri (435 unit); koperasi serba usaha (513 unit); dan koperasi unit desa (300 unit). Jumlah koperasi tahun 2020 – 2024 sebagaimana yang terlihat pada Tabel 2.116.

Tabel 2.114 Jumlah Unit Koperasi Menurut Jenis Koperasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

JENIS KOPERASI	2020	2021	2022	2023	2024
Koperasi Unit Desa	384	385	300	300	300
Koperasi Pegawai Negeri	437	418	435	434	435
Koperasi Karyawan	207	202	230	231	231
Koperasi Industri Kerajinan	13	57	15	15	16
Koperasi Angkutan/ Darat/Laut/ Sungai	23	21	26	26	27
Koperasi Serba Usaha	503	526	507	509	513
Koperasi Generasi Muda/ Mahasiswa	28	2	29	29	29
Koperasi Veteran	10	8	9	9	9
Koperasi Wredatama	14	6	11	11	11
Koperasi Wanita	88	89	84	84	84
Koperasi Simpan Pinjam	75	73	88	92	92
Koperasi Jasa/Profesi	46	34	27	27	27
Koperasi Pasar	31	30	39	39	39
Koperasi Pondok Pesantren	67	64	66	66	66
Koperasi Pertanian	140	132	149	149	149
Koperasi Perikanan/Nelayan	21	17	29	29	29
Koperasi Perkebunan	62	64	79	83	84
Koperasi Peternakan	11	9	12	13	13
Koperasi Kehutanan	3	4	4	4	4
Koperasi Angkatan Darat	26	28	28	28	28
Koperasi Angkatan Laut	3	3	3	3	3
Koperasi Angkatan Udara	1	1	1	1	1
Koperasi Kepolisian	18	19	19	19	19
Koperasi Jamu Gendong	-	1	1	1	1
Koperasi PEPABRI	6	9	9	9	9
Koperasi Pertambangan	3	1	1	1	1
KJKS	62	61	61	61	61
Koperasi Produsen	30	-	-	-	-
Koperasi Konsumen	2	-	-	-	-
Koperasi Sekunder	25	13	13	13	13
Koperasi Lain-Lain	267	604	657	717	776
Koperasi Wisata	-	-	1	2	2
Koperasi Perumahan	-	-	1	1	1
Koperasi Pedagang Kaki Lima	-	-	3	3	3
Kop. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)	-	-	6	6	7
Koperasi Multi Pihak	-	-	-	-	2
Koperasi Digital	-	-	-	-	2
JUMLAH	2.606	2.892	2.943	3.015	3087

Sumber:Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Usaha mikro dan menengah di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 yang tersebar di kabupaten/kota se Kalimantan Selatan meliputi Usaha Mikro sebanyak 273.450 Unit. Usaha Menengah sebanyak 209 Unit. dan Usaha Kecil sebanyak 1689 Unit. Lebih lengkapnya diuraikan pada tabel 2.117 berikut:

Tabel 2.115 Jumlah Jenis Usaha Mikro Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KABUPATEN /KOTA	KULINER	FASHION	PENDIDIKAN	OTOMOTIF	AGRIBISNIS	TEKNIK INTERNET	BIDANG LAINYA	JUMLAH
Tanah Laut	2.323	3.555	2	3.555	-	249	3.316	11.430
Kotabaru	283	439	-	440	-	14	568	1.744
Banjara	4.435	7.228	5	7.228	-	487	6.790	26.173
Barito Kuala	4.937	7.741	379	7.740	-	607	8.598	30.002
Tapin	3.907	3.856	104	3.857	-	287	4.906	16.917
H.S. Selatan	3.150	7.788	-	7.789	-	181	4.032	22.940
H.S. Tengah	6.298	6.623	577	6.623	-	469	8.306	28.896
H.S Utara	4.535	7.629	442	7.630	-	545	17.288	38.069
Tabalong	5.807	5.944	279	5.944	-	441	6.983	25.398
Tanah Bumbu	4.927	6.050	268	6051	-	441	7.225	24.962
Balangan	3144	3419	274	3420	-	277	4.145	14.679
Banjarmasin	1.493	2.654	3	2.654	-	205	1.284	8.314
Banjarbaru	5.783	5.002	276	5003	-	318	7.533	23.915
JUMLAH	47.512	67.928	2.609	67.934	-	4.521	65.474	275.348

Sumber:Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Tabel 2.116 Jumlah Jenis Usaha Menengah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KABUPATEN/ KOTA	KULINER	FASHION	PENDIDIKAN	OTOMOTIF	AGRIBISNIS	TEKNIK INTERNET	BIDANG LAINYA	JUMLAH
Tanah Laut	-	3	-	3	-	-	-	6
Kotabaru	-	-	-	-	-	-	-	-
Banjara	-	3	-	2	-	1	-	6
Barito Kuala	1	7	-	8	-	-	4	20
Tapin	-	3	-	2	-	-	2	7
H.S. Selatan	-	1	-	1	-	-	-	2
H.S. Tengah	-	7	-	8	-	-	5	20
H.S Utara	2	7	-	8	-	-	8	25
Tabalong	4	9	-	10	-	1	14	38
Tanah Bumbu	1	9	-	9	-	-	6	25
Balangan	-	1	-	1	-	-	1	3
Banjarmasin	-	-	-	-	-	-	-	-
Banjarbaru	5	13	1	14	-	1	23	57
JUMLAH	13	62	1	66	-	3	73	202

Sumber:Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Tabel 2.117 Jumlah Jenis Usaha Kecil Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KABUPATEN/ KOTA	KULINER	FASHION	PENDIDIKAN	OTOMOTIF	AGRIBISNIS	TEKNIK INTERNET	BIDANG LAINYA	JUMLAH
Tanah Laut	2.323	3.555	2	3.555	-	249	3.316	11.430

KABUPATEN/ KOTA	KULINER	FASHION	PENDIDIKAN	OTOMOTIF	AGRIBISNIS	TEKNIK INTERNET	BIDANG LAINYA	JUMLAH
Kotabaru	283	439	-	440	-	14	568	1.744
Banjar	4.435	7.228	5	7.228	-	487	6.790	26.173
Barito Kuala	4.937	7.741	379	7.740	-	607	8.598	30.002
Tapin	3.907	3.856	104	3.857	-	287	4.906	16.917
H.S. Selatan	3.150	7.788	-	7.789	-	181	4.032	22.940
H.S. Tengah	6.298	6.623	577	6.623	-	469	8.306	28.896
H.S Utara	4.535	7.629	442	7.630	-	545	17.288	38.069
Tabalong	5.807	5.944	279	5.944	-	441	6.983	25.398
Tanah Bumbu	4.927	6.050	268	6051	-	441	7.225	24.962
Balangan	3144	3419	274	3420	-	277	4.145	14.679
Banjarmasin	1.493	2.654	3	2.654	-	205	1.284	8.314
Banjarbaru	5.783	5.002	276	5003	-	318	7.533	23.915
JUMLAH	47.512	67.928	2.609	67.934	-	4.521	65.474	275.348

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Tabel 2.118 Rekap Data UMKM Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KLASIFIKASI	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha Mikro	376.233	326.786	328.567	273.423	273.450
2	Usaha Kecil	32.533	33.222	33.222	1712	1689
3	Usaha Menengah	3.140	2.839	2.839	213	209
	TOTAL	411.906	364.868	366.650	275348	275.348

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Tabel 2.119 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Koperasi Aktif Per Tahun	%	57.81	58.21	59.7	64.18	67.16
2	Persentase Koperasi yang menyelenggarakan RAT	%	37.84	51.35	54.05	55.22	56.71
3	Persentase Penumbuhan Koperasi Baru	%	10.81	10.85	11.18	12.70	12.62
4	Persentase Peningkatan Nilai Bisnis Koperasi dan UK	%	4.91	1.20	1.22	1.24	1.49
5	Persentase Peningkatan Kemandirian (struktur) Permodalan Koperasi dan UK	%	88.74	0.25	0.30	0.36	0.45

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah Koperasi dan UK yang memiliki Legalitas Usahanya	Unit	35	40	40	N/A*	
7	Jumlah Nilai Transaksi Promosi	Juta	0	0	650	N/A*	
8	Jumlah Usaha Kecil yang mampu mengakses Pasar Modern	Unit	20	20	25	N/A*	
9	Jumlah Jenis Produk Unggulan Koperasi dan UK yang mampu masuk ke Pasar Luar Daerah	Item	5	3	3	N/A*	

Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan 2024

10. Penanaman Modal

Investasi dalam pengembangan perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan masih sangat dibutuhkan dalam memberdayakan setiap sumber daya baik manusia maupun alam. Investasi berupa penanaman modal usaha di Provinsi Kalimantan Selatan sudah mulai merata di setiap kabupaten/kota meskipun masih terdapat beberapa kabupaten yang belum diminati investor secara umum. Berikut ini adalah data investasi daerah menurut kabupaten dan kota tahun 2024.

Tabel 2.120 Jumlah Proyek, Rencana, dan Realisasi Investasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2024 PMA dan PMDN

KABUPATEN/ KOTA	PMDN		PMA			PMDN + PMA	
	PMDN PROYEK	PMDN_TAMBAHAN_ JUTA	PMA_ PROYEK	PMA_TAMBAHAN USD_RIBU	PMA_ TAMBAHAN_JUTA	TOTAL_ PROYEK	TOTAL_TAMBAHAN JUTA
Kabupaten Kotabaru	362	Rp 910.437,40	121	\$ 246.665,10	Rp 3.699.977,77	483	Rp 4.610.415,17
Kabupaten Tanah Bumbu	908	Rp 2.781.408,40	70	\$ 62.185,30	Rp 932.779,96	978	Rp 3.714.188,36
Kota Banjarmasin	1894	Rp 2.973.888,40	162	\$ 8.411,30	Rp 126.169,56	2056	Rp 3.100.057,96
Kabupaten Tapin	356	Rp 1.618.639,20	10	\$ 4.627,80	Rp 69.417,05	366	Rp 1.688.056,25
Kabupaten Banjar	1152	Rp 1.204.451,70	168	\$ 2.397,20	Rp 35.958,03	1320	Rp 1.240.409,73
Kabupaten Tanah Laut	469	Rp 904.684,40	129	\$ 21.076,90	Rp 316.153,75	598	Rp 1.220.838,15
Kabupaten Tabalong	949	Rp 684.820,70	75	\$ 13.056,50	Rp 195.847,66	1024	Rp 880.668,36
Kabupaten Balangan	479	Rp 296.144,20	9	\$ 23.766,30	Rp 356.494,52	488	Rp 652.638,72
Kota Banjar Baru	1012	Rp 227.279,50	84	\$ 10.794,30	Rp 161.914,51	1096	Rp 389.194,01
Kabupaten Hulu Sungai Selatan	161	Rp 322.522,90				161	Rp 322.522,90
Kabupaten Hulu Sungai Tengah	272	Rp 182.108,20	13	\$ 31,70	Rp 475,50	285	Rp 182.583,70
Kabupaten Barito Kuala	151	Rp 75.362,70	43	\$ 3.643,50	Rp 54.652,57	194	Rp 130.015,27

KABUPATEN/ KOTA	PMDN		PMA			PMDN + PMA	
	PMDN PROYEK	PMDN_TAMBAHAN_ JUTA	PMA_ PROYEK	PMA_TAMBAHAN USD_RIBU	PMA_ TAMBAHAN_JUTA	TOTAL_ PROYEK	TOTAL_TAMBAHAN _JUTA
Kabupaten Hulu Sungai Utara	90	Rp 2.993,80				90	Rp 2.993,80
TOTAL	8255	Rp 12.184.742,00	884	\$ 396.655,90	Rp 5.949.840,88	9139	Rp 18.134.582,38

Sumber: BKPM 2024

11. Kepemudaan dan Olahraga

Pembinaan atlet muda melalui program PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar) dan PPLPD (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Daerah) di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika yang fluktuatif sepanjang tahun 2020 hingga 2024. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan pada tabel 2.123, jumlah atlet PPLP cenderung mengalami penurunan dari 30 atlet pada tahun 2020 menjadi 20 atlet pada tahun 2024. Penurunan ini berpotensi disebabkan oleh keterbatasan anggaran pembinaan, seleksi atlet yang lebih ketat, serta dampak jangka panjang pandemi terhadap program pelatihan.

Sementara itu, jumlah atlet PPLPD mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Pada tahun 2020 dan 2021, jumlah atlet tercatat stabil sebanyak 144 orang. Namun, terjadi penurunan tajam pada tahun 2022 menjadi hanya 62 atlet, yang kemungkinan dipengaruhi oleh restrukturisasi program atau pengurangan alokasi pembiayaan. Meski demikian, tren pemulihan terlihat pada tahun 2023 dan 2024, dengan peningkatan jumlah atlet masing-masing menjadi 116 dan 120 orang. Hal ini mencerminkan upaya Pemerintah Daerah dalam mengembalikan kapasitas pembinaan atlet lokal secara bertahap.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pembinaan olahraga daerah melalui optimalisasi program PPLP dan PPLPD agar mampu mencetak bibit-bibit atlet potensial secara berkelanjutan. Upaya sinergi antara Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk menjaga kesinambungan pembinaan dan peningkatan prestasi olahraga daerah di tingkat nasional.

Tabel 2.121 Jumlah Atlet PPLP dan Atlet PPLPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 sd 2024

TAHUN	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Atlet PPLP	30	26	24	24	20
Jumlah Atlet PPLPD	144	144	62	116	120

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga Prov. Kalimantan Selatan, 2025

Sarana dan Prasarana Olahraga

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki berbagai sarana dan prasarana olahraga yang tersebar di beberapa wilayah sebagai pusat pembinaan, kompetisi, serta kegiatan rekreasi masyarakat. Fasilitas olahraga yang tersedia antara lain Stadion 17 Mei sebagai ikon olahraga daerah, GOR Hasanuddin HM, GOR Babussalam Banjarbaru, serta SKB Mulawarman yang berfungsi sebagai pusat pelatihan dan penyelenggaraan berbagai event olahraga.

Selain itu, terdapat pula sarana olahraga berbasis komunitas seperti Lapangan Volly Pasir Gatot Sorbroto, Lapangan Sepakbola Kayutangi, serta Panjat Dinding Kayutangi yang mendukung aktivitas olahraga masyarakat dan pembinaan atlet muda.

Kawasan olahraga terpadu Swargaloka juga menjadi salah satu pusat unggulan dengan fasilitas Lapangan Golf, Driving Range, Mess Atlet, dan Lapangan Tembak, yang dapat menunjang kebutuhan pembinaan prestasi sekaligus pengembangan sport tourism. Tidak kalah penting, terdapat Lapangan Tennis Dharma Praja yang turut mendukung olahraga prestasi dan rekreasi.

Dengan ketersediaan sarana dan prasarana tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan, peningkatan, serta optimalisasi pemanfaatan guna mendorong lahirnya atlet berprestasi, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam olahraga, serta mendukung pembangunan sektor keolahragaan yang berkelanjutan.

12. Statistik

Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik. menggambarkan bahwa peran statistik sangat penting dalam perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi pembangunan dan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Data yang tepat akan sangat membantu dalam proses perencanaan pembangunan. Pada undang-undang ini juga dijelaskan bahwa tugas penyelenggaraan statistic dilakukan oleh Badan Pusat Statistik khususnya terkait dengan data dasar pembangunan.

Sementara dalam Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 mendelegasikan data statistik kepada Pemerintah daerah. khususnya data Sektoral. Yang dimaksud dengan data sektoral adalah data yang diproduksi oleh pengampu urusan dan akan dimanfaatkan secara sektoral pula. sedangkan data dasar selain bersifat sektoral juga bersifat non sektoral. sehingga dengan demikian pemerintah daerah berkewajiban membangun data sectoral sesuai dengan kewenangan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014.

KEGIATAN STATISTIK SEKTORAL

Kegiatan statistik sektoral yang dinilai pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan adalah:

- Kompilasi Statistik Perkebunan Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2023
- Pengelolaan Pendataan 26 Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), Tahun 2023

HASIL PENILAIAN

Hasil penilaian dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4
Nilai Indeks Pembangunan Statistik
dan Nilai Indeks Domain

Domain	Bobot	Nilai Harapan	Nilai Nasional	Nilai Hasil Penilaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Domain Prinsip SDI	28%	2,60	2,43	2,75
Domain Kualitas Data	24%	2,60	2,27	1,75
Domain Proses Bisnis Statistik	19%	2,60	2,47	2,21
Domain Kelembagaan	17%	2,60	2,32	2,05
Domain Statistik Nasional	12%	2,60	2,20	2,45
Indeks Pembangunan Statistik	100%	2,60	2,35	2,25

13. Persandian

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, urusan persandian merupakan urusan pemerintah daerah wajib non pelayanan dasar. Artinya pemerintah provinsi memiliki kewajiban menyelenggarakan urusan ini sesuai dengan kewenangan. Salah satu kewenangan adalah pengamanan informasi pemerintah daerah. terlebih pada saat ini sistem informasi pemerintah daerah sudah bersifat paperless atau digital dan online yang dengan mudah diakses oleh siapa saja yang menguasai teknologi informasi.

Berdasarkan arahan Kepala Lembaga Sandi Negara (LSN) yang dituangkan dalam Peraturan Kepala Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017, bahwa penyelenggaraan persandian merupakan penjabaran atas pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang persandian

yang meliputi perencanaan. pelaksanaan. pemantauan dan evaluasi serta pelaporan. pembiayaan dan pembinaan serta pengawasan. Kalimantan Selatan dalam melaksanakan urusan persandian dikaitkan dengan penyelenggaraan komunikasi dan informasi daerah yang berkaitan dengan aplikasi informasi yang dikembangkan.

14. Kebudayaan

Dalam rangka mengangkat harkat dan martabat kebudayaan harus dikembangkan kelembagaan kebudayaan sebagai pilar kebudayaan. Kelembagaan ini terkait dengan keberadaan unsur budaya yang ingin dikembangkan di Kalimantan Selatan melalui pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan kebudayaan lokal. Tujuan dari pembinaan ini adalah dalam rangka mengawal kebudayaan lokal dalam konstelasi kebudayaan nasional yang berakar pada kebudayaan daerah. Seni dan budaya turut menghiasi kehidupan masyarakat Kalimantan Selatan. Dari seni dan budaya tersebut berkembang nilai-nilai luhur yang diharapkan dapat menangkal pengaruh buruk dari kebebasan yang pesat arus informasi yang global. Oleh karena itu pelestarian budaya serta nilai-nilai luhur yang tercantum di dalamnya dapat memperkuat kualitas sumber daya manusia Kalimantan Selatan.

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kalimantan Selatan selama periode 2020–2023 menunjukkan tren fluktuatif, meskipun secara umum berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2023, indeks kebudayaan Kalimantan Selatan tercatat sebesar 58,55, sedikit lebih tinggi dibandingkan nasional yang berada pada angka 57,13. Namun, capaian ini mengalami perlambatan dibanding lonjakan pada tahun 2022 yang mencapai 58,45, setelah sebelumnya meningkat signifikan dari 52,45 di 2021. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa capaian pembangunan kebudayaan di Kalimantan Selatan belum berjalan secara stabil dan sistemik. Rendahnya kesinambungan dukungan terhadap pelestarian budaya lokal, minimnya investasi pada sektor ekonomi kreatif berbasis budaya, serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan nilai-nilai budaya menjadi faktor utama permasalahan.

Selain itu, tantangan lain muncul dalam bentuk kurangnya data dan indikator turunan yang mampu menggambarkan kontribusi nyata sektor budaya terhadap pembangunan daerah. Permasalahan ini menegaskan pentingnya kebijakan kebudayaan yang lebih terpadu dan berkelanjutan, termasuk penguatan kapasitas lembaga kebudayaan, peningkatan akses terhadap pendidikan budaya, serta revitalisasi ruang-ruang ekspresi seni dan warisan budaya lokal di wilayah Kalimantan Selatan.

Tabel 2.122 Perbandingan Indeks Kebudayaan Nasional dengan Kalimantan Selatan Tahun 2020-2023

TAHUN	NASIONAL	KALSEL
2018	53,74	53,79
2019	55,91	55,99
2020	54,65	54,41
2021	51,9	52,45
2022	55,13	58,45
2023	57,13	58,55

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan mayoritas penduduk suku Banjar, memiliki kekayaan budaya yang sangat besar, yang bisa dikembangkan sesuai dengan indikator dalam IPK.

1. Seni dan Ekspresi Budaya
 - a. Seni Tari: Tari Radap Rahayu, Tari Baksa Kembang, dan Tari Kuda Gepang.
 - b. Seni Musik: Musik Panting, alat musik tradisional seperti babun, gambus, dan kuriding.
 - c. Seni Pertunjukan: Madihin (puisi spontan khas Banjar), Wayang Gung, dan Mamanda (teater rakyat).
2. Adat Istiadat dan Ritus
 - a. Upacara adat seperti Batumbang, Bapalas Bidan, dan Badudus (ritual pembersihan).
 - b. Tradisi Haul Guru Sekumpul, ziarah massal yang menarik ratusan ribu orang setiap tahun.
3. Bahasa
 - a. Bahasa Banjar sebagai bahasa daerah utama, dengan dua dialek utama: Banjar Hulu dan Banjar Kuala.
 - b. Potensi pelestarian melalui pendidikan dan media lokal.
4. Manuskrip dan Warisan Tertulis
 - a. Naskah kuno beraksara Arab Melayu dan Pegon di pesantren-pesantren tua.
 - b. Manuskrip sastra dan hukum adat dari Kesultanan Banjar.
5. Teknologi Tradisional
 - a. Arsitektur rumah adat Banjar: Rumah Bubungan Tinggi.
 - b. Perahu tradisional seperti jukung tambangan dan klotok.
 - c. Keterampilan membuat kain sasirangan (kain tradisional khas Kalsel).
6. Pengetahuan Tradisional
 - a. Pengetahuan pengobatan tradisional dari ramuan lokal.

- b. Sistem pertanian ladang dan perikanan sungai berbasis kearifan lokal.
- c. Pengetahuan astronomi lokal dalam penentuan musim tanam atau penanggalan adat.

Tabel 2.123 Warisan Budaya Takbenda Indonesia Kalimantan Selatan yang telah ditetapkan

NO. PENETAPAN	KARYA BUDAYA	DOMAIN	TAHUN PENETAPAN
201800765	Mappanretasi Pagatan	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2018
201800766	Tenun Pagatan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2018
201800767	Damarulan/Damarwulan Banjarmasin	Seni Pertunjukan	2018
201901043	Nasi Astakona	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2019
201901044	Arsitektur Rumah Lanting	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2019
201901045	Bagasing Kalimantan Selatan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2019
201901046	Anyaman Purun Kalimantan Selatan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2019
201901047	Kurung-Kurung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2019
201901048	Bawanang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2019
201901049	Itatamba Banua	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2019
201901050	Ma'iwuu	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2019
201901051	Nimbuk	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan	2019
202001204	Bagandut	Seni Pertunjukan	2020
202001205	Lampit Amuntai	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2020
202001206	Tihang Bakambang	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	2020
202101314	Tari Radap Rahayu	Seni Pertunjukan	2021
202101316	Manyampir Buaya	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	2021
202204268	Hadangan Kalang	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku mengenai Alam Semesta	2022

NO. PENETAPAN	KARYA BUDAYA	DOMAIN	TAHUN PENETAPAN
	Ketupat Kandangan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2022
202204270	Masiwah Pare Gumboh	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	2022
202204269	Ladon	Seni Pertunjukan	2022
202309000	Arangan	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2023
202308999	Bapandung	Tradisi dan Ekspresi Lisan	2023
202400274	Pembuatan Jukung	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2024
202400278	Kalayangan Dandang	Keterampilan dan Kemahiran Kerajinan Tradisional	2024
202400292	Wayang Topeng Cerita	Seni Pertunjukan	2024
202400289	Batimung	Pengetahuan dan Kebiasaan Perilaku mengenai Alam Semesta	2024
202400455	Kalangkang Mantit	Adat Istiadat Masyarakat, Ritus, dan Perayaan-Perayaan	2024

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Tabel 2.124 Data Cagar Budaya Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Selatan

NO	KABUPATEN/KOTA	KATEGORI OBJEK					TOTAL CB
		BENDA	BANGUNAN	STRUKTUR	SITUS	KAWASAN	
1	Kota Banjarmasin	0	7	7	0	0	14
2	Kota Banjarbaru	0	0	0	0	0	0
3	Kab. Banjar	3	3	1	0	3	10
4	Kab. Batola	0	0	0	0	0	0
5	Kab. Tapin	0	1	0	0	0	1
6	Kab. Tanah Laut	0	4	0	0	0	4
7	Kab. Tanah Bumbu	0	9	0	0	0	9
8	Kab. Kotabaru	0	0	2	0	0	2
9	Kab. Hulu Sungai Selatan	1	3	27	1	0	32
10	Kab. Hulu Sungai Tengah	0	1	0	0	0	1
11	Kab. Hulu Sungai Utara	0	1	0	0	0	1
12	Balangan	6	5	3	0	0	14
13	Tabalong	0	3	8	0	0	11

CB Peringkat kab/Kota	CB Peringkat Prov
87	12

Di Kalimantan Selatan objek pemajuan kebudayaan yang terhimpun dari 13 Kabupaten/Kota sebanyak 2.664 Jenis/Buah. Berdasarkan hasil verifikasi 10 (sepuluh) objek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya, diperoleh rekapitulasi sebagai berikut:

Tabel 2.125 Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya

NO	OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAN CAGAR BUDAYA	JUMLAH
1	Manuskrip	58 Jenis
2	Tradisi Lisan	279 Jenis
3	Adat Istiadat	293 Jenis
4	Ritus	303 Jenis
5	Pengetahuan Tradisional	538 Jenis
6	Teknologi Tradisional	359 Jenis
7	Seni	354 Jenis
8	Bahasa	109 Jenis
9	Permainan Rakyat	225 Jenis
10	Olahraga Tradisional	80 Jenis
11	Cagar Budaya	99 Jenis

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

Rekomendasi strategi Pemajuan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan

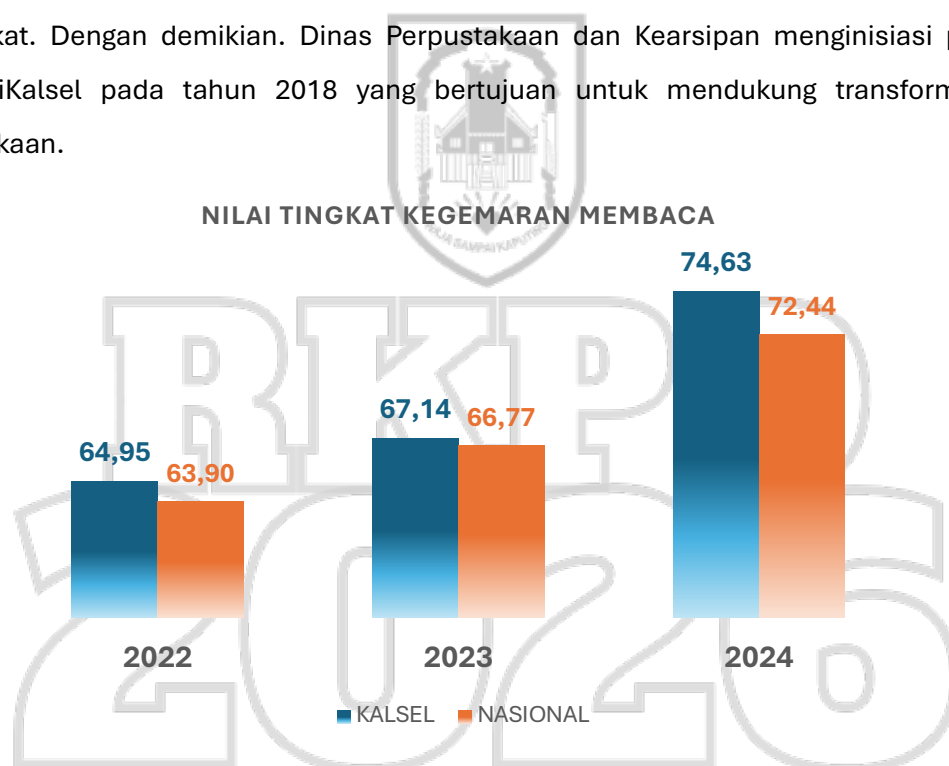
1. **Pendokumentasian & Digitalisasi Budaya**
Memprioritaskan inventarisasi manuskrip, seni pertunjukan, dan bahasa Banjar dalam bentuk digital.
2. **Pendidikan Budaya Lokal**
Integrasi kebudayaan lokal dalam kurikulum sekolah (muatan lokal) serta pelatihan guru.
3. **Revitalisasi Ruang Budaya**
Memanfaatkan museum daerah, sanggar seni, dan tempat ibadah untuk kegiatan budaya reguler.
4. **Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya**
Mendorong pengrajin sasirangan, seni pertunjukan Madihin, dan wisata budaya berbasis komunitas.
5. **Kolaborasi Antar Lembaga**

Menghubungkan lembaga pemerintah, komunitas budaya, dan pelaku UMKM dalam satu ekosistem budaya yang berkelanjutan.

15. Perpustakaan dan Kearsipan

a) Perpustakaan

Masih rendahnya minat baca masyarakat Kalimantan Selatan memerlukan upaya keras agar masyarakat memiliki daya saing sebagai tenaga kerja. Untuk mendorong minat baca diperlukan berbagai fasilitasi baik secara persuasif maupun atraktif kepada semua lapisan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menginisiasi pembuatan aplikasi iKalsel pada tahun 2018 yang bertujuan untuk mendukung transformasi digital perpustakaan.



Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022-2024

16. Kearsipan

Pengelolaan kearsipan di Kalimantan Selatan dikembangkan berdasarkan klasifikasi arsip. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya kemampuan pengelolaan kearsipan, baik dari segi tenaga maupun teknologi peralatannya.

Tabel 2.126 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Tahun 2023-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA	
		2023	2024
Persentase Peningkatan Kemanfaatan Perpustakaan oleh Pemustaka	%	5	2
Indeks/Kualitas Pengelolaan Arsip	Indeks	67,14	80,1
Jumlah inovasi yang dicanangkan	Jumlah	1	1

Sumber: Dispersip Provinsi Kalimantan Selatan. 2025

Sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan akuntabel, pengelolaan arsip memegang peranan penting dalam mendukung transparansi, akurasi data, serta kesinambungan informasi. Arsip menjadi sumber informasi yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, maupun dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya. Dalam praktiknya, arsip terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari, sedangkan arsip statis merupakan arsip yang sudah tidak digunakan lagi secara aktif, namun memiliki nilai guna sekunder dan disimpan secara permanen.

Sebagai bagian dari upaya penataan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis data, pengelolaan arsip terus ditingkatkan untuk mendukung penyediaan informasi yang cepat, tepat, dan terpercaya. Sampai saat ini, jumlah arsip statis yang telah terdokumentasi mencapai 28.831 berkas yang tersimpan dalam 2.371 boks, sementara arsip dinamis yang masih digunakan secara aktif dalam proses administrasi pemerintahan tercatat sebanyak 50.956 berkas. Ketersediaan dan penataan arsip tersebut merupakan bagian integral dari upaya penguatan sistem dokumentasi pemerintahan, yang mendukung kelancaran perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah.

2.5.3 Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pertanian yang sangat besar sebagai modal dasar pergerakan roda perekonomian daerah. Potensi inilah yang menjadikan pertanian menjadi salah satu sektor dominan dalam pembentukan struktur perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi PDRB 13.93% terhadap perekonomian daerah.

Perlu digaris bawahi bahwa sektor pertanian memiliki keunggulan dalam mewujudkan sustainability development karena sektor tersebut merupakan sektor yang menggali potensi sumber daya alam terbarukan. Meskipun sekarang pertambangan dan penggalan mendominasi struktur perekonomian, namun sektor pertanian juga memiliki kekuatan yang tidak kalah besarnya dengan sektor pertambangan dan penggalan sehingga pergeseran sektor ekonomi dapat dilaksanakan dengan berkelanjutan.

Kontribusi sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi terus meningkat seiring waktu. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan bidang pertanian mempunyai kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor Pertanian merupakan sektor penyumbang terbesar kedua yaitu 11.40% untuk Tahun 2022 setelah sektor pertambangan dan penggalan sebesar 32.05% dan penyumbangan ketiga yaitu industri pengolahan yaitu 11.39% terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Namun kondisi ini bebanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan petani.

Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai Luas Baku Sawah untuk Tahun 2019 seluas 291.145 hektar. Namun dalam pengelolaannya, petani memiliki tantangan dan hambatan tersendiri. Hal ini menjadi fokus utama dan terminologi melalui bentuk upaya meningkatkan kesejahteraan petani melalui pengembangan kelembagaan ekonomi petani, efisiensi usaha dan meningkatkan posisi tawar petani dari sub sektor hulu ke hilir.

Salah satu konsep dan model pengembangan sektor pertanian di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani yang merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi melalui kelembagaan ekonomi petani yang berbadan hukum baik itu berbentuk koperasi atau badan hukum lainnya dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani. Kawasan pertanian sendiri menjadi salah satu program strategis pembangunan pertanian nasional yang merupakan solusi atau upaya menuju kedaulatan dan kemandirian pangan, hal tersebut juga merupakan salah satu upaya untuk mengurangi ketergantungan impor sehingga ekonomi dapat tumbuh berkualitas dan masyarakat pertanian meningkat kesejahteraannya. Sejalan hal tersebut, Provinsi Kalimantan Selatan sebagai provinsi penyangga pangan dan pertanian Ibu Kota Negara baru melalui pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi petani sesuai model karakteristik daerahnya dengan mengangkat potensi sumber daya lokal dan unggul dalam rangka transformasi ekonomi melalui hilirisasi sektor pertanian.

a) Sektor Pertanian

a. Sub sektor Tanaman Pangan

Produksi pertanian di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan positif pada 2024, dengan beberapa komoditas mengalami peningkatan hasil. Padi mencatat produksi mencapai

1.006.429.59 ton dengan produktivitas stabil di 40.9 Ku/Ha. menunjukkan efisiensi yang tetap terjaga. Jagung mengalami peningkatan produksi menjadi 86.012.6 ton dengan luas panen mencapai 16.385.4 Ha. Ubi kayu dan ubi jalar juga menunjukkan produktivitas yang tinggi. masing-masing mencapai 328.53 Ku/Ha dan 224.28 Ku/Ha di 2024. Selain itu. kacang tanah terus mengalami peningkatan hasil dengan produksi mencapai 2.768.2 ton. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan strategi pertanian yang diterapkan. baik dalam optimalisasi lahan. penerapan teknologi. maupun dukungan kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas petani. untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel 2.126.

Tabel 2.127 Luas Panen. Produksi. serta Produktivitas Padi dan Palawija Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2021-2024

JENIS TANAMAN		PADI (SAWAH & LADANG)	JAGUNG	KEDELA	KACANG TANAH	KACANG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
2021	Luas Panen (Ha)	254.264	44.868	487	2.556	125	1.351	608
	Produksi (Ton)	1.016.314	264.168	852	3.258	147	45.506	12.532
	Produktivitas (Ku/Ha)	39.97	58.88	17:05	0.55	11.77	336.96	206.16
2022	Luas Panen (Ha)	216.022	25.123	6.963	1.570	65	1.102	354
	Produksi (Ton)	819.419	149.432	11.902	1.974	80	37.010	6.035
	Produktivitas (Ku/Ha)	38.6	58.88	17:50	0.55	11.77	336.96	206.16
2023	Luas Panen (Ha)	214.284	14.911	1.883	1.722	37	965.8	438.4
	Produksi (Ton)	875.546	82.994	2.769	2.362	28.7	33.555	9.832
	Produktivitas (Ku/Ha)	40.9	55.66	14.71	13.72	7.76	347.43	224.28
2024*	Luas Panen (Ha)	246.112	16.385.4	185.01	2.011.95	66	989.75	354.15
	Produksi (Ton)	1.006.429.59	86.012.6	272.15	2.768.2	34.8	32.516.7	7.937.3
	Produktivitas (Ku/Ha)	40.90	52.5	14.71	13.759	5.27	328.534	224.28

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan. 2024

Tabel 2.128 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Tahun 2019 – 2024

NO	URAIAN	TARGET (JLH)	CAPAIAN KINERJA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PPH Tingkat Ketersediaan (Skor)	84.5	77.54	72.19	79.68	67.56	70.53	80.4

Tabel 2.129 Skor Minimal Cadangan Pangan Pemerintah CPP Provinsi Tahun 2019 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Stok CPP Provinsi						
	Beras (ton)	220.76	435.3	386.8	667.12	515.01	349.43

Tabel 2.130 Skor Pola Pangan Tingkat Konsumsi Tahun 2019 – 2024

NO	URAIAN	TAHUN					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	PPH Konsumsi	85.1	86.3	85.9	87.8	88.1	92.29

b. Sub Sektor Hortikultura

Pada sub sektor hortikultura. Produksi buah-buahan di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif dengan peningkatan produktivitas pada beberapa komoditas. Jeruk siam tetap mencatat produksi tertinggi di 2024 sebesar 123.495.87 ton. dengan produktivitas 23.68 ton/Ha. Pisang mengalami peningkatan produktivitas yang signifikan. dari 58.01 ton/Ha (2023) menjadi 66.59 ton/Ha (2024). dengan produksi mencapai 72.599.66 ton. Durian terus mengalami perkembangan dengan produksi mencapai 41.600.78 ton dan produktivitas meningkat menjadi 14.5 ton/Ha. Nanas menunjukkan produktivitas mencapai 59.56 ton/Ha. Hasil ini mencerminkan keberhasilan optimalisasi lahan dan penerapan teknik budidaya yang semakin baik dalam sektor hortikultura. untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di Tabel 2.130:

Tabel 2.131 Produksi Delapan Komoditas Buah-buahan Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2022 – 2024

JENIS TANAMAN		JERUK SIAM	PISANG	DURIAN	NANAS
2022	Panen (Ha)	10.616	3.909	2.937	218
	Produksi (Ton)	115.360	74.123	8.136	15.620
	Produktivitas (Ton/Ha)	10.87	18.96	2.77	71.65
2023	Panen (Ha)	3.934	1.135	2.695	138.21
	Produksi (Ton)	123.936.56	65.842	38.178	14.756
	Produktivitas (Ton/Ha)	31.50	58.01	14.17	106.77
2024*	Panen (Ha)	5.215.92	1.090.3	2.869.14	224.57
	Produksi (Ton)	123.495.87	72.599.66	41.600.78	13.375.43
	Produktivitas (Ton/Ha)	23.68	66.59	14.5	59.56

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan. 2024

Sektor hortikultura dan pertanian tanaman pangan di Kalimantan Selatan menunjukkan kinerja yang positif pada 2024. Bawang merah mengalami peningkatan produktivitas menjadi 5.90 ton/Ha. sementara cabe besar juga meningkat dengan produksi mencapai 11.082.96 ton dan produktivitas 7.96 ton/Ha. Cabe rawit tetap menghasilkan produksi tinggi sebesar 11.970.44 ton. sedangkan petai terus berkontribusi terhadap sektor hortikultura dengan produksi 2.037.5 ton.

Dari indikator kinerja. produksi beras SIMTP meningkat menjadi 921.142 ton. sedangkan beras KSA mencapai 579.465 ton. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pertanian tanaman pangan

mengalami peningkatan menjadi 3.17%. menunjukkan perbaikan dibanding tahun sebelumnya. Produktivitas hortikultura juga mengalami peningkatan 2.33%. Selain itu, persentase SDM pertanian berkualitas terus meningkat menjadi 1.41%. dan metode penyuluhan yang diterapkan oleh petani mencapai 22.23%. mencerminkan efektivitas program penyuluhan dalam meningkatkan kualitas pertanian di daerah ini. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel 2.131:

Tabel 2.132 Produksi Komoditas Sayuran Utama di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2022 – 2024

JENIS TANAMAN		BAWANG MERAH	CABE BESAR	CABE RAWIT	PETAI
2022	Panen (Ha)	46.7	1.186	2.111	512.98
	Produksi (Ton)	246	8.417	11.764	3.799
	Produktivitas (Ton/Ha)	5.27	7.09	5.57	7.41
2023	Panen (Ha)	88.35	1.123	2.167	592.16
	Produksi (Ton)	483	8.763	13.255	3.732
	Produktivitas (Ton/Ha)	5.47	7.81	6.12	6.3
2024*	Panen (Ha)	82.71	1.392.63	2.347.21	512.9
	Produksi (Ton)	487.99	11.082.96	11.970.44	2.037.5
	Produktivitas (Ton/Ha)	5.90	7.96	5.1	3.97

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan, 2024

Tabel 2.133 Capaian Kinerja Urusan Pertanian Tahun 2019 - 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beras (SIMTP)	Ton	1.454.026	1.372.639	1.224.454	1.081.885	778.869	921.142
Beras (KSA)	Ton	790555	677105	601.330	516.612	518.041	579.465
LPE Pertanian Tanaman Pangan		0.28	3.25	-2.56	-2.11	0.81	3.17
Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Tanaman Pangan				0.68	5.13	0.78	0.78
Padi		-5.7	2.93	0.98	1	1	1
Jagung		27.88	-6.45	0.997	1	1	1
Kedelai		-8.04	21.95	0.29	0.18	0.18	0.18
Persentase Peningkatan Produksi Produktivitas Hortikultura				0.37	13.97	1.92	2.33

INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Bawang Merah		17.12	2.22	1.56	1.2	1	1
Cabe		10.18	3.73	2.95	2.5	2.5	2.5
Jeruk		-3.98	0.83	2.82	2.91	1	2
Persentase luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	%	N/A	N/A	2.5	2.17	2.5	2.5
Persentase Kelembagaan Penyuluhan yang Naik Kelas	%	N/A	N/A	3.48	3.6	3.73	3.88
Persentase SDM Pertanian yang berkualitas	%	N/A	N/A	1.36	1.38	1.39	1.41
Persentase Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian yang Diterapkan Oleh Petani	%	N/A	N/A	18.92	20.02	21.13	22.23

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. Kalimantan Selatan. 2024

2. Perkebunan

Perkebunan di Kalimantan Selatan meliputi perkebunan rakyat, perkebunan besar negara dan perkebunan besar swasta dengan luas seluruhnya menurun dari 767.775 pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 dengan luas 769.899 hektar dengan rincian sebagaimana Tabel 2.123.

Tabel 2.134 Luas Perkebunan dan Produksi Perkebunan berdasarkan Jenis Perkebunan di Kalimantan Selatan Tahun 2023-2024

JENIS PERKEBUNAN	LUAS TANAMAN PERKEBUNAN (HA)		PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN TON		LUAS TANAMAN PERKEBUNAN (HA)	PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN TON
	2022	2023	2022	2023	2024	2024
Perkebunan Rakyat	409.298	407.174	468.872	486.731	406.348	502.799
Perkebunan Besar Negara (PTP)	19.270	19.270	26.412	28.506	11.942	18.840
Perkebunan Besar Swasta (PBS)	341.331	402.256	905.762	956.962	394.242	1.008.680
JUMLAH	769.899	767.775	1.401.046	1.389.893	812.532	1.530.319

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2024

Produksi pada sub sektor perkebunan dominasi tanaman kelapa sawit pada tahun 2023 masih tinggi yakni sebesar 1.177.787 ton mengalami peningkatan dibanding pada tahun 2022 sebesar 1.168.372 ton; tanaman karet untuk tahun 2023 produksi sebesar 197.619 ton mengalami penurunan sebanyak 574 ton jika dibandingkan dengan tahun 2022 produksi sebesar 198.193; tanaman kelapa untuk tahun 2023 mengalami penurunan produksi sebanyak 85 ton jika dibandingkan dengan tahun 2022. dapat dilihat lebih jelasnya pada Tabel berikut.

Tabel 2.135 Produksi Lima Komoditas Tertinggi Komoditas Perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Tahun 2023 - 2024

JENIS TANAMAN	2023			2024		
	LUAS TANAM	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS	LUAS TANAM	PRODUKSI	PRODUKTIVITAS
	HA	TON	TON/HA	HA	TON	TON/HA
Kelapa Sawit	506.269	1.240.586	3.14	504.247	1.295.958	3.35
Karet	268.375	197.347	0.96	256.163	200.605	1.02
Kelapa	36.583	24.561	0.91	36.281	24.556	0.91
Kopi	2.231	884	0.63	2.251	875	0.62
Lada	350	113	0.61	343	114	0.62
Kemiri	2.951	1.400	0.57	2.953	1.432	0.58
Kayu Manis	2.830	2.833	1.44	2.831	2.836	1.49
Aren	2.204	1.642	1.17	2.202	1.679	1.20
Sagu/Rumbia	4.238	2.316	1.29	4.129	2.057	1.15
Kakao	348	56	0.44	326	58	0.44
Cengkeh	319	39	0.19	306	37	0.19

Sumber: Dinas Perkebunan Dan Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2024

Kebijakan nasional pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tanggal 22 Nopember 2019 berdasarkan Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024. Peraturan itu dimandatkan kepada 14 kementerian/lembaga (K/L) dan 26 provinsi penghasil sawit di seluruh Indonesia. Lima sasaran RAN KSB yakni: 1) peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. 2) penyelesaian status dan legalisasi lahan. 3) pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan. 4) meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan. dan 5) mempercepat tercapainya perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan. Inpres ini menjadi momentum penting untuk perbaikan tata kelola sawit oleh semua pihak. Inpres ini memberikan mandat di antaranya: penguatan data. koordinasi. dan infrastruktur. peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun. pengelolaan dan pemantauan lingkungan. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa. serta percepatan pelaksanaan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Pemprov Kalsel telah menyusun RAD-KSB dalam bentuk Peraturan Gubernur tentang RAD-KSB Provinsi Kalimantan Selatan 2022-2024 pada tahun ini sebagai upaya mewujudkan visi

dan misi menjadikan Kalsel MAJU (Makmur, Sejahtera dan Berkelanjutan) sebagai Gerbang Ibu Kota Negara dan misi nomor dua yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. penyusunan RAD-KSB Provinsi Kalsel menjadi prioritas Pemprov Kalsel sebagai salah satu provinsi penghasil sawit dengan luasan sebesar 497.261 hektare.

“Dengan luas tersebut. saat ini diusahakan oleh 89 perusahaan perkebunan besar swasta/negara serta perkebunan rakyat dengan luasan mencapai 106.000 hektare. di Kalsel terdapat 45 pabrik kelapa sawit dengan produksi CPO mencapai 1.561.147 ton per tahun. industri hilir berupa dua pabrik minyak goreng dengan kapasitas produksi 5.500 ton per hari dan dua pabrik biodisel dengan kapasitas produksi 2.500 ton per hari.” Strategi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kalsel dilakukan dengan mengimplementasikan regulasi serta menyelesaikan masalah legalitas lahan perkebunan berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan melakukan peningkatan industri hilir kelapa sawit agar tidak terbatas pada produk CPO.

Salah satunya memberikan kepastian hukum dan kebijakan daerah yang memberi jaminan berusaha disektor perkelapa sawitan dengan meningkatkan kemitraan kelembagaan perkebunan kelapa sawit mandiri yang saling menguntungkan. dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit dan badan usaha dan meningkatkan kemitraan lainnya melalui integrasi ternak sapi potong dengan kelapa sawit guna mendukung swasembada sapi potong melalui SSKA dan SSKA KU INTIP

Pengelolaan Perkebunan Kelapa Sawit berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan. saat ini telah menjadi penyokong PDRB utama dan diharapkan berkelanjutan. Aspek ekonomi yang telah dibangun perlu diarahkan untuk ikut serta dalam membangun perekonomian di Kalimantan Selatan. Sesuai amanat Inpres nomor 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAN-KSB) 2019-2024 dan diturunkan melalui Pembangunan perkebunan kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Selatan didasarkan atas Perda No.2 Tahun 2013 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan. Berdasarkan ketentuan tersebut. Kalimantan Selatan melalui Dinas Perkebunan dan Peternakan akan menyusun dokumen Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD KSB) Tahun 2022-2024.

3. Peternakan

Sub sektor peternakan masih menjadi sektor penting dalam peningkatan perekonomian daerah. Peran strategis sub sektor peternakan baik secara ekonomis maupun ekologis ini digambarkan melalui kontribusinya dalam penyumbang PDRB yang termasuk dalam rumpun pertanian. Untuk sub sektor peternakan berdasarkan undang-undang No 18 tahun 2009 tetang

peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang semua undang-undang tersebut juga berorientasi untuk kesejahteraan masyarakat peternak yang diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Ternak. Pelaksanaan Program peternakan dilakukan dengan pendekatan ekonomis, pendekatan agribisnis dan pendekatan teknis. Dengan pendekatan ekonomis yaitu perbaikan tataniaga ternak dan produk ternak, mendorong insentif peternakan dan pemberdayaan peternak.

Belum optimalnya peningkatan produksi dan pengembangan hilirisasi potensi unggulan sub sektor Peternakan, yang memiliki potensi yang begitu besar sebagai salah satu leading sektor yang menjadi penggerak utama perekonomian di Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian, perlunya upaya sejalan dengan arahan daerah yakni menitikberatkan pembangunan industri berbasis pada sektor pertanian dalam arti luas (termasuk sub sektor peternakan).

Dalam rangka mewujudkan agenda besar tersebut, maka Provinsi Kalimantan Selatan perlu menyusun pola/rancang bangun sebagai haluan dalam pembangunan sub sektor peternakan dari hulu sampai hilir dengan komoditas ternak yang diunggulkan adalah kerbau, itik, alabio dan sapi. Dalam hal ini dikembangkan kawasan pertanian untuk komoditas ternak berbasis korporasi peternak yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam rangka sebagai daerah penyangga pangan untuk ibu kota negara yang baru melalui pemanfaatan sumber daya lokal.

Jenis ternak yang dominan, baik yang dipelihara, dipotong, maupun diproduksi daging adalah sapi, kerbau, kambing, ayam buras, ayam ras petelur, dan itik. Informasi perkembangan jumlah populasi ternak besar dan kecil di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada gambar dan tabel di bawah ini.

Tabel 2.136 Jumlah Ternak Besar, Ternak Kecil, dan Unggas (Ekor) di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2024

TAHUN	JUMLAH TERNAK BESAR	JUMLAH TERNAK KECIL	JUMLAH UNGGAS
2021	185.480	87.710	102.931.355
2022	187.181	75.024	126.515.989
2023	193	71.896	88.231.178
2024	107.410	46.351	102.934.658

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2024

Tabel 2.137 Jumlah Produksi Telur (Kg) di Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2021-2024

TAHUN	TELUR ITIK	TELUR AYAM BURAS	TELUR AYAM RAS
2021	32.772.575	9.782.952	81.556.413
2022	31.581.744	7.969.190	26.850.963
2023	26.463.154.25	6.762.461.71	26.228.473.41
2024	8.930.235.55	1.065.657.43	110.268.560.70

Sumber: Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2024

Tabel 2.138 Capaian Kinerja Urusan Perkebunan dan Peternakan Tahun 2022-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA		
			2022	2023	2024
1	Nilai Tukar Pekebun	%	109.14	117.66	148.12
2	Nilai Tukar Peternak	%	101.2	104.31	103.06
3	Angka Produksi Karet	Ton Sheet	198.193	197.347	200.605 (**)
4	Angka Produksi Kelapa Sawit	Ton CPO	1.168.372	1.240.586	1.295.958 (**)
5	Angka Produksi Daging	Ton	83.222	91.311 (**)	133.221 (**)
6	Produktivitas Tanaman Perkebunan per Hektar Per Tahun (Karet)	Kg/Ha	967	962	1024
7	Luas Areal Pengendalian Penanggulangan Bencana	Ha	224	786	105
8	Prosentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	%	100	100	100
9	Prosentase Peningkatan Produksi Daging	%	2.8	9.7	15.39
10	Prosentase Penurunan Kejadian Jumlah KAsus Penyakit Hewan Menular	%	80	100	31.25
11	Prosentase Unit Usaha yang Menghasilkan Produk ASUH	%	100	100	50
12	Prosentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	10.83	100	100
13	Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perkebunan dan Peternakan	%	100	100	100
14	Prosentase Penambahan Kemitraan Pemasaran Tanaman Perkebunan (Kelompok)	%	27.93	15	100
15	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkebunan	%	15	8	100
16	Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Peternakan	%	49.42	27	100

Sumber : Dinas Perkebunan & Peternakan Prov. Kalimantan Selatan 2024

4. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum merupakan bagian tidak terpisahkan dari Program Pembangunan Nasional dimana sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang memegang peranan yang cukup penting dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan pembangunan pada sektor Kelautan dan Perikanan di Provinsi Kalimantan Selatan sejalan dengan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan nasional yang kemudian secara hierarkis dituangkan kedalam kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan di daerah.

Secara umum sumber perikanan bisa dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Perikanan darat bisa dibedakan menjadi dua yaitu budidaya perikanan dan perairan umum. Perikanan darat tersebut tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan selatan. Untuk volume produksi perairan umum daratan di Kalimantan selatan tahun 2022 sebanyak 61.87 ribu ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 2.08 triliun. Pada tahun 2022, perikanan laut di Kalimantan selatan hanya terdapat 6 kabupaten/kota yaitu daerah yang berada di sepanjang pesisir pantai kabupaten/kota tersebut adalah Tanah Laut, Kotabaru, Barito Kuala, Tanah Bumbu, dan Banjarmasin. Tahun 2022 produksi perikanan laut tercatat sebanyak 140.72 ribu ton dengan nilai produksi sebesar Rp. 4.68 Triliun.

Nilai Tukar Nelayan dan Pembudidaya Ikan (NTNP) tahun 2023 mengalami defisit, yaitu berada pada angka 99.22. Nilai ekspor perikanan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 25.90% dibanding capaian tahun 2019. Jika dilihat dari produksinya, baik jumlah rumah tangga perikanan, produksi maupun nilainya juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Capaian tertinggi berada pada tahun 2023 dimana jumlah rumah tangga perikanan mencapai 37.912 rumah tangga dengan produksi sebesar 274.131.81 ton dan nilai produksinya mencapai Rp 6.034.041.742.400.-

Tabel 2.139 Perkembangan Jumlah Rumah Tangga, Produksi, dan Nilai Produksi Sub Sektor Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan, Tahun 2011-2024

TAHUN	JUMLAH RUMAH TANGGA	PRODUKSI (TON)	NILAI PRODUKSI (Rp)
2011	60.919	247.741.10	4.581.337.731
2012	67.095	284.300.70	5.578.497.765
2013	67.191	339.437.28	6.376.406.906
2014	67.487	364.794.07	6.972.197.094
2015	67.980	368.451.70	7.954.889.861
2016	60.273	408.444.50	5.544.738.736
2017	66.435	412.326.10	5.571.503.232
2018	66.318	437.278.10	5.719.062.120
2019	66.532	434.765.00	5.870.300.000

2020 *)	127.799	451.598.51	6.856.223.371
2021	78.769	344.522.82	6.538.189.173
2022	163.316	358.261.39*)	5.319.832.257.750
2023	37.912	274.131.81	6.034.041.742.400
2024	61.484	368.898.00	8.839.647.074.400

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Prov. Kalimantan Selatan 2024

5. Kehutanan

Pemanfaatan hasil hutan kayu yang dimulai pada tahun 1967 yang didorong dengan diterbitkannya undang-undang tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), telah menempatkan sektor kehutanan di Kalimantan Selatan sebagai penggerak ekonomi nasional dan daerah. Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut lebih banyak melibatkan perusahaan-perusahaan besar seperti IUPHHK HA atau lebih familiar dengan istilah HPH dan IUPHHK HT atau lebih familiar dengan HTI, hal ini sudah berlangsung sejak lama dimana masyarakat sekitar hutan hanya menjadi penonton saja. Sampai Tahun 2021 pengelolaan hutan oleh masyarakat sebagai salah satu potensi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, hanya seluas 58,021 ha melalui 144 pengelolaan/izin Perhutanan Sosial (PS) dari luas kawasan hutan Kalimantan Selatan 1.714.944,40 Ha Pemanfaatan hutan yang kurang mengikutsertakan peran serta masyarakat sekitar hutan sebagai pengelola berdampak pada banyaknya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan para pengusaha dan antara masyarakat dengan pemerintah yang bertanggung jawab mengelola kawasan hutan yakni instansi kehutanan baik pusat maupun daerah yang disebabkan oleh kecemburuan sosial. Kedepannya hal ini dapat diperbaiki dengan melalui pola Perhutanan Sosial baik itu dalam bentuk HKM, HR, HTR dan HD, dimana masyarakat diberikan kebebasan untuk melakukan pemanfaatan kawasan hutan untuk kesejahteraan mereka namun fungsi kawasan hutan masih tetap terjaga dengan menghindari kerusakan yang dapat berdampak pada turunnya kualitas lingkungan kawasan hutan. Akar masalah yang menyebabkan masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan, antara lain karena terbatasnya sumber daya manusia dan modal masyarakat dalam memanfaatkan dan mengembangkan usaha di sektor kehutanan secara lestari dan berkelanjutan.

Produksi kayu bulat pernah menjadi primadona dalam mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seiring berjalannya waktu potensi kayu bulat di Kalimantan Selatan sudah menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Untuk itu diperlukan pengaturan pemanfaatan kayu bulat ini secara ketat untuk menjaga kelestariannya. Selama tahun 2024 jumlah total produksi kayu bulat di Kalimantan Selatan adalah sebesar 477.250.17 m³. Produksi kayu bulat ini menjadi bahan baku bagi industri pengolahan kayu yang akan mendorong laju perekonomian khususnya di Kalimantan Selatan.



RKPD 2026

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

Tabel 2.140 Rekapitulasi Produksi Kayu Bulat Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO.	BULAN	HUTAN TANAMAN (M3)	HUTAN ALAM (M3)
1	Januari	16,437.07	14,586.76
2	Februari	27,976.88	35,018.93
3	Maret	23,106.13	121,278.57
4	April	21,140.38	-
5	Mei	23,867.58	2,860.71
6	Juni	9,605.47	-
7	Juli	29,016.57	256.95
8	Agustus	29,422.71	2,276.38
9	September	29,570.74	2,592.31
10	Oktober	46,081.74	2,196.09
11	November	6,414.29	2,240.57
12	Desember	23,064.16	8,239.18
	JUMLAH	285,703.72	191,546.45

Sumber: Dinas Kehutanan Prov Kalsel. 2025

Kalimantan Selatan dikenal sebagai sentra industri pengolahan kayu khususnya di Pulau Kalimantan. Produksi kayu olahan dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) selama tahun 2024 adalah sebesar 463.599,31 m3. Jenis produksi kayu olahan yang dihasilkan sebagian besar berupa kayu lapis atau Laminated Veneer Lumber yaitu sebesar 339.513,47 m3 (73,23%). Berikutnya adalah produk kayu gergajian sebesar 97.065,84 m3 (20,93%). Selebihnya sebesar 27.009,23 m3 (5,82%) produksinya terdiri dari Veneer, Kayu gergajian, Serpihan kayu, dan particle board.

Tabel 2.141 Daftar Rekapitulasi Laporan Bulanan Produksi IPHHK-IPHHK Di Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

NO	JENIS PRODUKSI KAYU OLAHAN	INDUSTRI DENGAN KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M3/THN	INDUSTRI DENGAN KAPASITAS PRODUKSI < 6.000 M3/THN	JUMLAH
1	Kayu Lapis dan atau Laminated Veneer Lumber	333,566.62	5,946.85	339,513.47
2	Veneer	21,855.80	83.76	21,939.56
3	Kayu Gergajian	16,026.84	81,039.00	97,065.84
4	Serpih Kayu	0,470138889	00.00	0,470138889
5	Pulp	00.00	00.00	00.00
6	Bare Core /Board	00.00	00.00	00.00
7	Lumber Core	00.00	00.00	00.00
8	Block Board	00.00	00.00	00.00

NO	JENIS PRODUKSI KAYU OLAHAN	INDUSTRI DENGAN KAPASITAS PRODUKSI > 6.000 M3/THN	INDUSTRI DENGAN KAPASITAS PRODUKSI < 6.000 M3/THN	JUMLAH
9	MDF	00.00	00.00	00.00
10	Moulding	00.00	00.00	00.00
11	Wood Working	00.00	00.00	00.00
12	Flooring / Parquet Flooring	00.00	00.00	00.00
13	Mebel	00.00	00.00	00.00
14	Particle Board	1,958.33	00.00	1,958.33
15	Secondary Process Plywood (Kayu Lapis)	3,111.34	00.00	3,111.34
16	Produk Lainnya	00.00	00.00	00.00
JUMLAH		376,529.70	87,069.61	463,599.31

Sumber: Dinas Kehutanan Prov Kalsel. 2025

Pengelolaan hutan tidak lepas dari kegiatan untuk menjaga kelestarian hutan dari kerusakan, baik disebabkan karena penebangan liar maupun oleh kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Salah satu usaha untuk mencegah karhutla adalah dengan pengamatan hot spot atau titik panas. Hot spot dapat terdeteksi dengan menggunakan citra satelit penginderaan jauh yang dapat menangkap anomali termal atau panas yang berasal dari permukaan bumi.

Pada pengamatan sebaran titik panas di seluruh kabupaten/ kota selama periode tahun 2020 - 2024 menunjukkan angka yang fluktuatif. Pada tahun 2023 terjadi peningkatan jumlah titik panas yang sangat tinggi yaitu sebanyak 59.110 titik, jauh lebih banyak dari tahun-tahun sebelumnya, maupun pada tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2023 terjadi kemarau panjang yang merupakan siklus 4 tahunan dan adanya fenomena El Nino. Akibat El Nino musim kemarau yang terjadi akan semakin panjang dan suhu udara secara umum akan lebih tinggi. Hal ini memicu munculnya titik panas lebih banyak terdeteksi pada tahun tersebut.

Tabel 2.142 Sebaran Titik Panas/Hotspot di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tanah Laut	48	199	201	7,235	397
Kab. Kotabaru	234	242	502	3,961	342
Kab. Banjar	82	276	396	12,670	578
Kab. Barito Kuala	45	17	113	4,377	88
Kab. Tapin	207	135	389	6,344	765
Kab. Hulu Sungai Selatan	155	235	378	9,694	468
Kab. Hulu Sungai Tengah	71	60	91	1,980	125
Kab. Hulu Sungai Utara	19	75	18	3,507	145

KABUPATEN/KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Tabalong	246	207	262	1,596	670
Kab. Tanah Bumbu	65	150	100	2,433	173
Kab. Balangan	93	78	511	2,749	1,931
Kota Banjarmasin	4	16	11	26	2
Kota Banjarbaru	12	31	11	2,538	19
PROV. KALIMANTAN SELATAN	1281	1721	2983	59,110	5,703

Sumber: Dinas Kehutanan Prov Kalsel. 2025

6. Energi dan Sumber Daya Alam

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dimana kewenangan provinsi diatur dalam perpres tersebut, pendelegasian kewenangan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Provinsi terkait pengelolaan pertambangan komoditas mineral bukan logam dan batuan. Data dari tabel di bawah ini menunjukkan distribusi Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk komoditas pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan di sembilan kabupaten di Kalimantan Selatan. Total terdapat 130 IUP, dengan rincian 38 IUP untuk mineral bukan logam jenis tertentu dan 90 IUP untuk batuan, sementara tidak ada IUP untuk mineral bukan logam. Kabupaten Banjar memiliki jumlah IUP terbanyak sebanyak 48 IUP, diikuti oleh Kabupaten Tanah Laut sebanyak 31 IUP dan Kabupaten Kotabaru sebanyak 21 IUP, yang menunjukkan potensi besar sektor pertambangan mineral bukan logam dan batuan di wilayah tersebut. Hal ini mencerminkan pentingnya peran Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mengelola perizinan dan pengawasan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya mineral secara berkelanjutan. Data produksi tahun 2024 untuk pertambangan batuan sebesar 1.140.324.863 m³ dan pertambangan mineral bukan logam sebesar 5.482.803.164 m³.

Tabel 2.143 Jumlah Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2024

NO.	KABUPATEN	KOMODITAS			
		MINERAL BUKAN LOGAM	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTENTU	BATUAN	JUMLAH IUP
1	Tabalong	0	4	8	12
2	Balangan	0	1	2	3
3	Hulu Sungai Selatan	0	0	4	4
4	Hulu Sungai Tengah	0	0	2	2

NO.	KABUPATEN	KOMODITAS			
		MINERAL BUKAN LOGAM	MINERAL BUKAN LOGAM JENIS TERTEKUTU	BATUAN	JUMLAH IUP
5	Tapin	0	0	4	4
6	Banjar	0	14	34	48
7	Tanah Laut	0	10	21	31
8	Tanah Bumbu	0	1	4	5
9	Kotabaru	0	8	13	21
Jumlah		0	38	90	130

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan Tahun 2024

Perkembangan fasilitas listrik di Provinsi Kalimantan Selatan cukup signifikan dimana terlihat pada banyaknya pelanggan listrik yang terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Selatan, jumlah pelanggan listrik di Kalimantan Selatan dari tahun 2020 hingga tahun 2024 menunjukkan tren pertumbuhan yang signifikan, dengan total pelanggan meningkat dari 1,3 juta pelanggan pada tahun 2020 menjadi 1,53 juta pelanggan pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan kebutuhan listrik yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk, perkembangan ekonomi dan kebutuhan energi yang terus meningkat. Perkembangan Jumlah Pelanggan Listrik Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024 bisa dilihat di tabel di bawah.

Tabel 2.144 Jumlah Peningkatan Pelanggan Listrik di Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024

JENIS PELANGGAN	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumah Tangga [R]	1.192.400	1.248.127	1.294.105	1.341.112	1.388.876
Industri [I]	679	745	779	75.464	960
Bisnis [B]	59.733	64.037	68.688	-	85.682
Umum	47.298	50.083	52.940	-	-
Sosial [S]	-	-	-	823	46.928
Gedung dan kantor	-	-	-	-	-
Jalan umum	-	-	-	-	-
Pemerintah	-	-	-	11.271	12.741
Layanan Khusus	-	-	-	-	135
Jumlah	1.300.110	1.362.992	1.416.062	1.428.803	1.535.322

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan, 2025

Listrik telah menjadi kebutuhan dasar bagi setiap rumah tangga. Sampai saat ini pasokan listrik didapat dari perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan PLN terus bertambah

setiap tahunnya. Pada tahun 2024, total pelanggan listrik di Kalimantan selatan meningkat menjadi 1.535.322 menunjukkan adanya kenaikan sebesar sekitar 7,5% dari Tahun 2023.

Tabel 2.145 Jumlah Pelanggan Listrik menurut Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 - 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Tanah Laut	80.788	85.016	88.727	92.276	125.262
Kotabaru	59.373	63.873	67.521	70.561	98.125
Banjar	132.370	147.198	144.500	150.464	204.697
Barito Kuala	101.210	106.879	110.715	115.039	119.751
Tapin	76.381	80.546	83.893	88.498	73.411
Hulu Sungai Selatan	72.022	74.714	77.124	78.934	79.692
Hulu Sungai Tengah	87.482	91.459	93.915	96.695	97.927
Hulu Sungai Utara	84.467	89.018	91.317	93.501	76.927
Tabalong	71.043	74.115	76.407	79.563	100.726
Tanah Bumbu	139.463	147.271	155.706	164.597	122.700
Balangan	33.995	35.739	37.095	38.689	42.679
Banjarmasin	221.301	228.792	235.527	242.663	234.920
Banjarbaru	140.215	146.710	153.615	161.542	158.869
Kalimantan Selatan	1.300.110	1.371.330	1.416.062	1.473.022	1.535.322

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan dalam Angka 2024

Rasio elektrifikasi di Kalimantan Selatan telah mencapai sangat tinggi, dengan persentase sambungan listrik PLN pada tahun 2024 mencapai 99,22%. Sebagian besar rumah tangga di wilayah ini telah terhubung dengan layanan listrik, sehingga hampir seluruh penduduk memiliki akses listrik. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam memperluas infrastruktur ketenagalistrikan secara merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil. Tingginya rasio elektrifikasi membawa dampak positif yang nyata bagi masyarakat seperti peningkatan kualitas hidup, kemudahan dalam menjalankan aktivitas ekonomi dan pendidikan, serta mendorong pertumbuhan sektor produktif di pedesaan maupun perkotaan.

Tabel 2.146 Rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Selatan s.d Desember 2024

N O	KAB/ KOTA	JUMLAH KECA- MATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH RT	RT BERLISTRIK PLN	RT BERLISTRIK NON PLN	JUMLAH RT BERLISTRIK	RE PLN (%)	RE Total (%)
1	Kotabaru	22	202	95.604	89.408	6.191	95.599	93,52	99,99
2	Tanah Laut	11	135	111.299	110.456	837	111.293	99,24	99,99
3	Banjar	20	290	188.096	187.836	250	188.086	99,86	99,99
4	Barito Kuala	17	201	111.688	111.517	165	111.682	99,85	99,99
5	Tapin	12	135	66.066	66.007	55	66.062	99,91	99,99
6	HSS	11	148	71.082	71.075	0	71.075	99,99	99,99
7	HST	11	169	89.847	88.770	1.068	89.838	98,8	99,99
8	HSU	10	219	68.388	68.209	175	68.384	99,74	99,99
9	Tabalong	12	131	92.783	92.303	375	92.678	99,48	99,99
10	Tanah Bumbu	12	157	109.366	108.642	718	109.360	99,34	99,99
11	Balangan	8	157	37.916	37.526	388	37.914	98,97	99,99
12	Banjarmasin	5	52	213.300	213.279	0	213.279	99,99	99,99
13	Banjarbaru	5	20	144.289	143.848	422	144.270	99,69	99,99
	JUMLAH	156	2016	1.399.724	1.388.876	106.44	1.399.520	99,22	99,99

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan 2024

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan dalam kurun waktu 2021 hingga 2024, berfokus pada pengelolaan sumber daya air, reklamasi lahan pertambangan, peningkatan rasio elektrifikasi, pengembangan energi terbarukan serta peningkatan kualitas dan pelayanan publik. Dalam aspek pengelolaan sumber daya air, data menunjukkan penurunan persentase ketersediaan air tanah pada akifer tertekan dan tidak tertekan. Indikator tersebut merupakan indikator terbalik, yang berarti semakin baik. Hal ini mengindikasikan peningkatan efisiensi pengelolaan dan pemanfaatan air tanah. Program reklamasi lahan mencatat keberhasilan yang sangat menonjol, dengan peningkatan drastis dari 10,57% pada tahun 2021 menjadi 64,30% pada tahun 2024. Angka ini merefleksikan komitmen kuat Dinas ESDM dalam upaya pemulihan lingkungan pasca pertambangan dan berkelanjutan ekosistem. Pada sektor energi, Dinas ESDM berhasil meningkatkan rasio elektrifikasi secara konsisten setiap tahunnya. Capaian ini manandakan dedikasi dalam pemenuhan kebutuhan dasar listrik untuk masyarakat. Meskipun demikian, porsi energi terbarukan dalam bauran energi mengalami fluktuasi dan menunjukkan penurunan signifikan di tahun 2024 sebesar 11,96%. Hal ini mengindikasikan perlunya evaluasi dan strategi yang lebih terencana untuk kembali mendorong diversifikasi energi baru terbarukan. Dari segi pelayanan publik, adanya peningkatan

dan komitmen Dinas ESDM terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima.

Tabel 2.147 Capaian Kinerja Urusan ESDM Tahun 2021-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA			
			2021	2022	2023	2024
1	Persentase ketersediaan air tanah pada akifer tertekan (confined)	%	0,97	0,97	0,96	0,95
2	Persentase ketersediaan air tanah pada akifer tidak tertekan (unconfined)	%	0,96	0,96	0,95	0,94
3	Persentase lahan yang telah direklamasi	%	10,57	60,59	60,34	64,3
4	Rasio elektrifikasi	%	99,35	99,45	99,54	99,79
5	Porsi energi terbarukan pada bauran energi	%	13,24	17,9	17,9	11,96
6	Nilai hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi	poin	28,05	28,07	28,07	28,07
7	Nilai IKM pelayanan jasa UPTD Lab. ESDM	%	86,18	87,07	88,3	88,24
8	Jumlah inovasi pelayanan publik yang diterapkan	inovasi	-	1	1	1

Sumber: Dinas ESDM Prov. Kalimantan Selatan, 2025

7. Pariwisata

Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi obyek wisata yang layak untuk diperhitungkan sebagai daya tarik wisatawan baik dalam maupun luar negeri. Hal ini terlihat perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023. jumlah wisatawan yang berkunjung ke Provinsi Kalimantan Selatan baik domestik maupun mancanegara mencapai 15.343.161 wisatawan dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 16.654.736 .

Tabel 2.148 Data Kunjungan Wisnus Wisman Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2024

NO	KABUPATEN / KOTA	WISATAWAN NUSANTARA			WISATAWAN MANCANEGERA		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	Kota Banjarmasin	1.178.056	1.588.884	3.126.062	2.487	3.895	4.541

NO	KABUPATEN / KOTA	WISATAWAN NUSANTARA			WISATAWAN MANCANEGARA		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
2	Kota Banjarbaru	2.217.478	1.914.278	2.849.483	1.666	358	875
3	Kabupaten Banjar	2.104.383	2.253.119	2.606.108	1.063	14.681	6.264
4	Kabupaten Tapin	1.727.420	2.513.043	3.156.712	19	82	90
5	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	293.234	427.795	715.111	613	650	757
6	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	219.597	96.340	227.911	33	4	-
7	Kabupaten Hulu Sungai Utara	103.400	120.002	167.627	-	-	-
8	Kabupaten Balangan	40.127	45.651	233.786	20	27	13
9	Kabupaten Tabalong	3.092.902	3.851.766	859.876	44.754	44.911	-
10	Kabupaten Tanah Laut	567.506	608.611	608.779	8	13	6
11	Kabupaten Tanah Bumbu	857.429	775.057	903.687	389	-	167
12	Kabupaten Kotabaru	763.385	890.644	990.280	67	36	89
13	Kabupaten Barito Kuala	178.004	193.034	196.323	78	280	189
TOTAL		13.342.961	15.278.224	16.641.745	51.197	64.937	12.991

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2024

Tabel 2.149 Realisasi Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Peningkatan Kunjungan Wisatawan (orang)	Orang	5.275.590	7.768.439	6.742.276	13.394.158	15.343.161	16.654.736
2	Lama Tinggal Wisatawan (hari)	Hari	4	3	3	3	3	2.85

Sumber: Dinas Pariwisata Prov. Kalimantan Selatan. 2024

8. Perdagangan

Nilai ekspor menjadi salah satu pilihan menarik dalam menumbuhkan kembangkan perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan sekaligus perekonomian nasional. Pada tabel 2.152 dapat dilihat bahwa Kinerja ekspor Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 menunjukkan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah, dengan nilai total ekspor mencapai 11,36 miliar USD, yang berasal dari total volume ekspor lebih dari 164,5 miliar kilogram. Komoditas utama yang mendominasi ekspor adalah produk tambang, terutama batubara, yang menyumbang lebih

dari 9,98 miliar USD atau sekitar 88% dari total nilai ekspor, dengan volume lebih dari 162,7 miliar kilogram. Hal ini menegaskan bahwa struktur ekspor Kalimantan Selatan masih sangat tergantung pada sektor ekstraktif.

Selain tambang, produk kelapa sawit juga menjadi komoditas unggulan dengan nilai ekspor mencapai 942 juta USD, diikuti oleh produk kayu (191 juta USD) dan karet alam (135 juta USD). Meskipun nilainya relatif kecil, komoditas non-konvensional seperti rotan dan perikanan turut menunjukkan potensi diversifikasi ekspor, masing-masing mencatat nilai sebesar 1,09 juta USD dan 8,17 juta USD.

Ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor bahan mentah, khususnya batubara, menjadi salah satu permasalahan mendasar dalam struktur ekonomi Kalimantan Selatan. Kondisi ini membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global dan tekanan transisi energi. Oleh karena itu, ke depan diperlukan langkah strategis dalam mendorong hilirisasi industri, peningkatan nilai tambah produk lokal, serta pengembangan komoditas ekspor non-tambang yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Tabel 2.150 Volume dan Nilai Realisasi Ekspor Menurut Komoditas Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

KOMODITAS	VOLUME (KG)	NILAI (000 US\$)
Produk Karet Alam	77.265.788	135.451.638
Produk Kelapa Sawit	1.073.960.932	942.082.740
Produk Kayu	258.032.380	191.689.639
Produk Rotan	56.816	1.092.239
Produk Perikanan	1.222.552	8.169.940
Produk Tambang	162.776.017.783	9.982.290.056
Produk Lainnya	371.998.388	97.045.299
JUMLAH	164.558.554.639	11.357.831.553

Sumber: DITJEN BEA CUKAI KEMENKEU RI

Tabel 2.151 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Tahun 2020-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	LPE Perdagangan	%	-3.38	4.95	7.15	7.40	6.36
2	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	%	10.60	10.52	9.06	9.36	9.82
3	Laju Inflasi Harga	%	1.68	2.55	6.99	2.69	0.62
4	Persentase Barang Beredar Yang Sesuai Dengan Ketentuan	%	81.01	106.00	100.00	103.19	100

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
5	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Tambang	%	-26.96	Indikator ini dari hasil Asistensi SAKIP mulai Tahun 2021 dihilangkan			
6	Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas		-	54.38	81.37	-17.45%	-13.50

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, 2025

9. Industri

Perindustrian di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami perkembangan yang menunjukkan sisi positif dalam membentuk struktur perekonomian wilayah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian makro di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 cukup dominan dimana besarnya mencapai 6.23. Perkembangan sektor dikarenakan sejumlah potensi ekonomi yang berada di wilayah Kalimantan Selatan seperti sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia, hingga investor yang menanamkan modalnya untuk kepentingan bersama.

Pertumbuhan lapangan usaha industri pengolahan di dalam PDRB Kalimantan Selatan dari tahun 2019 sampai 2023 mengalami fase naik turun dari 1.45 (2019) menjadi 3.31 (2022) dan menurun menjadi 3.01 (2023). untuk lebih jelasnya bisa di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.152 Perkembangan Pertumbuhan dan Kontribusi Lapangan Usaha Industri Pengolahan di Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan	1.45	-3.63	6.23	3.31	3.01	3.88**
Kontribusi terhadap PDRB (ADHB)	13.64	13.52	13.95	11.39	10.75	10.63**

Sumber: BPS Kalimantan Selatan, 2024

Tabel 2.153 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Tahun 2019-2024 Provinsi Kalimantan Selatan

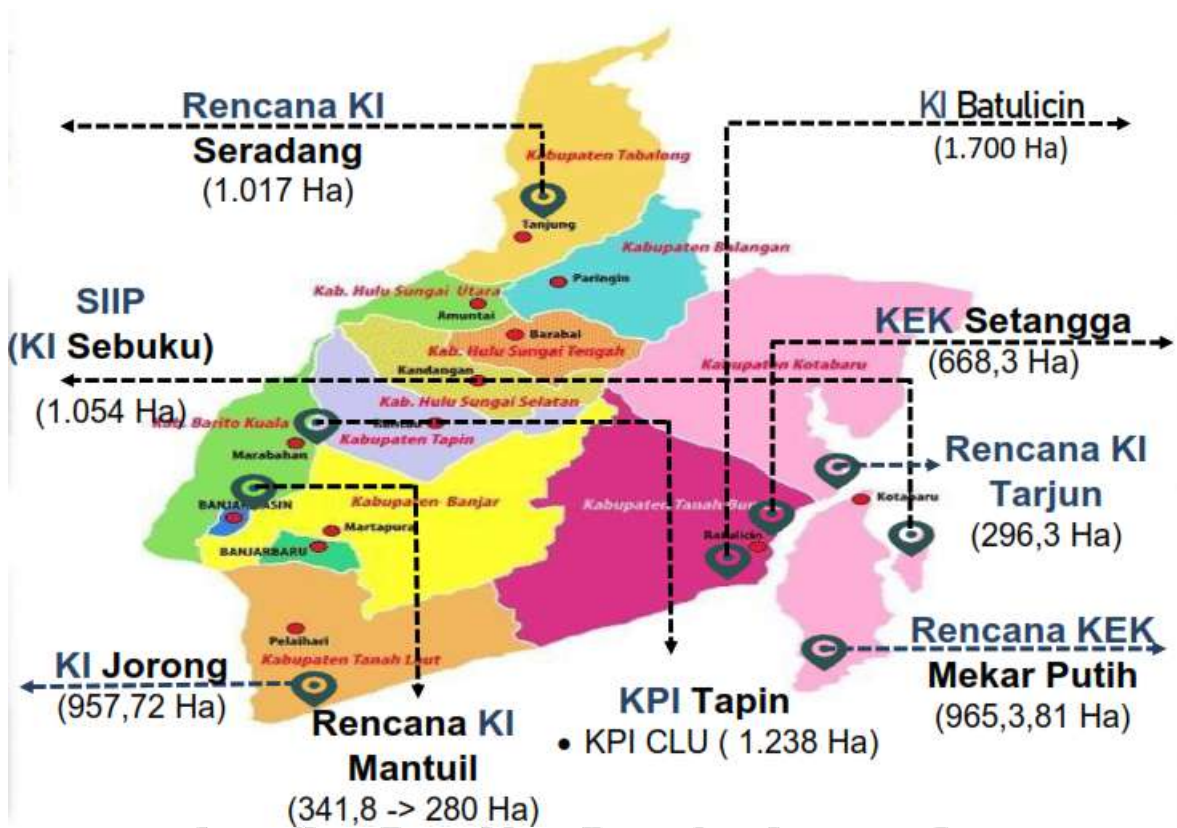
NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	4.09	-1.82	3.48	5.11	4.84	5.23**
2	LPE Industri	%	1.72	-3.63	6.01	3.31	3.01	3.88**
3	Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)*	%	5.05	5.30	5.30	4.07	N/A	N/A
4	Persentase Pertumbuhan Sektor Industri	%	N/A	N/A	N/A	5.75	9.12	9.14

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	CAPAIAN KINERJA					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	Persentase Pertumbuhan Sentra-Sentra industri*	%	5	5	5	5	N/A	N/A
6	Persentase IKM yang memanfaatkan teknologi industri*	%	5	5	5	5	N/A	N/A
7	Persentase tenaga kerja yang terserap sektor industri	%	N/A	N/A	3.25	5.36	6.78	7.74
8	Persentase industri kecil dan menengah yang naik kelas	%	N/A	N/A	3.82	5.59	5.89	6.24
9	Persentase SDM industri yang terampil	%	N/A	N/A	10.57	17.78	25.10	25.31* *
10	Peningkatan jumlah produktifitas sektor industri	Juta Rp.	N/A	N/A	43.99	42.04	42.43	42.77
11	Data tenaga kerja industri di provinsi	orang	N/A	N/A	14.079	19.439	18.506	18.806
12	Data tenaga kerja industri di kabupaten/kota	Orang	N/A	N/A	174.912	179.679	183.444	185.013
13	Jumlah industri kecil dan menengah yang naik kelas	Unit usaha	N/A	N/A	2.681	3.950	4.448	4.708
14	Jumlah potensi industri kecil dan menengah	Unit usaha	N/A	N/A	70.184	73.060	75.521	75.539
15	Jumlah SDM industri yang terampil	Orang	N/A	N/A	19.982	35.410	50.707	66.003
16	Jumlah nilai produksi sektor industri	Nilai	N/A	N/A	21.110.8 17.124.0 00	35.350.9 72.220.0 00	178.828. 698.814. 000	49.983 .057.7 54.000

Sumber: Dinas Perindustrian Prov. Kalimantan Selatan 2024

Keterangan : *) Indikator Kinerja tidak dipergunakan lagi dan untuk yg N/A

**) Realisasi masih bersifat sangat sementara
pada tahun itu indikator kinerjanya belum ada karna baru di mulai tahun 2021.



Provinsi Kalimantan Selatan memiliki potensi pengembangan kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) yang tersebar di berbagai kabupaten/kota. Berdasarkan peta rencana, terdapat beberapa lokasi strategis yang telah ditetapkan maupun masih dalam perencanaan pengembangan, antara lain:

1. Kawasan Industri Batulicin (Kabupaten Tanah Bumbu)
Merupakan kawasan industri terbesar dengan luas sekitar 1.700 hektare, yang diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan sumber daya alam.
2. KEK Setangga (Kabupaten Kotabaru)
Kawasan Ekonomi Khusus dengan luas 668,3 hektare, diproyeksikan sebagai pusat kegiatan industri dan logistik di wilayah pesisir timur Kalsel.
3. Kawasan Industri Jorong (Kabupaten Tanah Laut)
Memiliki luas sekitar 957,72 hektare, kawasan ini dirancang untuk mendukung kegiatan industri pengolahan berbasis tambang dan energi.

4. Kawasan Industri Sebuku atau SIIP (Kabupaten Kotabaru)
Dengan luas 1.054 hektare, kawasan ini diarahkan sebagai sentra industri yang mendukung aktivitas pertambangan dan energi di wilayah timur.
5. Kawasan Industri Seradang (Kabupaten Tabalong)
Direncanakan seluas 1.017 hektare, kawasan ini mendukung pengembangan sektor industri di wilayah utara Kalsel.
6. Rencana KI Mantuil (Kota Banjarmasin)
Awalnya seluas 341,8 hektare, kini direncanakan menjadi sekitar 280 hektare untuk pengembangan kawasan industri perkotaan yang lebih efisien.
7. Rencana KI Tarjun (Kabupaten Kotabaru)
Kawasan ini dengan luas 296,3 hektare diproyeksikan untuk pengembangan industri pendukung berbasis sumber daya lokal.
8. Rencana KEK Mekar Putih (Kabupaten Kotabaru)
Seluas 965,3 hektare, kawasan ini dipersiapkan untuk menjadi KEK yang mendorong pertumbuhan industri skala besar.
9. KPI Tapin (Kabupaten Tapin)
Memiliki luas 1.238 hektare, kawasan ini ditetapkan sebagai Kawasan Peruntukan Industri (KPI) berbasis lahan CLU, yang mendukung aktivitas industri di bagian tengah Kalsel.
10. Secara keseluruhan, distribusi kawasan industri dan KEK ini menunjukkan strategi pembangunan ekonomi Kalimantan Selatan yang terintegrasi, mencakup wilayah utara, tengah, selatan, hingga pesisir timur. Tujuannya adalah untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat hilirisasi sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

10. Transmigrasi

Melalui program transmigrasi dapat mendukung tujuan pembangunan nasional dan daerah yakni pemerataan jumlah penduduk. dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping itu. program transmigrasi berperan dalam mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka

melalui pembukaan lapangan kerja baru. yang umumnya pada sektor informal. Kalimantan Selatan memiliki lokasi Eks unit pemukiman transmigrasi yang tersebar di 9 (sembilan) kabupaten. yaitu Tanah Laut (24 unit). Barito Kuala (21 unit). Banjar (11 unit). Balangan (3 unit). Tanah Bumbu (17 unit). Kotabaru (25 unit). Tabalong (10 unit). Tapin (10 unit). dan Hulu Sungai Utara (5 unit). Sedangkan lokus Prioritas Kawasan Transmigrasi Nasional di Provinsi Kalimantan Selatan adalah di Kabupaten Barito Kuala. (Nama Kawasan: Cahaya Baru). dan Lokus Kawasan transmigrasi Prioritas Kementerian. yaitu Kawasan Transmigrasi Gula Habang (Kabupaten Balangan) dan Kawasan Transmigrasi Sebampan (Kabupaten Tanah Bumbu). Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel di bawah.

Tabel 2.154 Lokasi Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian di Provinsi Kalimantan Selatan (Pengukuran 2022-2023)

NO	KAWASAN	KABUPATEN	PENGUKURAN 2022		PENGUKURAN 2023		PENGUKURAN 2024	
			IPK TRANS	STATUS	IPK TRANS	STATUS	IPK TRANS	STATUS
1	Sebampan	Tanah Bumbu	52.47	Mandiri	51.91	Mandiri	59.66	Mandiri
2	Gula habang	Balangan	40.13	Berkembang	35.87	Berkembang	40.71	Berkembang
3	Cahaya Baru	Barito Kuala	62.76	Mandiri	70.00	Mandiri	79,29	Berdaya Saing

Sumber: Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

2.5.4 Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan Daerah

Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, kinerja unsur pengawasan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan perbaikan signifikan, terutama dalam aspek tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi.

Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) mengalami tren peningkatan dari 3,84 pada tahun 2020 menjadi 3,93 pada 2022, meskipun sedikit menurun ke angka 3,85 pada 2024. Hal ini menandakan bahwa secara umum integritas aparatur tetap terjaga, meskipun perlu perhatian terhadap penurunan kecil tersebut di tahun terakhir.

Capaian penting lainnya adalah turunnya persentase temuan material eksternal, dari 3,5% di tahun 2020 menjadi hanya 0,00151% pada tahun 2024. Hal ini merefleksikan peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan dan efektivitas pengawasan internal serta eksternal. Sejalan dengan itu, persentase SKPD yang bebas temuan keuangan material meningkat signifikan dari 85% (2020) menjadi 98% (2024), mencerminkan akuntabilitas yang semakin kuat di seluruh perangkat daerah.

Secara keseluruhan, tren capaian pengawasan menunjukkan arah yang positif, memperkuat pondasi reformasi birokrasi dan menciptakan iklim pemerintahan yang lebih akuntabel sebagai modal utama dalam penyusunan RKPD tahun 2026.

Tabel 2.155 Capaian Kinerja Unsur Pengawasan Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Indeks	3,84	3,88	3,93	3,92	3,85
2	Persentase temuan material eksternal pada Pemerintah Daerah	%	3,5	0,13	0,04	0,04	0,00151
3	Persentase SKPD Pemerintah provinsi Kalimantan Selatan Bebas Temuan Keuangan Material	%	85	85	86	88	98
4	Nilai Komponen Evaluasi Internal SAKIP	Poin	-	7.98	8,04	8,04	20,16

Sumber: LPPD Provinsi Kalsel dan LAKIP Inspektorat Tahun 2024

2.6 Aspek Daya Saing Daerah

2.6.2 Daya Saing Berdasarkan Pilar IDSD (BRIN)

Setiap wilayah di Indonesia memiliki keanekaragaman sumber daya yang menjadikan setiap daerah dapat berbeda dalam merencanakan pembangunannya. Terlebih lagi dalam hal daya saing daerah, dimana daya saing tersebut merupakan optimalisasi penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan dan unggulan daerah terutama sumber daya baik alam maupun manusianya. Hal tersebut akan menjadi salah satu faktor keberhasilan pembangunan ekonomi sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Terkait dengan aspek daya saing daerah diuraikan tentang kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Kerangka pengukuran IDSD 2024 mengacu kepada global Competitiveness index (GCI) 2019 (WEF. 2019) yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing seperti pada gambar di bawah ini. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya

saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi berdasarkan dimensi tertentu yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Perincian dimensi dan indikator pembentuk daya saing diuraikan pada penjelasan pilar.

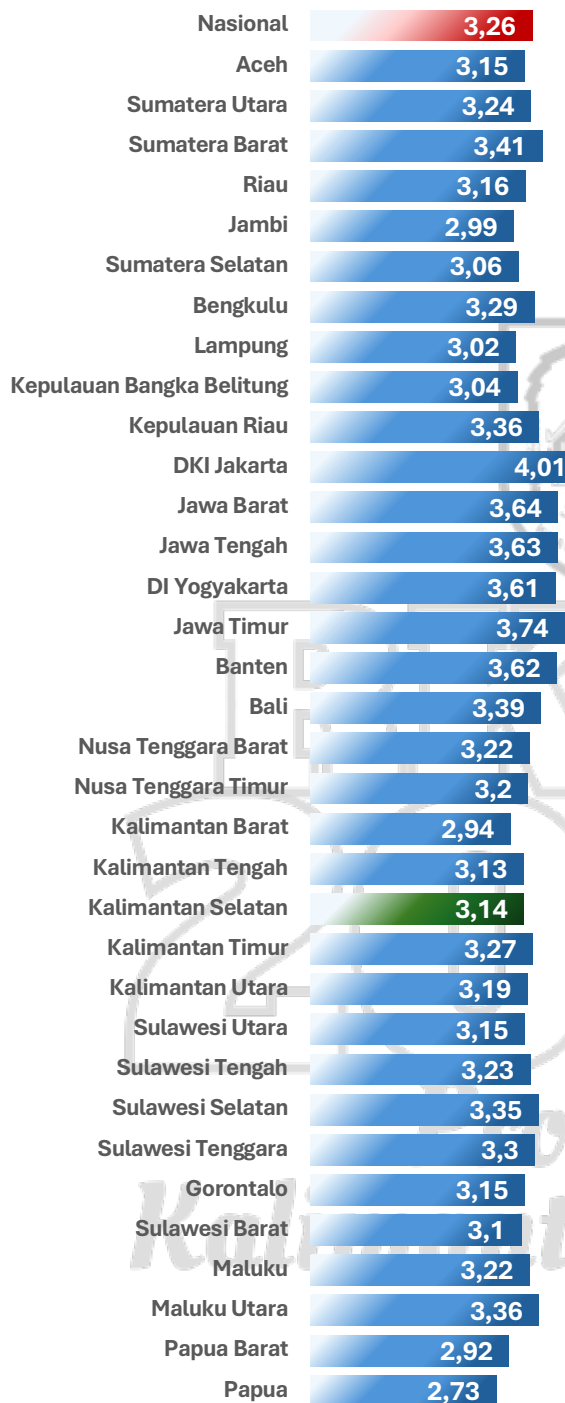


Gambar 2.39 Kerangka pengukuran IDSD 2024

Sumber : BRIN, 2025

2026
Provinsi
Kalimantan Selatan

SKOR IDSD 2022 - PROVINSI



Skor IDSD > 3,51 masih terpusat di Pulau Jawa. Beberapa provinsi dengan skor 3,00–3,51 tersebar di berbagai pulau.

SKOR IDSD 2022
NASIONAL

3,26

14

PROVINSI
≥ NASIONAL

* Skor Nasional adalah rata-rata Skor Provinsi

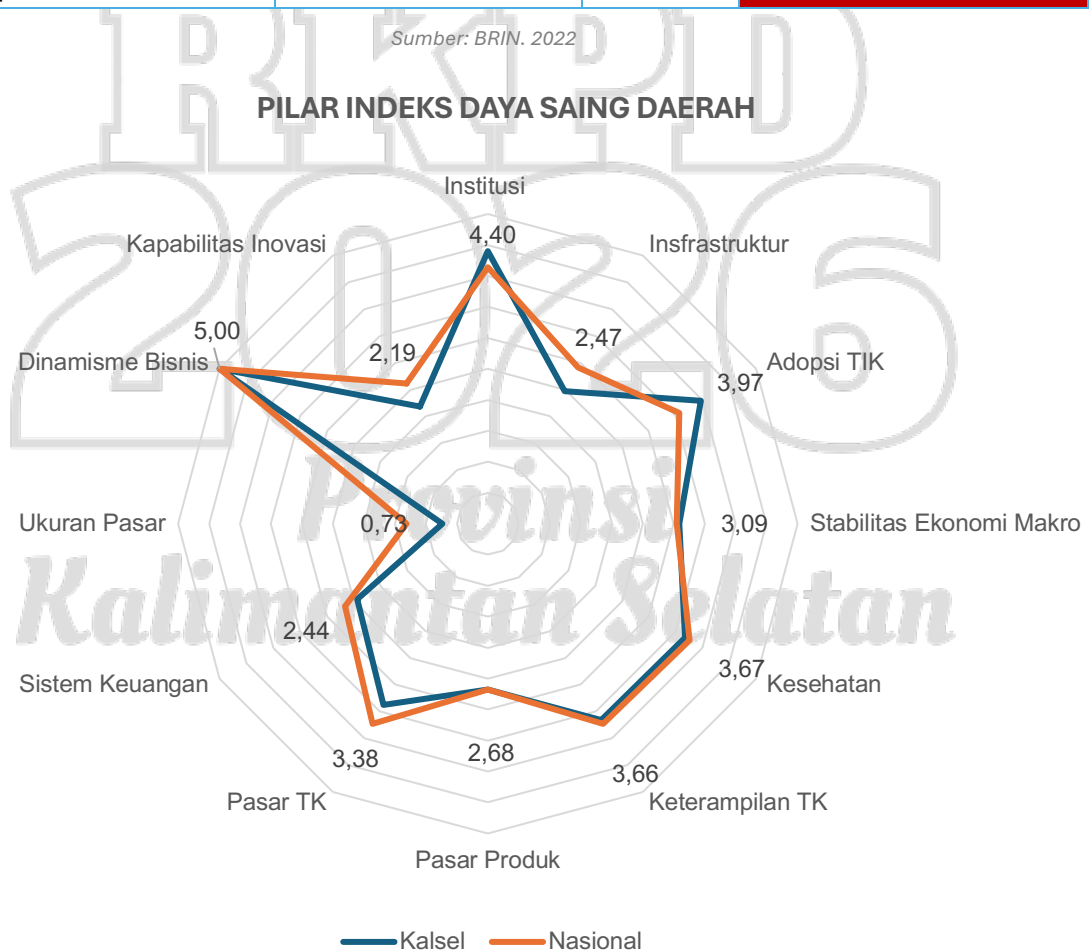
Gambar 2.40 Skor IDSD Nasional Tahun 2022

Sampai dengan tahun 2022 Skor IDSD Nasional adalah sebesar 3.26 dengan posisi skor Provinsi Kalimantan selatan berada dibawah capaian Rata-rata nasional yaitu sebesar 3.14

Tabel 2.156 Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022

NO	PILAR	KALIMANTAN SELATAN	NASIONAL	CAPAIAN
1	Institusi	4.40	4.14	DIATAS NASIONAL
2	Infrastruktur	2.47	2.91	DIBAWAH NASIONAL
3	Adopsi TIK	3.97	3.57	DIATAS NASIONAL
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3.09	3.05	DIATAS NASIONAL
5	Kesehatan	3.67	3.76	DIBAWAH NASIONAL
6	Keterampilan	3.66	3.73	DIBAWAH NASIONAL
7	Pasar Produk	2.68	2.68	SAMA DENGAN NASIONAL
8	Pasar Tenaga k Kerja	3.38	3.73	DIBAWAH NASIONAL
9	Sistem Keuangan	2.44	2.66	DIBAWAH NASIONAL
10	Ukuran Pasar	0.73	1.31	DIBAWAH NASIONAL
11	Dinamisme Bisnis	5.00	5.00	SAMA DENGAN NASIONAL
12	Kapabilitas Inovasi	2.19	2.62	DIBAWAH NASIONAL

Sumber: BRIN. 2022



Gambar 2.41 Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2022

Tabel 2.157 Capaian Indikator Pilar IDSD untuk Tahun 2023 - 2024

NO	PILAR	2023	2024
1	Institusi	4.52	4.62
2	Infrastruktur	2.98	3.09
3	Adopsi TIK	3.88	3.98
4	Stabilitas Ekonomi Makro	3.47	4.12
5	Kesehatan	3.68	3.71
6	Keterampilan	3.82	4.23
7	Pasar Produk	2.28	2.31
8	Pasar Tenaga Kerja	3.83	3.73
9	Sistem Keuangan	2.16	2.80
10	Ukuran Pasar	4.34	4.40
11	Dinamisme Bisnis	3.14	2.63
12	Kapabilitas Inovasi	2.89	3.11
	Kalimantan Selatan	3.42	3.56

Sumber: BRIN, 2025

Berdasarkan data table dan grafik di atas terdapat beberapa komponen atau pilar IDSD yang capaiannya belum berada di atas rata-rata nasional. komponen itu antara lain:

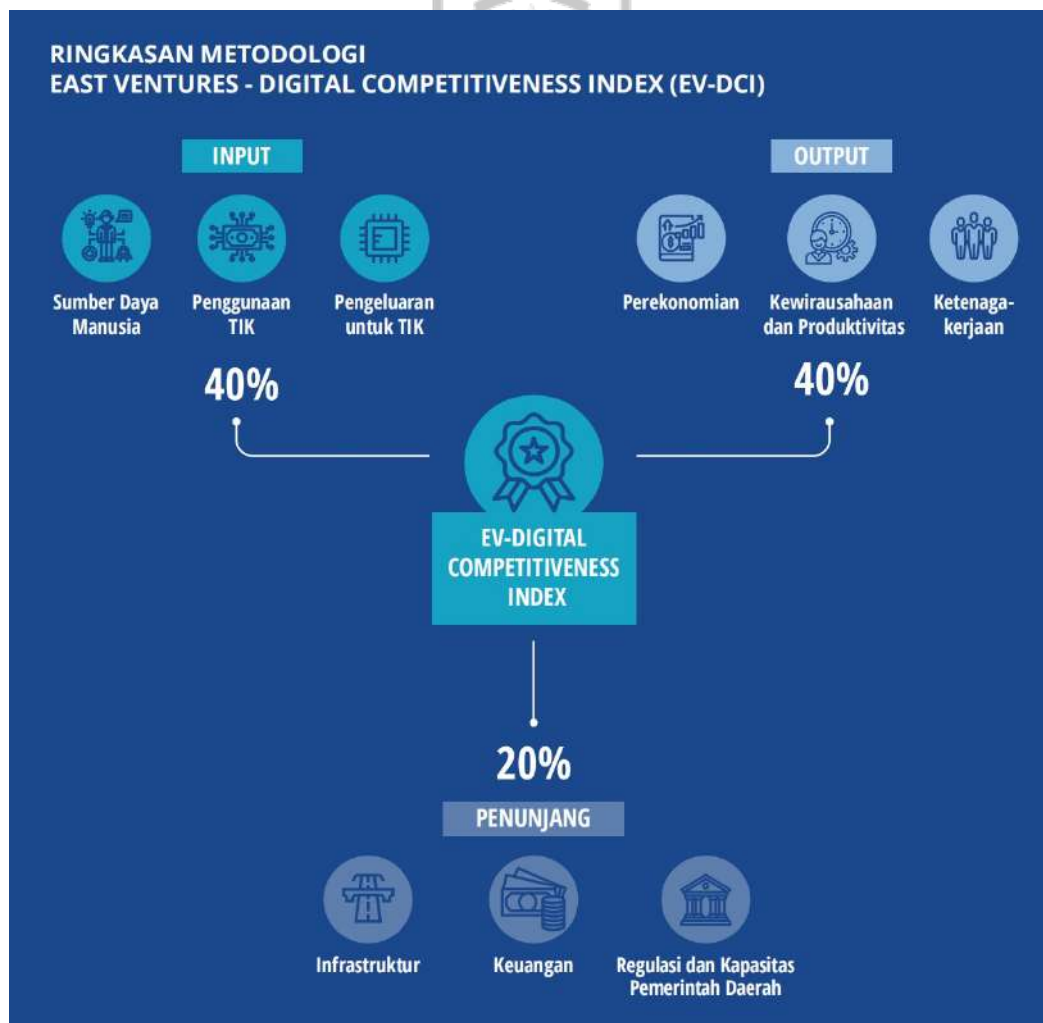
1. Infrastruktur
2. Kesehatan
3. Keterampilan
4. Pasar Tenaga Kerja
5. Sistem Keuangan
6. Ukuran Pasar
7. Kapabilitas Inovasi

Daya saing digital provinsi Indonesia dapat dilihat secara lebih detail melalui sub-indeks Input, Output, dan Penunjang. Secara umum sebaran skor lebih landai dan merata dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika dilihat dari nilai tengahnya, nilai tengah skor Input tidak mengalami perubahan (36.9), namun sebaran skor lebih merata akibat kesenjangan antar daerah semakin berkurang. Sementara nilai tengah skor Output dan Penunjang mengalami peningkatan masing-masing menjadi dari 26.9 menjadi 30.9 dan 39.1 menjadi 46.1.

Provinsi Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke 15 pada tahun 2021 dan 2022 dengan nilai sub-indeks Input, Output, dan Penunjang sebagai berikut:

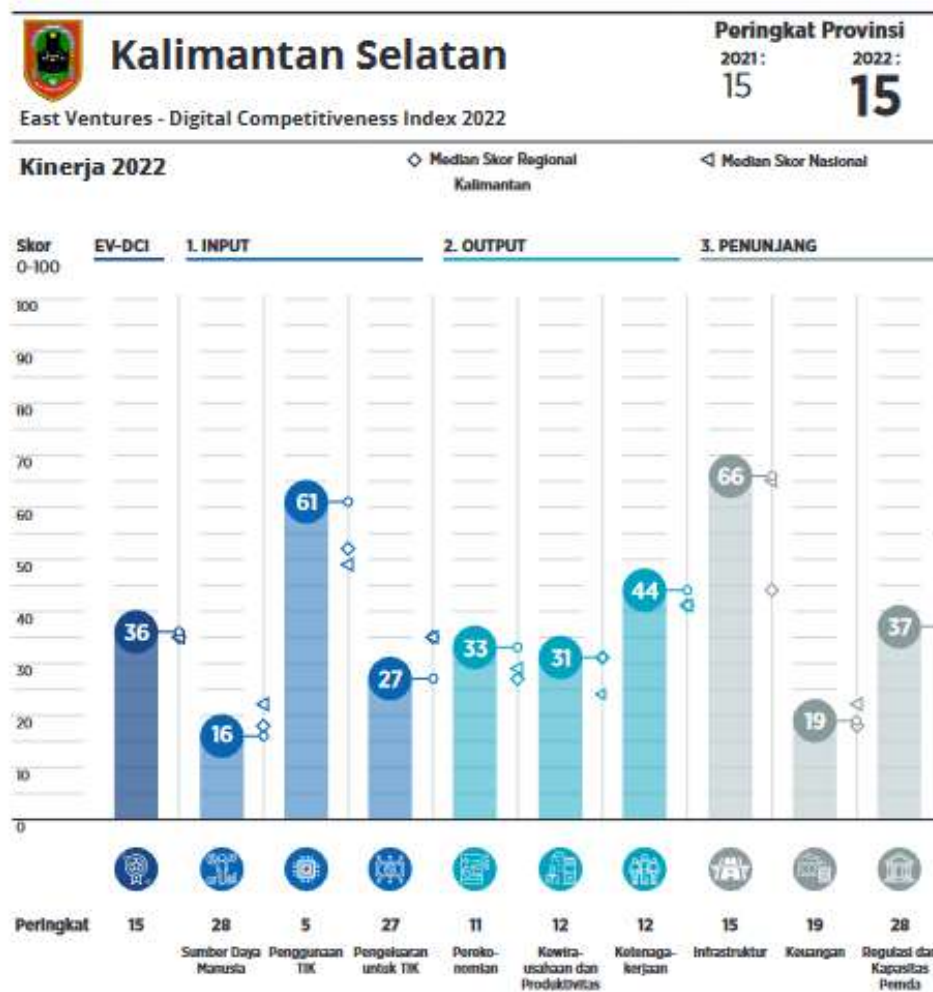
1. Input dengan komponen:
 - a. Sumber Daya Manusia
 - b. Penggunaan TIK
 - c. Pengeluaran untuk TIK

2. Output dengan komponen:
 - a. Perekonomian
 - b. Kewirausahaan dan Produktivitas
 - c. Ketenagakerjaan
3. Output dengan komponen:
 - a. Infrastruktur
 - b. Keuangan
 - c. Regulasi dan Kapasitas Pemda



Gambar 2.42 Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index 2022

Sumber: East Ventures - Digital Competitiveness Index 2022



Gambar 2.43 Ringkasan Komponen EV-Digital Competitiveness Index Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022

Sumber: East Ventures - Digital Competitiveness Index 2022

2.6.3 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah dalam kaitannya dengan daya saing daerah adalah terkait dengan kapasitas ekonomi daerah dimana daerah harus memiliki daya tarik (*attractiveness*) bagi pelaku ekonomi. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan perlu adanya tinjauan terhadap kemampuan ekonomi daerah yang bertujuan untuk mengetahui kualitas pertumbuhan ekonomi daerah dimana semakin baik kualitas pertumbuhan ekonomi suatu daerah maka semakin tinggi pula daya saing daerah tersebut dengan daerah lain.

2.6.3.1 Konsumsi Rumah Tangga

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka

mengumpulkan pendapatan. dapat memiliki harta dan kewajiban. serta mengonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama. utamanya kelompok makanan dan perumahan.

Sebagai salah satu penopang utama perekonomian pascapandemi, Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga (PKRT) di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 menunjukkan tren yang solid dan berkelanjutan. Meskipun mengalami perlambatan pertumbuhan secara tahunan (*year-on-year*) di triwulan II 2024 (4,81%) dibandingkan triwulan I 2024 (4,96%), angka pertumbuhan ini tetap positif dan mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga. Konsumsi rumah tangga terus mendominasi struktur PDRB, dengan kontribusi mencapai 45% di triwulan II 2024.

Dari sisi sebaran wilayah, pergerakan konsumsi masih terkonsentrasi di daerah dengan populasi tinggi. Kota Banjarmasin, yang pada Juni 2024 menampung sekitar 16% dari 4,23 juta jiwa penduduk Kalsel, mempertahankan posisi sebagai wilayah dengan pengeluaran konsumsi terbesar. Sementara itu, Kabupaten Banjar menjadi penyumbang terbesar kedua dalam nilai konsumsi. Sebaliknya, kabupaten dengan jumlah penduduk terkecil, seperti Kabupaten Balangan, memiliki nilai konsumsi terendah. Pola ini menunjukkan korelasi kuat antara jumlah penduduk dan agregat nilai konsumsi di masing-masing kabupaten/kota.

Meskipun secara keseluruhan konsumsi tumbuh positif, terdapat disparitas pertumbuhan antar-wilayah. Pada tahun 2022, Kabupaten Tabalong mencatatkan pertumbuhan tertinggi, sementara Kabupaten Barito Kuala terendah. Meskipun data tahun 2024 secara spesifik untuk setiap kabupaten/kota belum dirilis secara publik oleh BPS hingga saat ini, tren perbedaan laju pertumbuhan ini perlu menjadi perhatian dalam evaluasi kebijakan ekonomi. Selain itu, dinamika ekonomi 2024 juga diwarnai oleh tantangan, seperti laju inflasi dan potensi pergeseran pola konsumsi. Oleh karena itu, langkah-langkah kebijakan yang pro-aktif diperlukan untuk memastikan pemerataan daya beli dan pertumbuhan yang inklusif di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.

Secara keseluruhan, kinerja PKRT tahun 2024 menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat di tengah tantangan yang ada. Hasil ini menjadi landasan penting untuk perencanaan pembangunan tahun 2026, khususnya dalam merumuskan kebijakan yang dapat mendorong peningkatan daya beli, menjaga stabilitas harga, serta memperkuat sektor-sektor ekonomi yang berbasis pada konsumsi domestik.

2.6.3.2 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita

Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian. pemberian maupun

produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. Konsumsi rumah tangga dibedakan atas konsumsi makanan maupun bukan makanan tanpa memperhatikan asal barang dan terbatas pada pengeluaran untuk kebutuhan rumah tangga saja. tidak termasuk konsumsi/pengeluaran untuk keperluan usaha atau yang diberikan kepada pihak lain.

Pengeluaran untuk konsumsi makanan dihitung selama seminggu yang lalu, sedangkan untuk bukan makanan dihitung selama sebulan dan 12 bulan yang lalu. Baik konsumsi makanan maupun bukan makanan selanjutnya dikonversikan ke dalam pengeluaran rata-rata sebulan. Angka-angka konsumsi/pengeluaran rata-rata per kapita yang disajikan dalam publikasi ini diperoleh dari hasil bagi jumlah konsumsi seluruh rumah tangga (baik mengkonsumsi makanan maupun tidak) terhadap jumlah penduduk.

Pada aspek kemampuan ekonomi daerah, salah satu indikator adalah pengeluaran rata-rata per kapita selama sebulan. Pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pengeluaran rata-rata per kapita di Provinsi Kalimantan Selatan secara umum mengalami kenaikan di setiap periodenya yang dikarenakan adanya berbagai hal seperti laju inflasi, peningkatan arus komoditas barang, hingga perubahan gaya hidup masyarakat.

2.6.3.3 Nilai Tukar Petani

Nilai NTP di Kalimantan Selatan pada Bulan Maret 2024 sebesar 117.16 angka ini menunjukkan petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika tingkat rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk konsumsi rumahtangga dan biaya produksi terhadap tahun dasar atau NTP di atas 100.

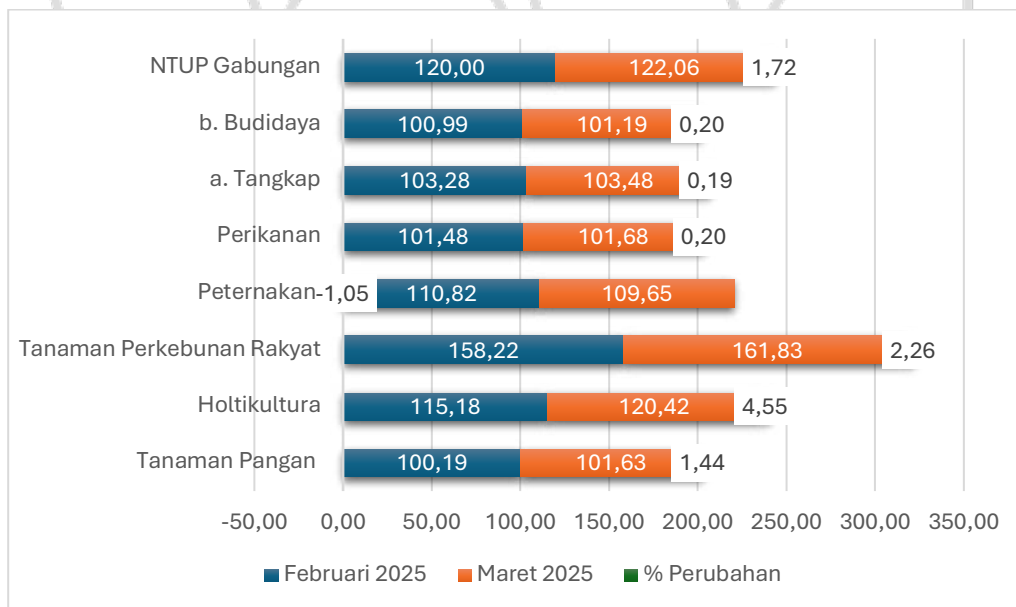
Pada Maret 2024, nilai Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) di Kalimantan Selatan mengalami kenaikan sebesar 2.36 persen yang disebabkan oleh kenaikan indeks pada beberapa kelompok pengeluaran khususnya kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) Maret 2024 sebesar 118.63. Nilai ini dapat diartikan bahwa untuk kegiatan usaha pertanian yang dilakukan petani mengalami kenaikan ketika rata-rata harga yang diterima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayar untuk biaya produksi, berarti kegiatan usaha yang dilakukan petani memberikan keuntungan.

Tabel 2.158 Perkembangan NTP Provinsi di Kalimantan dan Indonesia Tahun 2023-2024

NO.	PROVINSI	NTP (%)	
		2023	2024
1.	Kalimantan Barat	139.03	154.98
2.	Kalimantan Tengah	118.57	125.89
3.	Kalimantan Selatan	109.48	114.35
4.	Kalimantan Timur	129.04	137.94
5.	Kalimantan Utara	111.92	112.81
	INDONESIA	112.46	119.62

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. 2024

Pada Maret 2025, NTP Kalimantan Selatan sebesar 120,69, turun 0,55 dibandingkan NTP Februari 2025, yaitu dari 121,36 menjadi 120,69. Penurunan NTP pada Maret 2025 dipengaruhi oleh penurunan NTP pada subsektor penyusunnya, yaitu subsektor tanaman pangan, subsektor peternakan, dan subsektor perikanan yang masing-masing turun sebesar 2,00 persen; 1,64 persen; dan 0,54 persen secara berurutan, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dalam rangka peningkatan NTP. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) sampai dengan Maret 2025 dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 2.44 Perkembangan Nilai Tukar Petani Kalimantan Selatan s.d Maret 2025

Sumber: BPS Prov. Kalimantan Selatan. 2025

Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) digunakan untuk melihat tingkat keekonomian usaha pertanian di perdesaan pada bulan dan tahun tertentu dibandingkan dengan tahun dasarnya.

NTUP adalah perbandingan atau rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). yang dinyatakan dalam persentase. dimana pada penghitungan NTUP hanya menggunakan Biaya Produksi dan Penambahan Barang Modal (BPPBM) sebagai komponen Ib.

Secara konseptual NTUP adalah pengukur kemampuan tukar barang-barang (produk) pertanian yang dihasilkan petani terhadap barang/jasa yang diperlukan untuk kebutuhan dalam memproduksi hasil pertanian. NTUP diharapkan lebih mencerminkan kemampuan produksi petani. karena yang dibandingkan hanya produksi dengan biaya produksi dan penambahan barang modalnya.

2.6.3.1 Perkembangan Impor

Nilai impor Kalimantan Selatan bulan November 2024 mencapai US\$ 135,59 juta, turun 18,15 persen dibandingkan pada bulan Oktober 2024 yang sebesar US\$ 165,65 juta dan turun 8,69 persen dibandingkan dengan bulan November 2023 yang sebesar US\$ 148,49 juta.

Lima komoditas impor terbesar November 2024 di Kalimantan Selatan antara lain bahan bakar mineral; mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya; kendaraan dan bagiannya; berbagai produk kimia; serta bahan peledak, korek api, dan kembang api.

Menurut golongan penggunaan barang, nilai impor bulan November 2024 dibandingkan dengan bulan Oktober 2024 pada golongan barang konsumsi terjadi penurunan sebesar 9,28 persen, yaitu dari US\$ 11,93 juta menjadi US\$ 10,83 juta, kemudian pada golongan bahan baku/penolong mengalami penurunan sebesar 20,44 persen dari US\$ 145,21 juta menjadi US\$ 115,54 juta. Pada golongan barang modal terjadi kenaikan sebesar 8,53 persen dari US\$ 8,50 juta menjadi US\$ 9,23 juta

2.6.3.1 Perkembangan Sektor Energi

Sampai dengan Tahun 2023 Rasio elektrifikasi wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah mencapai 99.54 persen dengan rumah tangga berlistrik yang mencapai 1.295.476 . Pencapaian elektrifikasi di Kalimantan Selatan maupun Kalimantan Tengah cukup tinggi. tetapi kami terus berupaya persentasenya semakin meningkat dan masyarakat terlayani listrik.

2.6.3.2 Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel

Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang pada tahun 2024 sebesar 56,40 persen. Jika dibandingkan dengan tahun 2023, nilai ini mengalami kenaikan sebesar 1,64 poin dimana pada tahun 2023 TPK hotel bintang mencapai 54,76 persen. Sementara itu, TPK hotel nonbintang

pada tahun 2024 adalah sebesar 24,53 persen, dimana nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,74 poin dibandingkan dengan TPK hotel nonbintang pada tahun 2023 yang mencapai 23,79 persen.

Berdasarkan kelas hotelnya, TPK tertinggi pada hotel bintang tahun 2024 dicapai oleh hotel bintang 4 dengan TPK sebesar 63,05 persen. Sementara TPK terendah ada pada hotel bintang 1 sebesar 32,58 persen. Pada hotel nonbintang, TPK tertinggi pada tahun 2024 dicapai oleh kelas kamar > 40 kamar yaitu sebesar 38,33 persen, sedangkan TPK terendah terjadi pada hotel kelas kamar < 10 kamar yaitu sebesar 19,57 persen.

Dilihat dari perkembangannya, kelas hotel bintang 1 dan 2 mengalami penurunan TPK, sedangkan bintang 3 dan 4 mengalami kenaikan TPK. Untuk hotel bintang, kenaikan TPK masing-masing kelas adalah sebagai berikut, TPK hotel bintang 1 turun sebesar 0,33 poin, TPK hotel bintang 2 turun 2,93 poin, sedangkan TPK hotel bintang 3 naik 2,38 poin, dan TPK hotel bintang 4 naik 1,66 poin. Pada klasifikasi hotel nonbintang, TPK akomodasi dengan kelas kamar < 10 kamar turun 0,49 poin, TPK kelas kamar 10 - 24 kamar turun 0,45 poin, TPK akomodasi dengan kelas kamar 25 - 40 turun 0,26 poin, dan TPK dengan kelas kamar > 40 kamar naik 6,15 poin.

Sedangkan pada perkembangan TPK hotel nonbintang tahun 2024, TPK hotel nonbintang tertinggi juga terjadi pada Desember 2024 yaitu sebesar 29,38 persen, sedangkan TPK terendah terjadi di Maret 2024 yaitu sebesar 21,02 persen.

Selama tahun 2024, RLMT pada hotel bintang lebih besar dibandingkan dengan hotel nonbintang. Pada hotel bintang, RLMT nya sebesar 1,39 malam, lebih besar 0,34 poin dibandingkan hotel nonbintang yang sebesar 1,05 malam. Jika dilihat berdasarkan jenis tamu yang datang dan menginap, pada hotel bintang, RLMT tamu asing sebesar 3,39 malam dan RLMT tamu domestik sebesar 1,37 malam. Pada hotel nonbintang, RLMT tamu asing sebesar 1,04 malam dan RLMT tamu domestik sebesar 1,05 malam.

2.6.4 Fokus Iklim Investasi dan Pelayanan Publik

2.6.4.1 Investasi

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan berpengaruh positif terhadap perkembangan ekonomi suatu wilayah. Dalam kaitan ini, investasi yang dimaksud terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada besaran nilai komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

Komponen pembentukan modal tetap bruto terdiri dari PMTB bangunan dan nonbangunan. Subkomponen bangunan mendominasi PMTB pada tiap Kabupaten/ Kota. Komponen penyumbang pembentukan modal tetap bruto bangunan adalah output kategori

konstruksi pada PDRB Lapangan usaha. Sekitar 80 persen nilai PMTB berupa output dari konstruksi. Output kategori konstruksi bisa dihasilkan oleh pemerintah, rumah tangga maupun swasta. Output yang berasal dari pemerintah dapat dilihat pada pos belanja modal di APBD maupun APBN.

Tabel 2.159 Tabel PMTB Provinsi Kalimantan Selatan

KAB/KOTA	PMTB
	(MILIAR RUPIAH)
Kab.Tabalong	3.729.93
Kab. Balangan	3.088.17
Kab. Barito Kuala	3.371.20
Kab. Banjar	6.615.76
Kab.Tanah Laut	3.853.43
Kab.Hulu Sungai Selatan	2.486.97
Kota Banjarmasin	11.923.96
Kab.Tanah Bumbu	4.345.10
Kab. Tapin	2.348.54
Kota Banjarbaru	4.985.23
Kab.Kotabaru	5.861.14
Kab.Hulu Sungai Tengah	2.666.75
Kab. Hulu Sungai Utara	1.744.62
TOTAL	57.020.80

Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin merupakan wilayah yang memiliki nilai PMTB terbesar dengan nominal 11.92 triliun rupiah. Hal ini wajar, jika dihubungkan dengan status Banjarmasin sebagai ibukota. Kegiatan pembangunan yang ada tidak hanya bersumber dari pemerintah, namun termasuk pula dari swasta. Di sisi lain, Banjarmasin juga memiliki jumlah penduduk paling besar, pastinya juga memerlukan bangunan perumahan yang paling banyak (rumah tinggal). Rumah tinggal merupakan komponen pembentuk PMTB bangunan dari sektor rumah tangga. Pertumbuhan Komponen di Banjarmasin ini mencapai 4.84 persen.

Selain berupa bangunan, PMTB juga memuat barang-barang modal yang bukan bangunan. Beberapa yang tercakup dalam barang modal non bangunan yaitu mesin perlengkapan, kendaraan, hewan dan tanaman yang menghasilkan berulang. Serupa dengan subkomponen bangunan, seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan juga mengalami peningkatan pada tahun 2023 untuk sub komponen non bangunan.

2.6.4.1 Kriminalitas

Data kriminal akan menjadi tolok ukur dan acuan publik dalam menilai tingkat keamanan suatu wilayah. Kebutuhan fundamental setiap manusia terdiri dari kebutuhan biologis seperti

makan, minum serta tidur, dan kebutuhan sosial, seperti status sosial, peranan sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Saat ini dapat dikatakan bahwa rasa aman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Menurut Abraham Maslow dalam teori hierarki kebutuhan manusia (Maslow, 1943), rasa aman berada pada tingkatan yang kedua di bawah kebutuhan dasar manusia seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menunjukkan bahwa rasa aman merupakan kebutuhan manusia yang penting.

2.6.4.2 Pelayanan Publik

Hasil penilaian kepatuhan standar pelayanan publik tahun 2022 ada Lima pemerintah daerah di Kalsel yang masuk zona hijau dengan kategori kualitas tinggi (nilai 78.00 sampai 87.99), yaitu Pemerintah Kabupaten Tanah Laut (86.61), Pemerintah Kota Banjarbaru (84.74), Pemkab Tanah Bumbu (84.57), Pemkab Balangan (80.78), dan Pemkab Tabalong (79.36).

Adapun kategori pelayanan publik berkualitas sedang (54.00-77.99) atau berzona kuning, yakni Pemprov Kalsel, Pemkot Banjarmasin, Pemkab Banjar, Pemkab Barito Kuala, Pemkab Tapin, Pemkab Hulu Sungai Selatan, Pemkab Hulu Sungai Tengah, Pemkab Hulu Sungai Utara, dan Pemkab Kotabaru.

2.6.5 Fokus Sumber Daya Manusia

2.6.5.1 Ketenagakerjaan

Penduduk Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Komposisi penduduk bekerja menurut lapangan pekerjaan utama dapat menggambarkan struktur tenaga kerja di pasar kerja. Berdasarkan BPS Kalimantan Selatan per Agustus 2023, tiga lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja paling banyak adalah Pertanian (29.47 persen); Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (27.54 persen); dan Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (17.23 persen). Pola distribusi lapangan pekerjaan dalam menyerap tenaga kerja ini masih sama dengan Agustus 2023. Ada tiga lapangan pekerjaan utama yang mengalami peningkatan terbesar yaitu Sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Akomodasi (1.67 persen poin), Sektor Pertambangan (0.50 persen poin), dan Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan (0.49 persen poin). Sementara dua lapangan pekerjaan yang mengalami penurunan persentase terbesar adalah Sektor Pertanian (-2.94 persen poin) dan Konstruksi (-0.50 persen poin).

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu

buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar. pekerja bebas. dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2023. penduduk yang bekerja pada kegiatan informal adalah 55.25 persen. sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal adalah 44.75 persen.

Status Pekerjaan Utama pada penduduk yang bekerja di Kalimantan terbagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan BPS Kalimantan Selatan per Agustus 2023. penduduk bekerja masih didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai sebesar 42.03 persen. Berusaha sendiri sebesar 26.48 persen. Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap sebesar 12.98 persen. Pekerja Keluarga/Tak Dibayar sebesar 11.54 %. Pekerja Bebas di Nonpertanian sebesar 2.92 persen. Berusaha dibantu Buruh Tetap sebesar 2.72. dan Pekerja Bebas di Pertanian sebesar 1.34 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT berdasarkan BPS Kalimantan Selatan per Agustus 2023 sebesar 4.31 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja. terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2023 TPT mengalami penurunan sebesar bila dibandingkan dengan Februari 2022. Pada Agustus 2023. TPT laki-laki sebesar 4.91 persen. lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3.34 persen. TPT laki-laki mengalami peningkatan bila dibandingkan Agustus 2022 sedangkan TPT perempuan mengalami penurunan jika dibandingkan Agustus 2023. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal. TPT perkotaan (5.42 persen) lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (3.24 persen).

2.6.6 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Salah satu fokus yang juga memiliki peran besar terhadap aspek daya saing Provinsi Kalimantan Selatan selain dilihat dari beberapa komponen di atas. yang terakhir adalah mengenai Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur. Data-data yang tersedia terkait fokus fasilitas wilayah/infrastruktur di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu antara lain adalah panjang jalan. Penyelenggaraan jalan dan jembatan di Provinsi Kalimantan Selatan mencakup kewenangan nasional. provinsi. dan kabupaten/kota. Berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022 tentang penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai jalan nasional, berdasarkan data kemandapan jalan yang dihimpun dari kementerian PUPR kemandapan jalan Nasional tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan untuk panjang jalan Nasional Sepanjang 1204.2 Km dengan jalan mantap sepanjang 1159.8 Km dan jalan Belum Mantap sepanjang 44.4 Km dengan persentase jalan mantap sebesar 96.31 %, Adapun panjang jalan provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0150/KUM/2023 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan yang semula 756.12 km menjadi 927.41 km dengan

kondisi mantap 82.04 % pada Tahun 2023 dengan Panjang jalan mantap sebesar 760.84 Km dan masih ada sebesar 166.57 Km kondisi belum mantap. Adapun capaian kondisi jalan mantap Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah diatas target Nasional yaitu 75% untuk kondisi mantap jalan daerah Kewenangan Provinsi.

Komponen pendukung lainnya adalah ketersediaan bandara. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki jumlah total 5 bandara yang tersebar pada 5 Kab/Kota. antarlain:

1. Bandar Udara Internasional Syamsudin Noor – Banjarbaru
2. Bandar Udara Bersujud – Batulicin
3. Bandar Udara Warukin – Warukin
4. Bandar Udara Gusti Syamsir Alam – Kotabaru
5. Bandar Udara Mekar Putih – Kota Baru

Salah Satu Dari Semua Bandar Udara Tersebut Bahkan Merupakan Bandara Internasional Yang Menjadi Gerbang Bagi Penumpang Penerbangan Luar Negeri. Hal Tersebut Memang Diperlukan. Untuk Dapat Membuat Roda Ekonomi Dan Pariwisata Kalimantan Selatan Tetap Berputar.

Terkait dengan angkutan sungai dan laut Provinsi Kalimantan Selatan memiliki 7 pelabuhan yang beroperasi dengan 2 jenis pelabuhan yaitu pelabuhan sungai dan danau serta pelabuhan penyeberangan yang memiliki hirarki pelabuhan yaitu pengumpan. Lokasi pelabuhan tersebar di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kota Banjarmasin. Kabupaten Banjar. Kabupaten Barito Kuala. dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Seluruhnya memiliki status kepemilikan dan pengelolaannya dibawah kewenangan Pemerintah Daerah di Provinsi Kalimantan Selatan.

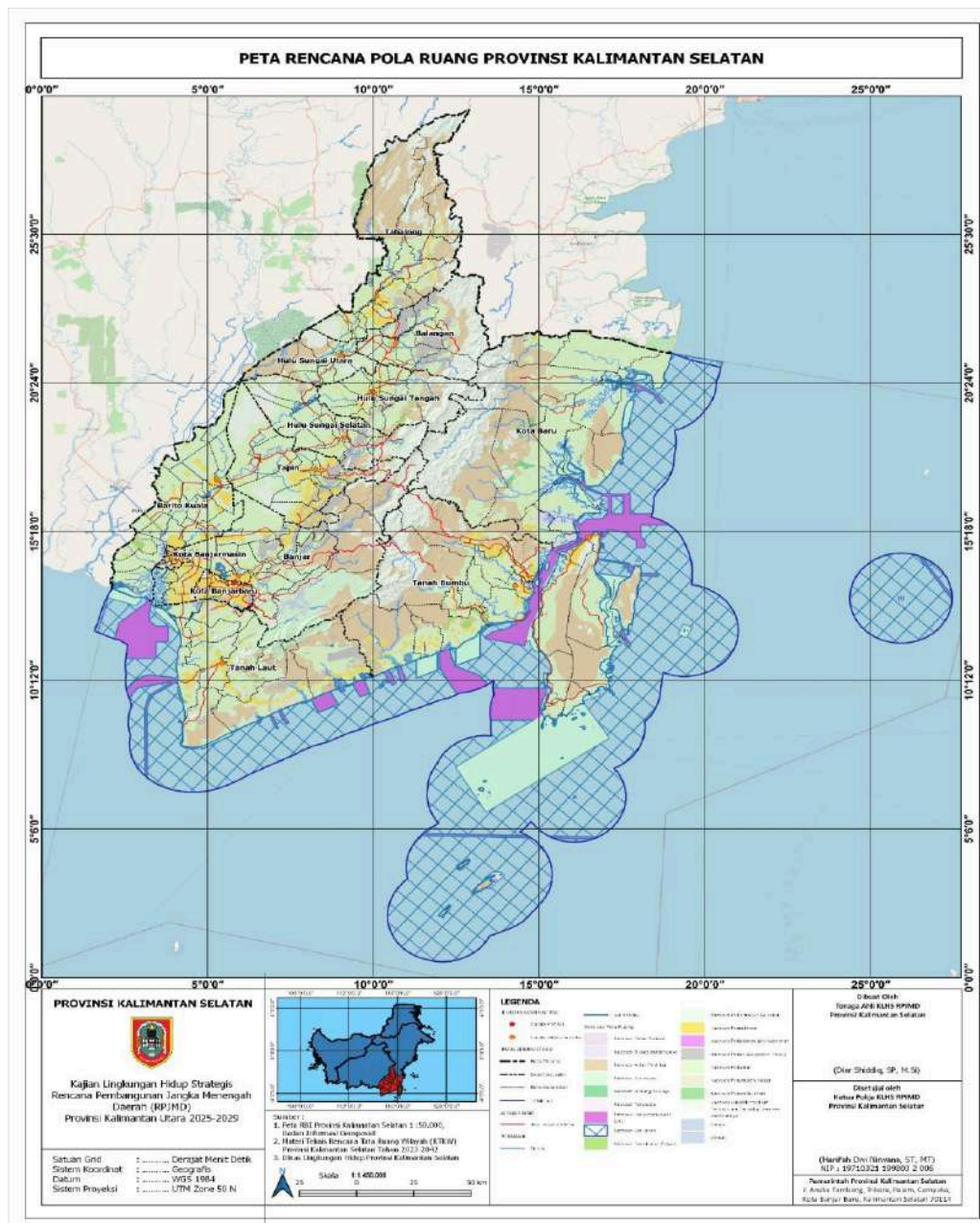
Dalam rangka menunjang perekonomian sektor pertanian dan pangan. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki Upaya dalam pengelolaan sumber daya air terkait dengan pengelolaan irigasi dan daerah irigasi. Adapun luas Daerah Irigasi dan Daerah Irigasi Rawa (DI/DIR) di Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah 995 DI/DIR dan luas total ± 359.595 Ha. dengan persentase 18.53% merupakan kewenangan pusat. 15.85% kewenangan provinsi. dan 55.62% merupakan kewenangan kabupaten/kota. Untuk melihat kinerja sistem irigasi masing-masing DI/DIR pada setiap kewenangan maka dilakukan penilaian kinerja jaringan irigasi yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2015 tentang eksploitasi dan pemeliharaan irigasi yang diterjemahkan kedalam Indeks Kinerja Sistem Irigasi (IKSI). Berdasarkan IKSI dapat disimpulkan bahwa kondisi irigasi di Provinsi Kalimantan Selatan rata-rata masih berada di bawah 50% yang menunjukkan bahwa kinerja sistem irigasi masih di bawah potensi yang dimilikinya karena adanya kerusakan

Komponen pendukung aspek daya saing Provinsi Kalimantan Selatan lainnya adalah pembangunan aspek kesejahteraan masyarakat. Upaya dalam meningkatkan pembangunan manusia adalah melalui pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar salah satunya melalui penyediaan air minum, sanitasi dan persampahan. Capaian air minum akses layak Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2021 sebesar 83.02% dan tahun 2022 sebesar 88.68% . hal ini menunjukkan bahwa trend pencapaian air minum akses layak di Kalimantan Selatan mengalami perbaikan setiap tahunnya. Sebagian besar Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan telah memiliki capaian air minum dengan status akses layak di atas rata-rata Provinsi. dan hanya ada beberapa yang perlu masih mendapat perhatian antara lain Kab Tanah Laut, Kab Barito Kuala dan Kabupaten Kotabaru dengan capaian ketiga Kabupaten ini yang masih berada di bawah angka rata-rata Provinsi. Capaian akses air limbah Akses layak domestik Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2022 sebesar 88.28% naik sebesar 1.63% dari capaian tahun 2021 sebesar 86.85%. Sistem pengelolaan sampah yang dominan masih tradisional, antara lain adanya praktek pembuangan sampah secara sembarangan. Sehingga untuk melakukan pengelolaannya Provinsi Kalimantan Selatan masih terus berupaya untuk menambah dan memaksimalkan penyediaan sarana prasarana yang memadai, seperti penyediaan TPA, TPS, TPST, atau TPS3R.

Terkait ketersediaan listrik, sampai saat ini pasokan listrik didapat dari perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan PLN terus bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2022 jumlah pelanggan PLN sebanyak 1.416.063 atau naik 3.26 persen dibanding tahun 2021 dengan angka rasio Elektrifikasi (RE) Kalimantan Selatan s.d Desember 2022 baik Jumlah RT Berlistrik bersumber dari PLN dan Non PLN adalah sebesar 99.45%.

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

2.6.7 Kondisi Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup



Peta rencana pola ruang Provinsi Kalimantan selatan berdasarkan dokumen RTRW Kalimantan selatan

Tahun 2023- 2042

Sumber: RTRW Prov. Kalimantan Selatan. Tahun 2023-2042

Berdasarkan data tutupan lahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tahun 2022, diketahui bahwa tutupan lahan pada Provinsi Kalimantan Selatan didominasi oleh Perkebunan (830,367.064 Ha), disusul dengan Hutan Lahan Kering Sekunder (685,295.77Ha), Pertanian Lahan Kering Campur (557,113.17 Ha). Berdasarkan data tersebut terjadi perubahan jika dibandingkan dengan data tutupan lahan pada tahun 2020 dimana tutupan lahan Prov. Kalsel

di dominasi oleh Hutan Lahan Kering Sekunder (700,718.60 Ha), Pertanian Lahan Kering Campuran (586,262.71 Ha), Perkebunan (791,118.57 Ha) dan Sawah (381,030.06 Ha). Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan lahan yang awalnya berpotensi besar terhadap pengembangan produktivitas pertanian dan perkebunan di Provinsi Kalimantan Selatan sedikit bergeser menjadi perkebunan

Menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antarkeduanya, sedangkan daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalamnya.

Terdapat banyak pendekatan dalam menentukan daya dukung suatu wilayah. Beberapa konsep dalam pengukuran daya dukung lingkungan diantaranya adalah pendekatan Carrying Capacity Ratio (CCR), konsep daya dukung wilayah untuk permukiman (DDPm), daya dukung lingkungan untuk lahan pertanian, konsep daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung, daya dukung sumber daya lahan, daya dukung sumber daya air, dan sebagainya (Muta'ali, 2012).

Kapasitas sumber daya alam tergantung pada kemampuan, ketersediaan, dan kebutuhan akan lahan dan air, penentuan daya dukung lingkungan hidup dapat dilakukan berdasarkan pendekatan yang telah disebutkan di atas. Agar pemanfaatan ruang di suatu wilayah sesuai dengan kapasitas lingkungan hidup dan sumber daya, alokasi pemanfaatan ruang harus mengindahkan kemampuan lahan.

Konsep daya tampung lingkungan memiliki hubungan yang erat dengan pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Dalam menetapkan status pencemaran diperlukan baku mutu lingkungan hidup (KLHK, 2014). Baku mutu lingkungan hidup digunakan sebagai batas/kadar zat, energi atau komponen sebagai unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Dengan kata lain baku mutu lingkungan hidup sebagai ambang batas (threshold) terjadinya indikasi pencemaran lingkungan. Dalam UU PPLH diatur mengenai baku mutu lingkungan hidup yang terdiri atas baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu emisi, baku mutu gangguan dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.6.7.1 Daya Dukung Permukiman

Daya dukung lahan bangunan (pendekatan permukiman) dihitung untuk mengetahui daya dukung lahan untuk kawasan permukiman agar pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak huni dapat tercapai. Daya dukung lahan permukiman dihitung dengan formula yang menggunakan data luas lahan bangunan (permukiman), luas lahan infrastruktur (jalan, drainase, dll), koefisien lahan terbangun (terbagi menjadi perkotaan dan pedesaan), serta jumlah penduduk. Berdasarkan Pedoman Penentuan DDDTLH (KLHK, 2014), penentuan daya dukung permukiman

berdasarkan luas lahan permukiman terhadap jumlah penduduk dan koefisien luas kebutuhan ruang. Jika $DDP > 1$, mampu menampung penduduk untuk bermukim. $DDP = 1$, terjadi keseimbangan antara penduduk yang bermukim dengan luas wilayah yang ada dan $DDP < 1$, tidak mampu menampung penduduk untuk bermukim dalam wilayah tersebut.

Dari hasil analisis berdasarkan ketentuan di atas, menunjukkan bahwa secara keseluruhan daya dukung permukiman sebesar 1.6 atau dalam kategori mampu menampung penduduk untuk bermukim. Akan tetapi jika dilihat dari wilayah administrasi menunjukkan bahwa Kota Banjarmasin statusnya tidakseimbang/tidak mampu menampung karena nilai DDP sebesar 0.7. Hasil analisis ini memperlihatkan persebaran konsentrasi permukiman yang belum merata di Kalimantan Selatan atau masih terpusat di perkotaan Banjarmasin, sehingga perlu adanya pusat-pusat konsentrasi penduduk di wilayah lain agar pemenuhan tempat tinggal yang layak di Banjarmasin masih dapat terjaga. (Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026)

2.6.7.2 Daya Dukung Lahan Pertanian

Daya dukung lahan pertanian dihitung dengan maksud untuk mengetahui ketersediaan lahan yang ada pada saat ini dan kebutuhan akan lahan pertanian pada akhir tahun perencanaan di suatu wilayah, sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang. Hasil dari perhitungan analisis daya dukung lahan pertanian adalah untuk mengetahui apakah daya dukung lahan suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Kondisi daya dukung lahan yang defisit menunjukkan bahwa ketersediaan lahan sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan akan produksi pangan di wilayah tersebut sedangkan kondisi daya dukung lahan pertanian surplus menunjukkan bahwa ketersediaan lahan di suatu wilayah masih dapat mencukupi kebutuhan akan produksi pangan.

Jumlah produksi padi dan jumlah penduduk dengan mengacu data dari BPS Kabupaten/Kota (Kabupaten/Kota dalam Angka 2020), untuk konversi gabah kering giling ke beras sebesar 58.86% (Kalimantan Selatan dalam angka 2020). Konsumsi beras mulai tahun 2017 berdasarkan hasil prognosa terkait konsumsi beras oleh Kementerian Pertanian sebesar 124 kg/orang/tahun. Asumsi konsumsi beras ini akan dipergunakan untuk perhitungan indeks daya dukung lahan pertanian yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2019.

Daya dukung lahan pertanian secara keseluruhan di provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2019 adalah 2.86 atau surplus sebesar 936.428 ton. Dari surplus beras ini menunjukkan bahwa Kabupaten Banjar mampu bertahan atau memiliki stok selama 1.85 tahun. Akan tetapi

berdasarkan administrasi terdapat dua wilayah yang telah mengalami defisit yakni Kota Banjarmasin (-78.992 ton) dan Kota Banjarbaru (-25.954 ton). Rendahnya stok pangan di wilayah ini karena secara eksisting wilayah ini merupakan daerah perkotaan dengan jumlah penduduk yang cukup besar dibandingkan dengan luas pertaniannya (lahan sawah). Selain itu untuk Kabupaten Kotabaru juga menunjukkan surplus pangan hanya 6.558 ton.

Beberapa Kabupaten yang memiliki produksi/surplus pangan terbesar seperti Barito Kuala (150.762 ton). Hulu Sungai Tengah (131.098 ton) dan Hulu Sungai Selatan (116.477 ton).

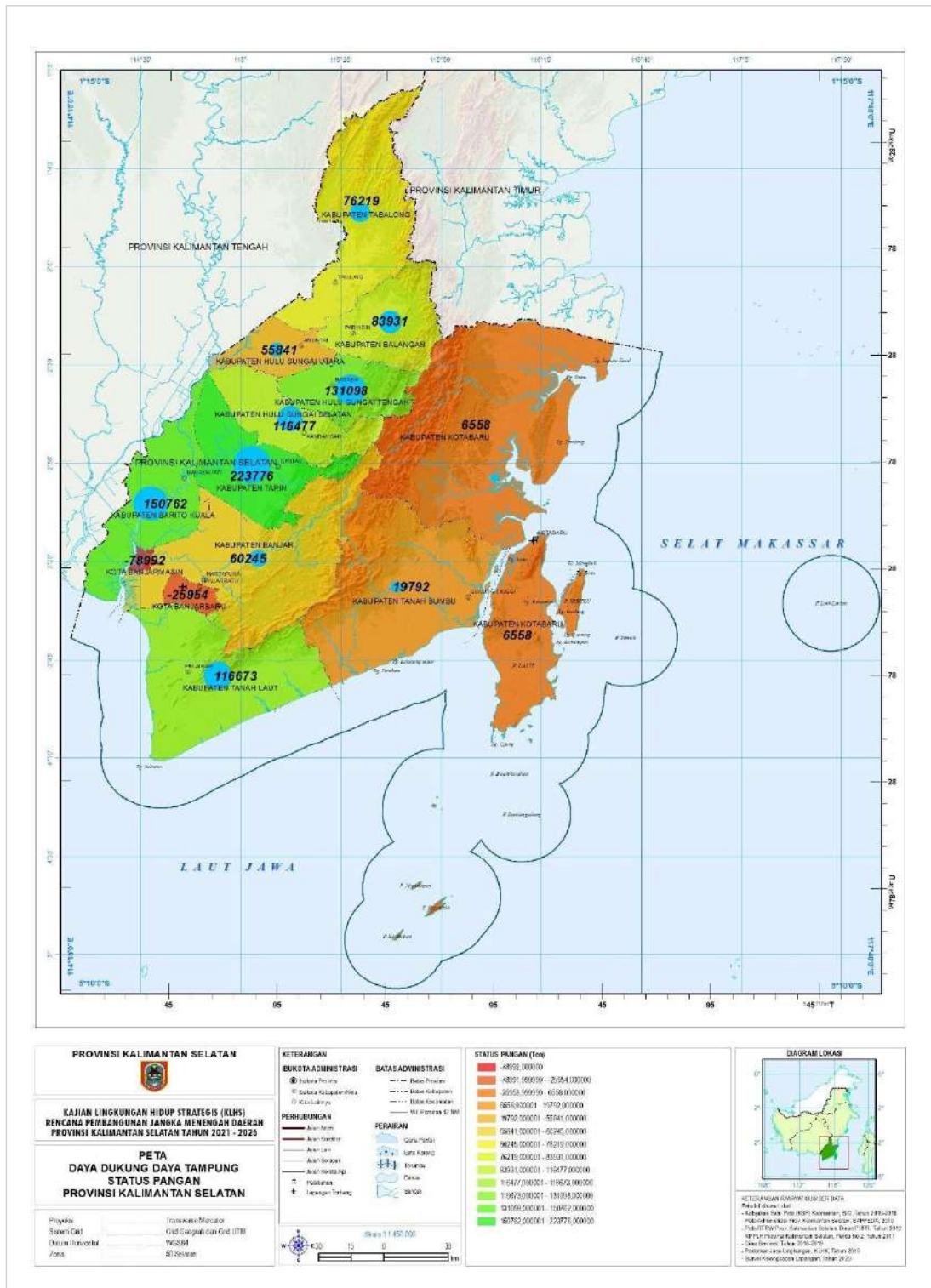
Tabel 2.160 Perhitungan Daya Dukung Lahan Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan sd Tahun 2023

KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PRODUKSI PADI (TON GKG)	KONVERSI GABAH KERING GILING/GKG KE BERAS	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	ANGKA KONSUMSI BERAS(KG/ PERKAPITA /PERTAHUN)	JUMLAH BERAS DI KONSUMSI (TON)	DDL (DAYA DUKUNG LAHAN UNTUK PANGAN)	SURPLUS BERAS (TON)
Balangan	16.068	9.507	136.524	98.26	13.146	1.22	(3.639)
Banjar	114.278	67.616	580.100	92.94	53.008	2.16	14.608
Banjarbaru	1.350	799	272.763	99.23	31.725	0.04	(30.926)
Banjarmasin	4.687	2.773	678.243	105.77	24.846	0.19	(22.073)
Barito Kuala	188.250	111.383	324.502	107.28	28.430	6.62	82.953
Hulu Sungai Selatan	85.828	50.783	237.319	104.34	24.356	3.52	26.427
Hulu Sungai Tengah	108.485	64.188	268.360	83.97	22.528	4.82	41.660
Hulu Sungai Utara	80.975	47.911	235.785	90.37	60.865	1.33	(12.954)
Kotabaru	16.759	9.916	329.641	83.99	27.434	0.61	(17.518)
Tabalong	59.184	35.018	262.631	90.7	23.448	2.52	11.570
Tanah Bumbu	39.071	23.118	346.336	82.66	28.198	1.39	(5.080)
Tanah Laut	52.839	31.264	364.117	93.61	33.521	1.58	(2.257)
Tapin	107.771	63.766	197.893	102.36	19.945	5.40	43.821
KALIMANTAN SELATAN	875.546	518.041	4.234.214	93.40	390.288	2.24	127.753

Sumber: Hasil Analisis (2024)

Dalam upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam hal ini OPD terkait harus menyediakan dan meningkatkan produksi dan produktifitas pertanian diantaranya melalui optimalisasi lahan. serta mengurangi alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian. Saat ini 13 Kabupaten/Kota sudah memiliki LP2B baik PERDA LP2Bnya maupun melalui Keputusan Bupati/Walikota. Ini juga bisa menjadi konsentrasi perencanaan dalam perencanaan tata ruang maupun penyusunan RKPD untuk tetap mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan. dengan cara

optimalisasi lahan dan mengurangi alih fungsi lahan pertanian serta meningkatkan produktivitas sawah yang sudah ada berdasarkan hasil daya dukung ini.



Gambar 2.45 Peta Status Pangan Provinsi Kalimantan Selatan s.d Data Terakhir Tahun 2021

2.6.7.3 Daya Dukung Air

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang, perhitungan daya dukung air bertujuan untuk mengetahui secara umum apakah sumber daya air di suatu wilayah dalam keadaan surplus atau defisit. Hasil perhitungan daya dukung air dapat dijadikan bahan masukan/pertimbangan dalam penyusunan RKPD atau revisi rencana tata ruang dan evaluasi pemanfaatan ruang dalam rangka penyediaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Daya dukung air ditinjau dari ketersediaan air (water supply) dan kebutuhan air (water demand) terdapat perhitungan melalui ketersediaan air dengan pendekatan limpasan air dan kebutuhan air dari total kebutuhan air domestik dan non domestik.

Status daya dukung air diperoleh dari perbandingan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) (Permen LH No. 17/2009).

- Bila $SA > DA$. daya dukung air dinyatakan surplus.
- Bila $SA < DA$. daya dukung air dinyatakan defisit atau terlampaui.

Sedangkan menurut Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono. M.Sc (2016). membagi menjadi:

- $DDA < 1$: Daya dukung air terlampaui atau buruk
- $DDA 1-3$: Daya dukung air bersyarat atau sedang
- $DDA > 3$: Daya dukung air aman atau baik

Jika mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 tentang Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional untuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan masih dominan belum terlampaui yakni sebesar 3.316.423.81 Ha atau 88.73% dibandingkan yang terlampaui hanya sebesar 421.277.86 Ha atau 11.27%. sebagaimana disajikan tabel 2.160.

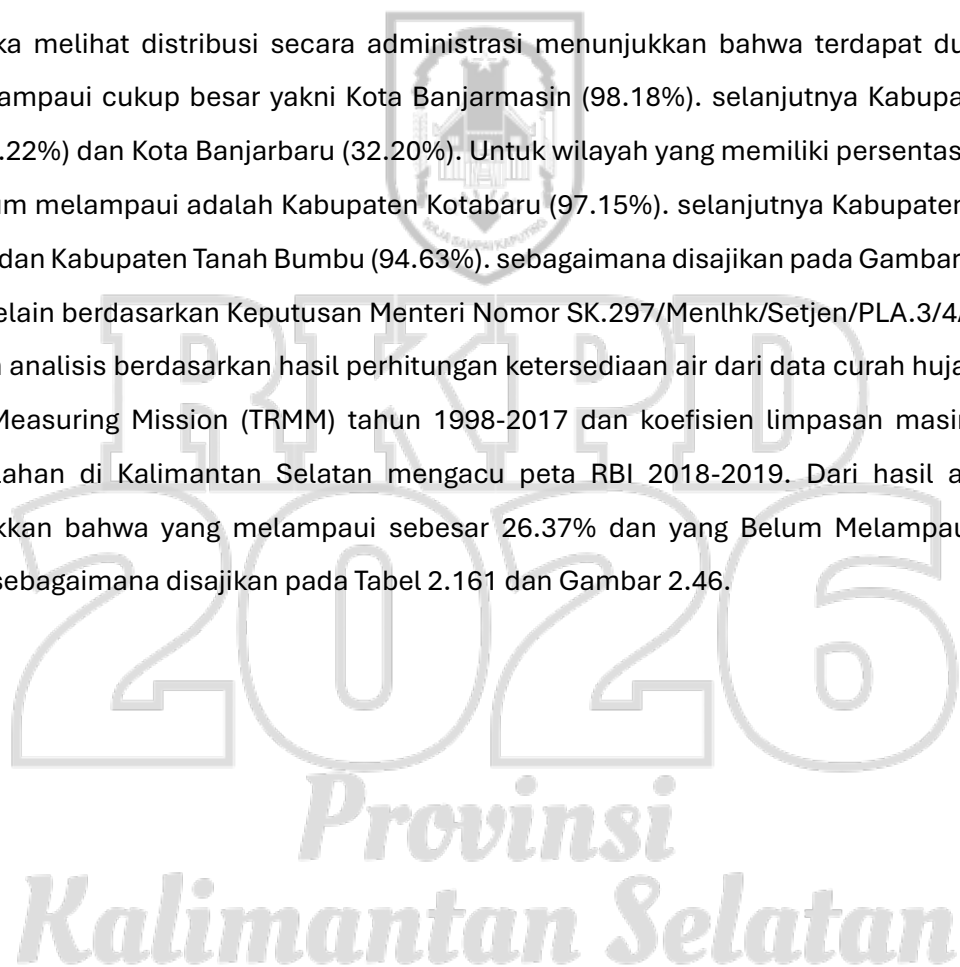
Tabel 2.161 Hasil Analisis Daya Dukung Dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Kepmen LHK

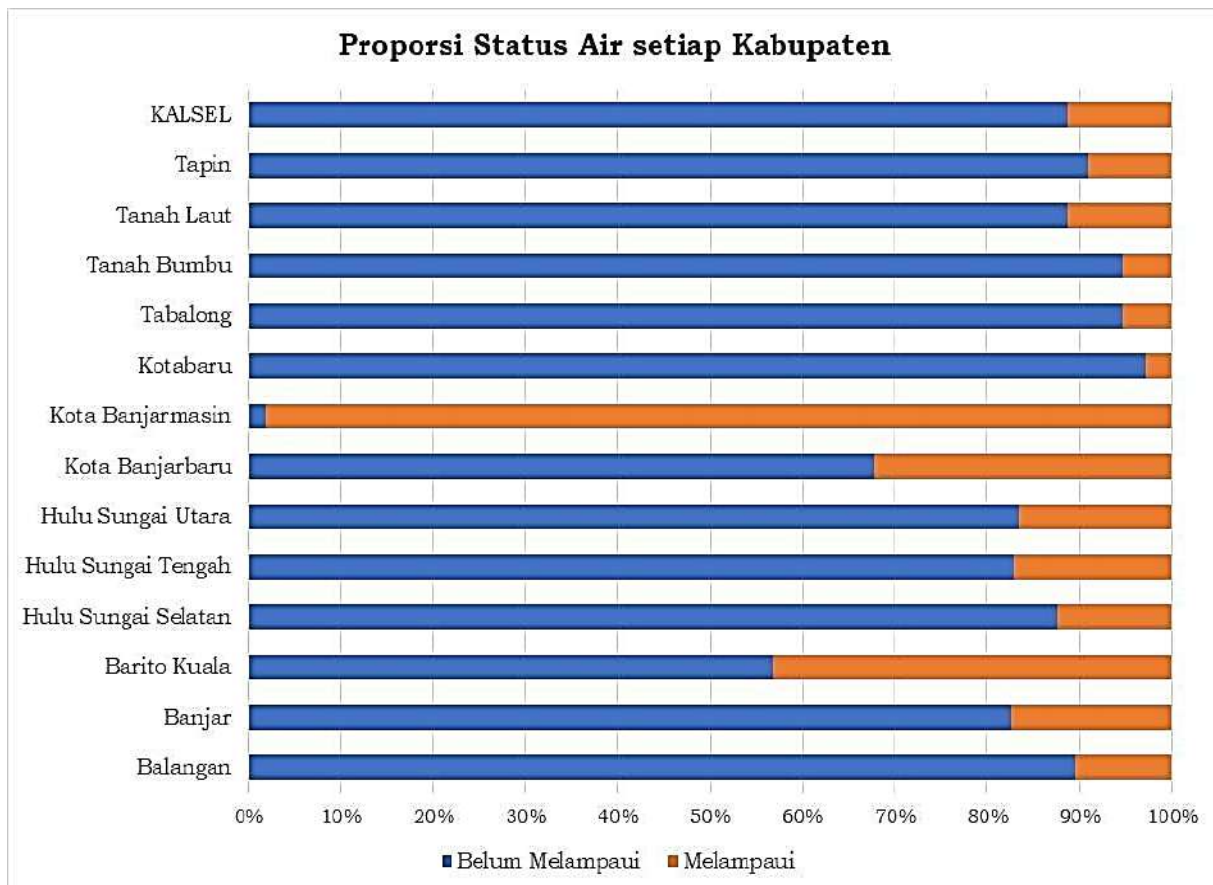
KABUPATEN/KOTA	STATUS AIR (HA)	
	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI
Balangan	170.402.98	19.768.37
Banjar	387.831.60	81.757.61
Barito Kuala	131.316.56	99.944.77
Hulu Sungai Selatan	148.814.78	21.047.17
Hulu Sungai Tengah	138.878.15	28.592.42
Hulu Sungai Utara	77.445.08	15.320.22
Kota Banjarbaru	22.004.96	10.449.64
Kota Banjarmasin	171.93	9.270.02

KABUPATEN/KOTA	STATUS AIR (HA)	
	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI
Kotabaru	896.465.56	26.324.66
Tabalong	350.399.74	19.762.32
Tanah Bumbu	450.442.59	25.546.36
Tanah Laut	342.468.64	43.630.44
Tapin	199.781.25	19.863.86
KALSEL	3.316.423.81	421.277.86
PERSENTASE (%)	88.73	11.27

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (98.18%). selanjutnya Kabupaten Barito Kuala (43.22%) dan Kota Banjarbaru (32.20%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belum melampaui adalah Kabupaten Kotabaru (97.15%). selanjutnya Kabupaten Tabalong (94.66%) dan Kabupaten Tanah Bumbu (94.63%). sebagaimana disajikan pada Gambar di Bawah.

Selain berdasarkan Keputusan Menteri Nomor SK.297/Menlhk/Setjen/PLA.3/4/2019 juga dilakukan analisis berdasarkan hasil perhitungan ketersediaan air dari data curah hujan Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM) tahun 1998-2017 dan koefisien limpasan masing-masing tutupan lahan di Kalimantan Selatan mengacu peta RBI 2018-2019. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa yang melampaui sebesar 26.37% dan yang Belum Melampaui sebesar 73.67%. sebagaimana disajikan pada Tabel 2.161 dan Gambar 2.46.





Gambar 2.46 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Kepmen LHK 2019 Secara Administrasi

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026

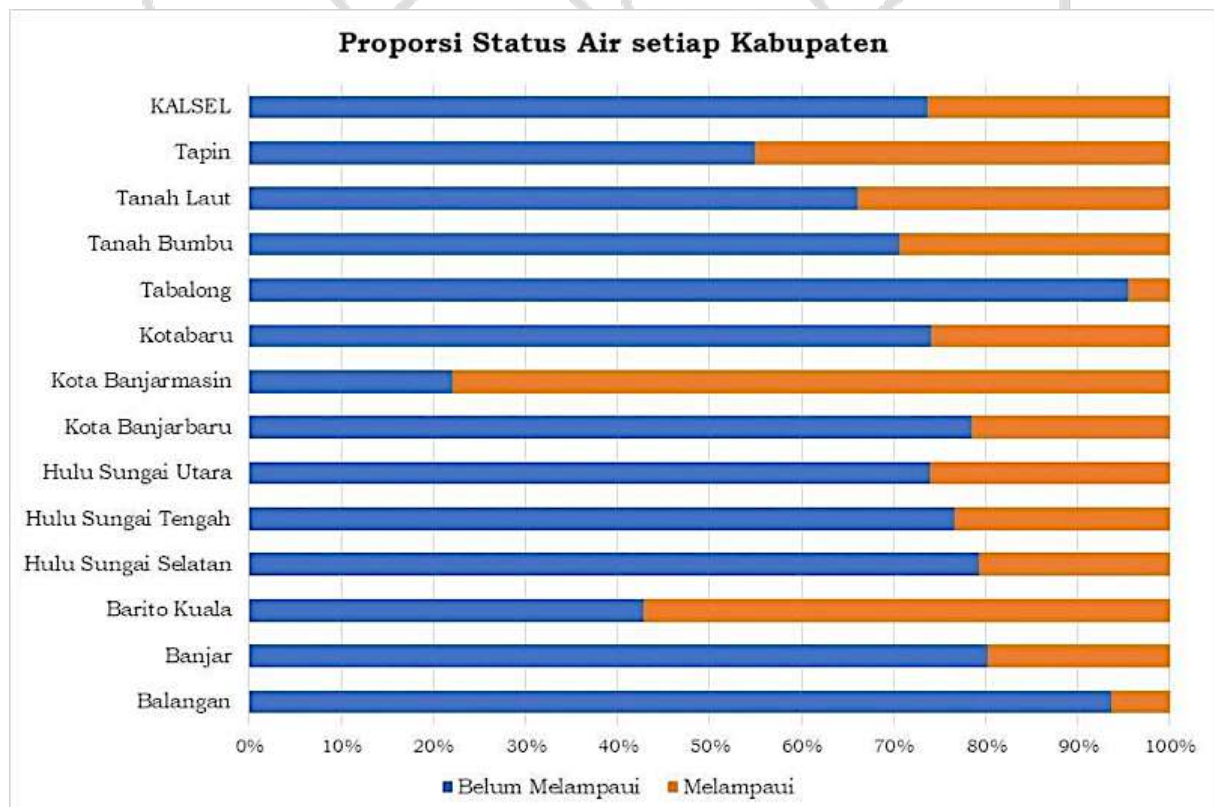
Tabel 2.162 Hasil Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Air Setiap Kabupaten/Kota Berdasarkan Analisis

KABUPATEN/KOTA	STATUS AIR (HA)	
	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI
Balangan	171.132.47	11.706.31
Banjar	367.262.34	90.692.07
Barito Kuala	108.218.73	144.510.57
Hulu Sungai Selatan	136.706.67	35.634.33
Hulu Sungai Tengah	111.604.87	34.027.10
Hulu Sungai Utara	68.305.81	24.045.24
Kota Banjarbaru	25.828.65	7.095.60
Kota Banjarmasin	2.176.57	7.671.06

KABUPATEN/KOTA	STATUS AIR (HA)	
	BELUM MELAMPAUI	MELAMPAUI
Kotabaru	703.900.93	246.401.37
Tabalong	331.881.88	15.852.60
Tanah Bumbu	343.142.10	142.368.38
Tanah Laut	251.420.34	129.175.79
Tapin	118.979.71	97.637.31
KALSEL	2.744.452.71	982.926.09
PERSENTASE (%)	73.67	26.37

Sumber: Hasil Analisis 2020.

Jika melihat distribusi secara administrasi menunjukkan bahwa terdapat dua wilayah yang melampaui cukup besar yakni Kota Banjarmasin (77.90%). selanjutnya Kabupaten Barito Kuala(57.18%) dan Kabupaten Tapin (45.07%). Untuk wilayah yang memiliki persentase terbesar yang belummelampaui adalah Kabupaten Tabalong (95.44%). selanjutnya Kabupaten Balangan (93.60%) dan Kabupaten Banjar (80.20%). sebagaimana disajikan pada Gambar 2.47.



Gambar 2.47 Proporsi Daya Dukung dan Daya Tampung Air Berdasarkan Hasil Analisis Secara Batas Administrasi Kabupaten

Untuk mengetahui tingkat ketersediaan dan kebutuhan berdasarkan volume air, maka hasil tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi dan grafik. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa ketersediaan air di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 57.054.478.190 m³/tahun. Kebutuhan air total sebesar 21.850.342.888 m³/tahun yang terdiri atas domestik sebesar 118.831.356 m³/tahun dan 21.731.511.531 m³/tahun, sehingga diperoleh selisih 35.204.135.302 m³/tahun.

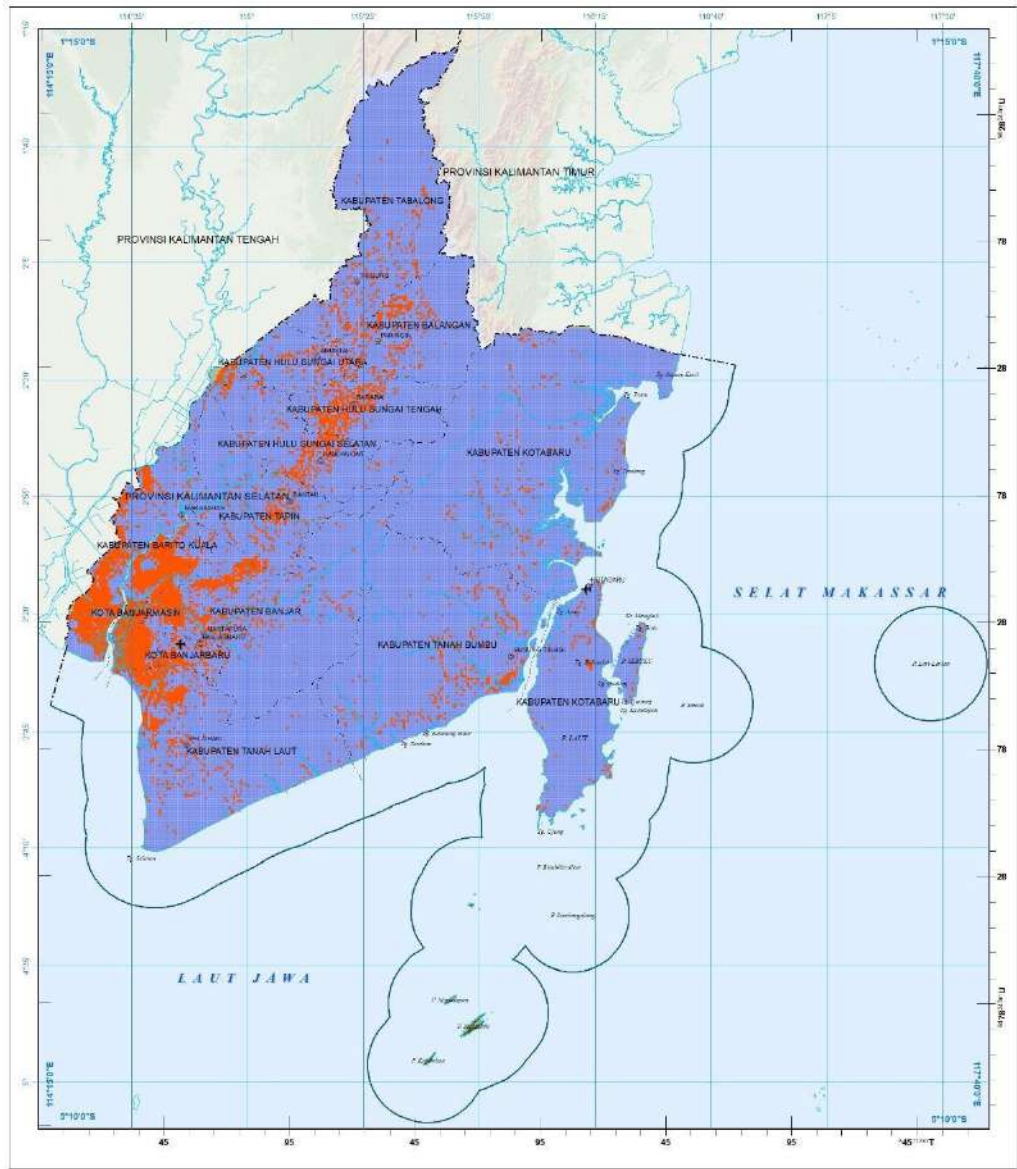
Dengan membandingkan antara ketersediaan air (SA) dan kebutuhan air (DA) menunjukkan bahwa masih dalam posisi surplus, akan tetapi jika mengacu pendapat Dr. Ing. Ir. Widodo Brontowiyono, M.Sc (2016), menunjukkan bahwa status air di Kalimantan Selatan hanya sebesar 2.61 atau berada pada interval DDA 1-3 atau termasuk daya dukung air bersyarat atau sedang.

Secara administrasi 3 wilayah yang telah melewati daya dukung atau status defisit Kabupaten Barito Kuala (-2.032.973.657 m³/tahun), Kabupaten Tapin (- 452.872.271 m³/tahun) dan Kota Banjarmasin (-16.497.858 m³/tahun), sebagaimana disajikan pada Tabel 3.37. Dari tabel tersebut juga, menunjukkan bahwa terdapat 6 kabupaten/kota dalam kategori bersyarat atau sedang dan 4 kabupaten dalam kategori aman atau baik. Jika dikaitkan dengan kejadian bencana banjir tahun 2021 di DAS Barito dimana limpasan air sangat tinggi dan tidak dapat dimanfaatkan, maka kedepan perlu penambahan area resapan untuk me-recharge (mengisi kembali) air tanah dangkal dan penyediaan infrastuktur air untuk menampung limpasan air dan dimanfaatkan sebagai sumber air baku baru sekaligus mengurangi risiko bencana banjir. Hal tersebut dapat dilihat terutama pada beberapa kabupaten (tujuh kabupaten/kota) yang berada di bagian tengah dan hilir DAS Barito yang memiliki status daya dukung air bersyarat dan terlampaui.

Tabel 2.163 Perhitungan Daya Dukung Air Berdasarkan Batas Administrasi Kabupaten s.d Analisis Terakhir Tahun 2020

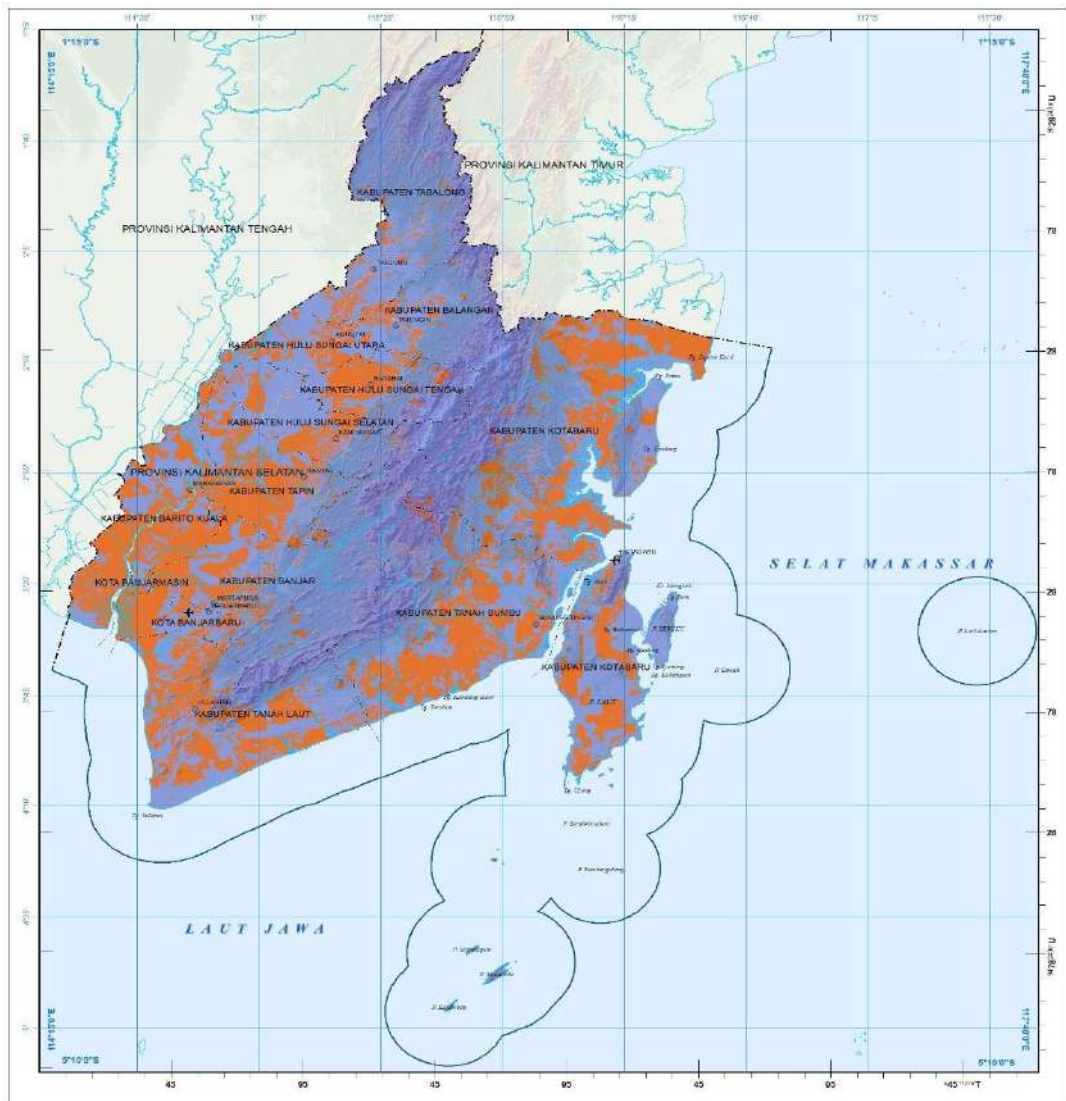
KABUPATEN/KOTA	KETERSEDIAAN AIR (M3/TAHUN)	KEBUTUHAN AIR (M3/TAHUN)		TOTAL	SELISIH (M3/TAHUN)	DDA	STATUS
		DOMESTIK	NON DOMESTIK				
Balangan	2.488.622.632	3.832.033	201.110.663	204.942.696	2.283.679.936	12.14	Aman atau Baik
Banjar	6.403.353.583	16.067.709	2.618.607.329	2.634.675.038	3.768.678.545	2.43	Bersyarat atau Sedang
Banjarbaru	267.034.708	6.933.394	122.034.057	128.967.451	138.067.257	2.07	Bersyarat atau Sedang
Banjarmasin	62.984.689	19.564.438	59.918.108	79.482.546	-16.497.858	0.79	Terlampau atau Buruk
Barito Kuala	2.254.090.692	9.156.974	4.277.907.375	4.287.064.349	-2.032.973.657	0.53	Terlampau atau Buruk
Hulu Sungai Selatan	1.838.948.146	6.940.898	812.337.904	819.278.803	1.019.669.343	2.24	Bersyarat atau Sedang
Hulu Sungai Tengah	2.321.514.402	7.954.635	408.652.369	416.607.004	1.904.907.398	5.57	Aman atau Baik
Hulu Sungai Utara	781.135.157	6.727.972	443.209.116	449.937.088	331.198.069	1.74	Bersyarat atau Sedang
Kotabaru	24.281.980.291	9.460.771	4.793.274.889	4.802.735.660	19.479.244.631	5.06	Aman atau Baik
Tabalong	4.608.696.906	7.117.880	440.811.834	447.929.713	4.160.767.192	10.29	Aman atau Baik
Tanah Bumbu	6.118.251.680	9.357.198	2.671.111.647	2.680.468.845	3.437.782.835	2.28	Bersyarat atau Sedang
Tanah Laut	3.904.895.902	10.220.204	2.712.191.816	2.722.412.020	1.182.483.882	1.43	Bersyarat atau Sedang
Tapin	1.722.969.404	5.497.250	2.170.344.425	2.175.841.675	-452.872.271	0.79	Terlampau atau Buruk
KALSEL	57.054.478.190	118.831.356	21.731.511.531	21.850.342.888	35.204.135.302	2.61	Bersyarat atau Sedang

Sumber: Hasil Analisis 2020 KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026.



Gambar 2.48 Peta Status Air Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026



Gambar 2.49 Status Air Analisis Provinsi Kalimantan Selatan

Sumber: KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021 – 2026

2.7 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

2.7.2 Evaluasi Realisasi RKPD Tahun 2023

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD serta kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator-indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen pendukung dalam pengambilan kebijakan bagi semua stakeholder.

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan. Dokumen ini akan memberi gambaran mengenai efektifitas pelaksanaan perencanaan hingga tahap pelaksanaan yang pada akhirnya memberi nilai strategis bagi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan usulan kegiatan dari masyarakat.

Hasil evaluasi dan pengendalian RKPD untuk Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh bahwa total 49 SKPD eselon II lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selaku pengelola anggaran berkewajiban untuk memasukkan laporan capaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Kerja SKPD dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2024.

Total anggaran Belanja Seluruh SKPD di Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 adalah sebesar Rp. 13.353.718.273.489.00 sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Semester II Tahun 2023 sebesar 85.32% atau Rp 11.154.450.062.626.00 dan untuk realisasi fisik sebesar 92.78%.

Dalam mengukur pencapaian hasil rencana kerja SKPD, dilakukan evaluasi hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan 4 Tahun 2023 mempedomani Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Selengkapnya jumlah SKPD dengan kriteria kinerja dan anggaran dapat dilihat pada Tabel 2.163

Tabel 2.164 Rekapitulasi Hasil Realisasi Keuangan dan Fisik RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Semester II Tahun 2024

NO	NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN SKPD
1	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.813.966.143.490	1.638.239.529.959	90.31	98.81	175.726.613.531
2	BALAI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN	29.854.044.896	26.448.450.847	88.59	91.69	3.405.594.049
3	TAMAN BUDAYA	5.709.222.396	5.210.628.719	91.27	100	498.593.677
4	MUSEUM LAMBUNG MANGKURAT	6.299.256.449	5.871.884.054	93.22	99.95	427.372.395
5	PUSAT LAYANAN DISABILITAS DAN PENDIDIKAN INKLUSI	5.420.206.813	4.189.333.006	77.29	93.95	1.230.873.807
6	DINAS KESEHATAN	126.706.889.957	113.672.615.482	89.71	99.89	13.034.274.475
7	BALAI PELATIHAN KESEHATAN	7.596.424.310	6.403.470.657	84.30	97.69	1.192.953.653
8	LABORATORIUM KESEHATAN	28.547.736.968	24.229.288.443	84.87	85.52	4.318.448.525
9	BALAI KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT	5.564.336.084	4.023.431.817	72.31	85.76	1.540.904.267
10	INSTALASI FARMASI	6.326.586.500	5.286.423.525	83.56	100.00	1.040.162.975
11	UPTD UNIT PELAYANAN KRISIS DAN EPEDEMI KESEHATAN	7.547.557.720	6.582.677.962	87.22	99.93	964.879.758
12	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ULIN BANJARMASIN	276.960.487.430	229.695.381.408	82.93	100.00	47.265.106.022
13	BLUD RSUD ULIN	492.737.062.215	486.044.707.130.00	98.64	99.00	6.692.355.085
14	RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM	80.157.017.322	69.060.487.252	86.16	99.36	11.096.530.070
15	BLUD RSJ SAMBANG LIHUM	31.037.920.575	28.456.950.333	91.68	100.00	2.580.970.242
16	RUMAH SAKIT UMUM DR. H. MOCH ANSARI SALEH	131.369.560.165	126.491.810.642	96.29	99.38	4.877.749.523
17	BLUD RS ANSARI SALEH	275.730.428.626	151.123.586.381	54.81	100.00	124.606.842.245
18	RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT GUSTI HASAN AMAN	44.876.391.350	32.314.640.772	72.01	97.66	12.561.750.578
19	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3.539.399.885.592	2.507.473.728.797	70.84	70.92	1.031.926.156.795
20	LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	20.482.823.939.00	12.093.153.213	59.04	61.40	8.389.670.726
21	BLUD BALAI PENGELOLAAN AIR MINUM BANJARBAKULA	28.987.444.656	27.822.264.263	95.98	97.78	1.165.180.393
22	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	108.446.286.950	67.693.083.551.00	62.42	99.99	40.753.203.399
23	BADAN PENANGGULANAN BENCANA DAERAH	28.262.408.956	22.334.638.655	79.03	99.29	5.927.770.301

NO	NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN SKPD
24	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	41.157.502.185	39.102.964.370	95.01	100	2.054.537.815
25	DINAS SOSIAL	83.358.172.532	71.682.458.198	85.99	98.02	11.675.714.334
26	PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS NETRA DAN FISIK FAJAR HARAPAN	7.707.249.822	7.081.038.276	91.88	100	626.211.546
27	PANTI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS ISKAYA BANARAN	4.809.651.737	4.457.118.255	92.67	99.96	352.533.482
28	PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL ANAK DAN REMAJA MULIA SATRIA	15.586.196.041	14.761.922.533	94.71	99.69	824.273.508
29	PANTI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL BARAKAT CANGKAL BACARI	10.554.115.860	9.213.302.722	87.30	99.91	1.340.813.138
30	PANTI PERLINDUNGAN DAN REHABILITASI SOSIAL LANJUT USIA BUDI SEJAHTERA	10.574.350.700	9.903.985.465	93.66	100	670.365.235
31	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	48.783.857.606	43.956.572.154	90.10	100	4.827.285.452
32	LABORATORIUM KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA	8.704.465.300	7.897.305.669	90.73	90.85	807.159.631
33	BALAI LATIHAN KERJA	7.910.464.810	6.928.204.955	87.58	100	982.259.855
34	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH I	429.000.000	418.275.628	97.50	100	10.724.372
35	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH II	836.652.100	730.074.836	87.26	100	106.577.264
36	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH III	1.143.127.700	1.101.476.101	96.36	100	41.651.599
37	BALAI PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAERAH WILAYAH IV	499.957.300	487.428.660	97.49	99.98	12.528.640
38	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA	20.403.001.946	19.004.500.537	93.15	99.69	1.398.501.409
39	UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	2.142.247.520	1.771.987.422	82.72	97.13	370.260.098
40	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	33.002.631.469	31.579.804.179	95.69	100	1.422.827.290
41	UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN	3.069.611.065	2.826.179.258	92.07	95.49	243.431.807
42	UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH REGIONAL BANJARBAKULA	6.767.345.642	6.287.009.404	92.90	99.03	480.336.238
43	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	11.363.996.226	9.464.723.673	83.29	100	1.899.272.553

NO	NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN SKPD
44	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	256.049.981.630	251.808.328.494.00	98.34	100	4.241.653.136
45	DINAS PERHUBUNGAN	244.157.956.754	194.511.197.560	79.67	99.80	49.646.759.194
46	UPTD TERMINAL TYPE B	3.766.000.000	3.574.485.209	94.91	99.93	191.514.791
47	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	59.033.286.153	54.353.199.003	92.07	98.24	4.680.087.150
48	DINAS KOPERASI. USAHA KECIL DAN MENENGAH	19.773.321.902	18.163.381.559	91.86	99.82	1.609.940.343
49	BALAI PELATIHAN KOPERASI DAN USAHA KECIL	7.882.383.000	6.790.320.187	86.15	100	1.092.062.813
50	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	23.248.976.987	20.422.088.166	87.84	100	2.826.888.821
51	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA	239.661.633.578	207.336.542.778	86.51	96.95	32.325.090.800
52	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	35.261.208.448	31.594.792.973	89.60	99.20	3.666.415.475
53	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	70.861.757.842	64.058.851.013	90.40	90.44	6.802.906.829
54	BALAI PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN	3.243.948.390	3.012.829.642	92.88	100	231.118.748
55	PERIKANAN BUDIDAYA DAN KESEHATAN LINGKUNGAN	4.516.407.550	4.143.486.976	91.74	100	372.920.574
56	PELABUHAN PERIKANAN BANJARMASIN	5.930.120.000	5.536.504.843	93.36	100	393.615.157
57	PELABUHAN PERIKANAN MUARA KINTAP	4.448.622.347	3.976.754.695	89.39	100	471.867.652
58	PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT KOTABARU	3.049.607.000	2.717.652.910	89.11	92.78	331.954.090
59	PELABUHAN PERIKANAN KOTABARU	1.470.735.000	1.433.021.312	97.44	100	37.713.688
60	PELABUHAN PERIKANAN BATULICIN	6.023.308.249	5.568.286.867	92.45	99.56	455.021.382
61	DINAS PARIWISATA	50.824.961.400	47.341.938.203	93.15	98.74	3.483.023.197
62	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	163.325.892.433	148.419.926.522	90.87	99.94	14.905.965.911
63	BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.718.606.005	3.519.389.289	94.64	100	199.216.716
64	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA	5.316.734.158	4.969.456.265	93.47	100	347.277.893
65	BALAI BENIH TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	6.088.814.100	5.214.539.426	85.64	92.14	874.274.674
66	BALAI PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	3.527.240.490	3.367.233.719	95.46	100	160.006.771
67	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN	55.961.281.482	42.702.274.323	76.31	91.98	13.259.007.159

NO	NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN SKPD
68	BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN	2.232.603.663	1.541.361.816	69.04	100	691.241.847
69	BALAI INSEMINASI BUATAN	3.680.986.969	3.209.047.402	87.18	100	471.939.567
70	DINAS KEHUTANAN	77.872.431.184	75.375.835.447	96.79	100	2.496.595.737
71	TAMAN HUTAN RAYA SULTAN ADAM	17.249.169.400	16.528.075.671	95.82	100	721.093.729
72	BALAI PERBENIHAN TANAMAN HUTAN	3.200.000.000	2.916.152.192	91.13	100	283.847.808
73	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KAYU TANGI	1.911.661.660	1.723.869.606.00	90.18	100	187.792.054
74	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN CANTUNG	1.880.389.750	1.817.199.308	96.64	100	63.190.442
75	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PULAU LAUT SEBUKU	1.879.897.500	1.808.662.941	96.21	100	71.234.559
76	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TABALONG	1.878.514.670	1.701.992.247	90.60	100	176.522.423
77	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN KUSAN	1.980.449.708	1.952.412.437	98.58	100	28.037.271
78	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN TANAH LAUT	1.930.451.000	1.785.606.601	92.50	100	144.844.399
79	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN BALANGAN	1.730.500.000	1.621.684.641	93.71	100	108.815.359
80	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN HULU SUNGAI	3.187.519.050	3.037.428.522	95.29	100	150.090.528
81	KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN SENGAYAM	1.880.050.000	1.849.600.483	98.38	100	30.449.517
82	DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	32.532.598.700	28.632.809.174	88.01	99.09	3.899.789.526
83	LABORATORIUM ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.741.787.473	1.640.002.040	94.16	100	101.785.433
84	DINAS PERDAGANGAN	17.961.610.900	16.692.127.727	92.93	96.65	1.269.483.173
85	BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG	2.039.463.303	1.910.333.323	93.67	100	129.129.980
86	DINAS PERINDUSTRIAN	23.381.365.302	18.306.968.037	78.30	97.00	5.074.397.265
87	BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI KAYU DAN LOGAM	1.676.435.060	1.577.135.511	94.08	100	99.299.549
88	SEKRETARIAT DAERAH	205.155.660.147	160.655.805.377	78.31	79.93	44.499.854.770
89	BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	5.541.686.100	4.828.537.658	87.13	90.42	713.148.442
90	BIRO HUKUM	7.471.247.900	5.455.079.647	73.01	99.19	2.016.168.253

NO	NAMA SKPD	PAGU ANGGARAN	REALISASI KEUANGAN	REALISASI KEUANGAN (%)	REALISASI FISIK (%)	SISA ANGGARAN SKPD
91	BIRO ORGANISASI	7.378.114.600	6.767.252.297	91.72	100	610.862.303
92	BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	9.667.568.300	7.926.925.173	82.00	94.95	1.740.643.127
93	BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	151.440.973.000	132.816.769.966	87.70	95.86	18.624.203.034
94	BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN	27.025.310.804	21.196.345.753	78.43	99.10	5.828.965.051
95	BIRO UMUM	66.696.842.900	51.512.306.186	77.23	88.48	15.184.536.714
96	BIRO PENGADAAN BARANG DAN JASA	8.262.197.100	7.046.695.439	85.29	100	1.215.501.661
97	BIRO PEREKONOMIAN	8.205.564.700	4.593.754.897	55.98	70.90	3.611.809.803
98	SEKRETARIAT DPRD	324.163.047.765	271.768.106.720	83.84	95.88	52.394.941.045
99	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	39.859.349.922	36.582.838.517	91.78	100	3.276.511.405
100	BADAN PENDAPATAN DAERAH	262.743.523.447	229.920.607.629	87.51	87.51	32.822.915.818
101	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	2.823.533.316.486	2.543.728.683.176	90.09	100	279.804.633.310
102	UPPD BANJARBARU	5.389.253.001	4.699.145.543	87.19	91.26	690.107.458
103	UPPD PELAIHARI	5.666.182.950	5.051.138.791	89.15	100	615.044.159
104	UPPD KOTABARU	4.192.067.153	3.757.460.784	89.63	95.02	434.606.369
105	UPPD MARTAPURA	5.817.211.060	5.480.493.423	94.21	94.30	336.717.637
106	UPPD MARABAHAN	4.451.079.848	4.132.866.943	92.85	96.86	318.212.905
107	UPPD RANTAU	4.667.047.492	4.346.294.592	93.13	100	320.752.900
108	UPPD KANDANGAN	4.836.677.068	4.261.822.717	88.11	97.51	574.854.351
109	UPPD BARABAI	4.387.651.295	4.206.286.155	95.87	97.43	181.365.140
110	UPPD AMUNTAI	5.492.241.046	5.244.885.603	95.50	98.56	247.355.443
111	UPPD TANJUNG	4.496.345.500	4.214.500.262	93.73	100	281.845.238
112	UPPD BATULICIN	4.800.779.070	4.167.602.609	86.81	94.52	633.176.461
113	UPPD PARINGIN	5.561.047.400	5.442.417.586	97.87	100	118.629.814
114	UPPD BANJARMASIN I	6.407.713.579	6.200.451.629	96.77	100	207.261.950
115	UPPD BANJARMASIN II	7.969.304.560	7.441.499.902	93.38	100	527.804.658
116	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	34.151.651.473	29.465.631.913	86.28	98.00	4.686.019.560
117	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	63.791.721.084	56.131.450.368	87.99	99.59	7.660.270.716
118	BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH	19.359.380.722	17.227.951.465	88.99	100	2.131.429.257
119	KEBUN RAYA BANUA	10.043.507.232	8.089.067.180	80.54	86.89	1.954.440.052
120	BADAN PENGHUBUNG	13.428.709.669	12.646.500.236	94.18	100	782.209.433
121	INSPEKTORAT DAERAH	40.778.760.783	32.339.857.273	79.31	98.22	8.438.903.510
122	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	216.850.761.050	203.300.745.082	93.75	99.76	13.550.015.968

Sumber : Emonev Bappeda Kalsel. Tahun 2023

Tabel 2.165 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI						
Pertumbuhan Ekonomi	%	4.6-5.0	5.23	100	Tercapai	
Laju Inflasi	%	2.0-4.0	1.95	100		
PDRB Perkapita ADHB	(Juta Rupiah/Org)					
PDRB Perkapita ADHK	(Juta Rupiah/Org)					
Indeks Gini	Indeks	0.324	0.298	100	Tercapai	
Tingkat Kemiskinan	%	4.40-4.22	4.02	100	Tercapai	
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	72.65	75.19	100	Tercapai	
Harapan Lama Sekolah	Tahun					
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,05	4,2	96,43	Tidak Tercapai	
APK Sekolah Menengah sederajat dan Pendidikan Khusus	%	95.12%	99.17%	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
APM Sekolah Menengah Atas sederajat dan Pendidikan Khusus	%	67.24	67.43%	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Guru Pendidikan SMA/SMK/Diksus yang profesional	%	76.92	66.47%	86,41	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase lulusan SMK yang bekerja	%	31.02	38.17%	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Peserta Didik Pendidikan Khusus yang mandiri	%	46.81	65.83%	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Peserta Didik SMA yang melanjutkan ke Perguruan Tinggi	%	61.20	43.57%	71,19	Tidak tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Angka Kematian Ibu (AKI)	per 100.000 KH	110	146	75,34	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Angka Kematian Bayi (AKB)	per 1.000 KH	7	11	63,63	Tidak Tercapai	Dinas Kesehatan
Prevalensi Stunting	%	24	9.4%	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Angka Kesakitan	%	12	5,41%	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase Fasyankes dengan SDM Sesuai Standar	%	60.34	85.54%	100	Tercapai	Dinas Kesehatan

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase Faskes dengan tatakelola Farmalkes sesuai Standar	%	80	94%	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase Penerapan Cluster Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di kabupaten/kota	%	84.62	92%	100	Tercapai	Dinas Kesehatan
Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	%	54.83	54.83%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	%	28.84	28.84%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Pengendali Daya Rusak Air dalam Kondisi Baik	%	37.58	37.58%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Cakupan Pelayanan Air Minum yang Layak	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Cakupan Pelayanan Persampahan	%	52.27	52.27%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Cakupan Pelayanan Air Limbah yang Layak	%	97	97%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Luas Genangan yang Tertangani	%	15.9	16%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentase sarana dan prasarana Bangunan Gedung dalam kondisi baik	%	100	82.48%	82,48	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Persentase sarana dan prasarana Bangunan dan Lingkungannya dalam kondisi baik	%	100	43.23%	43,23	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Tingkat Aksesibilitas Jalan	%	51.75	51.78%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Tingkat Kemantapan Jalan	%	82	82.91%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Meningkatnya Kualitas SDM Jasa Konstruksi yang Kompeten dan Bersertifikat	%	53	92.30%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Pemda di Provinsi yang Menginput Informasi Pembina Jasa Konstruksi dalam SIPJAKI dengan lengkap	%	70	70%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentasi Meningkatnya Tertib Jasa Konstruksi	%	21.5	33.50%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Nilai Penyelenggaraan Penataan Ruang	%	83	86.09%		Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Pemenuhan Layanan Rumah Layak Huni Korban Bencana /Program Pemerintah Provinsi	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Perkim
Persentase Luasan Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani	%	39.19	39.19%	100	Tercapai	Dinas Perkim
Peningkatan Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana	%	100	100%	100	Tercapai	BPBD
Persentase Peningkatan Upaya Penanganan Darurat Bencana	%	100	100%	100	Tercapai	BPBD
Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	%	100	100%	100	Tercapai	BPBD
Meningkatnya kepatuhan Masyarkat Terhadap Produk Hukum Daerah	%	100	100%	100	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran
Meningkatnya Kesadaran masyarakat Terhadap Bahaya Kebakaran dan Non Kebakaran	%	62	100%	100	Tercapai	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	%	21.50	37.29%	100	Tercapai	Dinas Sosial
Persentase PPKS yang mandiri	%	20.29	20.51%	100	Tercapai	Dinas Sosial
Persentase peningkatan pendapatan penduduk miskin	%	6.74	6.74%	100	Tercapai	Dinas Sosial
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Sosial
Persentase makam pahlawan dan kondisi baik	Makam	6	6 Makam	100	Tercapai	Dinas Sosial
Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	%	100	100%	100	Tercapai	Disnakertrans
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	21.53	23%	100	Tercapai	Disnakertrans
Persentase tenaga Kerja yang ditempatkan	%	27.21	48.35%	100	Tercapai	Disnakertrans
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS, Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS ketenagakerjaan)	%	13.47	33.77%	100	Tercapai	Disnakertrans
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	24.99	69.42%	100	Tercapai	Disnakertrans
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	40	36.99%	92,48	Tidak Tercapai	DPPPA
TPAK Perempuan	%	61	53.75%	88,11	Tidak Tercapai	DPPPA
Indeks Ketahanan Keluarga	Poin	85.31	79.09 Poin	92,71	Tidak Tercapai	DPPPA
Persentase Kabupaten/Kota Yang Membuat Data Gender (Laporan Situasi Perempuan & Anak)	%	100	69.23%	69,23	Tidak Tercapai	DPPPA
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	78.03	100%	100	Tercapai	DPPPA
Persentase Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1.56	1.22%	100	Tercapai	DPPPA
Persentase kebutuhan ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)	%	8.28	5.08%	100	Tercapai	DPPPA
Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	%	78.57	78.57%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Koefisien Variasi (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen	%	7	6.39%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn	90.2	90 Kg/Kap/Thn	100	Tercapai	Dinas KPTP
Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita PerTahun	Kg/Kap/Thn	22.76	19.7 Kg/Kap/Thn	100	Tercapai	Dinas KPTP
Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	%	15.89	15.89%	100	Tercapai	Dinas KPTP

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase Komoditas Pangan Yang Aman Dikonsumsi	%	84	89.39%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Persentase Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Selesai Tepat Waktu	%	60	52.94%	88,23	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Selesai Tepat Waktu	%	60	45	75	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan Selesai Tepat Waktu	%	60	50%	83,33	Tidak Tercapai	Dinas PUPR
Persentase Aset Tanah Provinsi untuk Infrastruktur yang dibebaskan oleh Seksi Pertanahan Dinas PUPR	%	60	68%	100	Tercapai	Dinas PUPR
Persentase luasan lahan terdampak yang dikendalikan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter Indeks Kualitas Air	%	9.61	11.66%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase kualitas udara dengan kategori baik dan sangat baik	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase luas tutupan lahan	%	60	27%	45	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Angka penurunan emisi GRK dari Bussines As Usual	Gg CO2-eq	9485	24601	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Nilai Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Point	55.15	44.54 Poin	80,76	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase air laut dengan kualitas kategori baik	%	43.48	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Peningkatan keanakearagaman hayati	%	17.3	17.3%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase usaha dan/kegiatan yang menerapkan pengelolaan Limbah B3 sesuai ketentuan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase dunia usaha yang taat terhadap pengelolaan lingkungan	%	100	92.67%	92,67	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase MHA yang diakui terkait dengan PPLH	%	50	50%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase partisipasi komunitas yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan sesuai kriteria	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase peningkatan pelestari lingkungan sesuai kriteria	%	100	83%	83	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase sekolah yang berbudaya lingkungan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase masyarakat yang mendapat penghargaan di bidang Lingkungan Hidup sesuai kriteria	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase kasus LH yang diselesaikan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase pengelolaan sampah di Kalsel	%	90	77.84%	86,48	Tidak Tercapai	Dinas Lingkungan Hidup
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) di Kalimantan Selatan	%	60	70.78%	100	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) di Kalimantan Selatan	%	99.30	98.66%	100	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Persentase Kepemilikan Akte Kelahiran di Kalimantan Selatan	%	100	97.34%	97,34	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Persentase Kepemilikan Akte Kematian Berdasarkan Laporan Peristiwa Kematian pada Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Persentase Kepemilikan Buku Nikah/Akta Perkawinan Pasangan dari Laporan Perkawinan di Kalimantan Selatan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Persentase Kabupaten/Kota yang Melaporkan Data Informasi Kependudukan di Kalimantan Selatan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Tingkat Penyajian Data Kependudukan Skala Provinsi dalam 1 (satu) Tahun	%	100	100%	100	Tercapa	Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan KB
Indeks Ketahanan Sosial	Poin	0.79	0.80119	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indeks Ketahanan Ekonomi	poin	0.66	0.70298	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indeks Kepuasan Pelayanan Pemerintahan Desa	poin	65	65	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Indeks Ketahanan Lingkungan	Poin	0.82	0.86745	100	Tercapai	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rasio Kejadian Kecelakaan Transportasi dengan Kematian Per 100.000 Keberangkatan	%	1.6	0%	0	Tidak Tercapai	Dinas Perhubungan
Rasio Konektivitas Provinsi	%	0.63	0.649%	100	Tercapai	Dinas Perhubungan
Pesentase Sentimen Positif Terhadap Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan	%	54	58%	100	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Visitor (akses) terhadap informasi publik yang valid	Visitor	260	260,056	100	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase wilayah bebas Blankspot	%	92	92%	100	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi yang dinilai kesehatannya untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	%	39	35%	89,74	Tidak Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pendampingan kelembagaan dan usaha untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam (satu) daerah provinsi	%	31	31%	100	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase usaha kecil yang diberikan pendampingan kelembagaan dan usaha	%	2.2	2.2%	100	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Persentase jumlah usaha kecil yang diberikan dukungan fasilitasi pemasaran	%	2	2%	100	Tercapai	Dinas Koperasi dan UKM
Nilai IKM Penanganan (Pelayanan) pengaduan	Nilai	88.75	94.7	100	Tercapai	DPMPTSP
Persentase Pengelolaan Sistem Informasi	Persen	100	100	100	Tercapai	DPMPTSP
Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	%	81.15	81.15%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi	%	6.02	6.02%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Pemuda Berpendapat Dalam Rapat Kemasyarakatan	%	5.02	5.02%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Pemuda Wirausaha Kerah Putih (White Collar)	%	0.41	0.41%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Atlet Binaan PPLP Yang Berprestasi	%	26.01	26.01%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Atlet Olahraga Berprestasi	%	20.08	20.08%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Partisipasi Masyarakat Dalam Berolahraga	%	35.94	35.94%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Prasarana dan Sarana Olahraga Berstandar	%	15.06	22,22%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Tenaga Keolahragaan Berprestasi	%	15.06	69,30%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Persentase Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepramukaan	%	31.21	31.21%	100	Tercapai	Dinas Pemuda dan Olahraga
Jumlah Jenis Data Statistik Sektoral Yang Akurat	Jenis	245	245	100	Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Tingkat Indeks Kematangan Keamanan Informasi (IKKI)	Poin	3.28	3.27	99,69	Tidak Tercapai	Dinas Komunikasi dan Informatika
Persentase Kebudayaan Daerah yang berkembang	%	45.45	51.73%	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Kesenian Tradisional yang berkembang	%	33.33	2.25%	6,75	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase cagar budaya non benda yang terlindungi	%	7.14	2%	28,01	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Objek Sejarah yang ditetapkan	%	20	20%	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase Benda, Bangunan, Struktur, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	%	17.97	16.67%	92,76	Tidak Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Persentase cagar budaya yang dikelola secara terpadu	%	17.50	21.67%	100	Tercapai	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Point	62.42	81.16	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	47.74	74.63	100	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan	%	100	100%	100`	Tercapai	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Luas kawasan ekosistem pesisir kritis yang telah direhabilitasi (ha)	Ha	155.8	218.55	100	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Total Produksi Perikanan (tangkap) dari seluruh kab/kota di wilayah provinsi	Ton	220000	218022	99,1	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi	Ton	250000	143500	57,4	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (%)	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Angka konsumsi Ikan masyarakat	Kg/Kap/thn	68.31	65.50	95,88	Tidak Tercapai	Dinas Kelautan dan Perikanan
Persentase peningkatan produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	1.56	1.56%	100	Tercapai	Dinas KPTP

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	%	2.25	2.25%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Persentase Luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	%	2.50	2.50%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas	%	3.88	3.88%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Persentase SDM Pertanian yang berkualitas	%	1.41	1.41%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Persentase Kelompok Tani yang mendapatkan metode dan informasi penyuluhan pertanian	%	22.23	22.23%	100	Tercapai	Dinas KPTP
Persentase peningkatan produksi peternakan	%	7	7%	100	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun	Kg/ha	76	72.85 Kg/ha	95,85	Tidak Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Persentase ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	17	17%	100	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Persentase ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	%	17	17%	100	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Persentase Unit Usaha Yang Menghasilkan Produk ASUH	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Luas areal pengendalian penanggulangan bencana	Ha	6.6	1905 Ha			Dinas Perkebunan & Peternakan
Persentase rekomendasi teknis usaha perkebunan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Persentase Peningkatan Penguatan Kelembagaan Perkebunan dan Peternakan	%	12	12%	100	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Prosentase Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perkebunan dan Peternakan	%	75	75%	100	Tercapai	Dinas Perkebunan & Peternakan
Persentase Objek Wisata Unggulan Yang Sesuai Sapta Pesona	%	20	20%	100	Tercapai	Dinas Pariwisata
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	%	10	10.82%	100	Tercapai	Dinas Pariwisata
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	5	-2.43%	-48,6	Tidak tercapai	Dinas Pariwisata
Persentase Peningkatan Pendapatan Produk Kreatif	%	5	7.25%	100	Tercapai	Dinas Pariwisata
Tingkat Hunian Akomodasi	Persen	48	44.49	92,68	Tercapai	Dinas Pariwisata
Tutupan Hutan dan Lahan	%	36	36%	100	Tercapai	Dinas Kehutanan
Persentase pelaku usaha yang bebas tunggakan PNPB dan Retribusi Daerah	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Kehutanan

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase populasi flora dan fauna bernilai penting pada kawasan ekosistem esensial yang aman dari ancaman kepunahan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Kehutanan
Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	%	10	12.50%	100	Tercapai	Dinas Kehutanan
Persentase penyediaan dokumen perencanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Kehutanan
Persentase luas wilayah cekungan air tanah yang di konservasi	%	14.53	14.53%	100	Tercapai	Dinas ESDM
Persentase luas lahan yang direvegetasi akibat usaha pertambangan yang telah dilakukan reklamasi	%	52.12	51.89%	99,55	Tidak Tercapai	Dinas ESDM
Rasio Elektrifikasi rumah tangga tidak mampu	%	88.92	89.43%	100	Tercapai	Dinas ESDM
Pertumbuhan Nilai Ekspor Non Migas	Persen	10	-13.50	-135	Tidak tercapai	Dinas Perdagangan
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	Persen	11	9.63	87,54	Tidak tercapai	Dinas Perdagangan
Persentase Pertumbuhan Industri	%	6.25	9.14%	100	Tercapai	Dinas Perindustrian
Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang Dikeluarkan Oleh Instansi Terkait	%	25.70	70%	100	Tercapai	Dinas Perindustrian
Persentase Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini	%	100	100%	100	Tercapai	Dinas Perindustrian
Persentase satuan permukiman yang difasilitasi pengembangan kawasan transmigrasi	%	100	100%	100	Tercapai	Disnakertrans
Persentase perumusan kebijakan Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama dengan capaian outcome 100%	%	100	100%	100	Tercapai	Biro Pemerintahan
Persentase Produk Hukum Daerah Berkualitas Sesuai Ketentuan Perundang-Undangan Yang Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Daerah	%	100	100%	100	Tercapai	Biro Hukum
Persentase Keberhasilan Pendampingan, Bantuan/Layanan Hukum (Litigasi & Non Litigasi) Pemerintah Daerah (Pemda)	%	100	100%	100	Tercapai	Biro Hukum
Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)	Unit	3	3 Unit	100	Tercapai	Biro Organisasi
Nilai laporan kinerja pemda	Persentase	12.40	12.34	99,51	Tidak Tercapai	Biro Organisasi
Persentase Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase	100	100	100	Selesai	Biro Organisasi

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Persentase PD yang melaksanakan Tata Laksana dengan "BAIK"	Persentase	70	70	100	Tercapai	Biro Organisasi
Persentase Perangkat Daerah dengan kualifikasi nilai SAKIP minimal A	Persentase	4.25	4.25	100	Tercapai	Biro Organisasi
Persentase perangkat daerah Prov Kalsel dengan kelembagaan yang ideal	Persentase	100	100	100	Tercapai	Biro Organisasi
Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan RB dgn baik	Persentase	70	70	100	Tercapai	Biro Organisasi
Persentase Permasalahan Pembangunan Daerah yang dapat Diselesaikan	%	65	80%	100	Tercapai	Biro Administrasi Pembangunan
Persentase Fasilitasi Pembinaan Kegiatan Keagamaan	%	100	100%	100	Tercapai	Biro Kesejahteraan Rakyat
Predikat Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Nilai	85	93.75	100	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Nilai Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Indeks	87	99.70	100	Tercapai	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
Jumlah Inovasi Pelayanan Publik yang dicanangkan	Buah	1	1	100	Tercapai	Biro Perekonomian
Nilai IKM	%	3.5	3.8%	100	Tercapai	Biro Perekonomian
Prosentase BLUD yang Baik	%	100	100%	100	Tercapai	Biro Perekonomian
Prosentase BUMD yang Sehat	%	100	100%	100	Tercapai	Biro Perekonomian
Tingkat Inflasi yang Stabil	%	3	2.01%	67	Tidak Tercapai	Biro Perekonomian
IKM DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Terhadap Pelayanan Set. DPRD	Nilai	96	99.17	100	Tercapai	Sekretariat DPRD
Persentase Dokumen Perencanaan (RPJPD/RPJMD/RKPD) Prov / Kab / Kota dengan nilai baik	%	100	100%	100	Tercapai	Bappeda
Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%	%	100	100%	100	Tercapai	Bappeda
Persentase Dokumen Perencanaan (Renstra/Renja) SKPD Provinsi dengan nilai baik	%	100	100%	100	Tercapai	Bappeda
Persentase program prioritas dengan tingkat ketercapaian >85%	%	100	100%	100	Tercapai	Bappeda
Persentase SKPD Provinsi yang menerapkan perencanaan anggaran berbasis kinerja	%	100	100%	100	Tercapai	Bappeda
Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	1.73	41.85	100	Tercapai	Bapenda
Rasio PAD	%	1.69	42.83	100	Tercapai	Bapenda

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	0.06	16.74	100	Tercapai	Bapenda
Rasio Belanja Pegawai Diluar Guru dan Tenaga Kesehatan	%	24.89	10.71%	43,03	Tidak Tercapai	BPKAD
Cash Management : Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	2.17	21.48%	100	Tercapai	BPKAD
Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	5.30	91.07%	100	Tercapai	BPKAD
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	0.48	52.6%	100	Tercapai	BPKAD
Assets Management	%	25	25%	100	Tercapai	BPKAD
Persentase SKPD dengan IP ASN minimal kategori sedang	%	77	100%	100	Tercapai	BKD
Persentase SKPD Melaksanaan Pemetaan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur	%	100	95.91%	95,91	Tidak Tercapai	BKD
Indeks Kepuasan PNS Terhadap Pelayanan Bidang Kepegawaian	Indeks	87	90.57	100	Tercapai	BKD
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						
Persentase Alumni Pelatihan yang Menerapkan Kompetensi Teknis, Manajerial, Latihan Dasar, Fungsional dan Pemerintahan Sesuai Tujuan Diklat	Persen	91.81	92.67	100	Tercapai	BPSDM
Persentase Peserta Diklat yang Memenuhi Standar Kompetensi	Persen	95.95	99.24	100	Tercapai	
Indeks Kepuasan Pelayanan BPSDM	Indeks	84.47	85.12	100	Tercapai	BPSDM
persentase hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk percepatan pembangunan daerah	%	90.10	90.74%	100	Tercapai	BRINDA
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan pada Badan Penghubung	persen	81.39	94.14	100	Tercapai	Badan Penghubung
Persentase OBRİK Tanpa Temuan Indikasi Kerugian Daerah	%	100	70%	70	Tercapai	Inspektorat Daerah
Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)	Poin	4.05	3.85	95,06	Tidak Tercapai	Inspektorat Daerah
Angka Penanganan Konflik Sosial	Angka	0	0	0		Badan KESBANGPOL
Indeks Capaian Revolusi Mental	Indeks	67.04	77.66	100	Tercapai	Badan KESBANGPOL
Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilukada	%	72.82	83.02%	100	Tercapai	Badan KESBANGPOL

ASPEK / FOKUS / BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	SATUAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI TAHUN 2024	CAPAIAN TAHUN 2024	KRITERIA	SKPD PENANGGUNGJAWAB
Indeks Kinerja Ormas	Indeks	80.64	72.17	89,49	Tidak Tercapai	Badan KESBANGPOL
Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	2.97	2.96	99,96	Tidak Tercapai	Badan KESBANGPOL
Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	64	77.44	100	Tercapai	Badan KESBANGPOL



2.7.3 Evaluasi Realisasi RKPD Sampai dengan Tahun 2024

2.7.3.1 Capaian Pembangunan Indikator Makro Tahun 2024

Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, mengamanatkan bahwa Evaluasi dan pengendalian RKPD perlu dilakukan untuk melihat sejauh mana konsistensi RKPD dengan RPJMD.

Indikator kinerja makro merupakan tolok ukur kemajuan yang akan dicapai oleh perangkat pemerintah daerah dan seluruh masyarakat pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam mewujudkan visi dan prioritas dalam RPJMD melalui berbagai program dan kegiatan pembangunan. Penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.166 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Makro Provinsi Kalimantan Selatan SD TW1 Tahun 2025

INDIKATOR KINERJA DAERAH	CAPAIAN KALSEL	CAPAIAN NASIONAL	TARGET RPJMD 2024	CAPAIAN DARI TARGET RPJMD
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75.19	75.02	72.65	Tercapai
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	4.2	4.91	4,05	Belum Tercapai
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	5.15	5.03	4,61 - 5,01	Belum Tercapai
Angka Kemiskinan	4.11	8.57	4.40 – 4.22	Tercapai
Indeks Gini	0.302	0.381	0.324	Tercapai
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	75.7	73.07	71.22	Tercapai
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	31.7	...	24.6	Tercapai

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Keterangan :

* Capaian Tahun 2024

1. Indeks Pembangunan Manusia

Kalimantan Selatan menunjukkan kemajuan yang ditunjukkan dari tren Indeks Pembangunan Manusia yang meningkat selama periode 2020 hingga 2024 dengan peningkatan yang konsisten dan signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, IPM Kalimantan Selatan sebesar 73,09 dan berhasil mencapai 75,19 pada tahun 2024 dimana terjadi peningkatan total sebesar 2,10 poin selama lima tahun.

Selama lima tahun terakhir, nilai IPM Kalimantan Selatan secara konsisten berada dalam kategori tinggi dan selalu melampaui IPM nasional Indonesia. Pencapaian ini menandakan bahwa kondisi pembangunan manusia dan kesejahteraan sosial di Provinsi Kalimantan Selatan secara

umum lebih baik daripada rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan kemajuan dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup penduduknya. Dibandingkan dengan wilayah Kalimantan lain, IPM Kalimantan Selatan tahun 2024 yang mencapai 75,19 berada pada posisi kedua setelah Kalimantan Timur yang memimpin dengan nilai tertinggi di pulau Kalimantan, yaitu 78,79 pada tahun 2024. Sementara Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah memiliki nilai IPM yang lebih rendah dibanding Kalimantan Selatan. Jika memperhatikan IPM berdasarkan wilayah, maka dapat dilihat bahwa di Tahun 2024 nilai IPM kedua kota di Provinsi Kalimantan Selatan lebih baik jika dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Nilai IPM Kota Banjarbaru 81,65 dan Kota Banjarmasin adalah 80,53. Kedua wilayah tersebut masuk dalam kategori IPM yang sangat tinggi. Sementara itu, sebelas kabupaten lainnya telah masuk dalam kategori IPM tinggi. Adapun nilai IPM terendah ada di Kabupaten Barito Kuala dengan nilai 71,40. Pada tahun 2024, terjadi peningkatan dalam IPM yang didorong oleh semua aspek penyusunnya dengan penekanan pada standar hidup yang layak. Namun, terdapat perlambatan dalam pertumbuhan semua indikator dibandingkan tahun sebelumnya. Misalnya, pertumbuhan umur harapan hidup saat lahir melambat dari 0,37 persen menjadi 0,28 persen, harapan lama sekolah melambat dari 0,31 persen menjadi 0,08 persen, rata-rata lama sekolah dari 1,06 persen menjadi 0,82 persen, dan pertumbuhan pengeluaran riil per kapita yang sebelumnya 3,88 persen, melambat menjadi 3,44 persen. Salah satu permasalahan pembangunan SDM di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu belum optimalnya kualitas pendidikan. Kualitas sumber daya manusia ditentukan oleh jenjang pendidikan yang dimiliki baik Pendidikan formal maupun informal. Dalam penelaahan permasalahan pendidikan menggunakan rata-rata lama sekolah sebagai tolak ukur rata-rata jenjang pendidikan yang dimiliki oleh masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, rata-rata lama sekolah mencapai 8,62 tahun dimana meningkat 0,07 tahun dibanding tahun sebelumnya. Angka Rata-rata Lama Sekolah juga menjadi indikator yang menentukan IPM sehingga RLS perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan nilai IPM.

Belum optimalnya kualitas pendidikan juga dapat dilihat dari Angka Partisipasi Sekolah (APS). APS menunjukkan seberapa tinggi atensi masyarakat terhadap pendidikan sesuai usia sekolah pada umumnya. Semakin tinggi angka partisipasi sekolah maka semakin tinggi pula masyarakat usia sekolah yang mengenyam bangku pendidikan. Namun secara umum, semakin tinggi usia sekolah maka angka partisipasi sekolah juga semakin rendah mengingat makin banyak hambatan dalam mengikuti jenjang pendidikan seperti biaya, cakupan sekolah, hingga masalah sosial lainnya. Nilai APS di SMU/SMK/MA/Paket C Kalimantan Selatan yang masih rendah (72,31), paralel dengan nilai RLS yang hanya 8,62 tahun. Rendahnya nilai APS ini menunjukkan banyaknya hambatan penduduk usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA sederajat.

Rendahnya nilai APS ini juga dapat tergambar bahwa ketersediaan masyarakat yang berpeluang untuk melanjutkan ke Perguruan Tinggi juga sedikit, sehingga sedikit pula ketersediaan tenaga kerja yang ahli dan terampil.

2. Angka Kemiskinan, Tingkat Kemiskinan, dan Garis Kemiskinan

Jika dilihat dari Indikator kemiskinan, maka Kalimantan Selatan termasuk provinsi yang mempunyai indikator kemiskinan terendah jika dibandingkan provinsi lain di seluruh Indonesia. Secara kuantitas. Penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada bulan Maret 2024 yaitu 4,11 persen dan pada September 2024 yaitu 4,02 persen dari seluruh penduduk Kalimantan Selatan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin Kalimantan Selatan memperlihatkan tren yang menurun, meskipun sempat mengalami peningkatan di tahun 2021 dimana persentase penduduk miskin mencapai 4,83 persen. Hal ini menunjukkan adanya kemajuan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Secara kuantitas, jumlah penduduk miskin terbanyak ada di wilayah Kota Banjarmasin sebanyak 33,38 ribu jiwa. Sementara itu, jumlah penduduk miskin paling sedikit ada di wilayah Kabupaten Tapin sebanyak 6,55 ribu jiwa.

Walaupun jumlah penduduk miskin di Kota Banjarmasin adalah yang paling banyak, namun secara persentase, Kota Banjarmasin bukan wilayah yang persentase penduduk miskinnya tertinggi. Persentase penduduk miskin di Kota Banjarmasin hanya 4,58 persen, jauh lebih rendah dibanding Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang persentase penduduk miskinnya mencapai 5,81 persen. Adapun persentase penduduk miskin terendah ada di Kabupaten Banjar dengan nilai 2,36 persen. Jika membandingkan dengan persentase penduduk miskin secara provinsi yang mempunyai nilai 4,11 persen, maka hanya ada enam Kabupaten/Kota yang persentase penduduk miskinnya lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten/kota yang dimaksud yaitu : Kabupaten Tanah Laut (3,74%), Kabupaten Banjar (2,36%), Kabupaten Tapin (3,33%), Kabupaten Hulu Sungai Selatan (3,38%), Kota Tanah Bumbu (3,41%) dan Kota Banjarbaru (3,79%)

Berdasarkan Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRUSA) BPS. Garis Kemiskinan dapat didefinisikan sebagai representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan dan kebutuhan pokok bukan makanan. Berdasarkan definisi tersebut, maka penduduk yang pengeluaran konsumsi per bulannya di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin

3. Ketenagakerjaan dan Tingkat Pengangguran Terbuka

Struktur tenaga kerja di Kalimantan Selatan per Agustus 2024 menunjukkan bahwa sektor Pertanian, Perdagangan termasuk Rumah Makan dan Akomodasi, serta Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan adalah penyumbang terbesar dalam penyerapan tenaga kerja, masing-masing dengan persentase 29,20 persen, 27,93 persen, dan 17,88 persen. Data ini konsisten dengan tahun sebelumnya. Sektor yang mengalami kenaikan terbesar dalam penyerapan tenaga kerja adalah Jasa Kemasyarakatan, Perdagangan dan Akomodasi, serta Konstruksi, sementara Sektor Industri dan Pertanian mengalami penurunan dalam porsi tenaga kerja yang diserap.

Berdasarkan status pekerjaan utama, penduduk bekerja dapat dikategorikan menjadi kegiatan formal dan informal. Penduduk yang bekerja di kegiatan formal mencakup mereka dengan status berusaha dengan dibantu buruh tetap/dibayar dan buruh/karyawan/pegawai, sedangkan sisanya dikategorikan sebagai kegiatan informal (berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar, pekerja bebas, dan pekerja keluarga/tak dibayar). Pada Agustus 2024, penduduk yang bekerja pada kegiatan informal adalah 53,56 persen, sedangkan yang bekerja pada kegiatan formal adalah 46,44 persen.

Status Pekerjaan Utama pada penduduk yang bekerja di Kalimantan terbagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan BPS Kalimantan Selatan per Agustus 2024, penduduk bekerja masih didominasi oleh Buruh/Karyawan/Pegawai sebesar 43,36 persen, Berusaha sendiri sebesar 23,84 persen, Pekerja Keluarga/Tak Dibayar sebesar 13,24 persen Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Keluarga/Tak Dibayar sebesar 13,01 persen, Pekerja Bebas sebesar 3,47 persen, Berusaha dibantu pekerja tetap dan dibayar sebesar 3,08 persen.

Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 dari hasil Sakernas bulan Agustus adalah 4,20 persen, angka tersebut masih lebih rendah daripada TPT Indonesia sebesar 4,91 persen. Berdasarkan Tabel 3.10, menunjukkan bahwa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan nilai TPT tertinggi adalah Kota Banjarmasin 6,56 persen, Kabupaten Tanah Bumbu 6,37 persen, dan Kabupaten Kotabaru 6,05 persen.

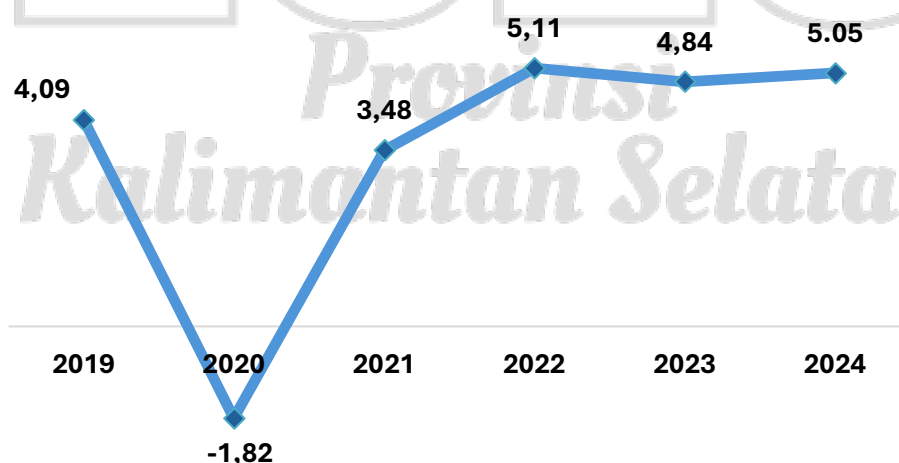


Gambar 2.50 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2021- Agustus 2024

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2024)

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Dari tahun 2019 hingga 2024, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah di tahun 2019 mencapai pertumbuhan 4,09 persen, terjadi kontraksi ekonomi mencapai -1,82 persen di tahun 2020 yang disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19. Tahun-tahun berikutnya menunjukkan pemulihan yang progresif dengan pertumbuhan sebesar 3,48 persen pada tahun 2021 dan mencapai puncaknya pada tahun 2022 dengan 5,11 persen. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi sedikit melambat menjadi 4,84 persen yang menandakan stabilisasi setelah fase pemulihan yang intens.



Gambar 2.51 Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2019-2024

Ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,05 persen dibandingkan dengan tahun 2023 (c-to-c). Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,07 persen; Jasa lainnya sebesar 7,41 persen; dan Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7,07 persen.

Hambatan/Tantangan Perekonomian Kalimantan Selatan yaitu ketergantungan pada sektor pertambangan. Meskipun sektor ini memberikan kontribusi besar, ketergantungan yang tinggi pada sumber daya alam dapat menjadi risiko jika harga komoditas global turun. Kontraksi Ekonomi Triwulan ke Triwulan: Kontraksi ekonomi pada triwulan IV-2024 menunjukkan adanya fluktuasi yang perlu diperhatikan, terutama dalam sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang mengalami penurunan signifikan. Pembangunan infrastruktur yang belum merata dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah.

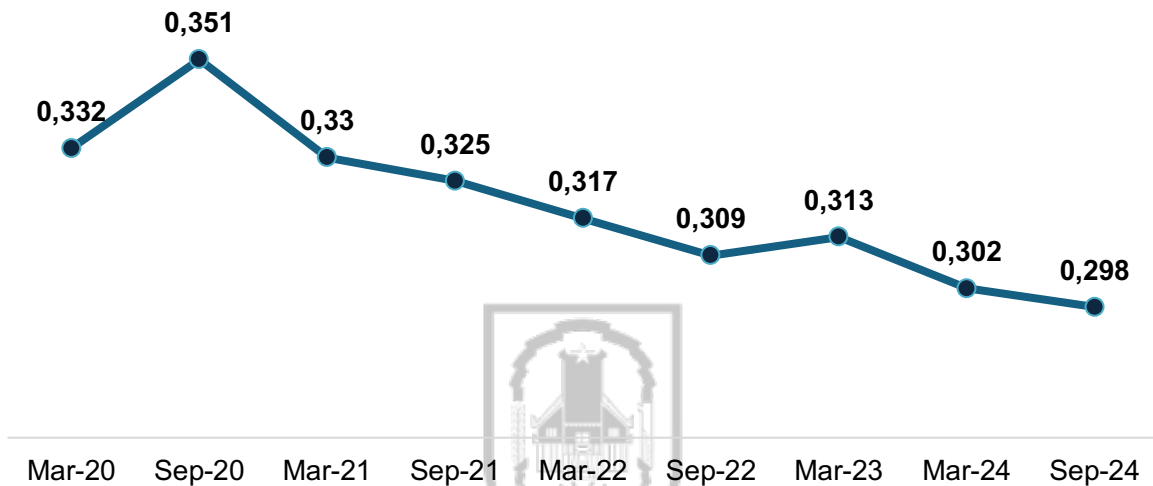
5. Tingkat Ketimpangan (Indeks Gini/Gini Rasio)

Gini Ratio adalah indikator yang mengukur ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat ketimpangan yang lebih besar. Sebuah nilai 0 menunjukkan distribusi yang sempurna, di mana setiap individu memiliki pendapatan yang sama, sedangkan nilai 1 menunjukkan bahwa seluruh pendapatan terkonsentrasi pada satu individu saja.

Sejak Maret 2020 hingga September 2024, tren Gini Ratio di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut berkurang. Dimulai dengan nilai 0,332 di Maret 2020 dan mencapai nilai tertinggi 0,351 di September 2020, Gini Ratio kemudian mengalami penurunan bertahap, mencapai nilai terendah sebesar 0,298 di September 2024. Penurunan ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan menjadi lebih merata di antara penduduk yang mencerminkan peningkatan kesetaraan ekonomi di Kalimantan Selatan sepanjang periode tersebut.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio selama lima tahun terakhir di wilayah perkotaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perdesaan. Namun, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan, Gini Ratio Kalimantan Selatan tahun 2024 menunjukkan adanya perbaikan dalam ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan tahun 2020. Untuk wilayah perkotaan, Gini Ratio pada September 2024 adalah 0,326, menurun dari 0,343 di September 2020 yang menandakan pengurangan ketimpangan. Di wilayah perdesaan, Gini Ratio juga menunjukkan penurunan, dari 0,277 pada September 2020 menjadi 0,259 pada

September 2024, yang juga mencerminkan adanya peningkatan dalam kesetaraan distribusi pendapatan.



Gambar 2.52 Gini Ratio Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

Sumber: Badan Pusat Statistik (2024)

Selain menggunakan *Gini Ratio*, ketimpangan juga diukur melalui persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah yang merupakan indikator dari Bank Dunia. Menggunakan ukuran ini, tingkat ketimpangan dikelompokkan menjadi tiga kategori. Ketimpangan dianggap tinggi apabila persentase pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah kurang dari 12 persen. Ketimpangan sedang didefinisikan jika persentasenya berada dalam kisaran 12 hingga 17 persen. Sementara itu, ketimpangan dianggap rendah jika persentase tersebut lebih dari 17 persen. Pada September 2024, persentase ini tercatat sebesar 22,40 persen di Kalimantan Selatan, menunjukkan adanya peningkatan dari 22,26 persen pada Maret 2024, yang mengindikasikan adanya penurunan ketimpangan.

6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Dari capaian indeks lingkungan hidup menjelaskan pengelolaan lingkungan hidup di Kalimantan Selatan belum berjalan dengan baik mengingat nilai indeks kualitas lingkungan hidup Provinsi Kalimantan Selatan masih terbilang cukup rendah. dimana pada tahun 2023 nilai IKLH Provinsi Kalimantan Selatan yaitu baru mencapai 73.28. yang terdiri dari komponen indeks kualitas air (IKA) sebesar 54.63, indeks kualitas udara (IKU) 89.52 dan indeks kualitas tutupan lahan (IKTL) sebesar 50.52. Dalam perspektif IKLH, Nilai indeks kualitas lingkungan hidup ini merupakan resultan dari upaya menjaga laju deforestasi. pengelolaan sampah dan limbah. upaya rehabilitasi dan pengendalian pencemaran dalam bentuk partisipasi perusahaan dalam

pengelolaan lingkungan hidup. Angka indeks ini bukan semata-mata peringkat. namun lebih kepada suatu dorongan upaya perbaikan kualitas lingkungan hidup.

Dalam konteks ini para pihak di tingkat provinsi terutama pemerintah provinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal. yaitu 100. Semakin jauh dengan angka 100. mengindikasikan harus semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan. Beberapa potensi yang mempengaruhi kualitas lingkungan hidup tersebut antara lain seperti industri kimia, karet, plastik, makanan dan minuman, pengolahan kayu, tekstil, perkebunan, pertambangan, pertanian, peternakan, limbah padat sarana transportasi, beban limbah cair dari penginapan dan rumah sakit, keterbatasan fasilitas buang air, besar dan timbunan sampah.

Rendahnya indeks kualitas lingkungan hidup Kalimantan Selatan tentunya tidak terlepas dari penurunan kualitas dan kuantitas air sungai. juga terlihat dari potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bencana banjir. puting beliung. tanah longsor. bencana kekeringan. kebakaran pemukiman dan kebakaran hutan lahan menjadi catatan khusus bagi Provinsi Kalimantan Selatan.

Evaluasi Program Unggulan Daerah: Pengembangan Padi Varietas Lokal

Program Pengembangan Padi Varietas Lokal di Kalimantan Selatan merupakan salah satu program unggulan daerah dalam upaya menjaga ketahanan pangan sekaligus melestarikan plasma nutfah lokal. Data tahun 2024 menunjukkan bahwa sebagian besar kabupaten/kota masih menanam padi lokal dengan variasi luas panen, produktivitas, dan total produksi yang berbeda-beda.

Beberapa daerah tercatat memiliki kontribusi signifikan, seperti Barito Kuala, Banjar, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Utara, yang menjadi sentra produksi padi lokal dengan luasan panen yang relatif besar. Namun, produktivitas rata-rata padi lokal masih berkisar pada 35–43 kuintal per hektar, lebih rendah dibandingkan produktivitas varietas unggul nasional. Hal ini menunjukkan adanya tantangan dalam peningkatan hasil, baik dari sisi kualitas benih, teknik budidaya, maupun dukungan sarana produksi.

Dari sisi produksi, padi lokal tetap menjadi komoditas yang penting karena memiliki keunggulan adaptasi lingkungan dan cita rasa khas yang disukai masyarakat. Akan tetapi,

keterbatasan produktivitas menyebabkan kontribusi terhadap ketersediaan pangan daerah masih belum maksimal.

Secara keseluruhan, Program Unggulan Pengembangan Padi Varietas Lokal telah memberikan kontribusi dalam menjaga keberlanjutan pangan lokal dan identitas budaya pertanian daerah. Namun, untuk meningkatkan kinerja ke depan, diperlukan langkah-langkah strategis seperti:

1. Perbaikan teknologi budidaya melalui penyuluhan, demplot, dan penggunaan pupuk berimbang.
2. Penguatan kelembagaan petani untuk meningkatkan skala usaha dan akses pasar.
3. Pengembangan hilirisasi dan pemasaran produk padi lokal, agar nilai tambah dan daya saing semakin meningkat.
4. Dukungan riset dan inovasi untuk menghasilkan varietas padi lokal yang lebih produktif tanpa mengurangi kualitas rasa dan ketahanan terhadap lingkungan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan program unggulan pengembangan padi varietas lokal dapat berkontribusi lebih besar terhadap ketahanan pangan, kesejahteraan petani, serta pelestarian kekayaan hayati Kalimantan Selatan.

2.8 Permasalahan Pembangunan Yang Berhubungan dengan isu strategis dan Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif, terdapat sejumlah permasalahan pembangunan daerah yang terkait dengan isu strategis. Hal ini menjadi tantangan utama dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

a. Terbatasnya Akses dan Kesempatan Untuk Mendapatkan Pendidikan Yang Layak

Pendidikan di Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan memerlukan penanganan menyeluruh. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya partisipasi peserta didik, terutama pada kelompok usia 16 hingga 18 tahun. Hal ini diperburuk oleh masih adanya kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah, sehingga peserta didik harus menempuh perjalanan jauh dengan akses transportasi publik yang minim, khususnya di daerah terpencil.

Keterbatasan fasilitas pendidikan berbasis teknologi di daerah pedalaman turut menghambat akses terhadap pembelajaran digital. Sementara itu, faktor ekonomi yang relatif rendah di sebagian masyarakat menyebabkan sebagian anak usia sekolah terpaksa bekerja membantu orang tua, sehingga berisiko putus sekolah. Kondisi geografis Kalimantan Selatan yang terdiri dari dataran rawa, perbukitan, pegunungan, dan wilayah kepulauan juga menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan.

Selain itu, masih banyak anak-anak yang mengenyam pendidikan di pondok pesantren Salafiah yang tidak terintegrasi dengan sistem pendidikan kesetaraan, sehingga tidak memiliki ijazah yang diakui secara formal. Di sisi lain, tingkat kepedulian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih kurang, menyebabkan banyak anak usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Permasalahan juga muncul dari sisi tenaga pendidik. Kompetensi guru dan tenaga kependidikan belum merata, masih banyak guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan atau tidak memenuhi standar kualifikasi akademik minimal (S1/D4). Pelatihan dan pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru juga masih terbatas. Distribusi guru yang tidak merata menyebabkan ada sekolah yang kekurangan guru, sementara yang lain mengalami kelebihan. Kedisiplinan sebagian guru juga masih menjadi sorotan, termasuk kurangnya guru produktif dan tenaga ahli di satuan pendidikan tertentu.

Dari sisi kurikulum, ketidaksesuaian antara materi pembelajaran dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, terutama di era digital dan Revolusi Industri 4.0, menjadi tantangan yang signifikan. Fasilitas praktik di SMK masih kurang memadai sehingga siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar berbasis industri secara optimal. Reskilling dan upskilling guru produktif juga belum maksimal, yang berdampak pada kurangnya keterampilan peserta didik sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Di bidang inklusi, jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif masih minim. Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) menghadapi banyak hambatan, mulai dari kurangnya Guru Pendidikan Khusus (GPK), minimnya prasarana sekolah yang ramah disabilitas, hingga terbatasnya sarana pembelajaran dan layanan terapi atau pendampingan psikologis. Stigma sosial terhadap ABK juga masih tinggi, menyulitkan mereka untuk terintegrasi dalam sistem pendidikan reguler.

Permasalahan sarana dan prasarana juga masih mencolok. Beberapa sekolah masih belum memiliki bangunan dan fasilitas yang sesuai standar. Keterbatasan fasilitas teknologi pendidikan, terutama akses internet yang belum merata, turut menjadi hambatan dalam implementasi pembelajaran digital. Belum optimalnya literasi dan numerasi peserta didik juga

menjadi perhatian. Kurikulum saat ini belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi unggulan daerah maupun pendekatan pembelajaran modern seperti project-based learning dan problem-solving. Integrasi teknologi dalam pembelajaran pun belum maksimal.

Dari sisi lingkungan belajar, masih ditemukan kasus perundungan (bullying) dan kekerasan di sekolah. Pengaruh negatif media sosial terhadap karakter peserta didik juga kian terasa. Kurangnya integrasi pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis semakin memperburuk kualitas pendidikan secara keseluruhan.

b. Terbatasnya Akses dan Kesempatan untuk Mendapatkan Kesehatan yang Baik

Provinsi Kalimantan Selatan masih menghadapi tantangan struktural dalam upaya pemenuhan akses layanan Kesehatan yang merata, berkualitas dan berkeadilan. Disparitas fasilitas pelayanan Kesehatan antara perkotaan dan perdesaan, keterbatasan tenaga medis di wilayah terpencil, serta infrastruktur penunjang yang belum optimal berdampak langsung terhadap capaian indikator Kesehatan. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Kalimantan Selatan masih berada pada tingkat yang mengkhawatirkan. Selain itu, Prevalensi Stunting pada Balita juga masih menjadi perhatian serius, mencerminkan permasalahan gizi kronis yang berkaitan dengan ketidakcukupan pangan bergizi, sanitasi yang belum memadai, serta belum optimalnya edukasi dan pola asuh yang tepat.

Kondisi ini diperburuk oleh terjadinya transisi epidemiologi yang ditandai dengan pergeseran pola penyakit dari dominasi penyakit menular menuju peningkatan penyakit tidak menular (PTM), seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit kardiovaskular yang kini menjadi penyumbang utama beban morbiditas dan mortalitas. Perubahan struktur demografi, khususnya peningkatan proporsi penduduk lanjut usia, mempertegas urgensi transformasi sistem pelayanan Kesehatan dari pendekatan kuratif menuju pendekatan promotive, preventif dan manajemen penyakit kronis jangka panjang.

Rendahnya tingkat graduasi PPKS, sehingga jumlah penerima bantuan sosial masih tinggi dan belum mandiri secara ekonomi maupun sosial

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) umumnya berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi yang berdampak pada rendahnya akses terhadap pendidikan yang berkualitas. Akibatnya, banyak PPKS yang tidak menyelesaikan Pendidikan formal, atau hanya memiliki keterampilan dasar yang tidak memadai untuk bersaing dipasar kerja. Untuk itu diperlukan bantuan akses Pendidikan serta berbagai Program Pemberdayaan untuk Masyarakat miskin.

Tingkat Graduasi PPKS yang masih rendah menjadi cerminan belum optimalnya Upaya pemberdayaan Masyarakat miskin. Graduasi seharusnya menandakan keberhasilan program perlindungan sosial dalam memandirikan PPKS secara ekonomi. Namun kenyataannya, banyak PPKS yang tetap berada dalam kondisi rentan karena minimnya akses terhadap Pendidikan, keterampilan, dan peluang kerja yang layak. Kondisi ini berdampak langsung terhadap daya saing Sumber Daya Manusia (SDM). SDM yang berasal dari PPKS umumnya memiliki tingkat Pendidikan rendah dan keterampilan yang belum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Tanpa intervensi yang kuat dalam bentuk pelatihan vokasi, pendampingan usaha, dan pembukaan akses ekonomi, mereka sulit bersaing di era digital dan industri yang makin kompetitif. Ketergantungan yang berkepanjangan pada bantuan sosial dapat membentuk mental pasif dan menghambat pengembangan potensi diri. Hal ini akan membuat siklus kemiskinan dan menjadi hambatan bagi peningkatan kualitas SDM.

Peningkatan graduasi Penerima Program Kesejahteraan Sosial menjadi salah satu tantangan utama dalam upaya pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan. Keberhasilan dalam hal ini bukan hanya mengurangi angka kemiskinan, tetapi juga memperkuat fondasi daya saing bangsa melalui SDM yang Tangguh, mandiri dan produktif, melalui indikator kinerja Persentase penerima bantuan sosial bersyarat yang mandiri, jumlah orang yang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi Masyarakat kewenangan provinsi, jumlah Penerima Manfaat (PM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan. Keluarga kewenangan provinsi, jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulant modal dan pendampingan usaha lintas kabupaten/kota.

Belum optimalnya peran Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga dukungan terhadap PPKS masih terbatas dan tidak maksimal

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan kekuatan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. PSKS mencakup individu, Lembaga, dan pranata sosial yang memiliki kapasitas untuk membantu Masyarakat rentan seperti Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dalam mencapai kemandirian. Namun, belum optimalnya peran PSKS menjadi salah satu hambatan utama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) terutama pada kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, penguatan peran PSKS sangatlah penting, dengan PSKS yang kuat dan responsive maka penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan lebih efektif melalui indikator kinerja Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan jumlah PSKS yang terampil.

c. Rendahnya kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas sehingga mereka masih bergantung pada bantuan sosial dan belum mampu berpartisipasi secara optimal dalam kehidupan sosial dan ekonomi

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki potensi besar apabila diberikan akses dan dukungan yang memadai. Namun, hingga saat ini tingkat kemandirian dan produktivitas kelompok ini masih rendah. Hal ini tidak lepas dari berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses Pendidikan inklusif, minimnya pelatihan keterampilan kerja, serta kurangnya kesempatan kerja yang setara di sektor formal maupun informal. Kondisi tersebut berkontribusi langsung terhadap rendahnya daya saing SDM. Selain itu, rendahnya kemandirian penyandang disabilitas memperbesar ketergantungan terhadap bantuan sosial, yang dalam jangka Panjang dapat membebani sistem kesejahteraan negara dan memperlebar kesenjangan sosial. hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan daya saing SDM tidak akan tercapai secara menyeluruh tanpa menyertakan kelompok disabilitas sebagai bagian integral dari Pembangunan manusia.

Meningkatkan kemandirian dan produktivitas penyandang disabilitas merupakan strategi penting untuk meningkatkan daya saing SDM secara komprehensif dengan indikator kinerja Persentase Penyandang Disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya didalam panti skala provinsi

d. Rendahnya Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Daerah

Pemuda merupakan aset strategis dalam pembangunan daerah, namun saat ini pemuda di Kalimantan Selatan masih menghadapi berbagai permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Peran serta pemuda dalam pembangunan daerah masih tergolong rendah, sementara persaingan global menuntut peningkatan kapasitas dan daya saing yang tinggi dari sumber daya pemuda.

Permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kemasyarakatan, baik dalam bentuk keterlibatan sosial maupun keorganisasian. Hal ini tercermin dari menurunnya minat pemuda untuk bergabung dalam organisasi kepemudaan, sosial kemasyarakatan, dan kepramukaan. Di sisi lain, kapasitas kepemimpinan pemuda masih belum optimal, ditunjukkan oleh terbatasnya jumlah pemuda yang memiliki kemampuan memimpin dan berperan aktif di tengah masyarakat. Selain itu, tingkat kewirausahaan di kalangan pemuda juga masih rendah, diiringi dengan partisipasi yang minim dalam kegiatan ekonomi mandiri.

Permasalahan lainnya adalah terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan pengalaman profesional di bidang kepemudaan, sehingga menghambat upaya

pembinaan dan pengembangan potensi pemuda secara berkelanjutan. Secara keseluruhan, rendahnya partisipasi, kapasitas, dan akses terhadap pengembangan diri di kalangan pemuda menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang terarah dan terpadu. Upaya penguatan peran pemuda dalam pembangunan daerah menjadi krusial, seiring dengan kebutuhan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang adaptif, produktif, dan berdaya saing tinggi.

e. Rendahnya Daya Saing Prestasi Olahraga Kalimantan Selatan

Daya saing prestasi olahraga Kalimantan Selatan pada kejuaraan olahraga multi-event di tingkat nasional masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari penurunan signifikan jumlah perolehan medali, seperti pada PON XIX Jawa Barat (2016), yang berhasil meraih 37 medali dan menduduki peringkat 16 dari 34 provinsi. Sementara pada PON XX Papua (2020), total medali yang diperoleh hanya 25, dan peringkatnya turun menjadi peringkat 22 dari 34 provinsi. Namun, pada PON XXI Aceh-Sumut (2024), terdapat peningkatan yang signifikan dibandingkan dua penyelenggaraan PON sebelumnya. Pada PON 2024, Kalimantan Selatan berhasil mencetak rekor tertinggi dengan total perolehan 56 medali, diiringi dengan peningkatan peringkat ke posisi 15 dari 34 provinsi. Meskipun demikian, secara nasional, Kalimantan Selatan masih belum berhasil menembus 10 besar peringkat, bahkan secara regional, Kalimantan Selatan masih tertinggal jauh dibandingkan dengan provinsi Kalimantan Timur.

f. Rendahnya Budaya Olahraga di Masyarakat Kalimantan Selatan

Budaya olahraga di masyarakat Kalimantan Selatan masih tergolong rendah, yang tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) selama empat tahun terakhir sebagai berikut:

- Pada tahun 2021, Kalimantan Selatan berada di urutan ke-29 dari 34 provinsi.
- Pada tahun 2022, Kalimantan Selatan berada di urutan ke-34 dari 34 provinsi.
- Pada tahun 2023, Kalimantan Selatan berada di urutan ke-30 dari 34 provinsi.
- Pada tahun 2024, Kalimantan Selatan melonjak ke urutan ke-4 dari 36 provinsi.

Capaian IPO Kalimantan Selatan antara tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan posisi yang sangat jauh dari rata-rata nasional dan selalu berada di posisi bawah dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain. Namun, pada tahun 2024, terjadi lonjakan signifikan, di mana Kalimantan Selatan berhasil naik ke posisi ke-4 dari 36 provinsi.

2.8.2 Permasalahan Pokok Pembangunan di Kalimantan Selatan

1. Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Kewilayahan belum optimal dan merata

Mengingat belum meratanya pembangunan Infrastruktur dasar dan perekonomian yang berkelanjutan berbasis wilayah perlu menjadi isu yang harus menjadi tindak lanjut dalam rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan, maka sering kali pembangunan ataupun pengembangan dan peningkatan layanan membutuhkan waktu yang lebih dari 1 tahun pembangunan atau dilaksanakan secara bertahap berdasarkan Prioritas daerah. Kondisi ini menyebabkan wilayah-wilayah di Kalimantan Selatan yang masih tertinggal dalam pemenuhan kuantitas dan kualitas layanan sarana dan prasarana dasar dan wilayah yang mendukung aktivitas penduduk terutama yang mendukung perekonomian.

Pembangunan infrastruktur berkualitas di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kapasitas yang memadai dan merata merupakan faktor penting untuk mendorong konektivitas antar wilayah sehingga dapat mempercepat dan memperluas pembangunan ekonomi. Hingga saat ini, di Provinsi Kalimantan Selatan belum terpenuhi pemerataan infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, air bersih, sanitasi energi, dan kelistrikan di setiap lapisan masyarakat sehingga hasil pembangunan belum dinikmati secara merata

Saat ini peningkatan kebutuhan energi didominasi oleh energi fosil yang tak terbarukan tentunya tak ramah lingkungan. Energi terbarukan pada dasawarsa sekarang lebih dikenal dengan energi alternatif, seperti; tenaga air, panas bumi, mini/mikro hidro, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, bahan bakar nabati, biogas, dan sampah kota.

Konektivitas di Kalimantan Selatan masih menjadi salah satu fokus pembangunan yang masih perlu terus ditingkatkan. Perkembangan daerah seiring bertambahnya penduduk membutuhkan konektivitas yang baik dan menjangkau seluruh wilayah. Selain itu, penyediaan air bersih, limbah domestik, penyediaan listrik dan energi yang terbarukan, perumahan dan permukiman yang layak dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, serta infrastruktur telekomunikasi dan digital belum merata ke seluruh wilayah dan perlu peningkatan kualitas.

2. Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Berbasis Digital belum Optimal

Pembangunan daerah yang optimal akan terealisasi jika tiga unsur pembangunan daerah yakni pemerintah (government), dunia usaha (swasta), dan masyarakat dapat berkolaborasi

dengan baik. Ketiga domain itu harus saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya sehingga terjalin sebuah sinergi dalam rangka mencapai tujuan.

Good governance merupakan tata laksana pemerintahan yang baik dalam organisasi pemerintahan untuk menuju suatu tujuan yang baik serta mengandung pengertian terkait nilai yang menjunjung tinggi keinginan rakyat, kemandirian, aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tugas dalam melayani masyarakat maupun swasta untuk berkembang dari sisi kuantitas maupun kualitasnya di segala bidang. Oleh karenanya, peran ini harus dijalankan dengan rasa amanah dan tanggungjawab yang tinggi agar tugas, pokok, dan fungsi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan amanat UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Pengelolaan atas Kualitas Lingkungan Hidup dan Kebencanaan Masih Belum Optimal

Degradasi lingkungan dapat pula terjadi akibat proses eksploitasi terhadap lahan dan tanah. seperti yang terjadi pada proses penambangan timah. emas. batu bara. dan lain sebagainya. Selain itu pembukaan lahan untuk usaha perekonomian mengakibatkan tutupan lahan semakin berkurang.

Untuk kawasan pesisir pelestarian tanaman mangrove dan terumbu karang harus terus diupayakan untuk menghindari degradasi yang lebih parah akibat kerusakan lingkungan.

Proses pemanfaatan Sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah wajib melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. agar lingkungan hidup tetap menjadi sumber daya dan penunjang hidup bagi rakyat serta makhluk hidup lain.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel. beberapa sungai yang dilakukan pengamatan sebagian besar terkategori sungai dengan pencemaran ringan. dan beberapa sungai tercemar sedang. Rendahnya indeks lingkungan hidup dibandingkan provinsi tetangga juga terlihat dari potensi bencana yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bencana banjir. puting beliung. tanah longsor. bencana kekeringan. kebakaran pemukiman dan kebakaran hutan lahan. Penanganan bencana di Kalimantan Selatan masih terkendala soal kewenangan yang dilaksanakan secara berjenjang yaitu pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab utama dan sekaligus pelaksana penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerahnya. dengan mempertimbangkan jumlah korban manusia. kerusakan prasarana dan sarana. kerugian harta benda. luas areal terkena bencana dan dampak mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat seperti kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan yang menghanguskan lebih

dari 24.000 hektar sepanjang tahun 2023. Luas kawasan terbakar itu meningkat signifikan dibandingkan peristiwa serupa dalam tiga tahun terakhir dengan karhutla tertinggi sepanjang 2023 ada di kota Banjarbaru, kabupaten Tanah Laut, dan Banjar

Permasalahan lingkungan lain yaitu terkait penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Gas rumah kaca merupakan penyumbang terbesar pada perubahan iklim dunia. Gas rumah kaca terjadi karena adanya aktivitas yang menghasilkan karbon dengan sumber utama yang berasal dari aktivitas ekonomi. Kebijakan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon penting untuk diadaptasi dan diterapkan pada rencana pembangunan daerah.

4. Struktur Perekonomian Daerah Masih Didominasi Sektor Primer

Struktur PDRB Kalimantan Selatan menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalan yang mencapai 29,47 persen, kemudian disusul Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 11,55 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 10,95 persen; serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 9,82 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Selatan mencapai 61,79 persen. Berdasarkan sumber pertumbuhan tahun 2024, sumber pertumbuhan tertinggi berasal dari lapangan usaha Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,73 persen; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,60 persen; dan Industri Pengolahan sebesar 0,59 persen.

Pengeluaran konsumsi masyarakat yang cukup rendah juga membuat perkembangan perekonomian mikro tidak tumbuh signifikan. Pengeluaran konsumsi masyarakat menunjukkan daya beli masyarakat di suatu wilayah yang mengindikasikan tinggi rendahnya perekonomian mikro dalam pembangunan daerah. Dalam kajian analisisnya, pengeluaran penduduk akan merepresentasikan pendapatan yang diterima dalam sebulan sehingga akan terlihat tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan secara menyeluruh.

Tingkat pengangguran Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. TPT hasil Sakernas Agustus 2024 sebesar 4,20 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar empat orang penganggur. Pada Agustus 2024 TPT mengalami penurunan sebesar 0,11 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2023. Pada Agustus 2024, TPT laki-laki sebesar 4,55 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,65 persen. TPT laki-laki mengalami penurunan sebesar 0,36 persen poin dan TPT perempuan mengalami peningkatan sebesar 0,31 persen poin jika dibandingkan Agustus 2023. Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, TPT perkotaan (5,51 persen)

cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan (2,91 persen). TPT menurut daerah tempat tinggal dibandingkan kondisi Agustus 2023, untuk perkotaan naik 0,08 persen poin dan perdesaan turun 0,33 persen poin

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) Agustus 2024 mengalami peningkatan. TPAK pada Agustus 2024 sebesar 70,22 persen, naik sebesar 0,46 persen poin dibanding Agustus 2023 dan turun sebesar 0,54 persen poin dibandingkan Agustus 2022. Berdasarkan jenis kelamin, pada Agustus 2024, TPAK laki-laki sebesar 84,71 persen, lebih tinggi dibanding TPAK perempuan yang sebesar 55,52 persen. Dibandingkan Agustus 2023, TPAK laki-laki turun sebesar 0,81 persen poin dan TPAK perempuan naik sebesar 0,36 persen poin.

5. Infrastruktur Dasar

Infrastruktur Dasar yaitu akses terhadap infrastruktur yang lebih luas menunjukkan sebuah pembangunan yang sudah lebih merata juga memudahkan kelompok masyarakat yang relatif tertinggal untuk mengejar laju pertumbuhan ekonomi. Perluasan akses tidak lepas dari ketersediaan infrastruktur dasar yang mapan, dengan indikator Persentase Rumah Tangga dengan Sumber Air Minum Layak, Persentase Rumah Tangga dengan Fasilitas Tempat Buang Air Sendiri

6. Belum Optimalnya Peningkatan Sistem Peringatan Dini, Perencanaan Kontingensi, dan Kedaruratan Bencana yang Prioritas

Provinsi Kalimantan Selatan rentan terhadap bencana alam banjir dan bencana sosial kebakaran sehingga menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur, serta terganggunya kehidupan sosial masyarakat

Bencana ini tidak hanya membawa kerugian ekonomi yang besar dan kerusakan infrastruktur, tetapi juga menghambat pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial dalam hal ini terus berupaya melakukan mitigasi bencana non struktural melalui edukasi masyarakat, serta peningkatan kapasitas tanggap darurat dengan indikator Persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Upaya peningkatan sistem peringatan dini, perencanaan kontingensi, serta penanganan kedaruratan bencana di daerah belum sepenuhnya optimal. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya integrasi lintas sektor, keterbatasan teknologi deteksi dini bencana, serta rendahnya frekuensi pembaruan dan pelaksanaan simulasi rencana kontingensi secara berkala. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan dalam merespons situasi kedaruratan juga masih memerlukan penguatan, baik dari aspek koordinasi maupun sarana dan prasarana

penunjang. Kondisi ini berdampak pada belum maksimalnya efektivitas respons dan penanganan bencana di berbagai wilayah rawan.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang terarah dan berkelanjutan untuk mempercepat penguatan sistem peringatan dini, penyusunan dan pemutakhiran dokumen perencanaan kontingensi, serta peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi kedaruratan bencana sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah.

7. Belum Optimalnya Penanganan Bencana karena Belum Tersedianya Prosedur atau Mekanisme Terkait Kedaruratan dan Pemulihan Pascabencana

Penanganan bencana di daerah masih menghadapi berbagai kendala, khususnya pada tahapan kedaruratan dan pemulihan pascabencana. Salah satu faktor utama yang menyebabkan belum optimalnya penanganan tersebut adalah belum tersedianya prosedur tetap (protap) atau mekanisme yang jelas, terpadu, dan dapat dioperasionalkan secara cepat dan efektif.

Ketiadaan mekanisme yang baku dalam penanganan kedaruratan menyebabkan koordinasi lintas sektor sering kali tidak berjalan maksimal, sehingga berdampak pada keterlambatan respons, distribusi bantuan yang tidak merata, serta kurangnya kejelasan peran dan tanggung jawab antar pihak terkait. Di sisi lain, proses pemulihan pascabencana juga sering terkendala karena belum adanya pedoman teknis dan skema pelaksanaan yang terstruktur, baik dalam aspek rehabilitasi fisik, sosial, ekonomi, maupun psikososial masyarakat terdampak.

8. Kurang optimalnya kualitas Layanan Administrasi Kependudukan per tahun

Penyelenggaraan pelayanan kependudukan diutamakan untuk pemenuhan dokumen Kependudukan, pelaporan peristiwa penting kependudukan pada masyarakat, integrasi dan akurasi data kependudukan serta penggunaan teknologi dan informasi guna menjamin keamanan data kependudukan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap dokumen kependudukan, menyebabkan pemenuhan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, laporan peristiwa kematian, perkawinan dan perceraian tidak terdokumentasi atau tercatat dengan baik. Untuk itu perlu adanya Peningkatan Kualitas Layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat khususnya masyarakat pada kondisi geografis yang susah ditempuh.

9. Kurang Optimalnya Koordinasi, Diseminasi Eksesibilitas Pemanfaatan Data dan Informasi Kependudukan untuk Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mempunyai Nilai Strategis di Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Penanganan Permasalahan Pembangunan

Kebijakan kependudukan semestinya dapat digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan, atau kita kenal sebagai konsep pembangunan berwawasan kependudukan. Langkah awal dalam mewujudkan konsep pembangunan berwawasan kependudukan adalah melaksanakan pembangunan di bidang administrasi kependudukan. Pemerintah telah memfokuskan pembangunan di sektor kependudukan pada bidang penataan administrasi kependudukan dengan kegiatan percepatan pembangunan database kependudukan, penertiban administrasi kependudukan serta pengembangan dan penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

10. Infrastruktur ekonomi belum kuat

Infrastruktur ekonomi mengukur seberapa jauh pertumbuhan ekonomi sudah dapat diakses masyarakat luas. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpaku pada tingginya angka pendapatan, namun juga perlu memperhatikan infrastruktur sebagai daya dukung untuk memperlancar pencapaian target pertumbuhan. Infrastruktur yang dimaksud adalah perangkat dukungan yang dapat memperluas akses bagi masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari tingginya pertumbuhan ekonomi, dengan indikator Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik/PLN, Persentase Penduduk yang Memiliki Telepon Genggam, Persentase Jalan dengan Kondisi Baik dan Sedang.

11. Pertumbuhan Ekonomi Yang Fluktuatif (Ekosda)

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan salah satu syarat mutlak sebuah pembangunan ekonomi yang inklusif. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan aktivitas ekonomi ataupun pemenuhan kebutuhan sehari-hari di masyarakat dengan indikator seperti Pertumbuhan PDRB Riil Perkapita, Share Manufaktur (Industri Pengolahan) terhadap PDRB dan Rasio Kredit Perbankan terhadap PDRB Nominal.

2.8.3 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang dilaksanakan pada urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi tiap Perangkat

Daerah. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di SKPD Lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel sebagai berikut :

Tabel 2.167 Permasalahan Pembangunan berdasarkan Urusan Pemerintahan di SKPD Lingkup Pemprov Kalsel

URUSAN	PERMASALAHAN
PENDIDIKAN	- Belum optimalnya Partisipasi Peserta didik terutama pada Usia 16 s.d. 18 Tahun - Masih ada kecamatan yang belum memiliki sekolah menengah, sehingga anak-anak harus menempuh perjalanan jauh untuk bersekolah - Minimnya akses transportasi publik ke sekolah, terutama bagi anak-anak di daerah terpencil - Minimnya fasilitas pendidikan berbasis teknologi di daerah pedalaman menghambat akses pembelajaran digital - Faktor ekonomi sebagian masyarakat relatif rendah, sehingga masih ada anak usia sekolah bekerja membantu orang tua yang menyebabkan anak putus sekolah - Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan yang terdiri dataran rawa, perbukitan / pegunungan, dan laut (kepulauan) - Masih banyak Penduduk Usia Sekolah yang mengenyam Pendidikan di Pondok Pesantren Salafiah, dimana keberadaan mereka tidak ikut pendidikan kesetaraan sehingga ijazahnya tidak diakui - Sebagian masyarakat masih kurang peduli akan pentingnya pendidikan, sehingga masih ada anak usia sekolah tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya - Kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang belum merata - Masih terdapat guru yang tidak memiliki sertifikat pendidikan - Masih terdapat guru yang belum memenuhi standar kualifikasi akademik (S1/D4) - Minimnya pelatihan dan pengembangan profesi guru secara berkelanjutan - Distribusi guru tidak merata, masih terdapat sekolah yang kekurangan atau kelebihan guru - Masih terdapat guru yang kurang mematahi kedisiplinan - Masih terdapat satuan pendidikan yang kekurangan guru produktif atau tenaga ahli - Kurangnya keterampilan peserta didik yang sesuai dengan kebutuhan industri - Kurikulum belum sepenuhnya selaras dengan kebutuhan industri dan dunia kerja, terutama di era digital dan Revolusi Industri 4.0. - Fasilitas praktik di SMK masih kurang memadai, sehingga siswa tidak mendapatkan pengalaman belajar berbasis industri yang optimal - Reskilling dan upskilling guru produktif belum memadai - Masih minimnya jumlah sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif, menyebabkan anak-anak berkebutuhan khusus sulit mendapatkan akses pendidikan yang setara. - Kurangnya Guru Pendidikan Khusus (GPK) menangani anak berkebutuhan khusus (ABK), baik di sekolah reguler maupun sekolah khusus. - Masih minimnya prasarana sekolah yang ramah disabilitas, seperti akses jalan, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya. - Masih minimnya sarana pembelajaran disabilitas. - Stigma sosial terhadap anak berkebutuhan khusus masih tinggi, menghambat integrasi mereka dalam sistem pendidikan reguler.

URUSAN	PERMASALAHAN
	- Minimnya pendampingan psikologis dan layanan terapi untuk siswa berkebutuhan khusus di daerah, baik di sekolah umum maupun sekolah luar biasa (SLB) - Masih terdapat sekolah dengan kondisi bangunan tidak sesuai dengan standar. - Masih terdapat sekolah yang tidak memiliki jumlah prasarana sesuai dengan standar - Masih terdapat sekolah yang tidak memiliki sarana pembelajaran sesuai dengan standar - Fasilitas teknologi pendidikan masih terbatas, terutama akses internet yang tidak merata - Belum optimalnya Literasi dan Numerasi peserta didik - Kurikulum belum sepenuhnya menyesuaikan dengan potensi unggulan daerah - Belum optimalnya pembelajaran yang mengadopsi pendekatan berbasis proyek (project-based learning) dan problem-solving. - Belum optimalnya integrasi teknologi dalam pembelajaran, seperti pembelajaran berbasis digital. - Masih terdapat kasus perundungan (Bullying) dan kekerasan di sekolah - Pengaruh Negatif Media Sosial terhadap Karakter Peserta Didik - Minimnya integrasi pendidikan karakter dan keterampilan abad 21 seperti kreativitas, kolaborasi, komunikasi, dan berpikir kritis.
KESEHATAN	- Masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI); - Angka Kematian Bayi yang cenderung meningkat - Masih tingginya Prevalensi Stunting; - Masih cukup tingginya Angka Kesakitan; - Transisi Epidemiologi dari dominasi Penyakit Menular ke Penyakit Tidak Menular akibat perubahan Demografi - Ancaman Penyakit Menular yang terus berkembang, termasuk resistensi antimikroba dan munculnya penyakit baru akibat perubahan lingkungan - Masih tingginya kasus Penyakit Tidak Menular; - Peningkatan Kasus Kesehatan Jiwa; - Masih tingginya kasus penyakit tular Vektor dan Zoonotik; - Masih cukup tingginya Prevalensi Balita Gizi Kurang; - Capaian STBM di Kab/Kota yang masih rendah; - Capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDK) masih rendah; - Masih belum terpenuhinya Tenaga Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit sesuai Standart; - Pemenuhan kompetensi Tenaga Kesehatan yang belum optimal; - Distribusi Tenaga Kesehatan yang belum merata, yang mengakibatkan disparitas jumlah Tenaga Kesehatan di Perkotaan dan Pedesaan. - Ketersediaan Obat dan Vaksin essensial yang belum terpenuhi secara optimal di Puskesmas; - Capaian Puskesmas yang desa/kelurahannya menerapkan 5 Cluster Germas masih rendah; - Capaian penerapan Cluster Germas di Kab/Kota yang masih rendah; - Capaian UKBM Aktif yang masih rendah; - Rendahnya kesadaran Masyarakat terhadap pencegahan penyakit dan pentingnya pola hidup sehat; - Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi untuk edukasi dan promosi kesehatan berbasis komunitas
PEKERJAAN UMUM DAN	Bina Marga - Banyaknya kondisi jalan yang rusak dan belum memenuhi standar

URUSAN	PERMASALAHAN
PENATAAN RUANG	- Tingkat kerusakan jalan dan jembatan lebih cepat dibanding laju pembangunan jalan. - Masih kurangnya tenaga teknis bidang pekerjaan umum. - Masih kurangnya aksesibilitas jalan pada ruas ruas jalan provinsi - Masih belum memadainya akses jalan untuk rencana pengembangan Kawasan Industri. - Rendahnya akses jalan dan jembatan serta penyediaan infrastruktur penunjang pada wilayah perbatasan. Sumber Daya Air - Pemeliharaan dan Perbaikan Infrastruktur pengendali banjir - Perencanaan drainase yang masih perlu direncanakan dan dibangun berdasarkan teknis kebutuhan pengendalian banjir - Masih belum optimalnya kondisi daerah irigasi permukaan dan irigasi Rawa - Pengendalian abrasi sungai dan laut kewenangan WS Cengal Batulicin Cipta Karya - Belum optimalnya cakupan layanan air minum perpipaan - Masih rendahnya akses terhadap sanitasi aman wilayah perkotaan dan akses layak untuk pedesaan - Banyaknya bangunan yang belum memenuhi standar - Penataan kawasan yang belum optimal - Pengembangan dan Pemeliharaan Berkelanjutan terhadap Sistem Pengelolaan Air Minum pada Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut) untuk mewujudkan penyediaan kebutuhan air baku/air bersih yang aman, handal dan berkelanjutan. Pertanahan - Belum optimalnya pelaksanaan inventarisasi dan sertifikasi lahan/tanah milik pemerintah daerah karena masih banyak lahan / tanah milik Pemerintah Daerah yang belum terserifikasi sesuai dengan data yang ada (KIB A) - Masih sering terjadinya gugatan masyarakat terhadap lahan/tanah milik Pemerintah Daerah terutama yang riwayat pengadaannya sudah sangat lama karena kurangnya pengamanan terhadap tanah/lahan milik Pemerintah Daerah baik secara administrasi ataupun teknis Penataan Ruang - Belum memadainya infrastruktur konektivitas ke wilayah IKN - Ketimpangan pembangunan antarwilayah. - Belum optimalnya kemacetan, ketimpangan wilayah dan tata ruang - Degradasi kawasan hutan akibat alih fungsi lahan dan aktivitas tambang. - Infrastruktur pelabuhan dan konektivitas antarwilayah jalur laut belum optimal. - Kesiapan Kabupaten/Kota sebagai kawasan metropolitan dalam penyediaan sarana prasarana dengan skala metropolitan dan penyediaan transportasi yang terintegrasi
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	- Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (Backlog Rumah) yang masih tinggi - Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan penanganan rumah di daerah rawan bencana dan program pemerintah yang belum optimal. - Masih rendahnya penanganan kawasan kumuh termasuk RTLH dalam kawasan kumuh. - Masih luasnya kawasan permukiman kumuh di Kalimantan Selatan sehingga perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru

URUSAN	PERMASALAHAN
	- Belum optimalnya penanganan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), yang salah satu penyebab karena kurangnya kolaborasi antar perangkat daerah terkait PSU untuk mewujudkan permukiman yang layak. - Pelayanan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) yang tidak memenuhi standar, berpotensi menimbulkan penurunan kualitas lingkungan permukiman - Masih rendahnya akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak
KETENTERAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT	- Masih tingginya pelanggaran K3; - Lambatnya pelayanan tindak lanjut (respon time rate) dari pengaduan masyarakat; - Masih tingginya indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan; - Masih rendahnya kapasitas penanganan risiko bencana; - Rendahnya literasi masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana;
SOSIAL	- Kurangnya sinergitas dan koordinasi dari berbagai pihak untuk menangani kompleksitas permasalahan PPKS. - Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana baik dalam penampungan maupun perawatan dan rehabilitasi medik. untuk SPM pelayanan PPKS dalam panti. - Belum maksimalnya penanganan rehabilitasi sosial; - Belum maksimalnya peningkatan SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) - Masih belum optimalnya penanganan bencana - Belum optimalnya Updating Data Kemiskinan
TENAGA KERJA	- Ketidakseimbangan antara penyediaan lapangan pekerjaan dengan kebutuhan masyarakat terhadap lapangan kerja sehingga jumlah penganggur relatif besar; - Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan keahlian sumber daya manusia yang ada; - Wirausaha baru kurang berkembang dan belum adanya tempat atau wadah sebagai sarana penampung hasil produk kewirausahaan; - Rendahnya kualitas angkatan kerja yang ditandai oleh tingkat pendidikan formal angkatan kerja provinsi kalimantan selatan didominasi oleh tamatan (maksimal) sekolah dasar. termasuk di dalamnya mereka yang belum tamat dan tidak pernah sekolah; - Rendahnya perlindungan dan kesejahteraan pekerja yang hingga saat ini pada umumnya dirasakan masih jauh dari memadai; - Sarana dan prasarana belum mendukung untuk melaksanakan pelatihan yang sesuai dengan perkembangan jaman maupun teknologi; - Dengan adanya revolusi industri 4.0 maka dapat tercipta pengangguran yang dipengaruhi oleh melebarnya ketimpangan ekonomi karena peran digitalisasi dapat menggeser peran konvensional dalam pasar;
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	- Belum optimalnya Pengarusutamaan Gender; - Belum optimalnya pelayanan perlindungan perempuan; - Belum optimalnya upaya perlindungan anak; - Masih tingginya kasus perkawinan anak;
PANGAN	- Laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya; - Kelembagaan pemasaran hasil-hasil pangan belum berperan optimal sebagai penyangga kestabilan distribusi dan harga pangan. khususnya di wilayah-wilayah terpencil; - Terbatasnya kemampuan dalam mengantisipasi dinamika permasalahan ketahanan pangan;

URUSAN	PERMASALAHAN
PERTANAHAN	- Masih rendahnya jumlah lahan bersertifikat. sehingga penanganan masalah pertanahan membutuhkan peningkatan koordinasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). - Masih minimnya data layanan untuk urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan provinsi - Masih lambatnya proses penyelesaian pembebasan dan kasus pertanahan;
LINGKUNGAN HIDUP	- Rendahnya kualitas lingkungan hidup - Belum maksimalnya pengelolaan persampahan dan limbah bahan berbahaya dan beracun (LB3) - Dampak perubahan iklim terhadap kondisi lingkungan. - Masih banyaknya alih fungsi lahan. - Belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung ekonomi hijau
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	- Belum maksimalnya cakupan akta kematian; - Belum maksimalnya cakupan akta perkawinan. - Belum maksimalnya cakupan akta kelahiran; - Masih terdapat penduduk usia dewasa yang belum memiliki KTP; - Masih tingginya pasangan pernikahan yang tidak memiliki akte nikah;
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	- Belum optimalnya pengelolaan lembaga ekonomi perdesaan (Manajemen Usaha); - Belum optimalnya peran dan fungsi lembaga kemasyarakatan; - Masih terdapat desa dengan status desa tertinggal dan sangat tertinggal; - Rendahnya indeks desa membangun. - Masih lemahnya kualitas SDM masyarakat di pedesaan dalam pengelolaan Bumdes - Masih kurangnya pembinaan terhadap Bumdes yang ada terutama untuk pemanfaatan teknologi dalam pengembangan usaha di pedesaan
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	- Belum maksimalnya Penerapan Grand Desain Pembangunan Kependudukan; - Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang belum ber KB; - Masih tingginya Pasangan Usia Subur yang putus ber KB; - Masih banyak ditemukan usia kawin pertama di bawah rata-rata usia ideal (usia ≤ 21 tahun) pada Pasangan Usia Subur (PUS). sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. - Kurangnya pelaksanaan komunikasi. informasi dan edukasi (KIE) program kependudukan keluarga berencana yang ditujukan pada program pembangunan keluarga (KKBP) untuk disesuaikan dengan program lini bawah dalam menekan laju pertumbuhan penduduk.
PERHUBUNGAN	- Belum optimalnya upaya dalam pelaksanaan peningkatan keselamatan berlalu lintas - Perlunya pengembangan Transit Oriented Development (TOD) dalam pengembangan wilayah - Belum optimalnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal sungai diakibatkan tertutupnya alur pelayaran sungai Martapura Kab Banjar, Danau Panggang, Paminggir Kab HSU karena penumpukan sampah limbah rumah tangga, batang pohon maupun tumbuhan enceng gondok dll. - Belum mengoptimalkan kinerja pelayanan Terminal Tipe B sehingga perlu dilakukan penataan terhadap fasilitas utama dan penunjang pada Gedung Terminal Tipe B
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	- Masih kurangnya sarana dan prasarana telekomunikasi; - Belum maksimalnya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). - Belum maksimalnya penyediaan informasi dan komunikasi public oleh pemerintah daerah.

URUSAN	PERMASALAHAN
	- Terbatasnya infrastruktur akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah yang menghubungkan antar SKPD. - Belum maksimalnya penerapan berbagi pakai data di SKPD - Masih terdapat area blankspot di Kalimantan Selatan
KOPERASI. USAHA KECIL. DAN MENENGAH	- Masih rendahnya kualitas kinerja kelembagaan koperasi; - Masih banyaknya koperasi tidak aktif; - Belum optimalnya kinerja pelayanan kepada masyarakat dari aparatur koperasi; - Kurangnya daya saing sumber daya manusia pada KUKM - Rendahnya daya saing produk UKM dalam menghadapi pasar domestik dan global - Masih kurangnya KUKM dalam menghadapi persaingan usaha - Masih terbatasnya akses pembiayaan bagi KUKM untuk mengembangkan usahanya - Masih terbatasnya pengetahuan dan keterampilan dalam pemasaran KUKM untuk memasarkan produk secara efektif
PENANAMAN MODAL	- Kurangnya Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN; - Belum optimalnya Promosi Investasi yang berkelanjutan; - Belum adanya Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha; - Beberapa kabupaten/kota tidak tercapai target investasinya (kesulitan menjual potensi investasi yang ada) karena tidak semua kabupaten/kota memiliki peta potensi investasi
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	- Masih rendahnya jumlah pemuda yang berperan aktif di masyarakat - Masih rendahnya jumlah pemuda yang mempunyai kapasitas kepemimpinan - Masih terbatasnya jumlah pemuda yang berwirausaha - Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri - Cenderung menurunnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan - SDM dengan kompetensi dan pengalaman professional bidang kepemudaan masih sangat terbatas. - Masih kurangnya partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. - Masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam mengikuti organisasi kepramukaan
STATISTIK	- Masih rendahnya SDM Perstatistikan; - Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik; - Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;
PERSANDIAN	- Masih rendahnya SDM Perstatistikan; - Masih kurangnya sarana dan prasarana urusan statistik; - Belum Optimalnya pengelolaan statistik sectoral;
KEBUDAYAAN	- Minimnya Integrasi Budaya Lokal dalam Kurikulum Pendidikan. - Masih rendahnya Apresiasi terhadap Karya Budaya dan Kearifan Lokal - Berkurangnya Penggunaan Bahasa Daerah dalam Kehidupan Sehari-hari - Berkurangnya Tradisi dan Adat dalam Kehidupan Sosial - Pengaruh Budaya Asing yang Lebih Dominan dibandingkan budaya lokal - Minimnya Fasilitas dan Sarana untuk Pergelaran Kebudayaan - Rendahnya frekuensi dan skala event budaya di Kalimantan Selatan sebagai ajang seniman menampilkan kemampuan diri - Kurangnya Apresiasi dan Dukungan terhadap Seniman Lokal - Minimnya Peran Sektor Swasta dalam Mendukung Pergelaran Seni dan Budaya - Masih rendahnya Pelindungan terhadap Warisan Budaya Lokal

URUSAN	PERMASALAHAN
	- Menurunnya Partisipasi Generasi Muda dalam Tradisi Lokal - Masih kurangnya Revitalisasi dan Pengembangan Tradisi Budaya
PERPUSTAKAAN	- Belum optimalnya perpustakaan digital; - Rendahnya minat masyarakat Kalimantan Selatan untuk melakukan aktivitas membaca - Masih Kurangnya Koleksi Bahan Pustaka yang terbaru untuk Layanan Umum. Referensi. Deposit. Layanan Anak. Layanan Terpadu Perpustakaan Sekolah (LTPS). - Belum optimalnya kegiatan pembinaan perpustakaan dan promosi perpustakaan. - Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM Perpustakaan
KEARSIPAN	- Depo arsip belum berjalan optimal; - Kurangnya pemahaman ASN terhadap kearsipan; - Belum lengkapnya regulasi daerah tentang pengelolaan arsip. - Belum terlaksananya pengelolaan kearsipan secara handal dan komprehensif berbasis TIK - Rendahnya komitmen pencipta Kearsipan skala Provinsi dalam menerapkan Norma. Standar. Prosedur dan Kriteria (NSPK) Ke Kearsipan.
PARIWISATA	- Mapping destinasi belum dilakukan (inventarisasi dan sarana prasarana dimiliki) yang hasil akhirnya adalah penyusunan pola perjalanan dengan berbagai pilihan: wisata budaya. wisata belanja. wisata alam. wisata minat khusus. wisata edukasi. agro dan ekowisata - Koordinasi lintas sektoral (lembaga) belum menyatu Pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif membutuhkan koordinasi dan kerja bersama-sama pihak-pihak terkait. - Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dunia pariwisata dan dibandingkan kecepatan pemilik modal menginvestasikan modal dalam industri pariwisata - Keterbatasan dana dan fokus kabupaten/kota dalam mengembangkan objek-objek wisatanya menjadi objek. - Kapasitas Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang berkualitas masih belum memadai
KELAUTAN DAN PERIKANAN	- Belum optimalnya Pengembangan Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya - Belum dimanfaatkannya secara optimal potensi sumber daya ikan di laut di wilayah > 5 mil laut. - Terbatasnya pembangunan dan pengembangan prasarana perikanan tangkap di titik sentra penangkapan ikan nelayan. khususnya dalam rangka mendukung penerapan sistem rantai dingin terhadap hasil tangkapan nelayan - Belum berkembangnya kelembagaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan yang mandiri dan berbadan hukum - Masih terbatasnya upaya pelestarian terhadap stock sumber daya ikan lokal. sehingga perlu adanya upaya pelepasliaran (restocking) di perairan umum - Pada umumnya usaha pembudidaya ikan masih menerapkan sistem tradisional dan/atau sistem semi-intensif - Masih besarnya ketergantungan pembudidaya ikan terhadap pakan ikan pabrikan yang menyebabkan tingginya biaya produksi budidaya ikan hingga 60 % khusus untuk memenuhi kebutuhan pakan ikan - Belum berkembangnya pengembangan usaha budidaya ikan lokal sebagai komoditas perikanan khas daerah

URUSAN	PERMASALAHAN
	- Pada umumnya para pembudidaya ikan masih belum memahami tentang ketentuan dan penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) - Masih terjadinya serangan hama dan penyakit ikan/udang di kawasan sentra pembudidayaan ikan - Belum Optimalnya Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan - Kesulitan pada akses permodalan usaha merupakan salah satu faktor yang membuat UMKM sektor kelautan dan perikanan terbatas pengembangannya dalam upaya peningkatan produktifitas dan kesejahteraannya - Masih terbatasnya penyebarluasan informasi tentang potensi, peluang usaha, dan pengembangan investasi sektor kelautan dan perikanan. - Masih terbatasnya penyebarluasan informasi dan penguatan edukasi kepada masyarakat tentang ikan dan manfaatnya bagi kesehatan, kekuatan, dan kecerdasan - Masih terjadinya kegiatan illegal fishing di perairan umum maupun perairan laut di Kalimantan Selatan - Terbatasnya fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki POKMASWAS dan aparat pengawas dalam mendukung pelaksanaan operasional pengendalian sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan - Pelaku usaha budidaya ikan air payau dan laut di Kalimantan Selatan masih rendah. - Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kalimantan Selatan masih rendah. - Produk perikanan banyak yang belum terpantau - Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif - Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir laut - Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil - Masih banyaknya pelaku usaha yang belum patuh terhadap perizinan
PERTANIAN	- Belum optimalnya produksi tanaman pangan dan hortikultura - Belum optimalnya kelembagaan penyuluhan dan petani - Menurunnya daya dukung sumber daya lahan dan air, serta dampak perubahan iklim - Belum optimalnya prasarana dan sarana pertanian - Masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian - Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi pasar - Masih rendahnya perlindungan terhadap petani dalam upaya peningkatan kesejahteraan petani yang berbasis korporasi petani - Sistem perbenihan tanaman pangan dan hortikultura masih belum tertata dengan baik - Masih kurang efektifnya pembangunan perkebunan ramah lingkungan - Belum optimalnya Integrasi Sawit – Sapi - Belum optimalnya pengembangan Kawasan perkebunan/peternakan berbasis korporasi pekebun/peternak - Pemotongan ternak sapi betina produktif cukup tinggi - Pengeluaran Ternak dan Hasil Ternak Keluar Kalimantan Selatan Cukup Banyak namun belum memberikan kontribusi yang memadai terhadap PAD. - Penyakit Hewan yang mempengaruhi pembangunan peternakan - Cenderung meningkatnya harga pakan dan bahan pakan ternak unggas - Jaminan Keamanan Pangan yang ASUH masih rendah
KEHUTANAN	- Masih luasnya lahan kritis - Masih maraknya aktifitas perambahan dan perusakan hutan

URUSAN	PERMASALAHAN
	- Masih kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan berbasis Perhutanan Sosial; - Terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam pengelolaan hutan - Belum maksimalnya penerimaan Retribusi dan PNBP sektor kehutanan karena sedikitnya izin usaha pemanfaatan hutan.
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	- Menurunnya cadangan air tanah akibat pengembalian air tanah yang berlebihan atau tidak sesuai kemampuan daya dukung air tanah serta pemanfaatan tata ruang pada zona imbuhan air tanah. - Kurangnya pengelolaan terhadap bukaan lahan tambang sehingga meninggalkan lubang bekas tambang (void) yang tidak/belum direklamasi. Salah satunya akibat pertimbangan tanpa izin yang masih marak sehingga mengakibatkan kerusakan lingkungan. - Belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dalam hal peningkatan bauran energi untuk pemenuhan kebutuhan energi. - Kurangnya pembangunan infrastruktur ketegalistrikan di daerah terpencil yang lokasinya sulit terjangkau dan masih banyaknya rumah tangga miskin yang belum mendapatkan sambungan listrik.
PERDAGANGAN	- Berlaku peraturan tentang larangan ekspor produk tambang menuntut adanya pergerakan investasi secara cepat dalam rangka hilirisasi produk – produk hasil tambang ; - Maraknya barang beredar di pasaran yang belum memenuhi ketentuan standar dapat mengancam kesehatan dan keselamatan konsumen terutama produk elektronik dan mainan anak; - Peningkatan penggunaan dan cinta produk dalam negeri dalam rangka memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia sebagai potensi pasar yang besar ; - Masih terjadinya perang dagang antara Amerika dan Cina yang mengakibatkan penurunan produk ekspor Indonesia dan ini sudah barang tentu pasti berimbas kepada pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ; - Berlakunya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai 31 Desember 2015 menyebabkan terjadinya beberapa deregulasi perdagangan luar negeri terutama menyangkut pembebasan bea masuk untuk barang – barang dari ASEAN selain itu di dalam 2015 terjadi deregulasi beberapa barang ekspor yang merupakan produk unggulan ekspor Kalimantan Selatan seperti batu bara, produk hasil hutan dan produk minyak sawit (CPO);
PERINDUSTRIAN	- Pemasaran yang terbatas. - Lemahnya struktur industri. - Terbatasnya IKM yang memiliki izin usaha industri. - Masih rendahnya kualitas SDM industri. - Belum tersedianya lahan clear dan clean untuk sentra IKM dan kawasan industri yang mendukung penumbuhan dan pengembangan industri. - Belum tersedianya data dan informasi industri yang memadai (valid dan up to date) untuk menarik investasi dan pengembangan industri. - Lambatnya investasi di sektor hilir industri. - Belum optimalnya pemanfaatan SDA lokal menjadi produk unggulan. - Masih rendahnya produktivitas industri. - Kurangnya jumlah wirausaha industri.
TRANSMIGRASI	- Terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria 2 C dan 3 terbatasnya lahan yang memenuhi kriteria clean dan clear - Rendahnya aspek legalitas dalam status kepemilikan lahan transmigrasi - Kurang optimalnya kerjasama dengan daerah penerima peserta transmigrasi

URUSAN	PERMASALAHAN
	- Belum optimalnya pengelolaan potensi di kawasan transmigrasi Kurangnya koordinasi dengan skpd lain dalam hal peningkatan pemberdayaan transmigrasi.



RKPD 2026

Provinsi Kalimantan Selatan

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah menjelaskan tentang kondisi perekonomian dan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kerangka Ekonomi Daerah memuat kondisi ekonomi tahun lalu, serta perkiraan/proyeksi tahun berjalan dan yang akan datang, yaitu tahun 2024 dan 2025. Kerangka ekonomi ini antara lain mencakup indikator-indikator yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah beserta arah kebijakan pemerintah daerah untuk pembangunan perekonomiannya.

Kerangka Keuangan Daerah memuat kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian, meliputi sumber-sumber pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah adalah suatu rencana strategis yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mengembangkan perekonomian daerah. Rencana ini mencakup arah kebijakan ekonomi daerah, kondisi ekonomi daerah, dan kerangka pendanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerangka ekonomi daerah meliputi:

Faktor Eksternal :

- ✓ Kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi
- ✓ Kebijakan pemerintah provinsi
- ✓ Perkembangan perekonomian daerah sekitar
- ✓ Dinamika geopolitik global
- ✓ Perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama seperti China dan India
- ✓ Transisi global menuju energi hijau

Faktor Internal :

- ✓ Kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian
- ✓ Upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi
- ✓ Penyediaan infrastruktur pertanian
- ✓ Penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi UMKM dan koperasi

- ✓ Perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar
- ✓ Pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dirumuskan berdasarkan pencapaian pembangunan ekonomi, evaluasi capaian target tahun-tahun sebelumnya, serta prospek dan tantangan perekonomian di masa yang akan datang. Beberapa poin penting dalam arah kebijakan ini meliputi:

- ✕ Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2025 berada dalam kisaran 4,4% hingga 5,2% year-on-year (yoy).
- ✕ Lima prioritas pembangunan 2025, antara lain peningkatan industri, sumber daya manusia (SDM), infrastruktur dasar, serta pengelolaan lingkungan hidup untuk ketahanan bencana.
- ✕ Fokus pada pengembangan sektor-sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kalsel, meliputi Pertambangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi.
- ✕ Strategi pengembangan ekonomi hijau melalui pariwisata berbasis Meratus Geopark, hilirisasi sumber daya alam (SDA), dan penciptaan sumber energi alternatif.
- ✕ Penguatan sinergi kebijakan antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan seluruh pemangku kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
- ✕ Peningkatan ketahanan ekonomi melalui pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum.

Dalam konteks rantai pasok global dan regional, Provinsi Kalimantan Selatan perlu memperhatikan potensi gangguan pada rantai pasok internasional akibat perubahan dinamika geopolitik global. Hal ini penting mengingat peran Kalimantan Selatan sebagai salah satu produsen komoditas unggulan seperti batu bara, yang permintaannya dapat terpengaruh oleh perlambatan ekonomi negara mitra dagang utama dan transisi global menuju energi hijau.

3.2 Kondisi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2024

Kondisi pembangunan ekonomi daerah Kalimantan Selatan membahas gambaran mengenai capaian kerangka ekonomi makro daerah tahun-tahun sebelumnya beserta proyeksinya untuk tahun 2025 dan 2026. Gambaran kerangka ekonomi makro daerah ini terdiri dari:

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

2. Share Perekonomian (Struktur Ekonomi Daerah)
3. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
4. PDRB Per Kapita
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
6. Indeks Modal Manusia (IMM)
7. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
8. Tingkat Kemiskinan
9. Gini Rasio
10. GRK
11. Inflasi
12. Incremental Capital Output Rasio (ICOR)
13. Indeks Williamson
14. Ekonomi Berkelanjutan



3.2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah nilai keseluruhan semua barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Ini mencakup jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. PDRB dapat dihitung menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan.

Pada sub bab ini disampaikan PDRB Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2022, 2023, dan 2024. PDRB tersebut disajikan berdasarkan harga berlaku dan harga konstan 2010, serta menurut lapangan usaha dan pengeluaran. Besar Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan Tahun 2023 mencapai Rp 269,29 triliun pada harga berlaku dan Rp 149,23 triliun pada harga konstan tahun 2010. Sedangkan untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan tahun 2024 mencapai Rp Rp 286,81 triliun pada harga berlaku dan Rp Rp 156,75 triliun pada harga konstan tahun 2010. Rincian PDRB menurut lapangan usaha disampaikan pada Tabel 3.1, dan Tabel 3.2, berikut.

Tabel 3.1 PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha ADHB dan ADHK Tahun 2022 - 2024 (Milyar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILYAR RUPIAH)			ATAS DASAR HARGA KONSTAN (MILYAR RUPIAH)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	28.635,33	30.630,76	33.119,22	18.884,18	19.510,14	20.350,74

LAPANGAN USAHA	ATAS DASAR HARGA BERLAKU (MILYAR RUPIAH)			ATAS DASAR HARGA KONSTAN (MILYAR RUPIAH)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
B. Pertambangan dan Penggalian	80.520,10	82.991,81	84.512,20	35.088,49	36.171,09	37.270,51
C. Industri Pengolahan	28.615,17	28.935,92	31.410,22	17.850,03	18.387,03	19.282,69
D. Pengadaan Listrik dan Gas	320,96	350,72	379,19786	184,86	199,86	213,35519
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	912,8	985,41	1061,2472	630,96	660,54	691,98345
F. Konstruksi	17.267,78	18.847,73	20.321,36	10.812,57	11.469,97	12.150,43
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22.758,70	26.026,96	28.179,44	13.202,32	14.017,15	14.908,08
H. Transportasi dan Pergudangan	15.764,97	19.253,00	20.816,06	9.298,00	10.344,24	10.934,10
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.506,71	5.003,67	5.534,47	2.966,30	3.241,51	3.503,16
J. Informasi dan Komunikasi	8.298,94	8.936,22	9.656,89	6.319,21	6.734,37	7.187,32
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	7.461,55	8.261,30	8.924,72	4.384,93	4.762,90	5.099,81
L. Real Estate	5.072,21	5.523,69	5.992,36	3.513,45	3.735,36	3.948,94
M,N. Jasa Perusahaan	1.543,08	1.746,13	1.923,83	898,3	966,41	1032,7912
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12.024,99	12.864,24	14.276,42	7.182,47	7.391,99	7.905,77
P. Jasa Pendidikan	9.932,27	10.537,98	11.513,29	6.429,09	6.656,62	6.985,64
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.864,99	5.297,09	5.756,06	3.047,17	3.220,53	3.399,82
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.755,99	3.103,81	3.441,88	1.646,94	1.761,26	1.891,78
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)	251.256,54	269.296,45	286.818,87	142.339,28	149.230,96	149.230,96
Jasa (H - U)	72.225,70	80.527,13	87.835,98	45.685,86	48.815,19	51.889,14
PDRB Non Pertambangan (PDRB - B. Pertambangan dan Penggalian)	170.736,44	186.304,64	202.306,66	107.250,79	113.059,87	111.960,45

Sumber: BPS Kalsel, diolah (2025)

1. Pertumbuhan Ekonomi Secara Keseluruhan :

PDRB meningkat dari Rp251.256,54 miliar (2022) menjadi Rp269.296,45 miliar (2023) dan Rp286.818,17 miliar (2024). Pertumbuhan ini mencerminkan kenaikan nilai nominal ekonomi yang stabil, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sekitar 7%.

Peningkatan riil terlihat dari Rp142.339,28 miliar (2022) menjadi Rp149.230,36 miliar (2023). serta pada 2024, pertumbuhan meningkat menjadi Rp156.756,92 miliar, menunjukkan adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi riil.

2. Analisis Berdasarkan Lapangan Usaha :

a. Sektor Utama Penyumbang PDRB :

i. Pertambangan dan Penggalian :

Sektor ini mendominasi kontribusi PDRB dengan nilai ADHB sebesar Rp80.520,10 miliar (2022), Rp82.991,81 miliar (2023), dan Rp84.512,50 miliar (2024). Secara riil (ADHK), sektor ini

tumbuh stabil dari Rp35.088,49 miliar (2022) menjadi Rp37.270,51 miliar (2024). Ketergantungan pada sektor ini tetap tinggi meskipun ada upaya diversifikasi.

ii. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor :

Kontribusi sektor ini terus meningkat secara nominal: Rp22.758,70 miliar (2022), Rp26.026,96 miliar (2023), hingga Rp28.179,44 miliar (2024). Secara riil juga mengalami pertumbuhan dari Rp13.020,32 miliar menjadi Rp14.908,04 miliar dalam periode yang sama. Sektor ini menunjukkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi lokal.

iii. Industri Pengolahan :

Menjadi salah satu sektor utama dengan nilai ADHB sebesar Rp28.615,17 miliar pada 2022 yang meningkat menjadi Rp31.410,22 miliar pada 2024. Secara riil juga tumbuh dari Rp17.850,03 miliar menjadi Rp19.282,15 miliar. Sektor ini berpotensi besar untuk mendukung industrialisasi daerah.

b. Sektor Jasa yang Berkembang :

i. Informasi dan Komunikasi :

Pertumbuhan signifikan terlihat pada sektor ini dengan nilai ADHB naik dari Rp7.461,55 miliar (2022) menjadi Rp8.924,72 miliar (2024). Secara riil juga meningkat dari Rp4.384,93 miliar ke Rp5.099,81 miliar. Hal ini mencerminkan peningkatan digitalisasi di Kalimantan Selatan.

ii. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum :

Sektor ini tumbuh pesat dengan nilai ADHB naik dari Rp 4.506,71 miliar (2022) menjadi Rp 5.534,47 miliar (2024). Secara riil juga meningkat dari Rp 2.966,30 miliar ke Rp 3.503,16 miliar. Pertumbuhan sektor ini menunjukkan potensi pariwisata dan layanan lokal.

c. PDRB Non-Pertambangan :

i. PDRB Non-Pertambangan mencerminkan kontribusi sektor selain pertambangan.

Nilai ADHB meningkat dari Rp170.736,44 miliar (2022) menjadi Rp186.304,64 miliar (2023) dan mencapai Rp202.306,66 miliar pada 2024. Secara riil (ADHK), terjadi peningkatan dari Rp107.250,79 miliar menjadi Rp113.059,87 miliar pada 2023 tetapi sedikit menurun ke Rp111.960,14 miliar pada 2024. Penurunan kecil di ADHK 2024 menunjukkan tantangan diversifikasi ekonomi meskipun kontribusi sektor non-pertambangan cukup besar.

Ekonomi Kalimantan Selatan tumbuh secara nominal setiap tahun (ADHB), tetapi pertumbuhan riil (ADHK) menunjukkan perlambatan pada tahun 2024. Sektor pertambangan

tetap mendominasi ekonomi daerah meskipun ada peningkatan kontribusi dari sektor jasa seperti perdagangan serta informasi dan komunikasi. Upaya diversifikasi melalui pengembangan sektor non-pertambangan perlu terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam. Potensi besar terlihat di sektor jasa khususnya pariwisata dan digitalisasi yang dapat menjadi motor baru pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan. Data ini memberikan gambaran bahwa Kalimantan Selatan memiliki peluang besar untuk memperkuat struktur ekonominya melalui diversifikasi sektor unggulan.

Tabel 3.2 PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran ADHB dan ADHK Tahun 2022 - 2024 (Milyar Rupiah)

PENGELUARAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU			ATAS DASAR HARGA KONSTAN		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	103.373,70	113.382,82	122.633,78	65.961,81	69.278,91	72.996,12
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.193,86	2.509,41	2.928,14	1.324,75	1.434,92	1.630,27
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	24.626,55	26.719,34	30.031,82	13.819,54	14.473,75	15.182,27
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	51.624,13	56.747,64	61.221,59	31.912,83	33.738,94	35.259,02
Perubahan Inventori	-859,82	-1.582,69	0,00	-550,67	-971,81	0
Ekspor Barang dan Jasa	225.887,72	212.240,43	205.494,54	119.484,26	128.461,60	134.821,35
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	155.589,61	140.720,48	134.799,85	89.613,25	97.185,35	102.715,03
PDRB (TOTAL)	251.256,54	269.296,45	286.818,87	142.339,28	149.230,96	156.756,94

Sumber: BPS Kalsel, diolah (2025)

Data PDRB Kalimantan Selatan berdasarkan sisi pengeluaran menunjukkan perkembangan ekonomi daerah dari tahun 2022 hingga 2024, baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan. Secara umum, PDRB mencerminkan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah tersebut selama periode tertentu.

Pada tahun 2022, total PDRB Kalimantan Selatan mencapai Rp251.256,54 miliar. Komponen terbesar berasal dari Ekspor Barang dan Jasa dengan nilai Rp225.887,72 miliar, menunjukkan dominasi sektor ekspor dalam struktur ekonomi daerah. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga juga signifikan, sebesar Rp103.373,70 miliar, mencerminkan peran konsumsi masyarakat dalam perekonomian.

Pada tahun 2023, total PDRB meningkat menjadi Rp269.296,45 miliar. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan di hampir semua komponen pengeluaran, terutama Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang naik menjadi Rp113.382,82 miliar dan Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) yang mencapai Rp56.747,64 miliar. Namun, nilai ekspor mengalami penurunan menjadi Rp212.240,43 miliar.

Di tahun 2024, total PDRB terus meningkat menjadi Rp286.818,87 miliar. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tetap mendominasi dengan kenaikan signifikan hingga Rp122.633,78 miliar. Sementara itu, nilai ekspor kembali menurun menjadi Rp205.494,54 miliar, menunjukkan potensi tantangan dalam sektor perdagangan internasional

PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dengan menghilangkan pengaruh inflasi. Pada tahun 2022, total PDRB tercatat sebesar Rp142.339,28 miliar. Komponen utama adalah Ekspor Barang dan Jasa sebesar Rp119.484,26 miliar dan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga sebesar Rp65.961,81 miliar.

Pada tahun 2023, total PDRB meningkat menjadi Rp149.230,96 miliar dengan kontribusi utama dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang naik menjadi Rp69.278,91 miliar dan PMTDB sebesar Rp33.738,94 miliar. Namun demikian, perubahan inventori mencatat angka negatif sebesar Rp-971,81 miliar.

Di tahun 2024, total PDRB mencapai Rp156.756,94 miliar dengan pertumbuhan di semua komponen pengeluaran utama seperti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (Rp72.996,12 miliar) dan PMTDB (Rp35.259,02 miliar). Ekspor juga meningkat menjadi Rp134.821,35 miliar.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang cukup konsisten dari sisi pengeluaran selama periode 2022–2024. Pengeluaran konsumsi rumah tangga terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah ini. Namun tantangan terlihat pada penurunan nilai ekspor atas dasar harga berlaku yang dapat memengaruhi struktur ekonomi berbasis perdagangan internasional di wilayah tersebut.

3.2.2 Share Perekonomian (Struktur Ekonomi Daerah)

Sektor PDRB Non-Pertambangan mendominasi struktur ekonomi Kalimantan Selatan dengan kontribusi sebesar 70,53%. Hal ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di luar pertambangan, seperti jasa, perdagangan, dan industri pengolahan, menjadi tulang punggung utama perekonomian daerah. Sektor ini mencerminkan upaya diversifikasi ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada sumber daya alam.

Sektor Jasa (H-U) merupakan penyumbang terbesar kedua dengan kontribusi 30,62%. Ini mencakup berbagai layanan seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Sementara itu, sektor Pertambangan dan Penggalan menyumbang 29,47%, menunjukkan bahwa meskipun sektor non-pertambangan mendominasi, pertambangan tetap menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Kalimantan Selatan.

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan memiliki kontribusi sebesar 11,55%, menegaskan pentingnya sektor ini dalam mendukung kebutuhan pangan serta bahan baku

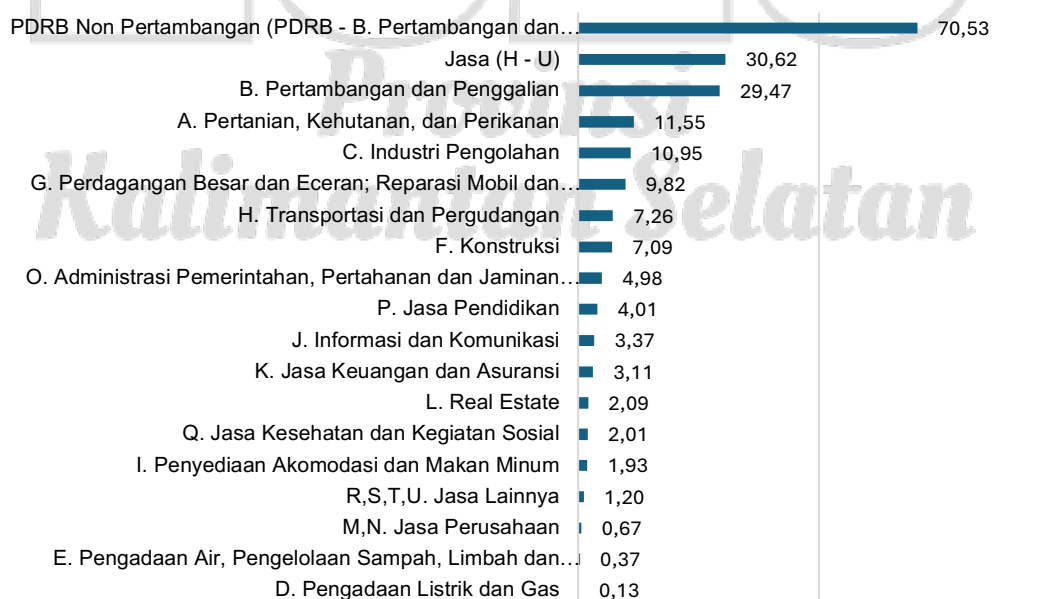
industri. Selain itu, sektor Industri Pengolahan menyumbang 10,95%, mencerminkan peran manufaktur dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal.

Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor memberikan kontribusi sebesar 9,82%, yang menunjukkan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat di daerah tersebut. Sementara itu, sektor Transportasi dan Pergudangan berkontribusi sebesar 7,26%, yang berperan penting dalam distribusi barang dan mobilitas masyarakat.

Sektor seperti Konstruksi (7,09%), Administrasi Pemerintahan (4,98%), serta Jasa Pendidikan (4,01%) memiliki kontribusi yang cukup signifikan dalam mendukung pembangunan fisik dan sosial di Kalimantan Selatan. Sektor lainnya seperti Informasi dan Komunikasi (3,37%), serta Jasa Keuangan dan Asuransi (3,11%) juga memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi daerah.

Beberapa sektor memiliki kontribusi kecil terhadap PDRB Kalimantan Selatan. Contohnya adalah sektor Pengadaan Listrik dan Gas (0,13%), yang menunjukkan bahwa sektor ini belum menjadi prioritas utama dalam struktur ekonomi daerah. Demikian pula dengan sektor seperti jasa perusahaan (0,67%) dan pengelolaan air serta limbah (0,37%) yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut.

Secara keseluruhan, struktur PDRB Kalimantan Selatan tahun 2024 menunjukkan dominasi sektor non-pertambangan sebagai pendorong utama ekonomi daerah. Namun demikian, sektor pertambangan tetap memainkan peran penting sebagai penyumbang kedua terbesar. Diversifikasi ekonomi melalui penguatan sektor jasa, industri pengolahan, dan perdagangan menjadi langkah strategis untuk menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.1 Share PDRB Kalimantan Selatan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2024 (Persen)

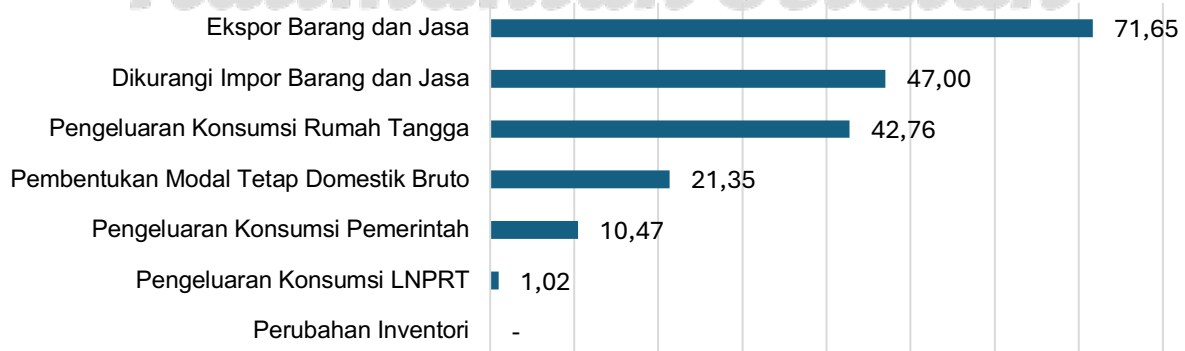
Berdasarkan data grafik yang ditampilkan, kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Selatan tahun 2024 menunjukkan berbagai komponen dengan peran yang berbeda-beda dalam struktur ekonomi daerah tersebut.

Komponen Ekspor Barang dan Jasa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDRB, yaitu sebesar 71,65%. Hal ini mencerminkan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan sangat bergantung pada aktivitas ekspor, baik barang maupun jasa, yang menjadi motor utama penggerak ekonomi di wilayah ini. Namun, aktivitas impor juga memiliki dampak signifikan. Impor Barang dan Jasa mengurangi nilai PDRB sebesar 47,00%, menunjukkan adanya ketergantungan terhadap barang dan jasa dari luar negeri.

Selain itu, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga berkontribusi sebesar 42,76%, menjadikannya salah satu pendorong utama ekonomi domestik. Konsumsi rumah tangga mencerminkan daya beli masyarakat dan tingkat aktivitas ekonomi lokal yang cukup tinggi. Di sisi lain, investasi melalui Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTDB) menyumbang 21,35% terhadap PDRB. Angka ini menunjukkan adanya investasi dalam pembangunan infrastruktur dan aset tetap yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Kontribusi dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah tercatat sebesar 10,47%, yang mencerminkan peran belanja pemerintah dalam mendukung pelayanan publik dan operasional pemerintahan. Sementara itu, pengeluaran dari Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) memiliki kontribusi yang relatif kecil, hanya sebesar 1,02%, sehingga perannya dalam struktur ekonomi daerah ini terbatas. Untuk komponen Perubahan Inventori, tidak ada data atau kontribusi yang tercatat dalam grafik ini.

Secara keseluruhan, perekonomian Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sangat didominasi oleh sektor ekspor barang dan jasa. Namun demikian, konsumsi rumah tangga dan investasi juga memainkan peran penting sebagai penggerak ekonomi domestik. Di sisi lain, aktivitas impor memberikan pengurangan nilai PDRB yang cukup besar.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.2 Share PDRB Kalimantan Selatan Menurut Pengeluaran Tahun 2024 (Persen)

3.2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah seperti provinsi. PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Laju pertumbuhan PDRB dihitung menggunakan PDRB atas dasar harga konstan dengan rumus :

$$\text{Laju Pertumbuhan PDRB} = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100 \%$$

Dimana:

- PDRB_t = nilai PDRB pada tahun ke-t
- PDRB_{t-1} = nilai PDRB pada tahun sebelumnya (t-1)
- Laju pertumbuhan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi wilayah dari tahun t-1 ke tahun t.

Ada tiga pendekatan utama untuk menghitung PDRB :

1. Pendekatan Produksi: Menghitung PDRB sebagai jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
2. Pendekatan Pendapatan: Menghitung PDRB dengan menjumlahkan seluruh balas jasa faktor produksi, seperti upah/gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya.
3. Pendekatan Pengeluaran: Menghitung PDRB sebagai jumlah komponen permintaan akhir, termasuk:
 - Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga
 - Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non-profit yang melayani rumah tangga
 - Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
 - Pembentukan modal tetap domestik bruto
 - Perubahan inventori
 - Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Laju pertumbuhan Ekonomi atau PDRB dapat mempengaruhi kebijakan ekonomi karena PDRB merupakan indikator penting dalam menilai kinerja perekonomian suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi

tingkat pengangguran, sehingga pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk meningkatkan laju pertumbuhan PDRB.

Ada beberapa poin penting terkait laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan yang telah dicatat oleh BPS provinsi Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2024, ekonomi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 5,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor yang paling cepat tumbuh adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 8,07 persen, diikuti oleh Jasa Lainnya sebesar 7,41 persen, dan Jasa Keuangan serta Asuransi sebesar 7,07 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan pada tahun 2024 masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalan yang mencapai 29,47 persen, diikuti oleh Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,55 persen, Industri Pengolahan sebesar 10,95 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 9,82 persen. Keempat sektor ini berkontribusi sebesar 61,79 persen terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Sumber pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 berasal dari Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,73 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 0,60 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 0,59 persen.

Pada triwulan IV tahun 2024, ekonomi Kalimantan Selatan mengalami peningkatan sebesar 5,15 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023. Sektor yang paling cepat tumbuh adalah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dengan pertumbuhan 9,35 persen, diikuti oleh Transportasi dan Pergudangan sebesar 8,55 persen, dan Industri Pengolahan sebesar 8,38 persen. Struktur PDRB Kalimantan Selatan pada triwulan ini masih didominasi oleh Pertambangan dan Penggalan yang mencapai 30,15 persen, kemudian Industri Pengolahan sebesar 11,70 persen, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,90 persen, serta Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 9,75 persen. Keempat sektor ini berkontribusi sebesar 61,51 persen terhadap perekonomian Kalimantan Selatan. Sumber pertumbuhan tertinggi pada triwulan ini berasal dari Industri Pengolahan sebesar 1,04 persen, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 0,66 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 0,60 persen.

Pada triwulan IV-2024, ekonomi Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 0,27 persen dibandingkan triwulan III-2024. Sektor yang mengalami penurunan signifikan adalah Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan penurunan 27,72 persen, serta Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,56 persen. Di sisi lain, beberapa sektor mengalami pertumbuhan positif, seperti Konstruksi yang tumbuh 11,69 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 9,38 persen, Industri Pengolahan sebesar 9,27 persen, dan Administrasi Pemerintahan sebesar 5,81 persen. Sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi pada triwulan ini berasal dari Industri Pengolahan sebesar 1,08 persen, Konstruksi sebesar 0,89 persen, dan Pertambangan dan Penggalan sebesar 0,76 persen.

Tabel 3.3 LPE dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024 Menurut Lapangan Usaha (Persen)

KOMPONEN LAPANGAN USAHA	LPE (%)					SUMBER PERTUMBUHAN (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,95	1,16	1,45	3,17	4,31	-0,13	0,16	0,2	0,44	0,56
Pertambangan dan Penggalian	-4,44	4,35	5,6	3,11	3,04	-1,12	1,05	1,38	0,76	0,74
Industri Pengolahan	-3,63	6,23	3,31	3,01	4,87	-0,43	0,78	0,42	0,38	0,60
Pengadaan Listrik, Gas	4,74	4,66	7,85	8,11	6,75	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,83	5,03	4,87	4,69	4,76	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Konstruksi	-1,29	2,87	4,33	6,29	5,93	-0,1	0,22	0,33	0,46	0,46
Perdagangan Besar dan Eceran, Dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-3,38	2,2	7,15	6,17	6,36	-0,32	0,2	0,65	0,57	0,60
Mj Transportasi dan Pergudangan	-5,32	1,81	17,43	11,18	5,70	-0,33	0,11	1,02	0,74	0,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-2,02	2,3	9,63	9,28	8,07	-0,04	0,05	0,19	0,19	0,18
Informasi dan Komunikasi	7,36	7,22	6,94	6,57	6,73	0,28	0,3	0,3	0,29	0,30
Jasa Keuangan	1,37	1,19	0,39	8,62	7,07	0,04	0,04	0,01	0,27	0,23
Real Estate	3,88	5,29	5,87	6,32	5,72	0,09	0,13	0,14	0,16	0,14
Jasa Perusahaan	-1,99	3,62	7,53	7,58	6,87	-0,01	0,02	0,05	0,05	0,04
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,73	1,49	0,53	2,92	6,95	0,04	0,07	0,03	0,15	0,34
Jasa Pendidikan	1,62	1,54	3,51	3,54	4,94	0,07	0,07	0,16	0,16	0,22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	10,89	5,31	5,69	5,57	0,13	0,23	0,11	0,12	0,12
Jasa lainnya	-1,46	1,16	6,78	6,94	7,41	-0,02	0,01	0,08	0,08	0,09
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE PDRB)	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05	-1,81	3,48	5,11	4,84	5,05
Jasa - Jasa	0,87	3,3	6,63	6,85	6,30	0,27	1,05	2,1	2,2	2,06
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE PDRB)	-	-	-	-	5,68	-	-	-	-	4,31

Sumber: BPS (2025) diolah

Hingga tahun 2024, perekonomian Kalimantan Selatan mencatat pertumbuhan sebesar 5,05% (year-on-year). Seluruh elemen pengeluaran menunjukkan tren positif, dengan Pengeluaran Konsumsi LNPRT memimpin pertumbuhan sebesar 13,61%. Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,37%, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (4,97%), Ekspor Barang dan Jasa (4,95%), serta Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (4,76%). Sementara itu, Impor Barang dan Jasa, yang berperan sebagai faktor pengurang, mengalami pertumbuhan 5,80%.

Komposisi PDRB Kalimantan Selatan berdasarkan pengeluaran pada harga berlaku tahun 2024 masih didominasi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, menyumbang hampir setengah dari total PDRB (42,76%). Kontributor lainnya meliputi Pembentukan Modal Tetap Bruto (21,35%), Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (10,47%), dan Net Ekspor (24,65%).

Perekonomian Kalimantan Selatan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,15 persen pada triwulan IV-2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year). Pengeluaran Konsumsi LNPRT memimpin pertumbuhan dengan angka tertinggi sebesar 6,91 persen. Komponen lainnya juga menunjukkan pertumbuhan positif, dengan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh 5,13 persen, diikuti oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto sebesar 4,41 persen. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan 2,57 persen, sementara Ekspor Barang dan Jasa tumbuh sebesar 0,34 persen. Di sisi lain, komponen Impor Barang dan Jasa, yang berperan sebagai faktor pengurang, mengalami kontraksi sebesar 0,29 persen.

Perekonomian Kalimantan Selatan mengalami penurunan sebesar 0,27 persen pada triwulan IV-2024 dibandingkan dengan triwulan III-2024 (quarter-to-quarter). Meskipun demikian, beberapa komponen pengeluaran masih menunjukkan pertumbuhan positif. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 21,45 persen. Pembentukan Modal Tetap Bruto, yang mencerminkan investasi, tumbuh 6,47 persen. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT masing-masing tumbuh 1,01 persen dan 0,34 persen. Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan 8,37 persen, sementara Impor Barang dan Jasa, yang berperan sebagai faktor pengurang dalam PDRB, tumbuh signifikan sebesar 19,20 persen.

Tabel 3.4 LPE dan Sumber Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2020–2024 Menurut Pengeluaran (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	LPE (%)					SUMBER PERTUMBUHAN (%)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
Konsumsi Rumah tangga	-0,26	0,79	5,37	5,03	5,37	-0,12	0,38	2,48	2,4	2,49
Konsumsi LNPRT	-2,4	1,1	5,02	8,32	13,61	-0,02	0,01	0,05	0,08	0,13
Konsumsi Pemerintah	-2,57	3,56	-0,56	4,73	4,90	-0,27	0,37	-0,06	0,47	0,47
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	-1,49	0,83	5,16	5,72	4,51	-0,32	0,18	1,16	1,25	1,02
Perubahan Inventori	-89,3	-	-908,12	76,48	(100,00)	-0,33	0,01	-0,46	-0,3	0,65
Ekspor Barang dan Jasa	-10,83	19,02	13,32	7,51	4,95	-8,16	12,98	10,37	6,33	4,26
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	-13,15	21,01	14,6	8,45	5,69	-7,41	10,45	8,43	5,38	3,71
Laju Pertumbuhan	-1,82	3,48	5,11	4,84	5,05	-1,81	3,48	5,11	4,84	5,05

Sumber: BPS (2025) diolah

Sedangkan peristiwa yang terjadi di Kalimantan Selatan dan berpengaruh terhadap perekonomian Kalimantan Selatan sesuai laporan BPS Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Triwulan I :

- Berdasarkan data KSA, produksi padi pada subround I-2024 (Januari-April) adalah sebesar 121.328 ton-GKG atau mengalami penurunan sebesar 29,39 persen dibandingkan dengan produksi padi pada subround I-2023.
- Pada periode bulan Januari-Maret 2024, TPK hotel berbintang tercatat sebesar 51,15; 50,50; dan 48,48 persen, sementara TPK hotel non-bintang tercatat sebesar 24,49; 24,54; dan 21,02 persen. Capaian ini lebih tinggi dibanding bulan Januari-Maret 2023 yang tercatat sebesar 43,69; 51,86; dan 51,43 persen untuk hotel berbintang dan 23,89; 24,56; dan 22,92 persen untuk hotel non-bintang.
- Jumlah penumpang berangkat dan barang muat melalui moda transportasi laut dan udara pada triwulan I-2024:
 - Jumlah penumpang berangkat dengan pesawat menurun 11,85 persen secara q-to-q. Sementara penumpang berangkat dan barang muat dengan pesawat tumbuh 4,87 dan 4,38 persen secara y-on-y.
 - Jumlah penumpang berangkat dan barang muat dengan kapal laut menurun 53,59 dan 46,64 persen secara q-to-q. Sementara barang muat dengan kapal laut tumbuh 9,16 persen secara y-on-y
- Inflasi umum Kalimantan Selatan tahun ke tahun pada bulan Maret 2024 adalah sebesar 2,58 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok makanan/minuman sebesar 4,95 persen.
- Kegiatan Pemilu Presiden dan Anggota Legislatif pada Februari serta aktivitas bulan Ramadan 1445H memicu kenaikan aktivitas berbagai lembaga nonprofit terutama partai politik dan lembaga keagamaan.
- Secara y-on-y, realisasi belanja pemerintah APBD dan APBN mengalami kenaikan terutama pada jenis Belanja Pegawai, seiring dengan kenaikan gaji dan THR yang sebagian telah terealisasi di triwulan I-2024. Kemudian berdasarkan data APBD, kenaikan terjadi pada jenis Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.
- Secara y-on-y, jumlah impor barang modal Kalimantan Selatan mengalami kenaikan, di antaranya seperti komoditas mesin pesawat mekanik dan mesin peralatan listrik.

Triwulan II :

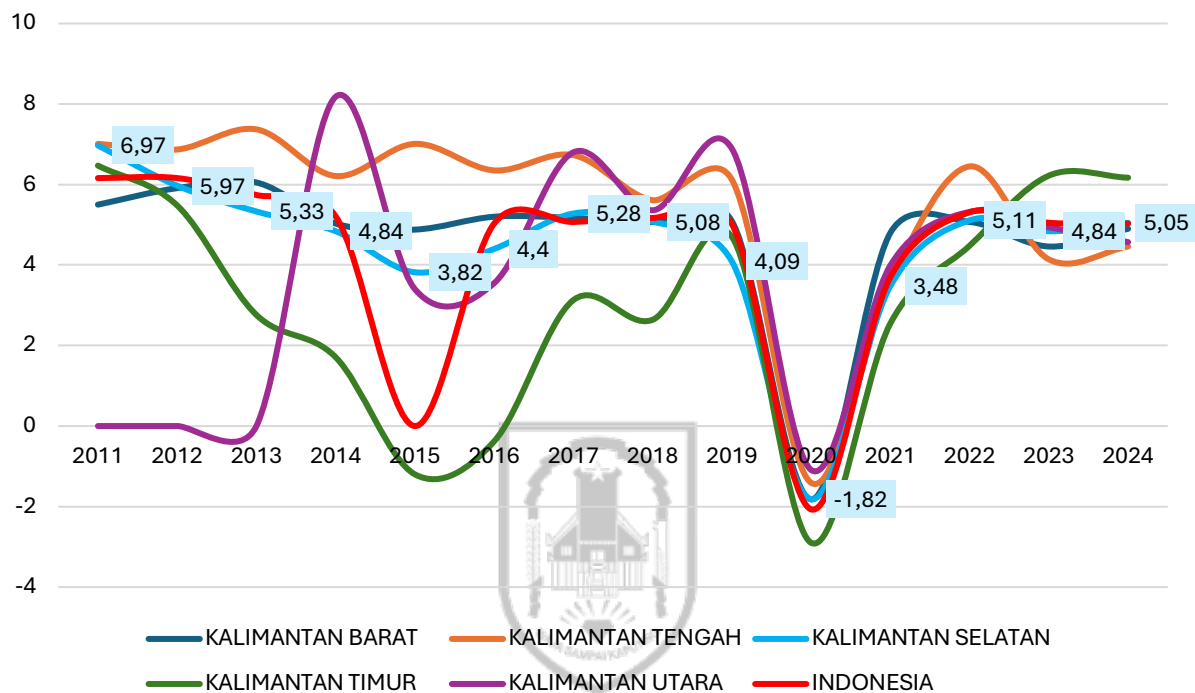
- Inflasi umum Kalimantan Selatan y-on-y pada bulan Juni 2024 adalah sebesar 2,34 persen. Kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi y-on-y bulan Juni 2024 terbesar, mencapai 0,92 persen.
- Perayaan hari besar keagamaan nasional seperti Bulan Ramadan, Hari Raya Idul Fitri, dan Hari Raya Idul Adha mendorong peningkatan kegiatan lembaga keagamaan dan organisasi masyarakat.

Triwulan III :

- Inflasi umum Kalimantan Selatan year-on-year pada bulan September 2024 adalah sebesar 1,98 persen. Kelompok pengeluaran Makanan, Minuman, dan Tembakau memberikan andil inflasi year-on-year bulan September 2024 terbesar, mencapai 0,61 persen.
- Aktivitas LNPRT tumbuh positif di triwulan ini seiring dengan adanya peningkatan kegiatan aktivitas partai politik menjelang Pilkada serentak pada November 2024.
- Secara q-to-q, realisasi Belanja Pegawai, baik APBD maupun APBN, pada triwulan-III 2024 mengalami kontraksi seiring dengan pencairan THR dan Gaji Ke-13 untuk ASN yang telah direalisasikan bersamaan pada triwulan II-2024. Meski demikian, secara y-on-y masih tumbuh positif.
- Nilai ekspor dan impor luar negeri Kalimantan Selatan pada triwulan III-2024 tumbuh positif dibandingkan dengan tahun 2023 pada periode yang sama (y-on-y).

Triwulan IV :

- Inflasi Kalimantan Selatan tahun ke tahun bulan Desember 2024 sebesar 1,95 persen. Inflasi tertinggi terjadi pada Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 10,48 persen.
- Aktivitas partai politik mengalami peningkatan selama pelaksanaan tahun politik, yakni Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Wakil-Presiden pada 14 Februari 2024, serta Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada 27 November 2024.
- Realisasi Belanja Pemerintah APBD tahun 2024 mengalami kenaikan untuk jenis Belanja Pegawai; dan Belanja Barang dan Jasa. Demikian pula dengan realisasi Belanja Pemerintah APBN yang meningkat untuk jenis belanja yang sama, dibandingkan dengan tahun 2023.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Provinsi di Kalimantan Tahun 2011 – 2024 (persen)

Data dalam tabel menunjukkan laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010 untuk wilayah Kalimantan dan Indonesia secara keseluruhan dari tahun 2011 hingga 2024. Berikut penjelasan berdasarkan data tersebut:

Analisis Pertumbuhan PDRB di Wilayah Kalimantan

Kalimantan Barat:

- Pertumbuhan relatif stabil dengan rata-rata di kisaran 4-6% per tahun.
- Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2020 (-1,82%), kemungkinan akibat dampak pandemi COVID-19.
- Pemulihan terlihat pada tahun-tahun berikutnya, dengan pertumbuhan kembali positif pada tahun 2021 hingga 2024.

Kalimantan Tengah:

- Memiliki tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi, terutama pada awal periode (2011-2013), mencapai lebih dari 7%.
- Pertumbuhan menurun pada tahun 2020 (-1,41%) akibat pandemi, tetapi pulih secara bertahap hingga mencapai 4,46% pada tahun 2024.

Kalimantan Selatan:

- Pertumbuhan cenderung fluktuatif dengan penurunan tajam pada tahun 2015 (3,82%) dan dampak negatif pandemi pada tahun 2020 (-1,82%).
- Pemulihan terlihat mulai tahun 2021, meskipun tingkat pertumbuhan tetap berada di kisaran moderat (sekitar 5%).

Kalimantan Timur:

- Pertumbuhan mengalami tren penurunan sejak awal periode, terutama setelah tahun 2013.
- Tahun-tahun terburuk adalah 2015 (-1,2%) dan 2020 (-2,9%), menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan.
- Pemulihan mulai terlihat setelah pandemi, dengan pertumbuhan mencapai 6,17% pada tahun 2024.

Kalimantan Utara:

- Data hanya tersedia mulai tahun 2015 karena provinsi ini baru terbentuk.
- Pertumbuhan cukup stabil dengan rata-rata di atas 3%, meskipun terdampak pandemi pada tahun 2020 (-1,09%).
- Pemulihan terjadi setelahnya dengan pertumbuhan mencapai 4,57% pada tahun 2024.

Analisis Nasional (Indonesia)

- Laju pertumbuhan nasional cenderung stabil di kisaran 5-6% per tahun sebelum pandemi.
- Dampak pandemi sangat terasa pada tahun 2020 (-2,07%), tetapi pemulihan terjadi secara bertahap hingga mencapai tingkat pertumbuhan sebesar 5,03% pada tahun 2024.

Dampak pandemi COVID-19 sangat terlihat dalam data ini, dengan penurunan tajam pada hampir semua wilayah Kalimantan dan nasional pada tahun 2020. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara menunjukkan ketahanan yang lebih baik dibandingkan wilayah lain di Kalimantan. Pemulihan ekonomi setelah pandemi tampak merata di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kalimantan.

3.2.4 PDRB Per Kapita

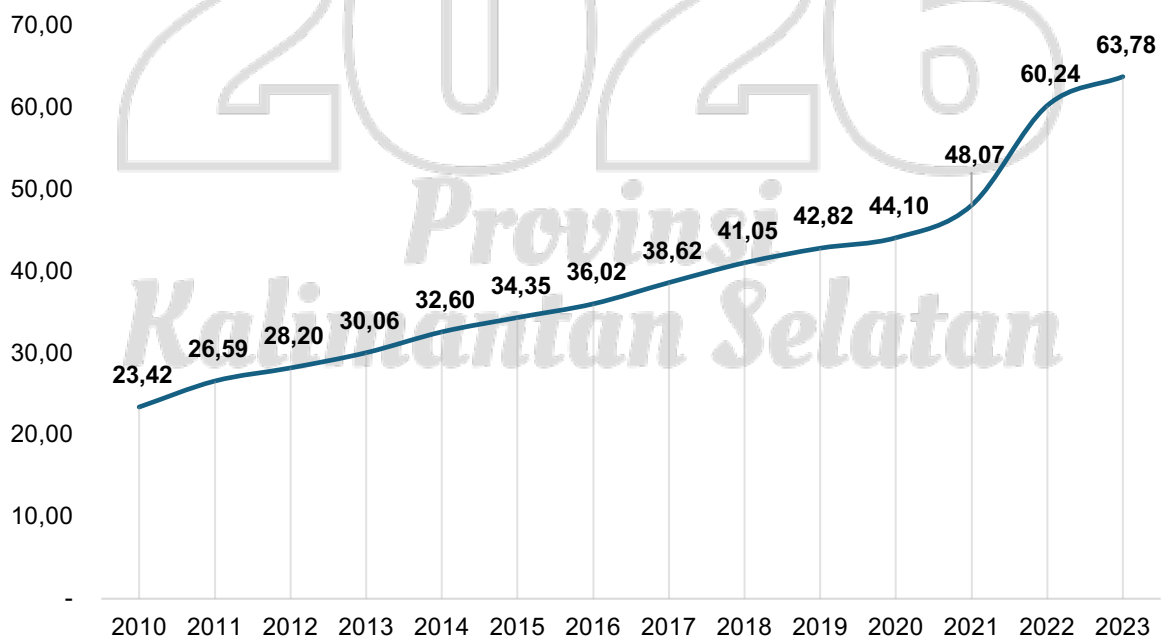
PDRB per kapita adalah hasil pembagian antara nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. Ini merupakan indikator penting yang menunjukkan:

- Nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk dalam suatu wilayah.
- Tingkat pendapatan rata-rata setiap orang pada tahun tersebut.
- Tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
- PDRB per kapita dapat dihitung dengan dua metode:

Atas dasar harga berlaku: Menunjukkan nilai PDRB per kepala menggunakan harga pada tahun berjalan.

Atas dasar harga konstan: Berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah, tanpa dipengaruhi oleh faktor harga.

Semakin tinggi nilai PDRB per kapita suatu wilayah, umumnya dianggap semakin sejahtera pula masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Namun, perlu diingat bahwa PDRB per kapita hanya mencerminkan rata-rata dan tidak selalu menggambarkan distribusi pendapatan yang merata di antara penduduk.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.4 Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah/Orang/Tahun)

Tren Perkembangan PDRB Per Kapita :

2010-2016: PDRB per kapita meningkat secara konsisten dari Rp 23,42 juta (2010) menjadi Rp 36,02 juta (2016). Kenaikan ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. 2017-2020: Peningkatan berlanjut dari Rp 38,62 juta (2017) hingga Rp 44,10 juta (2020), meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat dibandingkan periode sebelumnya. 2021: Terjadi lonjakan signifikan dari Rp 44,10 juta menjadi Rp 48,07 juta. Hal ini mungkin dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19.

2022-2023: Lonjakan yang lebih besar terjadi, dari Rp 48,07 juta (2021) menjadi Rp 63,78 juta (2023). Kenaikan ini mencerminkan akselerasi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut.

Faktor yang Mempengaruhi Naik Turunnya PDRB Per Kapita :

- Sektor Pertambangan dan Energi:

Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah penghasil batu bara dan sumber energi lainnya. Fluktuasi harga komoditas global seperti batu bara sangat memengaruhi PDRB per kapita. Lonjakan pada tahun 2022-2023 kemungkinan besar dipengaruhi oleh tingginya permintaan batu bara akibat krisis energi global.

- Investasi Infrastruktur :

Peningkatan pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan fasilitas umum dapat mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas masyarakat.

- Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi:

Tahun 2021 menunjukkan pemulihan ekonomi setelah pandemi COVID-19. Kebijakan fiskal dan stimulus ekonomi yang diterapkan pemerintah turut mendorong peningkatan PDRB.

- Perubahan Harga Komoditas:

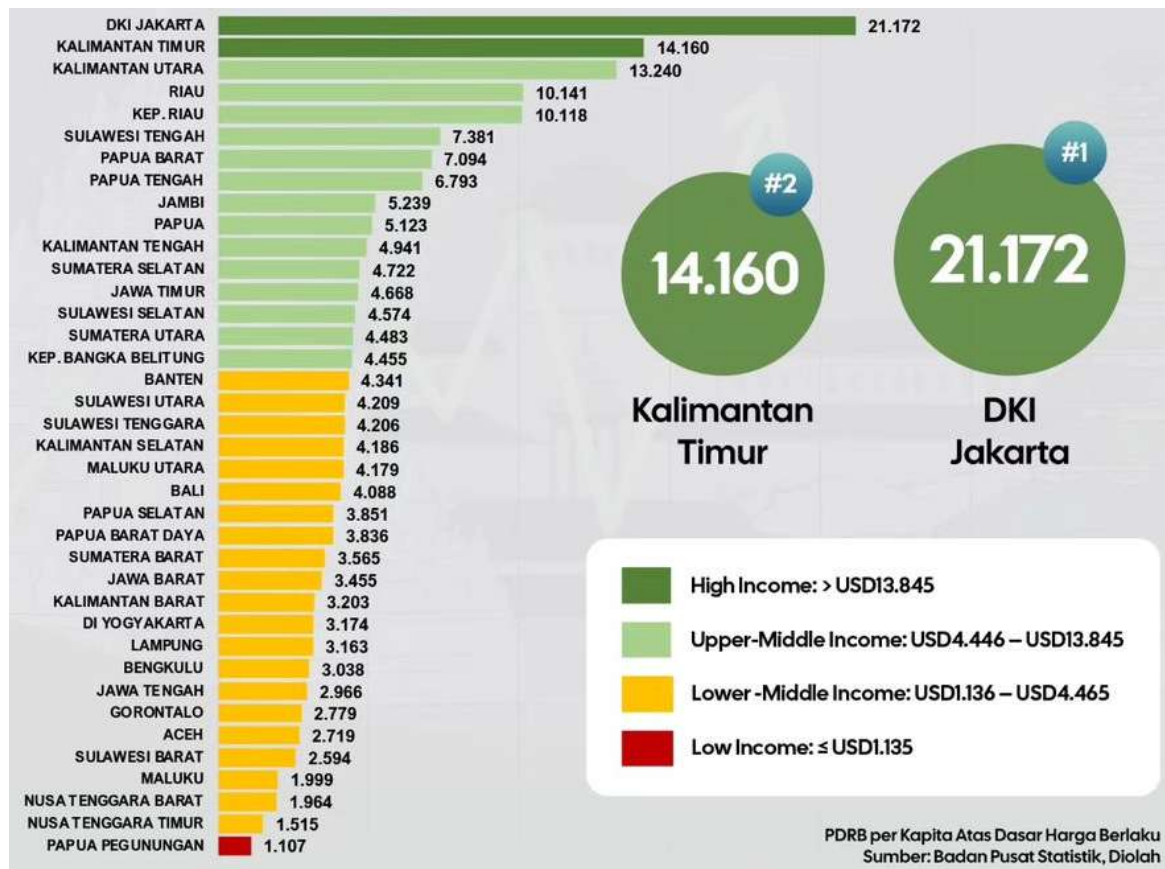
Sebagai daerah yang bergantung pada sektor utama seperti pertambangan dan perkebunan, perubahan harga komoditas seperti batu bara dan minyak sawit di pasar internasional sangat memengaruhi pendapatan daerah.

- Pertumbuhan Penduduk:

Kenaikan PDRB per kapita juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk yang relatif stabil. Dengan pendapatan regional yang meningkat lebih cepat dari pada pertumbuhan populasi, nilai per kapita pun naik.

PDRB per kapita Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif selama periode 2010–2023 dengan beberapa lonjakan signifikan pada tahun-tahun tertentu. Faktor utama seperti sektor

komoditas unggulan, investasi infrastruktur, pemulihan ekonomi pasca-pandemi, serta dinamika pasar global memainkan peran penting dalam fluktuasi data tersebut.



Sumber: Bappenas RI

Gambar 3.5 PDRB Per Kapita Indonesia dan Provinsi Tahun 2024 (USD per Kapita)

Data yang terlampir menunjukkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku untuk setiap provinsi di Indonesia, yang dikategorikan berdasarkan tingkat pendapatan menurut standar Bank Dunia:

- Pendapatan Tinggi: Lebih dari USD 13.845.
- Pendapatan Menengah-Atas: USD 4.446 - USD 13.845.
- Pendapatan Menengah-Bawah: USD 1.136 - USD 4.465.
- Pendapatan Rendah: Kurang dari atau sama dengan USD 1.135.

Posisi Kalimantan Selatan :

- PDRB per kapita Kalimantan Selatan adalah 4.179 USD, yang masuk dalam kategori *Lower-Middle Income* (Pendapatan Menengah-Bawah).
- Kalimantan Selatan berada di peringkat ke-16 secara nasional.

Perbandingan dengan Indonesia :

- Rata-rata nasional tidak disebutkan secara langsung dalam data, tetapi provinsi dengan PDRB tertinggi adalah DKI Jakarta (USD 21.172) dan terendah adalah Papua Pegunungan (USD 1.107).
- Kalimantan Selatan berada di bawah rata-rata beberapa provinsi besar seperti DKI Jakarta, Kalimantan Timur, dan Riau, tetapi lebih tinggi dibandingkan provinsi seperti Maluku (USD 1.999) dan Nusa Tenggara Timur (USD 1.515).

Perbandingan dengan Provinsi Lain :

1. Provinsi Kalimantan Lain:
 - Kalimantan Selatan memiliki PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan:
 - Kalimantan Timur (USD 14.160, kategori *High Income*).
 - Kalimantan Utara (USD 13.240, kategori *Upper-Middle Income*).
 - Namun lebih tinggi dibandingkan:
 - Kalimantan Barat (USD 3.203, kategori *Lower-Middle Income*).
2. Provinsi di Pulau Jawa:
 - Kalimantan Selatan memiliki PDRB per kapita lebih rendah dibandingkan DKI Jakarta (USD 21.172) dan Jawa Timur (USD 4.722), tetapi lebih tinggi dibandingkan Jawa Tengah (USD 2.966) dan DI Yogyakarta (USD 3.174).
3. Provinsi Papua dan Nusa Tenggara:
 - Jauh lebih tinggi dibandingkan Papua Pegunungan (USD 1.107) dan Nusa Tenggara Timur (USD 1.515).

Kalimantan Selatan memiliki posisi yang cukup baik dalam kategori *Lower-Middle Income*, tetapi masih tertinggal jauh dari provinsi dengan pendapatan tinggi seperti DKI Jakarta dan Kalimantan Timur. Dibandingkan provinsi lain di Kalimantan, PDRB-nya berada di tengah-tengah, menunjukkan potensi ekonomi yang perlu dikembangkan lebih lanjut untuk mengejar provinsi dengan pendapatan lebih tinggi.

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

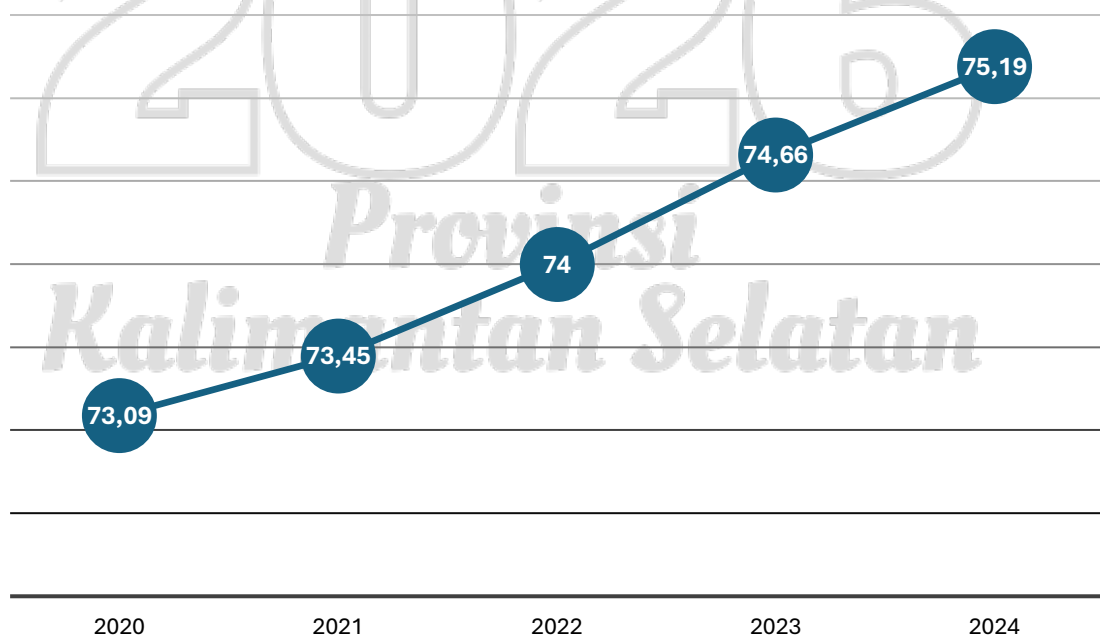
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, pendidikan, dan standar hidup untuk semua negara. IPM digunakan sebagai indikator untuk menilai aspek kualitas dari pembangunan dan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara termasuk negara maju, negara berkembang, atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijakan ekonomi terhadap kualitas hidup. IPM mengukur capaian pembangunan

manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan layak.

Komponen dasar kualitas hidup yang digunakan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meliputi:

- Umur Panjang dan Sehat: Diukur dengan harapan hidup saat lahir. Hal ini mencerminkan kesehatan dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai.
- Pengetahuan: Diwakili oleh rata-rata tahun sekolah yang ditempuh oleh penduduk dewasa dan ekspektasi tahun-tahun sekolah bagi anak-anak yang masih bersekolah. Hal ini mencerminkan akses dan partisipasi dalam pendidikan.
- Kehidupan Layak: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita. Hal ini mencerminkan standar hidup dan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, perumahan, dan akses terhadap layanan dasar.
- Ketiga komponen ini digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan tingkat pembangunan manusia di berbagai negara.

Perkembangan pergerakan angka IPM Kalimantan Selatan dari tahun 2020 sampai 2024 dapat dilihat dari Gambar 3.6 berikut.



Sumber: BPS Kalsel, diolah (2024)

Gambar 3.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan Tahun 2020 – 2024

3.2.6 Indeks Modal Manusia (IMM)

Indeks Modal Manusia (IMM) atau *Human Capital Index* adalah sebuah alat yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur potensi ekonomi suatu negara dengan memperhatikan kualitas modal manusia. IMM mengukur bagaimana modal manusia berkontribusi terhadap produktivitas generasi berikutnya dan sejauh mana negara-negara memanfaatkan modal manusia di negaranya. Indeks modal manusia diukur melalui tiga indikator, yaitu :

1. Kelangsungan Hidup, yang diukur melalui angka kematian anak dan mencerminkan kemampuan sistem kesehatan suatu wilayah dalam menjaga anak-anak tetap hidup dan sehat.
2. Pendidikan yang diukur melalui rata-rata lama sekolah dan kualitas pembelajaran yang diterima oleh anak-anak di sekolah.
3. Kesehatan yang diukur melalui tingkat stunting dan harapan hidup saat lahir yang sehat, yang menunjukkan kualitas layanan kesehatan dan gizi.

IMM memberikan penilaian dari 0 hingga 1, di mana 1 menunjukkan potensi maksimal dari modal manusia. Perkembangan IMM Kalimantan Selatan selama sejak tahun 2018 sebesar 0,52 dan tumbuh 0,53 pada tahun 2023. Meskipun selama lima tahun IMM Kalimantan Selatan meningkat perlahan namun kondisi ini menunjukkan adanya kemajuan.

Tabel 3.5 Kondisi Indeks Modal Manusia Kalimantan Selatan 2018 – 2023

CAPAIAN					
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,52	0,522	0,524	0,526	0,528	0,53

Sumber : Perhitungan Tim Bappeda Kalsel

3.2.7 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerj. TPT merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja dan menggambarkan kurangnya pemanfaatan pasokan tenaga kerja.

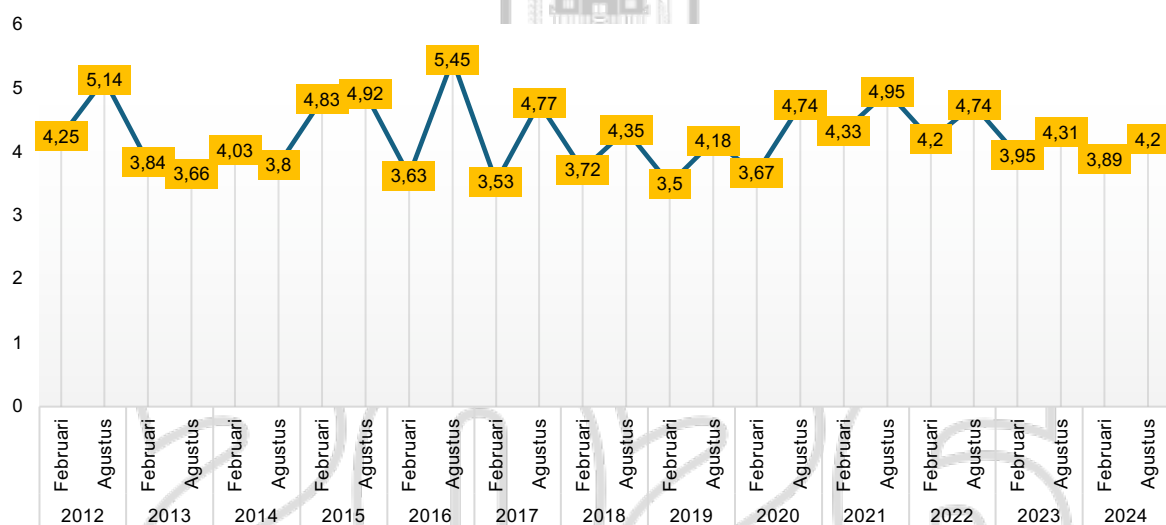
Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pengangguran terbuka mencakup orang-orang yang termasuk dalam kategori berikut:

1. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan
2. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mempersiapkan usaha

3. Mereka yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak aktif mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan
4. Mereka yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja

Pengangguran terbuka merujuk pada situasi di mana individu yang memiliki keterampilan, berpendidikan, dan siap bekerja tidak dapat menemukan peluang kerja yang sesuai dengan bidang keahlian mereka. Fenomena ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti ketidakcocokan keterampilan, minimnya pengalaman, dan isu diskriminasi.

TPT merupakan indikator penting yang mencerminkan kesehatan ekonomi suatu negara dan dapat berdampak signifikan pada individu serta masyarakat secara keseluruhan.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.7 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan Tahun 2012 – 2024 (persen)

Pada Agustus 2024, angkatan kerja mencapai 2,22 juta orang, menunjukkan kenaikan 49,28 ribu orang dibandingkan tahun sebelumnya. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat sebesar 0,46 persen poin. Jumlah penduduk yang bekerja naik menjadi 2,13 juta orang, bertambah 49,6 ribu orang dari Agustus 2023.

Sektor Perdagangan mencatat peningkatan terbesar dalam setahun terakhir, dengan pertambahan 21,98 ribu pekerja atau kenaikan 0,39 persen poin. Meskipun demikian, pekerja di sektor informal mengalami penurunan 1,70 persen poin, menjadi 53,56 persen atau sekitar 1,14 juta orang.

Terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pekerja penuh waktu (lebih dari 35 jam per minggu), naik 1,68 persen poin menjadi 63,19 persen dibandingkan 61,50 persen pada Agustus

2023. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun 0,11 persen poin, menjadi 4,20 persen pada Agustus 2024.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah metrik yang menunjukkan proporsi tenaga kerja yang belum terserap oleh lapangan pekerjaan, mencerminkan ketidakseimbangan antara pasokan dan permintaan tenaga kerja. Berdasarkan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2024, TPT tercatat sebesar 4,20%, yang berarti sekitar 4 dari 100 orang dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan. Dibandingkan dengan Agustus 2023, TPT mengalami penurunan 0,11 poin persentase.

Analisis berdasarkan gender menunjukkan bahwa TPT laki-laki (4,55%) lebih tinggi daripada TPT perempuan (3,65%). Namun, tren berbeda terlihat dalam perubahan tahunan: TPT laki-laki turun 0,36 poin persentase, sementara TPT perempuan naik 0,31 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Ditinjau dari lokasi geografis, daerah perkotaan memiliki TPT yang lebih tinggi (5,51%) dibandingkan daerah perdesaan (2,91%). Perbandingan dengan data Agustus 2023 menunjukkan peningkatan TPT di perkotaan sebesar 0,08 poin persentase, sedangkan di perdesaan terjadi penurunan sebesar 0,33 poin persentase.

Berdasarkan tingkat pendidikan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) menunjukkan variasi yang signifikan. Lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat menghadapi tantangan terbesar dalam mencari pekerjaan, dengan TPT tertinggi sebesar 6,65 persen. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan SD ke bawah justru memiliki TPT terendah, yaitu 2,34 persen.

Dalam perkembangan selama satu tahun terakhir, sebagian besar jenjang pendidikan menunjukkan tren positif dengan penurunan TPT. Namun, terdapat pengecualian pada tingkat SMP dan sederajat, di mana TPT justru mengalami sedikit kenaikan sebesar 0,03 persen poin. Hal ini menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja yang kompleks, di mana tingkat pendidikan tidak selalu berbanding lurus dengan kemudahan mendapatkan pekerjaan.

3.2.8 Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan data persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan (Kalsel) selama periode Maret 2019 hingga September 2024, terlihat adanya dinamika dalam perkembangan tingkat kemiskinan. Pada periode awal, yakni Maret 2019, persentase penduduk miskin tercatat sebesar 4,55% (192,48 ribu orang). Angka ini menunjukkan tren penurunan hingga mencapai 4,38% (187,87 ribu orang) pada Maret 2020, yang mencerminkan kondisi ekonomi yang cukup stabil sebelum pandemi Covid-19 melanda.

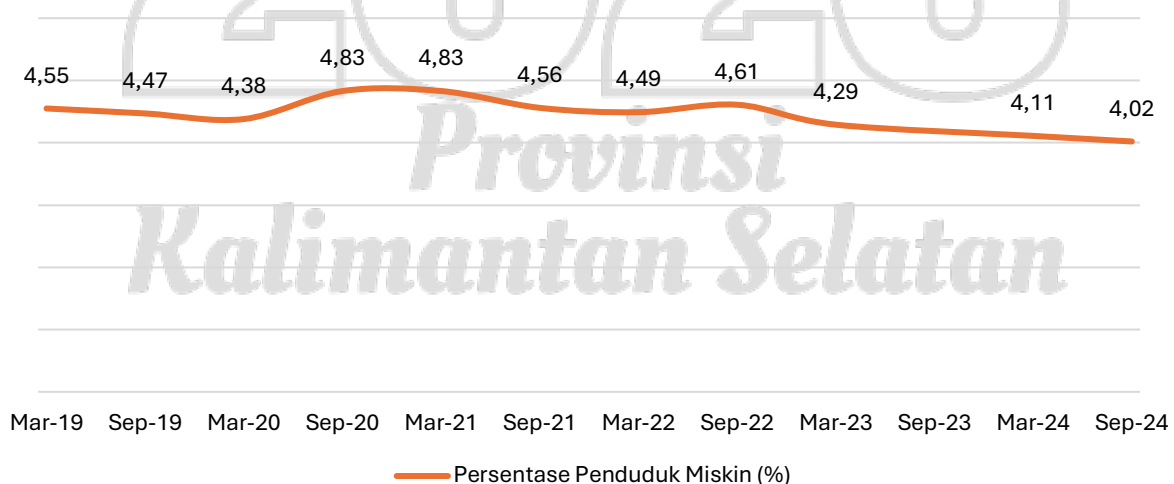
Namun, dampak pandemi Covid-19 mulai terasa pada September 2020, dengan peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 4,83% (206,92 ribu orang), yang merupakan

lonjakan signifikan. Kondisi ini berlanjut hingga Maret 2021, dengan persentase yang tetap tinggi di angka 4,83% (208,11 ribu orang), menjadi tingkat kemiskinan tertinggi dalam periode lima tahun terakhir. Pandemi menyebabkan gangguan ekonomi yang cukup serius, sehingga berdampak langsung pada peningkatan jumlah penduduk miskin.

Memasuki periode pemulihan, pada September 2021, persentase penduduk miskin mulai turun menjadi 4,56% (187,76 ribu orang), menunjukkan perbaikan ekonomi seiring dengan upaya penanggulangan dampak pandemi. Namun, pemulihan tersebut belum sepenuhnya stabil, karena pada September 2022 persentase kemiskinan kembali meningkat menjadi 4,61% (201,95 ribu orang). Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan struktural dalam mengurangi kemiskinan di Kalsel masih ada.

Tren positif mulai terlihat sejak Maret 2023, ketika persentase penduduk miskin turun ke angka 4,29% (188,93 ribu orang) dan terus membaik pada Maret 2024 dengan persentase 4,11% (183,31 ribu orang). Penurunan ini berlanjut hingga September 2024, dengan angka kemiskinan mencapai level terendah dalam periode yang diamati, yakni 4,02% (180,2 ribu orang).

Secara keseluruhan, kondisi kemiskinan di Kalimantan Selatan selama periode 2019–2024 menunjukkan pola fluktuatif yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pandemi Covid-19. Namun, tren penurunan sejak 2022 hingga 2024 menunjukkan adanya perbaikan dan pemulihan ekonomi yang cukup signifikan. Meskipun demikian, tantangan untuk mencapai penurunan kemiskinan yang berkelanjutan tetap ada, mengingat masih adanya kerentanan terhadap guncangan ekonomi di masa depan.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.8 Persentase Penduduk Miskin, (Maret dan September) Tahun 2019 - 2024

Penurunan tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung yang saling berkaitan. Salah satu faktor utama adalah pertumbuhan ekonomi yang

stabil, terutama pada sektor-sektor seperti pertanian dan jasa. Kedua sektor ini berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga secara langsung membantu mengurangi angka kemiskinan. Pertumbuhan yang konsisten di sektor-sektor ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah memiliki fondasi yang cukup kuat untuk menopang kesejahteraan masyarakat. Selain itu, pembangunan ekonomi di sektor ini turut mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, yang semakin memperkuat ketahanan ekonomi lokal.

Di samping pertumbuhan ekonomi, peran program sosial dan bantuan dari pemerintah juga sangat signifikan. Selama masa pandemi Covid-19, berbagai bentuk bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai, bantuan sembako, dan subsidi lainnya telah membantu masyarakat yang terdampak secara ekonomi. Program-program ini berfungsi sebagai jaring pengaman sosial yang mampu meredam lonjakan kemiskinan, terutama setelah peningkatan signifikan pada tahun-tahun awal pandemi. Setelah pandemi mereda, bantuan tersebut memberikan fondasi bagi masyarakat untuk kembali bangkit dan memulihkan perekonomian keluarga mereka.

Peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan turut menjadi pendorong penting dalam penurunan kemiskinan. Dengan pendidikan yang lebih baik, masyarakat memiliki peluang untuk memperoleh pekerjaan dengan pendapatan yang lebih tinggi dan stabil. Sementara itu, akses kesehatan yang lebih baik meningkatkan produktivitas masyarakat, karena individu yang sehat lebih mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi. Kombinasi antara pendidikan dan kesehatan yang berkualitas ini menciptakan modal manusia yang berdaya saing, yang pada akhirnya mempercepat pengurangan kemiskinan.

Namun, upaya pengurangan kemiskinan di Kalimantan Selatan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu hambatan utama adalah dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Pandemi menyebabkan gangguan yang meluas di berbagai sektor ekonomi, sehingga memicu lonjakan kemiskinan. Banyak sektor informal yang terdampak, menyebabkan masyarakat kehilangan mata pencaharian dan sumber pendapatan. Meskipun kondisi mulai membaik, dampak jangka panjang dari pandemi masih dirasakan, terutama di kalangan masyarakat yang paling rentan.

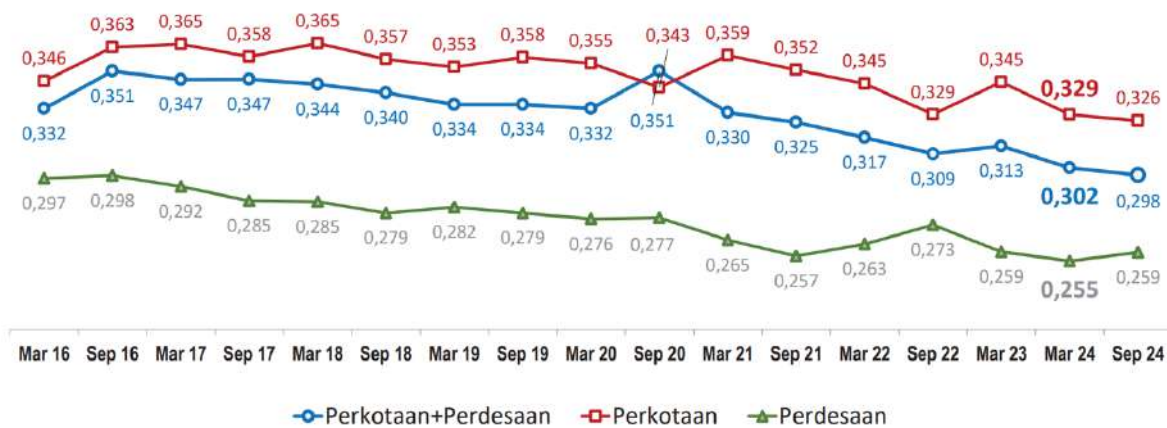
Selain itu, ketergantungan masyarakat Kalimantan Selatan pada sektor-sektor komoditas seperti karet dan batu bara turut menjadi penghambat pengurangan kemiskinan. Fluktuasi harga komoditas di pasar global dapat berdampak langsung pada pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor ini. Ketika harga komoditas menurun, pendapatan masyarakat pun ikut terdampak, sehingga memperlambat upaya pengurangan kemiskinan. Ketergantungan ini menunjukkan perlunya diversifikasi ekonomi untuk menciptakan perekonomian yang lebih stabil dan tahan terhadap guncangan eksternal.

Memahami faktor-faktor pendukung dan penghambat ini sangat penting dalam merumuskan strategi kebijakan yang efektif. Strategi kebijakan ke depan difokuskan pada penguatan ekonomi lokal melalui diversifikasi sektor ekonomi dan peningkatan ketahanan terhadap fluktuasi eksternal. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, tantangan kemiskinan di Kalimantan Selatan dapat diatasi, mendorong terciptanya kesejahteraan yang lebih inklusif dan merata di seluruh wilayah.

3.2.9 Gini Rasio

Berdasarkan data yang di keluarkan oleh BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Pada September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Kalimantan Selatan yang diukur dengan Gini Ratio adalah sebesar 0,298. Angka ini turun 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2024 yang sebesar 0,302. Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 sebesar 0,326, turun sebesar 0,003 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,329. Gini Ratio di daerah perdesaan pada September 2024 tercatat sebesar 0,259, naik sebesar 0,004 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024. Berdasarkan ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Kalimantan Selatan adalah sebesar 22,40 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk pada September 2024 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci menurut wilayah, di daerah perkotaan angkanya tercatat sebesar 20,97 persen dan di daerah perdesaan tercatat sebesar 24,17 persen, yang tergolong pada kategori ketimpangan rendah.

Angka Gini Ratio di Kalimantan Selatan sejak Maret 2017 hingga Maret 2020 mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa selama periode tersebut terjadi perbaikan pemerataan pengeluaran di Kalimantan Selatan. Namun demikian, sebagai dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pada awal bulan Maret 2020, angka Gini Ratio sempat mengalami kenaikan pada September 2020, dan kemudian kembali mengalami penurunan pada Maret 2021-September 2022 dan kembali naik pada Maret 2023. Pada Maret dan September 2024, Gini Ratio Kalimantan Selatan kembali turun (lihat Gambar 1). Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, Gini Ratio di daerah perkotaan pada September 2024 sebesar 0,326, turun sebesar 0,004 poin dibanding Maret 2024 yang sebesar 0,329. Sementara di daerah perdesaan, Gini Ratio September 2024 tercatat sebesar 0,259, naik sebesar 0,004 poin dibandingkan dengan kondisi Maret 2024. Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,255.



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)

Gambar 3.9 Perkembangan Gini Ratio, Maret 2016–September 2024

Selain Gini Ratio, ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini, tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12–17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2024, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di Kalimantan Selatan adalah sebesar 22,40 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Kondisi ini meningkat jika dibandingkan dengan Maret 2024 yang sebesar 22,26 persen. Jika dibedakan menurut daerah, pada September 2024 persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan adalah sebesar 20,97 persen, sementara persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan tercatat sebesar 24,17 persen. Dengan demikian, tingkat ketimpangan menurut kriteria Bank Dunia baik di daerah perkotaan maupun daerah perdesaan termasuk ketimpangan rendah. Walaupun tingkat ketimpangan di daerah perkotaan dan perdesaan termasuk rendah, jika dilihat dari besaran persentasenya bisa dikatakan tingkat ketimpangan di daerah perdesaan lebih baik dari pada di daerah perkotaan, di mana persentase penduduk 40 persen terbawah di daerah perdesaan lebih tinggi dari pada perkotaan.

Pada September 2024, provinsi yang mempunyai nilai Gini Ratio tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 0,431. Sementara Gini Ratio terendah tercatat di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Gini Ratio sebesar 0,235. Jika dibandingkan dengan Gini Ratio nasional yang sebesar 0,381, terdapat tujuh provinsi dengan angka Gini Ratio lebih tinggi dari pada angka nasional, yaitu DKI Jakarta (0,431), Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (0,428),

Jawa Barat (0,428), Papua Selatan (0,424), Gorontalo (0,413), Papua (0,405), dan Papua Barat (0,385). Gini Ratio Kalimantan Selatan pada September 2024 berada pada peringkat ke-7 terendah di Indonesia.

3.2.10 Gas Rumah Kaca

Data pada Tabel 3.6 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kalimantan Selatan selama periode 2022-2024:

- **2022:** Penurunan emisi mencapai **61,7%**
- **2023:** Penurunan emisi sebesar **68,3%**
- **2024:** Penurunan emisi hanya **n/a (Belum keluar)**.

Terdapat penurunan dalam kinerja pengurangan emisi GRK, pada tahun 2023 yang mengalami penurunan dari 2022 persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya tantangan serius dalam upaya Kalimantan Selatan untuk menjaga konsistensi dalam mitigasi perubahan iklim. Sedangkan data untuk 2024 belum keluar atau masih proses perhitungan.

3.2.10.1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tren Penurunan

✧ Sektor Pertambangan dan Energi

Kalimantan Selatan masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang menyumbang 29,47% dari PDRB provinsi. Peningkatan aktivitas di sektor ini pada 2024 kemungkinan berkontribusi signifikan terhadap melambatnya penurunan emisi GRK. Data menunjukkan bahwa meskipun pemerintah berupaya mendiversifikasi ekonomi, sektor pertambangan tetap mendominasi struktur ekonomi daerah.

✧ Pergeseran Prioritas Pembangunan

Dengan indikator ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi (5,05%), penurunan kemiskinan (menjadi 4,02%), dan penurunan pengangguran (menjadi 4,20%) pada 2024, terdapat indikasi bahwa fokus pembangunan lebih diarahkan pada aspek ekonomi dibandingkan aspek lingkungan. Hal ini mungkin menyebabkan berkurangnya investasi dan program untuk pengurangan emisi.

✧ Tantangan Implementasi Energi Terbarukan

Berdasarkan Indeks Ekonomi Biru, subindeks Energi Terbarukan Kalimantan Selatan hanya mencapai skor 1,76 dari 100, menunjukkan masih minimnya pengembangan energi alternatif

seperti PLTS dan PLTA. Kondisi ini berkontribusi pada tingginya ketergantungan pada energi fosil yang menghasilkan emisi tinggi.

3.2.10.2 Implikasi Terhadap Ekonomi Hijau dan Pembangunan Berkelanjutan

✧ Dampak pada Indeks Ekonomi Hijau

Meski Indeks Ekonomi Hijau Kalimantan Selatan menunjukkan peningkatan dari 35,58 (2015) menjadi 53,74 (2023), perlu tetap ada penguatan kebijakan untuk pengurangan emisi GRK pada 2024 yang berpotensi menghambat peningkatan indeks ini di masa mendatang.

✧ Transformasi Struktural Ekonomi

Penurunan kinerja ini menunjukkan tantangan dalam transformasi struktural ekonomi Kalimantan Selatan dari ekonomi berbasis ekstraktif menuju ekonomi hijau. Meskipun ada peningkatan pada indikator ekonomi hijau seperti kualitas air permukaan dan penurunan tutupan gambut antara 2015-2023, kinerja penurunan emisi GRK pada 2024 mengindikasikan adanya kesenjangan dalam implementasi kebijakan.

✧ Kaitannya dengan Pola Konsumsi dan Produksi

Pertumbuhan sektor konsumsi rumah tangga (5,37%) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (4,97%) pada tahun 2024 menunjukkan peningkatan aktivitas ekonomi yang berpotensi meningkatkan konsumsi energi dan emisi GRK. Tanpa diimbangi efisiensi energi dan adopsi teknologi ramah lingkungan, pola konsumsi dan produksi ini berkontribusi pada perlambatan penurunan emisi.

3.2.10.3 Tantangan dan Prospek ke Depan

✧ Keseimbangan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Keberlanjutan

Kalimantan Selatan menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi (proyeksi 4-5% untuk 2025) dengan target pengurangan emisi GRK. Diperlukan strategi pembangunan yang mengintegrasikan aspek ekonomi dan lingkungan secara harmonis untuk mencapai target pertumbuhan tanpa mengorbankan keberlanjutan lingkungan.

✧ Peluang dalam Transformasi Ekonomi

Meskipun terjadi penurunan kinerja, terdapat peluang signifikan dalam pengembangan ekonomi hijau, terutama melalui prioritas pembangunan 2025 yang mencakup pengembangan ekonomi hijau melalui pariwisata berbasis Meratus Geopark, hilirisasi sumber daya alam, dan penciptaan sumber energi alternatif.

✧ Penyelarasan dengan Komitmen Nasional

Penurunan drastis kinerja pengurangan emisi GRK berpotensi menghambat upaya Indonesia dalam mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC). Kalimantan Selatan perlu menyelaraskan kembali strategi pengurangan emisinya dengan komitmen nasional untuk mendukung upaya Indonesia mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

3.2.10.4 Rekomendasi Strategis

1. **Diversifikasi Energi:** Meningkatkan investasi pada energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, terutama di sektor industri dan transportasi.
2. **Penguatan Kebijakan Ekonomi Hijau:** Implementasi lebih agresif pada kebijakan yang mendukung ekonomi rendah karbon, termasuk insentif fiskal untuk industri yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan.
3. **Pengembangan Sektor Prioritas Rendah Emisi:** Mempercepat pengembangan sektor ekonomi dengan multiplier pertumbuhan tinggi namun multiplier emisi karbon rendah, seperti yang teridentifikasi dalam Kajian Ekonomi Hijau Kalsel.
4. **Implementasi Carbon Pricing:** Penerapan mekanisme penetapan harga karbon untuk mendorong industri mengurangi emisi dan mengadopsi teknologi bersih.
5. **Penguatan Kapasitas Monitoring dan Evaluasi:** Membangun sistem pemantauan emisi yang lebih andal untuk memastikan target pengurangan emisi tercapai dan teridentifikasi secara akurat.

Penurunan drastis dalam kinerja pengurangan emisi GRK Kalimantan Selatan tahun 2024 memerlukan respons kebijakan yang komprehensif dan integratif untuk membalikkan tren ini, terutama mengingat komitmen Indonesia untuk transformasi menuju ekonomi hijau dan upaya global dalam mitigasi perubahan iklim.

Tabel 3.6 Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kalimantan Selatan 2022 – 2024 (Persen)

KETERANGAN	2022	2023	2024
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	61,7	68,3	n/a

Sumber : Perhitungan Tim Bappeda Kalsel

3.2.11 Inflasi

Inflasi adalah proses kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam suatu perekonomian selama periode tertentu. Beberapa karakteristik utama inflasi meliputi :

3.2.11.1 Ciri-ciri Inflasi

- Terjadi kenaikan harga barang dan jasa secara menyeluruh
- Kenaikan harga berlangsung terus-menerus (minimal berbulan-bulan)
- Menyebabkan penurunan nilai mata uang

3.2.11.2 Pengukuran Inflasi

Inflasi diukur menggunakan beberapa indikator, antara lain:

- Indeks Harga Konsumen (IHK)
- GDP Deflator

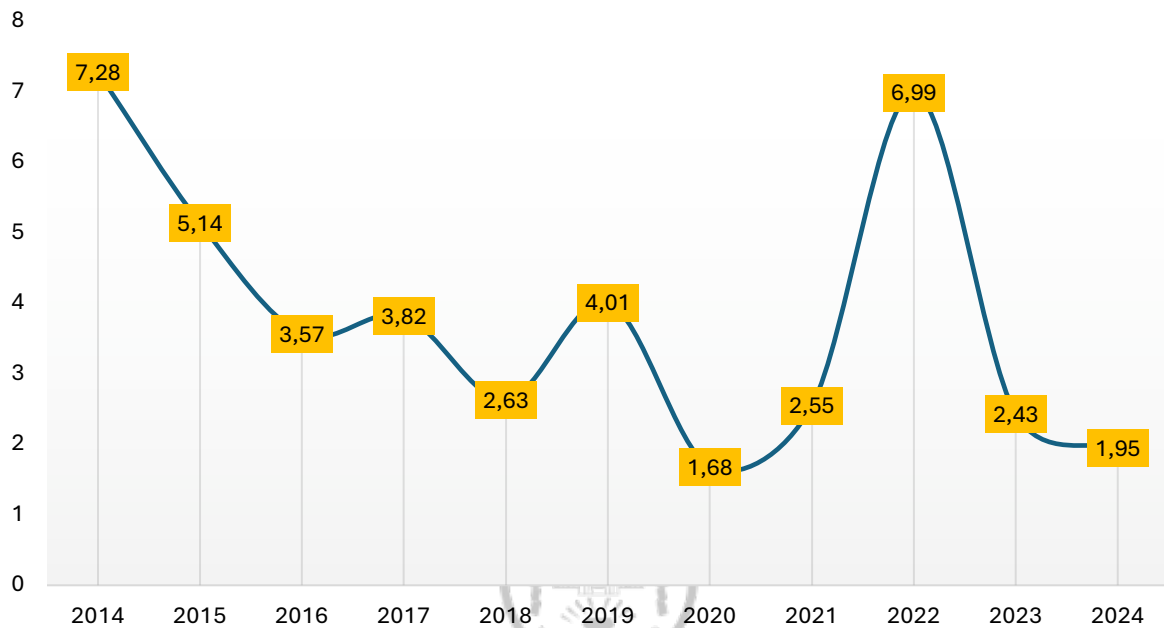
Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia bertugas melakukan survei dan mengumpulkan data harga berbagai barang dan jasa untuk menghitung tingkat inflasi

3.2.11.3 Jenis Inflasi

Berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi dapat digolongkan menjadi:

- Inflasi ringan: kurang dari 10% per tahun
- Inflasi sedang: 10-30% per tahun
- Inflasi berat: 30-100% per tahun
- Hiperinflasi: lebih dari 100% per tahun

Inflasi memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian suatu negara, mempengaruhi daya beli masyarakat, dan stabilitas harga di pasar.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.10 Inflasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2014 – 2024 (Persen)

Data inflasi Provinsi Kalimantan Selatan dari tahun 2014 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Berikut adalah analisis data tersebut:

3.2.11.4 Tren Inflasi

1. **2014-2015:** Inflasi tinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 7,28%, kemudian menurun menjadi 5,14% pada tahun 2015.
 - Penyebab: Inflasi tinggi pada tahun 2014 kemungkinan disebabkan oleh kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada biaya transportasi dan harga barang kebutuhan pokok.
2. **2016-2020:** Inflasi terus menurun hingga mencapai titik terendah pada tahun 2020 sebesar 1,68%.
 - Penyebab: Penurunan inflasi ini mungkin dipengaruhi oleh stabilitas harga bahan pokok dan kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 juga menyebabkan penurunan permintaan konsumsi masyarakat.
3. **2021-2022:** Inflasi kembali meningkat tajam pada tahun 2022 mencapai 6,99%, setelah sebelumnya berada di angka rendah 2,55% pada tahun 2021.
 - Penyebab: Kenaikan ini bisa terkait dengan pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang mendorong peningkatan permintaan barang dan jasa, serta kenaikan harga energi global.

4. **2023-2024:** Inflasi menurun lagi menjadi 2,43% pada tahun 2023 dan terus turun ke angka 1,95% pada tahun 2024.
 - Penyebab: Penurunan ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan harga barang dan jasa melalui kebijakan moneter dan fiskal.

3.2.11.5 Faktor Penyebab Utama

- ✧ **Kenaikan Harga Energi:** Fluktuasi harga BBM dan energi global sangat memengaruhi inflasi di Kalimantan Selatan.
- ✧ **Pandemi COVID-19:** Menekan inflasi akibat rendahnya permintaan barang dan jasa.
- ✧ **Pemulihan Ekonomi:** Pasca-pandemi, peningkatan aktivitas ekonomi mendorong inflasi sementara.
- ✧ **Kebijakan Pemerintah:** Pengendalian harga bahan pokok dan subsidi energi turut memengaruhi tingkat inflasi.

Secara keseluruhan, data ini mencerminkan dinamika ekonomi daerah yang dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga energi global dan faktor internal seperti kebijakan pemerintah serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat.

3.2.12 ICOR (Incremental Capital Output Ratio)

ICOR (Incremental Capital Output Ratio) adalah sebuah konsep ekonomi yang mengukur efisiensi penggunaan modal tambahan dalam menghasilkan output tambahan dalam suatu perekonomian. Secara lebih rinci:

3.2.12.1 Definisi dan Konsep

ICOR menunjukkan berapa banyak unit modal atau investasi yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit tambahan output atau pendapatan nasional. Konsep ini digunakan untuk menilai efektivitas investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3.2.12.2 Interpretasi

- ✧ Nilai ICOR yang rendah menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam penggunaan modal. Ini berarti dibutuhkan investasi yang lebih sedikit untuk menghasilkan pertumbuhan output yang sama.

- ✕ Nilai ICOR yang tinggi menandakan kurang efisiennya penggunaan modal, dimana diperlukan investasi yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan output yang sama.

3.2.12.3 Penggunaan

1. Perencanaan ekonomi: ICOR digunakan untuk memperkirakan kebutuhan investasi guna mencapai target pertumbuhan ekonomi tertentu.
2. Evaluasi kinerja: Membantu dalam menilai efektivitas kebijakan investasi dan pembangunan ekonomi.
3. Perbandingan antar sektor atau negara: Memungkinkan perbandingan efisiensi penggunaan modal di berbagai sektor ekonomi atau antar negara.

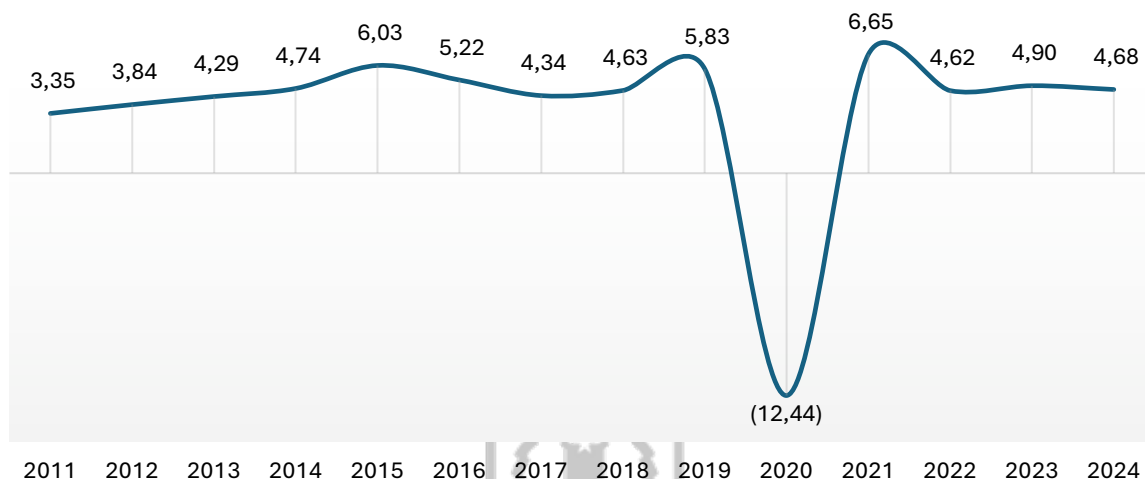
3.2.12.4 Faktor yang Mempengaruhi

Nilai ICOR dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk:

- Teknologi
- Kualitas sumber daya manusia
- Infrastruktur
- Kebijakan ekonomi
- Kondisi sosial-politik

3.2.12.5 Keterbatasan

- ICOR mengasumsikan hubungan linear antara investasi dan output, yang tidak selalu terjadi dalam realitas ekonomi.
- Tidak memperhitungkan faktor-faktor non-ekonomi yang dapat mempengaruhi efisiensi investasi.
- Sensitif terhadap fluktuasi jangka pendek dalam investasi dan output.



Sumber: BPS (2025) diolah

Gambar 3.11 ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2011 - 2024

Grafik ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Kalimantan Selatan dari tahun 2011 hingga 2024 menunjukkan fluktuasi efisiensi investasi dalam menghasilkan pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah analisis yang lebih rinci berdasarkan data grafik tersebut:

3.2.12.6 Periode 2011–2018: Tren Peningkatan ICOR

- **2011–2014:**

Pada tahun 2011, ICOR berada di angka 3,35, yang mencerminkan efisiensi investasi yang cukup baik. Artinya, hanya diperlukan tambahan investasi sebesar 3,35 unit untuk menghasilkan 1 unit tambahan output.

ICOR perlahan meningkat menjadi 3,84 pada 2012 dan 4,29 pada 2014. Peningkatan ini menunjukkan bahwa efisiensi investasi mulai menurun, meskipun masih dalam tingkat yang wajar.

- **2015–2018:**

ICOR terus meningkat dari 4,74 (2015) hingga mencapai puncaknya di 6,03 pada tahun 2018.

Kenaikan ini mengindikasikan bahwa semakin banyak modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan pertumbuhan output yang sama. Hal ini bisa disebabkan oleh investasi yang kurang produktif atau adanya hambatan struktural dalam perekonomian.

3.2.12.7 Periode 2019: Penurunan ICOR

Pada tahun 2019, ICOR turun menjadi 4,34, menandakan peningkatan efisiensi investasi dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh perbaikan kebijakan ekonomi atau optimalisasi penggunaan modal di sektor-sektor produktif.

3.2.12.8 Periode 2020: Lonjakan ICOR Akibat Pandemi

- Tahun 2020 mencatat lonjakan ICOR menjadi 6,65, nilai tertinggi dalam grafik setelah tahun 2018.

Lonjakan ini kemungkinan besar disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19, di mana investasi tetap dilakukan tetapi pertumbuhan output melambat secara signifikan atau bahkan negatif. Hal ini menunjukkan ketidakefisienan sementara akibat gangguan besar pada aktivitas ekonomi.

3.2.12.9 Periode 2021: ICOR Negatif (-12,44)

- Tahun 2021 mencatat angka ICOR negatif sebesar -12,44, yang sangat tidak biasa. Nilai negatif ini menunjukkan bahwa meskipun ada investasi besar-besaran, output justru mengalami kontraksi signifikan. Hal ini bisa terjadi karena dampak pandemi masih terasa kuat, dengan gangguan pada rantai pasok dan penurunan permintaan agregat.

3.2.12.10 Periode 2022–2024: Stabilitas dan Pemulihan

Setelah kontraksi besar di tahun sebelumnya, ICOR kembali stabil di angka sekitar 4,62 (2022), kemudian sedikit meningkat menjadi 4,90 (2023) dan turun lagi ke 4,68 (2024).

Stabilitas ini menunjukkan pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan peningkatan efisiensi investasi. Angka ICOR di bawah 5 mengindikasikan bahwa investasi mulai kembali produktif dalam menghasilkan pertumbuhan output.

Grafik menunjukkan bahwa efisiensi investasi di Kalimantan Selatan mengalami fluktuasi signifikan selama periode 2011–2024. Periode sebelum pandemi (2011–2018) ditandai dengan tren peningkatan ICOR yang mengindikasikan penurunan efisiensi. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada tahun 2020–2021 dengan lonjakan ICOR hingga nilai negatif akibat kontraksi ekonomi. Setelah pandemi (2022–2024), efisiensi investasi membaik dengan nilai ICOR yang stabil di kisaran angka 4–5.

Secara keseluruhan, tren ini mencerminkan tantangan struktural dalam perekonomian Kalimantan Selatan sekaligus potensi pemulihan melalui optimalisasi kebijakan ekonomi dan peningkatan produktivitas investasi di masa depan

Nilai ICOR Kalimantan Selatan pada tahun 2024 berada di angka 4,68, yang mencerminkan efisiensi investasi yang cukup baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Beberapa faktor yang memengaruhi nilai ICOR ini meliputi:

1. Pemulihan Ekonomi Pasca-Pandemi

- Setelah dampak signifikan pandemi COVID-19 pada 2020–2021, perekonomian Kalimantan Selatan menunjukkan pemulihan yang stabil. Pertumbuhan ekonomi mulai kembali positif, dan investasi menjadi lebih produktif dalam menghasilkan output tambahan.

2. Peningkatan Infrastruktur

- Pemerintah Kalimantan Selatan telah berinvestasi dalam pengembangan infrastruktur konektivitas, seperti jalan bebas hambatan Banjarbaru–Batulicin, yang memangkas waktu perjalanan dan meningkatkan efisiensi logistik. Infrastruktur ini mendukung aktivitas ekonomi dan meningkatkan produktivitas investasi.

3. Hilirisasi Industri Berbasis Sumber Daya Alam (SDA)

- Fokus pada hilirisasi sektor pertanian, perikanan, dan industri berbasis SDA membantu meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal. Langkah ini mengurangi ketergantungan pada ekspor bahan mentah dan menciptakan output yang lebih besar dari investasi yang ada.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

- Program pelatihan tenaga kerja lokal untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing telah berkontribusi pada produktivitas ekonomi. SDM yang lebih terampil memungkinkan penggunaan modal yang lebih efisien.

5. Stabilitas Kebijakan Ekonomi

- Pemerintah daerah telah memperbaiki iklim investasi melalui reformasi birokrasi dan peningkatan integritas serta akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini memberikan kepastian hukum bagi investor dan mendorong efisiensi dalam penanaman modal. **Diversifikasi Ekonomi**
- Selain sektor primer seperti pertanian dan perikanan, pemerintah juga mendorong pengembangan sektor pariwisata berbasis ekonomi hijau (eco-tourism) dan geopark. Diversifikasi ini membantu menyebarkan manfaat investasi ke berbagai sektor ekonomi.

Nilai ICOR Kalimantan Selatan pada tahun 2024 mencerminkan peningkatan efisiensi investasi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Faktor utama di balik capaian ini adalah pemulihan ekonomi pasca-pandemi, pengembangan infrastruktur strategis, hilirisasi industri

berbasis SDA, peningkatan kualitas SDM, stabilitas kebijakan ekonomi, dan diversifikasi sektor ekonomi. Semua langkah ini berkontribusi pada penggunaan modal yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan output di wilayah tersebut.

3.2.13 Indeks Williamson

Berdasarkan grafik dan data, Indeks Williamson di Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan dinamika sebagai berikut:

1. Penurunan Awal (2018–2020) :

- Nilai indeks menurun dari 0,407 pada tahun 2018 menjadi 0,395 pada tahun 2019 dan tetap stabil hingga 2020. Penurunan ini mencerminkan perbaikan distribusi ekonomi di wilayah tersebut, kemungkinan dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang berdampak pada sektor utama seperti pertambangan dan energi.

2. Peningkatan Signifikan (2021–2022) :

- Indeks meningkat dari 0,413 pada tahun 2021 menjadi puncaknya di 0,516 pada tahun 2022. Lonjakan ini disebabkan oleh keberhasilan pemerintah provinsi dalam menarik investasi asing dan nasional ke sektor alternatif seperti industri pengolahan dan pariwisata. Selain itu, kenaikan harga komoditas utama juga berkontribusi pada ketimpangan regional.

3. Penurunan Bertahap (2023–2024) :

- Nilai indeks menurun dari 0,504 pada tahun 2023 menjadi 0,493 pada tahun 2024. Penurunan ini menunjukkan perbaikan distribusi ekonomi meskipun masih berada di kategori ketimpangan yang tinggi.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Indeks Williamson :

Beberapa faktor utama yang memengaruhi perubahan nilai Indeks Williamson di Kalimantan Selatan antara lain:

1. Ketergantungan pada Sektor Pertambangan dan Energi :

- Sektor pertambangan dan energi merupakan tulang punggung ekonomi provinsi ini. Fluktuasi harga komoditas global sangat memengaruhi ketimpangan regional karena daerah yang kaya sumber daya cenderung lebih maju dibandingkan daerah lainnya.

2. Diversifikasi Ekonomi :

- Upaya diversifikasi ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata dan industri pengolahan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor utama, namun

efeknya belum cukup signifikan untuk menyelesaikan ketimpangan secara menyeluruh.

3. Investasi dan Infrastruktur :

- Peningkatan investasi asing/nasional serta pembangunan infrastruktur seperti jalan dan fasilitas umum berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi di daerah tertentu, tetapi sering kali tidak merata.

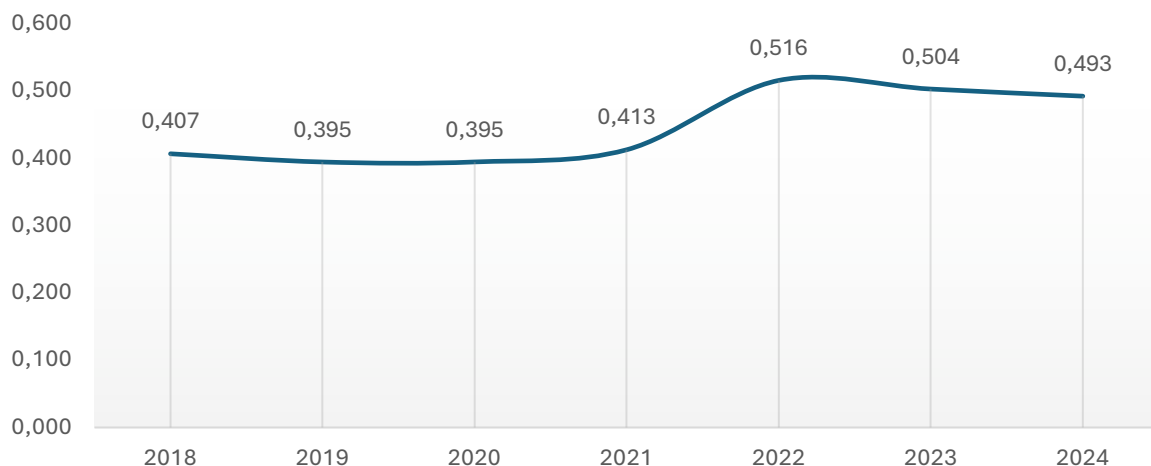
4. Kebijakan Pemerintah :

- Kebijakan pemerintah dalam mendukung investasi alternatif dan pembangunan infrastruktur memengaruhi distribusi ekonomi antar wilayah. Namun, implementasi kebijakan yang tidak merata dapat memperburuk ketimpangan.

5. Perubahan Demografi :

- Perbedaan jumlah penduduk dan distribusi pendapatan antar wilayah turut berkontribusi terhadap ketimpangan regional.

Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2018–2024 menunjukkan fluktuasi yang mencerminkan dinamika ekonomi regional. Ketimpangan tetap tinggi meskipun ada upaya diversifikasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Untuk mengurangi ketimpangan secara signifikan, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif, seperti pemerataan investasi antar wilayah, pengembangan sektor unggulan di daerah tertinggal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan.



Sumber: BPS Kalsel 2023

Gambar 3.12 Indeks Williamson Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 – 2024

3.2.14 Ekonomi Berkelanjutan

Ekonomi yang berkelanjutan, atau sering disebut sebagai ekonomi hijau, adalah model pembangunan ekonomi yang berfokus pada tiga aspek utama:

1. Menciptakan peluang kerja baru (green jobs) dan investasi baru (green investment)
2. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang rendah karbon
3. Meningkatkan daya dukung sumber daya alam dan lingkungan hidup

Tujuan utama ekonomi berkelanjutan adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi. Konsep ini berupaya menyelaraskan aktivitas ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan ekonomi tidak mengorbankan kelestarian alam dan sumber daya untuk generasi mendatang.

Beberapa karakteristik penting dari ekonomi berkelanjutan meliputi:

1. Transisi menuju energi baru terbarukan
2. Pengelolaan hutan dan sumber daya alam secara lestari
3. Pengembangan tenaga kerja hijau (green jobs)
4. Penerapan ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah
5. Peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya dan energi
6. Penurunan emisi gas rumah kaca
7. Perlindungan keanekaragaman hayati

Implementasi ekonomi berkelanjutan membutuhkan transformasi fundamental dalam model pembangunan ekonomi konvensional. Namun, jika berhasil dilaksanakan, diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan sosial secara inklusif.

3.2.15 Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi yang berfokus pada tiga aspek utama: menciptakan peluang kerja dan investasi baru yang ramah lingkungan, mendorong pertumbuhan ekonomi rendah karbon, dan meningkatkan daya dukung sumber daya alam serta lingkungan hidup. Tujuannya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan sambil tetap mendorong pertumbuhan ekonomi.

Transformasi menuju ekonomi hijau di Indonesia diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6-7% per tahun, sekaligus menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 100% pada tahun 2060 atau lebih cepat. Strategi utamanya meliputi pembangunan rendah karbon, pembangunan berketahanan iklim, dan penerapan ekonomi sirkular. Beberapa kebijakan kunci dalam

transformasi ini antara lain transisi energi menuju energi baru terbarukan, pengelolaan hutan lestari, pengembangan tenaga kerja hijau, pengelolaan keanekaragaman hayati berkelanjutan, dan peningkatan kualitas lingkungan hidup.

Untuk mengukur kemajuan transformasi ekonomi hijau, dikembangkan Indeks Ekonomi Hijau yang terdiri dari 16 indikator dalam 3 pilar: lingkungan (6 indikator), ekonomi (6 indikator), dan sosial (4 indikator). Indeks ini digunakan untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ekonomi hijau di tingkat nasional dan daerah. Indikator-indikator ini mencakup aspek seperti tutupan hutan, bauran energi terbarukan, kualitas air dan udara, penurunan emisi GRK, produktivitas sektor pertanian dan industri, serta indikator sosial seperti tingkat kemiskinan dan pengangguran.

Transformasi menuju ekonomi hijau membutuhkan perubahan fundamental dalam model pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, jika berhasil dilaksanakan, diproyeksikan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Implementasi ekonomi hijau juga sejalan dengan upaya Indonesia dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan dan visi Indonesia 2045 sebagai negara maju yang berdaulat, adil, dan makmur.



Sumber: Bappenas RI

Gambar 3.13 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2023

Data capaian Indeks Ekonomi Hijau Kalimantan Selatan yang ditampilkan menunjukkan perkembangan skor dari tiga pilar utama (Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial) serta skor

keseluruhan Indeks Ekonomi Hijau dari tahun 2015 hingga 2023. Berikut adalah penjelasan detailnya:

3.2.15.1 Pilar Lingkungan

- ✧ Skor Pilar Lingkungan cenderung meningkat secara bertahap dari tahun 2015 hingga 2023.
- ✧ Pada tahun 2015, skor berada di angka **18,52**, kemudian mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai **41,47** pada tahun 2022 dan sedikit turun menjadi **40,61** pada tahun 2023.
- ✧ Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek lingkungan, seperti pengelolaan sumber daya alam dan keberlanjutan ekosistem.

3.2.15.2 Pilar Ekonomi

- ✧ Pilar Ekonomi menunjukkan fluktuasi selama periode tersebut.
- ✧ Pada tahun 2015, skor awal adalah **43,40**, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2019 dengan skor **51,89**.
- ✧ Setelah itu, terjadi penurunan hingga **43,69** pada tahun 2020 sebelum meningkat kembali menjadi **62,78** pada tahun 2023.
- ✧ Kenaikan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berorientasi pada prinsip keberlanjutan.

3.2.15.3 Pilar Sosial

- ✧ Pilar Sosial memiliki skor yang relatif stabil dengan tren peningkatan dari **66,52** pada tahun 2015 menjadi **72,99** pada tahun 2023.
- ✧ Skor ini menunjukkan penguatan dalam aspek sosial seperti kesejahteraan masyarakat, kesetaraan, dan kualitas hidup.

3.2.15.4 Indeks Ekonomi Hijau

- ✧ Indeks Ekonomi Hijau sebagai gabungan ketiga pilar menunjukkan tren positif secara keseluruhan.
- ✧ Pada tahun 2015, indeks berada di angka **35,58**, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai angka tertinggi yaitu **53,74** pada tahun 2023.
- ✧ Hal ini mengindikasikan bahwa Kalimantan Selatan semakin mendekati ekonomi yang berkelanjutan dengan keseimbangan antara aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.

Secara umum, data ini menunjukkan bahwa Kalimantan Selatan telah membuat kemajuan signifikan dalam mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau selama hampir satu dekade terakhir. Peningkatan skor di semua pilar mencerminkan keberhasilan dalam upaya pembangunan berkelanjutan di wilayah tersebut.

Tabel 3.7 Indikator Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 dan 2023

Pilar	No	Indikator	Skor 2015	Skor 2023
Lingkungan	1	Tutupan Lahan	25,14	26,57
	2	Bauran Energi Terbarukan	8,76	24,83
	3	Kualitas air permukaan (parameter NO2)	-135,75	36,75
	4	Penurunan tutupan gambut	6,20	66,70
	5	Kualitas udara (parameter NO2)	70,99	86,17
	6	Penurunan Emisi GRK	0,00	2,63
Ekonomi	7	Intensitas Emisi GRK	84,35	88,59
	8	Intensitas Energi Akhir	-156,27	47,10
	9	PDRB/kapita	44,29	49,73
	10	Produktivitas Pertanian	39,06	38,20
	11	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri	74,75	92,22
	12	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa	25,40	67,16
Sosial	13	Rata-Rata Tahun Sekolah	57,60	65,50
	14	Angka Harapan Hidup	51,20	57,88
	15	Tingkat Kemiskinan	65,66	71,39
	16	Tingkat Pengangguran Terbuka	91,64	97,18

Sumber: Bappenas RI

Capaian tabel indikator indeks ekonomi hijau menunjukkan perkembangan skor dari tahun 2015 ke tahun 2023 berdasarkan tiga pilar utama: Lingkungan, Ekonomi, dan Sosial. Berikut penjelasan capaian untuk masing-masing indikator:

✦ PILAR LINGKUNGAN

- Tutupan Lahan: Skor meningkat dari 25.14 menjadi 26.57, menunjukkan sedikit perbaikan dalam perlindungan lahan.
- Bauran Energi Terbarukan: Skor meningkat signifikan dari 8.76 ke 24.83, mencerminkan peningkatan penggunaan energi terbarukan.
- Kualitas Air Permukaan (parameter NO2): Skor membaik drastis dari -135.75 menjadi 36.75, menunjukkan peningkatan kualitas air.
- Penurunan Tutupan Gambut: Skor naik dari 6.20 ke 66.70, mencerminkan keberhasilan dalam mengurangi degradasi gambut.

- Kualitas Udara (parameter NO₂): Skor meningkat dari 70.99 ke 86.17, menunjukkan kualitas udara yang lebih baik.
- Penurunan Emisi GRK: Skor naik dari 0.00 ke 2.63, meskipun masih rendah, ada kemajuan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca.

✦ PILAR EKONOMI

- Intensitas Emisi GRK: Skor meningkat dari 84.35 ke 88.59, menunjukkan efisiensi emisi gas rumah kaca yang lebih tinggi.
- Intensitas Energi Akhir: Peningkatan signifikan dari -156.27 menjadi 47.10, mencerminkan efisiensi penggunaan energi akhir yang lebih baik.
- PDRB/kapita: Skor naik dari 44.29 ke 49.73, menandakan peningkatan produktivitas ekonomi per kapita.
- Produktivitas Pertanian: Skor sedikit turun dari 39.06 ke 38.20, menunjukkan stagnasi atau penurunan produktivitas sektor pertanian.
- Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri: Skor meningkat tajam dari 74.75 ke 92.22, mencerminkan produktivitas industri yang lebih tinggi.
- Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Jasa: Skor naik signifikan dari 25.40 ke 67.16, menunjukkan perkembangan pesat sektor jasa.

✦ Pilar Sosial

- Rata-rata Tahun Sekolah: Skor meningkat dari 57.60 ke 65.50, mencerminkan peningkatan akses pendidikan.
- Angka Harapan Hidup: Skor naik dari 51.20 ke 57.88, menunjukkan perbaikan kesehatan masyarakat.
- Tingkat Kemiskinan: Skor meningkat dari 65.66 ke 71.39, mencerminkan pengurangan tingkat kemiskinan.
- Tingkat Pengangguran Terbuka: Skor naik dari 91.64 ke 97.18, menunjukkan penurunan angka pengangguran.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan tren positif pada sebagian besar indikator ekonomi hijau antara tahun 2015 dan 2023, terutama dalam aspek lingkungan dan sosial, serta beberapa sektor ekonomi seperti industri dan jasa yang mengalami peningkatan produktivitas signifikan. Namun, ada tantangan di sektor pertanian yang stagnan atau menurun sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

3.2.16 Ekonomi Biru

Ekonomi Biru adalah pendekatan pembangunan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan¹. Konsep ini merujuk pada ekonomi yang mengedepankan sektor maritim dan perairan lainnya untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi dengan melibatkan masyarakat, efisiensi sumber daya, dan meminimalkan limbah.

Beberapa poin penting tentang Ekonomi Biru:

- 1) Tujuan utamanya adalah meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut dan pesisir serta ekosistemnya.
- 2) Fokus pada sektor-sektor prioritas seperti perikanan, industri kelautan, transportasi laut, pariwisata bahari, energi terbarukan, bioteknologi, dan konservasi laut.
- 3) Memiliki potensi besar di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, dengan target kontribusi PDB Maritim mencapai 15% pada tahun 2045.
- 4) Mengintegrasikan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial dalam pengembangannya.
- 5) Bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem laut.

Ekonomi Biru merupakan pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada eksploitasi sumber daya laut, tetapi juga memperhatikan aspek konservasi dan keberlanjutan untuk kepentingan generasi saat ini dan masa depan.

Provinsi	IBEI 2023	Provinsi	IBEI 2023
Sulawesi Selatan	62,98	Papua Selatan	33,50
Jawa Timur	55,79	Kalimantan Barat	30,79
Nusa Tenggara Timur	53,35	Kalimantan Timur	29,07
Sulawesi Utara	52,94	Riau	25,60
Maluku	52,35	Bengkulu	24,51
Jawa Tengah	50,86	Kepulauan Bangka Belitung	24,35
Papua Barat Daya	49,25	Sulawesi Barat	24,32
Papua Barat	48,31	Kalimantan Utara	23,88
Nusa Tenggara Barat	48,15	Bali	23,58
Sulawesi Tenggara	47,17	Sumatera Barat	23,15
Sulawesi Tengah	46,63	Banten	22,62
Sumatera Utara	45,77	Kalimantan Selatan	22,56
Aceh	42,84	Kalimantan Tengah	21,61
Jawa Barat	42,56	Lampung	21,53
Maluku Utara	42,50	Papua Tengah	21,48
Gorontalo	37,03	DKI Jakarta	20,95
Kepulauan Riau	35,43	Sumatera Selatan	18,56
Indonesia	34,25	Jambi	14,03
Papua	34,20	DI Yogyakarta	8,93

Sumber: Bappenas RI

Gambar 3.14 Indeks Ekonomi Biru Indonesia 2023

Indeks Ekonomi Biru (IBE) Kalimantan Selatan pada tahun 2023 menunjukkan capaian sebesar 22,56, yang menempatkan provinsi ini di peringkat bawah dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Nilai ini jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu 34,25, dan juga lebih rendah dibandingkan provinsi-provinsi lain di wilayah Kalimantan seperti Kalimantan Barat (30,79), Kalimantan Timur (29,07), dan Kalimantan Utara (23,88).

Capaian IBE ini mencerminkan tingkat pemanfaatan ekonomi berbasis kelautan dan perairan secara berkelanjutan di Kalimantan Selatan. Rendahnya nilai indeks ini dapat mengindikasikan tantangan dalam mengelola sumber daya laut dan perairan secara optimal untuk mendukung pembangunan ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Variable Description	Kalimantan Selatan		
Blue Economy Index	22,56		
Economic Pillar	9,89		
Environment Pillar	9,46		
Social Pillar	50,26		
Subindeks Perikanan dan Budidaya (Akuakultur)	2,30	Subindeks Kualitas Sumber Daya dan Konservasi Laut	10,46
Peran sektor perikanan dalam PDB	4,14	Kawasan terumbu karang berkualitas baik	21,57
Volume produksi perikanan	0,00	Kawasan lamun berkualitas baik	0,00
Volume produksi budidaya tambak	0,34	Kawasan hutan mangrove berkualitas baik	79,19
Volume produksi akuakultur laut	0,24	Jumlah desa pesisir dengan tempat pembuangan sampah	2,80
Volume produksi budidaya rumput laut	0,00	Jumlah desa pesisir dengan tempat buang air besar	15,60
Subindeks Perdagangan, Transportasi dan Logistik	2,30	Penanaman/rehabilitasi hutan mangrove, rawa, dan lahan gambut	0,00
Volume angkutan laut	16,47	Invers dari jumlah sampah yang dibuang ke laut	0,00
Jumlah penumpang angkutan laut	1,35	Invers dari jumlah sampah yang dibuang ke darat	0,00
Jumlah penumpang angkutan laut di 25 pelabuhan strategis	0,67	Luas kawasan konservasi perairan	2,38
Volume ekspor perikanan	0,20	Subindex Energi Terbarukan	1,76
Kontribusi Ekspor Produk Perikanan Terhadap Total Ekspor	0,40	Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) (MW)	0,20
Volume Ekspor Perikanan Hidup dan Segar	0,03	Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)(GWh)	0,02
Subindeks Industri Berbasis Kelautan	21,49	Kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (MW)	0,30
Volume ekspor ikan olahan	0,17	Listrik yang dihasilkan oleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) (GWh)	1,54
Volume produksi garam	0,00	Subindex Kesejahteraan	19,99
Jumlah perahu/kapal penangkap ikan	35,36	Invers dari Persentase penduduk desa pesisir penerima Program Keluarga Harapan (PKH)	0,05
Subindeks Pariwisata Berbasis Kelautan	8,40	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan	11,59
Jumlah wisata bahari	2,00	Jumlah perempuan di sektor perikanan	11,59
Jumlah usaha/perusahaan wisata tirta komersial	0,20	Subindex Kesehatan	64,63
Subindex Enabler: Teknologi	0,00	Rata-rata Konsumsi Kalori Ikan per Kapita (kkal) per Hari	6,77
Jumlah kapal perikanan tangkap laut – kapal motor > 30 GT	0,00	Rata-Rata Konsumsi Protein dari Ikan per Kapita (kkal)	12,11
Subindex Enabler: Tata Kelola	5,06	Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Perikanan yang Memiliki Jaminan Kesehatan (Persen)	0,03
Jumlah Pelabuhan Perikanan dengan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4,00	Invers dari Persentase Penduduk Pesisir yang Hidup di Bawah Garis Kemiskinan	0,39
Catatan: nilai setiap indikator merupakan nilai yang berasal dari data sekunder berdasarkan metadata IBEI		Subindex Pendidikan	3,22
		Jumlah SMK Kemaritiman	1,20
		Jumlah lulusan sekolah perikanan	0,00
		Jumlah peserta pelatihan perikanan	0,86
		Persentase Penduduk Sektor Perikanan dengan Pendidikan Terakhir SMA atau Sederajat	0,02
		Persentase Penduduk di Sektor Perikanan dengan Ijazah Minimal SMA atau Sederajat	0,01
		Invers dari Persentase Penduduk Bekerja di Sektor Perikanan Penerima Program Indonesia Pintar (PIP)	0,20

Sumber: Bappenas RI

Gambar 3.15 Capaian pilar Indikator Indeks Ekonomi Biru Indonesia 2023

Data capaian Indeks Ekonomi Biru (Blue Economy Index) Kalimantan Selatan tahun 2023 berdasarkan lampiran menunjukkan skor total sebesar 22,56. Indeks ini terdiri dari tiga pilar utama: pilar ekonomi, pilar lingkungan, dan pilar sosial, dengan rincian sebagai berikut:

3.2.16.1 Pilar Ekonomi

- **Skor:** 9,89
- Pilar ini meliputi beberapa subindeks, seperti:
 - **Subindeks Perikanan dan Budidaya (Akuakultur):** Skor 2,30. Kontribusi sektor perikanan terhadap PDB dan volume produksi perikanan serta budidaya menjadi indikator utama.

- **Subindeks Perdagangan, Transportasi, dan Logistik:** Skor 2,30. Volume angkutan laut dan ekspor produk perikanan menjadi penentu.
- **Subindeks Industri Berbasis Kelautan:** Skor 2,11. Indikator seperti volume ekspor olahan dan jumlah kapal pengangkut ikan berkontribusi di sini.
- **Subindeks Pariwisata Berbasis Kelautan:** Skor 2,36. Jumlah wisata bahari dan usaha wisata turut diperhitungkan.
- **Subindeks Enabler Teknologi dan Tata Kelola:** Skor 0,82. Indikator ini mencakup jumlah kapal tangkap ikan dan keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

3.2.16.2 Pilar Lingkungan

- **Skor:** 9,46
- Pilar ini mencakup:
 - **Subindeks Kualitas Sumber Daya dan Konservasi Laut:** Skor 10,46. Indikator seperti luas kawasan terumbu karang berkualitas baik (21,57) dan kawasan mangrove berkualitas baik (79,19) menjadi faktor utama.
 - **Subindeks Energi Terbarukan:** Skor rendah yaitu 1,76. Kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan tenaga air (PLTA) masih terbatas.

3.2.16.3 Pilar Sosial

- **Skor:** 50,26
- Pilar ini memiliki kontribusi terbesar terhadap indeks total karena mencakup aspek kesejahteraan masyarakat pesisir:
 - **Subindeks Kesejahteraan:** Skor 19,99. Indikator seperti jumlah nelayan/pembudidaya ikan (11,59) menjadi penentu utama.
 - **Subindeks Kesehatan:** Skor tertinggi yaitu 64,65. Konsumsi kalori dan protein ikan per kapita serta jaminan kesehatan bagi pekerja sektor perikanan menjadi indikator penting.
 - **Subindeks Pendidikan:** Skor rendah yaitu 3,29. Jumlah sekolah kemaritiman dan pelatihan masih terbatas.

3.2.16.4 Faktor yang Mempengaruhi Capaian Indeks

1. **Kondisi Infrastruktur:**
 - Rendahnya skor pada subindeks teknologi dan tata kelola menunjukkan keterbatasan infrastruktur pendukung seperti TPI atau kapal tangkap modern.
2. **Kualitas Lingkungan:**

- Meski kawasan mangrove memiliki skor tinggi (79,19), rendahnya kapasitas energi terbarukan (PLTS/PLTA) memengaruhi skor lingkungan secara keseluruhan.

3. Kesejahteraan Sosial:

- Tingginya skor pada pilar sosial mencerminkan fokus pada konsumsi ikan sebagai sumber gizi masyarakat serta jaminan kesehatan bagi pekerja sektor perikanan.

4. Dukungan Kebijakan:

- Kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor perikanan seperti program keluarga harapan (PKH) untuk masyarakat pesisir turut memengaruhi capaian pilar sosial.

5. Ekspor dan Produksi:

- Rendahnya volume ekspor produk olahan menunjukkan peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dalam pengembangan industri berbasis kelautan.

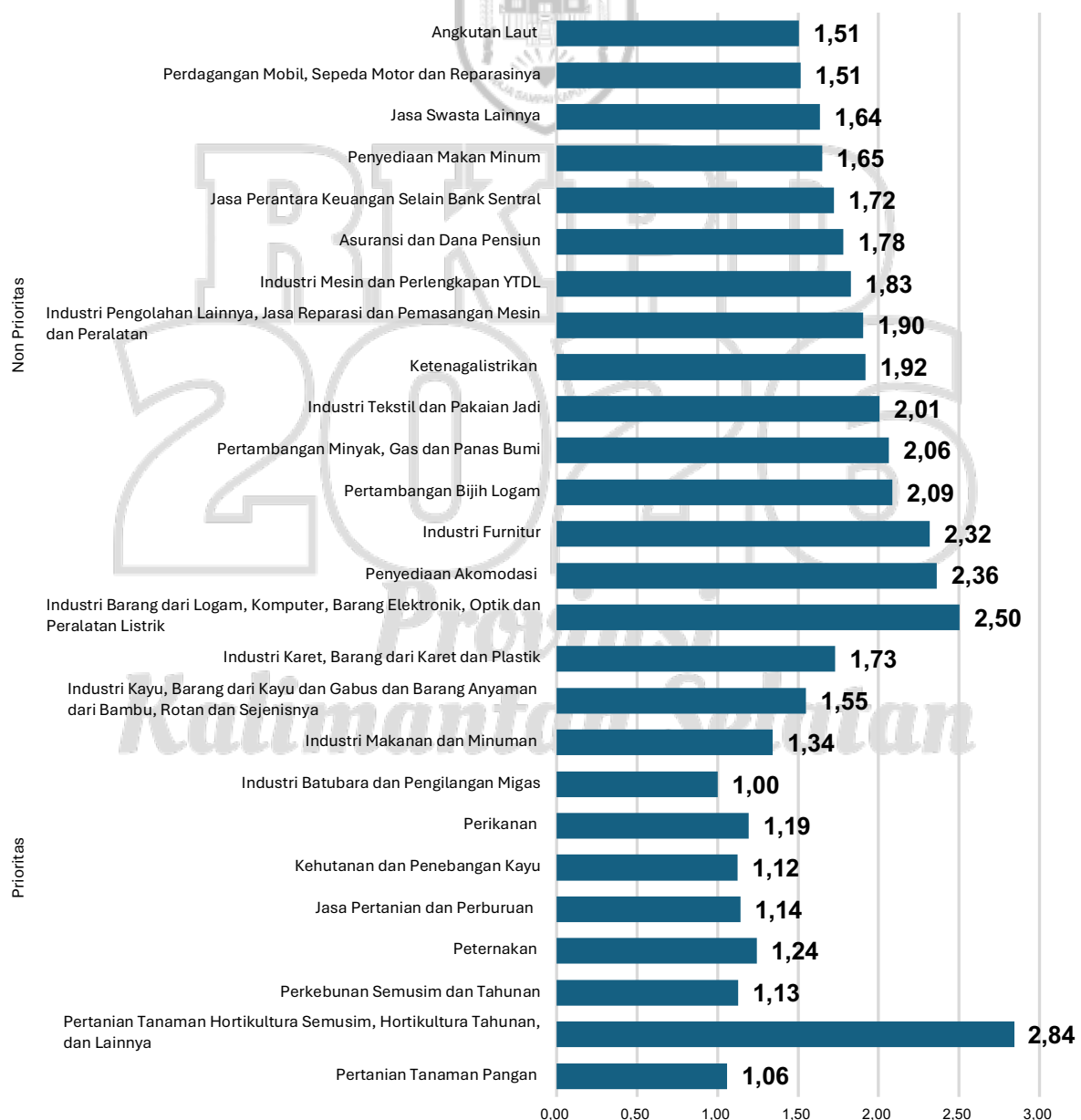
Secara keseluruhan, meskipun pilar sosial menunjukkan capaian yang baik, tantangan terbesar ada pada peningkatan pilar ekonomi dan lingkungan melalui penguatan infrastruktur serta pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

3.2.17 Input Output Hijau

Tujuan dari Ekonomi Hijau (*Green Economy*) di Indonesia adalah untuk menciptakan ekonomi yang lebih ramah lingkungan, serta mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan mengoptimalkan kesejahteraan sosial. Beberapa tujuan utama dari Ekonomi Hijau antara lain:

- 1) Transisi bahan bakar fosil: Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengembangkan energi ramah lingkungan, seperti energi baru dan terbarukan.
- 2) Optimalisasi efisiensi energi: Meningkatkan efisiensi energi dalam berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan pembangkitan listrik.
- 3) Mitigasi perubahan iklim: Mengurangi emisi karbon dan mengadaptasi keadaan yang diperlukan untuk mengatasi perubahan iklim.
- 4) Peningkatan kesejahteraan dan kesetaraan sosial: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan, serta mengurangi kemiskinan ekstrem.
- 5) Peningkatan kinerja ekonomi: Meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk pertanian, industri, dan perikanan.
- 6) Peningkatan kualitas hidup: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat, termasuk kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah melakukan kajian bersama Universitas Lambung Mangkurat pada tahun 2023 untuk melihat potensi dari pengembangan ekonomi hijau di Kalimantan Selatan. Hasil kajian menyimpulkan bahwa ada beberapa sektor memiliki produktifitas yang tinggi, ada juga yang memiliki serapan tenaga kerja yang tinggi, dan menghasilkan emisi yang rendah. Berdasarkan data yang dihasilkan, Pemerintah dapat memilih untuk mengkombinasikan kebijakan dalam menentukan prioritas pembangunan yang produktifitasnya tinggi, serapan tenaga kerjanya tinggi, tetapi menghasilkan emisi yang rendah. Data – data tersebut dapat dilihat pada Pengganda Output Sektor Prioritas dan Non Prioritas; Pengganda Kesempatan Kerja Sektor Prioritas dan Non Prioritas; serta Multiplier Emisi CO₂ Sektor Prioritas dan Non Prioritas.



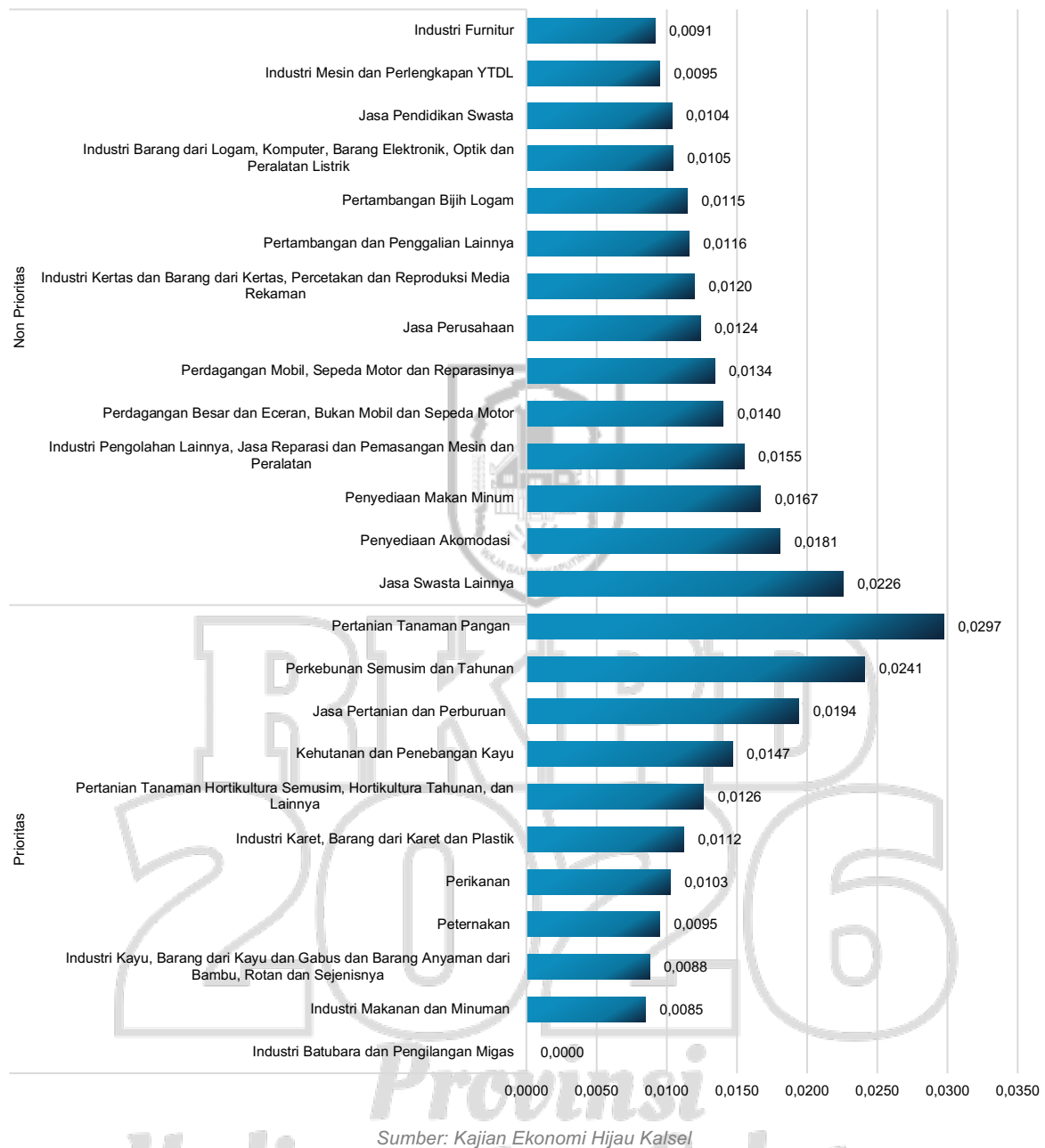
Sumber: Kajian Ekonomi Hijau Kalsel

Gambar 3.16 Pengganda Output Sektor Prioritas dan Non Prioritas

Pada Gambar menunjukkan nilai pengganda output untuk sektor prioritas ada 3 sektor yang besarnya pengganda output di atas rata-rata. Besarnya pengganda output pada sektor prioritas mengindikasikan bahwa sektor-sektor tersebut memberikan dampak output yang tinggi jika terdapat kenaikan dalam permintaan akhir seperti investasi dan konsumsi rumah tangga termasuk ekspor.

Sebaliknya banyak sektor non prioritas yang memiliki pengganda output tinggi. Terdapat 15 sektor yang memiliki pengganda output di atas rata-rata. Sektor-sektor yang memiliki angka pengganda output yang besar antara lain Industri Barang dari Logam, Komputer, Barang Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik, Penyediaan Akomodasi, Industri Furnitur, Pertambangan Bijih Logam, Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi, Industri Tekstil dan Pakaian Jadi. Sektor-sektor ini memiliki angka pengganda output di atas 2.



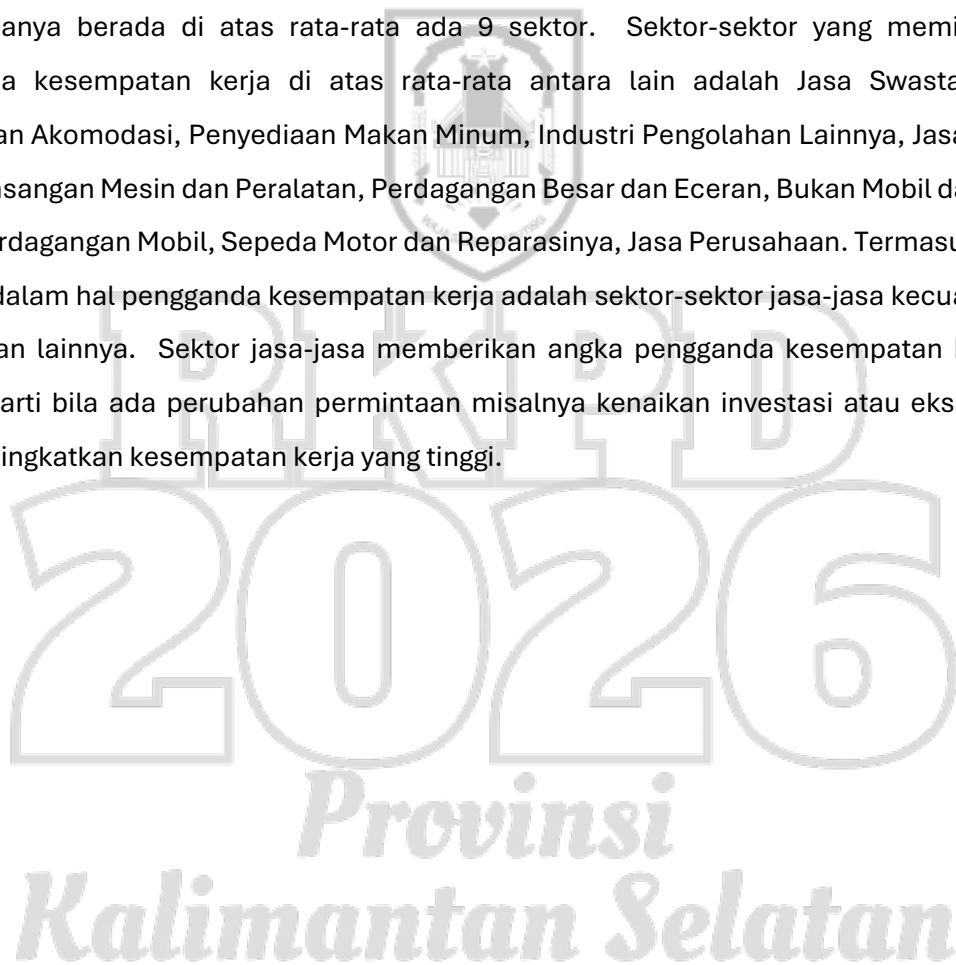


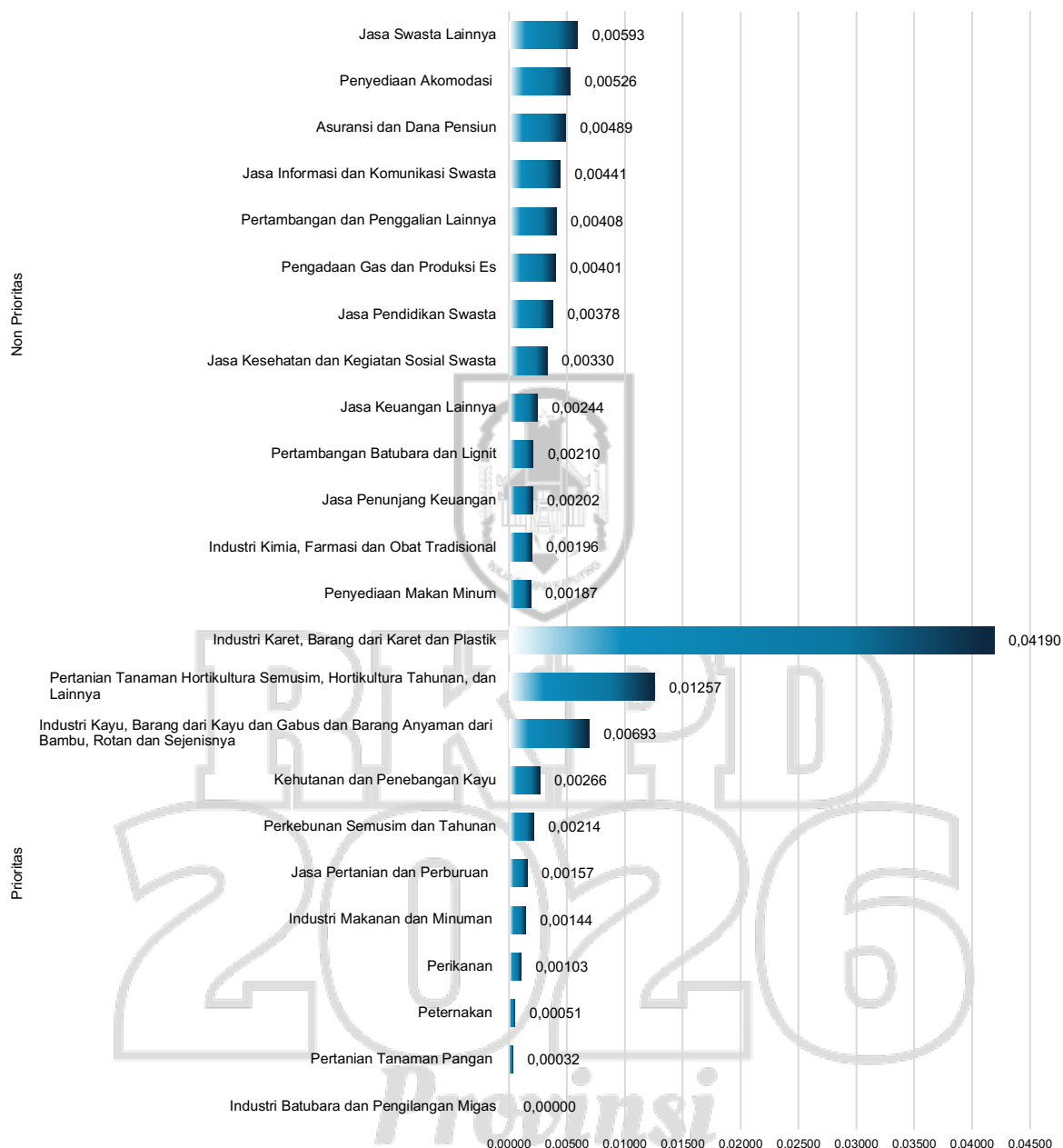
Gambar 3.17 Pegganda Kesempatan Kerja Sektor Prioritas dan Non Prioritas

Gambar menunjukkan bahwa sektor yang memiliki pengganda kesempatan kerja yang tinggi untuk sektor prioritas adalah sektor-sektor pertanian dalam arti luas. Hal ini menunjukkan bahwa bila terjadi perubahan atau ada shock di permintaan akhir atau adanya kenaikan investasi, atau ekspor, maka akan terjadi kenaikan kesempatan kerja yang tinggi di sektor pertanian dalam arti luas. Angka pengganda kesempatan kerja untuk sektor prioritas secara umum besarnya di atas rata-rata, kecuali sektor industri makanan dan minuman. Namun, besaran angkanya berada pada nilai rata-rata. Ini artinya bahwa sektor-sektor prioritas memiliki angka pengganda kesempatan kerja yang di atas rata-rata dan ini memberikan indikasi bahwa bila ada perubahan

permintaan akhir atau ada perubahan investasi atau ekspor, maka sektor prioritas akan memberikan kesempatan kerja yang tinggi.

Jumlah sektor-sektor non prioritas adalah 14 sektor, yang didominasi oleh sektor jasa-jasa dan industri pengolahan. Angka pengganda kesempatan kerja sektor industri pengolahan yang berada di atas rata-rata hanya ada 5 sektor yaitu sektor Industri pengolahan lainnya, jasa reparasi dan pemasangan mesin, Industri kertas dan barang kertas, percetakan dan reproduksi media, Industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik dan lain-lain, Industri mesin dan perlengkapan, dan Industri furnitur. Sedangkan jumlah sektor jasa yang angka penggandanya berada di atas rata-rata ada 9 sektor. Sektor-sektor yang memiliki angka pengganda kesempatan kerja di atas rata-rata antara lain adalah Jasa Swasta Lainnya, Penyediaan Akomodasi, Penyediaan Makan Minum, Industri Pengolahan Lainnya, Jasa Reparasi dan Pemasangan Mesin dan Peralatan, Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor, Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya, Jasa Perusahaan. Termasuk dalam 5 terbesar dalam hal pengganda kesempatan kerja adalah sektor-sektor jasa-jasa kecuali Industri pengolahan lainnya. Sektor jasa-jasa memberikan angka pengganda kesempatan kerja yang besar berarti bila ada perubahan permintaan misalnya kenaikan investasi atau ekspor, maka akan meningkatkan kesempatan kerja yang tinggi.





Gambar 3.18 Multiplier Emisi CO₂ Sektor Prioritas dan Non Prioritas

Sektor prioritas yang terdiri dari sebelas sektor hanya berkontribusi sebesar 5.85% dari total emisi CO₂. Masing-masing emisi di sektor prioritas memiliki kurang dari 1% kecuali Perdagangan yang berkontribusi 3.38%. Multiplier emisi karbon untuk sektor prioritas relatif rendah dan umumnya di bawah rata-rata multiplier emisi karbon. Hanya sektor Industri karet, barang dari karet dan plastik yang emisinya berada pada batas rata-rata. Ini artinya bahwa seluruh sektor prioritas telah memenuhi kategori ramah lingkungan karena proses produksi menghasilkan emisi yang rendah karbon, karena hampir semua sektor prioritas memiliki multiplier yang rendah karbon. Apalagi total emisi karbon yang dihasilkan seluruh sektor prioritas hanya menghasilkan emisi karbon kurang dari 6% dari total seluruh emisi karbon yang dihasilkan

dari seluruh proses produksi. Dengan demikian, jika sektor prioritas didorong untuk menjadi sektor pendorong pertumbuhan maka dampaknya tidak mengakibatkan pada kerusakan lingkungan. Artinya pemilihan sektor prioritas telah memenuhi 2 kriteria ekonomi hijau yaitu sektor yang tinggi multiplier pertumbuhan output dan rendah multiplier emisi CO₂ (karbon). Untuk melihat kriteria ketiga dari ekonomi hijau yaitu inklusivitas, maka bila sektor prioritas terpilih diberikan shock investasi, akan dapat dilihat potensi dampak investasi tersebut terhadap distribusi pendapatan masyarakat.

3.3 Tantangan Dan Peluang Perekonomian Kedepan

3.3.1 Gambaran Dan Prospek Perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan Tahun 2025-2026

Perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tahun 2025 meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Berdasarkan proyeksi dari berbagai lembaga keuangan dan ekonomi terkemuka, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan tetap kuat dan bahkan meningkat di tahun 2026, dengan Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif yang konsisten. Fundamental ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, dan implementasi berbagai kebijakan strategis menjadi faktor kunci yang mendorong optimisme terhadap prospek ekonomi di kedua wilayah tersebut dalam dua tahun ke depan.

3.3.1.1 Kondisi dan Prospek Perekonomian Indonesia 2025-2026

A. Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor Pendorongnya

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan tren yang positif dengan berbagai lembaga ekonomi memberikan proyeksi yang optimistis. Development Bank of Singapore (DBS) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan mencapai 5,1 persen, angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan 5,03 persen pada 2024. Sementara itu, ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap kuat di angka 5,0 persen pada tahun 2025, didorong oleh permintaan domestik dan implementasi program prioritas pemerintah.

Bank Indonesia (BI) memiliki pandangan yang sejalan dengan proyeksi tersebut, di mana Gubernur BI Perry Warjiyo memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik mencapai 4,8%-5,6% pada 2025 dan kemudian meningkat menjadi 4,9%-5,7% pada 2026. Perkiraan ini menunjukkan optimisme terhadap kinerja ekonomi Indonesia meskipun menghadapi tantangan global yang tidak menentu.

Pertumbuhan ekonomi di tahun 2025 diproyeksikan akan menghadapi kekuatan dua arah pada paruh pertama, dengan kuartal II 2025 diprediksi sebagai periode yang kuat untuk pertumbuhan karena adanya momentum Ramadan dan Idul Fitri. Konsumsi swasta dan pemerintah, investasi, serta kinerja ekspor diperkirakan akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode 2025-2026.

B. Stabilitas Makroekonomi dan Kebijakan Moneter

Inflasi di Indonesia diproyeksikan akan tetap terkendali dalam sasaran $2,5 \pm 1\%$ pada tahun 2025 dan 2026, berkat sinergi kebijakan moneter, fiskal, dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Pengendalian inflasi ini menjadi salah satu indikator stabilitas ekonomi yang penting, yang akan mendukung daya beli masyarakat dan keberlangsungan aktivitas ekonomi.

Nilai tukar rupiah pada tahun 2025 diperkirakan akan dijaga stabil dengan komitmen yang tinggi dari Bank Indonesia. Stabilitas ini didukung oleh fundamental yang baik, inflasi rendah, imbal hasil investasi yang menarik, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Selain itu, neraca pembayaran yang sehat dan cadangan devisa yang meningkat juga akan berkontribusi pada stabilitas eksternal ekonomi Indonesia.

Bank Indonesia juga memperkirakan pertumbuhan kredit pada 2025 dan 2026 akan mengalami peningkatan dengan bergerak di kisaran 11-13 persen. Hal ini sejalan dengan stabilitas sistem keuangan yang diproyeksikan akan tetap terjaga. Ekonomi keuangan digital juga diprediksi akan meningkat pesat dengan transaksi e-commerce, digital banking, dan uang elektronik yang diperkirakan tumbuh tinggi.

C. Tantangan dan Risiko Global

Meskipun proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup optimistis, terdapat beberapa tantangan dan risiko global yang perlu diwaspadai. Menurut Bank Indonesia, beberapa tantangan utama di tahun 2025 meliputi divergensi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dibandingkan dengan negara-negara lain, serta risiko geopolitik yang tinggi dan fragmentasi perdagangan.

Terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-47 dengan kebijakan "America First" juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap ketidakpastian global, terutama terkait kebijakan fiskal AS yang lebih agresif dan kebijakan perdagangan yang proteksionis. Hal ini berpotensi mempengaruhi perdagangan global dan aliran investasi ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

3.3.1.2 Kondisi dan Prospek Perekonomian Kalimantan Selatan 2025-2026

A. Pertumbuhan Ekonomi Regional yang Kuat

Perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan diprediksi akan tetap tumbuh kuat dalam kisaran 4,4% hingga 5,2% year-on-year (yoy) pada tahun 2025. Proyeksi ini mencerminkan stabilitas yang serupa dengan tahun 2024 dan menunjukkan ketahanan ekonomi daerah di tengah berbagai tantangan ketidakpastian global dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah.

Data awal tahun 2025 menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Selatan terus melanjutkan tren positifnya, dengan pertumbuhan ekonomi di triwulan IV tahun 2024 yang secara year-on-year tumbuh 5,15 persen, lebih tinggi dari angka nasional yang mencapai 5,05 persen. PDRB Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp286,82 Triliun (ADHB) atau Rp156,76 Triliun (ADHK), yang menggambarkan ukuran ekonomi regional yang cukup substansial.

B. Struktur Ekonomi dan Sektor Unggulan

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan masih ditopang oleh lapangan usaha Pertambangan dengan kontribusi 29,47 persen, sementara berdasarkan pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih mendominasi PDRB Kalimantan Selatan sebesar 46,32 persen. Ketergantungan yang tinggi pada sektor ekstraktif ini menjadi salah satu karakteristik ekonomi Kalimantan Selatan yang sekaligus menjadi tantangan untuk diversifikasi ekonomi di masa depan.

Sektor-sektor utama yang diproyeksikan akan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan dalam periode 2025-2026 meliputi Pertambangan, Pertanian, Industri Pengolahan, Perdagangan, dan Konstruksi. Sektor-sektor ini diharapkan terus memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB provinsi dan menyerap tenaga kerja lokal.

C. Stabilitas Harga dan Pengendalian Inflasi

Inflasi di Kalimantan Selatan pada Januari 2025 masih terkendali dan tercatat sebesar 0,62 persen (yoy), lebih rendah dari angka nasional yang mencapai 0,76 persen. Tingkat inflasi yang rendah ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pengendalian harga dan stabilitas ekonomi di tingkat regional.

Ke depan, Kalimantan Selatan diperkirakan akan tetap berada dalam rentang sasaran target inflasi nasional, yaitu $2,5\% \pm 1\%$. Untuk menjaga inflasi tetap dalam target, diperlukan penguatan sinergi kebijakan dalam kerangka 4K, yaitu Ketersediaan Pasokan, Keterjangkauan Harga, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif. Implementasi kerangka ini diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat di Kalimantan Selatan.

3.3.1.3 Sinergi Kebijakan dan Transformasi Ekonomi

A. Penguatan Stabilitas dan Transformasi Ekonomi Nasional

Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2025 terus menyelenggarakan program-program yang berfokus pada sinergi untuk memperkuat stabilitas dan transformasi ekonomi nasional. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan mitra strategis di Kalimantan Selatan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan mempercepat transformasi ekonomi di tingkat regional.

Gubernur Bank Indonesia menegaskan pentingnya transformasi ekonomi melalui digitalisasi, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan ekonomi hijau sebagai arah kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Transformasi ini menjadi agenda penting dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik yang semakin kompleks.

B. Agenda Kebijakan untuk Mendorong Pertumbuhan

Untuk memperkuat ketahanan dan meningkatkan kinerja perekonomian nasional lebih tinggi, beberapa agenda kebijakan yang ditempuh dalam transformasi ekonomi nasional meliputi sinergi untuk memperkuat stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, sinergi mendorong pertumbuhan domestik melalui konsumsi dan investasi, serta sinergi meningkatkan produktivitas dan kapasitas ekonomi nasional.

Selain itu, agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional juga mencakup sinergi pendalaman keuangan untuk pembiayaan perekonomian serta sinergi digitalisasi sistem pembayaran dan sektor jasa keuangan. Implementasi agenda-agenda ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan, baik di tingkat nasional maupun regional.

3.3.1.4 Prospek Investasi dan Pengembangan Ekonomi

A. Target Investasi Nasional dan Regional

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah menetapkan target investasi yang ambisius untuk tahun 2025 dan 2026. Untuk tahun 2025, investasi yang masuk ke Indonesia ditargetkan mencapai Rp1.950 triliun, kemudian meningkat menjadi Rp2.200 triliun pada tahun 2026. Target yang meningkat ini menunjukkan optimisme pemerintah terhadap iklim investasi Indonesia di tengah berbagai tantangan global.

Kalimantan Selatan sebagai provinsi dengan potensi sumber daya alam yang kaya memiliki peluang besar untuk menarik investasi, terutama di sektor pertanian, perkebunan, peternakan,

kehutanan, perikanan, pertambangan dan energi, pariwisata, industri, infrastruktur, serta jasa dan perdagangan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan kemudahan bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di provinsi ini.

B. Pengembangan Sektor Prioritas di Kalimantan Selatan

Sebagai provinsi yang masih bergantung pada sektor ekstraktif, Kalimantan Selatan diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonominya melalui pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan, serta akomodasi dan makan minum. Sektor-sektor ini memiliki potensi untuk menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan inklusif.

Pengembangan Kawasan Industri Terpadu seperti di Mantuil, Banjarmasin, yang memiliki luas lahan 341,8 hektar, membuka peluang bagi pengembangan industri manufaktur dari bahan mentah alam agroindustri sawit, karet, nanas, kayu, perikanan, dan pakan ternak¹⁶. Selain itu, posisi strategis Kota Banjarmasin sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Selatan menjadikannya sebagai pusat perniagaan dan daerah transit yang memiliki potensi ekonomi sangat besar untuk dikembangkan.

C. Persiapan Menuju Sensus Ekonomi 2026

Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan sedang melakukan persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan melaksanakan uji coba di beberapa daerah di Kalimantan Selatan. Uji coba ini bertujuan untuk menguji reliabilitas instrumen pendaftaran usaha/perusahaan, prosedur dan organisasi pelaksanaan lapangan pendataan, serta proses pengolahan data.

Kegiatan Uji Coba SE2026 di Kabupaten Barito Kuala telah dilaksanakan di Desa Jelapat I dan Tinggiran II Luar Kecamatan Tamban. Hasil dari kegiatan ini akan menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi di tahun 2026, yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang struktur ekonomi Kalimantan Selatan dan menjadi input penting untuk perencanaan pembangunan ekonomi di masa depan.

Prospek perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan untuk tahun 2025-2026 menunjukkan tren yang positif meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global.

Stabilitas makroekonomi, kebijakan moneter yang akomodatif, dan sinergi kebijakan menjadi faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Inflasi yang terkendali, nilai tukar yang stabil, dan pertumbuhan kredit yang sehat juga akan mendukung aktivitas ekonomi dan investasi.

Meskipun masih menghadapi tantangan struktural seperti ketergantungan pada sektor ekstraktif di Kalimantan Selatan, upaya diversifikasi ekonomi dan pengembangan sektor-sektor prioritas diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi regional dan menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif. Target investasi yang ambisius baik di tingkat nasional maupun regional juga menjadi indikator optimisme terhadap prospek ekonomi Indonesia dan Kalimantan Selatan di masa depan.

Dengan implementasi berbagai agenda kebijakan transformasi ekonomi nasional, termasuk digitalisasi, pendalaman pasar keuangan, dan penguatan ekonomi hijau, Indonesia dan Kalimantan Selatan memiliki potensi besar untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkelanjutan pada tahun 2025 dan 2026.

Tabel 3.8 Asumsi - Asumsi Perekonomian Kalimantan Selatan Tahun 2025

KOMPONEN	ASUMSI MAKRO 2025
Pertanian	Produksi padi dan TBS diperkirakan tumbuh stabil sejalan dengan curah hujan yang tinggi, pemupukan yang lebih baik, dan optimalisasi lahan untuk mendukung Ketahanan Pangan di Kalsel dan IKN. Walaupun demikian, keterbatasan lahan dan isu legalitas perkebunan kelapa sawit di Kawasan hutan dapat membatasi produksi TBS.
Pertambangan	Kinerja tambang batubara diperkirakan termoderasi sejalan dengan perlambatan permintaan batu bara global dan percepatan akan transisi energi hijau untuk menghasilkan renewable energy pada awal Tahun 2025 (International Energy Agency - IEA)
Industri Pengolahan	Industri Pengolahan diperkirakan masih tumbuh positif sejalan dengan permintaan terhadap CPO dan biodiesel yang tetap kuat.
Konstruksi	Prospek Konstruksi diperkirakan tumbuh meningkat sejalan dengan <i>outlook</i> investasi yang membaik pada tahun 2024
Akomodasi Makan Minum	Outlook perdagangan dan akomodasi diperkirakan mengalami akselerasi sebagai dampak rambatan dari pertumbuhan aktivitas IKN
Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Rumah tangga masih tumbuh kuat didorong oleh optimisme daya beli masyarakat yang masih cukup tinggi dan ekspektasi khususnya untuk barang tahan lama.
Konsumsi Pemerintah	Kinerja konsumsi pemerintah diperkirakan masih tumbuh walaupun memiliki lingkup yang cukup terbatas akibat defisit anggaran yang meningkat pada tahun 2025
Investasi	Akselerasi investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto) diperkirakan tumbuh meningkat pascapemilu seiring dengan berjalannya proyek pemerintah dan swasta serta kemudahan dalam melakukan investasi yang didukung oleh implementasi OSS-RBA, UU Cipta Karya, yang ditopang oleh penguatan RIRU (Regional Investor Relation Unit) Kalimantan Selatan
Net Ekspor	Kondisi Net Ekspor diperkirakan tumbuh kuat walaupun melambat di tengah elevasi tensi geopolitik yang masih tinggi dan adanya disrupsi pasokan dan energy secara global.

Sumber: Bank Indonesia KPw Kalsel dan Bappeda Kalsel

3.4 Tantangan dan Prospek Perekonomian Kalimantan Selatan 2025-2026: Analisis Komprehensif Pada Aspek Kemiskinan dan Pengangguran

Perekonomian Indonesia dan Kalimantan Selatan menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tahun 2025 meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan global. Berdasarkan proyeksi dari berbagai lembaga keuangan dan ekonomi terkemuka, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi akan tetap kuat dan bahkan meningkat di tahun 2026, dengan Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif yang konsisten. Fundamental ekonomi yang solid, inflasi yang terkendali, dan implementasi berbagai kebijakan strategis menjadi faktor kunci yang mendorong optimisme terhadap prospek ekonomi di kedua wilayah tersebut dalam dua tahun ke depan.

3.4.1 Kondisi dan Dinamika Kemiskinan di Indonesia 2025-2026

3.4.1.1 Tren Penurunan Kemiskinan Nasional

Indonesia telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengentasan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57 persen, menurun 0,46 persen poin dibanding Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin dibanding Maret 2023. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebanyak 24,06 juta orang, menurun 1,16 juta orang dibanding Maret 2024 dan menurun 1,84 juta orang dibanding Maret 2023.

Penurunan kemiskinan terjadi baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen. Jumlah penduduk miskin September 2024 di perkotaan menurun sebanyak 0,59 juta orang, sedangkan di perdesaan menurun sebanyak 0,57 juta orang dibanding Maret 2024.

Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp595.242 per kapita per bulan, meningkat 2,11% dari Maret 2024 yang sebesar Rp582.932. Garis kemiskinan ini terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp443.433 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809 (25,50 persen). Rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota, sehingga besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.803.590 per bulan.

A. Kinerja Kemiskinan Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan mencatatkan kinerja pengentasan kemiskinan yang lebih baik dibandingkan dengan rata-rata nasional. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kalimantan Selatan pada Maret 2024 sebanyak 183.310 orang atau 4,11 persen, turun dibandingkan dengan Maret 2023 yang berjumlah 188.930 orang atau 4,29 persen. Penurunan terjadi baik di perkotaan (turun 0,22 persen) maupun di perdesaan (turun 0,11 persen).

Kalimantan Selatan tercatat sebagai provinsi dengan persentase penduduk miskin terendah di Pulau Kalimantan dan nomor dua terendah se-Indonesia, setelah Bali. Prestasi ini tidak lepas dari berbagai faktor pendukung, seperti pertumbuhan ekonomi triwulan I tahun 2024 sebesar 4,96 persen, penurunan tingkat pengangguran terbuka, kecenderungan penurunan inflasi, meningkatnya nilai tukar petani, dan meningkatnya konsumsi per kapita per bulan.

Rata-rata rumah tangga miskin di Kalimantan Selatan pada September 2022 terdiri dari 4,93 orang anggota rumah tangga, dengan garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata sebesar Rp2.865.459 per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa biaya hidup rumah tangga miskin di Kalimantan Selatan sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional.

B. Target dan Strategi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan target ambisius untuk pengentasan kemiskinan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 7,0 hingga 8,0 persen pada tahun 2025, dari angka 9,36 persen pada tahun 2023. Target ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menerapkan tiga strategi utama pengentasan kemiskinan. Pertama, penurunan beban pengeluaran melalui program bantuan sosial. Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi. Ketiga, pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui regionalisasi bantuan sosial yang disesuaikan dengan tingkat kemahalan daerah.

Kemiskinan ekstrem juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83 persen, turun 0,29 poin dari Maret 2023 yang sebesar 1,12 persen. Pemerintah menargetkan penurunan kemiskinan ekstrem di bawah 0 persen pada tahun 2024, enam tahun lebih cepat dari target SDGs yang ditetapkan pada tahun 2030.

C. Tantangan dan Prospek Pengentasan Kemiskinan

Meskipun telah menunjukkan kemajuan signifikan, pengentasan kemiskinan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama di Kalimantan Selatan. Penurunan angka kemiskinan di provinsi ini masih sangat dipengaruhi oleh program bantuan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ketergantungan pada bantuan sosial menunjukkan belum adanya solusi jangka panjang yang efektif untuk mengatasi akar masalah kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyadari perlunya kajian yang lebih mendalam untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. Pada tahun 2025, Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan Kajian Penurunan Angka Kemiskinan dan Kerentanan Kemiskinan untuk menganalisis angka kemiskinan serta tingkat kerentanan kemiskinan di provinsi ini. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan dan kerentanan kemiskinan di Kalimantan Selatan.

Prospek pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan pada tahun 2025-2026 cukup optimistis, didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, dan berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun, diperlukan upaya yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak hanya didorong oleh bantuan sosial, tetapi juga oleh peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat secara mandiri.

3.4.1.2 Kondisi dan Prospek Pengangguran di Indonesia 2025-2026

A. Tren dan Target Tingkat Pengangguran Nasional

Tingkat pengangguran di Indonesia telah menunjukkan tren penurunan yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data terbaru, tingkat pengangguran Indonesia dilaporkan sebesar 4,91% pada 2024, turun dari 5,32% pada 2023. Penurunan ini mencerminkan keberhasilan berbagai kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan keterampilan tenaga kerja.

Presiden Joko Widodo telah menetapkan target ambisius untuk menurunkan angka pengangguran terbuka pada tahun 2025 menjadi 4,5-5% berdasarkan Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU-APBN) Tahun Anggaran 2025. Target ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus menekan angka pengangguran yang pada Februari 2024 tercatat sebanyak 7,2 juta orang.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 dengan tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan". Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional (Bappenas) menekankan bahwa tahun 2025 merupakan awal yang strategis untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Dengan target pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3-5,6 persen pada tahun 2025, diharapkan dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan menurunkan angka pengangguran secara signifikan.

B. Kinerja Pengangguran Kalimantan Selatan

Kalimantan Selatan telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dari rata-rata nasional dalam hal pengangguran. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,31% pada Agustus 2023, menurun sebesar 0,43% dari Agustus 2022 dan berada di bawah TPT nasional yang sebesar 5,32%. Pencapaian ini menggambarkan efektivitas program-program pemerintah daerah dalam menangani masalah pengangguran.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus berupaya menekan tingkat pengangguran dengan melaksanakan berbagai program strategis. Pada tahun 2024, pemerintah provinsi melaksanakan program pemagangan dalam negeri serta pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan dengan 24 pelatihan kejuruan, termasuk 14 paket dari APBN dan 10 paket dari APBD. Program-program ini mencakup berbagai bidang seperti tata rias kecantikan, desainer grafis muda, menjahit pakaian wanita dewasa, dan pengelola administrasi perkantoran.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga menyelenggarakan Forum Komunikasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri tahun 2024 sebagai momentum untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, termasuk tenaga kerja penyandang disabilitas. Berdasarkan data pada Agustus 2023, jumlah angkatan kerja di Kalimantan Selatan sebesar 2.173.257 orang, dengan penduduk yang bekerja sejumlah 2.079.681 orang dan pengangguran terbuka sejumlah 93.576 orang.

C. Tantangan Pengangguran di Era Digital

Era digital telah membawa perubahan signifikan dalam struktur ketenagakerjaan dan menciptakan tantangan baru bagi upaya mengurangi pengangguran. Perubahan cepat dalam teknologi menyebabkan banyak pekerja menghadapi risiko pengangguran atau underemployment karena keterampilan mereka tidak lagi relevan. Hal ini menimbulkan kebutuhan mendesak akan program pelatihan dan pendidikan ulang (re-skilling) untuk memastikan tenaga kerja tetap kompetitif di pasar.

Transformasi digital juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru dengan kontrak fleksibel yang menimbulkan tantangan dari sisi regulasi ketenagakerjaan. Banyak pekerja dalam status

freelance tidak mendapatkan hak-hak ketenagakerjaan yang memadai, seperti upah minimum, tunjangan, atau jaminan sosial. Situasi ini memerlukan perhatian khusus dari pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi seluruh pekerja dalam ekosistem ketenagakerjaan yang terus berubah.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan pentingnya membuat terobosan untuk menghindari jumlah pengangguran karena perubahan proses bisnis dan dampak pandemi COVID-19. Meskipun Indonesia masuk 5 besar negara di dunia dengan tingkat penggunaan internet tertinggi, tantangannya adalah mengoptimalkan pemanfaatan internet secara lebih produktif dan didukung pemerataan akses infrastruktur digital.

3.4.1.3 Sinergi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

A. Interkoneksi Kemiskinan dan Pengangguran

Kemiskinan dan pengangguran merupakan dua masalah sosial ekonomi yang saling terkait erat. Penurunan tingkat pengangguran dapat berdampak positif pada penurunan angka kemiskinan, dan sebaliknya, pengentasan kemiskinan dapat membuka lebih banyak peluang pekerjaan melalui peningkatan konsumsi dan investasi. Oleh karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran perlu diintegrasikan dalam kerangka pembangunan yang komprehensif.

Di Kalimantan Selatan, penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,42 persen pada Februari 2024 dibandingkan dengan Agustus 2023 menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada penurunan angka kemiskinan di provinsi ini. Penduduk yang sebelumnya menganggur kini memiliki penghasilan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan keluar dari status kemiskinan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan perlu merancang kebijakan yang dapat mengatasi kedua masalah tersebut secara simultan. Program pelatihan keterampilan dan pemberdayaan ekonomi yang ditargetkan pada kelompok miskin dapat menjadi strategi efektif untuk mengurangi kemiskinan sekaligus menciptakan tenaga kerja yang terampil dan kompetitif di pasar kerja.

B. Strategi Terpadu untuk Kesejahteraan Sosial

Untuk mencapai target penurunan kemiskinan dan pengangguran secara bersamaan, diperlukan strategi terpadu yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat sipil perlu berkolaborasi dalam merancang dan mengimplementasikan program-program yang efektif dan berkelanjutan.

Beberapa strategi terpadu yang dapat diimplementasikan di Kalimantan Selatan antara lain:

- 1) Pertama, pengembangan sektor ekonomi padat karya, seperti pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata. Sektor-sektor ini dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.
- 2) Kedua, penguatan program perlindungan sosial yang terintegrasi dengan program pemberdayaan ekonomi. Bantuan sosial perlu dirancang sebagai jaring pengaman sosial jangka pendek, sedangkan program pemberdayaan ekonomi ditujukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat dalam jangka panjang.
- 3) Ketiga, peningkatan akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Program pendidikan dan pelatihan perlu diselaraskan dengan potensi ekonomi daerah dan tren perkembangan teknologi.
- 4) Keempat, pengembangan kewirausahaan dan UMKM sebagai penggerak ekonomi lokal. Dukungan berupa akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemasaran dapat membantu UMKM tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru.

Tantangan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dan Kalimantan Selatan pada tahun 2025-2026 masih akan dipengaruhi oleh transformasi digital, perubahan struktur ekonomi, dan dinamika global. Namun, dengan target yang jelas dan strategi yang tepat, pemerintah dapat menurunkan tingkat kemiskinan menjadi 7,0-8,0% dan tingkat pengangguran menjadi 4,5-5,0% pada tahun 2025 seperti yang dicanangkan dalam RKP 2025.

Kalimantan Selatan dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang lebih rendah dari rata-rata nasional memiliki modal yang kuat untuk terus menekan kedua angka tersebut melalui berbagai program bantuan sosial, pelatihan kejuruan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, untuk menciptakan penurunan kemiskinan dan pengangguran yang berkelanjutan, provinsi ini perlu mengembangkan solusi jangka panjang yang tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat secara mandiri.

Dengan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar dan pemberdayaan ekonomi yang inklusif, Indonesia dan Kalimantan Selatan dapat mewujudkan target penurunan kemiskinan dan pengangguran, serta menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di tahun 2025-2026.

3.5 Proyeksi Pembangunan Ekonomi Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025-2026

Proyeksi Perekonomian adalah proses memprediksi kondisi ekonomi masa depan, yang melibatkan analisis dan permodelan berdasarkan indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan

Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, suku bunga, dan tingkat pengangguran¹³. Proyeksi ini digunakan oleh pemerintah dan pelaku bisnis untuk menyusun kebijakan fiskal dan moneter, serta strategi investasi dan operasional.

3.5.1 Tujuan Proyeksi Perekonomian

1. Penentuan Kebijakan: Pemerintah menggunakan proyeksi ekonomi untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam menghadapi dinamika ekonomi global dan domestik.
2. Perencanaan Bisnis: Pelaku bisnis memanfaatkan proyeksi ekonomi untuk merencanakan investasi, produksi, dan strategi pemasaran.
3. Pengembangan Daerah: Proyeksi ekonomi daerah membantu dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah.

3.5.1.1 Metode Proyeksi:

- ✓ Metode Kuantitatif: Menggunakan data historis dan rumus matematika untuk memprediksi tren masa depan.
- ✓ Metode Trend Moment: Digunakan untuk menganalisis pola data waktu (time series) dan memproyeksikan tren ekonomi.

3.5.1.2 Manfaat Proyeksi Perekonomian:

- ✓ Membantu dalam pengambilan keputusan strategis.
- ✓ Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perencanaan yang tepat.
- ✓ Mengurangi ketidakpastian dengan memberikan gambaran kondisi ekonomi masa depan.

3.5.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 3.9 LPE dan SOG beserta Proyeksi PDRB Pengeluaran Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2026 (Persen)

KOMPONEN PENGELUARAN	LPE (%)						SUMBER PERTUMBUHAN (%)					
	GROWTH (%)						SOURCE OF GROWTH (SOG) (%)					
	2023	2024	2025	2025			2023	2024	2025	2026		
			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH
Konsumsi Rumah tangga	5,19	5,37	5,17	5,46	5,96	6,29	2,4	2,49	2,41	2,54	2,81	2,96
Konsumsi LNPRT	8,32	13,61	(2,47)	5,46	5,96	6,29	0,08	0,13	(0,03)	0,05	0,06	0,06
Konsumsi Pemerintah	4,83	4,90	4,73	5,00	5,46	5,76	0,47	0,47	0,46	0,48	0,53	0,56

KOMPONEN PENGELUARAN	LPE (%)						SUMBER PERTUMBUHAN (%)					
	GROWTH (%)						SOURCE OF GROWTH (SOG) (%)					
	2023	2024	2025	2025			2023	2024	2025	2026		
			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH
Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto	5,55	4,51	5,11	5,39	5,89	6,21	1,25	1,02	1,15	1,21	1,34	1,41
Perubahan Inventori	76,48	(100,00)	(255,46)	5,39	5,89	6,21	-0,3	0,65	0,68	0,02	0,02	0,02
Ekspor Barang dan Jasa	7,54	4,95	7,21	7,61	8,32	8,77	6,33	4,26	5,94	6,39	7,08	7,47
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	8,56	5,69	6,70	7,08	7,73	8,15	5,38	3,71	0,71	0,76	0,84	0,89
PDRB ADHK 2010	4,84	5,05	5,28	5,00	6,09	6,42	4,84	5,05	5,28	5,00	6,09	6,42

Tabel 3.10 LPE dan SOG beserta Proyeksi PDRB Lapangan Usaha Kalimantan Selatan Tahun 2022 – 2026 (Persen)

KOMPONEN LAPANGAN USAHA	LPE (%)						SUMBER PERTUMBUHAN (%)					
	GROWTH (%)						SOURCE OF GROWTH (SOG) (%)					
	2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026		
			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH
1. Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,17	4,31	3,93	4,15	4,53	4,78	0,44	0,56	0,51	0,53	0,59	0,62
2. Pertambangan dan penggalan	3,11	3,04	4,37	4,56	5,56	5,83	0,76	0,74	1,04	1,07	1,19	1,25
3. Industri pengolahan	3,01	4,87	4,79	5,06	5,53	5,83	0,38	0,60	0,59	0,62	0,69	0,72
4. Pengadaan listrik, gas	8,11	6,75	6,50	6,87	7,50	7,91	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
5. Pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang	4,69	4,76	5,53	5,84	6,38	6,73	0,02	0,02	0,02	0,03	0,03	0,03
6. Konstruksi	6,29	5,93	6,12	6,46	7,05	7,44	0,46	0,46	0,47	0,50	0,56	0,59
7. Perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor	6,17	6,36	7,04	7,44	8,12	8,57	0,57	0,60	0,67	0,72	0,80	0,84
8. Transportasi dan pergudangan	11,18	5,70	6,17	6,51	7,11	7,50	0,74	0,40	0,43	0,46	0,51	0,53
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum	9,28	8,07	7,05	7,44	8,13	8,58	0,19	0,18	0,16	0,17	0,19	0,20
10. Informasi dan komunikasi	6,57	6,73	6,67	7,05	7,70	8,12	0,29	0,30	0,31	0,33	0,36	0,38
11. Jasa keuangan	8,62	7,07	6,87	7,26	7,93	8,36	0,27	0,23	0,22	0,24	0,27	0,28
12. Real estate	6,32	5,72	5,80	6,12	6,68	7,05	0,16	0,14	0,15	0,15	0,17	0,18
13. Jasa perusahaan	7,58	6,87	6,20	6,55	7,16	7,55	0,05	0,04	0,04	0,04	0,05	0,05
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	2,92	6,95	5,29	5,59	6,10	6,44	0,15	0,34	0,27	0,28	0,31	0,33

KOMPONEN LAPANGAN USAHA	LPE (%)						SUMBER PERTUMBUHAN (%)					
	GROWTH (%)						SOURCE OF GROWTH (SOG) (%)					
	2023	2024	2025	2026			2023	2024	2025	2026		
			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH			OUT-LOOK	BASE-LINE	MODE-RATE	HIGH
15. Jasa pendidikan	3,54	4,94	4,12	4,35	4,75	5,01	0,16	0,22	0,18	0,19	0,21	0,22
16. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	5,69	5,57	6,45	6,81	7,44	7,84	0,12	0,12	0,14	0,15	0,17	0,17
17. Jasa lainnya	6,94	7,41	5,93	6,26	6,84	7,22	0,08	0,09	0,07	0,08	0,08	0,09
PDRB ADHK 2010	4,84	5,05	5,28	5,00	6,09	6,42	4,84	5,05	5,28	5,00	6,09	6,42

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan tahun 2025-2026 didorong oleh beberapa faktor utama yang menjanjikan stabilitas dan kemajuan ekonomi regional. Struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor unggulan seperti pertambangan (32,02% PDRB), pertanian (11,37% PDRB), industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi menjadi fondasi pertumbuhan yang diproyeksikan mencapai 4,4-5,2% yoy. Konsumsi rumah tangga tetap mendominasi dengan kontribusi 46,32% terhadap PDRB, mencerminkan daya beli masyarakat yang terjaga. Stabilitas ekonomi makro dengan inflasi terkendali (0,62% yoy pada Januari 2025) dan neraca perdagangan yang surplus sebesar US\$807,43 juta memberikan landasan kokoh bagi pertumbuhan ekonomi. Potensi diversifikasi melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, khususnya sport tourism dan optimalisasi peran BUMDes, semakin memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi daerah ini.

Di sisi lain, terdapat beberapa faktor penghambat yang perlu diatasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang optimal dan berkelanjutan. Ketergantungan berlebihan pada sektor ekstraktif, terutama batubara, membuat perekonomian rentan terhadap fluktuasi harga dan permintaan global. Tantangan ketidakpastian global dan eskalasi ketegangan geopolitik di berbagai wilayah dapat memengaruhi permintaan dan harga komoditas ekspor utama Kalimantan Selatan. Keterbatasan infrastruktur pendukung sektor pertanian, seperti luas lahan padi yang terus menurun, konversi lahan pertanian, dan ketergantungan pada bibit subsidi serta impor pupuk, menjadi kendala serius. Masalah keberlanjutan sumber daya alam, ketidaksiapan sumber daya manusia dalam transformasi ekonomi, dan ketergantungan pada kebijakan fiskal serta tantangan pembiayaan pembangunan juga menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi yang perlu dikelola dengan strategi pembangunan komprehensif dan berkelanjutan.

Berdasarkan asumsi dan kebijakan untuk sasaran target pembangunan kedepan, maka dapat digambarkan bahwa proyeksi/target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.11 Proyeksi/Target Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

PROYEKSI/TARGET	2025 (%)	2026 (%)
<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)</i>	4,97 - 5,28	5,0 – 6,42

3.5.3 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita adalah pembagian antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dengan jumlah penduduk di daerah tersebut. PDRB per kapita menunjukkan nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah per satu orang penduduk. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

Penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami wilayah tertentu dan terikat pada sosial, budaya, politik, serta hak dan kewajiban. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, penduduk adalah warga negara yang bertempat tinggal di wilayah tertentu yang dapat juga ditinggali secara menetap. Penduduk memiliki hak dan kewajiban yang dapat dimiliki selama menjadi bagian dari sebuah negara. Penduduk memiliki domisili atau tempat tinggal resmi, dan tinggal di tempat tersebut dalam jangka waktu lama. Bukan penduduk, secara kontras, hanya tinggal sementara di domisili dan tidak memiliki maksud untuk tinggal menetap atau dalam jangka waktu lama.

Proyeksi PDRB per kapita Kalimantan Selatan tahun 2025-2026 menunjukkan tren positif, namun dengan tingkat pertumbuhan yang bervariasi tergantung pada faktor-faktor pendorong dan penghambat. Untuk mencapai skenario optimistik dan memastikan pertumbuhan PDRB per kapita yang berkelanjutan, beberapa kebijakan strategis perlu diimplementasikan:

- ✦ Diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor pertambangan, terutama melalui pengembangan sektor pertanian dan pariwisata sebagai penggerak ekonomi baru.
- ✦ Peningkatan infrastruktur pendukung untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan pariwisata.
- ✦ Investasi pada pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing tenaga kerja lokal.
- ✦ Pengembangan industri hilir berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal.
- ✦ Penguatan tata kelola dan efisiensi pembiayaan pembangunan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas.

Dengan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, Kalimantan Selatan berpotensi mencapai pertumbuhan PDRB per kapita yang lebih tinggi, mendekati atau bahkan melebihi proyeksi optimistik, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan PDRB Kalimantan Selatan sampai tahun 2026, maka dapat digambarkan bahwa proyeksi PDRB Per Kapita ADHB Kalimantan Selatan dapat digambarkan sebagai berikut.

Tabel 3.12 Proyeksi/Target PDRB Per Kapita Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

PROYEKSI/TARGET	2025 (Juta/Rupiah/Orang/Tahun)	2026 (Juta/Rupiah/Orang/Tahun)
PDRB Per Kapita	68,94 - 69,29	70,49 - 78,54

Sumber: Bappeda

3.5.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Melihat perkembangan pembangunan di Kalimantan khususnya untuk pembangunan di Pendidikan, Kesehatan, dan perekonomian maka diharapkan memberikan dampak positif kepada kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Selatan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target IPM Kalimantan Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.13 Proyeksi/Target Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

PROYEKSI/TARGET	2025	2026
Indeks Pembangunan Manusia (Nilai)	75,70	75,48 - 76,18
Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,33	13,99
Rata - rata Lama Sekolah (Tahun)	8,74	8,83
Pengeluaran Per Kapita (Ribu Rupiah/Orang/Tahun)	13.000	14.338
Umur Harapan Hidup (Tahun)	74,40	74,66

Sumber: Bappeda Kalsel 2025

3.5.5 Indeks Modal Manusia (IMM)

Tabel 3.14 Proyeksi/Target Indeks Modal Manusia Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

PROYEKSI/TARGET	2025	2026
Indeks Modal Manusia (IMM)	0,55	0,57

Sumber : Perhitungan Tim Bappeda Kalsel

3.5.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

Penurunan TPT di Kalimantan Selatan didukung oleh berbagai program ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Salah satu program unggulan adalah pemagangan dalam negeri yang telah menunjukkan peningkatan efektivitas. Selama dua tahun berturut-turut, tingkat penyerapan peserta di tempat kerja maupun wirausaha pada program pemagangan dalam negeri di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan signifikan, dari 63,89% pada tahun 2023 menjadi lebih dari 70% pada tahun 2024.

Pada Februari 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyelenggarakan sosialisasi pemagangan dalam negeri tahun 2025 untuk melahirkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten. Program ini merupakan bentuk komitmen pemerintah terhadap upaya percepatan peningkatan kompetensi tenaga kerja, sehingga para peserta memiliki daya saing dan dapat lebih mudah terserap di dunia kerja.

Selain program pemagangan, pemerintah juga melaksanakan berbagai pelatihan kejuruan melalui Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2024, terdapat 24 pelatihan kejuruan yang dibuka, terdiri dari 14 paket dari APBN dan 10 paket dari APBD, dengan berbagai program pelatihan seperti tata rias kecantikan, desainer grafis muda, menjahit pakaian wanita dewasa, dan pengelola administrasi perkantoran. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja dan mendorong kewirausahaan.

Pemerintah Provinsi juga aktif melaksanakan kegiatan job fair, pembinaan dan koordinasi ke instansi yang membidangi ketenagakerjaan di kabupaten/kota serta stake holder terkait, melaksanakan bimtek petugas antar kerja, serta pembinaan dan penguatan bursa kerja khusus. Upaya-upaya ini merupakan strategi komprehensif untuk mengurangi kesenjangan antara pencari kerja dan pemberi kerja.

Berdasarkan tren penurunan TPT dalam beberapa tahun terakhir dan berbagai program ketenagakerjaan yang sedang dan akan dilaksanakan, dapat diproyeksikan penurunan TPT Kalimantan Selatan untuk tahun 2025 dan 2026.

Untuk tahun 2025, dengan mempertimbangkan rata-rata penurunan TPT dalam tiga tahun terakhir sekitar 0,2-0,3% per tahun dan efektivitas program ketenagakerjaan yang meningkat, TPT Kalimantan Selatan diproyeksikan akan turun menjadi sekitar 3,9-4,0%. Proyeksi ini juga mempertimbangkan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 2025 yang fokus pada penanganan isu-isu strategis di bidang ketenagakerjaan.

Untuk tahun 2026, dengan asumsi penurunan berlanjut dengan kecepatan yang sama atau lebih baik, TPT Kalimantan Selatan diproyeksikan akan mencapai sekitar 3,6-3,8%. Proyeksi ini sejalan dengan target jangka panjang yang tertuang dalam dokumen Rencana Tenaga Kerja Nasional 2025-2029, yang menargetkan TPT Kalimantan Selatan mencapai 2% pada tahun 2029.

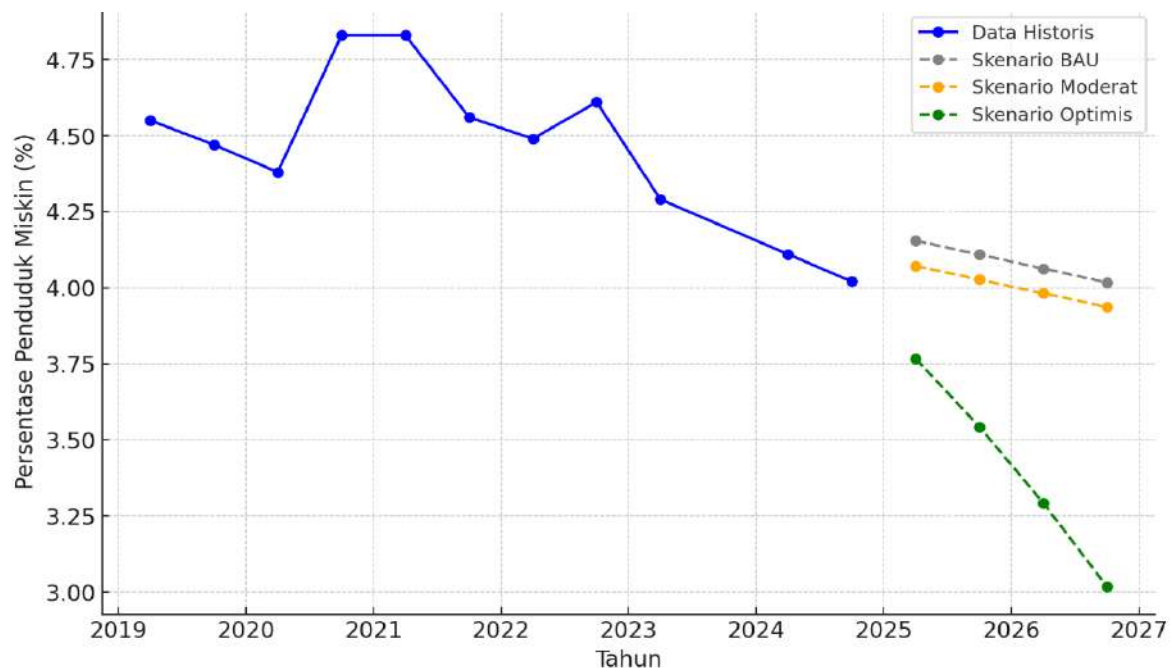
Melihat kondisi kedepan, diharapkan peningkatan ekonomi memberikan dampak positif kepada seluruh sektor sehingga kebutuhan tenaga kerja pun akan terus meningkat. Hal ini diharapkan agar dapat meningkatkan kesempatan kerja sehingga menurunkan pengangguran di Kalimantan Selatan. Mempertimbangkan hal tersebut maka proyeksi atau target Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.15 Proyeksi/Target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

PROYEKSI/TARGET	2025 (%)	2026 (%)
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	3,63 - 4,18	3,56-4,14

3.5.7 Tingkat Kemiskinan

Proyeksi tingkat kemiskinan di Kalimantan Selatan untuk periode 2025–2026 dilakukan dengan mempertimbangkan tiga skenario utama, yaitu Business As Usual (BAU), Moderat, dan Optimis. Setiap skenario dikembangkan berdasarkan pendekatan statistik menggunakan metode regresi. Untuk skenario BAU dan Moderat, digunakan regresi linear, di mana hubungan antara waktu dan persentase kemiskinan diasumsikan mengikuti pola linier berdasarkan data historis. Regresi linear adalah metode yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara variabel independen (tahun/periode) dan variabel dependen (persentase kemiskinan) dengan tujuan meramalkan nilai di masa depan. Sementara itu, untuk skenario Optimis, digunakan regresi polinomial derajat dua, yang memungkinkan model menangkap pola data yang lebih kompleks dan memperkirakan penurunan kemiskinan dengan percepatan lebih signifikan.



Gambar 3.19 Proyeksi Persentase Penduduk Miskin di Kalsel (2025 – 2026) dalam Tiga Skenario

3.5.7.1 Skenario Business As Usual (BAU)

Pada skenario ini, pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pengentasan kemiskinan diasumsikan berjalan sebagaimana biasanya, tanpa adanya terobosan atau percepatan baru. Proyeksi menunjukkan penurunan kemiskinan dari 4,15% pada Maret 2025 menjadi 4,02% pada September 2026.

Asumsi-asumsi untuk Skenario BAU:

- ✦ **Stabilitas Ekonomi Makro:** Tidak ada gejolak ekonomi yang signifikan, seperti inflasi tinggi atau resesi.
- ✦ **Keberlanjutan Program Sosial Rutin:** Program bantuan sosial yang telah berjalan dilanjutkan tanpa ekspansi atau peningkatan cakupan.
- ✦ **Tidak Ada Kebijakan Baru:** Tidak ada kebijakan tambahan yang mendorong percepatan pengurangan kemiskinan.
- ✦ **Ketergantungan Ekonomi Tetap:** Perekonomian masih didominasi oleh sektor-sektor komoditas tradisional dengan fluktuasi harga yang stabil.

3.5.7.2 Skenario Moderat

Skenario moderat mengasumsikan adanya perbaikan kebijakan dan implementasi program pengentasan kemiskinan yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dalam skenario ini, program sosial berjalan lebih efektif, dan diversifikasi ekonomi mulai mengurangi

ketergantungan terhadap sektor komoditas. Proyeksi menunjukkan penurunan kemiskinan dari 4,07% pada Maret 2025 menjadi 3,94% pada September 2026.

Asumsi-asumsi untuk Skenario Moderat:

- ✦ **Perbaikan Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan:** Program Penanggulangan Kemiskinan ditingkatkan dengan distribusi yang lebih tepat sasaran dan efisien melalui pemanfaatan By Name By Address Data Regsosek.
- ✦ **Diversifikasi Ekonomi Bertahap:** Peningkatan kontribusi sektor-sektor baru seperti UMKM, pariwisata, dan industri kreatif.
- ✦ **Peningkatan Akses Pendidikan dan Kesehatan:** Perbaikan kualitas dan akses layanan pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah terpencil.
- ✦ **Dukungan Infrastruktur Dasar:** Peningkatan infrastruktur transportasi dan digital untuk memperluas akses masyarakat terhadap peluang ekonomi.
- ✦ **Pengendalian Harga Komoditas:** Stabilitas harga komoditas utama yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.

3.5.7.3 Skenario Optimis

Skenario optimis mengasumsikan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan diimplementasikan secara terintegrasi dan efektif, disertai dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan pembangunan infrastruktur yang merata. Proyeksi menunjukkan penurunan kemiskinan yang signifikan, dari 3,77% pada Maret 2025 menjadi 3,02% pada September 2026. Regresi polinomial digunakan dalam skenario ini karena memungkinkan peramalan penurunan kemiskinan dengan kecepatan yang lebih tinggi, mencerminkan dampak dari kebijakan yang proaktif dan pertumbuhan ekonomi yang kuat.

Asumsi-asumsi untuk Skenario Optimis:

- ✦ **Perbaikan Tata Kelola Program Penanggulangan Kemiskinan:** Optimalisasi pemanfaatan data BNBA Regsosek untuk seluruh Program penanggulangan kemiskinan.
- ✦ **Pertumbuhan Ekonomi Inklusif dan Tinggi:** Pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional dengan distribusi manfaat yang merata.
- ✦ **Diversifikasi Ekonomi yang Signifikan:** Sektor pertanian, industri, dan jasa tumbuh secara bersamaan, mengurangi ketergantungan pada komoditas ekstraktif.
- ✦ **Akses Pendidikan dan Kesehatan Berkualitas:** Pendidikan berkualitas dan layanan kesehatan yang mudah diakses di seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
- ✦ **Kebijakan Pengentasan Kemiskinan yang Inovatif:** Implementasi kebijakan inovatif seperti program kewirausahaan berbasis masyarakat dan peningkatan kapasitas SDM lokal.

Ketiga skenario ini memberikan gambaran proyeksi penurunan kemiskinan di Kalimantan Selatan dengan asumsi dan hasil yang berbeda. Skenario BAU memperlihatkan penurunan yang lambat dengan kondisi berjalan seperti biasa. Skenario Moderat menunjukkan kemajuan yang lebih baik dengan pendekatan kebijakan yang adaptif dan perbaikan bertahap di sektor sosial dan ekonomi. Sementara itu, skenario Optimis menargetkan penurunan signifikan yang mengarah pada percepatan pengentasan kemiskinan jika intervensi strategis dilaksanakan dengan optimal. Berdasarkan proyeksi tersebut ditarget penurunan Persentase Penduduk Miskin Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.

Tabel 3.16 Target Tingkat Persentase Penduduk Miskin (P0) Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

PROYEKSI/TARGET	2025 (%)	2026 (%)
Persentase Penduduk Miskin (P0)	3,60 – 3,94	3,23 – 3,73

3.5.8 Gini Rasio

Berdasarkan data yang ditampilkan, Gini Rasio Kalimantan Selatan pada tahun 2024 adalah 0,298, dengan proyeksi untuk tahun 2026 berada di kisaran 0,284 - 0,294. Gini Rasio merupakan indikator ketimpangan pendapatan, di mana nilai yang lebih rendah menunjukkan distribusi pendapatan yang lebih merata. Berikut adalah analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini:

1) Kebijakan Pemerintah dalam Pengurangan Ketimpangan :

- Pemerataan Pengeluaran : Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menunjukkan upaya dalam meningkatkan pemerataan pengeluaran, terutama di daerah perdesaan. Pada tahun 2024, persentase pengeluaran kelompok 40% terbawah meningkat menjadi 22,26%, menunjukkan ketimpangan rendah menurut ukuran Bank Dunia.

Program Infrastruktur dan Pembangunan Ekonomi : Investasi dalam infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi lokal membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi, terutama di daerah terpencil.

2) Pertumbuhan Ekonomi :

- Dampak Pertumbuhan Ekonomi : Pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat mengurangi ketimpangan jika disertai dengan kebijakan yang mendukung distribusi pendapatan secara merata. Namun, jika pertumbuhan hanya menguntungkan kelompok tertentu, hal ini dapat meningkatkan ketimpangan.

- Sektor Pertambangan : Di Kalimantan Selatan, sektor pertambangan sering menjadi penopang ekonomi tetapi juga berpotensi menciptakan ketimpangan karena konsentrasi pendapatan pada segmen tertentu.

3) Tingkat Kemiskinan :

- Penurunan Kemiskinan : Penurunan persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan berkontribusi pada perbaikan Gini Rasio. Pemerintah telah menetapkan target penurunan kemiskinan secara bertahap hingga tahun 2026.
- Program Sosial : Program bantuan sosial dan subsidi untuk kelompok rentan membantu menekan tingkat kemiskinan dan meningkatkan distribusi pendapatan.

4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) :

- Peningkatan IPM : IPM yang lebih tinggi mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup masyarakat. Hal ini berkontribusi pada pengurangan ketimpangan pendapatan.
- Pendidikan sebagai Faktor Kunci : Pendidikan memiliki dampak langsung terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya saing tenaga kerja lokal.

5) Tingkat Pengangguran :

- Pengurangan Pengangguran : Tingkat pengangguran yang lebih rendah dapat mengurangi ketimpangan karena lebih banyak orang terlibat dalam aktivitas ekonomi produktif.
- Program Pelatihan Kerja : Pemerintah kemungkinan besar telah meluncurkan program pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal.

Proyeksi Gini Rasio tahun 2026 di Kalimantan Selatan berada dalam kisaran stabil (0,284 - 0,294), mencerminkan upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan melalui kebijakan pemerataan pengeluaran, investasi infrastruktur, peningkatan IPM, dan penurunan tingkat kemiskinan serta pengangguran. Keberhasilan pencapaian target ini bergantung pada konsistensi implementasi kebijakan pembangunan inklusif di seluruh wilayah provinsi.

Tabel 3.17 Proyeksi/Sasaran Gini Rasio Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

KETERANGAN	2025 (NILAI)	2026 (NILAI)
Gini Rasio	0,290 - 0,301	0,284 - 0,294

Sumber: Bappeda

3.5.9 Gas Rumah Kaca (GRK)

Sampai dengan tahun 2024, Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk turut berkontribusi dalam penurunan emisi GRK melalui (1) sektor energi yang terdiri dari: penggunaan energi untuk industri pembangkit, transportasi dan rumah tangga,

serta produksi batubara dan migas, (2) sektor IPPU yang terdiri dari produksi semen klinker dan limestone, (3) sektor AFOLU yang terdiri dari: pertanian, peternakan, kehutanan dan perubahan tutupan lahan, dan (4) sektor limbah yang terdiri dari limbah padat dan cair domestik dan limbah cair industri. Hanya saja indikator yang digunakan di dalam dokumen perencanaan jangka panjang belum mengaitkan penurunan emisi GRK dengan PDRB Provinsi, baru ditahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan menggunakan indikator Penurunan Intensitas Emisi GRK dengan target pada tahun 2025 adalah sebesar 75,97% sedangkan untuk target Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca berdasarkan dokumen perencanaan jangka panjang adalah sebesar 26,6%. Kedepan peran serta kabupaten/kota dalam penurunan emisi GRK akan lebih diprioritaskan mengingat kabupaten kota yang memiliki kewenangan terhadap sebagian besar kawasan tempat seluruh sektor berkegiatan.

Tabel 3.18 Proyeksi/Target Penurunan Intensitas Emisi GRK Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

KETERANGAN	2025 (%)	2026 (%)
Penurunan Intesitas Emisi GRK	75,97	76,41

3.1.3.1. INFLASI

Melihat kondisi yang ada, pemerintah terus berusaha dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk menjaga inflasi yang ada terjaga sesuai dengan yang diharapkan. Mempertimbangkan kondisi yang ada maka proyeksi atau target Inflasi Kalimantan Selatan tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.19 Proyeksi/Target Inflasi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

PROYEKSI/TARGET	2025 (%)	2026 (%)
Inflasi	3,2-3,9	3,2-3,9

3.5.10 Indeks Williamson

Indeks Williamson adalah alat statistik yang digunakan untuk mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Nilainya berkisar antara 0 hingga 1, di mana nilai mendekati nol

menunjukkan pemerataan pembangunan yang tinggi, sedangkan nilai mendekati satu menunjukkan ketimpangan pembangunan yang besar.

Nilai Indeks Williamson Kalimantan Selatan :

- ✂ Realisasi 2024 : 0,493
- ✂ Proyeksi/Sasaran 2025 : 0,493

Berdasarkan kriteria umum:

- ✂ Nilai antara “0,4 dan 0,6” menunjukkan tingkat ketimpangan “sedang”.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan di Kalimantan Selatan :

- 1) Distribusi Ekonomi Regional :
 - Ketimpangan dapat terjadi karena konsentrasi kegiatan ekonomi di daerah tertentu, seperti kota besar atau pusat industri. Daerah dengan akses terbatas terhadap infrastruktur ekonomi sering tertinggal.
- 2) Ketersediaan Sumber Daya Alam :
 - Kalimantan Selatan memiliki potensi sumber daya alam yang signifikan, tetapi pemanfaatan yang tidak merata dapat menyebabkan disparitas antar wilayah.
- 3) Investasi dan Infrastruktur :
 - Investasi pemerintah dan swasta (termasuk Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri) mempengaruhi pemerataan pembangunan. Daerah dengan investasi lebih besar cenderung memiliki tingkat pembangunan yang lebih tinggi.
- 4) Demografi dan Tenaga Kerja :
 - Kondisi tenaga kerja dan tingkat partisipasi angkatan kerja turut memengaruhi ketimpangan. Wilayah dengan tenaga kerja berkualitas tinggi cenderung lebih berkembang dibandingkan daerah dengan tenaga kerja kurang terampil[7][9].
- 5) Konektivitas Antar Wilayah :
 - Aksesibilitas melalui jalan raya, transportasi, dan komunikasi berperan penting dalam pemerataan pembangunan. Daerah terpencil sering mengalami kesenjangan karena kurangnya konektivitas.

Upaya untuk Mengurangi Ketimpangan :

Untuk mencapai pemerataan pembangunan, beberapa langkah dapat dilakukan:

- ♦ Pengembangan Infrastruktur : Meningkatkan konektivitas antar wilayah melalui pembangunan jalan, transportasi umum, dan fasilitas komunikasi.
- ♦ Peningkatan Investasi : Mendorong investasi di daerah kurang berkembang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi lokal.
- ♦ Pemerataan Pelayanan Dasar : Memastikan akses yang sama terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya di seluruh wilayah.
- ♦ Pengembangan Sumber Daya Manusia : Program pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas SDM di daerah tertinggal.

Dengan mempertahankan nilai Indeks Williamson pada level sedang (0,493), Kalimantan Selatan menunjukkan stabilitas dalam ketimpangan pembangunan regional. Namun, upaya berkelanjutan diperlukan untuk mendorong pemerataan lebih baik di masa depan.

Melihat kondisi yang ada, pemerintah terus berusaha dan berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk menjaga inflasi yang ada terjaga sesuai dengan yang diharapkan. Mempertimbangkan kondisi yang ada maka proyeksi atau target Inflasi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.20 Proyeksi/Target Indeks Williamson Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2026

Keterangan	2025 (Nilai)	2026 (Nilai)
Indeks Williamson	0,493	0,493

3.5.11 Sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan Tahun 2025

Secara ringkas, sasaran Indikator Ekonomi Makro Daerah Kalimantan Selatan tahun 2025 disajikan sebagaimana pada tabel berikut :

Tabel 3.21 Indikator Ekonomi Makro Daerah Tahun 2025

INDIKATOR		KALSEL (Realisasi)	KALSEL (Realisasi)	OUTLOOK KALSEL	SASARAN KALSEL
		2023	2024	2025	2026
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,84	5,05	4,97 - 5,28	5,0 – 6,42
2	PDRB ADHK 2010 Perkapita (Juta rupiah/orang)	35,34	35,76 - 37,67	38,14 - 38,25	38,14 - 38,25
	PDRB ADHB Perkapita (Juta rupiah/orang)	63,77	63,78	68,94 - 69,29	70,49 - 78,54
	Asumsi:				
	- Jumlah Penduduk (orang)	4.222.330	4.273.400	4.323.330	4.323.330

INDIKATOR		KALSEL (Realisasi)	KALSEL (Realisasi)	OUTLOOK KALSEL	SASARAN KALSEL
		2023	2024	2025	2026
	(Sumber Proyeksi Proyeksi Penduduk Indonesia 2020 –2050 Hasil Sensus Penduduk 2020)				
	- Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	1,22	1,19	1,17	1,17
3	Indeks Pembangunan Manusia	74,66	75,19	75,7	75,48 - 76,18
4	Indeks Modal Manusia (IMM)	0,53	-	0,55	0,57
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	4,22	4,05 – 4,59	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14
6	Persentase Penduduk Miskin (P0) (%)	4,29	4,02	3,60 – 3,94	3,23 – 3,73
7	Gini Ratio	0,313	0,298	0,290 - 0,301	0,284 - 0,294
8	Penurunan Intesitas Emisi GRK	68,3	n/a	75,97	76,41
9	Inflasi (%)	3,75	1,95	3,2-3,9	3,2-3,9
10	Indeks Williamson	0,504	0,493	0,493	0,493

Sumber: KEMD Bappeda 2025

Tabel 3.22 Kesepakatan Indikator Makro Daerah Dalam Rakortek Tahun 2025

INDIKATOR MAKRO		TARGET NASIONAL RKP	TARGET PROVINSI KALSEL
		2026	2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,8 – 6,3	5,6 – 6,4
2	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,44 – 4,96	3,56 – 4,14
3	Tingkat Kemiskinan (%)	6,50 – 7,50	3,23 – 3,73
4	Rasio Gini (%)	0,377 – 0,380	0,284 – 0,294
5	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	37,14	76,41

3.6 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Tahun 2026

Arah kebijakan pembangunan ekonomi secara formal didefinisikan sebagai penjabaran urusan pemerintahan dan prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi pemerintah yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan. Konsep ini berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Dalam konteks yang lebih luas, arah kebijakan pembangunan ekonomi merupakan strategi yang sistematis dan rasional untuk mencapai sasaran-sasaran strategik pembangunan ekonomi dengan cara yang efektif dan efisien.

Kebijakan pembangunan ekonomi melibatkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Proses ini melibatkan perumusan kebijakan, perencanaan strategis, dan implementasi program-program yang dirancang untuk memperkuat sektor ekonomi, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik. Berbeda dengan pertumbuhan ekonomi yang bersifat kuantitatif, pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif, tidak hanya mencakup pertambahan produksi, tetapi juga mencakup perubahan-perubahan dalam struktur produksi dan alokasi input pada berbagai sektor perekonomian

3.6.1 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional

Saya telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8,0 persen.
Marilah berbuat yang terbaik. Perencanaan ini kita laksanakan dengan realisme, dengan hal-hal yang konkret....”

Sumber: Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Musrenbangnas RPJM Nasional Tahun 2025-2029 (30 Desember 2024)

“.... perencanaan dasarnya adalah pengumpulan data yang benar. Perencanaan, sesudah perencanaan mencari awak, mencari orang untuk melaksanakann rencana itu. Rencana terbaik, gagasan terbaik, tanpa awak yang bisa melaksanakan, tidak akan berhasil....”

Sumber: Sambutan Presiden RI dalam Sarasehan Ekonomi (8 April 2025)



Sumber: Rancangan RKP 2026, Bappenas

Gambar 3.20 Arahan Presiden Prabowo untuk Target Pertumbuhan Ekonomi 8,0 Persen



Sumber: Rancangan RKP 2025, Bappenas

Gambar 3.21 Pertumbuhan Menuju 8,0 Persen Indonesia

Arah kebijakan nasional yang ditampilkan dalam gambar bertujuan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029. Kebijakan ini dirancang berdasarkan delapan strategi utama yang saling mendukung untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing. Strategi-strategi tersebut mencakup berbagai sektor penting yang menjadi prioritas pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Peningkatan Produktivitas Menuju Swasembada Pangan, Energi, dan Air

Strategi pertama berfokus pada peningkatan produktivitas nasional untuk mencapai swasembada di bidang pangan, energi, dan air. Pemerintah berkomitmen mengoptimalkan peran BULOG sebagai lembaga strategis dalam pengelolaan pangan nasional. Selain itu, program Food Estate dilaksanakan untuk meningkatkan produksi pangan secara terintegrasi dengan memanfaatkan lahan-lahan potensial. Di sektor energi, peningkatan bauran ethanol dan biodiesel menjadi langkah penting untuk mendukung transisi menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan.

Deregulasi Perizinan serta Sinkronisasi Kebijakan Fiskal dan Moneter Pro-Growth

Strategi kedua adalah penyederhanaan perizinan melalui deregulasi guna menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif bagi pelaku bisnis. Sinkronisasi antara kebijakan fiskal dan moneter juga dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi secara optimal. Langkah ini bertujuan mempercepat investasi dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional.

Ekonomi Biru dan Ekonomi Hijau

Pemerintah juga mengedepankan pendekatan ekonomi biru dan ekonomi hijau sebagai bagian dari kebijakan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi biru berfokus pada pengelolaan sumber daya kelautan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Sementara itu, ekonomi hijau menekankan pengembangan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan untuk menjaga ekosistem alam sekaligus mendorong inovasi teknologi hijau.

Industrialisasi Berbasis Hilirisasi SDA

Strategi keempat adalah industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam (SDA) yang berorientasi ekspor dan berkelanjutan. Pemerintah mendorong pengembangan industri padat karya untuk menciptakan lapangan kerja serta meningkatkan nilai tambah produk melalui hilirisasi SDA. Pendanaan strategis melalui Sovereign Wealth Fund (SWF) Danantara juga dioptimalkan untuk mendukung investasi di sektor-sektor prioritas.

Perkotaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kota-kota besar di Indonesia dijadikan pusat pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan infrastruktur modern serta pengembangan kawasan perkotaan. Strategi ini bertujuan menciptakan ekosistem urban yang mendukung aktivitas bisnis, inovasi, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif memiliki potensi besar dalam meningkatkan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah berupaya mengembangkan destinasi wisata unggulan melalui promosi intensif serta inovasi produk kreatif yang dapat bersaing di pasar global.

Transformasi Digital

Transformasi digital menjadi salah satu prioritas utama dalam kebijakan pembangunan nasional. Digitalisasi di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, pemerintahan, hingga bisnis, diharapkan mampu meningkatkan efisiensi, produktivitas, serta akses layanan bagi masyarakat secara luas.

Investasi: FDI Berorientasi Ekspor dan Investasi Non-APBN

Strategi terakhir adalah menarik Foreign Direct Investment (FDI) yang berorientasi ekspor serta mendorong investasi dari sumber-sumber non-APBN. Langkah ini bertujuan memperkuat struktur pembiayaan pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada anggaran negara.

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi 2025–2029

Melalui implementasi delapan strategi tersebut, pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat secara bertahap dari 6,3% pada tahun 2025 menjadi 8% pada tahun 2029 sebagaimana tercantum dalam Perpres No.12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025–2029. Pertumbuhan ini hanya dapat dicapai dengan dukungan aktif dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam melaksanakan program-program strategis nasional sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

Tema RKP Tahun 2026

“Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”



Sumber: Rancangan RKP 2026, Bappenas

Gambar 3.22 Tema dan Sasaran RKP Tahun 2026

Tema Utama RKP 2026

Tema yang diangkat adalah “Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”. Tema ini menegaskan fokus pemerintah pada ketahanan pangan dan energi sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan.

Prioritas Nasional (PN)

Gambar menampilkan delapan Prioritas Nasional (PN) yang menjadi kerangka utama kebijakan pembangunan tahun 2026. Meskipun detail tiap PN tidak dijabarkan dalam gambar, secara umum PN ini biasanya mencakup aspek-aspek seperti:

- ✓ Pembangunan manusia
- ✓ Penguatan ekonomi
- ✓ Ketahanan pangan dan energi
- ✓ Infrastruktur
- ✓ Reformasi birokrasi
- ✓ Pembangunan wilayah
- ✓ Stabilitas politik dan hukum
- ✓ Penguatan tata kelola pemerintahan

3.6.2 Sasaran Pembangunan Tahun 2026

3.6.2.1 Pertumbuhan Tinggi Berkelanjutan

- Pertumbuhan Ekonomi: Ditargetkan di kisaran 5,8%–6,3%. Ini menunjukkan ambisi pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata global, sebagai upaya pemulihan pasca pandemi dan menjaga daya saing.
- Penurunan Intensitas Emisi GRK: Target penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 37,14%, menandakan komitmen pada pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih.
- GNI Per Capita: Ditargetkan mencapai 5.870 USD, yang mencerminkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup: Target 76,67, menandakan perhatian pada kualitas lingkungan sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan.

A. Penurunan Kemiskinan

- Tingkat Kemiskinan: Ditargetkan turun ke 6,5%–7,5%. Ini ambisius, mengingat tantangan struktural dan dampak ekonomi global.
- Tingkat Pengangguran Terbuka: Target 4,44%–4,96%, menandakan upaya penciptaan lapangan kerja yang lebih inklusif.
- Kemiskinan Ekstrem: Target 0%, artinya pemerintah berkomitmen menghapus kemiskinan ekstrem sepenuhnya pada 2026.
- Rasio Gini: Target 0,377–0,380, menunjukkan upaya memperkecil ketimpangan pendapatan.

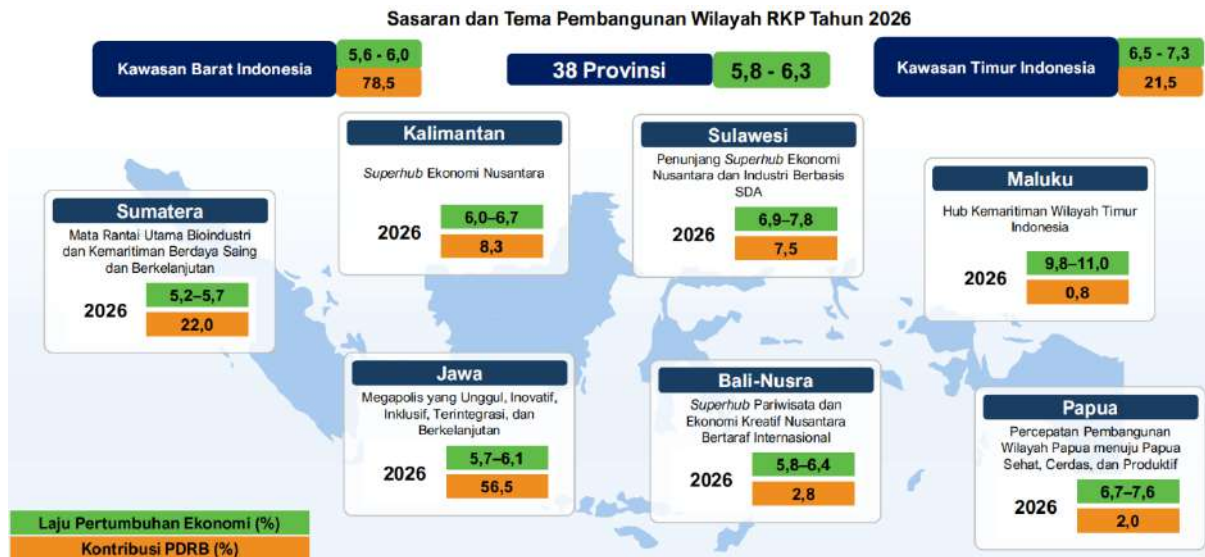
B. Sumber Daya Manusia Berkualitas

- Indeks Modal Manusia: Target 0,57. Indeks ini mengukur kualitas SDM dari aspek pendidikan, kesehatan, dan keterampilan, sebagai fondasi produktivitas nasional.

Gambar ini menegaskan bahwa RKP 2026 diarahkan pada:

- Penguatan ketahanan pangan dan energi sebagai pondasi ekonomi.
- Peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
- Pengurangan kemiskinan dan ketimpangan secara signifikan, termasuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
- Peningkatan kualitas SDM sebagai investasi jangka panjang pembangunan nasional.

Strategi ini sangat relevan dengan tantangan Indonesia ke depan, terutama dalam menghadapi dinamika global, perubahan iklim, dan kebutuhan peningkatan daya saing ekonomi berbasis inovasi dan keberlanjutan.



Gambar 3.23 Sasaran dan Tema Pembangunan Wilayah RKP Tahun 2026

Gambar ini berisi peta Indonesia yang menampilkan Sasaran dan Tema Pembangunan Wilayah RKP Tahun 2026 untuk 38 provinsi. Data yang ditampilkan meliputi target laju pertumbuhan ekonomi (%) dan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (%) untuk masing-masing wilayah utama di Indonesia.

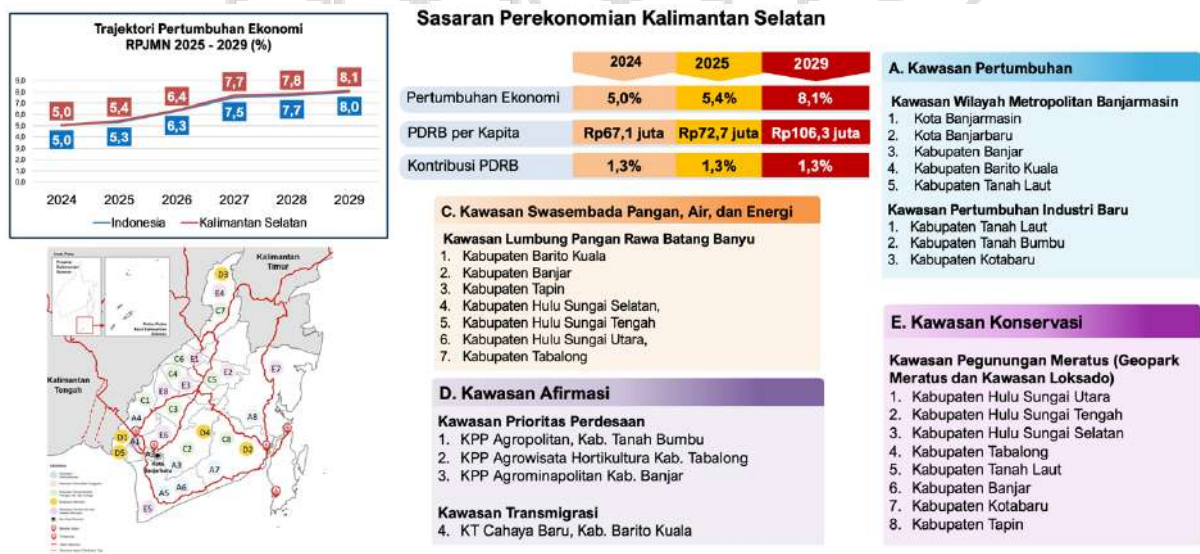
Pembagian Wilayah dan Target

- ❖ **Kawasan Barat Indonesia**
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi: 5,6 – 6,0%
 - Kontribusi PDRB: 78,5%
- ❖ **Kawasan Timur Indonesia**
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi: 6,5 – 7,3%
 - Kontribusi PDRB: 21,5%
- ❖ **Nasional (38 Provinsi)**
 - Laju Pertumbuhan Ekonomi: 5,8 – 6,3%
- ❖ **Jawa** tetap menjadi kontributor terbesar PDRB nasional (56,5%), meskipun pertumbuhan ekonominya tidak setinggi wilayah timur seperti Maluku dan Papua.
- ❖ **Maluku** diproyeksikan memiliki pertumbuhan ekonomi tertinggi (9,8 – 11,0%), namun kontribusi PDRB-nya sangat kecil (0,8%), menandakan basis ekonomi yang masih kecil namun tumbuh pesat.
- ❖ **Papua** juga menargetkan pertumbuhan tinggi (6,7 – 7,6%) dengan kontribusi PDRB 2,0%.

- ❖ **Kawasan Timur Indonesia** secara umum menargetkan pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding Kawasan Barat, namun kontribusi terhadap PDRB nasional masih jauh lebih kecil.
- ❖ **Sumatera dan Kalimantan** memiliki peran strategis dalam bioindustri, kemaritiman, dan sebagai superhub ekonomi.
- ❖ **Bali-Nusra** difokuskan pada pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif bertaraf internasional.

Gambar ini menegaskan strategi pembangunan Indonesia tahun 2026 yang berorientasi pada pemerataan pertumbuhan ekonomi antarwilayah, dengan mendorong pertumbuhan lebih tinggi di wilayah timur dan penguatan peran strategis masing-masing wilayah sesuai potensi unggulannya. Namun, kontribusi ekonomi nasional masih didominasi Jawa dan Sumatera, sedangkan wilayah timur difokuskan untuk percepatan pertumbuhan dan pengembangan potensi lokal.

3.6.3 Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi Kalimantan Selatan



Sumber: Bappenas

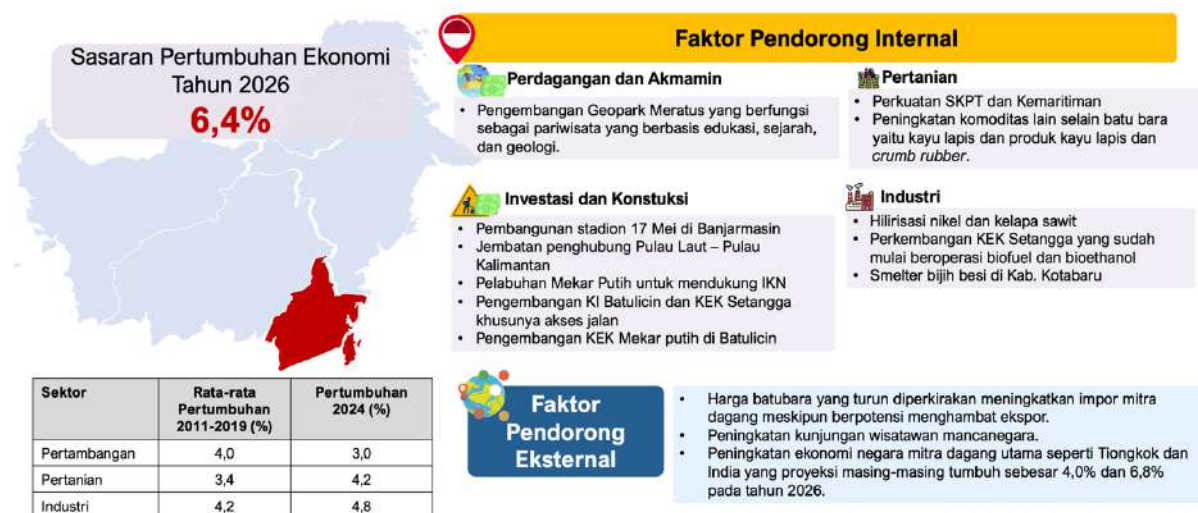
Gambar 3.24 Arah Kebijakan Dan Lokasi Prioritas Provinsi Kalimantan Selatan 2025-2029

Arah kebijakan nasional untuk Kalimantan Selatan dalam RPJMN 2025–2029 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan ditargetkan meningkat dari 5,4% pada tahun 2025 menjadi 8,1% pada tahun 2029, lebih tinggi dari rata-rata nasional. PDRB per kapita juga diproyeksikan naik signifikan dari Rp72,7 juta pada tahun 2025 menjadi Rp101 juta pada tahun 2029, dengan

kontribusi PDRB terhadap nasional stabil di angka 1,3%. Wilayah ini difokuskan pada pengembangan Kawasan Pertumbuhan, termasuk Wilayah Metropolitan Banjarmasin (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut) serta Kawasan Pertumbuhan Industri Baru di Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru.

Selain itu, Kalimantan Selatan diarahkan untuk menjadi kawasan swasembada pangan, air, dan energi melalui pengembangan lumbung pangan di rawa Batang Banyu yang mencakup Kabupaten Barito Kuala, Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong. Kawasan afirmasi juga menjadi prioritas dengan fokus pada pengembangan pedesaan melalui Kawasan Prioritas Perdesaan (KPP) seperti KPP Agropolitan di Tanah Bumbu, KPP Agrowisata Hortikultura di Tabalong, dan KPP Agrominapolitan di Banjar. Selain itu, terdapat Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Barito Kuala untuk mendukung pemerataan pembangunan.

Kalimantan Selatan juga memiliki komitmen kuat terhadap pelestarian lingkungan melalui pengembangan Kawasan Konservasi Pegunungan Meratus yang meliputi Geopark Meratus dan Kawasan Loksado. Wilayah konservasi ini mencakup Kabupaten Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Selatan, Tabalong, Banjar, Kotabaru, dan Tapin. Secara keseluruhan, arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal sekaligus memperkuat kontribusi Kalimantan Selatan terhadap perekonomian nasional dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.



Sumber: Bappenas

Gambar 3.25 Faktor Pendorong Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Selatan Tahun 2026

Arah kebijakan nasional yang ditampilkan dalam gambar bertujuan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar **6,4% pada tahun 2026**. Kebijakan ini didukung oleh berbagai faktor pendorong internal dan eksternal yang berfokus pada penguatan sektor

perdagangan, investasi, pertanian, dan industri. Pendekatan ini dirancang untuk memanfaatkan potensi sumber daya lokal sekaligus mengatasi tantangan global.

1) Faktor Pendorong Internal

Pengembangan **Geopark Meratus** menjadi salah satu prioritas dalam sektor perdagangan dan akmamin (aktivitas kemaritiman). Geopark ini dirancang sebagai destinasi pariwisata berbasis edukasi, sejarah, dan geologi, yang diharapkan dapat meningkatkan daya tarik wisata lokal dan mendorong aktivitas perdagangan. Selain itu, dalam sektor investasi dan konstruksi, pembangunan infrastruktur seperti **Stadion 17 Mei di Banjarmasin**, **jembatan penghubung Pulau Laut–Pulau Kalimantan**, dan **Pelabuhan Mekar Putih** menjadi langkah strategis untuk meningkatkan konektivitas wilayah serta mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Pengembangan kawasan industri seperti **KI Batulicin** dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Setangga juga menjadi prioritas, terutama akses jalan yang mendukung aktivitas ekonomi.

Sektor pertanian juga menjadi fokus utama dengan penguatan **Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT)** serta diversifikasi komoditas selain batu bara, seperti kayu lapis, produk kayu lapis, dan *crumb rubber* (karet remah). Di sisi lain, sektor industri diarahkan pada hilirisasi komoditas seperti nikel dan kelapa sawit untuk meningkatkan nilai tambah produk ekspor. Pengoperasian KEK Setangga yang memproduksi biofuel dan bioethanol serta pembangunan smelter bijih besi di Kabupaten Kotabaru menjadi langkah strategis untuk mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya alam.

2) Faktor Pendorong Eksternal

Di tengah proyeksi penurunan harga batu bara yang berpotensi menghambat ekspor, peningkatan impor oleh mitra dagang utama tetap memberikan peluang bagi perekonomian Indonesia. Selain itu, kunjungan wisatawan mancanegara diperkirakan meningkat seiring dengan pemulihan ekonomi global. Pertumbuhan ekonomi negara mitra dagang utama seperti Tiongkok (4,0%) dan India (6,8%) pada tahun 2026 juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap permintaan ekspor Indonesia.

3) Analisis Sektor Strategis

Berdasarkan data rata-rata pertumbuhan sektor selama 2011–2019 dan proyeksi 2024, sektor pertanian menunjukkan peningkatan signifikan dari rata-rata 3,4% menjadi 4,2%. Sektor industri diproyeksikan tumbuh sebesar 4,8%, lebih tinggi dari rata-rata sebelumnya sebesar 4,2%. Namun, sektor pertambangan diperkirakan mengalami perlambatan dari rata-rata 4,0% menjadi 3,0%, seiring dengan penurunan harga batu bara.

Kebijakan ini menunjukkan pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, diversifikasi ekonomi, hilirisasi industri, serta pemanfaatan potensi sumber daya

lokal. Dengan sinergi antara faktor internal dan eksternal, target pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4% pada tahun 2026 diharapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Pembangunan yang dipilih untuk menjadi Tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 adalah **“PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN PENGEMBANGAN SEKTOR UNGGULAN DAERAH MENDUKUNG PUSAT DISTRIBUSI REGIONAL”**, tema ini dibangun berdasarkan dengan kebijakan perekonomian daerah Provinsi Kalimantan Selatan kesinambungan dengan arah kebijakan tahun sebelumnya serta sinkronisasi dengan Visi Gubernur baru Tahun 2025 - 2029 yaitu **KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan Selatan**. Dimana visi ini mengarah pada upaya transformasi ekonomi, yang mana dengan upaya menggeser kontribusi sektor pertambangan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk meningkatkan kontribusi sektor dengan sumber daya alam yang dapat diperbaharui antara lain sektor pertanian, pariwisata, perdagangan serta meningkatkan peran UMKM dan hilirisasi industri. Kebijakan perekonomian daerah di tahun 2026 ini diambil dalam rangka menuju pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.

Tema pembangunan pada tahun 2026 memiliki empat fokus pembangunan dan lima prioritas daerah. Fokus pembangunan dan prioritas daerah yang dimaksud diuraikan pada gambar berikut.



Sumber : Bappeda Kalimantan Selatan

Gambar 3.26 Fokus Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026



Sumber : Bappeda Kalimantan Selatan

Gambar 3.27 Prioritas Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

3.7 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan fondasi penting dalam pelaksanaan otonomi daerah yang mencerminkan kapasitas suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Secara konseptual, keuangan daerah merujuk pada semua hak dan kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Definisi ini diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menggantikan PP 58 Tahun 2005.

Pengelolaan keuangan daerah sendiri mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Semua aspek ini diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. Prinsip pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3.7.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022, pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah terdiri dari beberapa komponen, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Asumsi kebijakan perencanaan pendapatan daerah pada RKPD Tahun Anggaran 2026 sebagai berikut:

1. Optimalisasi pengelolaan sumber potensi pendapatan secara terukur, rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum.
 - a. Optimalisasi pendapatan pajak daerah melalui program kegiatan intensifikasi seperti penyesuaian tarif pajak daerah, pemutakhiran database potensi, serta upaya penagihan, kemudian mengintensifkan kerja sama kemitraan dengan pemerintah Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan.
 - b. Optimalisasi pendapatan retribusi daerah melalui pengembangan pengelolaan pungutan berbasis elektronifikasi/digitalisasi.
2. Identifikasi dan ekstensifikasi pendapatan di luar pajak daerah.
 - a. Mendorong upaya optimalisasi pendapatan pada sektor Sumbangan Pihak Ketiga (SP 3) kepada pemerintah daerah yang terdiri dari dealer, Jasa Raharja, kelapa sawit, dan karet melalui sosialisasi, FGD dan penyesuaian regulasi (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah) bersama instansi terkait.
 - b. Rasionalisasi estimasi target penerimaan pada masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja Penghasil berdasarkan potensi.
3. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan penyederhanaan sistem dan prosedur pelayanan.
 - a. Mendorong pengembangan kualitas produk pelayanan pengelolaan pendapatan daerah pada semua Unit Kerja Penghasil secara bertahap dan berkesinambungan.

- b. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan Zona Integritas (ZI) pelayanan dengan melengkapi dan atau penyesuaian terhadap Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang konvensional maupun berbasis digitalisasi, serta melakukan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), khususnya pada Kantor Bersama SAMSAT se Kalimantan Selatan.
4. Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah
 - a. Percepatan penyampaian dan ketepatan penyajian pengelolaan pendapatan daerah berbasis teknologi informasi tepat guna dan berhasil guna.
 - b. Peningkatan kapasitas pengetahuan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola keuangan daerah berbasis teknologi informatika.
 - c. Pengukuran kinerja capaian pendapatan berdasarkan anggaran kas pendapatan berdasarkan *cashflow* (aliran kas) pada APBD tahun berjalan.
5. Optimalisasi pendapatan daerah yang bersumber dari sinergi pembiayaan dari Opsen PKB dan Opsen BBNKB
 - a. Sinergi pembiayaan dari opsen PKB dan opsen BBNKB yang dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai upaya peningkatan penerimaan pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota yang diarahkan untuk peningkatan dan perluasan layanan samsat.
 - b. Sosialisasi dan edukasi perpajakan baik melalui media massa, media elektronik maupun langsung ke berbagai lapisan masyarakat. Pendataan dan pemetaan kendaraan bermotor, melalui sensus, survey, penelusuran sampai pada operasi gabungan dan operasi khusus untuk menjaring wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan tepat jumlah.

Hal-hal yang dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang semakin menguat diharapkan akan membuat peningkatan pendapatan daerah dalam tahun berkenaan.

Tabel 3.23 Tabel Pendapatan Daerah Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 – 2026 (Rp)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN	9.476.592.022.958,92	12.405.575.231.420,30	10.231.897.562.453,00	9.480.011.540.545,90	-7,35%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.460.479.914.335,92	5.329.101.264.320,29	4.629.579.951.953,00	4.576.252.521.763,90	-1,15%
Pendapatan Pajak Daerah	4.026.378.759.419	4.409.342.181.904	3.711.664.179.990	3.745.635.821.789,90	0,92%
Pendapatan Retribusi Daerah	46.318.253.741	690.776.801.774	687.329.954.307	700.351.936.428,00	1,89%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.563.416.048	63.182.408.455	74.101.474.476	70.406.749.492,00	-4,99%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	335.219.485.128	165.799.872.187	156.484.343.180	59.858.014.054,00	-61,75%
PENDAPATAN TRANSFER	4.956.932.119.431,00	6.863.530.657.095,00	5.585.678.960.000,00	4.886.887.427.175,00	-12,51%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.956.932.119.431,00	6.586.357.007.976,00	5.385.678.960.000,00	4.626.887.427.175,00	-14,09%
Dana Bagi Hasil (DBH)	3.067.468.706.551	4.658.434.332.042	3.413.740.066.000	2.813.736.399.000	-17,58%
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.610.774.000	1.218.427.651.999	1.248.888.342.000	1.244.776.011.525	-0,33%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	710.792.815.880	694.749.866.935	516.561.259.000	561.561.259.000	8,71%
Dana Insentif Daerah (DID)	47.059.823.000	-	-	-	0,00%
Insentif Fiskal	0	14.745.157.000	6.489.293.000	6.813.757.650	5,00%
TRANSFER ANTAR DAERAH		277.173.649.119,00	200.000.000.000	260.000.000.000	30,00%
Bantuan Keuangan		277.173.649.119,00	200.000.000.000	260.000.000.000	30,00%
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	59.179.989.192,00	212.943.310.005,00	16.638.650.500,00	16.871.591.607,00	1,40%
Pendapatan Hibah	59.179.989.192	212.943.310.005	16.638.650.500	16.871.591.607	1,40%
JUMLAH PENDAPATAN	9.476.592.022.959	12.405.575.231.420	10.231.897.562.453	9.480.011.540.546	-7,35%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2025

3.7.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sumber PAD berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah. Upaya peningkatan PAD dilakukan melalui berbagai strategi, antara lain :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah.
- Digitalisasi sistem perpajakan dan retribusi daerah guna meningkatkan transparansi dan akurasi data.
- Optimalisasi pengelolaan aset daerah agar lebih produktif dan memberikan kontribusi maksimal bagi pendapatan daerah.
- Peningkatan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi guna mendorong kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya.
- Diversifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal.

Tabel 3.24 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemda Kalimantan Selatan Tahun 2021 - 2026

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN ASLI DAERAH	4.460.479.914.335,92	5.329.101.264.320,29	4.629.579.951.953,00	4.576.252.521.763,90	-1,15%
Pendapatan Pajak Daerah	4.026.378.759.419	4.409.342.181.904	3.711.664.179.990	3.745.635.821.789,90	0,92%
Pendapatan Retribusi Daerah	46.318.253.741	690.776.801.774	687.329.954.307	700.351.936.428,00	1,89%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	52.563.416.048	63.182.408.455	74.101.474.476	70.406.749.492,00	-4,99%
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	335.219.485.128	165.799.872.187	156.484.343.180	59.858.014.054,00	-61,75%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2025

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang fluktuatif dalam periode 2023 hingga proyeksi tahun 2026. Pada tahun 2023, realisasi PAD tercatat sebesar Rp 4,46 triliun dan meningkat signifikan pada 2024 menjadi Rp 5,33 triliun. Namun, target APBD tahun 2025 ditetapkan sebesar Rp 4,63 triliun, dan proyeksi RKPD tahun 2026 diperkirakan kembali

turun menjadi Rp 4,58 triliun, atau mengalami penurunan sebesar -1,15% dibandingkan target tahun sebelumnya.

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah menjadi sumber utama PAD, dengan realisasi sebesar Rp 4,03 triliun pada 2023 dan naik menjadi Rp 4,41 triliun pada 2024. Target tahun 2025 sedikit menurun menjadi Rp 3,71 triliun, namun proyeksi 2026 mengalami kenaikan tipis menjadi Rp 3,75 triliun, atau naik 0,92% dari tahun sebelumnya. Fluktuasi ini dapat dipengaruhi oleh perubahan kebijakan pajak, tingkat kepatuhan wajib pajak, serta faktor ekonomi makro yang mempengaruhi daya beli masyarakat.

Pendapatan Retribusi Daerah menunjukkan lonjakan signifikan. Pada 2023, realisasinya sebesar Rp 46,32 miliar, melonjak drastis pada 2024 menjadi Rp 690,78 miliar. Target 2025 dipatok pada angka Rp 687,33 miliar, dan proyeksi 2026 naik menjadi Rp 700,35 miliar, atau tumbuh 1,89% dari tahun sebelumnya. Kenaikan tajam ini kemungkinan besar didorong oleh perubahan tarif dan perluasan objek retribusi.

Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan juga menunjukkan tren positif, dari realisasi Rp 52,56 miliar pada 2023 menjadi Rp 63,18 miliar pada 2024. Target 2025 meningkat menjadi Rp 74,10 miliar, namun proyeksi 2026 turun menjadi Rp 70,41 miliar, atau berkurang 4,99% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya optimalisasi pengelolaan kekayaan daerah agar kontribusinya tetap stabil atau meningkat.

Sektor Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah mengalami fluktuasi cukup besar. Pada 2023, realisasinya mencapai Rp 335,22 miliar, menurun menjadi Rp 165,80 miliar pada 2024. Target 2025 lebih rendah lagi di angka Rp 156,48 miliar, dan proyeksi 2026 turun drastis menjadi Rp 59,86 miliar, atau turun 61,75% dari tahun sebelumnya. Penurunan tajam ini mengindikasikan tantangan besar dalam menjaga stabilitas sumber pendapatan dari kategori ini, yang bisa dipengaruhi oleh perubahan regulasi atau kebijakan pendapatan daerah.

Secara keseluruhan, PAD menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, dengan beberapa sektor mengalami pertumbuhan signifikan dan sektor lain menghadapi penurunan tajam. Diperlukan strategi yang komprehensif dan adaptif untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan PAD, agar dapat mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik secara optimal.

3.7.3 Pendapatan Transfer

Sumber pendapatan transfer dari pusat merupakan dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Pendapatan ini mencakup Dana Perimbangan, Dana Alokasi

Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), serta Dana Insentif Daerah (DID). Beberapa kebijakan dalam pendapatan transfer meliputi :

- Meningkatkan akurasi data potensi baik potensi pajak maupun potensi sumber daya alam bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sebagai dasar perhitungan Bagi Hasil.
- Meningkatkan keterlibatan pemerintah daerah dalam perhitungan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan perhitungan sumber daya alam lainnya agar memperoleh proporsi pembagian yang sesuai dengan potensi.
- Meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian teknis, dan pemangku kepentingan untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Transfer (DAU, DAK dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak).

Tabel 3.25 Pendapatan Transfer Pemda Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2026

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
PENDAPATAN TRANSFER	4.956.932.119.431,00	6.863.530.657.095,00	5.585.678.960.000,00	4.886.887.427.175,00	-12,51%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	4.956.932.119.431,00	6.586.357.007.976,00	5.385.678.960.000,00	4.626.887.427.175,00	-14,09%
Dana Bagi Hasil (DBH)	3.067.468.706.551	4.658.434.332.042	3.413.740.066.000	2.813.736.399.000	-17,58%
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.131.610.774.000	1.218.427.651.999	1.248.888.342.000	1.244.776.011.525	-0,33%
Dana Alokasi Khusus (DAK)	710.792.815.880	694.749.866.935	516.561.259.000	561.561.259.000	8,71%
Dana Insentif Daerah (DID)	47.059.823.000	-	-	-	0,00%
Insentif Fiskal	0	14.745.157.000	6.489.293.000	6.813.757.650	5,00%
TRANSFER ANTAR DAERAH		277.173.649.119,00	200.000.000.000	260.000.000.000	30,00%
Bantuan Keuangan		277.173.649.119,00	200.000.000.000	260.000.000.000	30,00%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2025

Pendapatan transfer daerah menunjukkan dinamika yang cukup signifikan selama periode 2023 hingga 2026. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp 4,96 triliun. Angka ini melonjak tajam pada tahun 2024 menjadi Rp 6,86 triliun. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi Rp 5,59 triliun, dan kembali turun pada proyeksi tahun 2026 menjadi Rp 4,89 triliun, atau mengalami penurunan sebesar 12,51% dibandingkan tahun sebelumnya.

Komponen terbesar pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2023, realisasi transfer pemerintah pusat mencapai Rp 4,96 triliun, naik menjadi Rp 6,59

triliun pada 2024, lalu turun menjadi Rp 5,39 triliun pada 2025, dan diproyeksikan kembali turun menjadi Rp 4,63 triliun pada 2026, atau turun 14,09% dari tahun sebelumnya.

Jika dirinci, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan komponen terbesar, dengan realisasi Rp 3,07 triliun pada 2023, melonjak menjadi Rp 4,66 triliun pada 2024, namun turun signifikan menjadi Rp 3,41 triliun pada 2025, dan diproyeksikan turun lagi menjadi Rp 2,81 triliun pada 2026, atau turun 17,58% dari tahun sebelumnya. Dana Alokasi Umum (DAU) relatif stabil, dengan realisasi Rp 1,13 triliun pada 2023, naik menjadi Rp 1,22 triliun pada 2024, Rp 1,25 triliun pada 2025, dan sedikit turun menjadi Rp 1,24 triliun pada 2026 (turun 0,33%).

Dana Alokasi Khusus (DAK) menunjukkan tren yang cukup positif, meskipun sempat turun dari Rp 710,79 miliar pada 2023 menjadi Rp 694,75 miliar pada 2024, namun kembali naik menjadi Rp 516,56 miliar pada 2025, dan diproyeksikan meningkat menjadi Rp 561,56 miliar pada 2026, atau tumbuh 8,71%. Sementara itu, Dana Insentif Daerah (DID) hanya tercatat pada 2023, dan insentif fiskal mulai muncul pada 2024 dengan nilai Rp 14,75 miliar, turun pada 2025 menjadi Rp 6,49 miliar, lalu naik tipis menjadi Rp 6,81 miliar pada 2026 (naik 5%).

Transfer antar daerah, khususnya bantuan keuangan, mulai terealisasi pada 2024 sebesar Rp 277,17 miliar, turun menjadi Rp 200 miliar pada 2025, dan diproyeksikan naik menjadi Rp 260 miliar pada 2026, atau tumbuh 30% dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum, meskipun terjadi peningkatan signifikan pada 2024, tren pendapatan transfer menunjukkan penurunan pada 2025 dan 2026, terutama pada komponen Dana Bagi Hasil. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk melakukan strategi pengelolaan keuangan yang lebih adaptif, memperkuat sumber pendapatan lain, dan mengoptimalkan pemanfaatan transfer antar daerah guna menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.

3.7.4 Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

Sumber pendapatan ini merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). Kebijakan yang dapat diterapkan dalam optimalisasi lain-lain pendapatan yang sah meliputi :

- a. Pemanfaatan hibah dari pemerintah pusat maupun lembaga internasional untuk mendukung program strategis daerah.
- b. Pengelolaan dana darurat secara efektif untuk mengatasi kondisi bencana dan keadaan darurat lainnya.

- c. Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah, baik dalam maupun luar negeri.

Tabel 3.26 Lain-lain Pendapatan Yang Sah Pemda Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2026

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	59.179.989.192,00	212.943.310.005,00	16.638.650.500,00	16.871.591.607,00	1,40%
Pendapatan Hibah	59.179.989.192	212.943.310.005	16.638.650.500	16.871.591.607	1,40%

Sumber: Badan Pendapatan Daerah, 2025

Berdasarkan data yang dilampirkan, komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah, khususnya dari Pendapatan Hibah, menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan selama periode 2023 hingga proyeksi 2026. Pada tahun 2023, realisasi pendapatan hibah tercatat sebesar Rp59,18 miliar. Angka ini melonjak drastis pada tahun 2024 menjadi Rp212,94 miliar, mencerminkan adanya penerimaan hibah yang luar biasa besar pada tahun tersebut.

Namun, pada tahun 2025, target pendapatan hibah yang ditetapkan dalam APBD turun tajam menjadi Rp16,64 miliar, dan proyeksi RKPD tahun 2026 hanya sedikit meningkat menjadi Rp16,87 miliar. Kenaikan antara target 2025 dan proyeksi 2026 hanya sebesar 1,40%.

Tren ini memperlihatkan bahwa pendapatan hibah bersifat tidak tetap dan sangat bergantung pada adanya program atau bantuan tertentu dari pihak ketiga, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga donor. Lonjakan pada tahun 2024 kemungkinan besar disebabkan oleh adanya hibah khusus atau proyek tertentu yang tidak berulang pada tahun-tahun berikutnya. Sementara itu, proyeksi ke depan menunjukkan kecenderungan pendapatan hibah kembali ke level normal, yang relatif kecil dibandingkan tahun 2024.

Kondisi ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam merencanakan belanja yang bersumber dari hibah, serta perlunya upaya diversifikasi sumber pendapatan daerah agar ketergantungan pada pendapatan yang bersifat tidak pasti dapat diminimalisir. Pemerintah daerah perlu terus mendorong upaya peningkatan pendapatan sah lainnya secara berkelanjutan guna menjaga stabilitas fiskal daerah.

3.8 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan saat ini perlu memusatkan perhatian pada upaya menyeimbangkan struktur dasar perekonomiannya, khususnya antara sektor pertambangan, pertanian, perikanan, kelautan, dan industri. Arah pembangunan yang mengedepankan keseimbangan antar sektor ini harus diiringi dengan kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang selaras dalam pelaksanaan Belanja Daerah. Selain itu, diperlukan penerjemahan visi dan misi daerah ke dalam rumusan program pembangunan yang sistematis,

menyeluruh, terencana, dan terintegrasi, dengan penentuan skala prioritas yang tepat serta sasaran dan hasil (outcome) yang jelas dan terukur. Semua ini harus diwujudkan agar pelaksanaan pembangunan benar-benar dapat menjawab dan memenuhi kebutuhan nyata masyarakat Kalimantan Selatan.

Kecenderungan meningkatnya kebutuhan akan belanja pegawai, belanja rutin perkantoran (biaya tetap), belanja bagi hasil, serta bantuan keuangan, tidak sejalan dengan proyeksi pendapatan daerah pada tahun 2026. Jika dilihat dari indikator ruang fiskal, yakni ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara fleksibel oleh pemerintah daerah, maka ruang fiskal Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Pengelolaan belanja daerah diarahkan melalui pola pengeluaran yang menjunjung prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, efisiensi, dan efektivitas. Untuk Tahun Anggaran 2026, kebijakan belanja daerah Provinsi Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat, meliputi: Gaji dan Tunjangan ASN Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Gaji dan Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); dan Belanja Tugas Belajar PNS.
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Tujuan dan Sasaran Daerah serta penerapan pelayanan dasar, diantaranya:
 - a. Mengedepankan program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;
 - b. Melaksanakan program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian 8 prioritas pembangunan nasional (Asta Cita) sebagaimana diamanatkan pada RPJMN serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan;
 - c. Melaksanakan pendampingan terhadap program-program pemerintah pusat;
 - d. Mengakomodir program pembangunan yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang;
 - e. Mengakomodir hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses yang dituangkan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh pimpinan DPRD;

- f. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kewenangan provinsi.
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
 4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026.
 5. Pengalokasian dana fungsi pendidikan wajib dipenuhi paling sedikit 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sebagai bentuk komitmen untuk memenuhi kebutuhan dalam penyelenggaraan pendidikan.
 6. Penggunaan dana fungsi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan fungsi pelayanan kesehatan di Provinsi Kalimantan Selatan secara konsisten dan berkelanjutan. Pembiayaan tidak hanya difokuskan pada urusan kesehatan secara langsung, tetapi juga mencakup kegiatan di luar urusan kesehatan yang mendukung fungsi kesehatan, seperti penyediaan sarana olahraga dan pengembangan sumber daya manusia.
 7. Pengalokasian belanja infrastruktur pelayanan publik ditetapkan paling sedikit 40 persen dari total belanja APBD, tidak termasuk belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah maupun desa. Belanja ini mencakup infrastruktur daerah yang berkaitan dengan percepatan pembangunan serta pemeliharaan sarana pelayanan publik dan ekonomi. Tujuannya adalah untuk membuka lebih banyak lapangan kerja, menurunkan angka kemiskinan, serta mengurangi kesenjangan pelayanan antar wilayah.
 8. Belanja untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya dialokasikan guna mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi, sekaligus mendukung kegiatan operasional perkantoran.
 9. Penganggaran dilakukan untuk memenuhi alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan beserta regulasi pelaksanaannya, termasuk di dalamnya alokasi untuk peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur serta penguatan kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
 10. Pengalokasian anggaran untuk Bantuan Keuangan dan Hibah dilakukan secara kompetitif, dengan tujuan mendorong lahirnya inovasi-inovasi yang mampu memberikan dampak percepatan terhadap pencapaian target-target strategis pembangunan daerah, sehingga hasilnya semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

11. Melakukan revitalisasi terhadap Kantor Dinas, Kantor Cabang Dinas/Balai/UPTD, serta satuan pelayanan tertentu yang secara kondisi fisik dan fungsional membutuhkan rehabilitasi dan penataan ulang.
12. Pemberian Penghargaan Olahraga kepada atlet daerah;
13. Kebijakan terkait pengalokasian belanja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014).
14. Kebijakan terkait belanja hibah, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga, (sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011). Selain untuk pemberian uang/barang atau jasa, belanja hibah dialokasikan untuk Belanja Operasional Sekolah (BOS) SD Negeri/Swasta, SMP Negeri/Swasta dan SMA Swasta. Untuk BOS SMA Negeri dan Pendidikan Khusus dialokasikan pada belanja langsung dalam bentuk program kegiatan pada SOPD Dinas Pendidikan. BOS ini pengalokasiannya merupakan yang terbesar dalam belanja hibah.

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

Tabel 3.27 Belanja Daerah Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
BELANJA	8.653.780.279.865,95	11.128.259.358.458,40	11.728.295.956.102	11.132.749.974.354	-5,08%
BELANJA OPERASI	4.362.802.312.617,95	5.743.177.864.617,28	6.850.333.234.866	6.849.795.592.395	-0,01%
Belanja Pegawai	1.782.141.431.621	2.186.426.620.270	3.222.405.820.646	3.131.169.992.819	-2,83%
Belanja Barang dan Jasa	2.205.751.280.057	3.084.357.776.471	3.346.415.097.220	3.430.075.474.651	2,50%
Belanja Hibah	362.441.800.940	454.197.967.876	258.824.817.000	265.295.437.425	2,50%
Belanja Bantuan Sosial	12.467.800.000	18.195.500.000	22.687.500.000	23.254.687.500	2,50%
Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-		
BELANJA MODAL	2.032.123.253.406,00	2.968.103.203.659,17	2.931.691.654.845	2.682.954.381.959	-8,48%
Belanja Modal Tanah	206.404.346.632	8.160.939.717	77.694.430.160	185.463.873.176	138,71%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.725.429.293	483.304.645.864	331.490.305.518	364.639.336.070	10,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	465.719.059.633	783.569.702.085	457.566.229.608	503.322.852.569	10,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	926.413.899.699	1.672.374.069.506	2.043.471.183.500	1.605.911.863.480	-21,41%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.540.643.149	20.438.391.487	20.427.512.059	22.470.263.265	10,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	319.875.000	255.455.000	1.041.994.000	1.146.193.400	10,00%
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.822.306.820,00	4.110.131.400,00	256.000.000.000	100.000.000.000	-60,94%
Belanja Tidak Terduga	17.822.306.820	4.110.131.400,00	256.000.000.000	100.000.000.000	-60,94%
BELANJA TRANSFER	2.241.032.407.022,00	2.412.868.158.782,00	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	-11,26%
Belanja Bagi Hasil	2.241.032.407.022,00	2.412.868.158.782,00	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	-11,26%
Belanja Bantuan Keuangan					
JUMLAH BELANJA	8.653.780.279.866	11.128.259.358.458,40	11.728.295.956.102	11.132.749.974.354	-5,08%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

3.8.1 Belanja Operasi

Berdasarkan data belanja operasi tahun 2023 hingga proyeksi 2026, terlihat adanya tren peningkatan anggaran secara umum, meskipun pada tahun 2026 terjadi sedikit penurunan dibandingkan tahun 2025. Realisasi belanja operasi pada 2023 sebesar Rp4,36 triliun meningkat signifikan menjadi Rp5,74 triliun pada 2024. Angka ini kemudian direncanakan naik lagi pada APBD 2025 menjadi Rp6,85 triliun, namun proyeksi RKPD 2026 sedikit menurun menjadi Rp6,85 triliun, atau turun tipis sebesar -0,01%.

Jika dirinci per komponen, Belanja Pegawai mengalami kenaikan tajam dari Rp1,78 triliun pada 2023 menjadi Rp2,19 triliun pada 2024, lalu melonjak ke Rp3,22 triliun pada 2025. Namun, pada 2026, belanja pegawai diproyeksikan turun menjadi Rp3,13 triliun, atau turun 2,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini bisa menjadi indikasi efisiensi belanja pegawai atau adanya kebijakan pengendalian belanja rutin.

Belanja Barang dan Jasa menunjukkan tren yang terus meningkat, dari Rp2,20 triliun pada 2023 menjadi Rp3,08 triliun pada 2024, lalu naik lagi ke Rp3,35 triliun pada 2025, dan diproyeksikan naik 2,5% menjadi Rp3,43 triliun pada 2026. Kenaikan ini mencerminkan adanya peningkatan kebutuhan operasional dan pelayanan publik.

Belanja Hibah juga mengalami fluktuasi. Setelah realisasi sebesar Rp362,44 miliar pada 2023 dan naik menjadi Rp454,20 miliar pada 2024, anggaran hibah turun menjadi Rp258,82 miliar pada 2025. Namun, pada 2026, belanja hibah diproyeksikan naik 2,5% menjadi Rp265,30 miliar. Pola ini menunjukkan bahwa alokasi hibah sangat dipengaruhi oleh kebutuhan dan prioritas program tertentu setiap tahunnya.

Belanja Bantuan Sosial juga meningkat secara bertahap, dari Rp12,47 miliar pada 2023 menjadi Rp18,20 miliar pada 2024, lalu naik menjadi Rp22,69 miliar pada 2025, dan diproyeksikan naik 2,5% menjadi Rp23,25 miliar pada 2026. Peningkatan ini sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat jaring pengaman sosial dan perlindungan masyarakat.

Secara keseluruhan, meskipun terjadi sedikit penurunan total belanja operasi pada 2026, tren kenaikan pada komponen belanja barang dan jasa, hibah, serta bantuan sosial menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan dukungan sosial. Sementara itu, penurunan belanja pegawai dapat menjadi sinyal perbaikan efisiensi birokrasi dan pengendalian belanja rutin.

Rincian lengkap proyeksi Belanja Operasi Daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.28 Belanja Operasi Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
BELANJA OPERASI	4.362.802.312.617,95	5.743.177.864.617,28	6.850.333.234.866	6.849.795.592.395	-0,01%
Belanja Pegawai	1.782.141.431.621	2.186.426.620.270	3.222.405.820.646	3.131.169.992.819	-2,83%
Belanja Barang dan Jasa	2.205.751.280.057	3.084.357.776.471	3.346.415.097.220	3.430.075.474.651	2,50%
Belanja Hibah	362.441.800.940	454.197.967.876	258.824.817.000	265.295.437.425	2,50%
Belanja Bantuan Sosial	12.467.800.000	18.195.500.000	22.687.500.000	23.254.687.500	2,50%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

3.8.2 Belanja Modal

Berdasarkan data belanja modal tahun 2023 hingga proyeksi RKPD 2026, terlihat adanya dinamika alokasi anggaran yang cukup signifikan. Total belanja modal mengalami peningkatan dari realisasi Rp2,12 triliun pada 2023 menjadi Rp2,97 triliun pada 2024. Namun, pada APBD 2025, belanja modal sedikit menurun menjadi Rp2,93 triliun, dan diproyeksikan kembali turun pada 2026 menjadi Rp2,68 triliun. Penurunan antara APBD 2025 dan proyeksi RKPD 2026 tercatat sebesar -8,48%.

Jika dirinci per jenis belanja modal, beberapa poin utama yang dapat disoroti adalah sebagai berikut:

Belanja Modal Tanah mengalami lonjakan sangat signifikan, dari Rp77,69 miliar pada 2025 menjadi Rp185,46 miliar pada 2026, atau naik 138,71%. Hal ini menunjukkan adanya prioritas pengadaan lahan untuk mendukung pembangunan infrastruktur atau fasilitas publik di tahun mendatang.

Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Lainnya, serta **Aset Lainnya** masing-masing diproyeksikan naik 10% pada 2026 dibandingkan 2025. Kenaikan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menjaga kesinambungan investasi pada sarana dan prasarana pendukung layanan publik.

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan justru mengalami penurunan cukup tajam, dari Rp2,04 triliun pada 2025 menjadi Rp1,61 triliun pada 2026, atau turun 21,41%. Penurunan ini kemungkinan merupakan bagian dari strategi pengendalian belanja infrastruktur besar-besaran setelah lonjakan pada tahun-tahun sebelumnya, atau adanya pergeseran prioritas ke sektor lain.

Secara keseluruhan, tren belanja modal daerah menunjukkan upaya penyesuaian dan efisiensi, dengan fokus pada pengadaan lahan dan peningkatan aset strategis, namun disertai pengurangan pada pembangunan infrastruktur jalan dan jaringan. Pemerintah daerah perlu

memastikan bahwa penurunan belanja pada sektor-sektor tertentu tidak menghambat pelayanan publik dan tetap mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Rincian lengkap proyeksi Belanja Modal Daerah Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 3.29 Belanja Modal Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
BELANJA MODAL	2.032.123.253.406,00	2.968.103.203.659,17	2.931.691.654.845	2.682.954.381.959	-8,48%
Belanja Modal Tanah	206.404.346.632	8.160.939.717	77.694.430.160	185.463.873.176	138,71%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	404.725.429.293	483.304.645.864	331.490.305.518	364.639.336.070	10,00%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	465.719.059.633	783.569.702.085	457.566.229.608	503.322.852.569	10,00%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	926.413.899.699	1.672.374.069.506	2.043.471.183.500	1.605.911.863.480	-21,41%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	28.540.643.149	20.438.391.487	20.427.512.059	22.470.263.265	10,00%
Belanja Modal Aset Lainnya	319.875.000	255.455.000	1.041.994.000	1.146.193.400	10,00%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

3.2.3.2. BELANJA TIDAK TERDUGA

Berdasarkan data yang dilampirkan, alokasi anggaran untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) menunjukkan fluktuasi yang sangat signifikan selama periode 2023 hingga proyeksi 2026. Pada tahun 2023, realisasi BTT tercatat sebesar Rp17,82 miliar, kemudian melonjak drastis pada 2024 menjadi Rp 4,11 triliun. Namun, pada APBD Penetapan 2025, anggaran BTT turun sangat tajam menjadi Rp 256 miliar, dan proyeksi RKPD 2026 kembali turun menjadi Rp100 miliar. Penurunan antara APBD Penetapan 2025 dan proyeksi RKPD 2026 tercatat sebesar -60,94%.

Lonjakan BTT pada 2024 kemungkinan besar disebabkan oleh kebutuhan pembiayaan yang bersifat darurat atau luar biasa, seperti penanganan bencana, krisis kesehatan, atau kejadian tak terduga lainnya yang memerlukan respons anggaran besar. Sementara itu, penurunan drastis pada 2025 dan 2026 mengindikasikan upaya pengendalian dan efisiensi anggaran, dengan asumsi risiko kejadian tak terduga di masa mendatang lebih rendah atau sudah diantisipasi melalui kebijakan lain.

Tren ini menegaskan pentingnya fleksibilitas dalam pengelolaan BTT, namun tetap perlu kehati-hatian agar alokasi tidak terlalu besar sehingga mengurangi ruang fiskal untuk belanja prioritas lainnya. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa meskipun terjadi penurunan anggaran BTT, kapasitas respons terhadap kejadian tak terduga tetap terjaga secara optimal.

Tabel 3.30 Belanja Tidak Terduga (BTT) Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
BELANJA TIDAK TERDUGA	17.822.306.820,00	4.110.131.400,00	256.000.000.000	100.000.000.000	-60,94%
Belanja Tidak Terduga	17.822.306.820	4.110.131.400,00	256.000.000.000	100.000.000.000	-60,94%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

3.8.3 Belanja Transfer

Berdasarkan data yang dilampirkan, belanja transfer daerah selama periode 2023 hingga proyeksi RKPD 2026 menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2023, realisasi belanja transfer tercatat sebesar Rp2,24 triliun dan meningkat pada 2024 menjadi Rp2,41 triliun. Namun, pada APBD Penetapan 2025, anggaran belanja transfer turun tajam menjadi Rp1,69 triliun, dan diproyeksikan kembali menurun pada RKPD 2026 menjadi Rp1,5 triliun. Penurunan antara APBD Penetapan 2025 dan proyeksi RKPD 2026 tercatat sebesar -11,26%.

Seluruh belanja transfer pada tabel ini dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil, tanpa adanya alokasi untuk Belanja Bantuan Keuangan selama empat tahun terakhir. Penurunan belanja transfer ini dapat mengindikasikan adanya perubahan kebijakan fiskal atau penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah, khususnya dalam menyalurkan dana bagi hasil kepada pihak terkait.

Tren penurunan ini perlu diantisipasi dengan strategi pengelolaan keuangan yang lebih efisien, agar tidak mengganggu stabilitas pendanaan bagi pihak penerima dana bagi hasil. Pemerintah daerah juga perlu memastikan bahwa penurunan belanja transfer tidak berdampak negatif terhadap pelayanan publik dan pembangunan di tingkat daerah.

Tabel 3.31 Belanja Transfer Pemda Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 - 2026 (Rp)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
BELANJA TRANSFER	2.241.032.407.022,00	2.412.868.158.782,00	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	-11,26%
Belanja Bagi Hasil	2.241.032.407.022,00	2.412.868.158.782,00	1.690.271.066.391	1.500.000.000.000	-11,26%
Belanja Bantuan Keuangan					

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

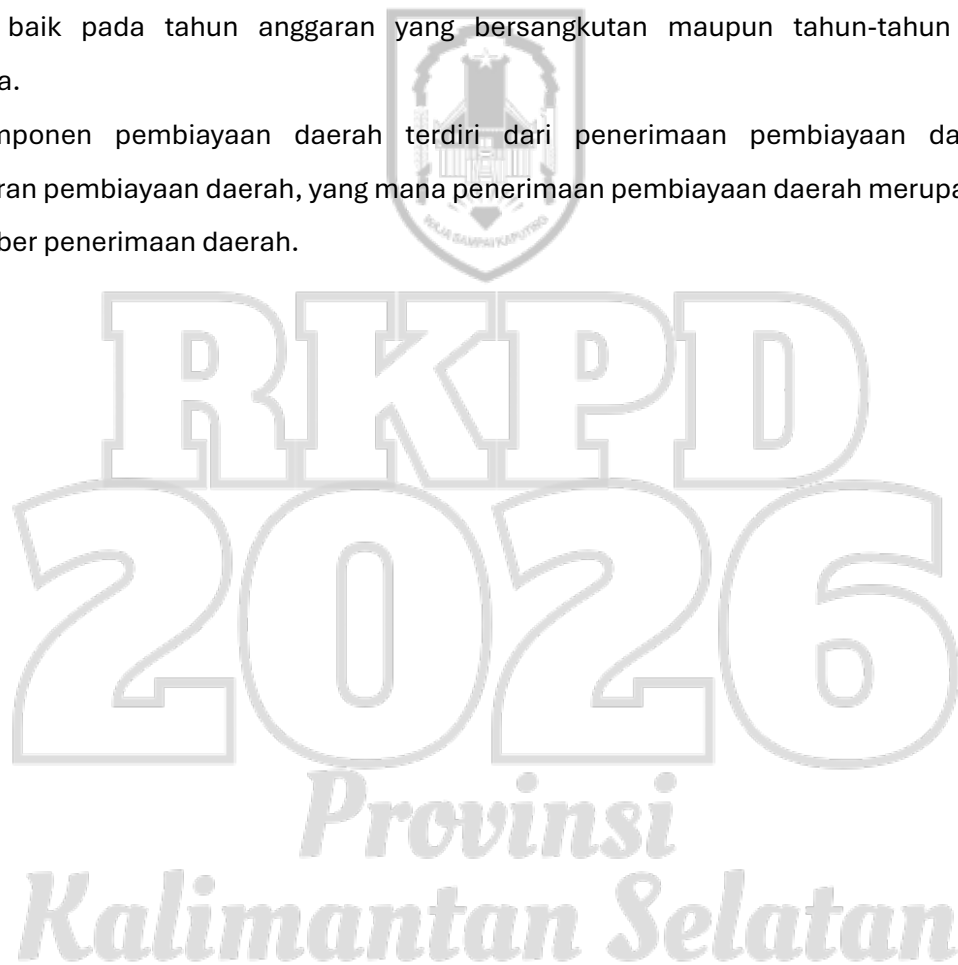
3.9 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah transaksi keuangan atas semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah digunakan

untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan meliputi sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, penerimaan piutang daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya. Pengeluaran pembiayaan meliputi penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya

Dalam struktur APBD, selain komponen pendapatan dan belanja daerah, terdapat juga pembiayaan daerah, yaitu setiap penerimaan/pengeluaran yang perlu dibayar kembali/diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Komponen pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah, yang mana penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah.



Tabel 3.32 Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 – 2026 (Rupiah)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
PEMBIAYAAN DAERAH	1.399.418.763.316	1.704.720.263.316,10	1.696.398.393.649	1.652.738.433.808	-2,57%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.562.255.763.316	1.762.208.763.316,10	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	-2,50%
Penggunaan SILPA	1.562.208.763.316	1.562.208.763.316	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	-2,50%
Pencairan Dana Cadangan	-	200.000.000.000	-		
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Talangan	-	-	-		
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	47.000.000	-	-		
Sisa Belanja Lainnya					
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	162.837.000.000	57.488.500.000,00	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	-			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	62.837.000.000	57.488.500.000,00	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
Pemberian Pinjaman Dana Talangan	-	-	-		
PEMBIAYAAN NETTO	1.399.418.763.316	1.704.720.263.316,10	1.696.398.393.649	1.652.738.433.808	-2,57%

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Provinsi
Kalimantan Selatan

3.9.1 Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Penerimaan ini digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 3.33 Penerimaan Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 – 2026 (Rupiah)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.562.255.763.316	1.762.208.763.316,10	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	-2,50%
Penggunaan SILPA	1.562.208.763.316	1.562.208.763.316	1.746.398.393.649	1.702.738.433.808	-2,50%
Pencairan Dana Cadangan	-	200.000.000.000	-	-	
Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Talangan	-	-	-	-	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen	47.000.000	-	-	-	
Sisa Belanja Lainnya					

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Berdasarkan data yang dilampirkan mengenai penerimaan pembiayaan pada APBD tahun 2023 hingga proyeksi RKPD 2026, berikut adalah analisa narasinya:

1. Tren Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan menunjukkan tren peningkatan dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.562.255.763.316 menjadi Rp1.762.208.763.316,10 pada tahun 2024. Namun, pada APBD Penetapan 2025, jumlah ini sedikit menurun menjadi Rp1.746.398.393.649, dan diproyeksikan kembali turun pada RKPD 2026 menjadi Rp1.702.738.433.808. Penurunan dari APBD Penetapan 2025 ke RKPD 2026 tercatat sebesar -2,50%.

2. Komponen Utama Penerimaan

Komponen terbesar penerimaan pembiayaan berasal dari penggunaan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran), yang konsisten menjadi sumber utama dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023 dan 2024, seluruh penerimaan pembiayaan berasal dari SILPA. Pada tahun 2025 dan 2026, SILPA tetap menjadi sumber utama, dengan nominal yang menurun sejalan dengan total penerimaan pembiayaan.

3. Pencairan Dana Cadangan

Pada tahun 2024, terdapat pencairan dana cadangan sebesar Rp200.000.000.000, yang tidak ditemukan pada tahun-tahun lainnya. Ini menunjukkan adanya kebutuhan tambahan dana pada tahun tersebut yang tidak diulang pada tahun berikutnya.

4. Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen

Terdapat penerimaan kembali investasi non permanen pada tahun 2023 sebesar Rp47.000.000, namun tidak ada pada tahun-tahun berikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat pengembalian investasi yang tidak terjadi di tahun-tahun setelahnya.

5. Tidak Ada Penerimaan dari Sumber Lain

Pada seluruh periode yang dianalisis, tidak terdapat penerimaan dari pencairan dana cadangan (kecuali 2024), penerimaan kembali pinjaman dana talangan, maupun sisa belanja lainnya. Ini mengindikasikan bahwa struktur pembiayaan daerah sangat bergantung pada SILPA dan, pada satu kesempatan, dana cadangan.

6. Penurunan Proyeksi

Penurunan sebesar -2,50% dari APBD Penetapan 2025 ke RKPD 2026 menunjukkan adanya proyeksi penurunan kemampuan pembiayaan dari sumber-sumber yang ada, terutama SILPA. Hal ini bisa menjadi perhatian untuk pengelolaan fiskal ke depan agar tidak terlalu bergantung pada sisa anggaran tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah masih sangat didominasi oleh penggunaan SILPA, dengan sedikit diversifikasi sumber penerimaan. Penurunan proyeksi pada tahun 2026 perlu diantisipasi dengan strategi pengelolaan keuangan yang lebih beragam agar ketahanan fiskal daerah tetap terjaga.

3.10 Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan daerah dalam APBD adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang bersifat strategis dan tidak termasuk dalam kategori belanja rutin. Pengeluaran ini bertujuan untuk mendukung transaksi keuangan pemerintah daerah yang memiliki dampak jangka panjang, seperti:

- Pembentukan Dana Cadangan: Alokasi dana untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak atau program strategis di masa depan.
- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah: Investasi pemerintah daerah dalam badan usaha atau proyek tertentu untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Pembayaran Pokok Pinjaman: Pelunasan utang pemerintah daerah yang jatuh tempo, termasuk cicilan pokok, bunga, dan kewajiban lainnya.

- Pemberian Pinjaman kepada Entitas Lain: Pinjaman yang diberikan kepada pihak lain, seperti pemerintah pusat atau daerah lain, dengan harapan akan diterima kembali di masa depan.

Pengeluaran pembiayaan ini biasanya digunakan untuk menutup defisit anggaran atau memanfaatkan surplus APBD dan diatur berdasarkan prinsip akuntansi berbasis kas sesuai peraturan perundang-undangan.

Tabel 3.34 Pengeluaran Pembiayaan Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan TA 2023 – 2026 (Rupiah)

URAIAN	REALISASI		APBD PENETAPAN	RKPD	PERUBAHAN APBD PENETAPAN 2025 DAN RKPD 2026
	2023	2024	2025	2026	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	162.837.000.000	57.488.500.000,00	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
Pembentukan Dana Cadangan	100.000.000.000	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	62.837.000.000	57.488.500.000,00	50.000.000.000	50.000.000.000	0,00%
Pemberian Pinjaman Dana Talangan	-	-	-	-	-

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, 2025

Berdasarkan data pengeluaran pembiayaan dari tahun 2023 hingga proyeksi RKPD 2026, berikut adalah analisa narasinya:

1. Tren Pengeluaran Pembiayaan

Total pengeluaran pembiayaan menunjukkan tren penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, realisasi pengeluaran mencapai Rp162.837.000.000. Angka ini turun drastis pada tahun 2024 menjadi Rp57.488.500.000,00, kemudian kembali turun menjadi Rp50.000.000.000 pada APBD Penetapan 2025 dan tetap di angka yang sama pada RKPD 2026. Tidak ada perubahan antara APBD Penetapan 2025 dan RKPD 2026 (0,00%).

2. Komponen Pengeluaran Pembiayaan

- **Pembentukan Dana Cadangan** hanya terjadi pada tahun 2023 sebesar Rp100.000.000.000. Setelah itu, tidak ada lagi pengeluaran untuk pembentukan dana cadangan pada tahun-tahun berikutnya.
- **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah** menjadi satu-satunya komponen pengeluaran pembiayaan pada tahun 2024 hingga 2026. Pada tahun 2023, realisasi penyertaan modal sebesar Rp62.837.000.000, lalu meningkat menjadi Rp57.488.500.000,00 pada 2024, dan turun serta stabil di angka Rp50.000.000.000 pada 2025 dan 2026.
- **Pemberian Pinjaman Dana Talangan** tidak dilakukan sama sekali selama periode yang dianalisis.

3. Stabilitas dan Konsistensi

Pada tahun 2025 dan 2026, pengeluaran pembiayaan hanya terdiri dari penyertaan modal pemerintah daerah dengan nominal yang sama, yaitu Rp50.000.000.000. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi kebijakan dalam pengeluaran pembiayaan pada dua tahun terakhir.

4. Penurunan dan Efisiensi

Penurunan pengeluaran pembiayaan secara signifikan dari tahun 2023 ke tahun-tahun berikutnya dapat diartikan sebagai upaya efisiensi dan penyesuaian terhadap kebutuhan riil daerah. Tidak adanya pembentukan dana cadangan dan pinjaman dana talangan juga mengindikasikan fokus pengeluaran pada penyertaan modal yang lebih terukur dan terencana.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa pengeluaran pembiayaan daerah mengalami penurunan dan lebih terfokus pada penyertaan modal pemerintah daerah, dengan tidak adanya lagi pembentukan dana cadangan maupun pemberian pinjaman dana talangan. Kebijakan ini mencerminkan upaya efisiensi dan stabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah untuk tahun-tahun mendatang.

3.11 Arah Kebijakan Alternatif Pembiayaan Daerah

Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan dana yang besar untuk pembangunan daerah. Terbatasnya APBD Provinsi Kalimantan Selatan yang hanya bersumber pada sumber-sumber penerimaan konvensional, mendorong Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mencari alternatif pembiayaan anggaran dalam membangun Kalimantan Selatan. Sumber-sumber pendanaan pembangunan non-APBD yang dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan antara lain:

A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembangunan dalam suatu daerah membutuhkan banyak sumber pendanaan, pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan selain bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, juga memperoleh dukungan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pendanaan pembangunan yang bersumber dari APBN berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh Perangkat Daerah di kabupaten/kota maupun Perangkat Daerah Provinsi.

B. APBD Kabupaten/Kota

Keterbatasan sumber pembiayaan dalam pembangunan daerah melalui APBD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan melalui

kolaborasi pembiayaan dengan APBD kabupaten/kota. Kolaborasi sangat diperlukan agar tercipta sinkronisasi dalam menuntaskan program dan kegiatan yang telah direncanakan, sehingga nantinya diharapkan pembangunan daerah menjadi lebih terarah dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Kolaborasi dapat dilakukan dengan syarat bahwa program dan kegiatan provinsi sejalan dan sinergis dengan program dan kegiatan pemerintah kabupaten/kota, sehingga antara provinsi dan kabupaten/kota dapat bekerja sama didalam pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun penuntasannya dilakukan dengan sharing pendanaan ataupun pembagian peran pendanaannya.

C. Dana Masyarakat

Salah satu potensi pendanaan non APBD yang bisa dijadikan sumber pembiayaan percepatan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan adalah melalui dana masyarakat, mengingat jumlah penduduk Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi jumlah penduduk terbanyak kedua di pulau Kalimantan, maka potensi untuk pendanaan pembangunan melalui dana masyarakat cukup besar. Potensi ini pun belum dapat memberi peran maksimal dalam mensejahterakan rakyat dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Melalui dana masyarakat ini diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi menuju manfaat masyarakat. Dari berbagai jenis dana masyarakat, yang memungkinkan digali potensinya adalah zakat dan wakaf uang, untuk itu, diperlukan adanya komitmen dan kerjasama yang kuat antar seluruh pemangku kepentingan zakat, baik pemerintah, DPRD, badan dan lembaga amil zakat, maupun masyarakat Kalimantan Selatan secara keseluruhan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

D. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Dinamika lingkungan bisnis dan liberalisasi menuntut Perubahan pola usaha yang berorientasi lebih holistik, berbasis nilai-nilai *Good Corporate Governance* karena Perusahaan dalam eksistensinya ditengah-tengah masyarakat memerlukan citra yang positif. Untuk itu diperlukan adanya program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) yang baik didalam Perusahaan. Dari Segi Pemerintah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR) bisa jadi merupakan salah satu solusi yang menguntungkan dan tidak terlalu berisiko sebagai suatu alternatif sumber pembiayaan dibandingkan alternatif sumber pembiayaan lain sebab tidak dapat dipungkiri bahwa Pembiayaan pembangunan semakin lama menjadi

kebutuhan yang mendesak dan kemampuan keuangan pemerintah daerah yang terbatas serta masih bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) atau Corporate Social Responsibility (CSR), merupakan suatu tanggung jawab perusahaan untuk memberdayakan masyarakat secara berkelanjutan (sustainability), mencakup aspek ekonomi, lingkungan dan sosial budaya. Perusahaan yang telah mengalami keuntungan atas bisnisnya, sudah pada tempatnya jika sebagian keuntungannya digunakan untuk melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat.

E. Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan. Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi, dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumberdaya publik yang tepat dapat berkontribusi lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil dan dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas, dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”. Salah satu persoalan yang dihadapi pemerintah daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain, seperti kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sosial, dan agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bahu-membahu untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

F. Hibah

Hibah dimaksud adalah Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam rangka mendukung pembangunan diberbagai sektor. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) diperlukan karena adanya kebutuhan investasi untuk membangun ekonomi dan adanya keterbatasan sumber dana pemerintah untuk investasi. Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) adalah setiap penerimaan negara baik dalam bentuk devisa dan atau devisa yang dirupiahkan maupun dalam bentuk barang dan atau dalam bentuk jasa yang diperoleh dari pemberi pinjaman luar negeri yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu. Peraturan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN), diantaranya Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengajuan Usulan, Penilaian, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan yang Dibiayai dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Pengusulan kegiatan yang dibiayai dengan PHLN dapat dilakukan oleh Kementerian Negara (departemen dan non-departemen), lembaga pemerintahan non-departemen (selanjutnya disebut lembaga), Pemerintah Daerah (Pemda), dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

G. Pinjaman Daerah

Konsep dasar pinjaman daerah dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

H. Obligasi Pemerintah Daerah

Obligasi daerah adalah salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan/atau jangka panjang yang bersumber dari Masyarakat, penerbitan obligasi daerah hanya dapat dilakukan di pasar modal domestic dan dalam mata uang Rupiah, namun efek yang diterbitkan tidak dijamin oleh Pemerintah. Revenue Bond adalah salah satu jenis obligasi pendapatan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan digunakan hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah.

I. Kemitraan dengan Lembaga Internasional/NGO

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, maka diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang tata cara kerja sama daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dan kerja sama daerah dengan lembaga di luar negeri. Kerja sama daerah ini merupakan sebagian urusan pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan, yang menjadi kewenangan daerah, terdiri atas pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, dan promosi potensi daerah, serta objek kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Internasional disebut juga dengan ‘NGO’ (*Non Governmental Organization*) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerja sama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, *Transfer of knowledge*, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain

J. PINA (Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah)

Pembiayaan Investasi Non-Anggaran Pemerintah (PINA) adalah skema pembiayaan proyek infrastruktur tanpa melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui penggalangan sumber pembiayaan alternatif agar dapat digunakan untuk berkontribusi dalam pembiayaan proyek – proyek strategis yang membutuhkan modal besar, tetapi dinilai baik secara ekonomi dan menguntungkan secara finansial. PINA merupakan alternatif pendanaan yang difasilitasi oleh Pemerintah guna mengatasi kendala pembiayaan ekuitas proyek infrastruktur. Pengembangan skema investasi ini, murni tidak melibatkan Dana dari Pemerintah melalui Pembiayaan Investasi Non Anggaran (PINA), namun dapat berkolaborasi dengan proyek KPBU dalam pembangunan infrastruktur.

peraturan perundang-undangan. Lembaga Internasional disebut juga dengan ‘NGO’ (*Non Governmental Organization*) merupakan organisasi/lembaga internasional kegiatannya bertujuan memberikan bantuan atau pelayanan pada masyarakat secara sukarela. Keterlibatan Lembaga Internasional dalam proses pembangunan sebagai alternatif untuk menyelesaikan masalah keterbatasan sumberdaya yang dimiliki pemerintah, yaitu ketersediaan anggaran dalam

menyediakan layanan publik serta bentuk partisipasi mitra pembangunan dalam kontribusinya dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan manfaat dari mitra kerja sama ini diantaranya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjangkau daerah yang sulit dan belum terjangkau oleh program pemerintah daerah, *Transfer of knowledge*, inovasi pemberdayaan masyarakat, dan hasil baik dapat direplikasikan ke daerah lain.



BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perencanaan Pembangunan Berbasis Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta mensinergikan 4 (empat) pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, dan *top down-bottom-up planning*. Selain itu, digunakan pendekatan perencanaan berbasis kewilayahan yang bertujuan untuk memberikan arahan pembangunan sesuai dengan potensi daerah. Dalam prosesnya, pemanfaatan media informasi baik media cetak maupun media sosial resmi pemerintah memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk menyebarkan informasi, membangun partisipatif dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Perumusan prioritas RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjawab tantangan isu strategis yang telah dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan beserta hasil evaluasi pembangunan pada tahun 2025. Untuk menjamin keselarasan dengan tujuan, sasaran, dan kebijakan dalam perencanaan jangka panjang dan jangka menengah nasional maupun daerah, maka perumusan sasaran dan prioritas dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 sebagaimana kerangka pikir pada Gambar 4.1. disusun dengan mengacu dan memperhatikan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029;
2. Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2045;
4. Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026;
5. RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029;
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Kalimantan Selatan Tahun 2023 – 2042;
7. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB); dan
8. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.



4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

4.1.1 Penelaahan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional

Penelaahan Terhadap RPJMN Tahun 2025 - 2029

IV-2



(Sumber : Perpres RPJMN Tahun 2025 – 2029, Bappenas)

Gambar 4.1. Asta Cita sebagai Prioritas Pembangunan dalam RPJMN 2025 - 2029

Berdasarkan RPJMN Tahun 2025 – 2029 ada Delapan Prioritas Nasional merupakan wujud implemementasi Asta Cita yang kemudian diterjemahkan ke dalam Program Prioritas dan Proyek Prioritas yang memiliki sasaran terukur sebagai dasar pelaksanaan di Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, dan badan usaha (BUMN, Swasta). Prioritas Nasional ini menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran nasional tahunan, intervensi kerangka regulasi dan kelembagaan, rencana kerja di tiap instansi pemerintah hingga penyusunan intervensi teknis strategis seperti halnya proyek strategis nasional. Delapan Prioritas Nasional tersebut seperti yang disajikan pada Gambar 4.2., yaitu :

- ♦ Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia
- ♦ Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru
- ♦ Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

- ♦ Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas
- ♦ Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri
- ♦ Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan
- ♦ Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan
- ♦ Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Salah satu isu strategis dalam memperkuat pelayanan dasar dan mewujudkan pembangunan manusia yang unggul di Kalimantan Selatan yaitu pengembangan program *New Posyandu yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu* akan difokuskan pada peningkatan kapasitas kader, penyediaan sarana prasarana yang memadai, integrasi layanan dasar, serta pengembangan sistem informasi posyandu berbasis teknologi. Dengan pendekatan ini, *New Posyandu* diharapkan mampu menjadi garda terdepan pelayanan dasar di tingkat komunitas dan mendukung pencapaian target indikator SPM, RPJMD, dan SDGs. *New Posyandu* bukan hanya revitalisasi layanan kesehatan masyarakat, melainkan transformasi Posyandu menjadi pusat layanan terpadu yang menjangkau berbagai aspek kehidupan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan dengan 6 Bidang layanan dasar.

Dalam rangka penyelaras program prioritas nasional ke dalam prioritas daerah, Pemerintah daerah mendukung Koperasi Merah Putih dan Sekolah Rakyat dalam RKPD melalui integrasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pembinaan, sinergi dengan pusat, dan evaluasi kinerja. Ini juga merupakan bentuk komitmen terhadap pengembangan ekonomi lokal berbasis koperasi dan kemandirian masyarakat, serta peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin sebagai upaya mendorong pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Penelaahan Terhadap RKP Tahun 2026

Tahun 2026 merupakan tahun kedua transisi pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 – 2029. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 sebagai tahap kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025 – 2029 memiliki kedudukan strategis sebagai fondasi awal perwujudan fondasi transformasi, yang

meliputi transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi.

Tema RKP Tahun 2026 adalah “**Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**”. Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026 terdiri dari 5 Direktif Presiden dan program-program lain yang konkret, terukur, dan berdampak yang tersebar dalam seluruh Prioritas Nasional sebagai wujud implelementasi Asta Cita.



Gambar 4.2. Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Keterangan: *) Lima Direktif Presiden

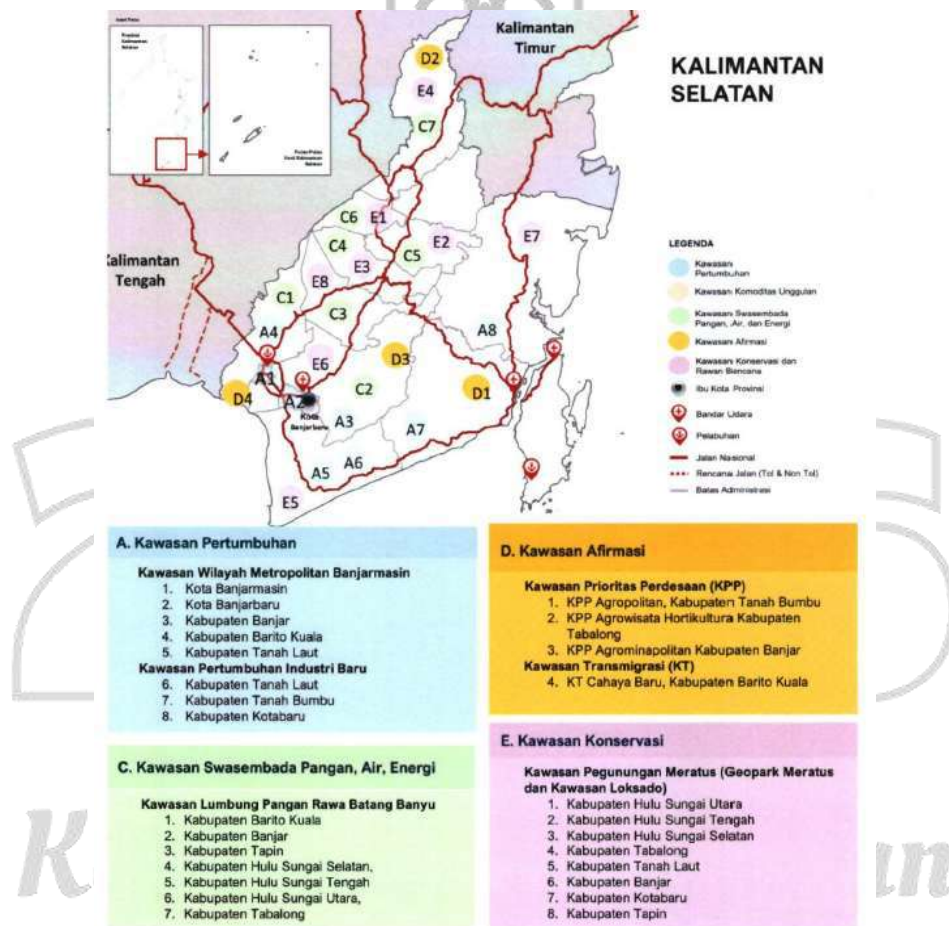
Sumber: Kementerian PPN/Bappenas (diolah), 2025

Setiap wilayah berfokus pada penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah serta pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar sebagai fondasi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah, maka kebijakan pembangunan kewilayahan dan sarana prasarana akan difokuskan pada pengembangan wilayah yang lebih merata dan berkeadilan, termasuk keselarasan pembangunan perkotaan, sebagai pusat aglomerasi kegiatan dan pertumbuhan, serta perdesaan, sebagai lokus pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan. Berdasarkan rincian sasaran pembangunan lima tahunan dalam RPJMN Tahun 2025 – 2029, maka pada RKP Tahun 2026 pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ditargetkan untuk dapat tumbuh sebesar 5,6-6,4%. Berikut rincian target nasional untuk indikator makro Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

	LPE (%)	PDRB per Kapita (Rp juta)	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Gini	Indeks Modal Manusia	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	IKLH Daerah	TPT (%)
2026	5,6 – 6,4	76,1 – 78,4	1,3	2,46 – 3,46	0,284 – 0,294	0,58	73,97 – 76,45	72,51	3,56 – 4,10

Gambar 4.3. Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan pada RKP Tahun 2026

Berdasarkan kebijakan kewilayahan pada RPJMN Tahun 2025 - 2029, tema pembangunan wilayah Pulau Kalimantan adalah “Superhub Ekonomi Nusantara” dengan potensi wilayah Provinsi Kalimantan Selatan diarahkan sebagai gerbang logistik. Adapun intervensi pengembangan kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan sebagai berikut.



(Sumber : Perpres RPJMN Tahun 2025 – 202 dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025)

Gambar 4.4. Intervensi Umum Kewilayahan dan Sarana Prasarana Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

4.1.2 Penelaahan dengan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercantum dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah dan memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok

pembangunan pada pelaksanaan Tahap I RPJPD Tahun 2025 – 2045 dan RPJMN Tahun 2025 – 2029.

Adapun Visi Pembangunan Tahun 2025 – 2029 yaitu :

**“KALSEL BEKERJA,
(Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera)
Menuju Gerbang Logistik Kalimantan”.**

Perwujudan visi tersebut dilaksanakan melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

Misi 1 Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia	:	Pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai-nilai hidup yang luhur, berbudaya, dan berakhlak mulia.
Misi 2 Pembangunan Infrastruktur yang Handal	:	Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta tekoneksi dengan wilayah lain
Misi 3 Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah	:	Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul.
Misi 4 Penguatan Terhadap Perubahan Iklim	:	Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana. Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup.

Misi 5 : Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah.

Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat

Dalam kerangka logis (*logical framework/logframe*) atau *Results-Based Management* (RBM), indikator dampak berada pada level paling atas. Indikator ini selaras dengan indikator tujuan (*goal indicators*) atau indikator makro pembangunan yang berfungsi untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam jangka panjang secara menyeluruh yang tercantum pada Tabel 4.1. Masing-masing indikator kinerja disertai dengan target per tahun yang akan menjadi tolak ukur keberhasilan pembangunan tahunan, dimana dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2026 akan merujuk pada target indikator kinerja Tahun 2026 pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029.

Tabel 4.1 Target Indikator Makro Daerah Tahun 2026

No.	Indikator	Satuan	Target RKPD Provinsi Tahun 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	Persen	5,6 - 6,4
2	PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)	Ribu Rupiah	77.210-81.280
3	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,32
4	Tingkat Kemiskinan (%)	Persen	2,46 - 3,46
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Persen	3,56 - 4,14
6	Rasio Gini	Poin	0,285 - 0,296
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,57
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (tahunan) (%)	Persen	26,86
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	72,51

Hubungan antara misi, tujuan, dan sasaran pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 beserta target capaian pertahun dapat dilihat pada Tabel 4.2. Tujuan dan sasaran daerah dirumuskan berdasarkan misi dan memiliki keterkaitan dengan visi RPJMD. Setiap tujuan dan sasaran RPJMD dinyatakan dengan pernyataan yang jelas dan diukur dengan indikator kinerja.

Tabel 4.2 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029

MISI, TUJUAN, & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
KALSEL BEKERJA (BERKELANJUTAN, BERBUDAYA, RELIGI, DAN SEJAHTERA) MENUJU GERBANG LOGISTIK KALIMANTAN											
BERBUDAYA - RELIGI											
1	MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA										
1.1	Tujuan: Menguatnya Fondasi Tranformasi Sosial	1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,55	0,56	0,57	0,59	0,6	0,61	0,62
		2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,19	75,48	75,99	76,50	77,00	77,51	77,99
		3	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6	6,1	6,2	6,3	6,4	6,5
1.1.1	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,18	74,42	74,66	74,91	75,15	75,39	75,64
		2	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	21,6	19,5	18,88	18,25	17,63	16,83
1.1.2	Sasaran: Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital	1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,71	8,8	8,88	8,97	9,05	9,14
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,33	13,46	13,59	13,72	13,86	13,99
		3	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	44,62	50,12	56,31	63,25	71,06	79,82	89,67
1.1.3	Sasaran: Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	1	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	74,01	74,3	74,7	75,1	75,51	75,91	76,32
		2	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,65	59,81-59,89	60,38-60,5	60,96-61,11	61,53-61,72	62,1-62,33	62,67-62,94
1.1.4	Sasaran: Menurunnya kemiskinan		Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,02	3,44-3,94	3,23 - 3,46	2,91 – 3,41	2,61 – 3,11	2,30-2,64	1,89-2,39
1.1.5	Meningkatnya Kualitas Keluarga		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,9	65,95	69,5	73,5	77	80	82,2
SEJAHTERA											
2	MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL										
2.1	Tujuan: Terwujudnya sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pemerataan pembangunan	1	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,58	0,61	0,63	0,65	0,67	0,69	0,71

MISI, TUJUAN, & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
2.1.1	Sasaran: Meningkatnya Cakupan dan Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	1	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	0,45	0,49	0,51	0,53	0,56	0,58	0,60
		2	Indeks Konektivitas	Indeks	0,85	0,85	0,91	0,98	1,02	1,09	1,13
BERKELANJUTAN - SEJAHTERA - GERBANG LOGISTIK											
3	MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH										
3.1	Tujuan: Menguatnya Fondasi Tranformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3 – 5,4	5,6 - 6,4	5,7 - 7,7	5,8 - 7,8	5,8 - 8,1	6,2 - 8,2
		2	PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	60.210	68.940-72.700	77.210-81.280	85.470-89.860	93.740-98.440	102.000-107.000	110.270-115.580
		3	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	53,01	54,73	56,525	58,32	60,115	61,91	63,35
		4	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	22,67	23,78	24,943	26,105	27,268	28,43	29,35
3.1.1	Sasaran: Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah	1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	10,95	11,68	11,88	12,07	12,27	12,46	12,66
		2	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,16	5,4	5,95	6,5	7,05	7,6	8,15
		3	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,07	8,08	8,09	8,09	8,09	8,1	8,1
		4	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	6,36	6,37	6,37	6,38	6,39	6,39	6,4
		5	Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen	4,35	4,79	5	5,5	6	6,5	7
3.1.2	Sasaran: Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	1	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Juta Rupiah	24,85	25,40	26,40	27,40	28,40	29,40	30,40
		2	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	67,12	77,74	78,4	79,07	79,75	80,3	80,82
3.2	Tujuan: Terwujudnya	1	Indeks Williamson	Indeks	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433	0,433

MISI, TUJUAN, & SASARAN		INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET				
					2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
	Perekonomian daerah yang Merata	2	Rasio gini	Poin	0,298	0,290 – 0,301	0,285 - 0,296	0,280 - 0,291	0,275 - 0,286	0,270 - 0,281	0,262- 0,274
3.2.1	Sasaran: Menurunnya Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14	3,48 - 4,10	3,39 - 4,04	3,29 - 3,97	3,20-3,83
		2	Rasio Kewirausahaan	Persen	2,95	3,02	3,07	3,12	3,16	3,21	3,26
3.2.2	Sasaran: Meningkatnya perekonomian masyarakat desa	1	Indeks Desa	Indeks	77,01	77,5	78,22	78,94	79,65	80	80,5
BERKELANJUTAN											
4	MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM										
4.1	Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,59	72,32	72,51	72,71	72,90	73,10	73,29
		2	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,75**	83,79	82,75	82,07	81,62	81,14	80,49
4.1.1	Sasaran: Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	1	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,08	70,52	72,72	72,92	73,12	73,32	73,52
		2	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,41	70,97	71,27	71,57	71,87	72,17	72,47
		3	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	84,27	80,05	80,1	80,16	80,21	80,27	80,32
		4	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52	70,37	70,44	70,51	70,58	70,65	70,72
		5	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	Persen	26,6	22,95	26,86	33,13	35,5	34,49	40,43
4.1.2	Sasaran : Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih	1	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	11,93	15	16,8	18,6	20,4	24	25,8
4.1.3	Sasaran: Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana	1	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,54	0,56	0,58	0,6	0,62	0,64	0,66
							BERBUDAYA				
5	MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT										

MISI, TUJUAN, & SASARAN		INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET				
				2024	Target 2025	2026	2027	2028	2029	2030
5.1	Tujuan: Menguatnya Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,54	84,68	84,82	84,96	85,1	85,24	85,39
5.1.1	Sasaran: Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	1 Nilai SAKIP	Poin	A (82,04)	82,96	83,88	84,82	85,76	86,72	87,69
		2 Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		3 Indeks Integritas	Indeks	71,53	76,36	77,34	78,32	79,29	80,27	81,05
		4 Indeks Sistem Merit	Indeks	279	325	330	335	340	345	350
		5 Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	3	3,05	3,08	3,1	3,16
5.1.2	Sasaran: Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	1 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital***	Indeks	3,63	3,63	1,64	1,84	2,04	2,24	2,44
		2 Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	N/A	54,05	54,95	55,85	56,75	57,65	58,55
		3 Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,61	4,63	4,65	4,67

Sumber : Ranhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029

Keterangan:

* Indeks Harmoni Indonesia dan Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah merupakan indikator baru, sehingga tahun 2024 belum ada realisasi.

** Indeks Risiko Bencana tahun 2024 menggunakan hasil konversi metode baru

*** Indeks SPBE secara nasional hanya berlaku sampai tahun 2025, selanjutnya diganti dengan Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026.

Provinsi
Kalimantan Selatan

Sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, maka rencana kerja tahunan selama 5 (lima) tahun difokuskan pada tema-tema pembangunan daerah yang secara spesifik dilaksanakan untuk mencapai visi RPJMD. Berikut tema pembangunan daerah tahun 2026 sampai tahun 2030 berdasarkan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029.



(Sumber : Ransir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029)

Gambar 4.2 Tema Pembangunan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan pada tahap I yakni periode tahun 2025-2029 mengusung tema “Penguatan Fondasi Transformasi”, sebagaimana termuat dalam gambar di atas. Setiap tahapan tersebut memberikan gambaran fokus pembangunan daerah secara umum.

Tema pembangunan pada Tahun 2026 yaitu **“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional”**. Pada awal periode RPJMD, pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) antara lain meliputi pendidikan termasuk pendidikan vokasi, dan sistem kesehatan yang inklusif. Pemerintah provinsi mengembangkan model pembelajaran berbasis teknologi, mendorong revitalisasi SMK sesuai kebutuhan pasar, serta memperluas akses pelatihan kerja berbasis wilayah. Layanan kesehatan diperkuat dengan pendekatan promotif dan preventif termasuk GERMAS, serta integrasi program pencegahan stunting, gizi anak, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat. Strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dengan skema berbasis komunitas dan digitalisasi layanan. Selain itu, revitalisasi kelembagaan adat dan pelestarian budaya lokal diperkuat sebagai bagian dari karakter Kalimantan Selatan yang berbudaya dan religius. Tahun ini menjadi titik balik dalam mempersiapkan generasi produktif Kalimantan Selatan yang berdaya saing dan berkarakter religius dan budaya.

Dalam mewujudkan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur, ditetapkan 10 janji, berbagai prioritas dalam mewujudkan visi dan misi untuk menuju Gerbang Logistik Kalimantan. Rangkaian janji, prioritas, dan upaya perwujudan Gerbang Logistik Kalimantan disajikan pada gambar-gambar di bawah. Keseluruhannya merupakan rangkaian kebijakan yang diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan pada Renstra Perangkat Daerah terkait sesuai kewenangannya.



(Sumber : Ransir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029)

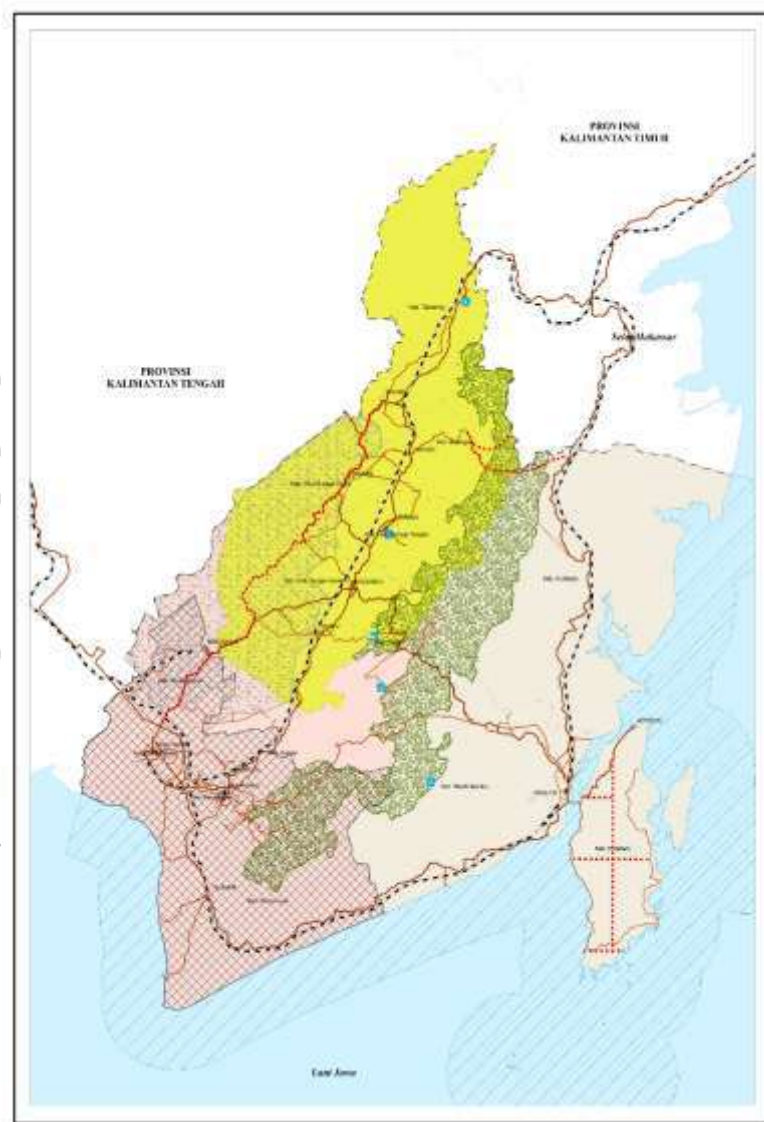
Gambar 4.3 Sepuluh Janji Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2030

Perwujudan peran Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan dalam mendukung Pembangunan Super Hub Ekonomi Nusantara, diselaraskan dengan pentahapan pelaksanaan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 - 2042 yang melingkupi kebijakan pengembangan wilayah, struktur dan pola ruang.

Agar kebijakan pembangunan dengan basis kewilayahan berjalan efektif maka diperlukan kebijakan perencanaan pengembangan wilayah yang memiliki sistem yang saling terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota. Melalui konsep ini, dapat dilakukan pembagian 3 (tiga) klaster pengembangan wilayah. Pembagian klaster tersebut didasarkan pada beberapa hal yaitu adanya aglomerasi pusat-pusat kegiatan, keterkaitan fungsional dan potensi pengembangan wilayah antar kabupaten/kota yang dideliniasi berdasarkan batas administrasi wilayah serta sinkronisasi arah pengembangannya dengan konsep pengembangan kawasan-kawasan strategis di Provinsi Kalimantan Selatan. Pembagian wilayah pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan terintegrasi antar wilayah kabupaten/kota yang disesuaikan dengan sektor-sektor unggulan maupun potensi daerah masing-masing.

Adapun 3 (tiga) klaster wilayah tersebut seperti yang ditampilkan pada di bawah terbagi menjadi:

1. Klaster Banjarbakula dan sekitarnya yang meliputi wilayah administrasi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut.
2. Klaster Banua Anam meliputi wilayah administrasi Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Tapin.
3. Klaster Saijaan – Bersujud meliputi wilayah administrasi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.



Gambar 4.4 Konsep Pembagian Klaster Kewilayahan Kalimantan Selatan dan Pengembangan Kawasan-Kawasan Strategis (Sumber : Analisa Bappeda, 2025)

4.1.3 Penelaahan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim

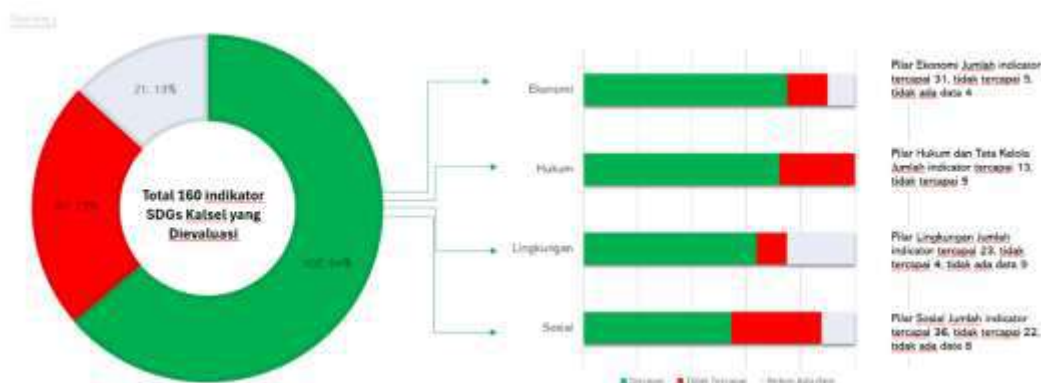
Perencanaan pembangunan Tahun 2026 juga Berpedoman pada Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)”. Sehingga, dalam perumusan prioritas juga telah diselaraskan terhadap dokumen TPB/SDGs melalui pengintegrasian 17 goal SDGs kedalam 5 Prioritas Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025. Selain pengintegrasian 17 Goal SDGs kedalam prioritas daerah, menjadikan isu SDGs/TPB sebagai isu pembangunan Bersama juga menjadi salah satu bentuk tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan yang telah dilakukan. Seperti pada data pada capaian indikator TPB/SDGs pada dokumen RAD Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun 2023 isu yang diangkat untuk menjadi perhatian antarlain pada pilar sosial, ekonomi dan lingkungan seperti yang terjadi pada beberapa tahun kebelakang. Tujuan TPB dengan status capaian tidak tercapai terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan ada pada Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera dengan beberapa indikator yang tidak tercapai antarlain Angka Kematian Balita (AKBa), Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.

Ketidak tercapaian target pada 2 indikator ini lebih disebabkan kepada adanya perbaikan data di tingkat tapak, semakin banyak masyarakat yang tercatat riwayat kesehatannya baik kelahiran maupun kematian, dimana hal ini mengindikasikan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pengobatan di fasilitas kesehatan. Adapun kebijakan yang diambil adalah terus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya fasilitas kesehatan, menyediakan pengobatan berbiaya murah/gratis untuk mengundang masyarakat menggunakan fasilitas kesehatan ketika sakit dengan target kebijakan adalah masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan secara mudah.

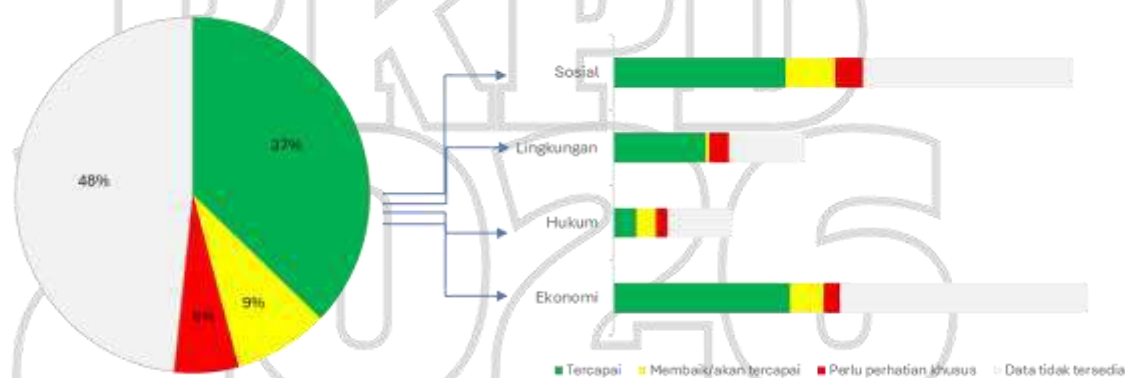
Tujuan TPB/SDGs selanjutnya dengan capaian merah terbanyak yaitu Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan dengan indikator Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya. Untuk memperbaiki hal ini kebijakan yang diambil antara lain Pembangunan TPST untuk Regional Banjarbakula untuk memaksimalkan pemilahan, serta terus melakukan sosialisasi dalam rangka pengurangan sampah pada sumbernya (masyarakat) dengan tujuan dan sasaran akhir adalah sampah yang dibuang Ke TPA sudah berupa residu.

Tujuan TPB/SDGs selanjutnya dengan capaian merah terbanyak yaitu tujuan 8 pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dengan indikator laju pertumbuhan pdb perkapita. penurunan pdb perkapita, ketidaktercapaian indikator ini secara garis besar disebabkan karena Provinsi Kalimantan Selatan yang masih sangat bergantung pada pendapatan daerah sektor primer yaitu sektor pertambangan dan penggalan. Untuk itu kedepannya kebijakan yang akan diambil

antarlain pengembangan sektor pertanian dan perkebunan dalam rangka mengurangi tumpuan ekonomi hanya pada sektor pertambangan dan terakhir adalah pengembangan sektor industri (hilirisasi industri) dengan tujuan utama yaitu secara perlahan shifting ekonomi dari pertambangan ke sektor yang lebih berkelanjutan. Ketiga isu ini selaras dengan isu pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang akan di jawab melalui kebijakan pembangunan daerah ke dalam 5 Prioritas Daerah (PD) Tahun 2026.



Gambar 4.5 Diagram capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023



Gambar 4.6 Diagram capaian TPB/SDGs Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024

Tabel 4.3 Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

Pilar	Tercapai	Membaik/akan tercapai	Perlu perhatian khusus	Data tidak tersedia
Ekonomi	46	9	4	65
Hukum	6	5	3	17
Lingkungan	24	1	5	20
Sosial	45	13	7	55

Sumber: Sekretariat TPB/SDGs Prov Kalsel, 2024

Adapun untuk capaian SDGs Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan, beberapa indikator diambil sebagai contoh untuk mendapat perhatian lebih dari Provinsi Kalimantan Selatan antara lain:

- Indikator Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai standar nasional menurut jenjang pendidikan. Penurunan angka capaian disebabkan kualifikasi rekrutmen guru PPPK

- tidak menyaratkan sertifikasi PPG sehingga berdampak pada rasio guru bersertifikat (kualitas) menurun meski secara kuantitas, jumlah guru bertambah.
- b. Indikator Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya. Pengelolaan persampahan sudah dilaksanakan di seluruh Kab/Kota Provinsi Kalimantan Selatan, saat ini cakupan pelayanan yang masih menjadi pekerjaan rumah, terutama untuk kabupaten yang memiliki geografi wilayah kepulauan masih terdapat kendala untuk pemerataan di pulau-pulau terpencil.
 - c. Indikator Jumlah pelabuhan strategis yang tidak tercapai, dengan penyebab Tidak terdapat pelabuhan strategis kewenangan Dishub Provinsi, namun karena Provinsi Kalimantan Selatan mendapat tema pengembangan wilayah sebagai Gerbang Logistik Kalimantan, dimana salah satu media keluar masuk logistik salah satunya melalui jalur laut, maka isu ini tetap diangkat dan mendapat perhatian khusus, sehingga pemerintah pusat dapat melihat tingkat kepentingan dari permasalahan tersebut. Kalimantan Selatan saat ini sedang mengusulkan pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih, Pulau Laut Kalimantan Selatan.
 - d. Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran HAM perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan, peningkatan angka jumlah penanganan pelanggaran HAM ini seharusnya dapat diapresiasi sebagai bentuk meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya melaporkan kejadian pelanggaran HAM atau kekerasan, meskipun hal tersebut juga menjadi tugas rumah bersama untuk penanganannya.

Tabel 4.4 Persandingan Target dan Capaian Indikator TPB/SDGs Tahun 2024 Provinsi Kalimantan Selatan

INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	Target 2024	Capaian 2024
1.2.2*	Persentase laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan dalam berbagai dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	%	4,4	0
2.a.1*	Indeks orientasi pertanian (IOP) untuk pengeluaran pemerintah.	%	0,8	0,014
4.a.1.(a)	Persentase siswa yang mengalami perundungan dalam 12 bulan terakhir.	Persen	0	0
4.c.1*	Persentase guru yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional menurut jenjang pendidikan	Persen	76,92	52,04

INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	Target 2024	Capaian 2024
5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio	16	0
5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Rasio	6	0
5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat, (b) pemerintah daerah.	%	100	0,1
9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	buah	2	0
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Peneliti	20	16
9.5.2*	Jumlah sumber daya manusia bidang ilmu pengetahuan dan teknologi (peneliti, perekayasa, dan dosen) pada instansi pemerintah dan perguruan tinggi per satu juta penduduk	Peneliti	20	16
10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	%	0	0
11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB	kab/kota	13	9
11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	%	99	77,78
12.6.1*	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya (untuk 9 sektor utama)	Perusahaan	3	0
13.2.2*	Jumlah emisi gas rumah kaca (GRK) per tahun	Gg CO2-eq	82015	52954
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan laut yang berada dalam batasan biologis yang aman.	%	100	0
16.10.1(c)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) perempuan terutama kekerasan terhadap perempuan.	Kasus	15	264

INDIKATOR	SASARAN / INDIKATOR	SATUAN	Target 2024	Capaian 2024
16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun	Rasio	6,25	0
16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Persen	100	5

Dalam rangka mendukung target pengurangan emisi GRK sebagaimana tertuang dalam dokumen NDC, Indonesia telah mengeluarkan rangkaian perangkat hukum dan kebijakan dalam mengetahui capaian pengurangan emisi GRK dari aksi mitigasi di 5 sektor (kehutanan, energi, IPPU, pertanian dan limbah) yang telah dilaporkan oleh kementerian teknis selaku penanggung jawab aksi sesuai tupoksi kementerian/Lembaga kepada KLHK melalui Tim MRV untuk dilakukan verifikasi atas capaian pengurangan emisi GRK. Sejalan dengan itu, ruang lingkup daerah juga memerlukan yang sama dalam rangka mendukung target pengurangan emisi GRK di Kalimantan Selatan.

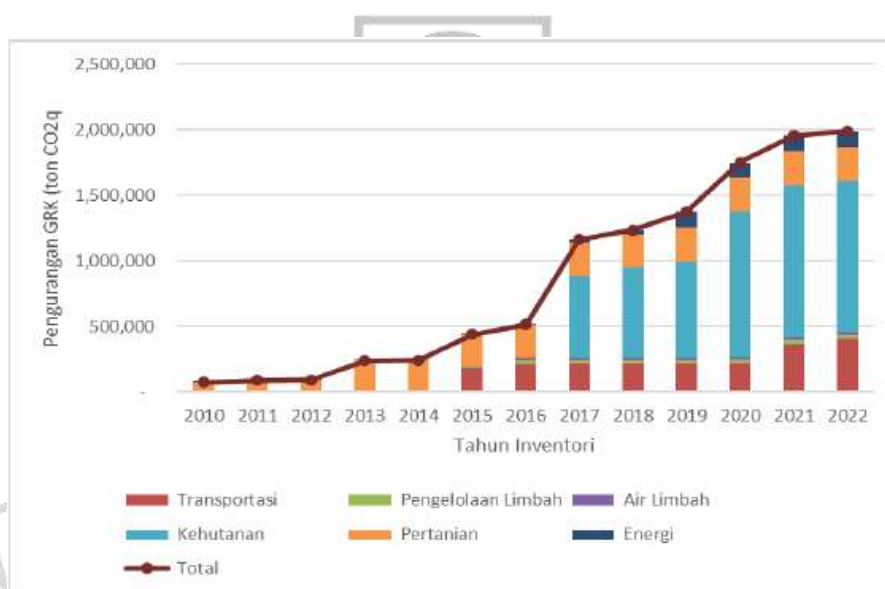
Untuk memperoleh data capaian pengurangan emisi GRK dan/atau peningkatan serapan karbon yang memenuhi prinsip *TACCC* (*Transparent, Accurate, Consistence, Complete, and Comparable*) atau Transparan, Akurat, Konsisten, Komprehensif, dan Komparabel), Kementerian LHK telah menerbitkan Peraturan Menteri LHK Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengukuran, Pelaporan dan Verifikasi Aksi dan Sumberdaya Pengendalian Perubahan Iklim. Pelaksanaan Peraturan Menteri LHK ini sebagai pendukung dalam pencapaian target pengurangan emisi GRK pada NDC.

Secara nasional, target pengurangan emisi pada tahun 2030 berdasarkan NDC adalah sebesar 834 Juta ton CO₂-eq pada target NDC-1 dan sebesar 1.185 Juta ton CO₂-eq pada target NDC-2. Secara Kalimantan Selatan target NDC-1 dan NDC-2 ialah 81.762 dan 67.945 Gg CO₂-eq.

Untuk memenuhi target tersebut, secara daerah Kalimantan Selatan telah dilakukan berbagai aksi mitigasi pada semua sektor oleh penanggung jawab aksi mitigasi. Berdasarkan perhitungan capaian pengurangan emisi GRK (seperti yang telah diverifikasi melalui AKSARA) secara Kalimantan Selatan dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 terjadi pengurangan emisi GRK sebesar 1,99 Juta ton CO₂-eq dan pada tahun sebelumnya 2021 dan 2020 dengan pengurangan emisi GRK sebesar 1,96 dan 1,75 Juta ton CO₂-eq.

Tabel 4.5 Pengurangan Emisi GRK Kalimantan Selatan Terverifikasi Tahun 2020 - 2022

No	Sektor	Capaian Pengurangan emisi GRK (ton CO ₂ e)		
		2020	2021	2022
1	Energi	117,138	117,139	117,143
2	Transportasi	220,258	372,034	405,926
3	Pertanian	260,293	260,334	260,352
4	Kehutanan	1,105,434	1,156,668	1,156,668
5	Pengelolaan Limbah padat	30,080	30,080	30,080
6	Air Limbah	19,202	19,202	19,202
	Total	1,752,405	1,955,456	1,989,370



Gambar 4.7 Capaian pengurangan GRK Kalimantan Selatan Tahun 2010 - 2022

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1 Isu Strategis Pembangunan

Perumusan isu strategis, tujuan dan sasaran dalam penyusunan RKPD Tahun 2026 merupakan pendefinisian terhadap pelaksanaan dan evaluasi tahap akhir RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 – 2026 dan penjabaran terhadap tujuan dan sasaran arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029. Isu strategi pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan untuk penyusunan perencanaan Tahun 2026 diidentifikasi berdasarkan data-data dan pencapaian target pada Tahun 2024 serta isu strategis yang muncul berdasarkan kebijakan nasional.

Merujuk pada hasil tersebut, maka dilakukan inventarisasi permasalahan per urusan sebagai upaya identifikasi kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya. Dari hasil identifikasi tersebut, secara garis besar dapat diangkat beberapa isu-isu strategis daerah. Isu-isu ini

mencerminkan kondisi faktual serta tantangan yang dihadapi dalam berbagai sektor pembangunan. Adapun isu strategis yang menjadi perhatian utama adalah sebagai berikut:

1. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas SDM yang masih rendah menjadi kendala dalam meningkatkan daya saing daerah. Faktor-faktor seperti akses pendidikan, kesehatan, keterampilan tenaga kerja, dan penguasaan teknologi perlu diperkuat untuk menciptakan SDM yang unggul dan kompetitif tanpa mengesampingkan budaya lokal.

2. Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian yang Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan

Ketimpangan pembangunan infrastruktur dasar dan perekonomian masih menjadi tantangan, terutama dalam upaya pemerataan di seluruh wilayah. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pemerataan dan pengembangan ekonomi berbasis kewilayahan dengan melihat kondisi antar wilayah dengan melihat kebutuhan dan potensi antar klaster untuk mendorong pemerataan kesejahteraan masyarakat.

3. Fondasi Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Terbaru yang Masih Belum Kuat

Pemanfaatan SDA terbaru sebagai basis perekonomian daerah masih belum optimal. Diperlukan kebijakan yang mendukung pengelolaan SDA secara berkelanjutan agar dapat menjadi pilar utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

4. Belum Optimalnya Kapasitas Mitigasi, Penanganan Bencana, dan Penanganan Pencemaran Lingkungan

Ancaman bencana alam serta permasalahan lingkungan menjadi isu krusial yang memerlukan peningkatan kapasitas mitigasi, respons cepat dalam penanganan bencana, serta upaya pengendalian pencemaran lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

5. Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan

Kualitas tata kelola pemerintahan yang masih perlu ditingkatkan, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pelayanan publik. Reformasi birokrasi menjadi kunci dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan rangkuman isu-isu strategis daerah tersebut, dapat diterjemahkan beberapa strategi yang menjadi fokus pembangunan. Fokus ini menjadi dasar untuk menentukan arah prioritas pembangunan tahun 2026.

Tabel 4.6 Isu Strategis dan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2026

NO	ISU STRATEGIS RKPD 2026	FOKUS
1	Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	1. Perkuatan akses dan kualitas pendidikan. 2. Perkuatan akses dan kualitas kesehatan. 3. Peningkatan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja. 4. Peningkatan dan penguatan kompetensi SDM dalam penerapan teknologi. 5. Peningkatan akses inklusif.
2	Belum Meratanya Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian yang Berkelanjutan Berbasis Kewilayahan	1. Peningkatan akses infrastruktur dasar berbasis kewilayahan 2. Penyediaan infrastruktur perekonomian secara merata dan integrasinya terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dengan berbasis kewilayahan
3	Fondasi Perekonomian Berbasis Sumber Daya Alam (SDA) Terbarukan yang Masih Belum Kuat	1. Peningkatan produktivitas daerah, dengan mendorong optimalisasi hilirisasi 2. Konsumsi masyarakat masih fokus pada kebutuhan dasar 3. Konsumsi terhadap substitusi impor untuk bahan baku dan bahan penolong masih tinggi 4. Sistem distribusi yang belum menghadirkan efisiensi daerah sebagai akibat dari skala produksi yang belum mencapai skala ekonomi kawasan 5. Penguatan kebijakan dalam pengelolaan SDA terbarukan
4	Belum Optimalnya Kapasitas Mitigasi, Penanganan Bencana, dan Penanganan Pencemaran Lingkungan	1. Penurunan Indeks Kualitas Air 2. Peningkatan luas lahan kritis pada kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan 3. Masih terjadinya banjir serta kebakaran hutan dan lahan di berbagai wilayah Kalimantan Selatan 4. Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) di Kalimantan Selatan cenderung masih tinggi 5. Konsep mitigasi bencana yang belum optimal 6. Peningkatan pelayanan SPM Bencana secara lintas sektor
5	Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan	1. Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Kalimantan Selatan masih rendah 2. Masih belum optimalnya pelayanan masyarakat berbasis elektronik. 3. Masih tingginya persepsi masyarakat terhadap korupsi 4. masih belum optimalnya profesionalisme ASN 5. Masih belum optimalnya penerapan informasi publik (SAKIP)

Sumber : Analisa Bappeda, 2025

4.2.2 Prioritas Pembangunan Nasional dalam RKP Tahun 2026

Adapun persandingan antara fokus Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029 dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 4.7 Persandingan Prioritas Nasional RPJMN 2025 – 2029 dengan Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Prioritas Nasional pada RPJMN 2025 - 2029	Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026
Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	Swasembada Pangan, Energi, dan Air - Optimalisasi Bulog - Pelaksanaan <i>Food Estate</i> - Peningkatan Bauran Ethanol dan Biodiesel - Energi Terbarukan - Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu ke Hilir - Pengelolaan Sampah*
Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	1. Pendidikan dan Kesehatan - Ekosistem Makan Bergizi Gratis - Percepatan Renovasi Sekolah - Sekolah Rakyat* - Sekolah Unggulan - Digitalisasi Pendidikan* - Cek Kesehatan - Percepatan Rumah Sakit Daerah
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	2. Deregulasi dan Kepastian Hukum - Reformasi Birokrasi - Kemudahan Berbisnis - Ketertarikan Investasi
Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	3. Adopsi Teknologi dan Inovasi - Transformasi Digital - Riset dan Inovasi
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	4. Pertahanan Semesta - Komponen Cadangan - Pemenuhan Alutsista - Penguatan Kemampuan Teritorial
Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	5. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi - Percepatan Hilirisasi SDA oleh Entitas Milik Indonesia - Optimalisasi Potensi Danantara
Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	6. Percepatan Pengentasan Kemiskinan* - Data Tunggal Kemiskinan - Digitalisasi Bantuan - 3 Juta Rumah - Koperasi desa/kelurahan merah putih*
Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	7. Fiskal Adaptif, Stabilitas Makroekonomi

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2025

4.2.3 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Saran dan masukan dimaksud diperoleh dari hasil pelaksanaan proses perencanaan yaitu pada tahapan Pembukaan dan Konsultasi Publik Rancangan Awal RKPD, Forum SKPD, Musrenbang Provinsi dan Dialog Interaktif Rancangan Akhir RKPD serta hasil penyerapan aspirasi masyarakat oleh DPRD melalui pelaksanaan Reses. Terdata ada sebanyak 2.084 usulan pokok pikiran DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang disampaikan untuk penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026.

Saran dan masukan DPRD menjadi salah satu pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas dan fokus pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026. Masukan yang telah masuk dalam SIPD-RI Kementerian Dalam Negeri kemudian diseleksi berdasarkan kewenangan provinsi dan kemudian dilakukan pemilahan berdasarkan prioritas. Berdasarkan hasil seleksi dan verifikasi, terdapat 345 usulan yang diterima dan 1.739 usulan yang ditolak dengan hasil telaahan terhadap pokok-pokok pikiran DPRD pada tabel berikut.

Tabel 4.8 Penelaahan Pokok Pikiran DPRD Kalimantan Selatan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
1	Pendidikan dan Kebudayaan	- Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana pendidikan seperti pembangunan ruang kelas, renovasi bangunan sekolah, dan halaman sekolah beserta peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik - Bantuan Beasiswa Pendidikan untuk siswa kurang mampu - Peningkatan dan pengadaan sarana prasarana Cagar Budaya/Makam
2	Kesehatan	- Usulan penyediaan sarpras kesehatan, peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, dan bantuan layanan kesehatan
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	- Pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan dan jembatan serta perbaikan drainase jalan. - Pemenuhan infrastruktur dasar pembangunan sarpras air bersih dan pemasangan pipa PDAM - Normalisasi sungai, rehabilitasi jaringan irigasi, perkuatan tebing/tanggul, pembangunan embung, dan pengaman pantai.
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	- Penanganan rumah tidak layak huni berupa kegiatan rehabilitasi/perbaikan/ bedah rumah tidak layak huni dan korban bencana banjir. - peningkatan kawasan kumuh dan pengembangan permukiman maka usulan berfokus pada perbaikan dan - peningkatan jalan pemukiman
5	Perhubungan	- Penyediaan fasilitas keselamatan jalan dan PJU - Peningkatan pengawasan jalan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
6	Kehutanan	- Pengadaan bibit tanaman - Peninjauan kebijakan dan aturan terkait sektor kehutanan
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	- Penyediaan sarana prasarana kelistrikan
8	Perkebunan dan Peternakan	- Terdapat usulan perbaikan jalan usaha tani, jalan tani poros, dan jalan kebun. Selain itu, terdapat usulan untuk mendukung kegiatan pada sektor peternakan.
9	Pertanian dan Ketahanan Pangan	- Bantuan sarana produksi pertanian (pengadaan benih, bibit, pupuk, dan lainnya) - Pengadaan sarana pertanian lainnya (alat dan mesin pertanian pra panen dan pasca panen) - Pembangunan dan perbaikan jalan usaha tani - Optimalisasi lahan pertanian
10	Kelautan dan Perikanan	- Pemberian insentif usaha perikanan - Penyediaan bibit ikan beserta sarana dan prasarana usaha perikanan
11	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	- Peningkatan pemberdayaan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga dengan melaksanakan pelatihan berupa publik speaking, serta untuk industri rumahan
12	Kepemudaan dan Olahraga	- Pembinaan organisasi kepemudaan - Peningkatan sarana dan prasarana olahraga - Peningkatan fasilitas olahraga
13	Kesatuan Bangsa dan Politik	- Peningkatan Pendidikan politik dan penguatan ideologi kebangsaan
14	Kebencanaan	- Penanganan dan penanggulangan bencana
15	Perdagangan	- Operasi pasar, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting - Penyediaan sarana dan prasarana pusat distribusi regional dan provinsi
16	Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Usulan untuk mendukung usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro dalam segi pendidikan dan pelatihan keterampilan
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Perlu adanya pengadaan alat-alat penunjang pelatihan kepada Masyarakat agar kegiatan diklat dapat berjalan dengan baik, serta pemberdayaan usaha menengah lewat bantuan usaha kecil
18	Lingkungan Hidup	- Pendampingan penanganan sampah - Pengadaan dan penanganan TPA/TPS regional
19	Pariwisata	- Pelatihan dan pendampingan ekonomi kreatif - Pengembangan kemitraan pariwisata dan ekonomi kreatif - Peningkatan SDM Pariwisata dan ekonomi kreatif
20	PMD	- Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk pengadaan sarana dan prasarana dalam kegiatan kemasyarakatan
21	Sosial	- Bantuan peningkatan pelayanan panti - Peningkatan potensi dan sumber kesejahteraan sosial

NO	URUSAN	PERMASALAHAN
22	Satpol PP dan Pemadam Kebakaran	- Usulan berupa bantuan sarana pemadam kebakaran
23	Taman Budaya	- Pelatihan terkait pemasaran dan pembinaan produk UMKM
24	Balai Latihan Kerja	- Pelatihan atau diklat bagi SDM siap kerja
25	Kependudukan dan Catatan Sipil	- Peningkatan pelayanan untuk fasilitasi kependudukan,
26	Perpustakaan dan Kearsipan	- Usulan pengadaan buku pustaka, dukungan dan fasilitasi publikasi karya penulis lokal

4.2.4 Prioritas dan Sasaran RKPD Tahun 2026

Sesuai dengan arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 dan merujuk pada kebijakan nasional dan isu-isu strategis daerah, maka RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 bertemakan :

“Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional”

Tema Pembangunan tahun 2026 memiliki makna penting yang diwakili tiga kata kunci (*key words*), yaitu :

1. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia** : Menunjukkan pentingnya peningkatan daya saing daerah pada beberapa komponen terutama sumber daya manusia (SDM) antara lain pendidikan vokasi, sistem kesehatan yang inklusif, pengembangan model pembelajaran berbasis teknologi dan digitalisasi, mendorong revitalisasi SMK sesuai kebutuhan pasar, serta memperluas akses pelatihan kerja berbasis wilayah dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana serta upaya transformasi digital. Dalam hal ini, fokus peningkatan SDM dilakukan untuk mendukung pengembangan peran Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik guna memperkuat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memastikan kelancaran dan efisiensi distribusi barang/jasa dalam kegiatan logistik.
2. **Pengembangan Sektor Unggulan Daerah** : Merupakan fondasi dalam membangun dasar yang kokoh untuk mengembangkan daya saing daerah, memastikan keberlanjutan ekonomi dengan mendorong potensi dan sektor unggulan daerah, perkuatan kedaulatan dan swasembada pangan dan energi, serta memposisikan wilayah sebagai pusat logistik strategis di Kalimantan, yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang didukung penyediaan infrastruktur konektivitas dan penerapan teknologi digital. dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan mendorong terwujudnya sistem ekonomi yang mengedepankan

keseimbangan antara ekonomi, lingkungan, dan sosial melalui upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tidak merusak lingkungan, menjaga keseimbangan pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam sebagai sektor ekonomi unggulan, serta menjamin kesejahteraan sosial secara berkelanjutan dalam jangka panjang

3. **Pusat Distribusi Regional** : merupakan hub penting dalam mengembangkan Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik regional yang akan menjadi titik penting dalam rantai pasok regional (produksi skala regional), memfasilitasi pergerakan barang secara efisien dan berkelanjutan (distribusi), dan sebagai penyeimbang dalam menjaga stabilitas harga.

Berdasarkan ketiga poin tersebut maka tema Tahun 2026 memiliki makna bahwa pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 bertujuan dalam meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan, kedaulatan dan swasembada pangan dan energi melalui perwujudan peran Kalimantan Selatan dalam sistem logistik regional dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, kesetaraan, keberlanjutan, dan mengutamakan potensi dan sektor unggulan Provinsi Kalimantan Selatan melalui peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur serta fasilitas pendukung.

Berdasarkan tema RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dan rumusan prioritas, maka dapat dijabarkan kebijakan pembangunan daerah ke dalam 5 (lima) Prioritas Daerah (PD) sebagai berikut.

1. PD 1: Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia

- 1) Peningkatan Akses dan Kualitas Pendidikan;
- 2) Peningkatan Akses dan Kualitas Kesehatan;
- 3) Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan;
- 4) Penurunan Prevalensi Stunting;
- 5) Pelestarian Budaya;
- 6) Peningkatan Akses Disabilitas dan Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Sosial.

2. PD 2: Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal

- 1) Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar Berbasis Kewilayahan;
- 2) Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Pendukung Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Kewilayahan;
- 3) Pengembangan Moda Transportasi Massal.

3. PD 3 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah

- 1) Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri;
- 2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri;
- 3) Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan;
- 4) Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing;
- 5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berdaya Saing.

4. PD 4 : Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana

- 1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup;
- 2) Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan.

5. PD 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

- 1) Penguatan Reformasi Birokrasi;
- 2) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik;
- 3) Pengembangan Satu Data Kalsel.

Dalam rangka melaksanakan prioritas di atas, adapun strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2026 yang mengacu pada arah kebijakan pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut.

1. Misi 1 Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia

a. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) , dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat** : kesehatan menjadi pilar penting peningkatan daya saing SDM serta mampu meningkatkan produktivitas, inovasi, dan kemampuan adaptabilitas masyarakat. Layanan kesehatan diperkuat dengan pendekatan promotif dan preventif , integrasi program pencegahan stunting, gizi anak, jaminan kesehatan untuk masyarakat. Strategi pengentasan kemiskinan ekstrem dilaksanakan dengan skema berbasis komunitas dan digitalisasi layanan.
- **Meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk penyiapan tenaga kerja:** Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang didukung perkuatan literasi digital dan penyiapan kualitas lulusan untuk penyerapan dunia kerja.

- **Perkuatan karakter SDM** : Revitalisasi kelembagaan adat dan pelestarian budaya lokal diperkuat sebagai bagian dari karakter Kalimantan Selatan yang berbudaya dan religius.

2. Misi 2 Pembangunan Infrastruktur yang Handal

a. Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar:

- Peningkatan cakupan akses air minum aman, sanitasi aman, penanganan kawasan kumuh, peningkatan akses rumah layak huni, peningkatan infrastruktur atau akses teknologi informasi dan komunikasi (TIK), serta akses kelistrikan melalui sinergi pelaksanaan yang berbasis pembangunan spasial kewilayahan.

b. Peningkatan Konektivitas Wilayah dengan arah kebijakan :

- Peningkatan infrastruktur yang mendukung jalur-jalur logistik dan menghubungkan kawasan industri/pusat pengolahan dengan simpul transportasi dan/atau pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lainnya.
- Mendorong pengembangan konektivitas antar kawasan-kawasan sentra bahan baku dan pendukung produksi lainnya
- Membangun jembatan yang menghubungkan antar pulau di Kalimantan Selatan dan meningkatkan konektivitas antar daerah.
- Memperluas dan meningkatkan kapasitas pelabuhan untuk mendukung kegiatan logistik dan perdagangan internasional.
- Meningkatkan sistem distribusi barang dan jasa antar kawasan seperti terminal barang, sebagai pusat distribusi yang efektif.

c. Perencanaan dan Peningkatan Layanan Transportasi dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- Pengembangan sistem dan moda transportasi terpadu dan terintegrasi dengan didukung sinergi perencanaan dan pelaksanaan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- Peningkatan koordinasi dalam pembangunan sistem logistik yang terintegrasi dengan pusat-pusat transportasi.

3. Misi 3 : Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah

a. Pengembangan dan Peningkatan Sektor Unggulan Daerah didukung Optimalisasi dan Integrasi Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi

- Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru dan ekonomi biru berbasis wilayah.
- Pengembangan hilirisasi industri yang terintegrasi dengan pusat produksi dan pusat distribusi serta terhubung dengan simpul transportasi dan jalur logistik.

- Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, serta menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan dengan didukung penyediaan infrastruktur memadai (aksesibilitas dan irigasi).
- Peningkatan produktivitas dan daya saing produk kelautan dan perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan.
- Pengembangan UNESCO Global Geopark Meratus dengan mening didukung peningkatan amenitas pariwisata, fasilitasi usaha pariwisata rakyat, dan pelatihan pemandu wisata lokatkan akses dan sarpras pada masing-masing situs geosite unggulan.

b. Peningkatan keterampilan dan keahlian tenaga kerja

- Memberikan pelatihan dan pendidikan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian mereka di bidang-bidang seperti teknologi informasi, bahasa asing, dan manajemen
- Penguatan *link and match* antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja terutama yang berkaitan dengan pengembangan hilirisasi industri dan sektor logistik

c. Peningkatan dan Pengembangan Pasar Barang dan Jasa dengan arah kebijakan :

- **Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM:** Memberikan bantuan modal dan pelatihan bagi UMKM untuk meningkatkan kualitas produk dan daya saing mereka di pasar.
- **Membuka akses pasar dan peningkatan promosi bagi produk lokal:** Membantu UMKM untuk memasarkan dan mempromosikan produk lokal di pasar lokal, nasional, dan internasional baik secara konvensional maupun pemasaran digital.

d. Peningkatan Lingkungan Pendukung dengan arah kebijakan sebagai berikut :

- **Meningkatkan ekosistem inovasi :** Mendorong pengembangan kajian dan inovasi untuk menciptakan diversifikasi pengetahuan dan ide inovatif dalam mendorong perkuatan perencanaan, kelembagaan, dan konsep-konsep pembangunan baru
- **Meningkatkan stabilitas ekonomi makro :** Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi, penciptaan nilai tambah produk, dan perkuatan investasi.
- **Memberikan insentif bagi investor:** Memberikan insentif bagi investor yang berinvestasi di kawasan industri dan logistik, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.

4. Misi 4 : Penguatan Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim

- **Meningkatkan pelestarian lingkungan** : Meningkatkan rehabilitasi hutan, lahan, dan ekosistem laut dan pesisir khususnya yang berada pada kondisi kritis, pelestarian *geosites* di kawasan Pegunungan Meratus, perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal, menurunkan pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian kerusakan lingkungan yang memperhatikan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta pengelolaan persampahan secara terpadu.
- **Meningkatkan ketangguhan dan ketahanan bencana** : Meningkatkan mitigasi bencana struktural dan non struktural termasuk adaptasi perubahan iklim secara terpadu didukung dengan sistem pendataan kebencanaan dan penanggulangan baik pada saat pra bencana, saat kejadian bencana, dan pasca bencana.

5. Misi 5 : Tata Kelola Pelayanan Publik yang Mudah dan Cepat

- **Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Regulasi Daerah** : Penataan regulasi dan akuntabilitas kinerja Pemda, meningkatkan keselarasan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, peningkatan upaya pencegahan korupsi, manajemen risiko, serta peningkatan pengawasan dan budaya birokrasi BerAKHLAK.
- **Transformasi Digital dan Inovasi Layanan Pemerintah** : akselerasi transformasi digital melalui upaya pengembangan smart government, PEMDI terpadu, digitalisasi layanan publik, penguatan tata kelola data dan jaringan informasi geospasial untuk mendukung kebijakan Satu Data dan Satu Peta.
- **Peningkatan Kapasitas Daerah dan Pelibatan Masyarakat** : Penguatan kapasitas ASN, pengelolaan aset, kapasitas fiskal, dan pembiayaan inovatif, pelibatan masyarakat sipil, termasuk masyarakat adat, serta peningkatan kualitas dan sarana pelayanan publik.

Berbagai metode dan pendekatan perencanaan dalam pembangunan diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat. Capaian pembangunan harus berkontribusi terhadap indikator makro daerah sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah. Oleh karena itu, pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan harus mampu menjawab berbagai permasalahan yang berkembang dan fokus terhadap sasaran prioritas. Kelima rumusan prioritas pembangunan Kalimantan Selatan kemudian diselaraskan dengan sasaran pembangunan yang kemudian dijabarkan ke dalam program prioritas untuk mencapai target indikator kinerja program daerah pada Tahun 2026 sebagaimana disajikan pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9 Keterkaitan Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah RPJMD Tahun 2025 – 2029 dengan Program Prioritas pada RKPD tahun 2026

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
1	Prioritas Daerah 1 - Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia	MISI 1: PEMBANGUNAN MANUSIA YANG UNGGUL, BERBUDAYA, DAN BERAKHLAK MULIA							
		<u>Tujuan :</u> Menguatnya Fondasi Tranformasi Sosial							
		<u>Sasaran :</u> 1. Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat 2. Meningkatnya Kualitas Pendidikan dan Literasi Digital 3. Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia 4. Menurunnya Kemiskinan 5. Meningkatnya Kualitas Keluarga							
		Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,57					
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,99-76,69					
		Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	6,1					
1.1	Sub Prioritas 1.1. Peningkatan Kualitas Pendidikan								
		Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	Tahun	8,8	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Putus Sekolah jenjang SMA	Persen	0,09	Disdikbud
						Angka Putus Sekolah jenjang SMK	Persen	0,17	Disdikbud
						Angka Putus Sekolah jenjang SLB	Persen	0,49	Disdikbud
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	Tahun	13,46	Program Pengelolaan Pendidikan	Nilai rata-rata Akhir Siswa SMA	Nilai	84,98	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi literasi SMA	Nilai	76,97	Disdikbud

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
									
						Nilai rata-rata kompetensi numerasi SMA	Nilai	65,84	Disdikbud
						Nilai rata-rata Akhir Siswa SMK	Nilai	82,62	Disdikbud
						Nilai rata-rata Uji Kompetensi Keahlian SMK	Nilai	86,90	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi literasi SMK	Nilai	73,96	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi numerasi SMK	Nilai	62,58	Disdikbud
						Nilai rata-rata Akhir Siswa SLB	Nilai	69,80	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi Literasi SDLB	Nilai	72,38	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SDLB	Nilai	74,25	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMPLB	Nilai	78,79	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB	Nilai	75,46	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi Literasi SMALB	Nilai	78,13	Disdikbud
						Nilai rata-rata kompetensi Numerasi SMALB	Nilai	70,16	Disdikbud
						Indeks Iklim Keamanan SMA	Indeks	75,46	Disdikbud
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMA	Indeks	73,99	Disdikbud

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Indeks Iklim Keamanan SMK	Indeks	72,80	Disdikbud
						Indeks Iklim Kebhinekaan SMK	Indeks	70,88	Disdikbud
						Indeks Iklim Keamanan SDLB	Indeks	82,23	Disdikbud
						Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	Indeks	72,37	Disdikbud
						Indeks Iklim Keamanan SMPLB	Indeks	77,43	Disdikbud
						Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	Indeks	75,77	Disdikbud
						Indeks Iklim Keamanan SMALB	Indeks	76,52	Disdikbud
						Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	Indeks	76,83	Disdikbud
						Nilai Rata-rata karakter peserta didik SMA sesuai profil pelajar pancasila	Nilai	59,28	Disdikbud
						Nilai Rata-rata karakter peserta didik SMK sesuai profil pelajar pancasila	Nilai	57,22	Disdikbud
						Nilai rata-rata karakter peserta didik SLB sesuai profil pelajar pancasila	Nilai	63,45	Disdikbud
						Indeks Inklusivitas SMA	Indeks	63,69	Disdikbud
						Indeks Inklusivitas SMK	Indeks	61,55	Disdikbud
						Indeks Inklusivitas SDLB	Indeks	74,95	Disdikbud
						Indeks Inklusivitas SMPLB	Indeks	73,85	Disdikbud
						Indeks Inklusivitas SMALB	Indeks	75,30	Disdikbud

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMA pada kompetisi Nasional	Persen	15,43	Disdikbud
						Persentase medali yang diperoleh peserta didik SMK pada kompetisi Nasional	Persen	35,30	Disdikbud
						Persentase medali yang diperoleh peserta didik SLB pada kompetisi Nasional	Persen	16,40	Disdikbud
						Persentase Satuan Pendidikan SMA terakreditasi minimal B	Persen	78,01	Disdikbud
						Persentase Satuan Pendidikan SMK terakreditasi minimal B	Persen	72,19	Disdikbud
						Persentase Satuan Pendidikan SLB terakreditasi minimal B	Persen	40,20	Disdikbud
						Persentase Guru bersertifikat Pendidik	Persen	62,36	Disdikbud
					Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Indeks Distribusi Guru	Indeks	0,82	Disdikbud

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
		Indeks Masyarakat Digital	Indeks	56,31	Program Pembinaan Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Angka	75,50	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
1.2	Sub Prioritas 1.2 : Peningkatan Kualitas Kesehatan								
		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	74,66	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Persalinan di Fasyankes	Persen	89	Dinas Kesehatan
						Prevalensi underweight (berat badan kurang dan berat badan sangat kurang) pada balita	Persen	18,8	Dinas Kesehatan
						Angka Kematian Neonatal (per 1.000 KH)	Angka	8,4	Dinas Kesehatan
						Angka Kematian Bayi (per 1.000 KH)	Angka	10,4	Dinas Kesehatan
						Kab/Kota yang Melaksanakan Peningkatan Kebugaran terhadap Masyarakat Usia Produktif dan Lansia	Kab/Kota	7	Dinas Kesehatan
						Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	Persen	88	Dinas Kesehatan
						Persentase ODHIV Baru yang Ditemukan yang Mendapatkan Pengobatan ARV	Persen	88,68	Dinas Kesehatan
						Angka keberhasilan pengobatan	Persen	80	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						tuberkulosis (treatment success rate)			
						Kabupaten/Kota Eliminasi Malaria	Kabupaten/ Kota	12	Dinas Kesehatan
						Kabupaten/Kota Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	Kabupaten/ Kota	3	Dinas Kesehatan
						Kabupaten Kota yg Melaksanakan Skrining PTM Prioritas	Kabupaten/kot a	7	Dinas Kesehatan
						Kabupaten/kota yang melakukan deteksi dan respon potensi KLB/wabah serta pengendalian faktor risiko kesehatan yang berpotensi KLB/wabah	Kabupaten/kot a	9	Dinas Kesehatan
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	Dinas Kesehatan
						Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Orang yang terdampak dan Berisiko pada Situasi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persen	100	Dinas Kesehatan
						Persentase Rumah Sakit Pemerintah Terakreditasi	Persen	96	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Persentase FKTP Terakreditasi Paripurna	Persen	46	Dinas Kesehatan
						Persentase Fasyankes yang menyelenggarakan RME dan Terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persen	90	Dinas Kesehatan
						Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi yang terakreditasi Paripurna	Persen	100	Dinas Kesehatan
						Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	per 1.000 penduduk	1,5	Dinas Kesehatan
						Persentase Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu yang Diintegrasikan ke JKN Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	Persen	100	Dinas Kesehatan
						Persentase fasyankes dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar	Persen	70	Dinas Kesehatan
						Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Angka	90	Dinas Kesehatan
						Persentase Pasien Keluar Sembuh/Mandiri	Persen	95	Dinas Kesehatan
						Persentase Faskes yang Memenuhi Sediaan Farmasi sesuai standar	Persen	75	Dinas Kesehatan
						Persentase FKTP yang Mengimplementasikan	Persen	43	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						n Penggunaan Antibiotik Rasional			
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Persentase Fasyankes dengan SDM sesuai Standart	Persen	86,5	Dinas Kesehatan
						Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Persen	100	Dinas Kesehatan
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase Pengelolaan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan sesuai Standar	Persen	78	Dinas Kesehatan
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Kab/Kota yang Melakukan Kampanye Kesehatan (Pembudayaan Germas)	Persen	40	Dinas Kesehatan
1.3	Sub Prioritas 1.3. : Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan								
		Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	74,66	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	Persentase partisipasi masyarakat berusia 10 - 60 tahun yang berolahraga	Persen	0,418	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Pemuda yang Berolahraga	Persen	32,6	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persen	46,67	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/Internasional	Persen	10,76	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.4	Sub Prioritas 1.4. : Penurunan Prevalensi Stunting								
		Prevalensi Stunting	Poin	19,5	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan	Prevalensi underweight (berat badan kurang dan	Persen	18,8	Dinas Kesehatan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Upaya Kesehatan Masyarakat	berat badan sangat kurang) pada balita			
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien Variasi (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen	Persen	6,3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn	90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn	22,9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
1.5	Sub Prioritas 1.5. Pelestarian Budaya								
		Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	60,38-60,5	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase Kelompok Masyarakat yang diberikan Pemahaman terkait Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persen	80	Bakesbangpol
					Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Nilai layanan dasar pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat desa	Nilai	117,66	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
						Nilai aktivitas dan fasilitas masyarakat	Nilai	66,34	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
						Nilai pengelolaan lingkungan	Nilai	46	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa
						Jumlah Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan	Angka	39	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat Dan Desa

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Desa yang Melayani 6 SPM			
						Jumlah Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang Melayani 6 SPM	Angka	39	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
					Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	Persen	0,38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase tradisi budaya yang dilestarikan	Persen	15,89	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase seniman yang mendapatkan anugerah kebudayaan tingkat provinsi	Persen	34,11	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pembinaan Sejarah	Persentase lembaga yang mampu menyelenggarakan kegiatan kebudayaan	Persen	48,06	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Persentase anak usia sekolah yang aktif terlibat dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya	Persen	30,07	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pelestarian Dan	Persentase Cagar Budaya dan Warisan	Persen	22,37	Dinas Pendidikan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Pengelolaan Cagar Budaya	Budaya Tak Benda yang ditetapkan			dan Kebudayaan
1.6	Sub Prioritas 1.6 : Peningkatan Akses Disabilitas dan Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Sosial								
		Persentase Penduduk Miskin	Persen	3,23 - 3,46	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Persentase penerima bantuan sosial bersyarat yang mandiri	Persen	3,25	Dinas Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
						Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
						Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persen	38	Dinas Sosial
					Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	Dinas Sosial
					Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan;	Persen	68,42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan	Persen	28,76	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	59,11	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	74,7	Program Kesejahteraan Rakyat	Tingkat kondusifitas kerukunan umat beragama	Poin	74,7	Biro Kesejahteraan Rakyat
						Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sadakah (ZIS)	Persen	33	Biro Kesejahteraan Rakyat

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Persen	100	Biro Kesejahteraan Rakyat
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	Persen	100	Satpol PP dan Damkar
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase Potensi Konflik Sosial yang Ditangani	Persen	100	Bakesbangpol
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persen	100	Bakesbangpol
					Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	Persen	93	Bakesbangpol
					Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga	Nilai Sub Komponen Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik pada IDI Kalimantan Selatan	Poin	80	Bakesbangpol

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase Pendidikan Politik bagi Masyarakat	Persen	100	Bakesbangpol
		Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	69,5	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	Indeks	72.02	DP3AKB
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Persentase peningkatan keluarga yang memenuhi komponen keluarga sejahtera	Persen	5	DP3AKB
					Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	33	DP3AKB
						Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK) Perempuan	Persen	53,5	DP3AKB
					Program Perlindungan Perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	DP3AKB
						Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	12,34	DP3AKB
					Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	Indeks	60,25	DP3AKB
						Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	Indeks	78,5	DP3AKB

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					 Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Anak memerlukan perlindungan Khusus yang mendapatkan Layanan Komprehensif	Persen	100	DP3AKB
						Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio	4,10	DP3AKB
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Persen	0,94	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Pemuda NEET	Persen	21,82	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial kemasyarakatan	Persen	67,5	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Pemuda yang Aktif dalam Kegiatan Organisasi	Persen	2,44	Dinas Pemuda dan Olahraga
						Persentase Pemuda yang Menduduki Posisi Manajerial	Persen	1,36	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
						Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
						Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan	Persen	100	Dinas Sosial

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Dasarnya di Dalam Panti			
						Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Dalam Panti	Persen	100	Dinas Sosial
PD 2	Prioritas Daerah 2 - Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal	MISI 2: PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR YANG HANDAL Tujuan : Terwujudnya Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk Pemerataan Pembangunan Sasaran: Meningkatnya Cakupan dan Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah							
		Indeks Infrastruktur	Indeks	0,63					
2.1	Sub Prioritas 2.1 : Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar Berbasis Kewilayahan								
		Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	0,51	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Cakupan Pelayanan Air Minum yang layak	Persen	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Rumah Tangga dengan	Persen	51	Dinas Pekerjaan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Akses Air Minum Aman			Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Cakupan Pelayanan Air Limbah yang layak	Persen	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	11,05	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Cakupan Pelayanan Persampahan	Persen	78,4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	78	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Mengakses Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Ketenagalistrikan	Rasio Elektrifikasi	Persen	99,87	Dinas ESDM
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh	Persen	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						 Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni			
						Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Pengembangan Permukiman	Persentase permukiman di kawasan strategis yang sesuai standar	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Kawasan Permukiman	Persentase penurunan luas kawasan kumuh kewenangan provinsi	Persen	42,76	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Persen	49,53	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.2	Sub Prioritas 2.2 : Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Pendukung Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Kewilayahan								
		Indeks Konektivitas	Indeks	0,91	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persen	87	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan	Persen	100	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	Santunan Tanah untuk Pembangunan tepat waktu di Tahun Berjalan			Penataan Ruang
2.3	Sub Prioritas 2.3 : Pengembangan Moda Transportasi Massal								
		Indeks Konektivitas	Indeks	0,91	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Aksesibilitas Jalan	Persen	26,81	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,63	Dinas Perhubungan
					Program Pengelolaan Pelayaran	Rasio Konektivitas Air	Rasio	0,62	Dinas Perhubungan
3	Prioritas Daerah 3 - Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah	MISI 3: PERTUMBUHAN EKONOMI YANG BERKELANJUTAN, MERATA, DAN SYARIAH <u>Tujuan 1:</u> Menguatnya Fondasi Tranformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan <u>Sasaran :</u> 1. Meningkatnya Perekonomian Sektor Unggulan dan Syariah 2. Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik <u>Tujuan 2 :</u> Terwujudnya Perekonomian daerah yang Merata <u>Sasaran :</u> 1. Menurunnya Pengangguran 2. Meningkatnya Perekonomian Masyarakat Desa							

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
		Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,6 - 6,4					
		PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	77.210-81.280					
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	56,525					
		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	24,943					
		Indeks Williamson	Indeks	0,433					
		Rasio gini	Poin	0,285 - 0,296					
		Tujuan : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim Sasaran : Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih							
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,51					
3.1	Sub Prioritas 3.1 : Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri								
		Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	16,8	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase rumah tangga penerima listrik bersumber dari pembangkit EBT	Persen	0,09	Dinas ESDM
					Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Triliun Rupiah	1.60	Dinas Perindustrian
		Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rupiah	26,40	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan	Persen	10	DPMPTSP
3.2	Sub Prioritas 3.2 : Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri								
		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	11,88	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	213.000	Dinas Perindustrian

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta USD	12.170	Dinas Perindustrian
						Persentase Produk yang Dihasilkan melalui Penerapan Technological Readiness Level (TRL) Skala 6	Persen	50	Dinas Perindustrian
						Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Persen	6,49	Dinas Perindustrian
						Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persen	63,00	Dinas Perindustrian
	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	5,95		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	Penurunan Luas Kawasan Kritis Ekosistem Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Ha	12.098,85	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Persentase pemenuhan rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi	Persen	100,00	Dinas Kelautan Dan Perikanan
						Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Ton	221.500	Dinas Kelautan Dan Perikanan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	162.337,59	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	36,10	Dinas Kelautan Dan Perikanan
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase peningkatan dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi	Persen	6	Biro Perekonomian
						Persentase BLUD dengan Nilai IKM sangat Baik	Persen	60	Biro Perekonomian
						Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	Biro Perekonomian
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan	Persen	1,03	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase Peningkatan Produktivitas Hortikultura	Persen	4,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Produktivitas Tanaman Perkebunan per hektar per tahun	Kg/Ha/Tahun	1031,00	Dinas Perkebunan Ternakan
						Persentase peningkatan produksi peternakan	Persen	9,00	Dinas Perkebunan Ternakan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan	Persentase Peningkatan Lumbung Pangan Yang Memenuhi Stok Pangan Minimal	Persen	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan	Persen	276,74	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Koefisien Variasi (CV) Harga Beras di Tingkat Konsumen	Persen	6,3	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Konsumsi Beras Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn	90	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Konsumsi Pangan Lokal Per Kapita Per Tahun	Kg/Kap/Thn	22,9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Penurunan Desa Rawan Pangan	Persen	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Persen	5,81	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan Segar yang Memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	Persen	81	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase peningkatan Luas Tanam Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase Ketersediaan Prasarana Tanaman Pangan dan	Persen	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Hortikultura yang Sesuai untuk Peningkatan Produksi			
						Persentase ketersediaan prasarana perkebunan yang sesuai untuk peningkatan produksi	Persen	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase ketersediaan prasarana peternakan yang sesuai untuk peningkatan produksi	Persen	100	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase infrastruktur irigasi dalam kondisi baik	Persen	39,75	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase Kapasitas Penyediaan Air Baku	Persen	21,26	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pendidikan Dan Pelatihan, Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan	Persentase peningkatan pendapatan masyarakat sekitar hutan	Persen	10	Dinas Kehutanan
					Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular	Persen	95	Dinas Perkebunan dan Peternakan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Masyarakat Veteriner	Persentase Unit Usaha Yang Menghasilkan Produk ASUH (Aman, Sehat, Utuh dan Halal)	Persen	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Luasan pertanaman yang dapat dikendalikan akibat bencana alam	Persen	2,5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase Penanganan Bencana Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	96,5	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	65,25	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Luas Areal Pengendalian Penanggulangan Bencana	Ha	9000	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kelembagaan Penyuluhan Pertanian yang Naik Kelas	Persen	N/A	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase SDM Pertanian yang meningkat kapasitasnya	Persen	1,49	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
						Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian	Persen	26,23	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Persentase Kelembagaan Petani yang Naik Kelas	Persen	3,98	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Teknis Izin Usaha Perkebunan	Persen	100	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Program Pengelolaan Aspek Kegeologian	Jumlah volume air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	m3	733.066.050	Dinas ESDM
						Luas zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah di wilayah sungai lintas kabupaten/kota	Ha	0,014	Dinas ESDM
						Persentase terkelolanya Warisan Geologi	Persen	17,65	Dinas ESDM
3.3	Sub Prioritas 3.3 : Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan								
		Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	6,37	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase Sarana Perdagangan Yang Mendukung Arus Distribusi Barang	Persen	100	Dinas Perdagangan
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persen	0,04	Dinas Perdagangan
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi	Persen	100	Dinas Perdagangan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
		Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	78,4	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi yang terpetakan	Persen	10	DPMPTSP
						Realisasi Total Terhadap Target Investasi	Persen	100	DPMPTSP
					Program Promosi Penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	Persen	7,57	DPMPTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai Ketentuan	Persen	72	DPMPTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha yang terselesaikan	Persen	80	DPMPTSP
						Persentase pelaku usaha yang diawasi sesuai dengan kewenangan Provinsi		0,08	DPMPTSP
					Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor Non Migas (Bea Cukai)	USD	11.586.124.100	Dinas Perdagangan
					Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Persen	81,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Tingkat Aksesibilitas Jalan	Persen	26,81	
					Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rasio Konektivitas Darat	Rasio	0,63	Dinas Perhubungan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
3.4	Sub Prioritas 3.4 : Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing								
		Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,09	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persen	8	Dinas Pariwisata
						Rata-rata Lama Menginap Wisatawan	Hari	1.36	Dinas Pariwisata
					Program Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persen	20	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Persen	14	Dinas Pariwisata
					Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang telah Bersertifikat	Persen	18	Dinas Pariwisata
	Rasio Kewirausahaan		Persen	3,07	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase Rekomendasi Tehnis Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi yang diterbitkan	Persen	25	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase Koperasi yang menindaklanjuti hasil Pengawasan dan Pemeriksaan	Persen	38	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase KSP/USP Koperasi yang Sehat	Persen	56	Dinas Koperasi dan UKM

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Perkoperasian yang bersertifikat	Persen	41,60	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase Koperasi yang Aktif	Persen	45	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Ukm)	Persentase Pertumbuhan Wirausaha	Persen	25	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengembangan UMKM	Persentase UKM Menjalin Kemitraan	Persen	6	Dinas Koperasi dan UKM
3.5	Sub Prioritas 3.5 : Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigan yang Berdaya Saing								
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	3,56 - 4,14	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase lulusan pelatihan vokasi dan produktivitas yang bekerja atau berwirausaha sesuai kompetensi	Persen	60%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	5.96%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah per Tenaga kerja	683828096.84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Penempatan Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah	Persen	43,58	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi			
					Program Hubungan Industrial	Persentase Pekerja yang terlindungi Hak-Hak Pekerja dan dapat melakukan Dialog Sosial dengan perusahaan;	Persen	68.42 % ;	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenaga kerjaan	Persen	28.76%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
						Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	59,11%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
					Program Pengelolaan Pendidikan	Persentase lulusan yang bekerja dan/atau berwirausaha sesuai dengan program keahlian	Persen	66,49	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Masa Tunggu Lulusan SMK (sejak lulus sampai bekerja atau wirausaha)	Bulan	3.42	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
						Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap kompetensi lulusan SMK	Persen	86.71	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
		Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen	5	Program Kesejahteraan Rakyat	Tingkat kondusifitas kerukunan umat beragama	Poin	74,7	Biro Kesra
						Persentase peningkatan pengumpulan zakat, infak, dan sadakah (ZIS)	Persen	33	Biro Kesra
						Persentase kebijakan di bidang bina mental spiritual, kesejahteraan rakyat pelayanan dasar, dan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang ditindaklanjuti	Persen	100	Biro Kesra
					Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk)	Persentase pertumbuhan kewirausahaan	persen	25	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi yang aktif	persen	45	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase barang beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangundangan	Persen	100	Dinas Perdagangan
						Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	100	Dinas Perdagangan
						Persentase komoditi potensial yang sesuai	Persen	100	Dinas Perdagangan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						dengan ketentuan berlaku			
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	Persentase peningkatan dividen BUMD yang disetorkan ke Pemerintah Provinsi	Persen	6	Biro Perekonomian
						Persentase BLUD dengan Nilai IKM sangat Baik	Persen	60	Biro Perekonomian
						Tingkat Inflasi	Persen	2,5 ± 1	Biro Perekonomian
		Indeks Desa	Indeks	78,22	Program Penataan Desa	Nilai kelembagaan dan pelayanan desa	Nilai	32,34	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
						Nilai tata kelola keuangan desa	Nilai	37	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
					Program Peningkatan Kerja Sama Desa	Nilai Kondisi Akses Jalan	Nilai	44,5	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
						Nilai Utililtas Dasar	Nilai	21,5	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
						Persentase Kerjasama di desa	Persen	68	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
					Program Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Produksi Desa	Nilai	27,34	Dinas Pemberdayaa n Masyarakat dan Desa
						Nilai Fasilitas Pendukung Ekonomi	Nilai	85,34	Dinas Pemberdayaa

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
									n Masyarakat dan Desa
4	Prioritas Daerah 4 - Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana	MISI 4: PENGUATAN KETAHANAN TERHADAP PERUBAHAN IKLIM Tujuan: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Daerah terhadap Bencana Sasaran : 1. Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan 2. Meningkatnya Penggunaan Energi Bersih 3. Meningkatnya Kapasitas Daerah Terhadap Bencana							
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	72,51					
		Indeks Risiko Bencana	Indeks	82,75					
4.1	Sub Prioritas 4.1 : Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup								
		Indeks Kualitas Air	Indeks	72,72	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau sungai dengan status memenuhi parameter IKA	Persen	15,63	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	71,27	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase kabupaten/kota dengan nilai ISPU kategori baik	Persen	76,92	Dinas Lingkungan Hidup
		Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	80,1	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase titik pantau Air Laut dengan Kategori Baik	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	70,44	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Ekosistem Gambut	Poin	50,73	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Hutan	Persentase Pelaku usaha yang tertib PUHH	Persen	100	Dinas Kehutanan
						Persentase Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi	Persen	1	Dinas Kehutanan
						Persentase Luas Kawasan Hutan dan lahan yang Dilindungi sesuai dengan kewenangan	Persen	100	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	Persentase luas rehab DAS	Persen	100	Dinas Kehutanan
	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	Persen	26,86		Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Angka Emisi GRK sektor Limbah	Gg CO2-eq	945	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,4124	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Persentase Pelaku Usaha KP Yang Patuh Terhadap Peraturan Perundangan	Persen	100	Dinas Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase Masyarakat Adat Lingkup Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota Yang memahami PPLH	Persen	17,4	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap ketentuan peraturan lingkungan hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Entitas Yang Memahami tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persen	100	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Mineral Dan Batubara	Persentase pemegang IUP yang melaksanakan kewajiban sesuai regulasi	Persen	46,48	Dinas ESDM

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Persentase luas lahan yang direklamasi akibat kegiatan usaha pertambangan	Persen	3,08	Dinas ESDM
					Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan sampah di kalsel	Persen	60	Dinas Lingkungan Hidup
						Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Poin	58	Dinas Lingkungan Hidup
		Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	16,8	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Persentase rumah tangga penerima listrik bersumber dari pembangkit EBT	Persen	0,09	Dinas ESDM
4.2	Sub Prioritas 4.2 : Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan								
		Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,58	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Kawasan	29	BPBD
						Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Persen	100	BPBD
						Persentase Penanganan Pascabencana	Persen	100	BPBD
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase Luas Genangan yang Tertangani	Persen	n/a	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
						Persentase wilayah yang tercakup oleh sistem drainase terencana	Persen	0,06	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Persentase pengendali daya rusak air dalam kondisi baik	Persen	17,04	Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
									Penataan Ruang
					Program Pengembangan Perumahan	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
						Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	100	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Pengelolaan Hutan	Persentase Pelaku usaha yang tertib PUHH	Persen	100	Dinas Kehutanan
						Persentase Luas Hutan dan Lahan yang direhabilitasi	Persen	1	Dinas Kehutanan
						Persentase Luas Kawasan Hutan dan lahan yang Dilindungi sesuai dengan kewenangan	Persen	100	Dinas Kehutanan

Provinsi
Kalimantan Selatan

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
5	Prioritas Daerah 5 - Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	MISI 5: TATA KELOLA PELAYANAN PUBLIK YANG MUDAH & CEPAT Tujuan : Menguatnya Fondasi Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Sasaran : 1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah dan Profesionalitas ASN 2. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital							
		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,82					
5.1	Sub Prioritas 5.1 : Penguatan Reformasi Birokrasi								
		Nilai SAKIP	Poin	83,88	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	Persentase Produk Hukum Daerah Yang Ditetapkan	Persen	100	Biro Hukum
						Persentase Pemenuhan Bantuan Hukum	Persen	100	Biro Hukum
						Indeks Reformasi Hukum	Poin	97,66	Biro Hukum
						Indeks Kualitas Kebijakan	Poin	55	Biro Hukum

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Program Penataan Organisasi	Persentase perangkat daerah yang menerapkan RB dengan baik	Persen	100	Biro Organisasi
						Nilai laporan kinerja pemerintah daerah	Point	12,55	Biro Organisasi
						Persentase perangkat daerah dengan kualifikasi Nilai SAKIP minimal AA	Persen	28,57	Biro Organisasi
						Indeks BERAKHLAK Perangkat Daerah	Indeks	79,5	Biro Organisasi
						Indeks Kelembagaan Provinsi	Indeks	82,3	Biro Organisasi
						Jumlah Unit Pelayanan Publik dengan Pelayanan Publik Prima (Nilai A)	Unit	5	Biro Organisasi
						Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Tata Laksana dengan "Baik"	Persen	82	Biro Organisasi
						Jumlah dokumen proses bisnis pemda	Dokumen	1	Biro Organisasi
						Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Proses Bisnis	Persen	-	Biro Organisasi
		Opini BPK	Predikat	WTP	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	7,50	BPKAD
						Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan	Persen	16,10	BPKAD

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	0,53	BPKAD
						Cash Management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	14,59	BPKAD
						Persentase Belanja Pegawai Diluar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	Persen	26,78	BPKAD
						Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	Persen	48,08	BPKAD
						Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	Persen	80,68	BPKAD
						Persentase Penurunan SILPA	Persen	88,63	BPKAD
						Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	Persen	100	BPKAD
						Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban I	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban II	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban III	Persen	80	Inspektorat

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					 Program Kebijakan Dan Pelayanan	Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irbn I	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irbn II	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irbn III	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD dengan data dukung SPIP lengkap dan valid	Persen	100	Inspektorat
						Persentase SKPD dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal 20	Persen	100	Inspektorat
						Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi pada perangkat daerah	Nilai	3.10	Inspektorat
						Persentase kasus pengawasan dan Pemeriksaan Pengaduan kasus yang ditangani	Persen	100	Inspektorat
						Indeks tata kelola pengadaan barang dan jasa	Nilai	90	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Pengadaan Barang Dan Jasa	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	30	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Indeks Integritas	Indeks	77,34	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Formasi Pengadaan ASN yang terisi	Persen	100	Badan Kepegawaian Daerah
						Persentase Jabatan Manajerial yang terisi	Persen	100	Badan Kepegawaian Daerah
						Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Profesionalitas ASN Kategori Tinggi	Persen	80	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Persentase ketersediaan pedoman teknis pengawasan	Persen	100	Inspektorat
		Indeks Sistem Merit	Indeks	330	Program Kepegawaian Daerah	Persentase Formasi Pengadaan ASN yang ter isi	Persen	100	Badan Kepegawaian Daerah
						Persentase Jabatan Manajerial yang terisi	Persen	100	Badan Kepegawaian Daerah
						Persentase Perangkat Daerah dengan Indeks Profesionalitas ASN Kategori Tinggi	Persen	80	Badan Kepegawaian Daerah
					Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase Pengembangan Kompetensi Teknis yang Tepat Sasaran	Persen	75	BPSDM
						Persentase ASN yang Mengikuti Uji Kompetensi	Persen	80	BPSDM

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Persentase Pemenuhan Unsur Mutu Kelembagaan	Persen	82	BPSDM
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Dasar	Persen	46	BPSDM
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Manajerial	Persen	65	BPSDM
						Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Fungsional	Persen	1,848	BPSDM
		Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban I	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban II	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan AUDIT material internal di wilayah Irban III	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irban I	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal	Persen	80	Inspektorat

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						berulang di wilayah Irban II			
						Persentase SKPD bebas temuan Pemeriksaan internal berulang di wilayah Irban III	Persen	80	Inspektorat
						Persentase SKPD dengan data dukung SPIP lengkap dan valid	Persen	100	Inspektorat
						Persentase SKPD dengan nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal minimal 20	Persen	100	Inspektorat
						Nilai penerapan strategi pencegahan korupsi pada perangkat daerah	Nilai	3.10	Inspektorat
						Persentase kasus pengawasan dan Pemeriksaan Pengaduan kasus yang ditangani	Persen	100	Inspektorat
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persen	80	Bappeda
						Persentase program prioritas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia dengan	Persen	100	Bappeda

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Tingkat ketercapaian minimal 85%			
						Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang perekonomian dan sumber daya alam	Persen	80	Bappeda
						Persentase program prioritas bidang perekonomian dan sumber daya alam dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen	100	Bappeda
						Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah pada bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persen	80	Bappeda
						Persentase program prioritas bidang infrastruktur dan kewilayahan dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen	100	Bappeda
					Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RPJMD dan RKPD	Persen	80	Bappeda
						Rata-rata persentase keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah	Persen	80	Bappeda

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Rata-rata persentase keselarasan Dokumen Perencanaan Kabupaten/Kota dengan Dokumen Perencanaan Provinsi	Persen	80	Bappeda
						Persentase keterisian data sektoral dan spasial provinsi	Persen	85	Bappeda
						Persentase jumlah program prioritas dengan Tingkat ketercapaian minimal 85%	Persen	100	Bappeda
					Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase Inovasi SKPD yang sesuai mekanisme Indeks Inovasi Daerah	Persen	38,54	BRIDA
						Persentase HKI yang difasilitasi	Persen	100	BRIDA
						Persentase tumbuhan yang di eksplorasi dan dikoleksi	Persen	100	BRIDA
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Assets management	Persen	100	BPKAD
						Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	Persen	2,00	BPKAD
					Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	Persen	100	BAPENDA
						Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	Persen	46,27	BAPENDA
						Persentase Peningkatan	Persen	-16.12	BAPENDA

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Pendapatan pada UPPD			
						Revenue Mobilization: Deviasi Realisasi PAD Terhadap Anggaran PAD dalam APBD	Persen	9,80	BAPENDA
						Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Persen	100,00	BAPENDA
5.2	Sub Prioritas 5.2 : Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka Meningkatkan Pelayanan Publik								
		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,64	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	78	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	54,95		Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Mengakses Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	60	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis pembangunan aplikasi	Persen	85	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Publikasi Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) dalam Modul E-Walidata SIPD	Persen	75	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)	Persen	99,37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
						Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	Persen	32,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	Persen	82	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,6	Program Pelayanan Penanaman Modal	Persentase Perizinan yang diterbitkan sesuai Ketentuan	Persen	72	DPMPTSP
					Program Pencatatan Sipil	Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	98,78	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
						Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	Persen	100	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5.3	Sub Prioritas 5.3 : Pengembangan Satu Data Kalsel								
		Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	1,64	Program Pengelolaan	Persentase aplikasi yang memenuhi standar teknis	Persen	85	Dinas Komunikasi

No	Prioritas Daerah / Sub Prioritas RKPD Tahun 2026	Misi/Tujuan/ Sasaran/Indikator	Satuan	Target 2026	Program Prioritas	Indikator Program	Satuan	2026	Perangkat Daerah
					Aplikasi Informatika	pembangunan aplikasi			dan Informatika
					Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei)	Persen	78	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Persentase Peningkatan Masyarakat Yang Mengakses Informasi Publik Pemerintah Daerah	Persen	60	Dinas Komunikasi dan Informatika

RKPD
2026
Provinsi
Kalimantan Selatan

Prioritas pembangunan daerah mengacu pada prioritas RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 – 2029, dengan fokus sebagaimana disusun dan diterjemahkan ke dalam masing-masing sub prioritas daerah (Tabel 4.9) untuk mencapai sasaran dan target pembangunan daerah Tahun 2026. Pelaksanaan pencapaian target prioritas pembangunan daerah terdiri dari program-program prioritas yang diselenggarakan oleh SKPD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi terhadap target pencapaian prioritas pembangunan.

Disamping pelaksanaan program prioritas dan program rutin daerah, perlu upaya yang lebih masif untuk mendorong kinerja pencapaian target dimaksud melalui berbagai strategi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan komprehensif dan dapat dilaksanakan secara kolaboratif untuk memberikan dampak yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan. Upaya tersebut diantaranya dapat didorong melalui berbagai inovasi atau program unggulan pembangunan baik yang bersifat sektoral maupun multisektor yang termuat dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pada Tahun 2026. Penjabaran pelaksanaan inovasi atau program unggulan yang dilaksanakan pada Tahun 2026 termuat dalam Bab VI terkait Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.

Tabel 4.10 Program Unggulan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Program Unggulan dan Deskripsi
1	Dinas Perkebunan dan Peternakan	Nama Program Unggulan : Pengembangan Koorporasi Pekebun Berbasis Kawasan Karet (BANGSIBUN KARET) Deskripsi Program Unggulan : Program unggulan yang bertujuan dalam meningkatkan nilai tambah dan daya saing pengembangan kawasan perkebunan karet berbasis korporasi petani/pekebun yang bertujuan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan Kalsel sebagai penyangga pangan IKN serta peningkatan pendapatan dan kesejahteraan pekebun karet di Kalsel.

No	Perangkat Daerah	Program Unggulan dan Deskripsi
2	Dinas Kehutanan	Nama Program Unggulan : Si HH Ke Hutan (Integrasi Hulu Hilir Kelola Hutan) Deskripsi Program Unggulan : Program ini menjadi model kemitraan yang mempertemukan kelompok tani hutan, perhutanan sosial, dan industri dalam kerja sama penanaman serta pengelolaan hasil hutan rakyat. Dengan pendekatan yang integratif dan inklusif, Si HH Ke Hutan memperkuat Gerakan Revolusi Hijau sebagai gerakan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi, menciptakan nilai tambah dari sumber daya hutan, dan menjadi contoh tata kelola kehutanan yang efisien, berkeadilan, serta dapat direplikasi di wilayah lain.
	RSUD Ulin	Nama Program Unggulan : EPN TERPADU (Edukasi dan Pengasuhan Neonatus Terpadu) Deskripsi Program Unggulan : Sebuah inovasi atau program yang berkaitan dengan edukasi dan pengasuhan bayi baru lahir (neonatus). Bertujuan untuk memberikan edukasi dan pengasuhan yang komprehensif terkait perawatan bayi baru lahir, terutama pada masa-masa kritis setelah persalinan.

4.2.5 Keselarasan Prioritas Pembangunan RKPD 2026 dan RKP 2026

Program Prioritas tersebut juga tidak lepas dari agenda pembangunan dan program pembangunan yang pada Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari 5 Prioritas Daerah. Penjabaran Program prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam mendukung prioritas pembangunan Nasional Tahun 2026. Sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional dan Provinsi Kalsel dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.11 Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026 dengan Indikator Sasaran Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
PN 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia				PD 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	
Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia	1	Indeks Demokrasi Indonesia		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi
	2	Indeks Hak Asasi Manusia		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)
PN 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru				PD 2 : Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan	
				PD 3 : Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan	
				PD 4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana	
				PD 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	
Terjaganya kedaulatan negara dan penguatan stabilitas keamanan nasional sebagai fondasi pelaksanaan pembangunan		Global Cybersecurity Index		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Transformasi Digital

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan yang berkualitas secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Indeks Ketahanan Pangan	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Indeks Ketahanan Pangan
	Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Indeks Ketahanan Energi	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi (%)
	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi (%)
Meningkatnya kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi, dan Air (FEW Nexus)	Indeks Ketahanan Air Nasional	Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Indeks Infrastruktur Dasar
	Kapasitas tampungan air (m3 /kapita)	Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Indeks Infrastruktur Dasar
	Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)	Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Indeks Infrastruktur Dasar
	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Indeks Infrastruktur Dasar
Terwujudnya perekonomian nasional yang progresif, inklusif, dan berkelanjutan	Posisi ekonomi syariah Indonesia di tingkat global (peringkat)	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Persentase Pelaku Usaha yang Bersertifikat Halal (%)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
	Indonesia Blue Economy Index (IBEI)	Menguatnya fondasi tranformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)
	Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global (peringkat)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Terwujudnya Transformasi Ekonomi Hijau	Indeks Ekonomi Hijau	Menguatnya fondasi tranformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Indeks Ekonomi Hijau Daerah
	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) (%)
	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan (%)	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) (%)
	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan) (%)
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Iklim	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
	Indeks Kualitas Udara	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Udara
	Indeks Kualitas Air	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air
	Indeks Kualitas Lahan	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Lahan
	Indeks Kualitas Air Laut	Menurunnya Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan	Indeks Kualitas Air Laut
PN3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta		PD 3 : Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung	

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi				oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan	
Meningkatnya Lapangan Kerja yang Berkualitas		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)		Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
		Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB (%)		Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
		Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (%)		Menurunnya Pengangguran	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)
		Rasio Kewirausahaan (%)		Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Rasio Kewirausahaan (%)
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata		Rasio PDB Pariwisata (%)		Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)
Meningkatnya Proporsi PDB Ekonomi Kreatif		Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)		Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Rasio Kewirausahaan (%)
PN 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenian, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas				PD 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	
Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata		Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
		Harapan lama sekolah (tahun)		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (tahun)
		Rata-rata nilai PISA (a) Membaca		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (tahun)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
	(b) Matematika (c) Sains		
	Rata-rata nilai asesmen tingkat nasional (a) Literasi Membaca (b) Numerasi	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Harapan Lama Sekolah (tahun)
	Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (%)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
	Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
Terwujudnya Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) (Rata-rata kelahiran per wanita usia subur 15–49 tahun)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Prevalensi Stunting
	Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Pembangunan Keluarga

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
	Indeks Perlindungan Anak	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Indeks Pembangunan Pemuda	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender
	Indeks Ketimpangan Gender	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender
	Indeks Pembangunan Gender	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Indeks Ketimpangan Gender
	Mobilitas Penduduk Lanjut Usia (%)	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Mobilitas Penduduk Penyandang Disabilitas (%)	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
Menguatnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Tenaga Kerja	Peringkat Indeks Inovasi Global	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
	Pengeluaran Iptek dan Inovasi (% PDB)c)	Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Transformasi Digital
	Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%)c)	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)
Meningkatnya Prestasi Olahraga Indonesia di Tingkat Dunia dan Budaya Berolahraga di Masyarakat	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Olympic Games	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
	Jumlah Perolehan Medali Emas pada Paralympic Games	Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
		Peringkat pada Asian Games		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		Peringkat pada Asian Para Games		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		Peringkat pada SEA Games		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		Peringkat pada ASEAN Para Games		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang aktif berolahraga		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
PN 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri				PD 3 : Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan	
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas dan Daya Saing Industri Pengolahan		Rasio PDB Industri Pengolahan (%)		Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Terwujudnya Peningkatan Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		Biaya Logistik (% PDB)		Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor (%)
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDB)		Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDB)		Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
PN 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan				PD 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	
				PD 2 : Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan	
Mempercepat pengurangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan		Tingkat kemiskinan (%)		Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
		Tingkat kemiskinan ekstrem (%)		Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
		Proporsi penduduk kelas menengah (%)		Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
		Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)
		Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (%)		Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
Meningkatkan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan		Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)		Meningkatnya Mutu Layanan Sarana dan Prasarana yang Menjangkau Seluruh Wilayah	Indeks Infrastruktur Dasar
Mewujudkan pembangunan kemandirian perdesaan dari bawah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan		Persentase desa mandiri (%)		Meningkatnya taraf kehidupan dan perekonomian masyarakat desa	Indeks Desa
Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi		Proporsi PDRB perkotaan terhadap PDB nasional (%)		Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Persentase Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB (%)
		Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional (%)		Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
PN 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan				PD 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik	
Terwujudnya supremasi hukum yang transparan, adil, dan tidak memihak serta sistem politik yang fungsional		Indeks Pembangunan Hukum		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	Indeks Integritas
		Indeks Persepsi Korupsi		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	Indeks Integritas
		Indeks Materi Hukum		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	Indeks Integritas
		Indeks Integritas Nasional		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	Indeks Integritas
		Indeks Integritas Partai Politik		Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah dan profesionalitas ASN	Indeks Integritas
Terwujudnya birokrasi pemerintahan yang adaptif dan melayani		Indeks Reformasi Birokrasi Nasional		Menguatnya fondasi transformasi tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi
		Indeks Pelayanan Publik		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Pelayanan Publik
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		Meningkatnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis digital	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Terwujudnya masyarakat yang bebas dari penyalahgunaan narkoba		Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika		Meningkatnya Daya Saing Sumber Daya Manusia	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
Terwujudnya tata kelola BUMN yang baik untuk meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Negara sebagai agen pembangunan	Return on Asset (ROA) BUMN (%)	Meningkatnya Perekonomian Daerah yang Berkelanjutan dan Syariah	Return on Aset (ROA) BUMD (%)
Tercapainya peningkatan pendapatan negara yang optimal sesuai potensi perekonomian dengan tetap menjaga iklim investasi, didukung upaya untuk mewujudkan reformasi fiskal secara komprehensif melalui optimalisasi belanja negara, serta perluasan sumber dan pengembangan inovasi pembiayaan	Rasio Pendapatan Negara terhadap PDB (%)	Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)
	Rasio Penerimaan Perpajakan terhadap PDB (%)	Berkembangnya Investasi dan Sistem Logistik	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB (%)
Tercapainya tingkat inflasi yang rendah dan stabil untuk mendukung stabilitas serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan	Tingkat Inflasi (%)	Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin
PN 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur		PD 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya	
		PD 4 : Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana	
Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Terwujudnya Masyarakat yang Berbudaya dan Berakhlak Mulia	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Nasional		Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran/ Kinerja Pembangunan Daerah
Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB (%)		Menurunnya kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin

RKPD
2026
Provinsi
Kalimantan Selatan

Tabel 4.12 Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Nasional pada RKP Tahun 2026

NO.	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	NO.	PRIORITAS DAERAH /PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
1	Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia	• Penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan • Penguatan demokrasi dan tata kelola pemilu • Penguatan budaya hukum dan HAM	1	PD 1 : Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Kesejahteraan Rakyat 3. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 4. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
2	Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	• Swasembada pangan, energi, dan air • Transformasi ekonomi digital, hijau, dan biru • Ekonomi syariah dan pemberdayaan UMKM berbasis syariah	1	PD 2 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal 1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Pengelolaan Ketenagalistrikan
			2	PD 3 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah 1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian 2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 5. Program Perekonomian Dan Pembangunan 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan 7. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat 8. Program Penanganan Kerawanan Pangan 9. Program Pengawasan Keamanan Pangan 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian 11. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 12. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 13. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian 14. Program Penyuluhan Pertanian 15. Program Perizinan Usaha Pertanian
			4	PD 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 4. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 5. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	NO.	PRIORITAS DAERAH /PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
				6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 7. Program Pelayanan Penanaman Modal
3	Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi	• Pembangunan infrastruktur strategis dan konektivitas • Perluasan lapangan kerja berkualitas dan kewirausahaan • Penguatan industri kreatif dan ekonomi lokal	1	PD 3 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah 1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air 2. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 4. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam 5. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi 6. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 7. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian 8. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi 9. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umk) 10. Program Pengembangan UMKM
				PD 2 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur yang Handal 1. Program Penyelenggaraan Jalan 2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 3. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan 4. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) 5. Program Pengelolaan Pelayaran
4	Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas	• Penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem • Peningkatan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan • Penguatan peran perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan prestasi olahraga	1	PD 1 : Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya 1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pengelolaan Pendidikan 3. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan 4. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat 5. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan 6. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman 7. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan 8. Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan 9. Program Pengembangan Kebudayaan 10. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 11. Program Rehabilitasi Sosial 12. Program Pemberdayaan Sosial 13. Program Kesejahteraan Rakyat 14. Program Peningkatan Kualitas Keluarga 15. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 16. Program Perlindungan Perempuan
5	Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi	• Hilirisasi industri SDA	1	PD 3 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah

NO.	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	NO.	PRIORITAS DAERAH /PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
	dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	(pertambangan, pertanian, kelautan) • Pengembangan industri berbasis inovasi dan teknologi • Dukungan kawasan industri dan daya saing manufaktur		1. Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan 2. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri 3. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 4. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri 5. Program Pengendalian Izin Usaha Industri 6. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional 7. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 8. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 9. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 10. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian 11. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
				PD 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik 1. Program Promosi Penanaman Modal 2. Program Pelayanan Penanaman Modal
6	Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	• Penguatan peran desa dalam pembangunan nasional • Pemberdayaan ekonomi masyarakat desa dan pertumbuhan lokal • Pemanfaatan dana desa untuk peningkatan produktivitas	1	PD 1 : Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia 1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial 3. Program Rehabilitasi Sosial 4. Program Pemberdayaan Sosial 5. Program Kesejahteraan Rakyat
				PD 3 : Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan, Merata, dan Syariah 1. Program Penataan Desa 2. Program Peningkatan Kerja Sama Desa 3. Program Administrasi Pemerintahan Desa
7	Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	• Reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis digital • Penegakan hukum, pencegahan korupsi, dan pemberantasan narkoba • Penguatan kelembagaan dan efektivitas pemerintahan	1	PD 5 : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik 1. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik 2. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika 3. Program Fasilitas Dan Koordinasi Hukum 4. Program Penataan Organisasi 5. Program Pengelolaan Keuangan Daerah 6. Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa 7. Program Kepegawaian Daerah 8. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi 9. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia 10. Program Penyelenggaraan Pengawasan 11. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

NO.	PRIORITAS NASIONAL/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL	KEGIATAN PRIORITAS UTAMA	NO.	PRIORITAS DAERAH /PROGRAM PRIORITAS PROVINSI
				12. Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah 13. Program Riset Dan Inovasi Daerah 14. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah 15. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
				PD 1 : Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia 1. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik 2. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan 3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 4. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
8	Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	• Mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana • Pelestarian budaya dan nilai-nilai luhur bangsa • Penguatan toleransi antar umat beragama dan harmoni sosial	1	PD 1 : Memperkuat Pembangunan Manusia yang Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia 1. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat 2. Program Kesejahteraan Rakyat
			2	PD 4 : Memantapkan Pembangunan Rendah Karbon dan Memperkuat Ketahanan Daerah Terhadap Perubahan Iklim dan Bencana 1. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup 2. Program Pengelolaan Hutan 3. Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Program Penanggulangan Bencana 5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase 6. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)

Adapun highlight indikasi intervensi kewilayahan dan sarana prasarana di Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan RKP Tahun 2026 sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 4.13 Highlight Indikasi Intervensi Arah Pembangunan Kewilayahan RKP Tahun 2026 di Provinsi Kalimantan Selatan dan Dukungan Pemerintah Daerah dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
1	Provinsi Kalimantan Selatan	Direktif Presiden: Pemberian Makanan Bergizi bagi Siswa, Santri, Ibu Hamil, Ibu menyusui, dan Balita serta Penguatan Ekosistem Pendukung Pemberian Makan Bergizi untuk mendukung Percepatan Pemenuhan Gizi, dengan <i>output</i>: - Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis. - Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional. - Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). - Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha. - Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor. - Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan.	1. Sertifikasi halal untuk program makan bergizi gratis, dengan dukungan program: • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian 2. Pemenuhan standar sistem tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan sistem informasi pemenuhan gizi nasional, dengan dukungan program: • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 3. Pemenuhan sarana dan prasarana atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan dukungan program: • Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat 4. Pemberdayaan komunitas masyarakat dan pelaku usaha, dengan dukungan program: • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pemberdayaan UMKM • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi 5. Penguatan koordinasi dukungan lintas sektor, dengan dukungan program: • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
			• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat
		Direktif Presiden: Peningkatan akses pendidikan untuk semua jenjang (SD, SMP, dan SMA) bagi anak miskin dan rentan, dengan <i>output</i> pembangunan Sekolah Rakyat yang menyediakan layanan pendidikan berasrama.	6. Meningkatkan pelatihan petugas penjamah makanan, dengan dukungan program: • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pengembangan Kompetensi • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
		Direktif Presiden: Pemanfaatan <i>Platform</i> Digital Pembelajaran dalam Peningkatan Kompetensi dengan <i>output Platform</i> Digital Pendidikan.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Penyediaan sarana dalam mendukung digitalisasi pembelajaran, dengan <i>output</i>: - Satuan PAUD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. - SD yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. - SMP yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. - SMA yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. - SMK yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran. - SLB yang mendapatkan Peralatan Digitalisasi Pembelajaran.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan
		Direktif Presiden:	• Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		Peningkatan ekonomi lokal melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dengan <i>output</i>: - Peningkatan kapasitas usaha koperasi. - Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM koperasi.	- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
		Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Usaha Afirmatif, dengan <i>output</i>: - Pelatihan pertanian bagi Non-Aparatur. - Masyarakat penerima akses kelola Kawasan Hutan. - Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Usaha Perhutanan Sosial. - Peningkatan kemandirian usaha Kelompok Tani Hutan (KTH). - Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih. - Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh Kelautan dan Perikanan. - Kartu Prakerja. - Keluarga Penerima Manfaat kewirausahaan sosial yang mendapatkan pendampingan usaha. - Alat dan mesin pertanian pra panen. - Penguatan kewirausahaan afirmatif ternak ruminasia potong, ternak unggas dan ternak lainnya. - Asuransi peternakan, tanaman pangan, tanaman hortikultura, dan tanaman perkebunan. - Sarana dan alat bantu penangkapan ikan yang tersalurkan. - Sarana budi daya dan benih perikanan yang disalurkan ke masyarakat. - Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan dan pengembangan usahanya. - Pemuda yang Terfasilitasi sebagai Kader Kewirausahaan.	- Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja - Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) - Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pengembangan Kompetensi - Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan - Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		p. Pendanaan untuk usaha mikro yang terfasilitasi pembiayaan UMi (PN). Direktif Presiden: Pengentasan kemiskinan melalui Kartu Kesejahteraan, dengan output: - Bantuan PBI JKN. - Kartu Indonesia Pintar. - Keluarga Yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat. - Keluarga Yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako. - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah. - Bantuan Pangan dalam rangka Pengendalian Kerawanan Pangan. - Penyediaan Elpiji 3 kg yang tepat sasaran bagi Masyarakat, Usaha Mikro, Nelayan, dan Petani Sasaran. - Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik. - Warga masyarakat di lokasi rawan bencana yang difasilitasi kampung siaga bencana. - Desa/Kelurahan di lokasi rawan bencana yang difasilitasi Lumbung Sosial. - Asistensi Rehabilitasi Sosial untuk Lanjut Usia, Penyandang Disabilitas, Korban Bencana dan Kelompok Rentan Lainnya.	- Bantuan PBI JKN (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional) - Program Pemberdayaan Sosial - Kartu Indonesia Pintar - Program Pemberdayaan Sosial - Keluarga yang Mendapat Bantuan Sosial Bersyarat - Keluarga yang Memperoleh Bantuan Sosial Sembako - Program Pemberdayaan Sosial - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah - Bantuan Pangan untuk Pengendalian Kerawanan Pangan - Program Penanganan Kerawanan Pangan - Penyediaan Elpiji 3 Kg Tepat Sasaran - Kebijakan Tarif dan Subsidi Listrik - Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi - Kampung Siaga Bencana - Lumbung Sosial di Lokasi Rawan Bencana - Program Penanganan Bencana - Program Penanggulangan Bencana - Asistensi Rehabilitasi Sosial (Lansia, Disabilitas, Korban Bencana, dll.) - Program Pemberdayaan Sosial
A1 A2 A3	Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin: A1: Kota Banjarmasin	Perencanaan kawasan dan peningkatan layanan perkotaan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang layak huni, inklusif, dan berbudaya, dengan output:	- Program Kawasan Permukiman - Program Pengelolaan Persampahan - Program Pengelolaan Aspek Gegeologian

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
A4 A5	A2: Kota Banjarbaru A3: Kabupaten Banjar A4: Kabupaten Barito Kuala A5: Kabupaten Tanah taut	a. Bantuan peralatan/sarana, penyelidikan geologi tata lingkungan untuk penataan ruang dan infrastruktur. b. Bantuan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) bidang perumahan c. Pembinaan dan pengawasan pengembangan sanitasi. d. Bantuan pembangunan rumah susun hunian ASN/TNI/POLRI. e. Pemugaran permukiman kumuh. f. Peremajaan permukiman kumuh. g. Permukiman kembali permukiman kumuh. h. Bantuan pembangunan rumah swadaya. i. Pengembangan kawasan permukiman sekumpul (lanjutan). j. Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Regional Provinsi Kalimantan Selatan di Kota Banjarbaru. k. Pembangunan TPST di Kota Banjarmasin dan Kabupaten Barito Kuala. l. Pembangunan stasiun peralihan sementara dan prasarana pendukung sampah di Kota Banjarmasin. m. Pembangunan SPA (Stasiun Peralihan Antara) Persampahan di Kabupaten Banjar. n. Perluasan kapasitas IPLT Basirih di Kota Banjarmasin. o. Optimalisasi IPLT di Kabupaten Banjar. p. Peningkatan IPAL di Kabupaten Barito Kuala. q. Pembangunan SPAM Kabupaten/Kota di Kabupaten Barito Kuala. r. Perluasan SPAM Kabupaten/Kota di Kota Banjarbaru. s. Subsidi angkutan umum perkotaan di Kota Banjarmasin.	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi (sebagian relevan)
		Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana untuk mewujudkan perkotaan yang hijau dan tangguh, dengan <i>output</i> : a. Pengendalian banjir di Kota Banjarmasin.	1. Pengendalian banjir di Kota Banjarmasin - Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya - Program Penanggulangan Bencana 2. Pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas

Kode	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPDP Tahun 2026
		b. Pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas. c. Penguatan instrumen peringatan dini bencana.	- Program Penanggulangan Bencana - Program Penanganan Bencana 3. Penguatan instrumen peringatan dini bencana - Program Penanganan Bencana - Program Penanggulangan Bencana
		Peningkatan kapasitas tata kelola perkotaan untuk mencapai transparansi, akuntabilitas, cerdas, dan terpadu melalui pembentukan kelembagaan (atau forum) pengelola Wilayah Metropolitan (WM) Banjarmasin dan penguatan kerja sama multipihak dalam pembiayaan dan pembangunan perkotaan, dengan output: - Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan. - Daerah yang melakukan penilaian indeks maturasi perkotaan lintas K/L secara terpadu di Wilayah Metropolitan. - Daerah yang dikuatkan tata kelola smart city-nya di Wilayah Metropolitan. - Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP perkotaan pada Wilayah Metropolitan. - Pilot project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin.	- Daerah yang diterapkan sebagai pilot kerja sama antar daerah untuk mendukung pusat pertumbuhan di WM Banjarmasin - Pilot project kerja sama daerah dalam mendukung pusat pertumbuhan di Wilayah Metropolitan Banjarmasin - Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah - Program Peningkatan Kerja Sama Desa - Daerah yang melakukan penilaian indeks maturasi perkotaan lintas K/L secara terpadu di WM - Daerah yang dikuatkan tata kelola smart city-nya di WM - Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi - Daerah yang dimediasi dan diadvokasi dalam penerapan PP perkotaan pada WM - Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
A6 A7 A8	Kawasan Pertumbuhan Industri Baru A6: Kabupaten Tanah Laut A7: Kabupaten Tanah Bumbu	Pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor, dengan <i>output</i> : - Pengembangan hilirisasi nikel, dengan output: industri smelter/ pemurnian/ pengolahan nikel beserta turunannya yang termonevitor dan terevaluasi perkembangannya. - Kebijakan penguatan industri logam berbasis pengolahan nikel.	- Hilirisasi nikel, industri smelter, baterai, dan logam - Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) - Program Hubungan Industrial - Perencanaan dan pengembangan jejaring promosi investasi Industri yang terfasilitasi untuk peningkatan investasi dan ekspor

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
	A8: Kawasan Kotabaru	c. Perencanaan dan pengembangan jejaring kerja promosi investasi. d. Industri yang terfasilitasi dalam rangka peningkatan investasi. e. Ekspor sektor industri hilirisasi nikel, industri yang terfasilitasi melalui pendampingan dalam rangka peningkatan investasi dan/atau ekspor. f. Industri baterai nasional yang terfasilitasi dalam rangka penguatan struktur industri dalam negeri. g. Kriteria standar Crude Palm Oil (CPO) untuk peningkatan kualitas bahan baku industri kelapa sawit. h. Peralatan fasilitas laboratorium/workshop/ layanan industri hasil perkebunan, mineral logam, dan maritim. i. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (LS ISPO) Hilir. j. Penguatan standardisasi untuk hilirisasi sawit. k. Pengembangan industri bahan bakar terbarukan generasi kedua (HVO/SAF - Hydrogenated Vegetable Oil/Sustainable Aviation Fuel) berbahan baku technical oil. l. Fasilitasi penyediaan pasokan bioetanol untuk bahan bakar nabati (biofuel). m. Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) dan Penurunan Gas Rumah Kaca (GRK) sektor industri. n. Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma.	• Program Pengembangan Ekspor 3. Hilirisasi sawit dan biofuel (HVO/SAF, bioetanol), LS ISPO, standardisasi • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 4. Peralatan laboratorium/workshop untuk industri perkebunan, logam, maritim • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) 5. STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) Tanaman Kelapa Sawit dan Palma • Program Penyuluhan Pertanian
C1 C2 C3 C4 C5	Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu: C1 : Kabupaten Barito Kuala C2: Kabupaten Banjar	Perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura, perkebunan, dan perikanan yang memperhatikan ketahanan iklim, dengan <i>output</i>: a. Penguatan kapasitas kelembagaan petani. b. Peningkatan adopsi praktik pertanian berkelanjutan. c. Peningkatan adopsi teknologi dan modernisasi pertanian.	• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi • Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera dan Lanjut Usia • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKP Tahun 2026
C6 C7	C3: Kabupaten Tapin C4: Kabupaten Hulu Sungai Selatan C5: Kabupaten Hulu Sungai Tengah C6: Kabupaten Hulu Sungai Utara C7: Kabupaten Tabalong	d. Pengembangan kawasan peternakan terintegrasi hulu hingga hilir mendukung peningkatan produksi dan produktivitas pangan hewani. e. Penguatan kesehatan hewan mendukung produktivitas ternak. f. Peningkatan kualitas input ternak melalui bibit ternak unggul dan pakan ternak. g. Peningkatan ketersediaan pangan. h. Kawasan lumbung pangan perikanan/sentra perikanan dengan komoditas nila dan kepiting. i. Ternak unggas. j. Pendampingan kelompok perhutanan sosial. k. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok masyarakat.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
		Pengembangan pengairan dan irigasi, dengan <i>output</i> : a. Pembangunan Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar (lanjutan penyelesaian). b. Pembangunan Embung Jaro di Kabupaten Tabalong (lanjutan penyelesaian). c. Persiapan pembangunan Intake Barabai Hilir di Kabupaten Hulu Sungai Tengah d. Persiapan pengembangan sarpras pemanfaatan air baku Bendung Batang Alai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. e. Persiapan peningkatan jaringan irigasi permukaan dan rawa di Kabupaten Tapin. f. Persiapan pengembangan jaringan irigasi DI Amandit di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. g. Persiapan pengembangan DIR Seluang, Jelapat, dan Tanipah di Kabupaten Barito Kuala.	- Program Pengelolaan Sumber Daya Air - Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan
D1 D2 D3	Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP): D1: KPP Agropolitan,	Pemenuhan layanan dasar dan infrastruktur perdesaan, dengan <i>output</i> :	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKP Tahun 2026
	Kabupaten Tanah Bumbu D2: KPP Agrowisata Hortikultura, Kabupaten Tabalong D3: KPP Agrominapolitan, Kabupaten Banjar	a. Fasilitasi lembaga posyandu dalam penerapan 6 bidang SPM. b. Sarana puskesmas, pustu dan posyandu (Strengthening of Primary Healthcare in Indonesia - SOPHI). c. Fasilitasi program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) bidang pencegahan berbasis sumber daya pembangunan desa. d. Desa yang mendapatkan fasilitasi konvergensi pencegahan Stunting, revitalisasi posyandu, dan kampanye posyandu aktif. e. Sarana pelayanan dasar desa dan perdesaan yang dibangun/dikembangkan. f. Infrastruktur air minum berbasis masyarakat. g. Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berbasis masyarakat. h. Pengembangan unit pelayanan kesehatan di tingkat desa/kelurahan. i. Peningkatan peran kader kesehatan. j. Pemasangan sambungan baru listrik bagi rumah tangga belum berlistrik yang tidak mampu. k. Desa/kelurahan yang dibangun 4G oleh operator. l. Kabupaten/kota yang difasilitasi menerapkan infrastruktur pasif bersama. m. OM BTS 4G/lastmile. n. Sarana dan prasarana konektivitas transportasi desa dan perdesaan yang dibangun/ dikembangkan. o. Pembangunan penataan TPA dan pembangunan TPST Tabalong.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Minum dan Sanitasi • Program Penataan Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa
		Transformasi ekonomi lokal, ketahanan sosial dan pelestarian lingkungan desa, dengan output:	• Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Lanjutan pembangunan pengendali banjir di Kabupaten Tabalong.	• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi • Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup • Program Administrasi Pemerintahan Desa
D4	Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala D4: KT Cahaya Baru, Kabupaten Barito Kuala	Pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala, dengan <i>output</i> : - Pembangunan sarana permukiman di kawasan transmigrasi. - Pengembangan jalan dan sistem drainase di kawasan transmigrasi.	• Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi • Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi • Program Kawasan Permukiman • Program Pengembangan Permukiman • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8	Kawasan Pcgunungan Meratus (Geopark Maratus den Kawasan Loksado): E1: Kabupaten Hulu Sungai Utara E2: Kabupaten Hulu Sungai Tengah E3: Kabupaten Hulu Sungai Selatan E4: Kabupaten Tabalong E5: Kabupaten Tanah Laut E6: Kabupaten Banjar E7: Kabupaten Kotabaru E8: Kabupaten Tapin	Pengembangan ekowisata kelas dunia di <i>Geopark Geosite Meratus</i> dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra dan tenaga kerja lokal melalui pengembangan destinasi wisata potensial, dengan <i>output</i> : - Pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado. - Optimalisasi pengelolaan lembaga konservasi. - Penguatan data dan informasi keanekaragaman hayati, pembinaan, dan pemberdayaan kelompok masyarakat. - Penguatan perencanaan Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). - Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). - Inventarisasi dan verifikasi usaha dan/atau kegiatan terbangun di Kawasan Suaka Alam (KSA), Kawasan Pelestarian Alam (KPA), dan Taman Buru (TB). - Program desa mandiri peduli gambut.	• Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Program gambut lestari.	
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kualitas infrastruktur konektivitas darat, laut, dan udara yang mendukung pertumbuhan ekonomi strategis, dengan output: - Pembangunan jembatan Laut-Pulau Kalimantan - Pembangunan Jalan Banjarbaru – Batulicin (jalan alih trase). - Pembangunan jalan akses Pelabuhan Mekar Putih di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. - Preservasi jalan nasional. - Preservasi pemeliharaan rutin jalan ruas Walangsi–Kaparkias dan Pagatan– Batulicin. - Preservasi jalan MA. Muning - Balimau – Kandangan. - Pengembangan Pelabuhan Mekar Putih di Pulau Laut, Kabupaten Kotabaru. - Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan.	• Program Penyelenggaraan Jalan • Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan • Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil • Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan infrastruktur ketenagalistrikan untuk mendukung pertumbuhan wilayah dan pemerataan pembangunan, dengan output: - Pembangunan infrastruktur gardu induk. - Pembangunan infrastruktur Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan perluasan cakupan layanan ketenagalistrikan.	• Program Pengelolaan Ketenagalistrikan • Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan (EBT)
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan pencegahan dan percepatan penurunan Stunting serta pengendalian penyakit dan pembudayaan hidup sehat, dengan output: - Ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang mendapat makanan tambahan dari buffer-stock. - Koordinasi dan advokasi terkait perbaikan gizi dan peningkatan pelayanan kesehatan bayi dan balita.	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Pemberian obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC). - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC). - Menyediakan bahan dan alat pencegahan dan pengendalian TBC (TPT). - Menanggulangi TB di tempat kerja. - Mendampingi lembaga dalam uji klinis vaksin TBC. - Melakukan penemuan aktif dan skrining mobile. - Mendorong pelaporan kasus TB oleh fasyankes swasta. - Melatih tenaga kesehatan dalam penemuan dan penanggulangan penyakit TBC. - Menyediakan obat dan perbekalan kesehatan program pencegahan dan pengendalian TBC bagi masyarakat. - Pendampingan, supervisi dan monitoring evaluasi program pencegahan dan pengendalian penyakit tropis. - Assessment eliminasi penyakit tropis (kusta). - Layanan pengendalian faktor risiko penyakit malaria. - Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) pencegahan dan pengendalian penyakit HIV/AIDS.	
	Provinsi Kalimantan Selatan	Penguatan kapasitas sistem pelayanan kesehatan (pemenuhan sarana prasarana dan alat, tenaga medis dan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan), dengan output: - Dukungan peningkatan pemenuhan standar sarana prasarana dan alat kesehatan untuk Rumah Sakit Umum Daerah Ulin dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Moch. Ansari Saleh di Kota Banjarmasin. - Pengembangan layanan unggulan KJSU KIA minimal di 1 RSUD.	• Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Pembinaan mutu rumah sakit untuk mencapai akreditasi paripurna. - Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke dan sistem rujukan berbasis kompetensi di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. - Meningkatkan kapasitas RS setara tipe C di kab/kota yang hanya memiliki RS tipe D. - Memberikan pembinaan kualitas mutu pelayanan. - Memberikan bantuan operasional RS Kapal. - Memberikan pembinaan BLU RS Pemerintah yang mandiri. - Menyediakan BMHP untuk Skrining Kesehatan. - Melakukan pemeriksaan dan tes konfirmasi sampel skrining bayi baru lahir. - Melakukan tes konfirmasi sampel skrining kanker leher rahim dengan HPV DNA. - Melakukan sosialisasi program pemeriksaan kesehatan gratis. - Peningkatan integrasi sistem data untuk pencatatan dan pelaporan program pemeriksaan kesehatan gratis. - Melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk menunjang pemeriksaan kesehatan gratis. - Membina puskesmas penyelenggara pemeriksaan kesehatan gratis. - Melakukan pengendalian pelaksanaan melalui pemantauan dan evaluasi terpadu pemeriksaan kesehatan gratis.	
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi lokal untuk mendukung produktivitas tenaga kerja, dengan <i>output</i> :	• Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Penerapan sistem pembelajaran SMK berbasis industri. - Peningkatan kapasitas dan pemerataan pendidik SMK. - Sertifikasi kompetensi siswa SMK/MAK.	• Program Hubungan Industrial
	Provinsi Kalimantan Selatan	Pengentasan kemiskinan, integrasi bantuan sosial, jaminan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat yang adaptif dengan perwujudan satu sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional, dengan output: - Sistem dan teknologi informasi kesejahteraan sosial. - Data terpadu kesejahteraan sosial. - Data dan informasi ketersediaan pangan. - Data dan informasi pendidikan dan kebudayaan. - Pengendalian Pengawasan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik Induk (PSRE). - Pengelolaan layanan pusat kesejahteraan sosial. - Koordinasi pelaksanaan optimalisasi jaminan sosial kesehatan pusat dan daerah. - Korban bencana sosial dan non alam yang mendapat bantuan. - Penguatan akses permodalan melalui kartu usaha bagi usaha mikro dan pekerja informal - Pengembangan program pelatihan vokasi yang relevan dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).	• Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM) • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan • Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pengembangan Kompetensi
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kualitas pemuda, serta penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan terhadap hak penyandang disabilitas dan lanjut usia, dengan output: - Talenta sentra keolahragaan yang memperoleh fasilitas pembinaan dan pengembangan.	• Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi • Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) • Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin • Program Pembinaan Sejarah dan Budaya

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Peningkatan kualitas pemuda dalam pendidikan, kesehatan, karakter, dan pencegahan perilaku berisiko. - Peningkatan partisipasi ketenagakerjaan layak pemuda. - Peningkatan kewirausahaan pemuda. - Peningkatan partisipasi aktif dan kepemimpinan pemuda di bidang sosial dan politik.	
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan dari kekerasan, dengan output: - Penguatan tata kelola dan pelembagaan PUG dalam proses pembangunan.	• Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan • Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak • Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Perempuan dan Pemuda
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana, dengan output: - Penguatan instrumen peringatan dini bencana. - Penyediaan infrastruktur pencarian dan pertolongan. - Penyediaan Peta Dasar Skala Besar 1:5.000 Wilayah Darat.	• Program Penanggulangan Bencana • Program Penanganan Bencana • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana
	Provinsi Kalimantan Selatan	Konservasi sumber daya air, dengan output: - Pemulihan lahan yang sudah menurun fungsinya sebagai pengatur tata air dan penyelamatan mata air yang berperan krusial. - Data dan informasi kualitas air di sungai dan danau.	• Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) • Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) • Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
	Provinsi Kalimantan Selatan	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah yang Berkualitas, dengan output: - Merevitalisasi bangunan Satuan PAUD yang sudah mengalami kerusakan. - Membangun unit sekolah baru satuan PAUD. - Merevitalisasi bangunan SD yang sudah mengalami kerusakan. - Membangun unit sekolah baru SD.	• Program Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah • Program Pengembangan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal • Program Penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Merevitalisasi bangunan SMP yang sudah mengalami kerusakan. - Membangun unit sekolah baru SMP. - Merevitalisasi bangunan SMA yang sudah mengalami kerusakan. - Membangun unit sekolah baru SMA. - Menyediakan sarana Madrasah untuk menunjang pembelajaran.	
	Provinsi Kalimantan Selatan	Pelaksanaan Reforma Agraria, dengan output: - Pemberian Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria. - Fasilitasi pemberian bantuan pemberdayaan tanah masyarakat penerima Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria.	• Program redistribusi Tanah dan ganti kerugian tanah
	Provinsi Kalimantan Selatan	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi serta penguatan ekonomi syariah, dengan output: - Penguatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi, terutama koperasi sektor produksi. - Peningkatan kapasitas usaha dan akses sumber daya produktif. - Pengembangan kewirausahaan. - Pengembangan industri dan UMKM halal. - Peningkatan ekspor halal dan kerjasama ekonomi syariah internasional. - Penguatan ekosistem halal. - Penguatan keuangan syariah. - Penguatan dana sosial syariah.	• Program pengembangan UMKM • Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi • Program pendidikan dan pelatihan perkoperasian • Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi
		Transformasi Penyelenggaraan Jaminan Produk, dengan output: - Sertifikasi dengan pemeriksaan dan/atau pengujian. - Sertifikasi halal dengan pernyataan halal pelaku usaha.	• Program pengembangan UMKM • Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi • Program standardisasi dan penilaian kesesuaian

Kode	Lokasi Prioritas	<i>Highlight</i> Indikasi Intervensi pada RKP Tahun 2026	Dukungan Pemerintah Daerah Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada RKPD Tahun 2026
		- Penguatan literasi produk halal pada lembaga dan SDM jaminan produk halal, serta pelaku UMKM. - Pengawasan jaminan produk halal kepada lembaga dan SDM halal. - Akreditasi lembaga halal. - MoU kemitraan jaminan produk halal.	

Sumber: Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 Tahun 2025

RKPD 2026

Provinsi Kalimantan Selatan

4.3 TAHAPAN PROSES PERENCANAAN

Proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan dengan memperhatikan berbagai pendekatan perencanaan pembangunan. Hal tersebut tertuang dalam agenda kerja yang rinci dalam tiap tahapannya sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang RKPD.

4.3.1 Orientasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

Kegiatan Orientasi Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024. Kegiatan dihadiri oleh berbagai stakeholder di Kalimantan Selatan.

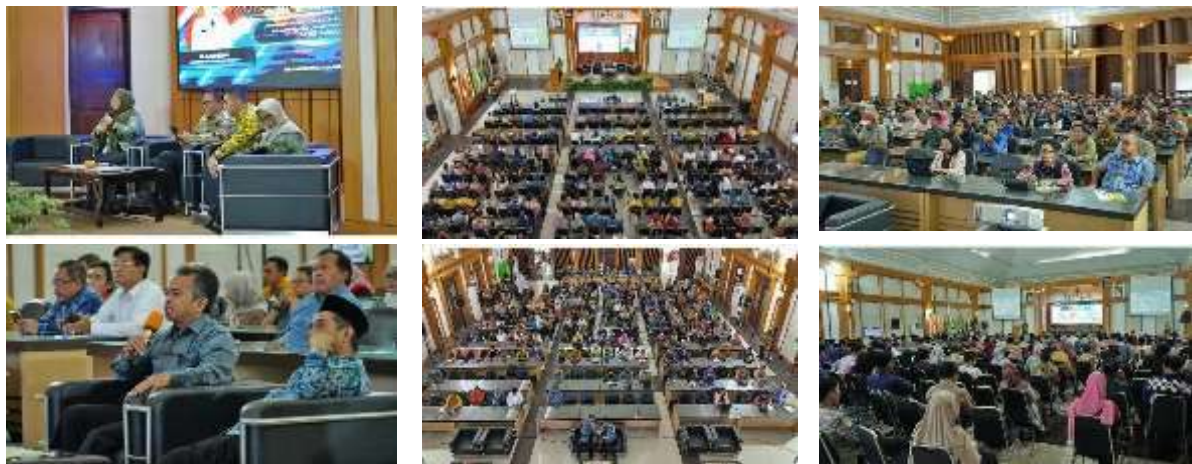


Gambar 4.8 Dokumentasi Orientasi RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

4.3.2 Forum Konsultasi Publik

Kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) RKPD Tahun 2026 dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 bertempat di Aula Lantai 3 Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan. Kegiatan ini melibatkan dialog antar berbagai pemangku kepentingan beserta perwakilan masyarakat dan bertujuan untuk mendapatkan masukan beserta saran dalam penyusunan prioritas pembangunan daerah dalam perencanaan dokumen RKPD Tahun 2026 yang selaras

dengan kebutuhan masyarakat. Adapun kesepakatan dalam FKP RKPD Tahun 2026 dituangkan ke dalam berita acara dan ditandatangani oleh perwakilan dari lembaga/instansi pemerintah dan masyarakat.



Gambar 4.9 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan FKP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

4.3.3 Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Selatan

Pelaksanaan Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 dilaksanakan pada Tanggal 20 Februari 2025 – 19 Maret 2025 bertempat di Kantor Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan dan secara daring. Dalam kegiatan ini dilakukan sinkronisasi usulan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan Tahun 2026 antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kota/Kabupaten Se-Kalimantan Selatan.



Gambar 4.10 Dokumentasi Rakortekrenbang Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

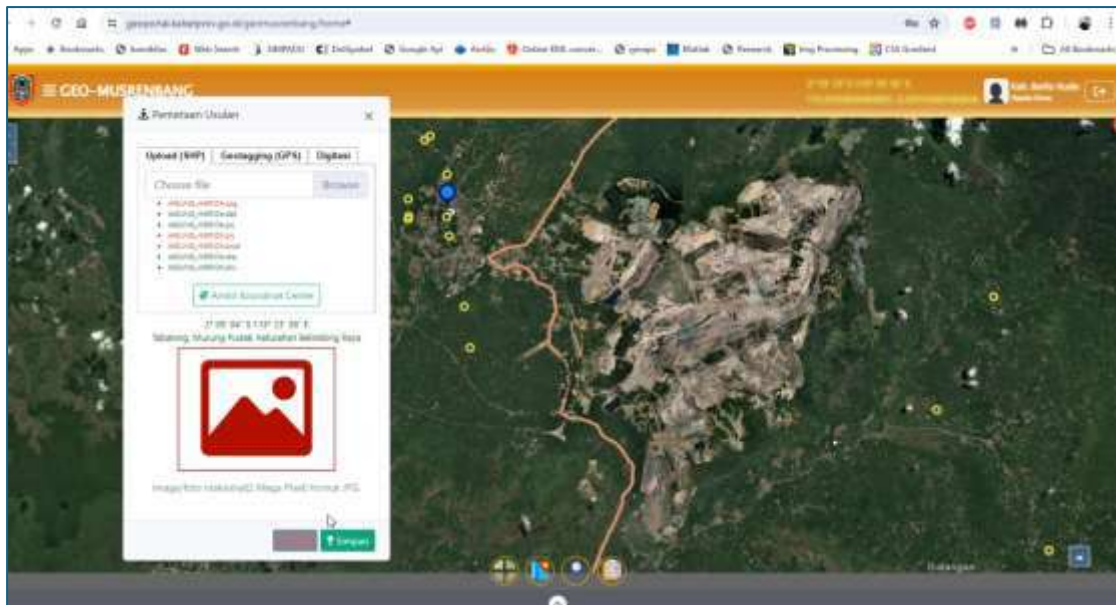


Gambar 4.11 Dokumentasi Desk Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025

Proses sinkronisasi perencanaan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota sudah menerapkan sistem perencanaan berbasis spasial menggunakan Geo-Musrenbang yang terintegrasi dengan Geoportal Provinsi Kalimantan Selatan. Sistem ini memudahkan identifikasi terhadap lokasi pengusulan dan analisa prioritas penanganan berbasis spasial.

Usulan	Filter Dengan	Nilai	Simpan
RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Perumahan	Kec. Alalak	PERUBAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Dangkalnya daerah irigasi	Kec. Carbon	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
DINAS PERUSAHAAN, OLAKHRAGA, REKREASI DAN BUDAYA	kurang berkembangnya kawasan wisata dibawah jembatan baru	Kec. Alalak / Kec. Arja Mustika	DINAS PARAWISATA

Gambar 4.12 Tampilan Geo-Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan



Gambar 4.13 Tampilan Pemetaan Usulan pada Geo-Musrenbang Provinsi Kalimantan Selatan

4.3.4 Musrenbang RKPD Tahun 2025

Kegiatan Musrenbang RKPD Tahun 2025 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dilaksanakan pada tanggal 24 April 2025. Kegiatan dihadiri oleh berbagai stakeholder di Kalimantan Selatan serta Perwakilan Pemerintah yang terdiri dari Kementerian PPN/Bappenas RI, Kementerian Dalam Negeri RI, serta kementerian yang terkait dengan prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan Tahun 2026.



Gambar 4.14 Dokumentasi Musrenbang RKPD Tahun 2025 untuk Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

4.3.5 Forum Lintas Perangkat Daerah

Kegiatan Forum Lintas Perangkat Daerah tahun 2026 dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan untuk mensinkronkan program/kegiatan/sub kegiatan prioritas dalam perencanaan pembangunan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.15 Dokumentasi pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah

4.3.6 Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD

Pelaksanaan Pasca Musrenbang dilaksanakan dengan tujuan untuk finalisasi usulan program/kegiatan/sub kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD Kalimantan Selatan Tahun 2026. Pelaksanaan pasca musrenbang dihadiri oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.



Gambar 4.16 Dokumentasi Pasca Musrenbang Penyusunan RKPD

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang berbasis sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, merupakan pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. Arah kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan provinsi dengan kabupaten/kota di Tahun 2026. Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota berdasarkan pada arah kebijakan pembangunan daerah Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 yang tercantum dalam Bab IV.

5.1 Indikator Makro Kabupaten/ Kota

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota pada dasarnya merupakan fokus kebijakan pembangunan yang memberi panduan bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencapaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Dalam kerangka rencana pembangunan tahunan, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada pencapaian target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2026. Indikator makro pembangunan terdiri atas Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Persentase Penduduk Miskin, Indeks Gini dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Arah kebijakan pembangunan seluruh kabupaten dan kota di Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat mendukung pencapaian 6 (enam) indikator kinerja makro Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur kemajuan atau keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia di suatu daerah. Capaian IPM yang digunakan dalam Analisa ini merupakan data dari hasil long form sensus penduduk tahun 2020 yang berimplikasi pada peningkatan nilai IPM di provinsi Kalimantan

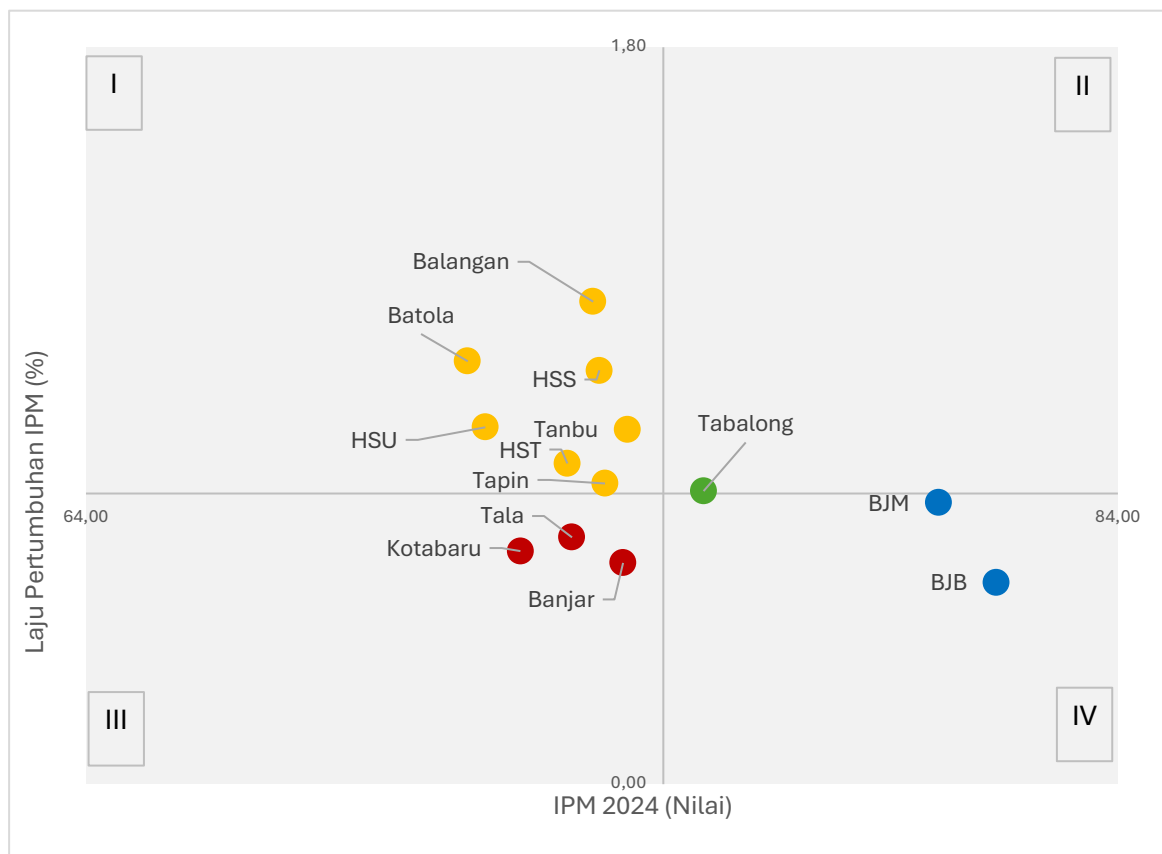
Selatan karena adanya penyesuaian pada salah satu komponen IPM, yaitu usia harapan hidup (UHH). Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IPM kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IPM kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.1 Kategori Capaian IPM Kabupaten/ Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH RENDAH dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IPM LEBIH TINGGI dan Laju Pertumbuhan IPM LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 7 (Tujuh) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih rendah dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut Kabupaten Balangan, Kabupaten Batola, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Tapin
- Kuadran II.** Pada kelompok ini ada 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tabalong.
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian IPM dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Kotabaru, dan Kabupaten Banjar.
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian IPM lebih tinggi dan laju pertumbuhan IPM lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

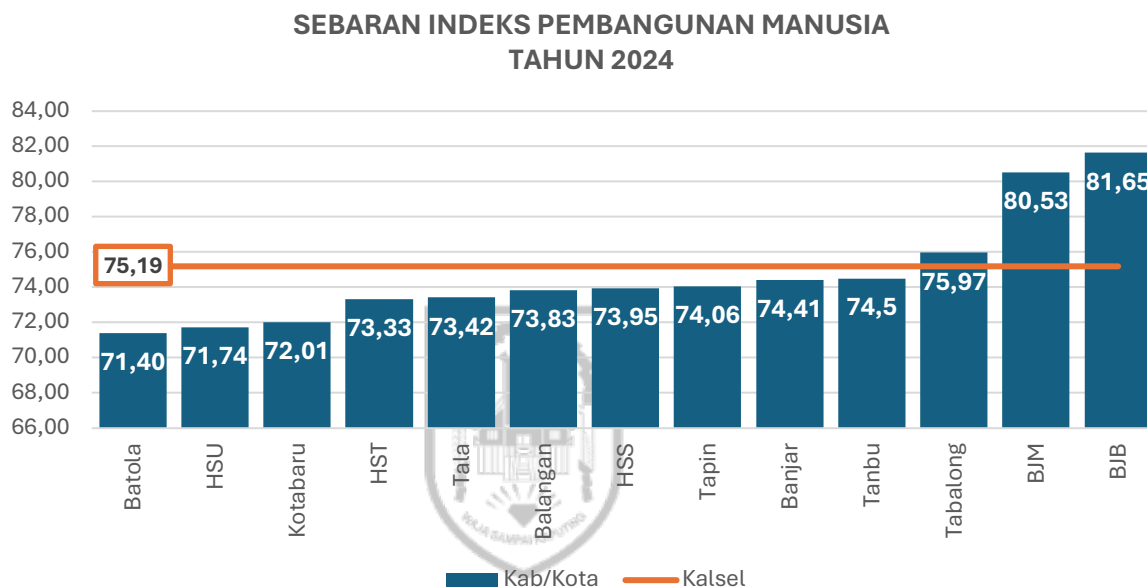
Gambar 5.1 Analis Kuadran Capaian IPM dan Laju Pertumbuhan IPM Kabupaten/ Kota Tahun 2023-2024

Pada tahun 2024, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota cukup bervariasi. Capaian setiap daerah (Kabupaten/Kota) memiliki nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tercatat. Nilai IPM daerah-daerah tersebut berkisar antara 71,4 hingga 81,65. Namun, yang menarik adalah bahwa seluruh daerah dibandingkan dengan IPM Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), yang memiliki nilai tetap yaitu 75,19.

Daerah dengan IPM terendah: Batola (71,4) memiliki nilai IPM terendah dibandingkan dengan daerah lainnya. Daerah dengan IPM tertinggi: BJB (81,65) memiliki nilai IPM tertinggi, menonjol dibandingkan daerah lainnya. Distribusi nilai IPM Sebagian besar daerah memiliki nilai IPM yang lebih rendah daripada IPM Kalsel (75,19). Batola dan HSU memiliki nilai yang hampir identik (71,4 dan 71,74), sedangkan BJM dan BJB memiliki nilai yang mendekati IPM Kalsel, dengan BJB sedikit lebih tinggi.

Keseimbangan IPM: Beberapa daerah, seperti HST, Tala, dan Balangan, memiliki nilai yang relatif serupa dan cenderung lebih rendah dari Kalsel. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam pencapaian IPM antar daerah. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan variasi IPM yang

ada antar daerah dengan beberapa daerah yang cukup jauh di bawah nilai IPM Kalsel dan satu daerah (BJB) yang lebih tinggi.



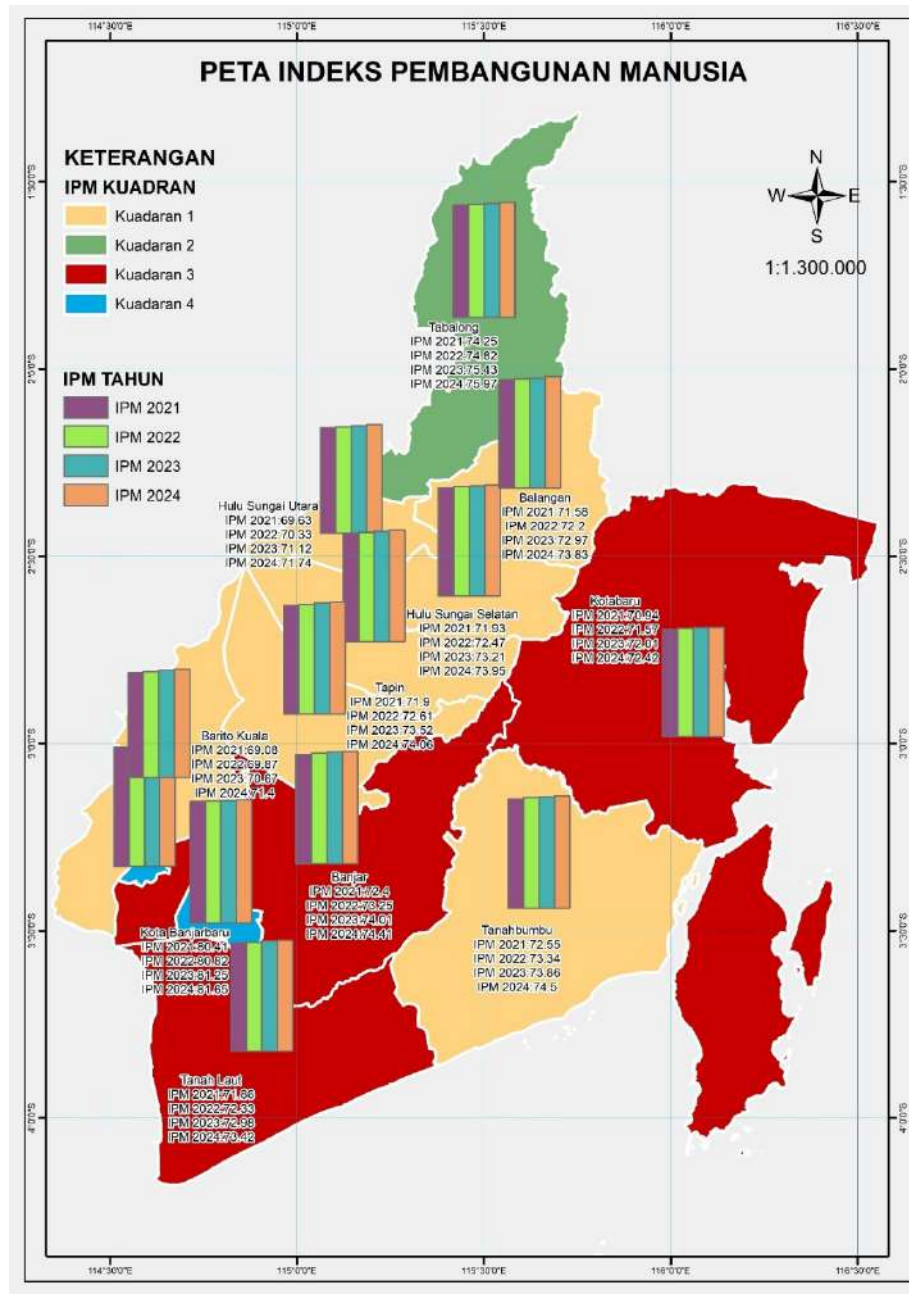
Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Gambar 5.2 Sebaran Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2024

Tabel 5.2 Capaian IPM Kabupaten/Kota Tahun 2023-2024

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)			
		2023	2024	PERTUMBUHAN (%)	KATEGORI
1	KALIMANTAN SELATAN	74,66	75,19	0,71	Tinggi
2	KAB. TANAH LAUT	72,98	73,42	0,60	Tinggi
3	KAB. KOTABARU	72,01	72,42	0,57	Tinggi
4	KAB. BANJAR	74,01	74,41	0,54	Tinggi
5	KAB. BARITO KUALA	70,67	71,4	1,03	Tinggi
6	KAB. TAPIN	73,52	74,06	0,73	Tinggi
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	73,21	73,95	1,01	Tinggi
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	72,76	73,33	0,78	Tinggi
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	71,12	71,74	0,87	Tinggi
10	KAB. TABALONG	75,43	75,97	0,72	Tinggi
11	KAB. TANAH BUMBU	73,86	74,5	0,87	Tinggi
12	KAB. BALANGAN	72,97	73,83	1,18	Tinggi
13	KOTA BANJARMASIN	79,98	80,53	0,69	Sangat Tinggi
14	KOTA BANJARBARU	81,25	81,65	0,49	Sangat Tinggi

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025



Gambar 5.3 Peta Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota

Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, upaya akselerasi dilaksanakan pada daerah di kuadran III (Prioritas 1) dan Kuadran I (Prioritas 2), melalui optimalisasi pe kejar paket guna mengejar mendorong peningkatan rata-rata lama sekolah.

5.1.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kemajuan suatu negara/daerah serta hasil dari pembangunan dilakukan selama periode tertentu.

Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat yang dilihat berdasarkan pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata dari penduduk sebuah negara/daerah. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian LPE dan Share Perekonomian kabupaten/kota tahun 2024, maka capaian LPE kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

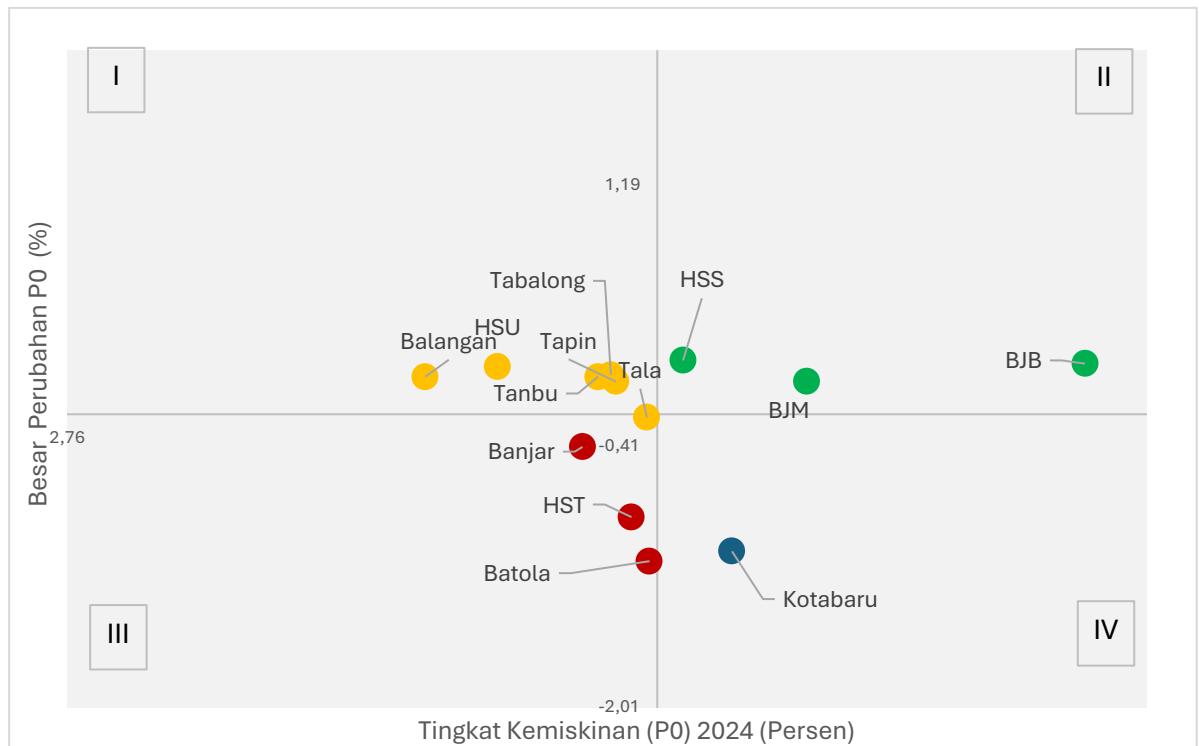
Tabel 5.3 Kategori Capaian LPE Kabupaten/ Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH RENDAH dan Share Perekonomian LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian LPE LEBIH TINGGI dan Share Perekonomian LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2024

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 6 (Enam) kabupaten/kota dengan capaian LPE lebih rendah dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara , Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tapin, Kabupaten Tala, dan Kabupaten Tabalong.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 3 (Tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru dan Kota Hulu Sungai Selatan.
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 3 (Tiga) kabupaten/kota dengan capaian LPE dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Barito Kuala.

4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 1 (Satu) kabupaten/kota dengan capaian capaian LPE lebih tinggi dan Share Perekonomian lebih rendah dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Kotabaru



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Gambar 5.4 Analis Kuadran Capaian LPE dan Share Perekonomian Kabupaten/Kota

Perkembangan perekonomian Kalimantan Selatan secara regional dilihat dengan menganalisis share dan pertumbuhan PDRB dari 13 kabupaten/kota dengan membagi daerah ke dalam empat kuadran berdasarkan nilai share dan pertumbuhan PDRB masing-masing. Perpotongan sumbu vertikal dan sumbu horizontal merupakan nilai share dan pertumbuhan rata-rata. Artinya kabupaten/kota yang berada di sebelah kanan sumbu vertikal (Kuadran II dan IV) merupakan kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi di atas capaian Provinsi Kalimantan Selatan, sedangkan kabupaten/kota yang berada di sebelah atas sumbu horizontal adalah kabupaten/kota yang memiliki share perekonomian terhadap Provinsi di atas share rata-rata seluruh kabupaten/kota (kuadran I dan II).

Kabupaten/kota yang berada pada kuadran 1 dan 2 merupakan daerah penting bagi Provinsi Kalimantan Selatan, sharenya bagi pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan cukup besar. Oleh karena itu, pertumbuhannya harus tetap dijaga karena wilayah-wilayah ini menjadi tulang punggung perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan saat ini. Daerah-daerah yang harus menjadi prioritas untuk didorong adalah wilayah yang berada pada kuadran 1. Pada kuadran 1

tingkat pertumbuhan dan share belum optimal namun masih memiliki potensi untuk dapat dikembangkan.

5.1.3 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Angka TPT yang tinggi menunjukkan tingginya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian TPT kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian kinerja TPT kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

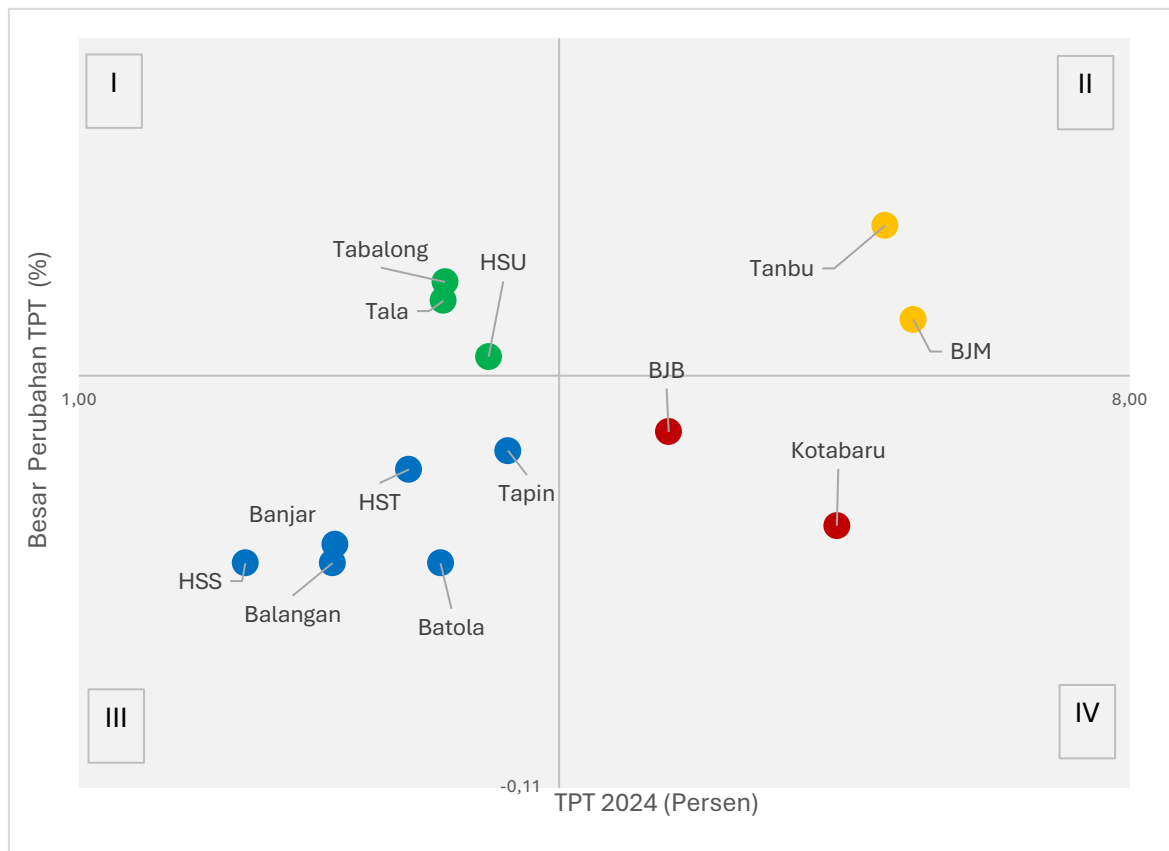
Tabel 5.4 Kategori Capaian TPT Kabupaten/ Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Besar Perubahan LEBIH BAIK dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT TIDAK LEBIH BAIK capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT LEBIH BAIK DARI dari capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT LEBIH BAIK dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT DI BAWAH capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian TPT dan Perubahan TPT TIDAK LEBIH BAIK dari capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 3 (Tiga) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tanah Laut.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin dan Kabupaten Tanah Bumbu
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Balangan.

4. **Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian TPT lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT di bawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru dan Kota Banjarbaru.



Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

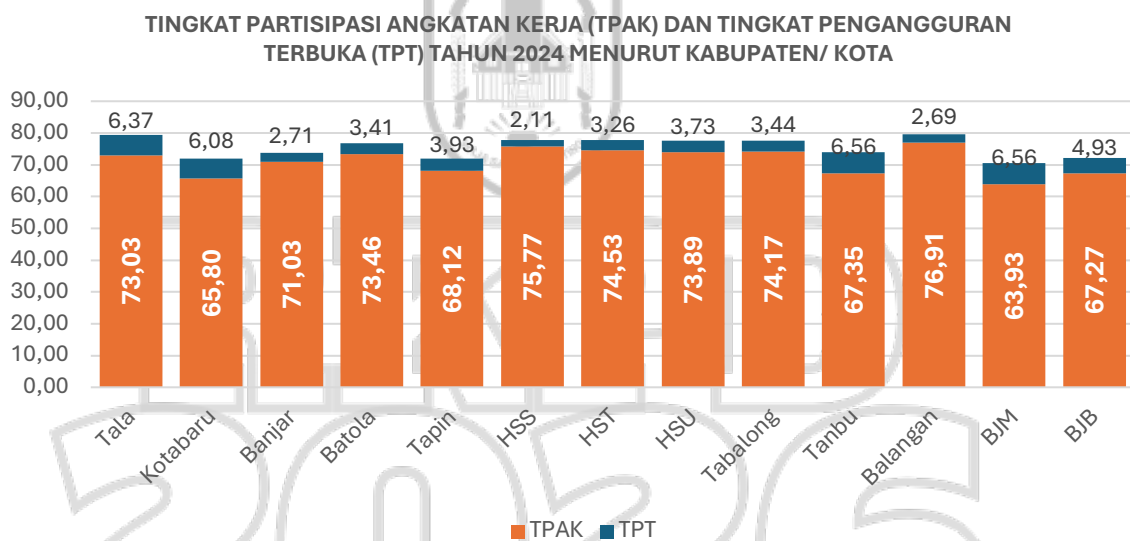
Gambar 5.5 Analis Kuadran Capaian TPT dan Laju Perubahan TPT Kabupaten/Kota

Kondisi ketenagakerjaan di Kalimantan Selatan menunjukkan perbedaan di setiap kabupaten/kota. Hal ini ditunjukkan dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di 13 kabupaten/kota yang berada pada kisaran 63,93 persen hingga 76,39 persen. TPAK menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang aktif berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi (baik yang bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan). Daerah dengan TPAK tertinggi: Tala (79,03%) memiliki TPAK tertinggi, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk usia kerja berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Daerah dengan TPAK terendah: Kotabaru (65,80%) memiliki TPAK terendah, yang menunjukkan bahwa persentase penduduk usia kerja yang aktif cukup rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

TPT menunjukkan persentase penduduk usia kerja yang tidak memiliki pekerjaan namun aktif mencari pekerjaan. Kotabaru mencatatkan TPT terendah (2,71%), yang berarti hanya sedikit penduduk usia kerja yang menganggur. Tabalong dan HSS memiliki TPT cukup tinggi (mencapai

3,44% dan 3,93% masing-masing), menunjukkan tantangan pengangguran yang lebih besar di daerah tersebut.

TPT lebih rendah cenderung terlihat pada daerah dengan TPAK lebih tinggi. Misalnya, Tala dengan TPAK yang tinggi (79,03%) memiliki TPT yang relatif rendah (6,37%). Kotabaru menunjukkan pola yang berbeda dengan TPAK yang rendah namun TPT juga rendah, yang bisa menunjukkan ketidakseimbangan dalam lapangan kerja yang tersedia. Banjarmasin (BJM) dan BJB memiliki TPAK yang tinggi (73,89% dan 74,17%) dengan TPT yang lebih rendah (4,93% dan 6,56%), yang bisa menunjukkan pasar kerja yang lebih baik atau lebih banyak lapangan pekerjaan yang tersedia.



Gambar 5.6 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tahun 2024 menurut Kabupaten/Kota

Pada umumnya, permasalahan tingkat pengangguran terbuka di Kalimantan Selatan disebabkan oleh tingginya pertumbuhan angkatan kerja yang belum diringi dengan penciptaan lapangan kerja yang memadai. Daya serap pasar tenaga kerja belum mampu mengimbangi pertumbuhan angkatan kerja yang ada. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah dapat ditinjau dari sisi tingkat pendidikan penduduk yang berkesempatan untuk berada pada pasar tenaga kerja. Angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD ke Bawah, yaitu sebesar 43,99 persen dari total angkatan kerja. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas tenaga kerja di Kalimantan Selatan masih relatif rendah.

Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya untuk mengurangi tingkat pengangguran terbuka dengan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor juga dengan meningkatkan kompetensi dan daya saing sehingga angkatan kerja dapat memenuhi kualifikasi

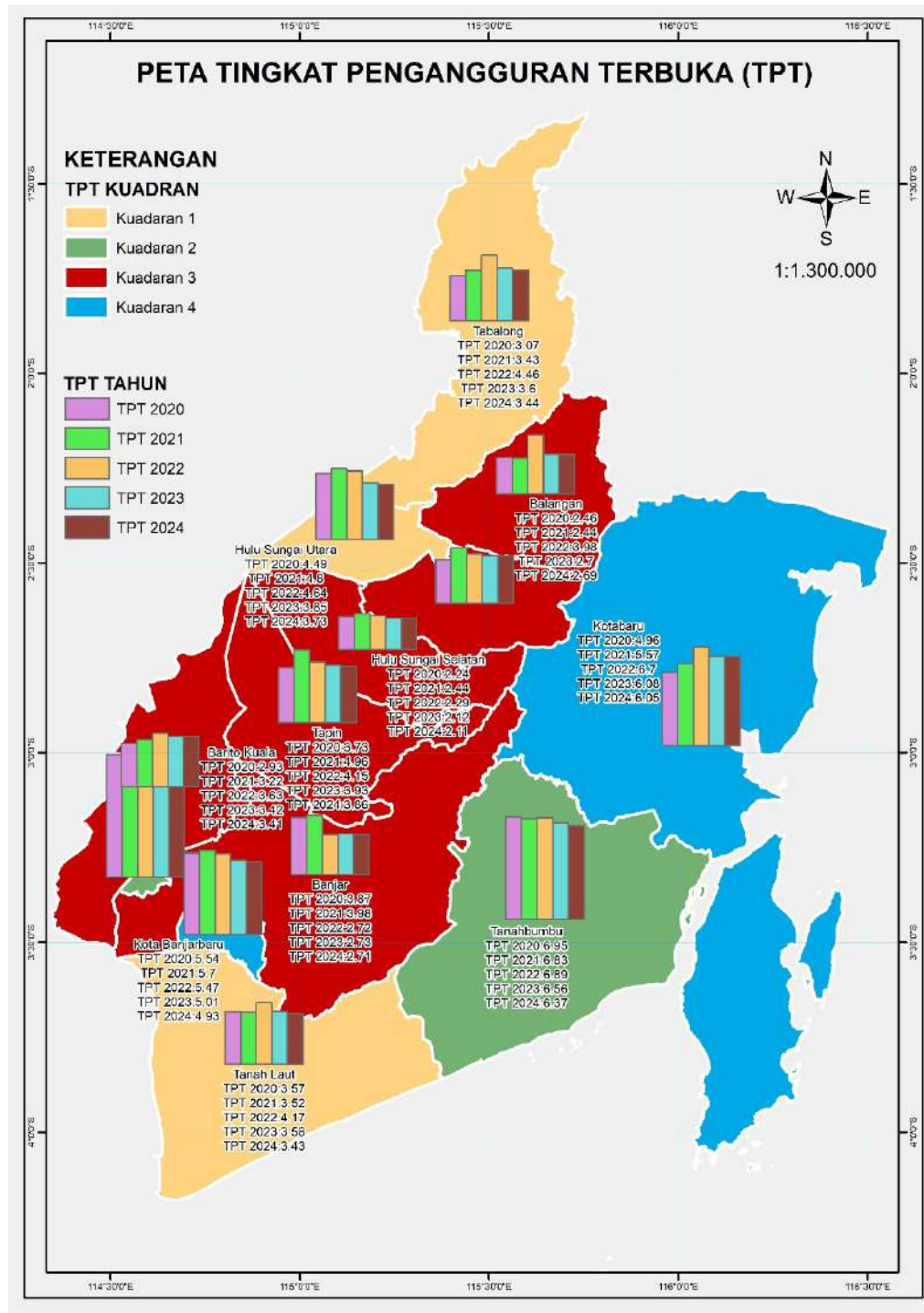
yang dibutuhkan pasar kerja. Kualitas sumber daya manusia yang unggul dan kompeten akan menjadikan Kalimantan Selatan sebagai provinsi yang berdaya saing tinggi.

Tabel 5.5 TPT Kabupaten/ Kota Tahun 2022 - 2024

NO.	PROVINSI / KABUPATEN / KOTA	TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)			BESAR PERUBAHAN
		2022	2023	2024	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,74	4,31	4,20	0,11
2	KAB. TANAH LAUT	4,17	3,58	3,43	0,15
3	KAB. KOTABARU	6,70	6,08	6,05	0,03
4	KAB. BANJAR	2,72	2,73	2,71	0,02
5	KAB. BARITO KUALA	3,63	3,42	3,41	0,01
6	KAB. TAPIN	4,15	3,93	3,86	0,07
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	2,29	2,12	2,11	0,01
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	3,35	3,26	3,20	0,06
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	4,64	3,85	3,73	0,12
10	KAB. TABALONG	4,46	3,60	3,44	0,16
11	KAB. TANAH BUMBU	6,89	6,56	6,37	0,19
12	KAB. BALANGAN	3,98	2,70	2,69	0,01
13	KOTA BANJARMASIN	6,96	6,70	6,56	0,14
14	KOTA BANJARBARU	5,47	5,01	4,93	0,08

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

*Provinsi
Kalimantan Selatan*



Gambar 5.7 Peta Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota

5.1.4 Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin menunjukkan kelompok masyarakat dengan pengeluaran per kapita sebulannya berada dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan

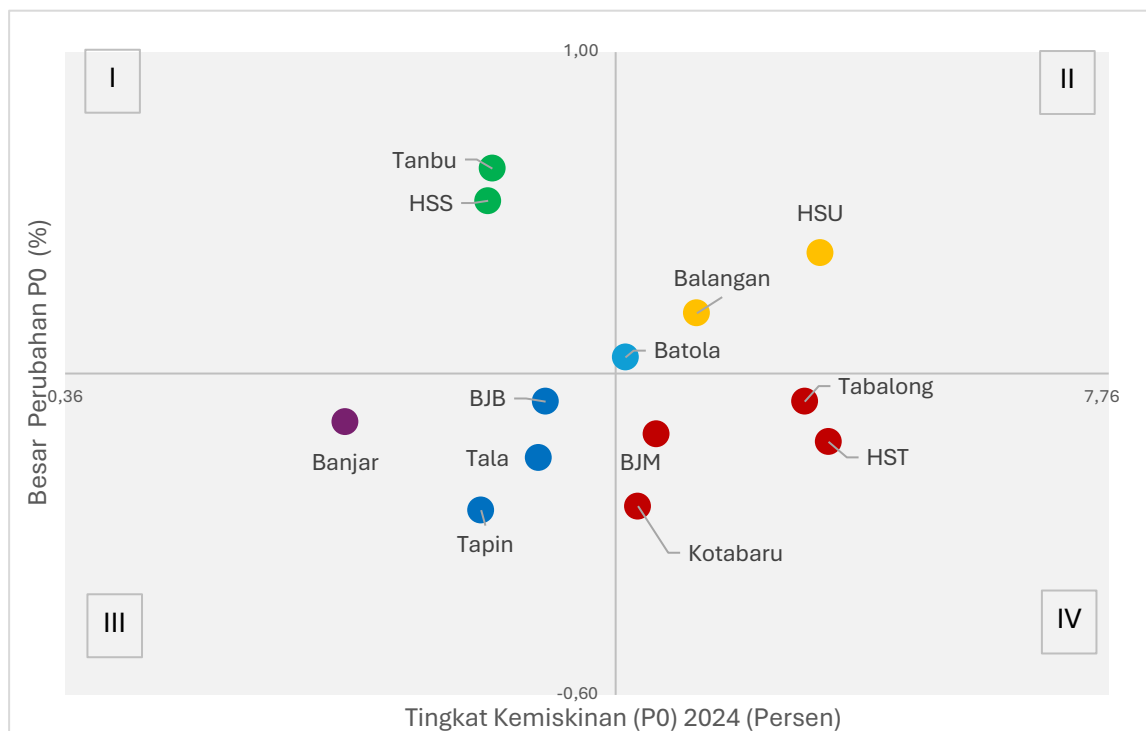
capaian tahun 2023, maka capaian Persentase Penduduk Miskin kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.6 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin dan Besar Perubahan LEBIH BAIK dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin TIDAK LEBIH BAIK DARI capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin LEBIH BAIK DARI dari capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin LEBIH BAIK dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin TIDAK LEBIH BAIK DARI capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin DI ATAS dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin LEBIH BAIK dari capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Tanah Bumbu.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di atas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi.
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 4 (empat) kabupaten/kota dengan capaian Persentase Penduduk Miskin lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin di bawah capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kota Banjarmasin.



Sumber: BPS, Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Gambar 5.8 Analis Kuadran Capaian Persentase Penduduk Miskin dan Laju Perubahan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota

Persentase penduduk miskin di Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan yang positif dengan tren konsisten menurun. Namun demikian permasalahan kemiskinan masih dialami oleh sejumlah kabupaten/kota dimana tingkat kemiskinan masih lebih tinggi dan laju penurunan kemiskinan yang lebih rendah dibanding provinsi.

Permasalahan kemiskinan umumnya dialami oleh kabupaten dengan karakteristik wilayah didominasi perdesaan dan wilayah yang padat penduduknya. Untuk itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan fokus mengurangi tingkat kemiskinan melalui program-program peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Selain itu Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terus berupaya mengoptimalkan pemutakhiran kualitas data yang digunakan sebagai dasar perencanaan program penanggulangan kemiskinan.

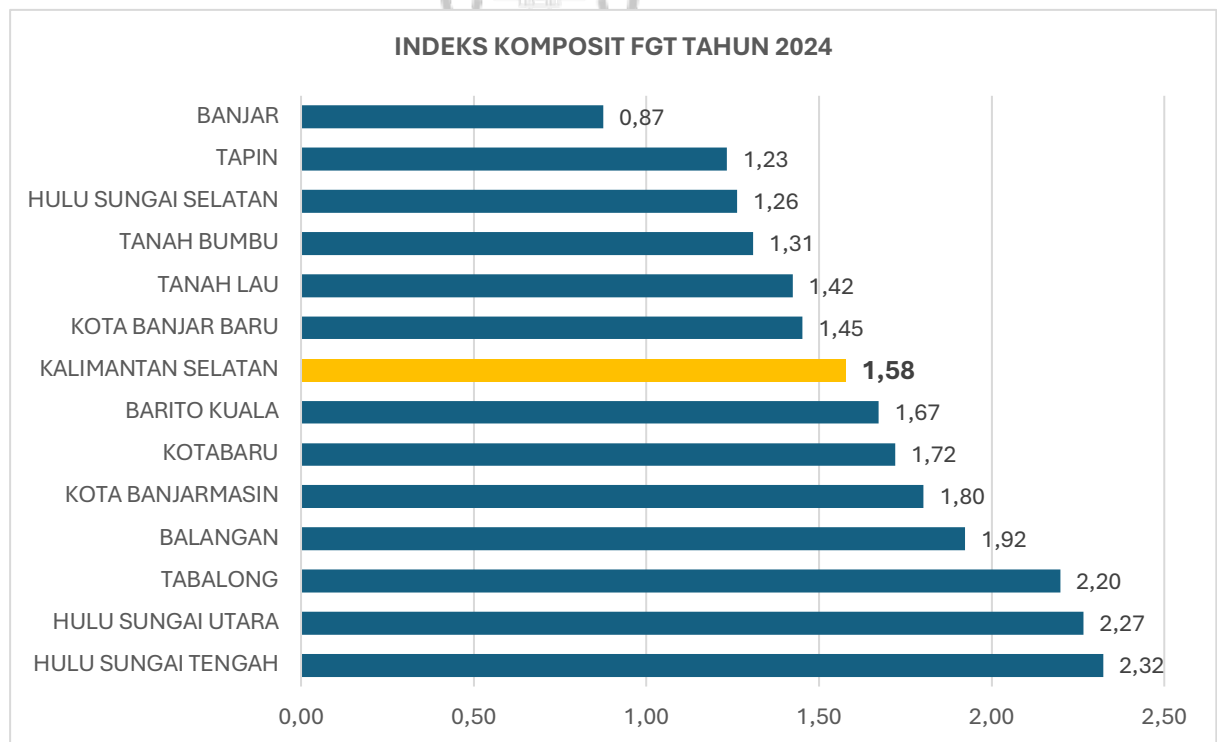
Tabel 5.7 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota Tahun 2022 - 2024

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	% PENDUDUK MISKIN			BESAR PERUBAHAN
		2022	2023	2024	
1	KALIMANTAN SELATAN	4,49	4,29	4,11	0,18
2	KAB. TANAH LAUT	3,86	3,73	3,74	-0,01
3	KAB. KOTABARU	4,3	4,32	4,45	-0,13
4	KAB. BANJAR	2,79	2,44	2,36	0,08
5	KAB. BARITO KUALA	4,75	4,6	4,36	0,24
6	KAB. TAPIN	3,6	3,19	3,33	-0,14

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	% PENDUDUK MISKIN			BESAR PERUBAHAN
		2022	2023	2024	
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	4,54	4,01	3,38	0,63
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	5,92	5,84	5,81	0,03
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	6,49	6,25	5,75	0,5
10	KAB. TABALONG	5,87	5,77	5,64	0,13
11	KAB. TANAH BUMBU	4,26	4,12	3,41	0,71
12	KAB. BALANGAN	5,83	5,22	4,87	0,35
13	KOTA BANJARMASIN	4,74	4,63	4,58	0,05
14	KOTA BANJARBARU	4,17	3,92	3,79	0,13

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Perkembangan persentase kemiskinan (P0), kedalaman kemiskinan (P1), dan keparayaan kemiskinan (P2) tidak lepas dari upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Kalimantan Selatan. Indeks komposit FGT (Foster Greer Thorbecke) merupakan rata-rata rangkin dari P0, P1, dan P2 di kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

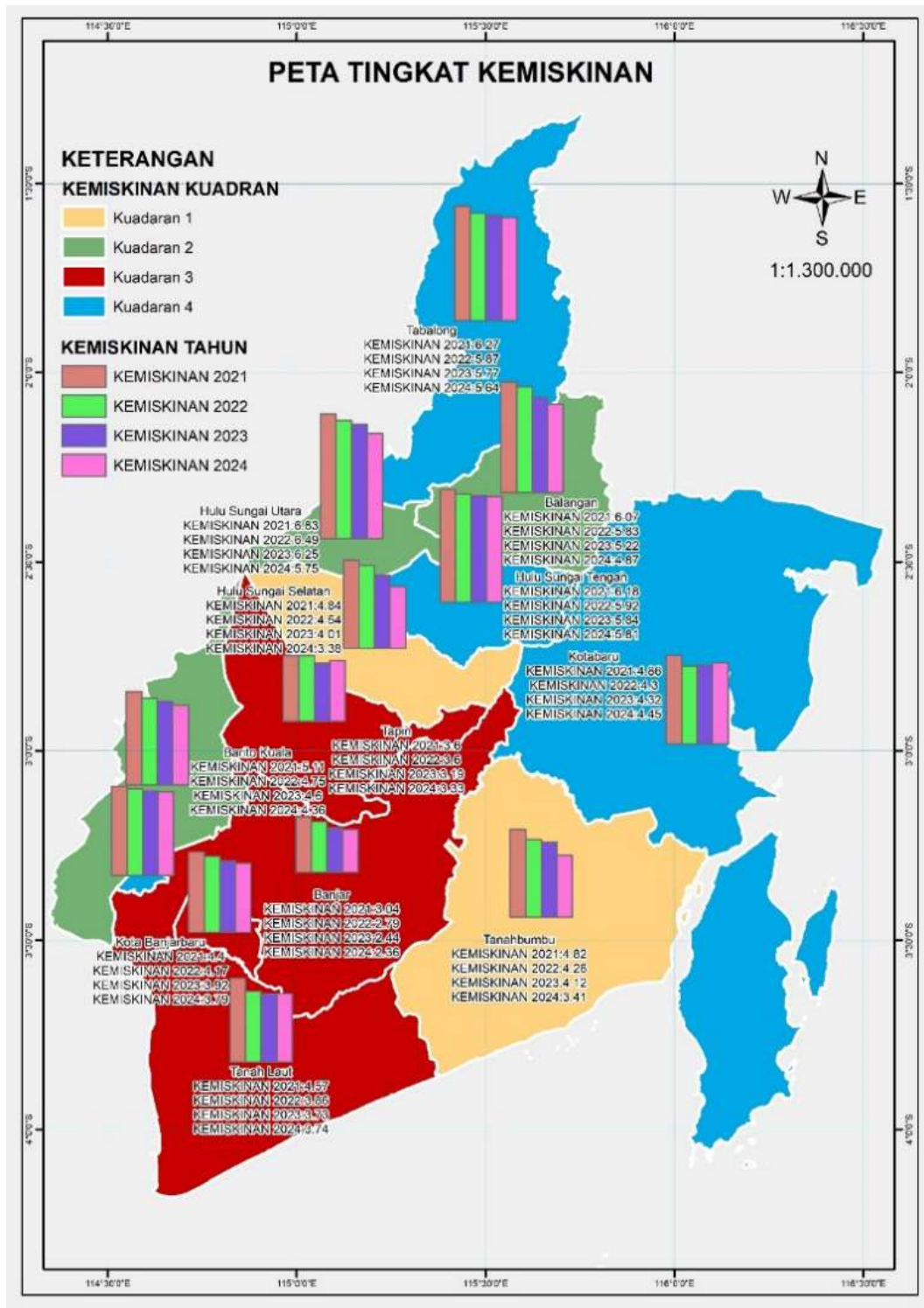


Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

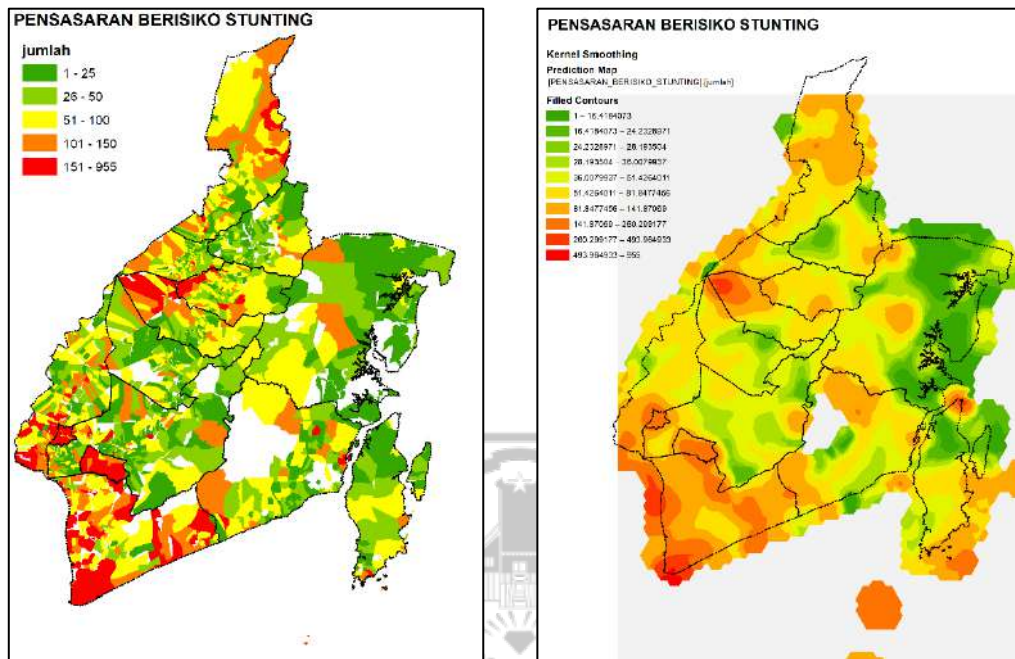
Gambar 5.9 Indeks Komposit FGT Tahun 2023

Indeks komposit FGT menunjukkan tingkat kompleksitas permasalahan kemiskinan di suatu daerah. Semakin tinggi indeks komposit FGT semakin kompleks permasalahan kemiskinan yang dihadapi oleh suatu daerah, begitu juga sebaliknya. Indeks komposit FGT digunakan untuk menyusun strategi pensasaran pengentasan kemiskinan di Provinsi Kalimantan selatan. Memprioritaskan daerah dengan indeks komposit FGT yang rendah akan mendemonstrasikan efektivitas dalam pengupayaan pengentasan kemiskinan yang lebih cepat dan lebih berpeluang dapat diwujudkan. Di sisi lain, memfokuskan pengentasan kemiskinan di wilayah dengan indeks

komposit FGT yang tinggi akan memberikan dampak jangka panjang yang lebih signifikan, yang sekaligus dapat meningkatkan kesetaraan di skala yang lebih luas.



Gambar 5.10 Peta Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota

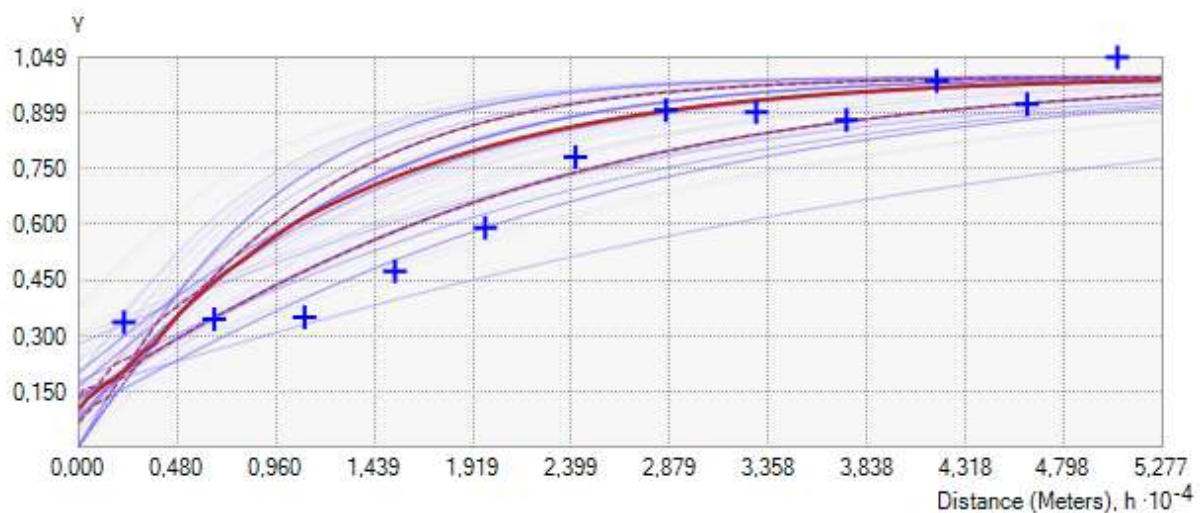


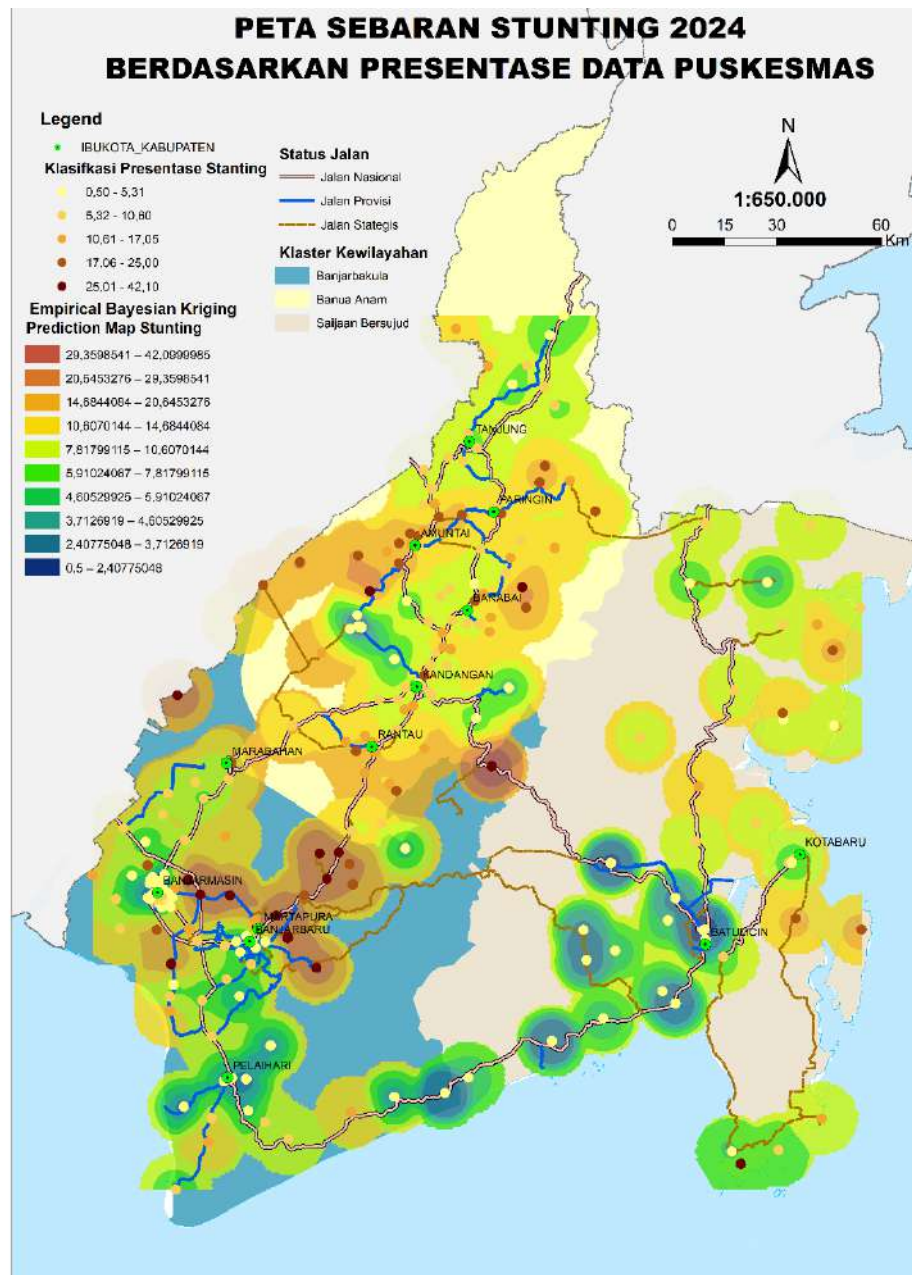
(a). Analisa Jumlah KK (P3KE) Berisiko Stunting

(b). Geostatistikan Kernal Smoothing Jumlah KK (P3KE) Berisiko Stunting

Gambar 5.11 Peta Analisa Geostatistik Resiko Stunting dari Analisa Data Pensasaran P3KE-Kemenko PMK

Berdasarkan analisa Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dapat dilihat bahwa sebaran berada pada wilayah pedalaman, pesisir dan wilayah pinggiran kota seperti wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru yang memiliki potensi stunting tinggi dikarenakan jumlah penduduk di wilayah tersebut lebih banyak. Sehingga dapat diprioritaskan penanganan kemiskinan ekstrim pada wilayah berwarna merah pada peta yang mencirikan dampak ganda antara kemiskinan ekstrem dan keluarga berisiko stunting.





Gambar 5.12 Analisa Geostatistik Data Presentase Stunting 2024 dari Puskesmas

5.1.5 Indeks Gini

Indeks Gini Digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Apabila koefisien Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan apabila bernilai 1 berarti ketimpangan benar-benar sempurna terjadi. Secara umum, ketimpangan pengeluaran penduduk kabupaten/kota di Kalimantan Selatan pada tahun 2023 dalam kategori rendah sampai moderat. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian indeks gini kabupaten/kota tahun 2023 dibandingkan capaian

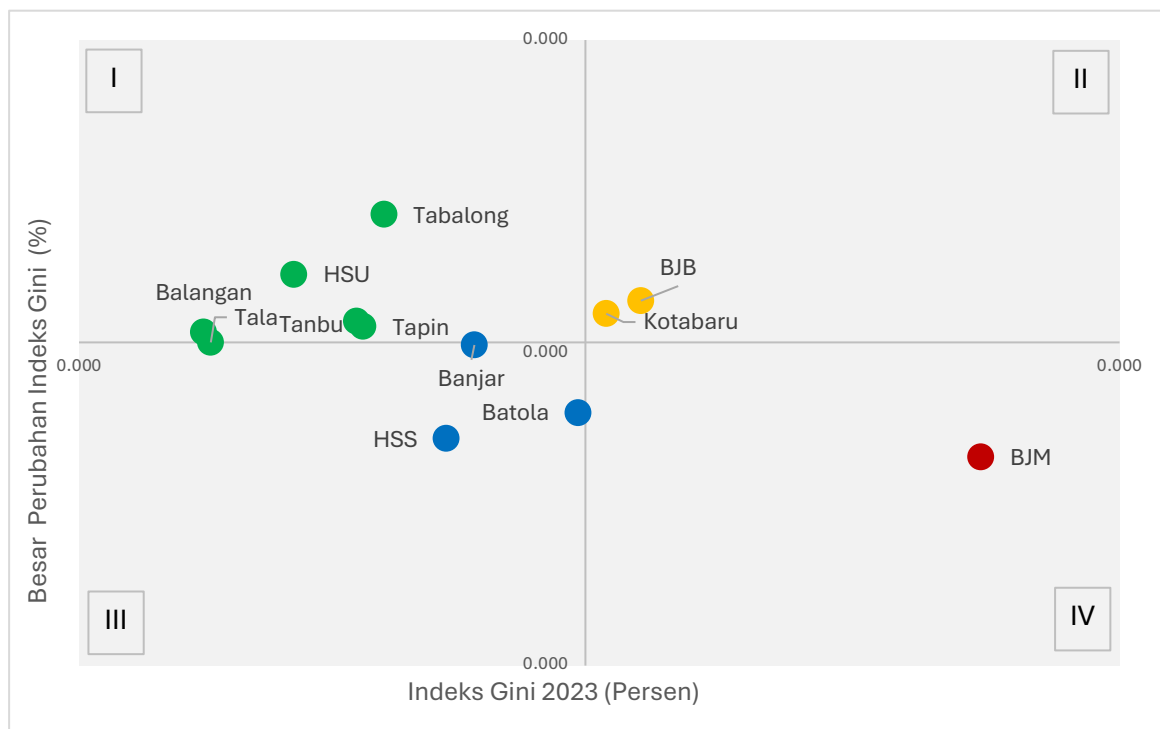
tahun 2022, maka capaian Persentase indeks gini kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.8 Kategori Capaian Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/ Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini dan Besar Perubahan LEBIH BAIK dibanding capaian provinsi
II	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini DI ATAS capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini LEBIH BAIK DARI dari capaian provinsi
III	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini LEBIH BAIK dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini DI BAWAH capaian provinsi
IV	●	Kelompok kabupaten/kota dengan capaian indeks gini DI ATAS dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini LEBIH BAIK dari capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2023

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 6 (enam) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Hulu Balangan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Tabalong.
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 2 (dua) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini diatas capaian provinsi. Kelompok Kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Kotabaru, dan Kota Banjarbaru.
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 3 (tiga) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih rendah dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini dibawah capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Barito Kuala.
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini terdapat 1 (satu) kabupaten/kota dengan capaian indeks gini lebih tinggi dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini di bawah capaian provinsi. Kota Banjarmasin.



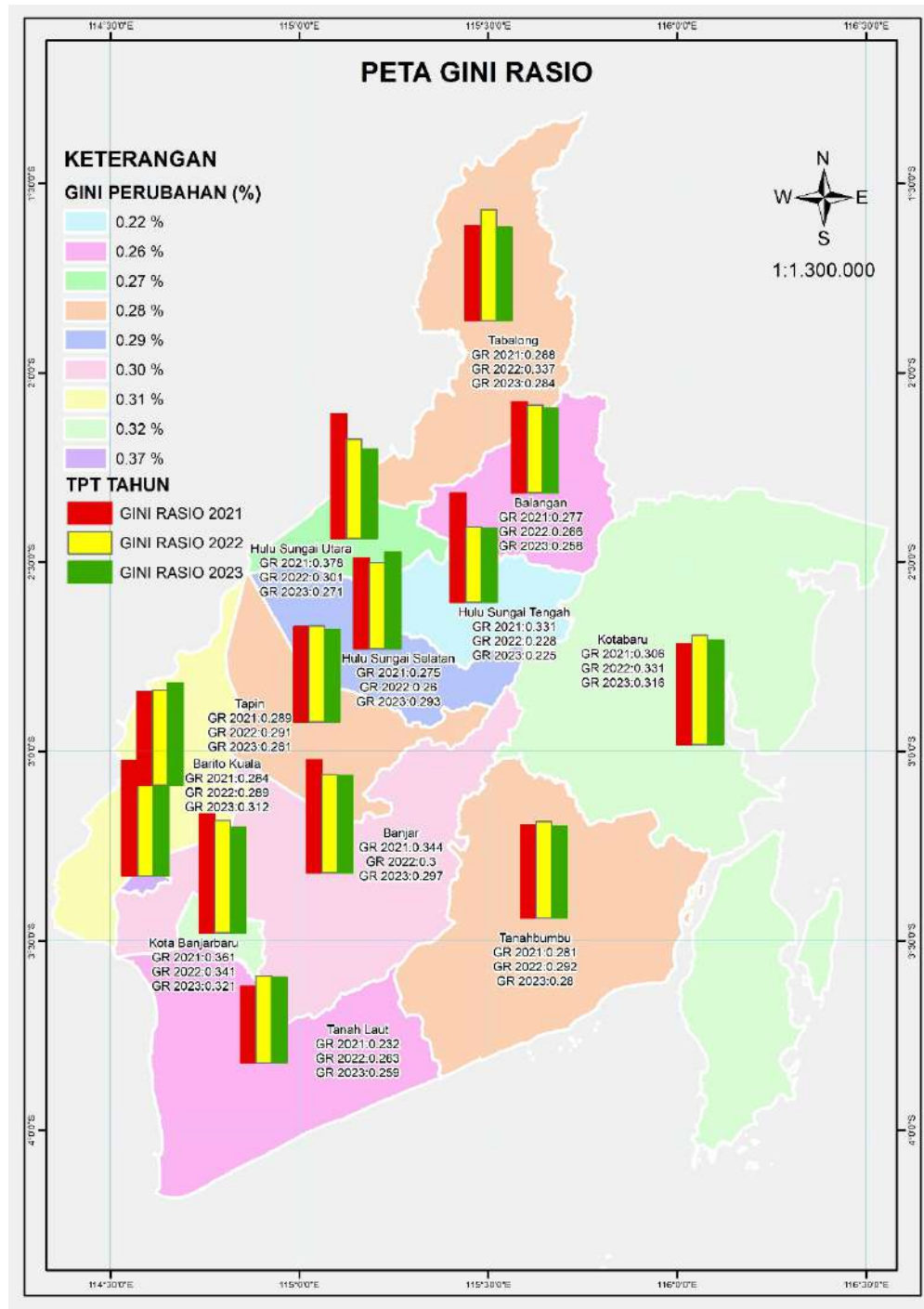
Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2024

Gambar 5.13 Analis Kuadran Capaian Indeks Gini dan Laju Perubahan Indeks Gini Kabupaten/Kota

Tabel 5.9 Indeks Gini Kabupaten/ Kota Tahun 2021 - 2023

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	INDEKS GINI			BESAR PERUBAHAN
		2021	2022	2023	
1	KALIMANTAN SELATAN	0,330	0,317	0,313	0,004
2	KAB. BANJAR	0,232	0,263	0,259	0,004
3	KAB. TAPIN	0,306	0,331	0,316	0,015
4	KAB. KOTABARU	0,344	0,300	0,297	0,003
5	KOTA BANJARBARU	0,284	0,289	0,312	-0,023
6	KAB. TANAH LAUT	0,289	0,291	0,281	0,01
7	KAB. TANAH BUMBU	0,275	0,260	0,293	-0,033
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	0,331	0,228	0,225	0,003
9	KOTA BANGKALAN	0,378	0,301	0,271	0,03
10	KAB. BARITO KUALA	0,288	0,337	0,284	0,053
11	KAB. BALANGAN	0,281	0,292	0,280	0,012
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	0,277	0,266	0,258	0,008
13	KAB. TABALONG	0,350	0,330	0,370	-0,04
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	0,361	0,341	0,321	0,02

Sumber: BPS. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2024



Gambar 5.14 Peta Indeks Gini Kabupaten/Kota

5.1.6 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

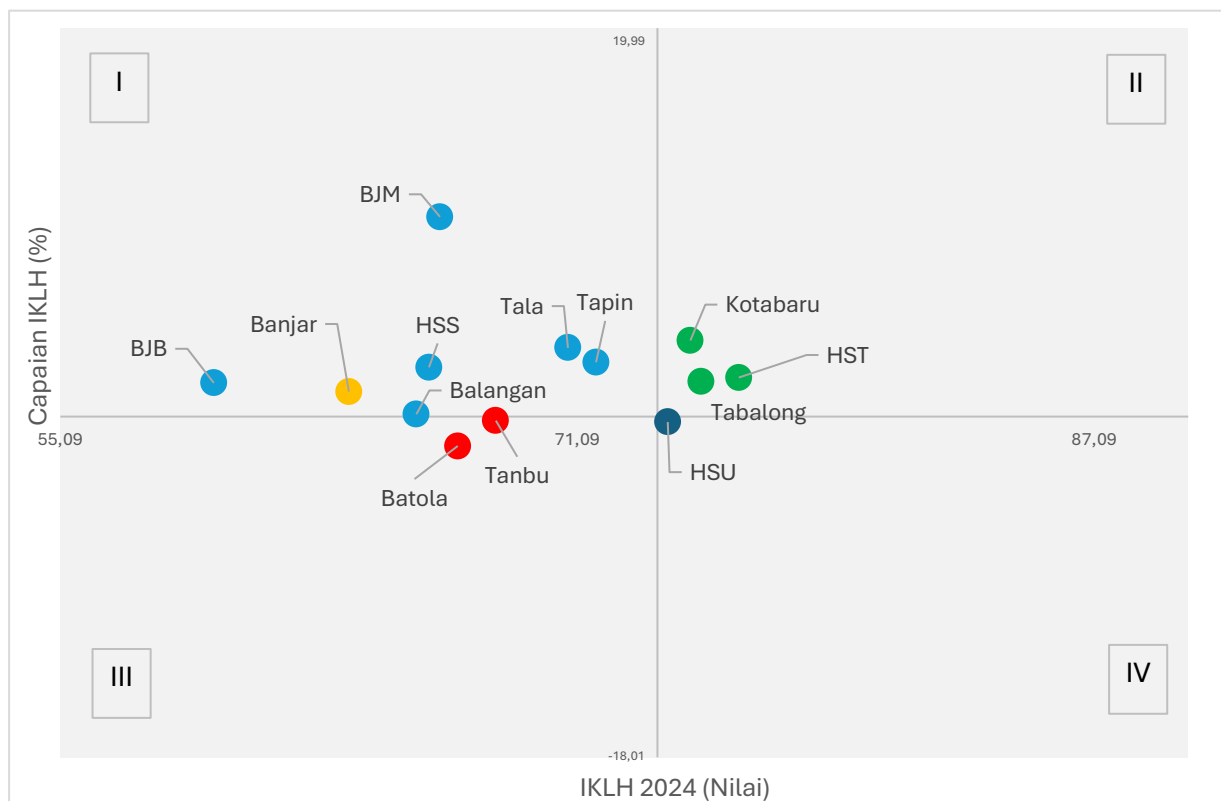
IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikankesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Berdasarkan hasil analisis kuadran terhadap capaian IKLH kabupaten/kota tahun 2024 dibandingkan capaian tahun 2023, maka capaian IKLH kabupaten/kota dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori kuadran sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 5.10 Kategori Capaian IKLH Kabupaten/ Kota

KUADRAN	SIMBOL	INTERPRETASI
I		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH LEBIH RENDAH dan Laju Pertumbuhan IKLH LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
II		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
III		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan Laju Pertumbuhan IKLH LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi
IV		Kelompok kabupaten/kota dengan capaian IKLH LEBIH TINGGI dan Laju Pertumbuhan IKLH LEBIH RENDAH dibanding capaian provinsi

Sumber: Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

- Kuadran I.** Pada kelompok ini terdapat 7 (Tujuh) kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih rendah dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Tapin, dan Kabupaten Balangan;
- Kuadran II.** Pada kelompok ini terdapat 3 (Tiga) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih tinggi dibanding capaian provinsi, yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Kotabaru;
- Kuadran III.** Pada kelompok ini terdapat 2 (Dua) kabupaten/kota dengan capaian IKLH dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi. Kelompok kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Barito Kuala;
- Kuadran IV.** Pada kelompok ini tidak ada kabupaten/kota dengan capaian IKLH lebih tinggi dan laju pertumbuhan IKLH lebih rendah dibanding capaian provinsi adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.



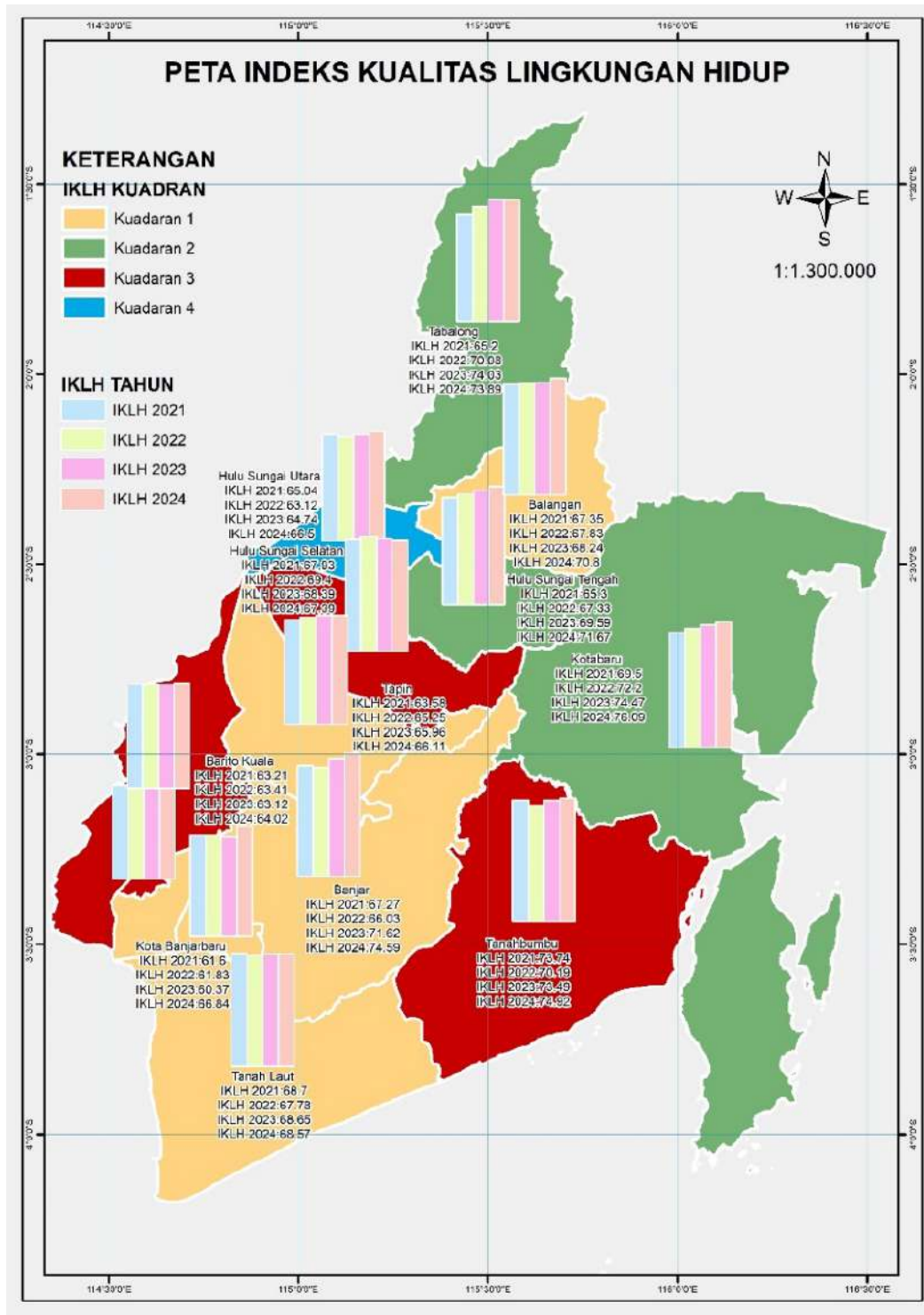
Sumber: DLH. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Gambar 5.15 Analis Kuadran Capaian ICLH dan Laju Pertumbuhan ICLH Kabupaten/ Kota Tahun 2022-2024

Tabel 5.11 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota Tahun 2022 - 2024

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	IKLH			PERTUMBUHAN
		2022	2023	2024	
1	KALIMANTAN SELATAN	71,97	73,5	73,57	0,10
2	KAB. BANJAR	66,03	71,62	74,59	1,43
3	KAB. TAPIN	65,25	65,96	66,11	2,99
4	KAB. KOTABARU	72,2	74,47	76,09	4,15
5	KOTA BANJARBARU	61,83	60,37	66,84	1,89
6	KAB. TANAH LAUT	67,78	68,65	68,57	3,75
7	KAB. TANAH BUMBU	70,19	73,49	74,92	-0,12
8	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	69,4	68,39	67,39	2,72
9	KOTA BANJARMASIN	56,38	58,73	59,84	10,72
10	KAB. BARITO KUALA	63,41	63,12	64,02	-1,46
11	KAB. BALANGAN	67,83	68,24	70,80	0,23
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	67,33	69,59	71,67	2,18
13	KAB. TABALONG	70,08	74,03	73,89	1,95
14	KAB. HULU SUNGAI UTARA	63,12	64,74	66,5	-0,19

Sumber: DLH. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025



Gambar 5.16 Peta IKLH Kabupaten/Kota

5.1.7 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada daerah yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pengukuran IDSD Ini

bertujuan untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah.

Kerangka pengukuran mengacu kepada *global competitiveness index* (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya saing. Setiap pilar daya saing diukur dengan menggunakan indikator pembentuk daya saing.

Komponen Lingkungan Pendukung meliputi empat pilar, yaitu institusi yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, politik, hukum dan keamanan; infrastruktur yang dapat mendukung aktivitas perekonomian; adopsi TIK yang merupakan faktor determinan bagi kemajuan Industri 4.0; dan stabilitas ekonomi makro yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral, perekonomian, serta tingkat biaya hidup.

Komponen Sumber Daya Manusia meliputi dua pilar, yaitu kesehatan yang merepresentasikan kualitas hidup manusia yang diukur dari angka harapan hidup dan keterampilan yang erat keterkaitannya dengan penciptaan tenaga kerja produktif yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha.

Komponen Pasar meliputi empat pilar, yaitu pasar produk yang mendorong efisiensi di dalam sistem produksi; pasar tenaga kerja yang mampu menekan pengangguran dengan merangsang terciptanya kesempatan kerja; sistem keuangan yang merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan non- perbankan di daerah untuk memediasi aktivitas perekonomian; dan ukuran pasar yang menguatkan struktur industri dalam menghasilkan nilai tambah akibat berkembangnya iptek.

Komponen Ekosistem Inovasi meliputi dua pilar, yaitu dinamisme bisnis yang menggambarkan kemudahan entitas bisnis memulai usaha untuk penciptaan dan perluasan lapangan kerja serta kapabilitas inovasi yang mengukur kemampuan daerah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi bernilai tambah.

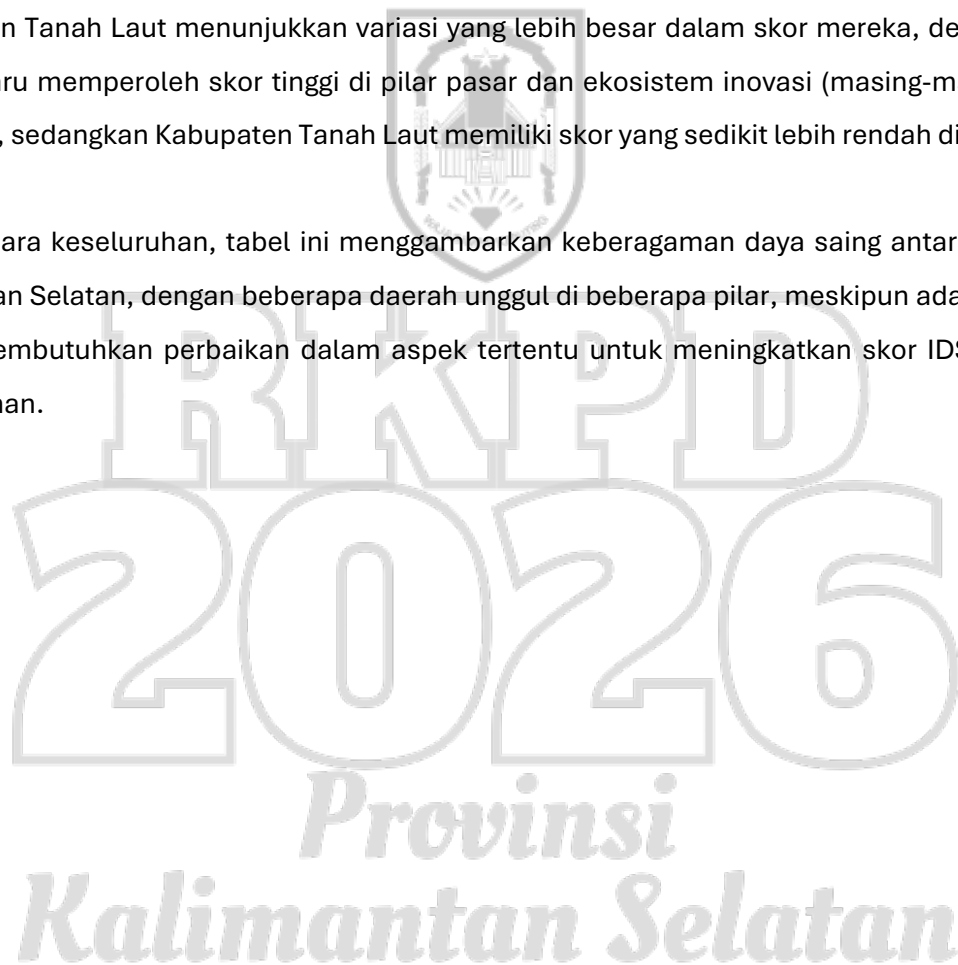
Indeks Daya Saing Daerah diarahkan menjadi data dasar yang dapat digunakan dalam menyusun kebijakan peningkatan daya saing daerah. Tabel berikut merupakan kondisi daya saing daerah berdasarkan kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

Tabel ini menunjukkan skor IDSD (Indeks Daya Saing Daerah) untuk berbagai provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia, dengan penilaian berdasarkan beberapa pilar yang meliputi lingkungan pendukung, SDM (Sumber Daya Manusia), pasar, dan ekosistem inovasi. Skor IDSD ini mencakup 12 pilar yang terfokus pada aspek yang berbeda untuk menilai daya saing dan potensi daerah.

Provinsi Kalimantan Selatan, dengan skor IDSD 3,56, menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan rata-rata kabupaten/kota di daerahnya (skor rata-rata 3,65) serta sedikit lebih rendah dari skor nasional yang mencapai 3,43. Secara keseluruhan, Kalimantan Selatan memperoleh skor tinggi di berbagai pilar, khususnya pada pilar lingkungan pendukung dan pasar, yang menunjukkan bahwa provinsi ini memiliki kondisi yang cukup mendukung untuk tumbuhnya daya saing. Misalnya, di pilar lingkungan pendukung, Kalimantan Selatan memiliki skor 4,62, yang lebih tinggi dibandingkan angka nasional (4,18).

Namun, beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan seperti Kota Banjar Baru dan Kabupaten Tanah Laut menunjukkan variasi yang lebih besar dalam skor mereka, dengan Kota Banjar Baru memperoleh skor tinggi di pilar pasar dan ekosistem inovasi (masing-masing 4,53 dan 4,64), sedangkan Kabupaten Tanah Laut memiliki skor yang sedikit lebih rendah di beberapa pilar.

Secara keseluruhan, tabel ini menggambarkan keberagaman daya saing antar daerah di Kalimantan Selatan, dengan beberapa daerah unggul di beberapa pilar, meskipun ada juga yang masih membutuhkan perbaikan dalam aspek tertentu untuk meningkatkan skor IDSD secara keseluruhan.

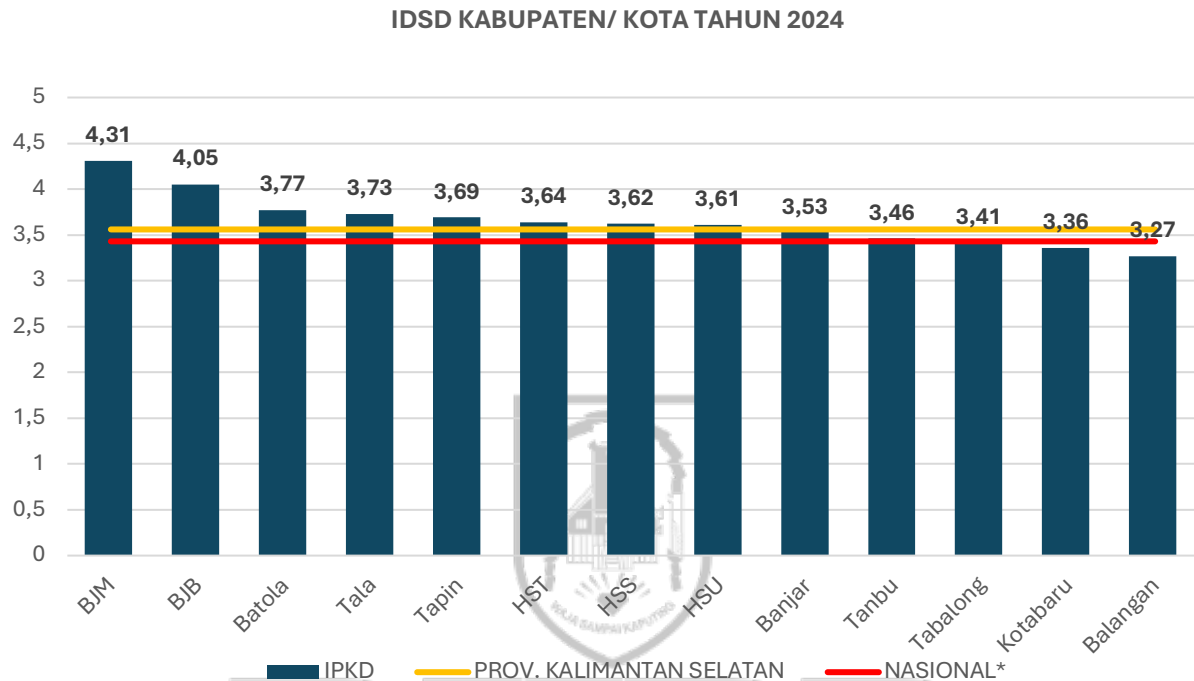


Tabel 5.12 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/ Kota Tahun 2024

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR	EKOSISTEM INOVASI			SKOR IDSD
	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR	PILAR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
NASIONAL*	4,18	2,97	3,47	3,99	3,76	3,91	2,57	3,03	2,76	4,35	3,06	3,13	3,43
PROV. KALIMANTAN SELATAN	4,62	3,09	3,98	4,12	3,71	4,23	2,31	3,73	2,8	4,4	2,63	3,11	3,56
RATA-RATA KAB/KOTA	4,64	3,39	4,37	3,81	3,69	4,03	3,21	3,6	2,48	4,1	4,55	1,94	3,65
TANAH LAUT	4,76	3,36	4,58	3,9	3,76	3,94	3,07	3,3	2,87	4,17	4,8	2,21	3,73
KOTABARU	4,5	2,99	4,21	3,65	3,73	3,63	1,87	2,91	2,04	4,4	4,56	1,84	3,36
KAB BANJAR	4,69	3,67	4,22	3,7	3,59	4,09	1,5	3,76	2,55	4,23	4,37	2,02	3,53
BARITO KUALA	4,69	3,84	4,63	3,66	3,49	3,93	3,98	3,94	2,6	3,91	4,8	1,75	3,77
TAPIN	4,57	3,93	4,56	3,99	3,85	4,03	2,85	3,83	2,81	3,96	4,55	1,35	3,69
HULU SUNGAI SELATAN	4,69	3,16	4,54	3,94	3,5	4,19	3,97	3,71	1,88	3,82	4,65	1,35	3,62
HULU SUNGAI TENGAH	4,77	3,13	3,93	3,96	3,49	3,99	4,87	3,66	1,89	3,83	4,67	1,56	3,64
HULU SUNGAI UTARA	4,51	2,97	4,34	3,77	3,33	4,13	5	3,44	2,4	3,66	3,92	1,83	3,61
TABALONG	4,81	3,24	3,87	3,5	3,86	4,2	1,55	2,92	1,81	4,33	4,82	2,04	3,41
TANAH BUMBU	4,66	3,47	4,27	3,81	3,83	3,8	1,76	3,01	2,97	4,36	4,47	1,16	3,46
BALANGAN	4,7	3,17	4,03	3,85	3,62	4,31	1,27	3,33	0,84	4,12	4,31	1,68	3,27
BANJARMASIN	4,45	3,68	4,79	4,06	3,91	4,04	5	4,48	4,11	4,52	4,63	4,03	4,31
BANJAR BARU	4,48	3,47	4,89	3,72	3,97	4,12	5	4,53	3,41	3,96	4,64	2,42	4,05

Sumber: BRIN. Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Kalimantan Selatan



Sumber: BRIN, Diolah Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan 2025

Gambar 5.17 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten/Kota

Berdasarkan data Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) di atas ditunjukkan bahwa Kota Banjarmasin memiliki daya saing daerah tertinggi dari kabupaten lainnya dan lebih baik dari rata-rata Provinsi dan Nasional. Kondisi ini merefleksikan bahwa Pembangunan di perkotaan masih lebih unggul dari daerah kabupaten, sehingga perlu percepatan pembangunan di kabupaten untuk mewujudkan kesetaraan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

5.1.8 Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Tahunan

Gas Rumah Kaca (GRK) adalah gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali radiasi inframerah. Penurunan emisi GRK dihitung dari kegiatan yang secara langsung menurunkan emisi gas rumah kaca lima sektor prioritas, yaitu:

1. Sektor berbasis lahan yang terdiri dari sub-sektor kehutanan dan lahan gambut, sub-sektor pertanian
2. Sektor berbasis energi, yang terdiri dari sub-sektor energi, sub-sektor transportasi
3. Sektor berbasis sektor industri (IPPU)
4. Sektor berbasis limbah yang terdiri dari persampahan dan limbah cair
5. Sektor berbasis kelautan dan pesisir

Data aktivitas aksi penurunan emisi digunakan untuk menghitung potensi penurunan emisi. Aktivitas Pembangunan Rendah Karbon (PRK) merupakan besaran kegiatan pembangunan yang berpotensi mengeluarkan atau menyerap emisi di satu wilayah dalam waktu tertentu dan memiliki satuan aktivitas yang berbeda-beda di tiap sektor. Perhitungan potensi penurunan emisi GRK dihasilkan dengan membandingkan nilai penurunan emisi GRK terhadap nilai baseline yang telah ditetapkan.

Tabel 5.13 Penurunan Emisi GRK Tahun 2022 (Ton CO₂/eq)

NO.	PROVINSI / KABUPATEN/ KOTA	EMISI GRK		
		2022	2023	2024
1	KALIMANTAN SELATAN	102714,56	22384,08	*)

Sumber: aplikasi AKSARA tanggal 27 Februari 2025

Keterangan:

*) datanya belum dirilis oleh Bappenas

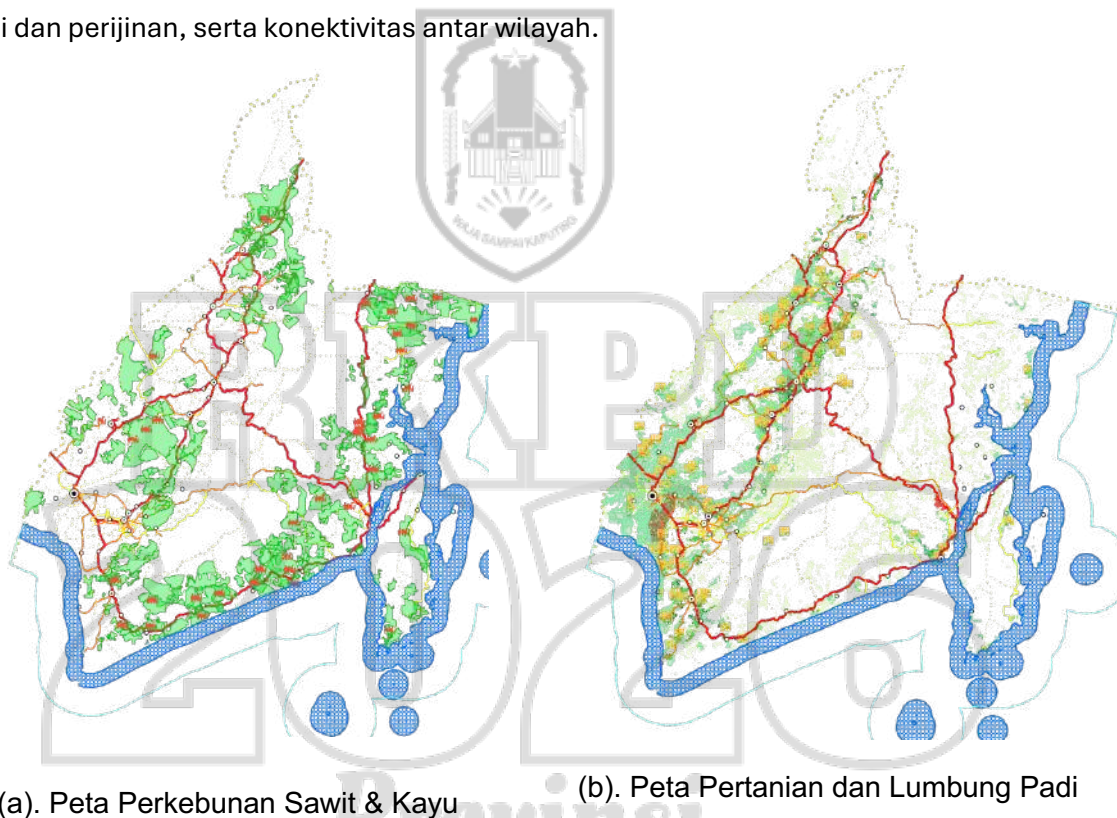
5.2 Kebijakan Pembangunan Kewilayahan

Posisi Kalimantan Selatan yang dilalui oleh jalur ALKI II, serta ditetapkannya Kalimantan Timur sebagai Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Kalimantan Tengah sebagai kawasan *food estate*, memberikan peluang dan potensi bagi Kalimantan Selatan untuk ikut menjadi wilayah maju yang berkelanjutan. Berdasarkan arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025 – 2029, Kalimantan Selatan ditetapkan sebagai Gerbang Logistik Kalimantan. Oleh karena itu, Kalimantan Selatan perlu mempersiapkan diri dalam menyambut hal tersebut, baik kesiapan SDMnya maupun infrastrukturnya.

Pada tahun 2023, Bappeda telah melakukan penyusunan dokumen Rancangan Kewilayahan Provinsi Kalimantan Selatan, dimana di dalamnya memuat pembagian Kalimantan Selatan menjadi 3 (tiga) klaster wilayah untuk lebih memudahkan dalam perencanaan pembangunan dan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah di Kalimantan Selatan. Adapun pembagian klaster-klaster tersebut, antara lain klaster A Banjarbakula (Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar, dan Kabupaten Tanah Laut), klaster B Banua Anam (Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Balangan, dan Kabupaten Tapin), dan klaster C Saijaan-Bersujud (Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru). Kajian tersebut dilanjutkan dengan penyusunan Rencana Pengembangan Wilayah Berbasis Spasial pada tahun

2024 yang lebih menekankan pada persiapan Kalimantan Selatan secara kewilayahan dalam konsep pengembangan gerbang logistik.

Meskipun terbatas, lahan di wilayah Kalimantan Selatan memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai areal pertanian, khususnya tanaman pangan dan perkebunan. Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kotabaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tabalong merupakan wilayah yang memiliki potensi besar bagi pengembangan pertanian tanaman pangan. Ke depannya, Provinsi Kalimantan Selatan dalam pengembangan sektor pertanian difokuskan kepada lembaga pengelola, peningkatan kualitas SDM, progres pengembangan kawasan, perkuatan teknologi, regulasi dan perijinan, serta konektivitas antar wilayah.

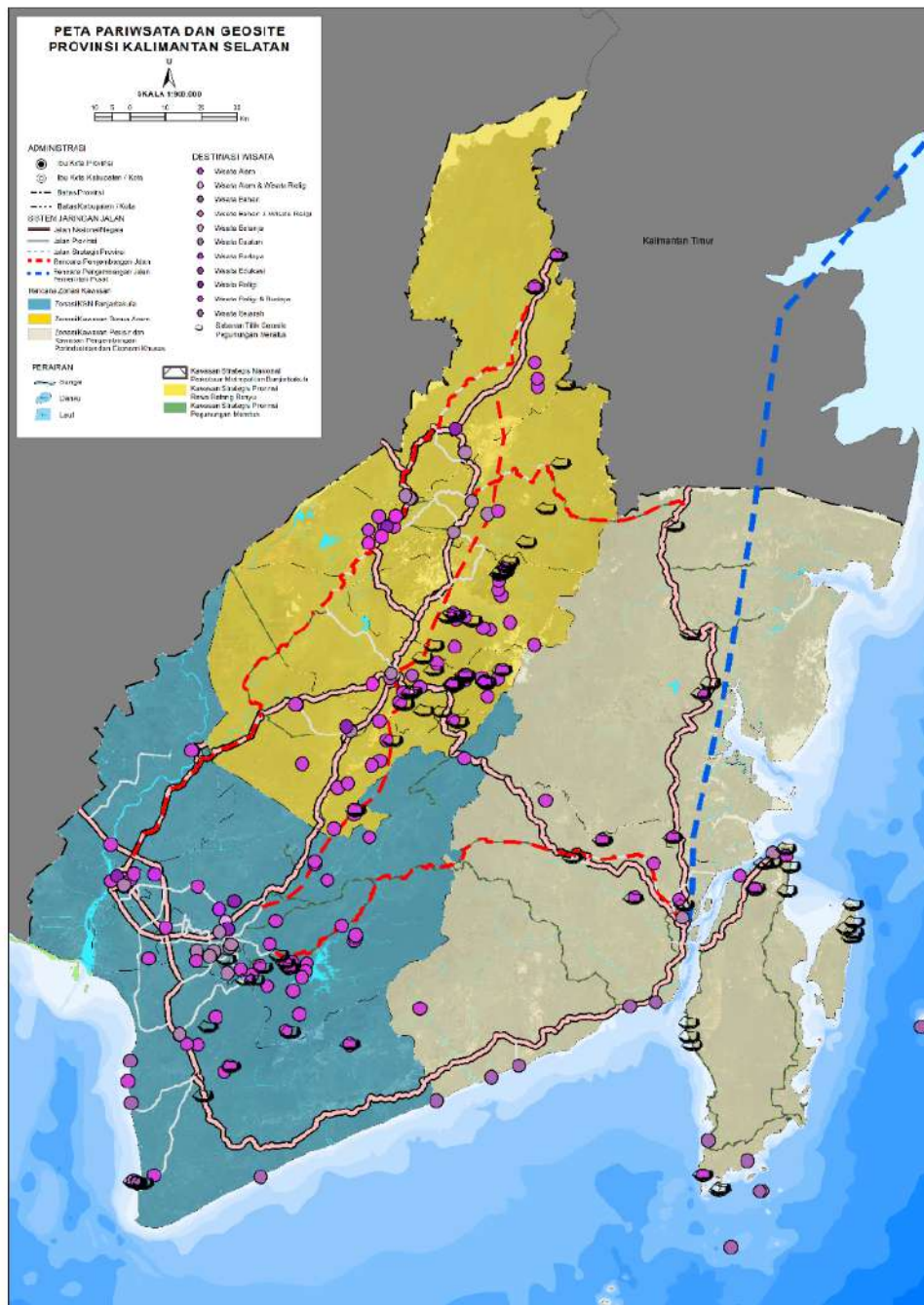


Gambar 5.18 Peta Potensi Pertanian dan Perkebunan Kalsel

Di sektor industri, Kalimantan Selatan memiliki potensi industri baik yang berbasis sumber daya alam, khususnya industri pengolahan hasil hutan dan hasil pertanian, maupun yang memanfaatkan dan mengandalkan teknologi seperti industri mesin, serta industri kimia dasar yang potensial untuk dikembangkan. Pembangunan industri diarahkan terutama untuk mengembangkan industri yang berorientasi ekspor dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sehubungan dengan itu, pembangunan industri dikembangkan secara bertahap melalui peningkatan keterkaitan industri dengan pertanian dan jasa, sehingga meningkatkan nilai tambah dan memperkuat struktur ekonomi daerah.

Pariwisata juga merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan. Kalimantan Selatan memiliki potensi wisata yang beragam, baik wisata alam maupun budaya yang dapat

dikembangkan secara lebih optimal dengan mempertimbangkan kekayaan alam provinsi yang terdiri atas sungai, hutan, serta latar belakang sejarah dan keanekaragaman seni dan budaya. Pengembangan sektor pariwisata akan mendorong industri ekonomi kreatif dan menarik sektor-sektor lainnya seperti transportasi, akomodasi, dan rumah makan. Pengembangan sektor ini juga dapat mengungkit ekonomi rakyat.



Gambar 5.19 Peta Sebaran Destinasi Wisata dan Geosite

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian integral dari pembangunan daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Arah pengembangan infrastruktur Kalimantan Selatan

difokuskan kepada optimalisasi kapasitas dan kualitas infrastruktur yang saat ini sudah tersedia, pengembangan infrastruktur baru dan perluasan layanan infrastruktur sesuai strategi peningkatan potensi ekonomi di kabupaten/kota, pengintegrasian pembangunan infrastruktur nasional, provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang diharapkan sebagai primer over seperti bandar udara, pelabuhan, jalan strategis nasional, jalan kolektif primer dan jalan arteri primer dan pengembangan sektor strategis pendukung pembangunan infrastruktur, antara lain pengembangan industri baja dan industri semen.

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas sangat penting untuk menyelaraskan pembangunan di daerah. Kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari indeks kualitas hidup atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Rendahnya IPM akan berakibat pada rendahnya produktivitas kerja dari penduduk. Produktivitas yang rendah berakibat pada rendahnya perolehan pendapatan. Rendahnya pendapatan menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin, sehingga rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya penduduk miskin. Arah pengembangan SDM Kalimantan Selatan difokuskan kepada SDM yang mendukung dalam sektor prioritas dalam pengembangan ekonomi daerah Kalimantan Selatan yaitu industri, pertanian dan pangan, pariwisata, dan digital.

5.2.1 Arah Kebijakan Kewilayahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 telah disahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 dan menjadi acuan dalam pengembangan wilayah di seluruh Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2026 juga mengacu pada RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, karena di dalam RTRW tersebut sudah ditetapkan mengenai pengembangan kawasan beserta infrastruktur-infrastruktur pendukungnya.

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat pengembangan kawasan strategis provinsi, dimana wilayah Kalimantan Selatan terdiri atas beberapa kawasan strategis. Kawasan strategis tersebut diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi, dan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah.

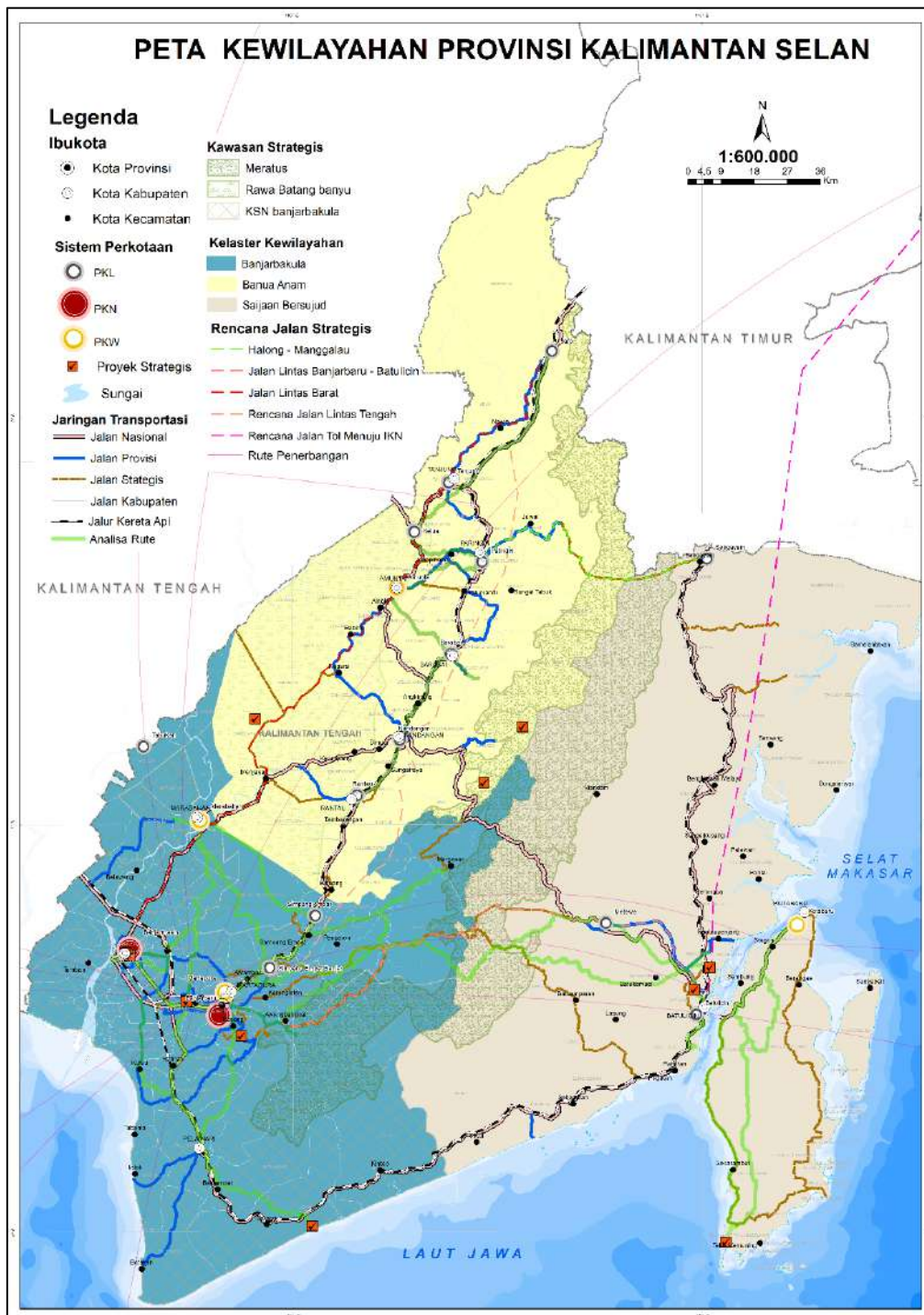
Tabel 5.14 Pembagian Kawasan Strategis di Provinsi Kalimantan Selatan

NO	TEMA KAWASAN	KAB/ KOTA (LOKASI)	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	ARAH PENGEMBANGAN
Kawasan Strategis Nasional dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi				
1	Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarkakula	Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Laut		• Melengkapi fasilitas pendukung • Mengembangkan infrastruktur strategis • Mengembangkan perdagangan, jasa, industri, dan pariwisata • Investasi pada modal
2	Batulicin	Kab. Tanah Bumbu		
Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi				
3	Kawasan Ekonomi Setangga	Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru		Pengembangan di sekitar kawasan industri
4	Kawasan Rawa Batang Banyu	Kab. Barito Kuala, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Hulu Sungai Utara, Kab. Tabalong, Kab. Tapin	Peningkatan produksi pangan daerah	Pengembangan pertanian dan agroindustri yang berdaya saing, produktif dan berwawasan lingkungan
4	Kawasan Sekitar Industri Batulicin	Kabupaten Tanah Bumbu		Kawasan yang berbasis pada pengembangan industri, perdagangan dan jasa pada komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, karet, kepelabuhanan, maritim.
5	Kawasan Sekitar Industri Kotabaru	Kabupaten Kotabaru		Pengembangan industri, Perdagangan, jasa pada komoditas besi baja, batubara, semen, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim yang meliputi Kawasan Industri Tarjun, Pelabuhan Mekar Putih, Pelabuhan Tanjung Pemancingan Pengembangan Kawasan Kota Terpadu Mandiri Sengayam
6	Kawasan Industri Jorong dan sekitarnya	Kabupaten Tanah Laut		Pengembangan industri, perdagangan, jasa dengan komoditas besi baja, batubara, kelapa sawit, industri pengolahan, kepelabuhanan, maritim dan energi
7	Kawasan Peruntukan Industri Seradang	Kabupaten Tabalong		Kawasan Industri Unggul dari Sektor Primer yang Berbasis Eco-Spasial dan Berintegritas

NO	TEMA KAWASAN	KAB/ KOTA (LOKASI)	ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	ARAH PENGEMBANGAN
8	Kawasan Sentra Energi dan Pangan	Kabupaten Kotabaru		Pengembangan sentra energi dan pengembangan sentra pangan yang terintegrasi dengan industri pengolahnya
Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup				
9	Kawasan Pegunungan Meratus	Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Hulu Sungai Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah, Kab. Kotabaru, Kab. Tabalong, Kab. Balangan, Kab. Tapin, Kab. Tanah Bumbu		Pusat keanekaragaman hayati melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan geologi dan antropologi, serta konservasi sumber daya alam yang berkelanjutan
10	Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Kab. Tanah Laut, Kab. Banjar, Kab. Kotabaru, Kab. Barito Kuala, Kab. Tanah Bumbu, Perairan Laut Jawa, dan Perairan Selat Makassar		Pengelolaan sumber daya WP3K Kalimantan Selatan yang maju, sejahtera dan berkelanjutan

Sumber: Perda No. 6 Tahun 2023 tentang RTRW Provinsi Kalimantan Selatan 2023-2043

RKPD
2026
Provinsi
Kalimantan Selatan



Gambar 5.20 Peta Kewilayahan Kalimantan Selatan

Dengan memperhatikan distribusi penduduk pada masing-masing wilayah kabupaten/kota, sistem pusat permukiman Provinsi Kalimantan Selatan terbagi atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lingkungan (PKL). Pembagian sistem pusat permukiman tersebut antara lain:

1. Pusat Kegiatan Nasional (PKN) terdapat di Kawasan Perkotaan Banjarmasin - Banjarbaru - Banjar - Barito Kuala - Tanah Laut yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi

berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, industri, industri kelautan, pertanian dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan

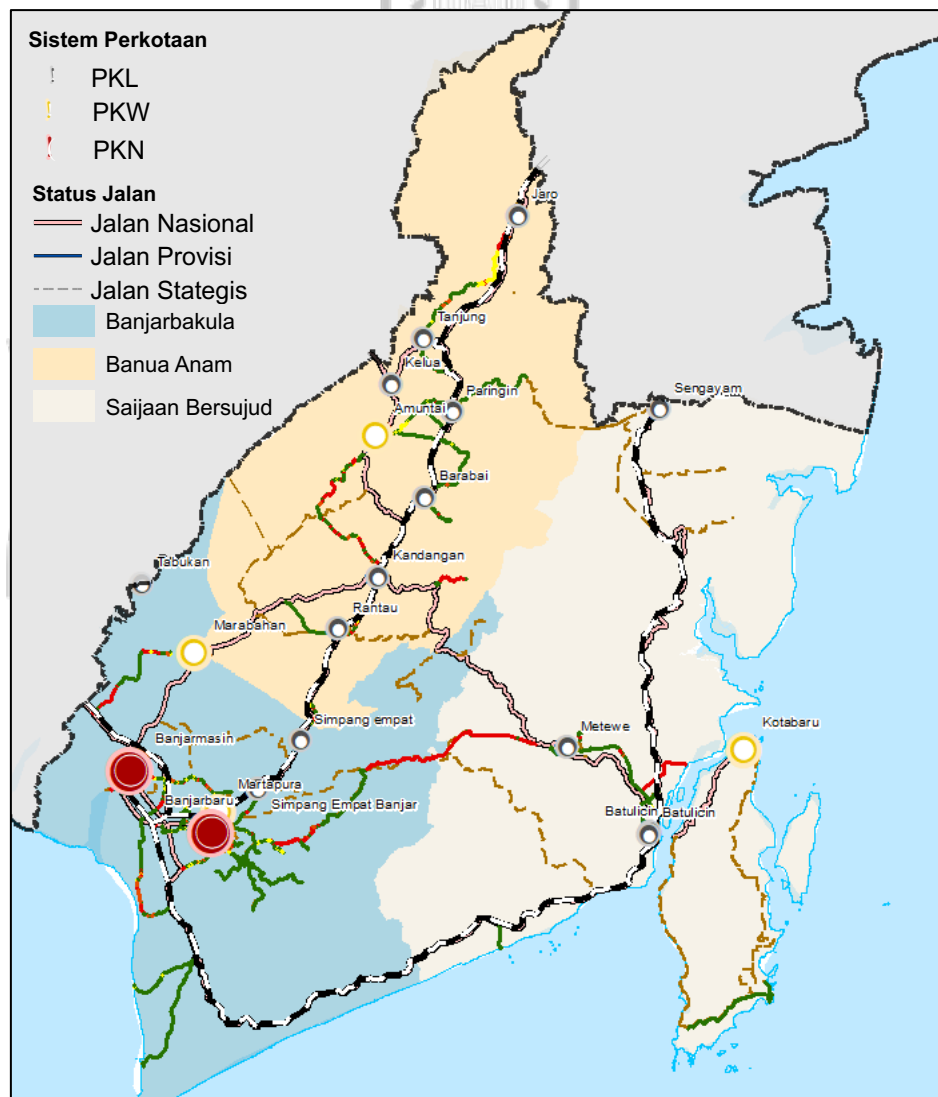
2. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), meliputi:

- a. Marabahan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan industri pengolahan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pengembangan perkantoran kabupaten, pusat pengembangan transportasi, pusat kesehatan, pusat pengembangan perdagangan, perbankan dan jasa regional, pusat pendidikan, pusat permukiman perkotaan, dan pusat pariwisata sungai;
- b. Martapura di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pariwisata dan kegiatan keagamaan skala regional dan nasional, serta pusat perdagangan dan jasa skala internasional;
- c. Amuntai di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan jasa dan komersial, industri pengolahan, wisata budaya, pertanian dan perikanan; dan
- d. Kotabaru di Kabupaten Kotabaru yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata dan jasa lingkungan.

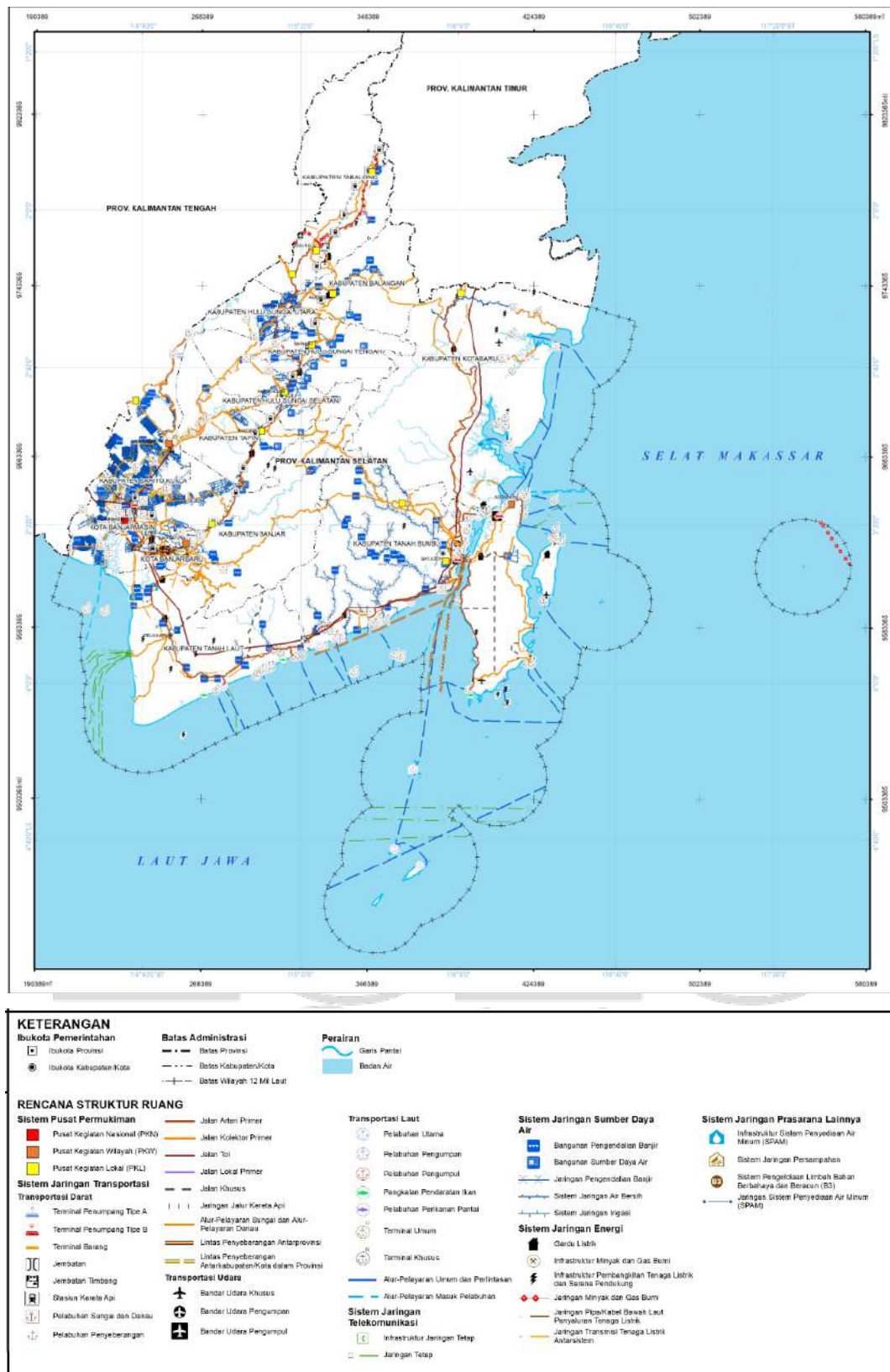
3. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang ditetapkan oleh pemerintah daerah provinsi. PKL merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

- a. Tanjung di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan publik dan perdagangan jasa;
- b. Simpang Empat - Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu yang memiliki fungsi sebagai pusat pelayanan transportasi regional dan internasional, pusat kawasan industri, pusat pemerintahan dan pelayanan publik skala regional, kawasan permukiman perkotaan, dan kawasan perdagangan dan jasa;
- c. Kandangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki fungsi sebagai kawasan jasa pemerintahan umum skala regional, jasa pariwisata skala regional, dan permukiman;
- d. Rantau di Kabupaten Tapin yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian dan pariwisata;
- e. Barabai di Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa;
- f. Paringin di Kabupaten Balangan yang memiliki fungsi sebagai pusat ekowisata, wisata budaya skala regional;

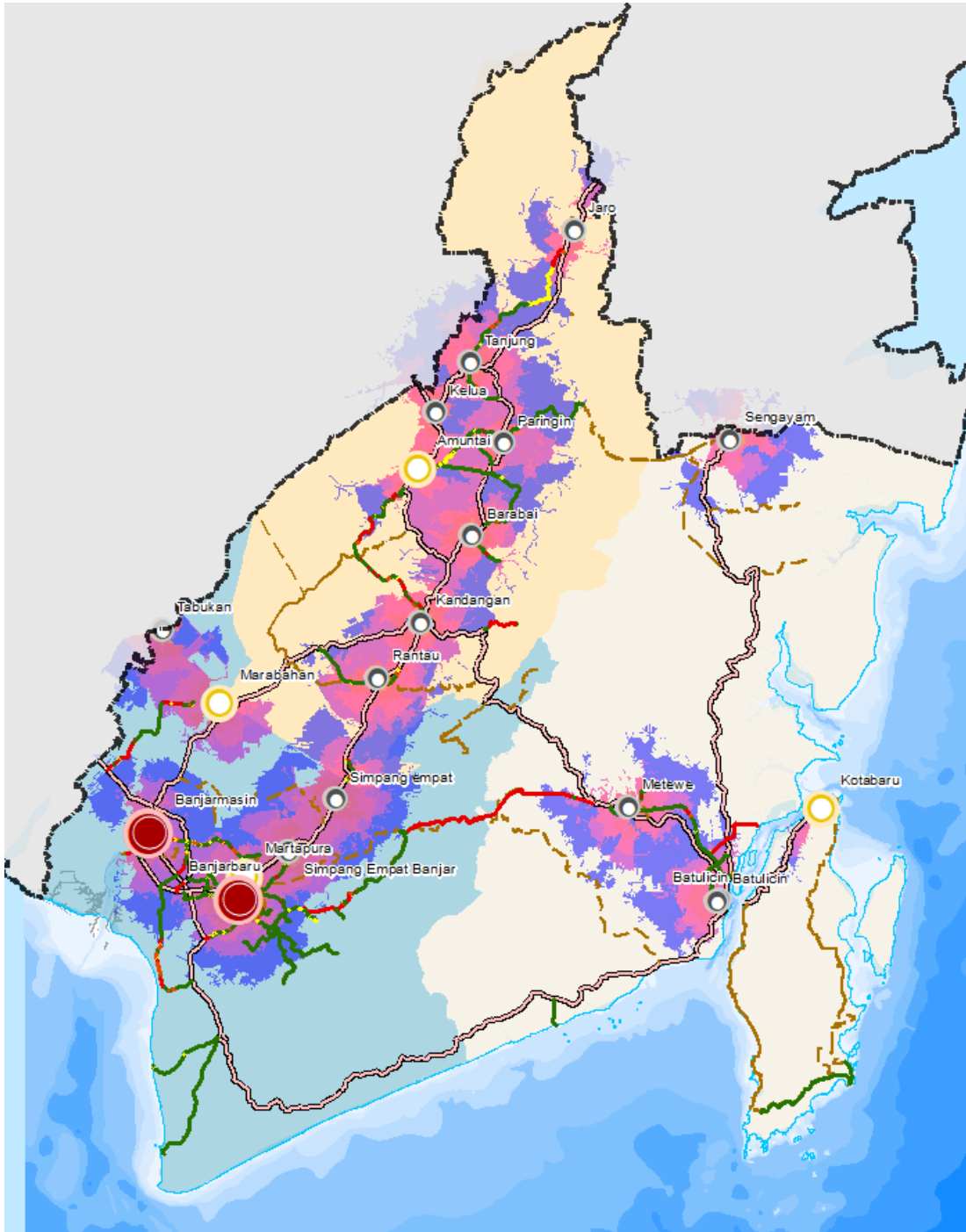
- g. Tabukan di Kabupaten Barito Kuala yang memiliki fungsi sebagai pusat perikanan, pusat pemerintahan kecamatan, pusat pengembangan industri skala besar, pusat pengumpul komoditas hasil pertanian dan perkebunan, pusat pengembangan perumahan dan fasilitas penunjangnya, pusat pelayanan lintas kecamatan, pusat kesehatan, pusat pendidikan, dan pusat pengembangan pelabuhan sungai;
- h. Simpang Empat di Kabupaten Banjar yang memiliki fungsi sebagai pusat pemerintahan, permukiman, jasa pariwisata, pertanian dan perikanan;
- i. Kelua di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat perdagangan jasa;
- j. Jaro di Kabupaten Tabalong yang memiliki fungsi sebagai pusat pertanian, perikanan dan pariwisata;



Gambar 5.21 Peta Sistem Perkotaan di Kalimantan Selatan

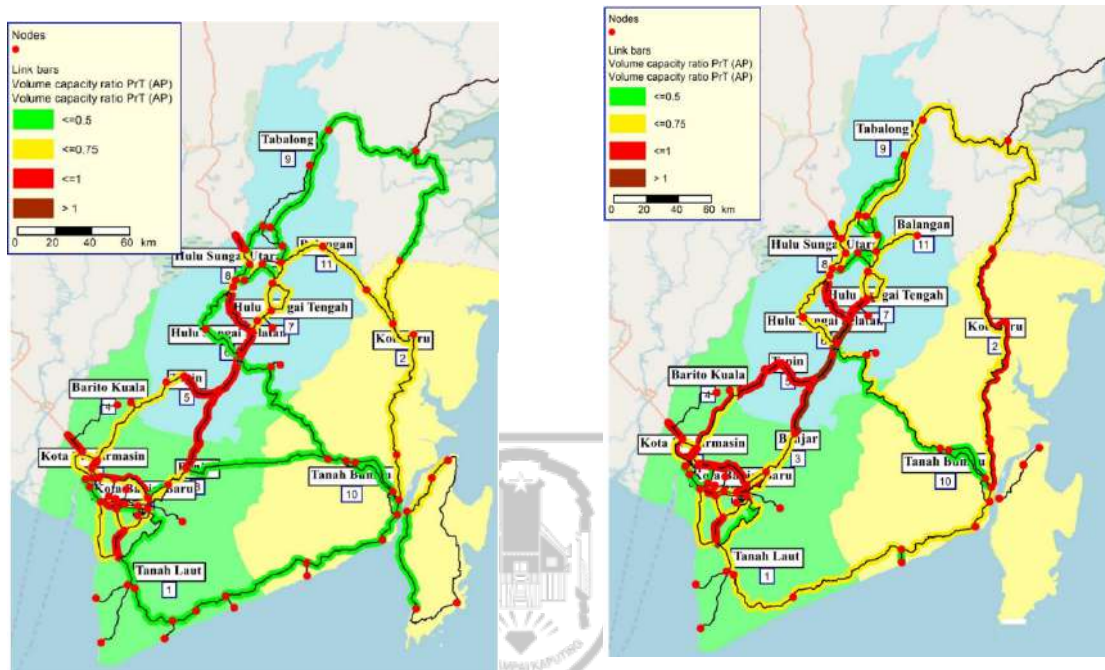


Gambar 5.22 Peta Struktur Ruang (RTRWP KALSEL 2023-2042)



Gambar 5.23 Peta Cakupan Layanan Sistem Perkotaan

Cakupan layanan sistem perkotaan memiliki nilai layanan dengan jarak proyeksi 30 kilometer, ini menggambarkan jarak distribusi antar sistem perkotaan, pada peta cakupan layanan sistem perkotaan menggambarkan peran jalan lintas Banjarbaru -Batulicin memegang peran penting dalam memangkas jalur distribusi.



Gambar 5.24 Peta Proyeksi Kepadatan Jalan Nasional dan Provinsi Tahun 2024

Peningkatan jumlah kendaraan yang tentu berdampak dapat mengurangi waktu tempuh dikarenakan perbandingan volume dengan kapasitas meningkat terutama jaringan jalan di Kawasan Strategis Metropolitan Banjarbakula dan lintas penghubung Banjarmasin – Martapura – Rantau – Kandangan – Barabai - Amuntai. Berdasarkan hasil kajian pengembangan jaringan jalan Provinsi Kalimantan Selatan, diestimasikan perbandingan volume dengan kapasitas jaringan jalan nasional A. Yani akan meningkat, sehingga arus lalu lintas Jaringan Jalan Lintas Barat menjadi meningkat, dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara akan memicu peningkatan perbandingan volume dengan kapasitas di zona kawasan industri dan pesisir.

Hasil analisa proyeksi pengembangan ruas jalan nasional dan provinsi di Provinsi Kalimantan Selatan (2024 : Do-Something). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan serta perubahan status jalan di tahun 2024 akan berdampak menurunkan perbandingan volume dengan kapasitas VCR = 17,92% (tidak melakukan apapun) menjadi VCR = 5,66% (melakukan sesuai), mengalami penurunan sangat signifikan (-68,42%). Pengembangan jaringan jalan baru dan pelebaran jalan, serta perubahan status yang dikerjakan sampai tahun 2029 akan berdampak menurunkan VCR = 22,64% (*do-nothing*) menjadi VCR = 3,77% (*do-something*), mengalami penurunan sangat signifikan (-83,34%).

5.2.2 Arah Kebijakan Kewilayahan Berdasarkan Pembagian Klaster

5.2.2.1 Arah Kebijakan Banjarbakula dan Sekitarnya

Pada tahun 2024, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut telah disahkan melalui Peraturan Presiden No. 85 Tahun 2024 tentang RTR KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. Perpres tersebut mencakup keseluruhan wilayah Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Tanah Laut, sebagian wilayah Kabupaten Banjar, dan sebagian wilayah Kabupaten Barito Kuala.

Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antar kawasan berbasiskan pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 5.15 Kebijakan dan Strategi Kawasan Metropolitan Banjarbakula

NO.	KEBIJAKAN	STRATEGI
1	Pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat perdagangan jasa, pelayanan umum dan ekonomi berskala internasional, dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai kawasan pendukung perkotaan inti melalui kegiatan industri, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan permukiman perkotaan	a. Mengembangkan Kawasan Perkotaan Inti sebagai pusat pemerintahan provinsi, pusat pendidikan tinggi, pusat perekonomian skala regional, nasional, dan internasional sekaligus sebagai pintu gerbang skala regional, nasional, dan internasional melalui sektor perhubungan; b. Meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendorong berkembangnya potensi sektor pertanian dan industri agro; c. Meningkatkan keterkaitan Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya untuk mendorong perkembangan potensi sektor industri; d. Mengembangkan fungsi permukiman perkotaan pada Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dalam rangka mengantisipasi meningkatnya kebutuhan permukiman di Kawasan Perkotaan Inti e. Mempertahankan fungsi-fungsi pusat kegiatan utama dan kegiatan pendukung secara optimal; f. Mengendalikan pusat kegiatan yang berkembang tidak sesuai dengan fungsi dan konsep perkotaan; g. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi pusat pusat kegiatan baru yang mendukung pengembangan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula; dan h. Mengembangkan dan meningkatkan pertumbuhan dan distribusi penduduk melalui penyediaan kebutuhan lahan pengembangan pembangunan melalui manajemen lahan yang sesuai.

2	Penetapan dan pengembangan pusat pertumbuhan kelautan yang terintegrasi dalam rangka mendukung daya saing kawasan sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional;	a. Menetapkan dan mengembangkan sentra kegiatan perikanan sebagai pusat bahan baku, pengumpul, pengolah, dan distribusi produk perikanan b. Meningkatkan peran Pelabuhan Perikanan untuk optimalisasi usaha perikanan tangkap; c. Meningkatkan peran Pelabuhan laut untuk optimalisasi distribusi produk perikanan; d. Mengembangkan dan mengefektifkan sentra industri dan jasa maritim; e. Mengembangkan industri pengolahan ikan dalam rangka hilirisasi usaha perikanan tangkap dan budi daya; dan f. Menyediakan prasarana dan sarana pendukung kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa, serta industri dan pertanian.
3	Peningkatan konektivitas antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, serta dengan pusat pertumbuhan kelautan;	a. Mengembangkan jaringan transportasi yang terintegrasi dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan dan Kawasan Hutan; b. Mengembangkan sistem transportasi yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (Transit Oriented Development). c. Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang mengintegrasikan Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya dengan tetap memperhatikan pelestarian lingkungan; d. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang menghubungkan antar Kawasan Perkotaan Inti dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya; e. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang seimbang dan terpadu untuk menjamin aksesibilitas yang tinggi antara Kawasan Perkotaan Inti dengan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya, dan pusat pertumbuhan kelautan; f. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi laut yang terkoneksi dengan jaringan transportasi lainnya dalam mendorong konektivitas antarkawasan, distribusi barang dan jasa, pemerataan pertumbuhan, dan pengembangan ekonomi wilayah pesisir, dan mendukung kegiatan industri; dan g. Mengembangkan dan meningkatkan pelayanan transportasi udara melalui pengembangan bandar udara.
4	Pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan keterkaitan dan fungsi antarkawasan di dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula, serta antara	a. Meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan sistem jaringan prasarana regional pada perkotaan inti dan perkotaan sekitarnya melalui sistem kerja sama antarkabupaten/kota;

	Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula dengan wilayah di sekitarnya;	b. Mengembangkan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan fasilitas umum berskala regional dan nasional dalam mendukung pelayanan perkotaan inti dan perkotaan sekitarnya; c. Mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana pendukung industri agro dan maritim untuk menjamin aksesibilitas kegiatan produksi, pengolahan, dan distribusi hasil kegiatan dari hulu ke hilir; d. Mengembangkan dan meningkatkan sistem prasarana pendukung industri pengolahan untuk peningkatan investasi di Kawasan Industri; e. Meningkatkan penyediaan sistem prasarana permukiman, terutama permukiman di sepanjang aliran sungai, dalam rangka peningkatan kualitas hidup Masyarakat dan lingkungan; f. Mengembangkan dan meningkatkan kualitas sistem jaringan energi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pengembangan energi alternatif; g. Meningkatkan kualitas sistem jaringan telekomunikasi yang mencapai seluruh pusat kegiatan di Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula; h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya air melalui upaya konservasi dan pendayagunaan sumber daya air serta pengendalian daya rusak air; i. Mengembangkan dan mengatur jaringan transportasi laut termasuk Alur Pelayaran untuk mendukung konektivitas antara Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula dan wilayah sekitarnya; dan j. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana bawah laut.
5	Penetapan dan pemantapan fungsi lindung baik di darat maupun Perairan Pesisir dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan;	a. Menetapkan dan memantapkan Kawasan Lindung untuk perlindungan sumber air; b. Mencegah terjadinya alih fungsi lahan Kawasan Lindung dengan tetap mempertahankan fungsi lindungnya; c. Mengendalikan kegiatan budi daya yang berbatasan dengan Kawasan Lindung; d. Mengembalikan fungsi lindung bagi Kawasan Lindung yang mengalami alih fungsi dan merehabilitasi kerusakan fungsi lindung; e. Mengembangkan kegiatan Pariwisata berbasis ramah lingkungan; f. Melaksanakan mitigasi bencana alam dan perubahan iklim yang dapat mencegah dan menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, longsor, abrasi, dan gelombang pasang;

		g. Menetapkan sempadan sungai untuk menjamin kelestarian sungai; h. Menetapkan dan mengatur kawasan sempadan pantai untuk mendukung pembangunan berkelanjutan; i. Mengalokasikan ruang, menetapkan, dan mengatur pemanfaatan kawasan konservasi di wilayah pesisir dan laut; j. Meningkatkan pengawasan dan pemantauan kegiatan pemanfaatan Kawasan Lindung termasuk kawasan konservasi di laut; dan k. Mengoptimalkan ruang perikanan secara seimbang dan berkelanjutan di kawasan konservasi.
6	Pengembangan, pemantapan, dan pengendalian fungsi budidaya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan	a. Menetapkan lokasi dan arahan pemanfaatan kegiatan budi daya sesuai kriteria teknis dengan mempertimbangkan faktor fisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan negara; b. Mengembangkan kegiatan budi daya secara terpadu, serasi, dan selaras sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; c. Menetapkan arahan penataan Kawasan Permukiman di sempadan sungai dalam rangka mewujudkan Kawasan Permukiman yang layak huni dan tetap memperhatikan kearifan lokal; d. Mempertahankan kawasan penyangga lingkungan dan mengembangkan sentra produksi pangan untuk mendukung keberlangsungan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula; e. Mengembangkan dan mengelola prasarana waduk dan jaringan irigasi untuk mendukung pertanian; f. Mengoptimalkan alokasi Ruang darat, pesisir, dan laut untuk pengembangan usaha kegiatan dan hilirisasi perikanan; g. Mengembangkan konsep wanamina dan minapadi untuk optimalisasi produktivitas perikanan; h. Mengembangkan konsep agropolitan melalui penetapan keterkaitan fungsi kawasan penyedia lahan baku dan Kawasan Industri agro serta agrowisata; i. Mengembangkan dan mengatur ruang untuk kepelabuhanan, terminal untuk kepentingan sendiri, dan terminal khusus; j. Meningkatkan fungsi Kawasan Hutan produksi untuk menjaga fungsi daerah tangkapan air; k. Mengatur dan mengendalikan kegiatan budi daya dari hulu ke hilir yang berpotensi menimbulkan dampak ke lingkungan; dan

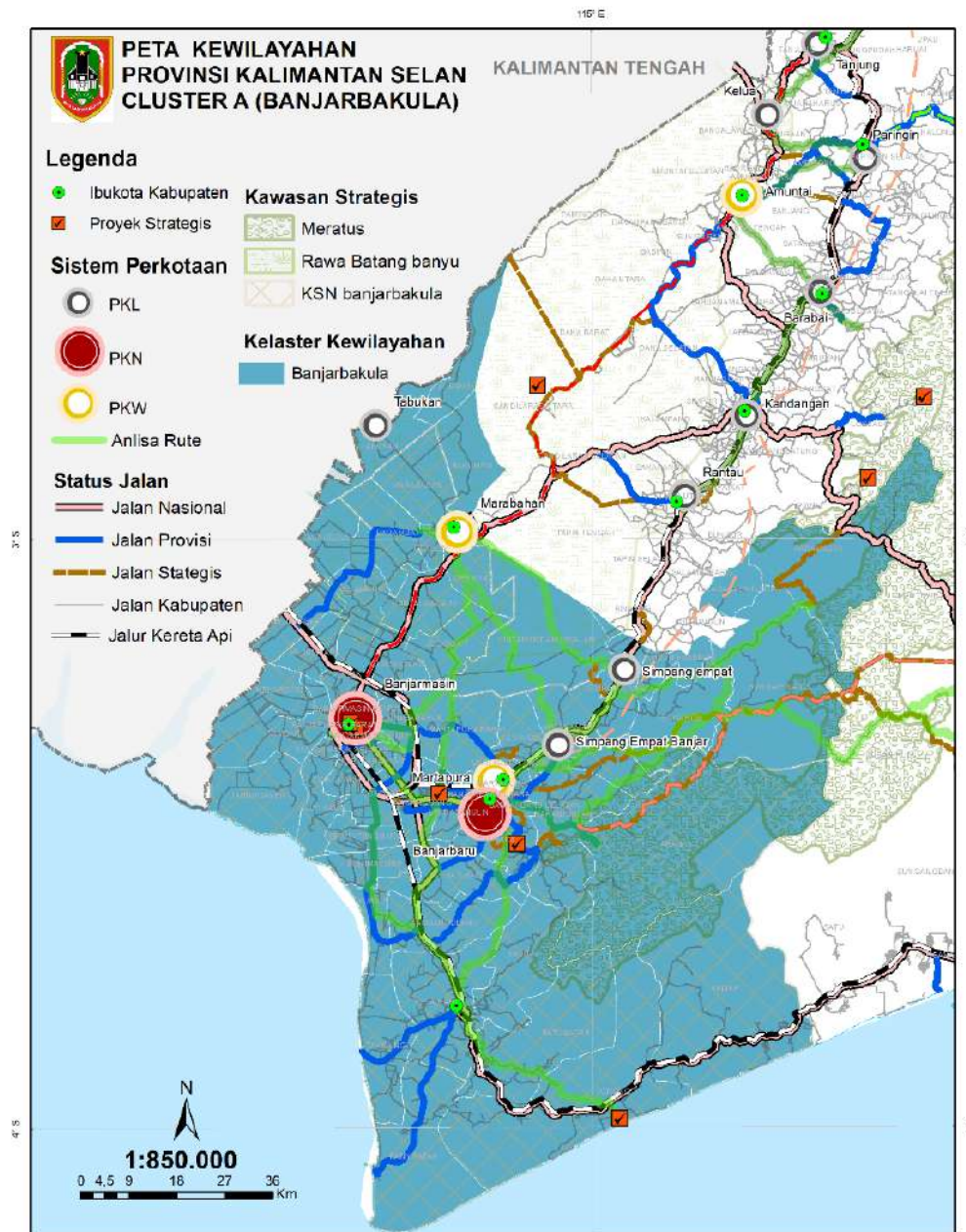
		l. Memantapkan fungsi wilayah pertahanan dan keamanan negara.
7	Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan perencanaan dan pembangunan antar sektor, antarkawasan, dan penguatan peran masyarakat.	a. Melakukan koordinasi, fasilitasi kerja sama, dan kemitraan dalam penyelarasan perencanaan, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pembangunan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula; b. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi pembangunan antarsektor, serta antara Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/ kota; c. Meningkatkan penguatan peran Masyarakat dalam proses perencanaan, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang perkotaan; dan d. Melindungi dan menjamin akses ruang untuk masyarakat lokal dalam pengusahaan kegiatan ekonomi.

Sumber: Perpres No. 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut

Pembagian klaster yang telah dilakukan, salah satunya bertujuan untuk mengakomodir sebagian wilayah Kabupaten Banjar dan Kabupaten Barito Kuala yang tidak masuk ke dalam Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. Hal ini dilakukan agar pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh bagian wilayah.

Zona Banjarbakula yang merupakan pusat perdagangan dan jasa, dimana wilayah inti adalah Banjarbaru dan Banjarmasin, sedangkan kawasan penyangga terdiri dari Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Banjar dan Kabupaten Tanah Laut.

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

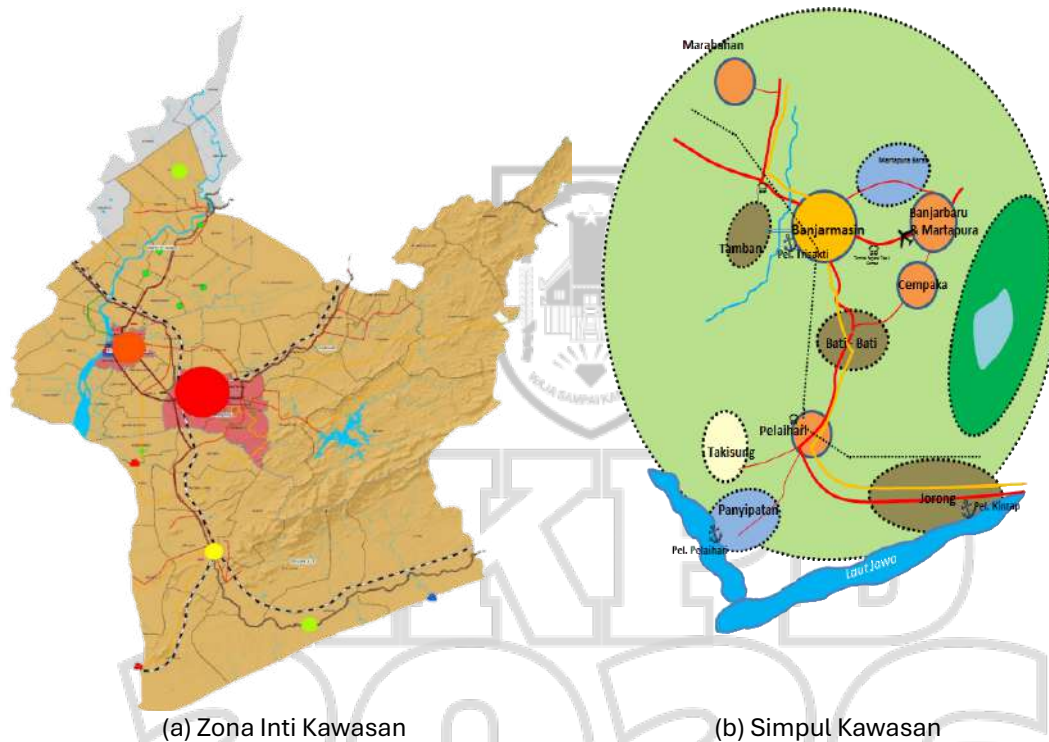


Gambar 5.25 Peta Klaster A - Banjarbakula

Kota Banjarmasin yang dijadikan sebagai pusat perbankan, perdagangan dan jasa, pusat pendidikan tinggi, pusat kesehatan, wisata budaya (pasar terapung) dan Kawasan Industri Mantuil yang simpul konektivitasnya pelabuhan Trisakti. Kota Banjarbaru yang merupakan ibu kota provinsi merupakan wilayah pusat pemerintahan, pusat perdagangan jasa, perhotelan, persampahan, Ekowisata & Wisata Geopark, Aero City, Sport City, dan sebagai pintu gerbang Kalimantan Selatan melalui Bandara Internasional Syamsuddin Noor.

Kawasan penyangga Banjarbakula, Kabupaten Barito Kuala diperuntukan sebagai pusat kegiatan pertanian dan perkebunan, kawasan pendukung ketahanan pangan kabupaten ini merupakan kawasan produksi beras terbesar di Kalimantan Selatan, dan juga pusat pendidikan

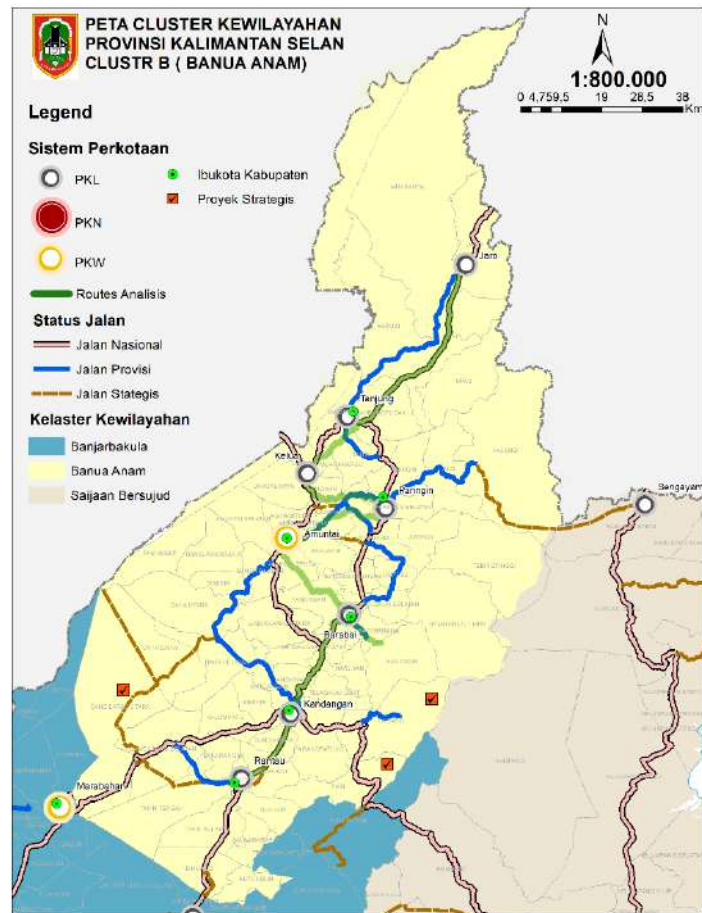
tinggi untuk wilayah (*hinterland*) wilayah Barito Kuala di sekitar kawasan inti. Kabupaten Banjar dengan potensi kawasan produksi beras terbesar kedua di Kalimantan Selatan yang pusat kegiatan pertanian dan perikanan dan juga ekowisata dan wisata geopark. Kabupaten Tanah Laut sebagai pusat pertanian, perikanan, peternakan, agribisnis, dan Kawasan Industri Jorong yang didukung simpul konektivitas Pelabuhan Swarangan.



Gambar 5.26 Peta Pengembangan Kewilayahan Zona Banjarbakula

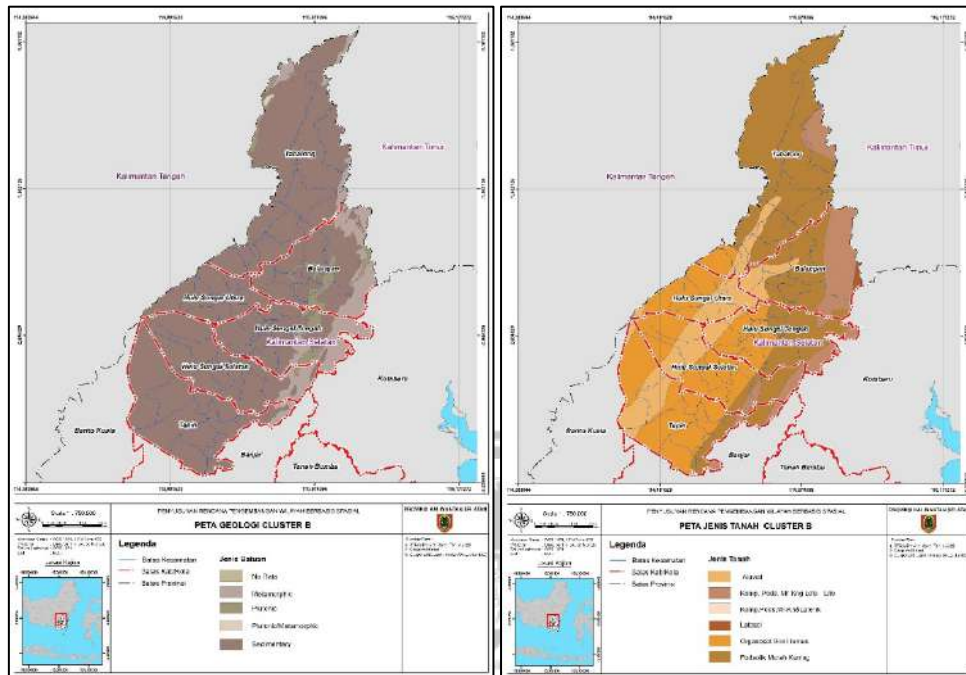
5.2.2.2 Arah Kebijakan Banua Anam

Wilayah Banua Anam merupakan wilayah ketahanan pangan dan kerajinan dengan potensi perkebunan terutama sayuran dan buah-buahan yang dapat menopang wilayah Banjarbakula dan Ibukota Nusantara, potensi perikanan air tawar yang besar yang perlu dikembangkan ke dalam ikan kemasan dan albumin ikan gabus agar mampu bersaing masuk ke pasar Ibu Kota Nusantara dan masuk ke pasar internasional. Industri perkebunan karet yang dihasilkan wilayah ini diharapkan mampu menyediakan kebutuhan di zona industri Batulicin dan Kotabaru, untuk itu perlu adanya jalur konektivitas yang menghubungkan wilayah gerbang ibukota seperti Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan memiliki jalur distribusi ke wilayah industri dan pesisir.



Gambar 5.27 Peta Klaster B - Wilayah Banua Anam

Berdasarkan kondisi Geologi di cluster ini adalah, bahwa daerah ini sebagian besar merupakan daerah subur dan sangat cocok untuk kegiatan bercocok tanam (pertanian dan perkebunan). Pada cluster ini memiliki potensi kekayaan sumberdaya mineral sehingga bisa dijadikan wilayah eksplorasi seperti untuk penggalian.



Gambar 5.28 Peta Geologi dan Jenis Tanah Cluster Banua Anam

Berdasarkan jenis tanah pada cluster ini didominasi tanah yang sangat lembab, rawa-rawa atau selalu tergenang air. Tanah jenis ini juga subur cocok untuk pertanian, namun masih dapat untuk didirikan bangunan diatasnya. potensi yang menjadi sector basis di Kawasan. Kawasan Klaster Banua Anam untuk mendukung Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik dengan potensi wilayah Pertanian (padi, Holtikultura), Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan tangkap dan budidaya (darat), Tambang (batubara, kapur, migas, dsb).

Kawasan Klaster Banua Anam merupakan perwujudan swasembada sektor pertanian pangan, hortikultura dan perkebunan yang memperhatikan ketahanan iklim. Rencana pengembangan berdasarkan prioritas dan menjadi sektor unggulan pada Klaster Banua Anam yaitu :

1. Pusat Produksi

- Pabrik Karet di Kabupaten Hulu Sungai Tengah
- Kawasan Industri dan rencana KPI Seradang Kabupaten Tabalong hilirisasi industri tambang (bahan bangunan - semen)
- Kawasan Industri Tapin (TIPE) di Kabupaten Tapin (industry agro)

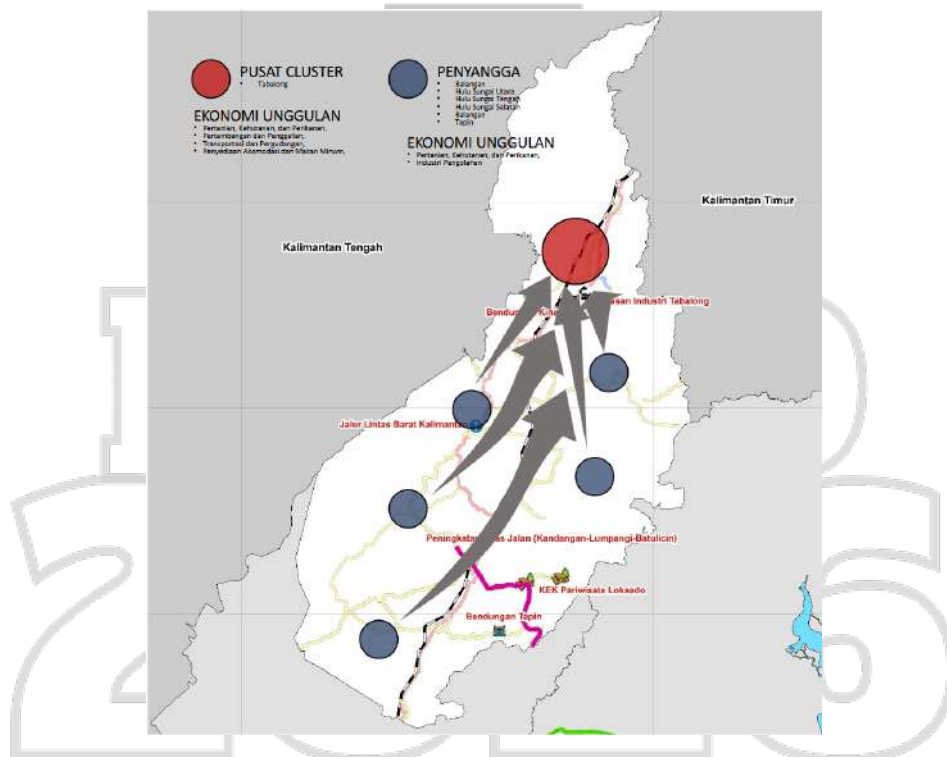
2. Pusat Distribusi:

- Kabupaten Tapin di Pelabuhan Margasari;
- Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Terminal Induk dan Cargo, Terminal Pasar kramat;
- Kabupaten Tabalong di Terminal Barang Murung Pudak dan Kelua, Penumpang tipe A, Bandara Udara Krambitan;

- Kabupaten Hulu Sungai Selatan di Terminal Penumpang Kandangan;
- Kabupaten Hulu Sungai Utara di Terminal Banua Lima, dan
- Kabupaten Balangan di Terminal Barang Pasar Batu Mandi dan Haur Batu.

3. Pariwisata

- Pegunungan meratus
- Loksado
- Wisata alam lainnya
- Sentra kerajinan dan kuliner



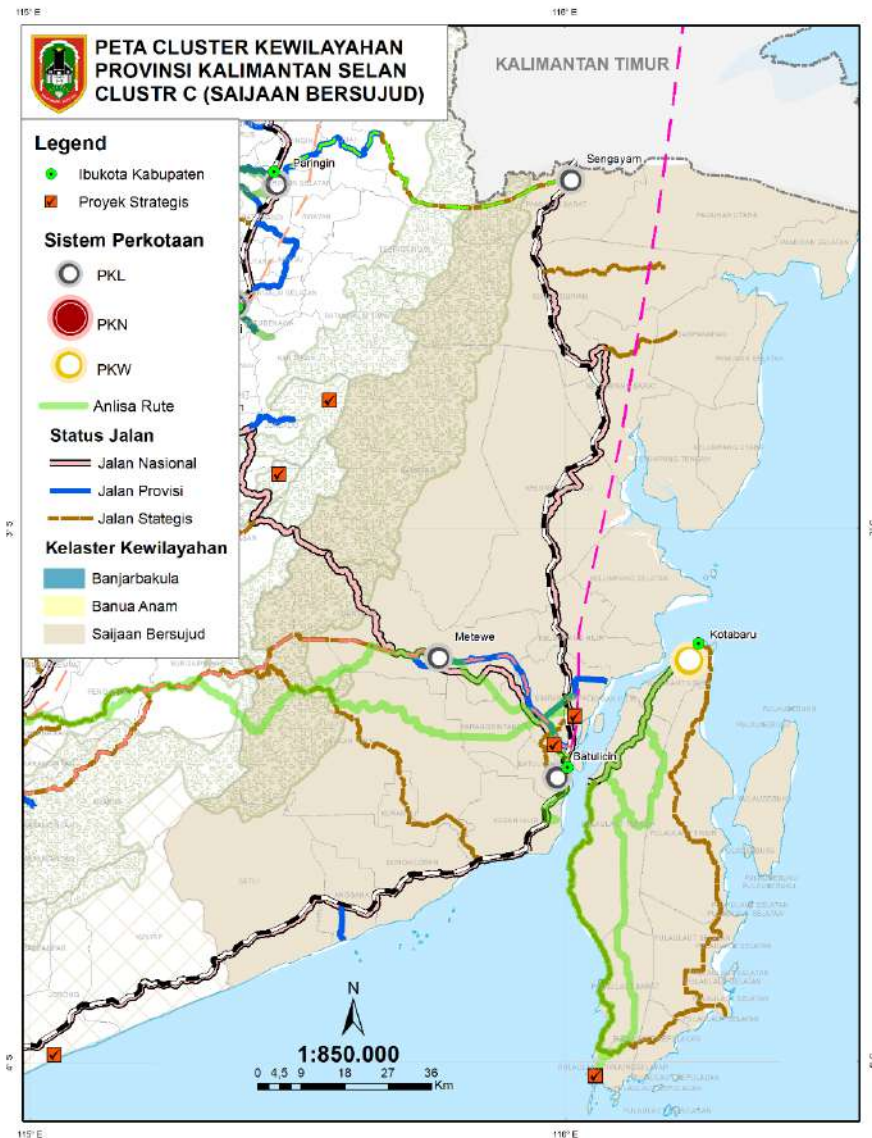
Sumber : Anlisa Kajian Kewilayahan, 2024

Gambar 5.29 Peta Arahkan Pusat Kegiatan, Potensi dan Distribusi
Klaster Banua Anam

Untuk mewujudkan transformasi ekonomi sebagai misi yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan, maka pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, berkelanjutan, dan beradaptasi dengan perubahan iklim untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan, menjaga produktivitas pertanian dan perkebunan, serta peningkatan kesejahteraan petani di Klaster Banua Anam.

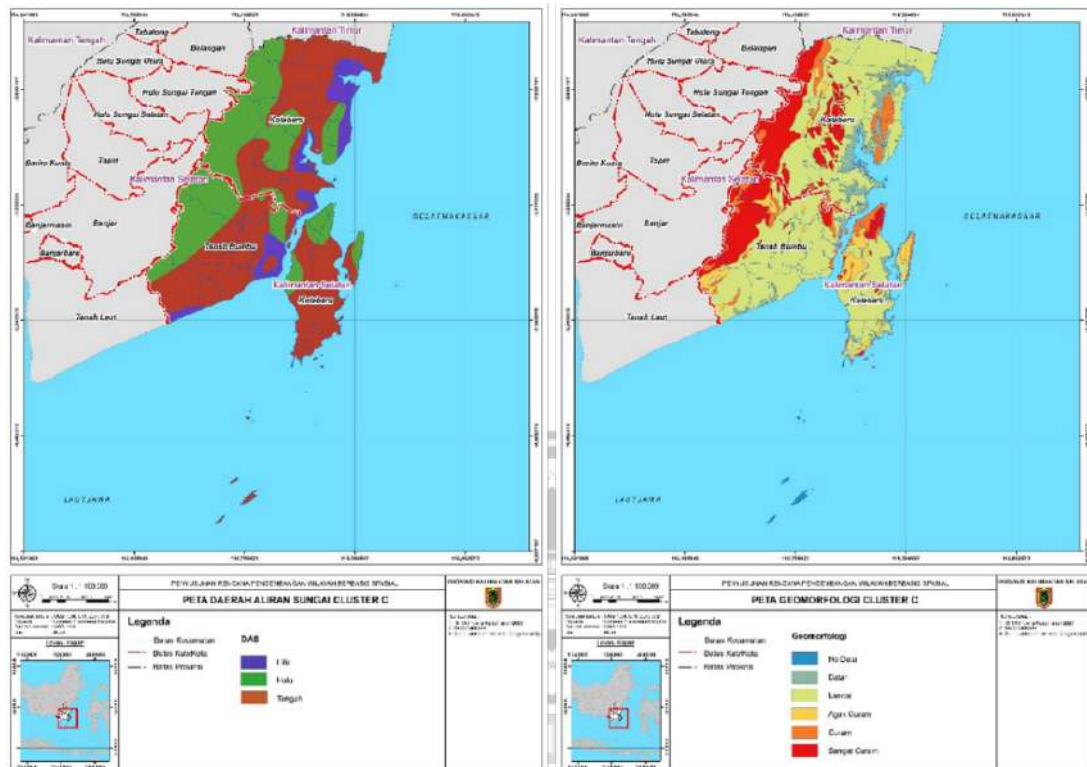
5.2.2.3 Arah Kebijakan Wilayah Saijaan Bersujud

Wilayah industri dan pesisir merupakan kawasan hilirisasi hasil tambang dan perkebunan, pusat pengembangan perikanan air laut, geosite dan wisata pantai dan laut. Wilayah ini dengan potensi pelabuhan internasional dan laut dalam setara berada di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI II) potensi ini, diharapkan menjadikan wilayah ini penyedia bahan baku industri besar dan menengah.



Gambar 5.30 Peta Klaster C - Wilayah Pesisir dan Industri

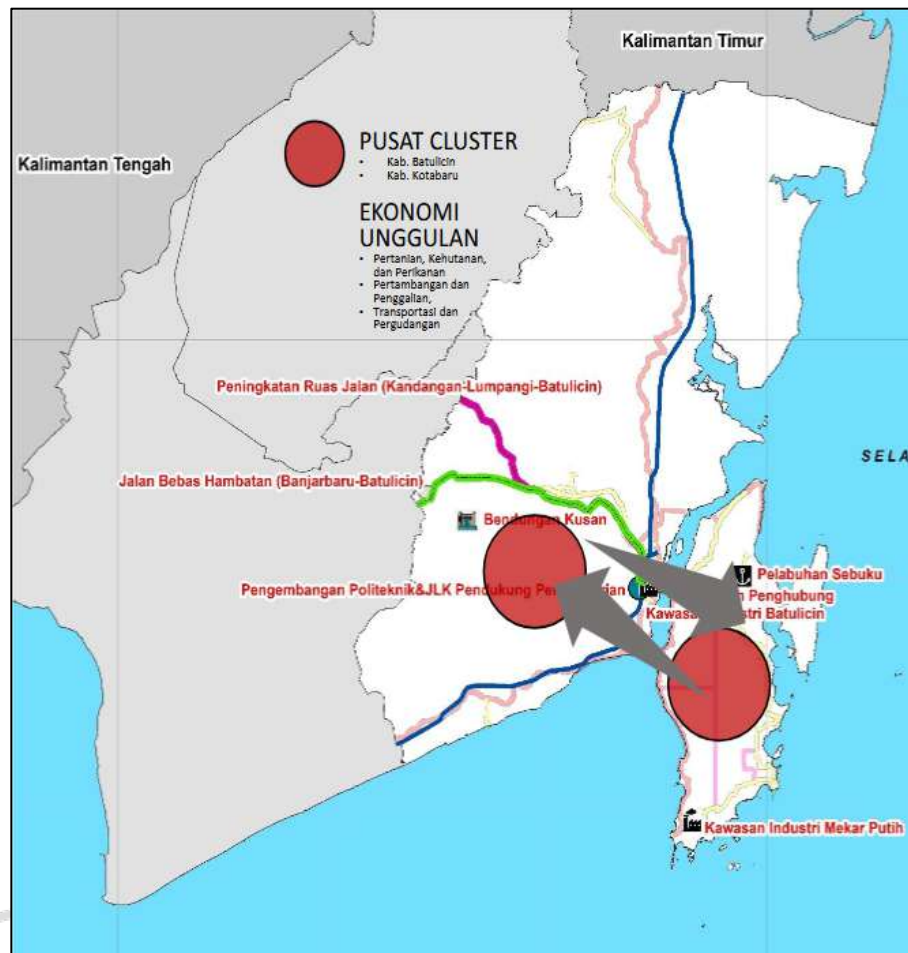
Dengan potensi mangrove dan terumbu karang serta ikan laut yang kaya diharapkan menjadi wilayah perikanan terpadu yang terkoneksi dengan wisata pesisir dan pulau-pulau kecil. Agar dapat menjadikan potensi alam berkelanjutan dan ramah lingkungan. Peningkatan dan pelestarian mangrove merupakan kegiatan strategis dalam pencegahan erosi dan pengrusakan pantai agar dapat menjaga ekosistem air dan perikanan di pesisir.



Gambar 5.31 Peta DAS dan Geomorfologi Wilayah Saijaan Bersujud

Pada cluster ini memiliki daya dukung air kategori baik sehingga memiliki kemampuan tinggi dalam penyediaan sumber daya air yang dapat menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan air minum. Berdasarkan kondisi geomorfologi yang relatif datar dan landai ini memberikan keuntungan dalam pengembangan infrastruktur di Cluster ini. Wilayah Kalimantan Selatan yang banyak dialiri sungai ini menjadikan potensi besar terhadap pengembangan pertanian, pariwisata, dan perdagangan.

*Provinsi
Kalimantan Selatan*



Gambar 5.32 Peta Arahkan Pusat Kegiatan, Potensi dan Distribusi Klaster Saijaan Bersujud

Berdasarkan hasil analisa potensi wilayah, maka pusat Klaster ini berada di Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru dengan ekonomi unggulan Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan serta Industri Pengolahan. pengembangan hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA) unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, serta berorientasi ekspor.

Rencana pengembangan berdasarkan prioritas dan menjadi sektor unggulan pada Klaster Saijaan Bersujud yaitu:

1. Pusat Produksi

- Kawasan Industri Batulicin di Kabupaten Tanah Bumbu : industry agro
- KEK Setangga : Industri Hilirisasi Sawit (Biodiesel, Refinery Minyak Goreng, kimia), Smelter, besi.
- KI Sebuku : hilirisasi industry logam (besi baja, baterai, kimia, dsb)

- Rencana KEK Mekar Putih : hilirisasi hasil tambang Batubara, pasir kwarsa (syngas, pupuk, kimia, baterai, besi baja, plastik, kaca, bahan bangunan, dsb), hilirisasi perkebunan (CPO, olahan makanan, pupuk, kimia, dsb),
- KI Tarjun → hilirisasi industri perikanan (pengalengan, olahan hasil laut, cold storage, pabrik es batu, dsb).

2. Pusat Distribusi

- Kabupaten Tanah Bumbu : Pelabuhan KEK Setangga, Pelabuhan Batulicin, Pelabuhan Satui, Bandara Bersujud, Terminal Barang Angsana, Terminal Kersik Putih.
- Kabupaten Kotabaru : Pelabuhan Kotabaru, Pelabuhan Stagen, Pelabuhan Sebuk, Pelabuhan Mekarputih, Bandara Gusti Syamsir Alam, pengembangan terminal penumpang di Sengayam.

3. Sektor Pariwisata

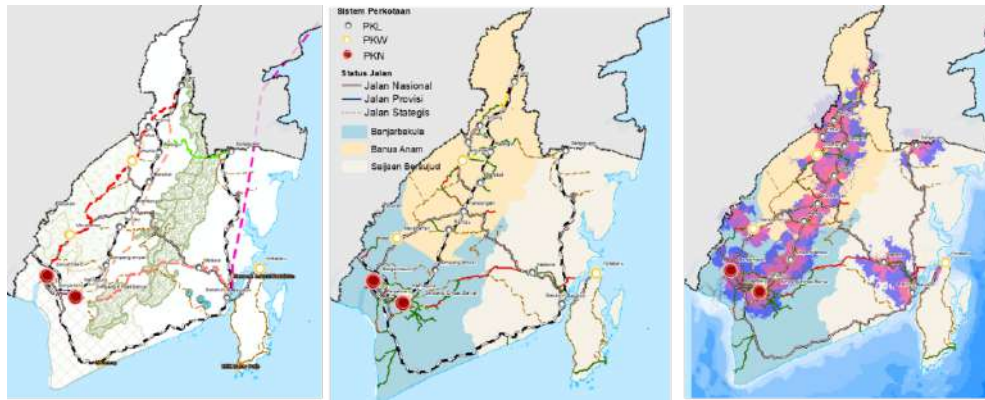
- Wisata Alam yaitu : Pulau Samber Gelap, Pantai Teluk Tamiang, Pulau Tanjung Kunyit, Pulau Denauan, Pulau Pemalihan, Pulau Birah-Birahan, Pantai Gedambaan (Sarang Tiung), Pantai Teluk Gosong, Goa Temuluang, Bukit Mamake, Bukit Bapake, Hutan Meranti, Air Terjun Tumpang Dua dan wisata alam lainnya.

5.2.3 Analisa Layanan Kawasan

Cakupan layanan kawasan merupakan analisa ketersediaan akses dan fasilitas pendukung konektivitas, analisa ini membantu menggambarkan pusat-pusat produksi terhadap kemampuan distribusinya. Selain itu juga dapat menggambarkan seberapa mudah masyarakat dapat mengakses layanan, dan dapat mengevaluasi kesenjangan layanan antar kawasan;

5.2.3.1 Cakupan Layanan Sistem perkotaan

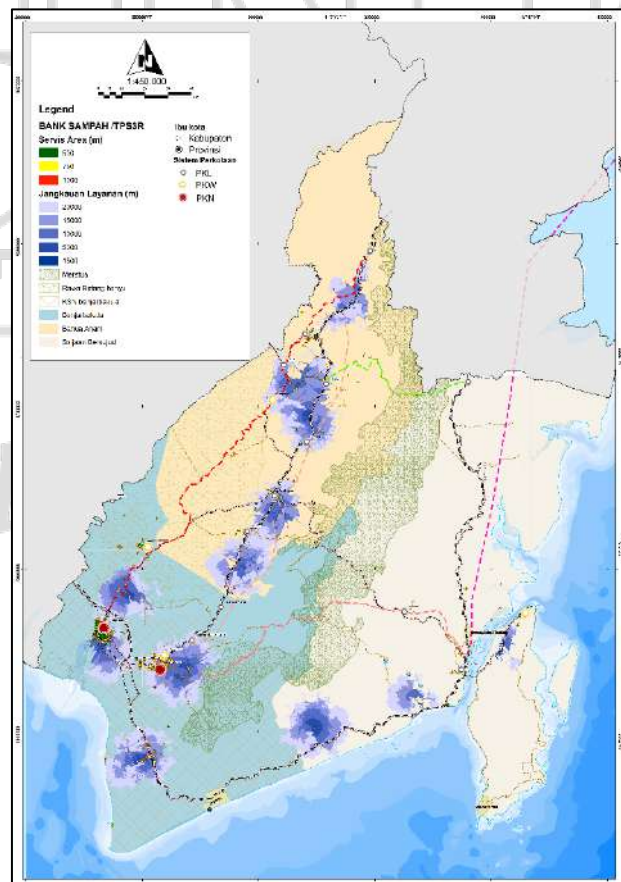
Sistem Perkotaan yang memiliki konektivitas yang baik tentunya akan dapat memudahkan distribusi barang dan jasa, selain itu setiap perkotaan memiliki potensi yang berbeda-beda, perbedaan ini akan menjadi saling melengkapi dengan konektivitas yang mantap.



Gambar 5.33 Peta Sistem Perkotaan

5.2.3.2 Cakupan Layanan Fasilitas Persampahan

Sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, berkelanjutan, dan melibatkan seluruh pihak, mulai dari individu, komunitas, hingga pemerintah dan sektor swasta. Dengan menerapkan prinsip dan praktik ini, kita dapat menciptakan sistem manajemen persampahan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

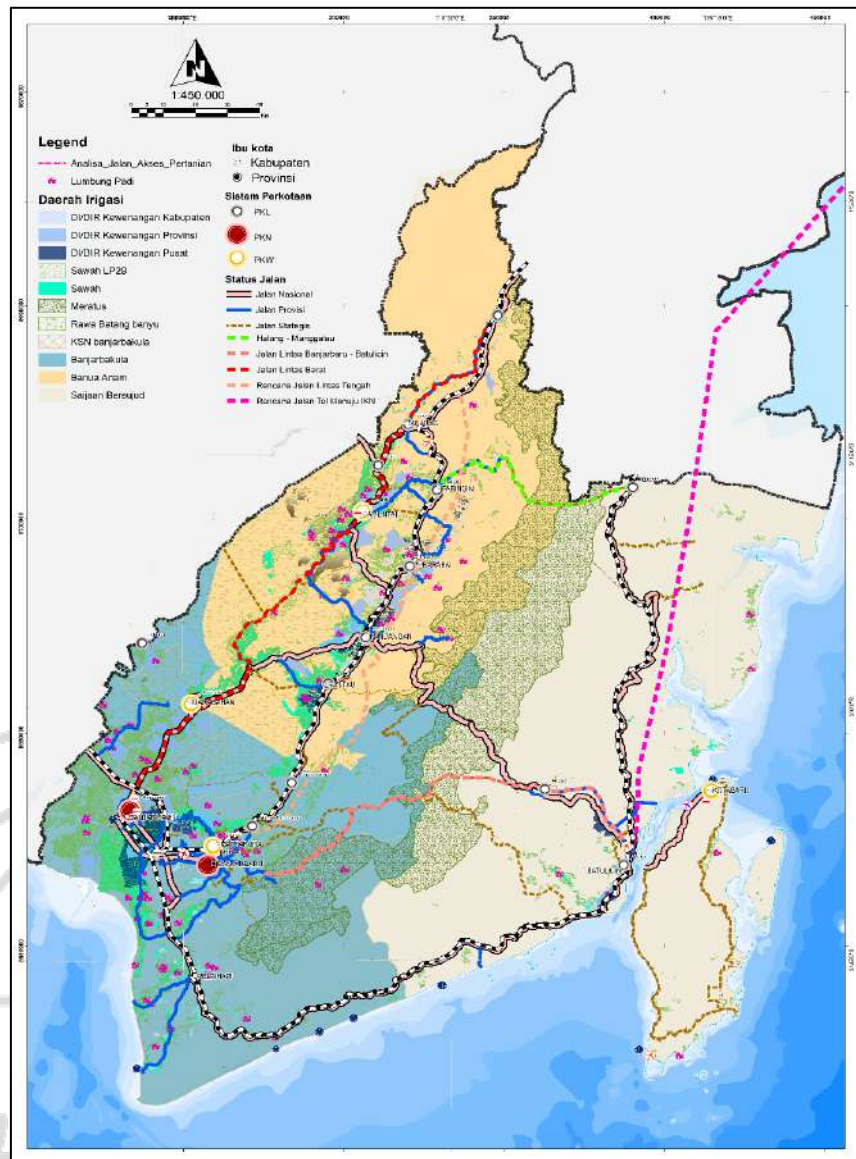


Sumber : Analisa Data Persampahan dari SICIPI PUPR Prov.Kalsel dengan model Network Analyst

Gambar 5.34 Peta Cakupan Layanan Fasilitas Persampahan

5.2.3.3 Cakupan Layanan Irigasi Pertanian

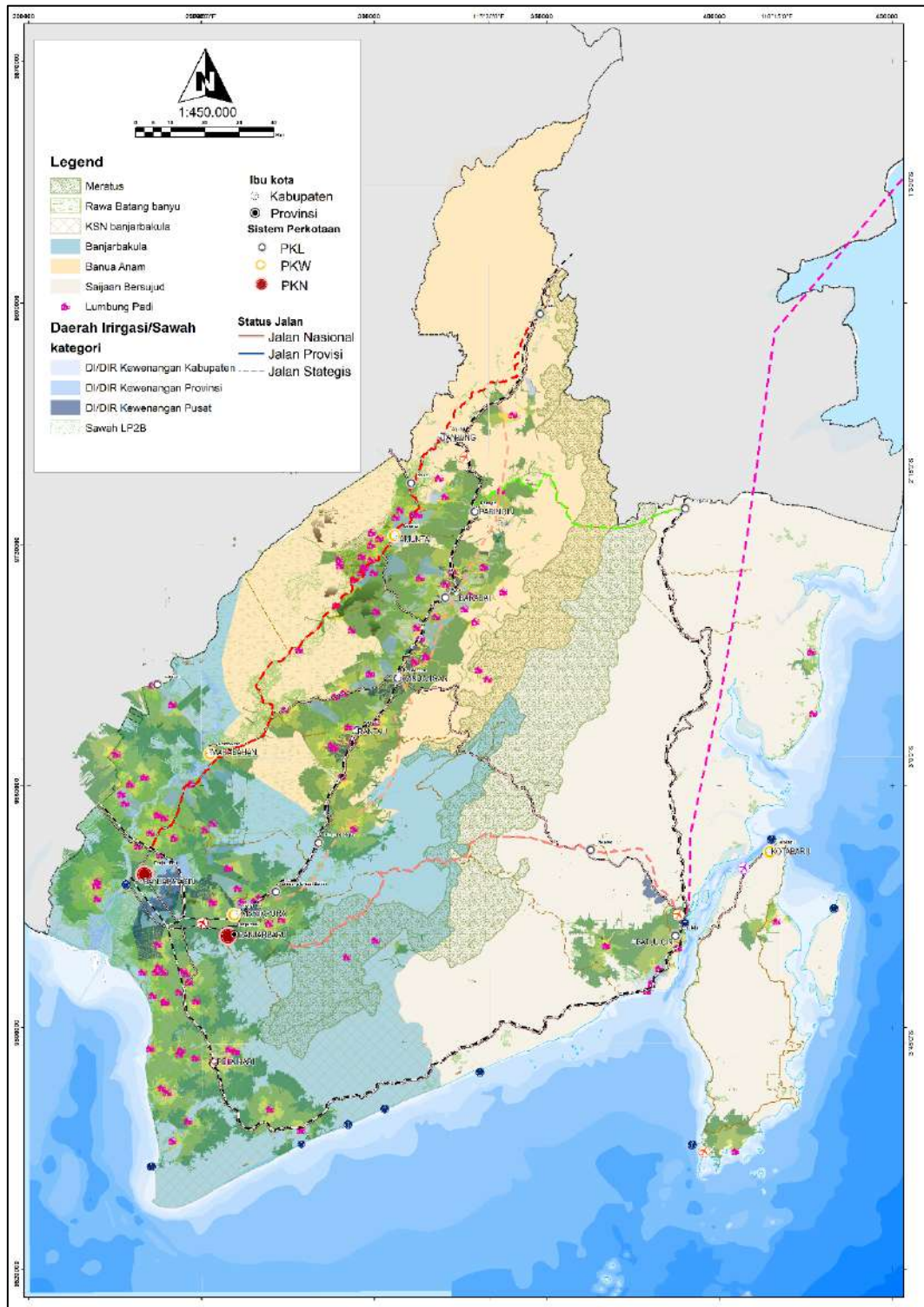
Pengembangan daerah irigasi sudah bersesuaian dengan areal persawahan yang berada di kawasan pengembangan pertanian pangan.



Sumber : Peta Daerah Iriqasi, LBS 2021 DPKP Prov.Kalsel

Gambar 5.35 Gambar 5. 1 Peta Daerah Irigasi

Cakupan layanan lumbung pangan dengan daerah irigasi dan sawah menunjukan secara akses cukup baik, hanya beberapa lokasi lumbung pangan yang memiliki jangkaun layanan yang terisolir, ini dikarenakan berada pada zona pegunungan meratus. Dari segi kawasan rawa batang banyu yang diperuntukan untuk pertanian dan perkebunan secara sistem layanan memadai, namun masih perlu di tingkatkan untuk mencakup wilayah pertanian yang dekat dengan perbatasan Kalimantan Tengah, selain itu peningkatan kualitas jaringan jalan untuk melayani angkutan pangan menui Kelaster Kawasan Sajaan Bersujud.

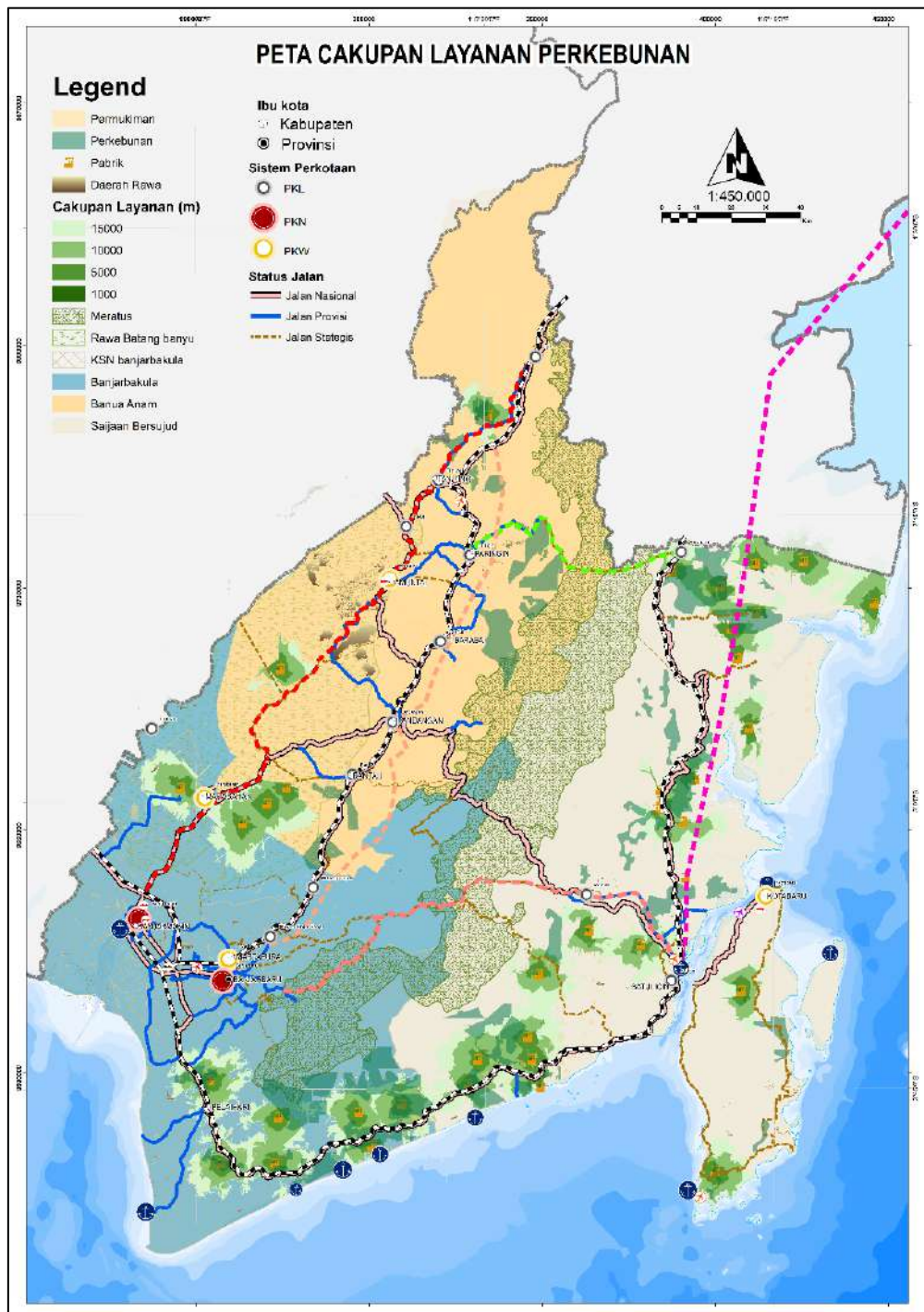


Sumber : Anlisa Daerah Irigasi, LBS 2021 DPKP dan Lumbung Padi dengan model Network Analyst

Gambar 5.36 Peta Cakupan Layanan Lumbung Padi

5.2.3.4 Cakupan Layanan Perkebunan

Road Network Service Area pabrik terhadap Kawasan Perkebunan menggambarkan kemadirian kawasan perkebunan, hasil perkebunan yang diolah lebih awal di dalam pabrik, ini menggambarkan distribusi bahan mentah yang minimal, sehingga mengurangi beban jalan.

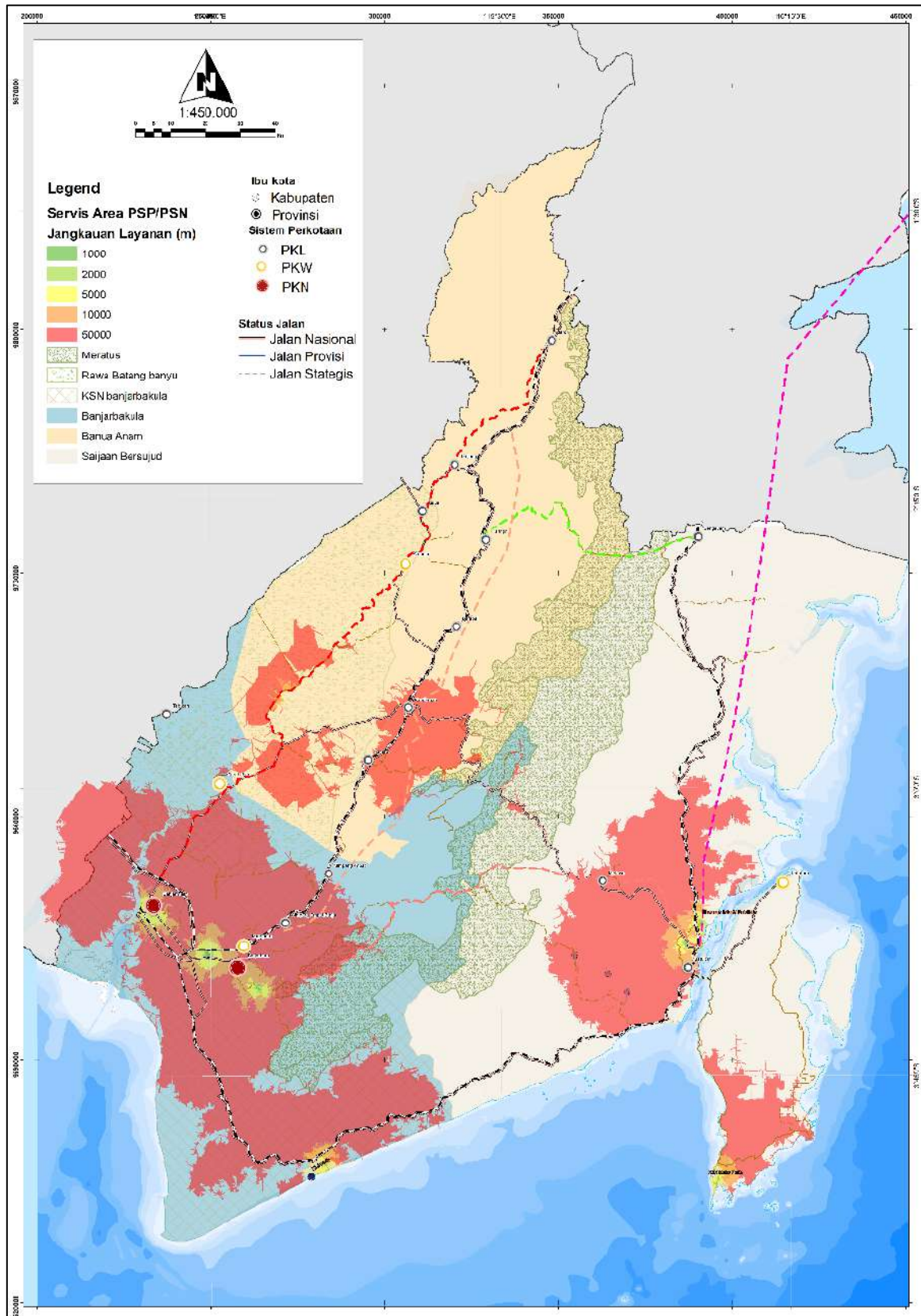


Sumber : Anlisa Sebaran Pabrik dengan Daerah Perkebunana dengan model Network Analyst

Gambar 5.37 Cakupan Layanan Pabrik Perkebunan

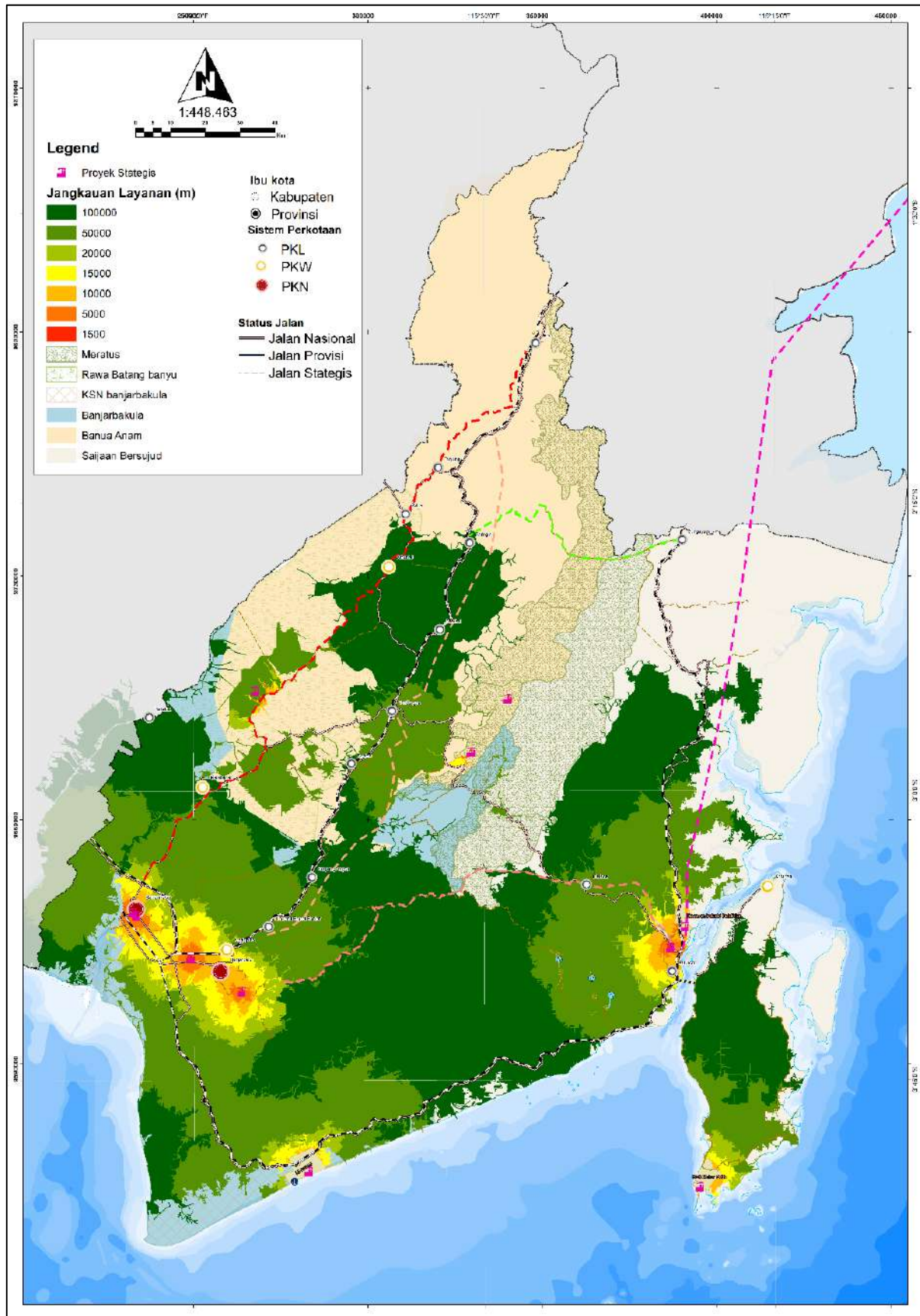
5.2.3.5 Cakupan Layanan PSP/PSN

Cakupan layanan proyek strategis secara umum memiliki korelasi layanan konektifitas yang cukup, namun memang beberapa lokasi memiliki keterbatasan akses seperti Bendungan Tapin yang memiliki jangkauan layanan kecil, ini dikarenakan jaringan jalan yang terbatas sehingga nilai yang dikeluarkan *Network Analyst Service Area* menjadi kecil.



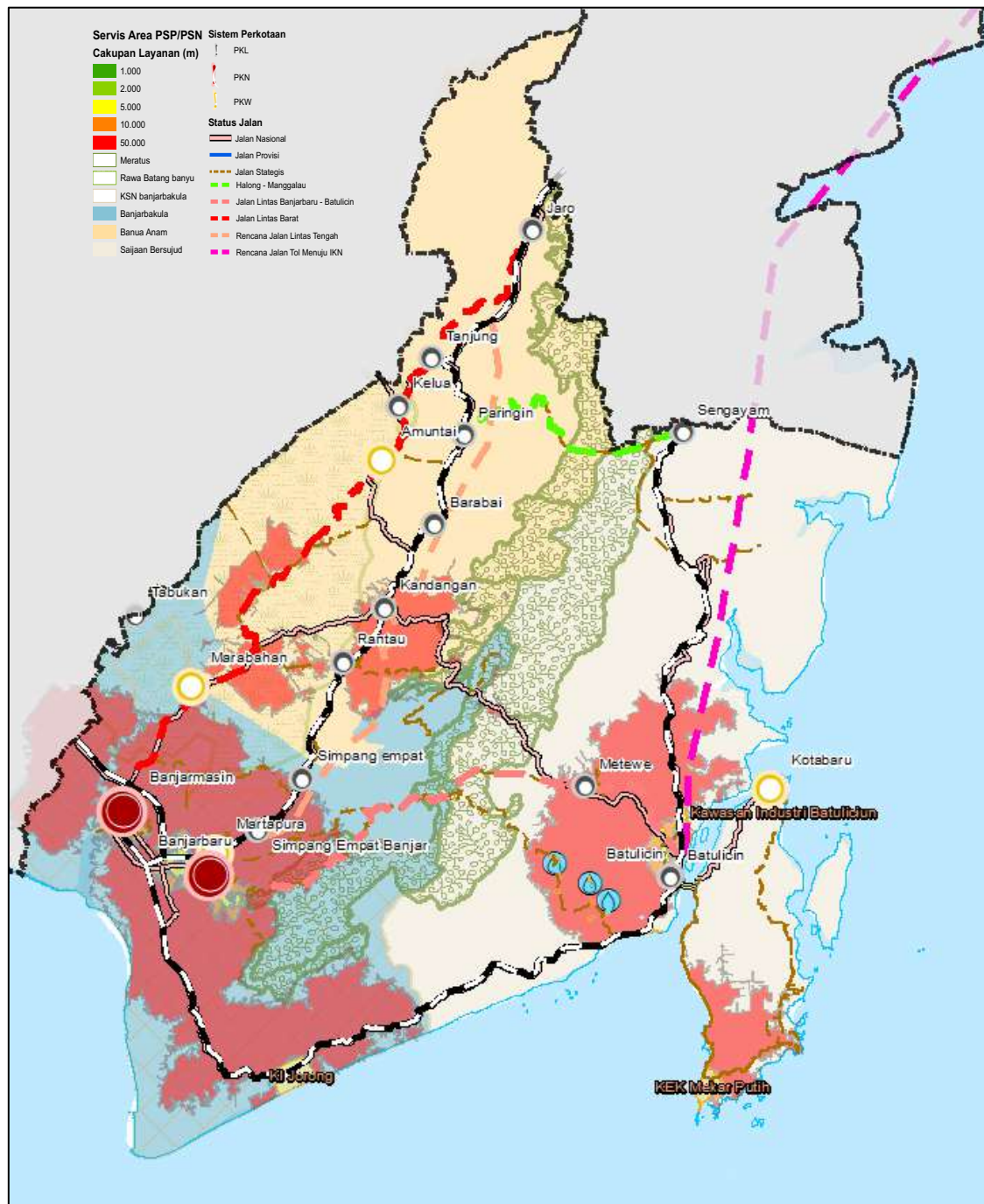
Sumber : Anlisa Sebaran Proyek Strategis dengan model Network Analyst

Gambar 5.38 Analisa Layanan Kawasan Proyek Strategis



Sumber : Anlisa Sebaran Proyek Strategis dengan Jangkauan Layanan 100Km dengan model Network Analyst

Gambar 5.39 Analisa Layanan Kawasan Proyek Strategis Dalam Sekala 100 Km

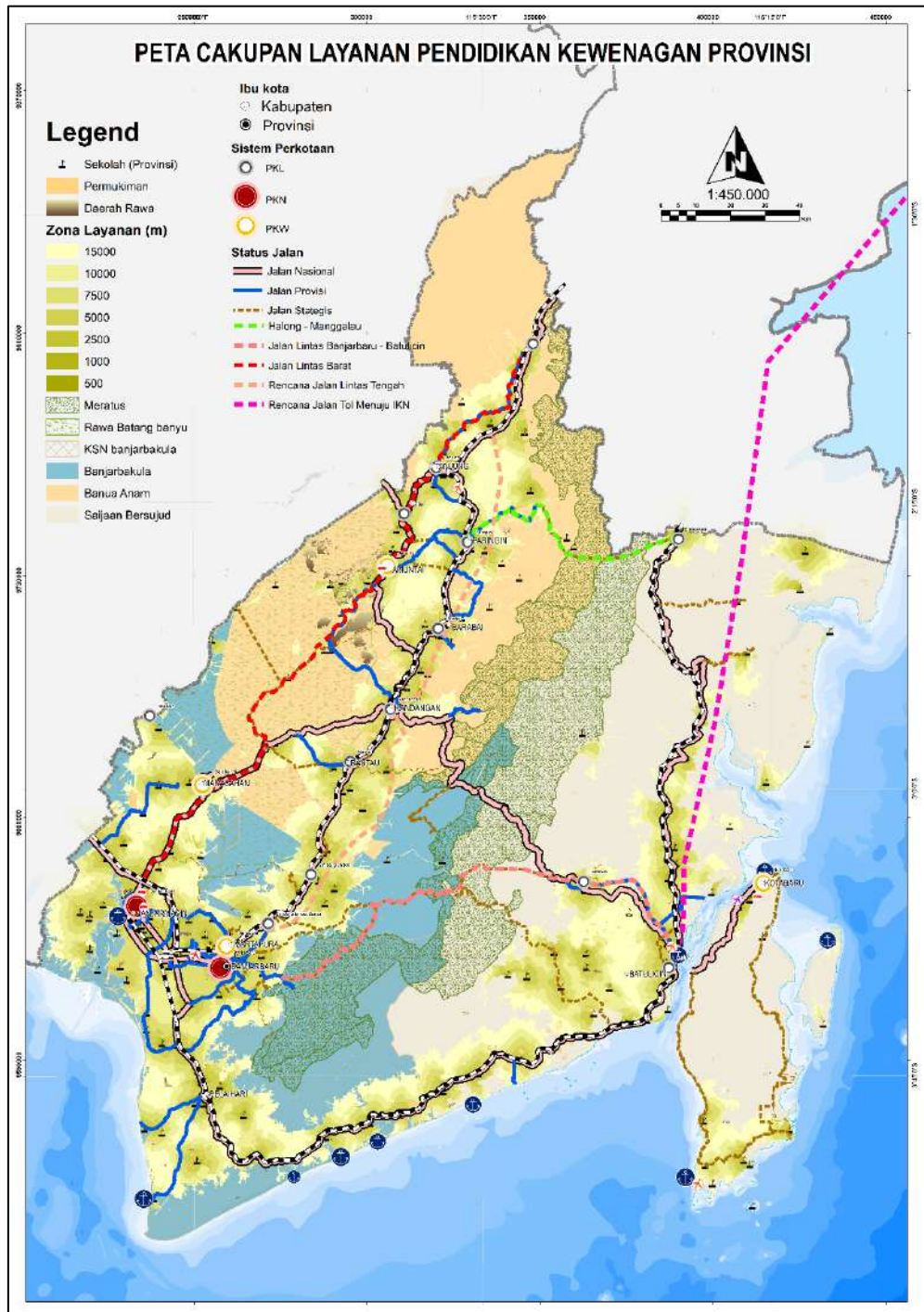


Sumber : Anlisa Sebaran Proyek Strategis model Network Analyst- Service Area

Gambar 5.40 Road Network Analisis Proyek Strategis

5.2.3.6 Cakupan Layanan Pendidikan

Cakupan Layanan Pendidikan yang di analisa berdasarkan *Road Network Service Area* menggambarkan beberapa seolah yang berada pada wilayah di sekitaran sisi pegunungan meratus secara akses tersedia hanya luas cover area nya saja yang kecil ini dikarenakan Kawasan permukiman yang kecil serta jaringan jalan yang tidak banyak. Secara umum cakupan layanan pendidikan kewenangan pemerintah provinsi dinilai cukup menyebar disemua kabupaten.

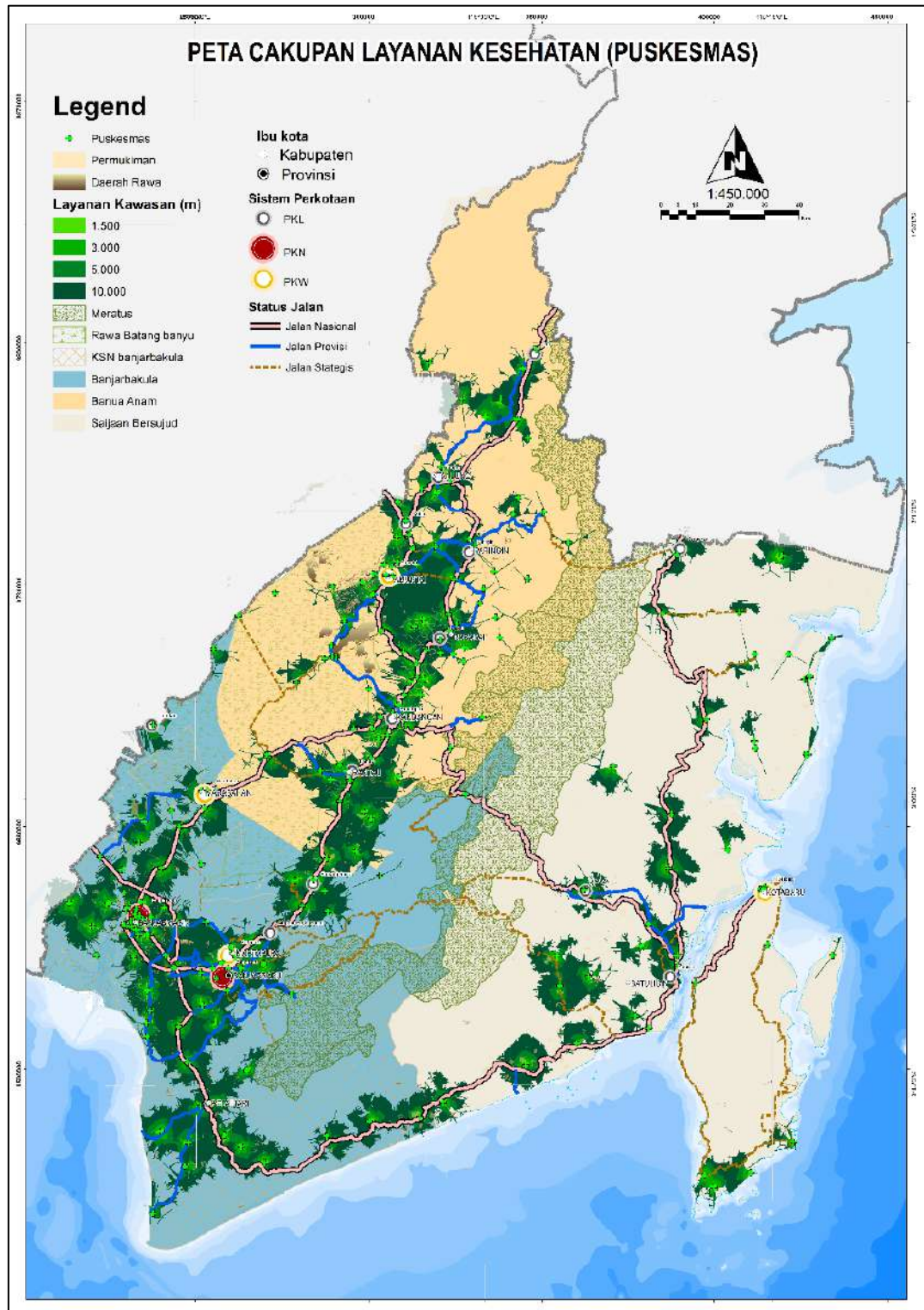


Sumber : Peta Sebaran Sekolah (SMA/SMK/SLB) DISDIK Prov.Kalsel dianalisa dengan model Network Analyst

Gambar 5.41 Peta Jangkauan Layanan Pendidikan

5.2.3.7 Cakupan Layanan Kesehatan

Pusat Layanan Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang di tinjau dari segi sebaran lokasi puskesmas ditemukan jangkauan layanan puskesmas tidak melebar pada daerah tertentu, akan tetapi ditemukan pada daerah kotabaru di pulau Kalimantan, terdapat layanan puskesmas yang cukup luas.



Sumber : Peta Sebaran Puskesmas dari DINKES Prov.Kalsel dianalisa dengan model Network Analyst

Gambar 5.42 Cakupan Layanan Puskesmas

5.2.4 Proyek Prioritas Kalsel

Proyek Strategis Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendukung pencapaian Asta Cita, Percepatan Kedaulatan Pangan, Air, dan Energi serta Kalimantan Selatan sebagai Gerbang Logistik Nasional dan Target Pertumbuhan Ekonomi 8 % yang tersebar di 13 Kabupaten Kota di Kalimantan Selatan.

Tabel 5.16 Proyek Strategis

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
DUKUNGAN PERCEPATAN KEDAULATAN PANGAN				
1	Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Kalimantan Selatan	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
2	Pengembangan Padi	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
3	Pengembangan Jagung Hibrida	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
4	Pengembangan Kacang Tanah	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
5	Pengembangan Porang	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		
6	Pengembangan Bawang Merah	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
7	Pengembangan Jeruk Siam Banjar	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
8	Pengembangan Cabe	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
9	Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian swadaya	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	13 Kab/Kota di Kalsel
10	Pengembangan Budidaya Ikan Gabus	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kabupaten Tanah Bumbu
11	Pengembangan Budidaya air payau (udang, bandeng, kepiting dan rumput laut)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kab. Batola, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		
12	Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, Tanah Laut, Barito Kuala, HSU, Tapin HSS, Balangan, dan Banjar
13	Sarana dan Prasarana Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Pembangunan SKPT)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kabupaten Kotabaru
14	Program Pengembangan Peternakan Berkelanjutan Menuju Kalimantan Selatan Sebagai Gerbang Logistik Ibu Kota Nusantara	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Provinsi Kalimantan Selatan
15	Sistem Integrasi Itik di Lahan Rawa dan Lahan Kering (SITI HAWA LARI)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Provinsi Kalimantan Selatan
16	Pembangunan Pusat Distribusi Regional (PDR)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar
17	Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi (PDP)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kota Banjarbaru, Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.		
PENGELOLAAN AIR				
1	Bendungan Riam Kiwa	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Desa Angkipih dan Desa Paramasan Bawah, Kabupaten Banjar
2	Bendungan Kusan	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Desa Mangkalapi, Kecamatan Kusan Hulu, Kabupaten Tanah Bumbu
3	Bendungan Pancur Hanau	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Desa Alat, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan
4	Pembangunan Bendungan Kumap	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Desa Burum - Panaan, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR DASAR				
1	Pembangunan SPAM Regional Saijaan Bersujud	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kabupaten Tanah Bumbu Kabupaten Kotabaru (Pelayanan Distribusi Air Mimun)

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
2	Pembangunan SPAM Regional Banua Anam	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kabupaten Tapin - Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pelayanan Distribusi Air Minum)
3	Optimalisasi SPAM Regional Banjarbakula	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	WM Metropolitan Banjarbakula
3	Pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Regional Banjarbakula, Pembangunan Insinerator dan Pengelolaan Limbah B3	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	Kawasan TPAS Regional Banjarbakula, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru
KETAHANAN BENCANA				
1	Pengendalian Banjir Perkotaan di Wilayah Banjarbakula (Pembangunan Embung dan Sistem Drainase Terintegrasi)	8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur	Menjamin pelestarian lingkungan hidup	WM Metropolitan Banjarbakula
SUMBER DAYA ENERGI				
1	Pembangunan PLTS Komunal	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong	Mencapai Swasembada	Provinsi Kalimantan Selatan

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Pangan, Energi dan Air	
EKONOMI SYARIAH				
1	Fasilitasi Pemberdayaan Pesantren melalui One Pesantren One Produk (OPOP)	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Provinsi Kalimantan Selatan
2	Fasilitasi Sertifikasi Halal	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Provinsi dan 13 Kab/Kota
3	Pengembangan Kawasan Ekonomi Halal Berbasis Budaya dan Kearifan Lokal	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Provinsi dan 13 Kab/Kota
4	Penataan Kawasan Sekumpul	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Sekumpul, Kec. Martapura, Kab. Banjar
5	Pengembangan Air Santri di Kel Murung Keraton dan Murung Kenanga	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Pemberantasan kemiskinan, menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan	Desa Murung Keraton dan Desa Murung Kenanga, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
PENGUATAN EKONOMI BIRU				
1	Rehabilitasi Mangrove	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Kabupaten Tanah Laut dan Kabupaten Tanah Bumbu
2	Rehabilitasi Terumbu Karang	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Kabupaten Kota Baru dan Kabupaten Tanah Bumbu
3	Bangunan Pengaman Pantai Kawasan Pesisir Kab. Tanah Laut	2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.	Menjamin Pelestarian Lingkungan Hidup	Desa Muara Kintap, Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut
PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA				
1	Revitalisasi Balai Latihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Penguatan Pendidikan, Sains, dan Teknologi serta Digitalisasi	Kota Banjarbaru
HILIRISASI INDUSTRI				
1	Pembuatan IPRO	5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Mencapai Swasembada Pangan, Energi dan Air	Kabupaten Hulu Sungai Selatan; Kabupaten Tanah Bumbu; Kabupaten Kotabaru; Kota Banjarbaru; Kabupaten Tanah Bumbu, Desa

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
				Binawaradan Pagatan; Kabupaten Kotabaru
PENGUATAN UMKM				
1	Promosi dan Pemasaran Produk - Produk Unggulan Lokal	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Internasional, Nasional, Provinsi dan 13 Kab/Kota
2	Pengembangan Korporasi Pekebun berbasis Kawasan Karet (BANG SIBUN BAKARET)	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Provinsi Kalimantan Selatan
3	Pengembangan Kopi Berbasis Diversifikasi Integrasi (BANG KODIN)	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Provinsi Kalimantan Selatan
4	Peningkatan Prasarana Perkebunan	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Provinsi Kalimantan Selatan

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
5	Pendataan Perkebunan Sawit Rakyat	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Provinsi Kalimantan Selatan
6	Pembinaan dan Pendampingan untuk Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) Pekebun	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Provinsi Kalimantan Selatan
HILIRISASI DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI				
1	Pembangunan Kawasan Industri Seradang	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Kec. Haruai dan Upau, Kab. Tabalong
2	Kawasan Industri Tarjun (Kab. Kotabaru)	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Kecamatan Kelumpang Hilir Desa Tarjun Kabupaten Kotabaru
PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DAN AKSESIBILITAS ANTAR WILAYAH				
1	Jembatan Penghubung Pulau Kalimantan - Pulau Laut	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-	Kabupaten Tanah Bumbu, Pulau Laut Kabupaten Kotabaru

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	
2	Jalan Lintas Tengah Pulau Laut	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
3	Jalan Halong - Paser	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)	Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan - Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur
4	Jalan Lintas Barat Provinsi Kalimantan Selatan	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)	Tapin – Hulu Sungai Selatan – Hulu Sungai Utara – Tabalong
5	Pembangunan Jembatan Barito II	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)	Kota Banjarmasin (Mantuil) – Kab. Barito Kuala (Tamban)

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
6	Pembangunan Prasarana dan Penyediaan Faskes Jalan Nasional	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)	Klaster Banjarbakula, Klaster Banua Anam, Klaster Saijaan Bersujud
7	Jalan Lintas Tengah Pulau Kalimantan	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Klaster Banjarbakula dan Klaster Banua Anam
8	Jembatan Panda (Pantang Raya - Dadahup)	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Kecamatan Tabukan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kecamatan Kapuas Murung Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
9	Jalur Kereta Api Tanjung - Banjarmasin	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Klaster Banjarbakula dan Klaster Banua Anam

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
10	Pembangunan dan / Pengembangan Jalan Balangan - Kotabaru	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)	Kecamatan Halong - Kab. Balangan – Kab.Kotabaru
TRANSPORTASI				
1	Pengembangan Transportasi Perkotaan di Wilayah Metropolitan Banjarbakula (Darat dan Sungai)	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibukota Nusantara (IKN)	WM Metropolitan Banjarbakula
PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS DISTRIBUSI LOGISTIK				
1	Rencana Pembangunan Pelabuhan Internasional Mekar Putih Kotabaru	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan
2	Pelabuhan Margasari Baru	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi	Desa Sungai Putting dan Desa Margasari Ilir, Kabupaten Tapin

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN				
1	Pembangunan Rumah Susun ASN Pemerintah Prov. Kalsel	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan	Kelurahan Palam, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
2	Pembangunan Rumah Susun Mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan	Kota Banjarbaru
3	Pembangunan Rumah Tapak	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi	Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan	13 Kab/Kota di Kalsel
PENGEMBANGAN KAWASAN				
1	Pembangunan MICE Pada Kawasan Central Business Distrik (CBD) di Aerocity	3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di	pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga	Kelurahan Guntung Payung Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
		sentra produksi melalui peran aktif koperasi		
PEMBANGUNAN FASILITAS KESEHATAN				
1	Pembangunan Pusat Jantung Terpadu RSUD Ulin	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Kota Banjarmasin
2	Pengembangan RS Ansari Saleh	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Kota Banjarmasin
PEMBANGUNAN PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL				
1	Pembangunan Panti Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terpadu di 2 Klaster Wilayah	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: Peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat	Kab. HST
				Kab. Kotabaru
PEMBANGUNAN / PENGEMBANGAN PENDIDIKAN VOKASI				
1	Pembangunan dan Pengembangan Perguruan Tinggi Vokasi Berbasis Potensi Wilayah (2 Klaster)	4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi z) dan penyandang disabilitas	PENGUATAN PENDIDIKAN, SAINS DAN TEKNOLOGI, SERTA DIGITALISASI	Kab. HSU, Kab. Tanah Laut Kab. Tanah Bumbu Kab. Kotabaru Kab. Tabalong
PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN				

NO	USULAN PROYEK STRATEGIS	ASTA CITA	PROGRAM PRESIDEN	LOKASI
1	Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional	6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta pemberantasan kemiskinan	Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Banjar Kab. Tapin

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk terus mendorong sinergi dan kolaborasi pembangunan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Upaya ini diwujudkan melalui penyajian proyek dan program prioritas pembangunan yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyajian program dan proyek pembangunan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai arah kebijakan pembangunan provinsi sekaligus menjadi penekanan bagi pemerintah kabupaten/kota agar dapat memberikan dukungan dan menyesuaikan arah pembangunan daerahnya secara selaras dengan agenda pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah.

Melalui pendekatan ini, diharapkan tercipta keterpaduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang pada akhirnya akan mempercepat pencapaian target-target pembangunan makro, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan daya saing daerah.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga akan terus memfasilitasi dan mengawal pelaksanaan proyek-program strategis lintas wilayah guna memastikan setiap intervensi pembangunan memiliki dampak nyata bagi masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan nasional secara berkelanjutan.

Penjabaran Lima Direktif Presiden dalam RKP Tahun 2026 hingga Tingkat Kabupaten/Kota

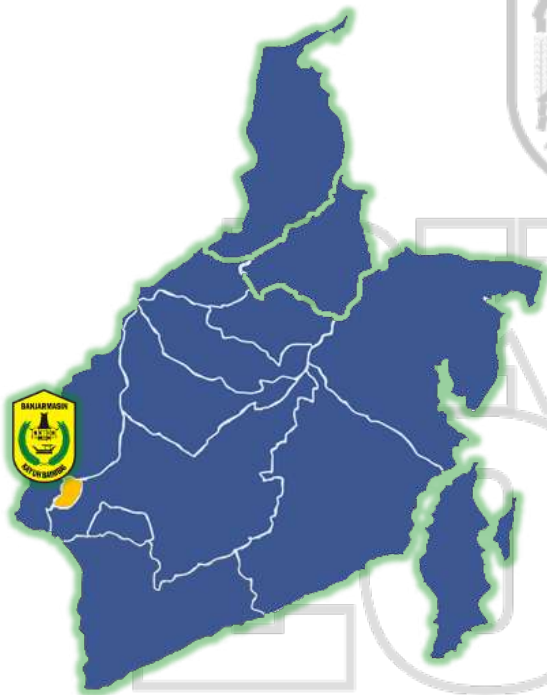
Untuk mendukung pelaksanaan RKP Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan menurunkan lima Direktif Presiden ke dalam program dan kegiatan pembangunan daerah yang dapat diimplementasikan hingga tingkat kabupaten/kota. Kelima direktif tersebut meliputi:

1. Ketahanan Pangan dan Pengelolaan Sampah;
2. Digitalisasi Pendidikan;
3. Sekolah Rakyat;
4. Pengentasan Kemiskinan melalui Kartu Afirmasi; dan
5. Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Sasaran-sasaran tersebut akan dijabarkan dalam dokumen perencanaan provinsi serta disinergikan dengan rencana kerja pemerintah kabupaten/kota, sehingga pelaksanaannya dapat terarah, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

5.3 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN/KOTA

5.3.1 Kota Banjarmasin



Potensi Ekonomi :

1. Kota perdagangan
2. KI mantuil
3. Metropolitan Banjarbakula
4. pengembangan pariwisata (siring tandean, patung bekantan, dll)
5. wisata religi (mesjid sabilal, pasar wadai ramadhan)
6. makam sultan suriansyah
7. kota pendidikan (ULM, Uniska, UIN, dll)
8. kota wisata kesehatan (RSUD terpadu seperti jantung)
9. kampung sasirangan
10. gerbang logistike melalui trisaksi
11. kota perdagangan dan jasa.

Tenaga Kerja :

- (Prioritas) Capaian TPT **DI ATAS** dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan TPT **LEBIH RENDAH** dari capaian provinsi

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan wisausaha
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

- (Prioritas) Capaian indeks gini **DI ATAS** dibanding capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini **LEBIH RENDAH** dari capaian provinsi
- kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah & miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarmasin tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Program-program penanggulangan kemiskinan
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

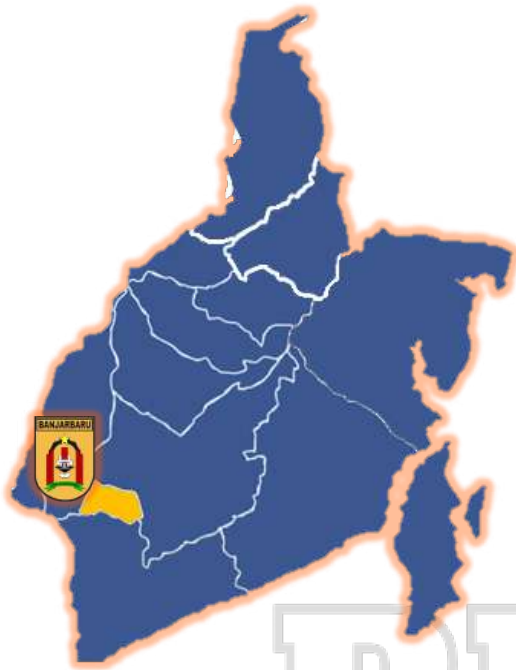
1. Sebagai Kota yang berfokus pada kegiatan penduduknya (Program kegiatan diarahkan ke penataan permukiman, sarana dan prasarana transportasi, perdagangan dan jasa dan pusat ekonomi).
2. Pengembangan industri pengolahan.
3. Pengembangan dan pembinaan destinasi wisata;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi UKM dan pembinaan wirausaha baru;
5. Dukungan terhadap pembangunan pusat distribusi regional dan pasar rakyat.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan pasar induk dan pusat-pusat distribusi regional;
2. Pengembangan kawasan industri dan pelabuhan utama;
3. pemetaan komponen kerentanan dan kapasitas, penguatan instrumen peringatan dini bencana;
4. Penguatan konektivitas jalan dan pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan Transit Oriented Development (TOD)

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

5.3.2 Kota Banjarbaru



Potensi Ekonomi :

1. Ibu Kota provinsi 2. Aero city 3. metropolitan banjarbakula 4. gerbang logistik udara 5. Kota pendidikan (ULM) 6. pengembangan pariwisata (tahura, kampung purun, dll) 7. kota perdagangan dan jasa 8. Kota Event 9. Wisata buatan (amanah) 10. Kota event music

Tenaga Kerja :

- Capaian Persentase Penduduk Miskin DI ATAS capaian provinsi dan Besar Perubahan Persentase Penduduk Miskin LEBIH BAIK DARI dari capaian provinsi
- peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan wirausaha 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

- Capaian indeks gini DI ATAS capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini LEBIH BAIK DARI dari capaian provinsi
- kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah & miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kota Banjarbaru tahun 2026 antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pembangunan dan rehabilitasi SMK pendukung pariwisata dan penerbangan
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
3. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
4. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan wisata budaya Banjar, pendulangan intan, wisata buatan dan pelaksanaan festival budaya.
2. Pada bidang koperasi, UMKM dengan pembinaan dan pelatihan menjadi wirausaha baru.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Sebagai bagian dari Metropolitan Banjarbakula dan ibukota provinsi, fungsi dari kota berfokus pada kegiatan permukiman, sarana dan prasarana, transportasi, perdagangan dan jasa dan perkantoran pemerintah.
2. Untuk bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan melanjutkan program/kegiatan SPAM regional dan TPA regional Banjarbakula.

5.3.3 Kabupaten Banjar



Potensi Ekonomi :

(Perlu Perhatian) capaian LPE **LEBIH RENDAH** dan Share Perekonomian **TIDAK LEBIH BAIK** dibanding capaian provinsi

1. kawasan penyanggah ibu kota provinsi
2. Pengembangan pesantren modern
3. wisata halal
4. wisata religi (haul guru)
5. wisata geopark meratus, pendulangan intan, pasar terapung lok baintan, aranio, kiram, dll
5. pengembangan pertanian dan perikanan
6. metropolitan banjarbakula

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & Kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan tenaga pendidik di pesantren/OPOP
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin.

Arah kebijakan provinsi untuk perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Banjar tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pariwisata; dan program kejar paket B-C.

2. Pada bidang pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pembangunan masyarakat desa; dan pemberdayaan kelompok tani.
3. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
4. Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang koperasi UMKM dan perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil hasil hutan.
2. Pada bidang pertanian dengan pengembangan kawasan lahan basah komoditas unggulan padi dan hortikultura, pengembangan kawasan pertanian lahan kering, kawasan pertanian tadah hujan, sentra produksi pangan dan sentra agribisnis hortikultura.
3. Pada bidang kehutanan dengan program/kegiatan penyediaan bibit pohon, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya hutan; dan pelaksanaan perhutanan sosial.
4. Pengembangan sentra industri dan perdagangan batu permata
5. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
6. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya);
7. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
8. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya;

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan pertanahan dengan program/kegiatan penyelesaian TORA; dan sertifikasi lahan hutan.
2. Pengembangan daerah irigasi untuk mendukung ketahanan pangan Provinsi dan Nasional dan peningkatan produksi beras lokal berkualitas;
3. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
4. Pengembangan pengairan dan irigasi;

5.3.4 Kabupaten Tanah Laut



Potensi Ekonomi :

1.peningkatan produktifitas komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan unggulan 2. melakukan hilirisasi dengan pemanfaatan KI Jorong. 3. pengembangan pariwisata (pantai,dll) 4. pengembangan sekolah pertanian 5. pengembangan politeknik tala untuk mendukung pertanian dan industry 6.metropolitan banjarbakula

Tenaga Kerja :

peningkatan produktifitas & Kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan SMA pertanian dan Poltek tanah laut 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM,

dan IKM

(Prioritas) Capaian dan Pertumbuhan Indikator Kemiskinan Tala **LEBIH RENDAH** dari Provinsi namun Pertumbuhan **TIDAK LEBIH BAIK** dari provinsi, ada peningkatan Tingkat kemiskinan sebesar 0,1% sehing

Capaian IPM Tala **lebih rendah** dari Provinsi namun **tumbuh lebih cepat**, sehingga perlu fokus perbaikan dimensi IPM yang masih rendah yaitu pendidikan dan daya beli masyarakat

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kab. Tanah Laut Tahun 2026, sebagai berikut :

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Industri pengolahan, dengan dukungan pada KI Jorong yang telah ditetapkan sebagai proyek prioritas pemerintah;

2. Pengadaan listrik dan gas, dengan dukungan pembangunan PLTU asam-asam unit 5, 6 dan 7; dan dukungan pembangunan PLT Bayu.
3. Bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
4. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; pemantapan pelaksanaan IB; dan pengendalian pemotongan ternak produktif.
5. Bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan peningkatan perikanan tangkap; dan pembangunan unit pengolahan ikan.
6. Pengembangan industri karet output penyusunan data *supply-demand* sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri karet, serta pengembangannya produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran.
7. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
8. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya;
9. Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan Infrastruktur Energi Terbarukan/Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB);
2. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mangrove, serta infrastruktur pengamanan pantai;
3. Pengembangan hilirisasi kelapa sawit;

5.3.5 Kabupaten Tanah Bumbu

Capaian IPM Batola lebih rendah dari Provinsi namun tumbuh lebih cepat, sehingga perlu fokus perbaikan dimensi IPM yang masih rendah yaitu rata-rata lama sekolah, dimensi kesehatan dan daya beli Masyarakat.

Capaian dan Pertumbuhan Indikator Kemiskinan Batola lebih rendah dari Provinsi sehingga perlu

percepatan dan perbaikan upaya penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi data intervensi, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemenuhan SPM, dan penguatan jaring pengaman sosial masyarakat. Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Tanah Bumbu tahun 2026, antara lain:



A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
3. Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa;

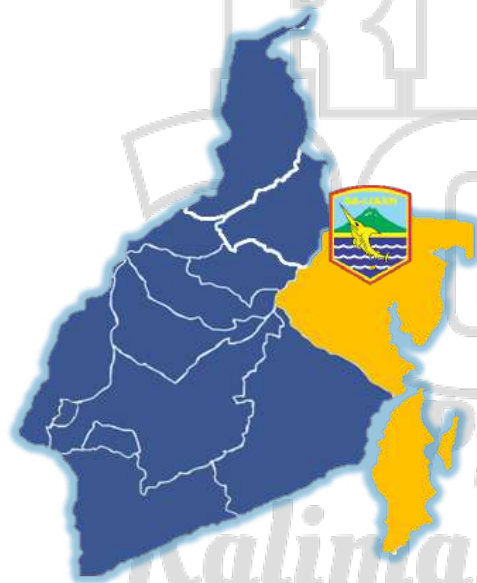
B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang perindustrian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri batulicin.
2. Pengembangan kawasan budidaya pertanian dan perkebunan.
3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kelautan.
4. Pengembangan industri karet output penyusunan data *supply-demand* sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran.
5. Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara.
6. Peningkatan investasi hilirisasi besi baja;
7. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya)

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan pembangunan jalan bebas hambatan Batulicin – Banjarbaru;
2. Pembangunan jembatan penghubung pulau Kalimantan dengan pulau laut; dan pembangunan bendungan kusan;
3. Untuk bidang perhubungan dengan dukungan pengembangan bandara bersujud; dan dukungan pengembangan pelabuhan;
4. Pengembangan Destinasi wisata pesisir dan Mengrove, serta infrastruktur pengaman pantai.
5. Pengembangan akses Jembatan Laut Pulau Kalimantan;
6. Pengembangan hilirisasi nikel;
7. Pengembangan hilirisasi kelapa sawit;

5.3.6 Kabupaten Kotabaru



Potensi Ekonomi :

- (Perlu Perhatian) capaian LPE LEBIH RENDAH dan Share Perekonomian LEBIH TINGGI dibanding capaian provinsi
- 1. Penetapan KEK Mekar Putih 2. hilirisasi industri dengan pemanfaatan kawasan KEK mekar putih dan KI sebuku 3. Pembangunan SKPT. 4. Gerbang logistik dengan pelabuhan laut dalam mekar putih 5. pengembangan pariwisata (teluk tamiyang, bukit mamake, dll) 6. kawasan penyangga IKN

Tenaga Kerja :

- (Perlu Perhatian) Capaian dan Pertumbuhan Indikator Kemiskinan Ada Kenaikan Kemiskinan, Kotabaru **LEBIH TINGGI** dari Provinsi dan perubahan **LEBIH BAIK**, sehingga perlu percepatan dan perbaikan upaya penanggulangan kemiskinan melalui verifikasi dan validasi data intervensi, pengembangan ekonomi kerakyatan, pemenuhan SPM, dan penguatan jaring pengaman sosial masyarakat.
- 1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

- (Perlu Perhatian) capaian indeks gini **DI ATAS** capaian provinsi dan Besar Perubahan indeks gini **LEBIH BAIK DARI** dari capaian provinsi
- kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Kotabaru Tahun 2026 sebagai berikut:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

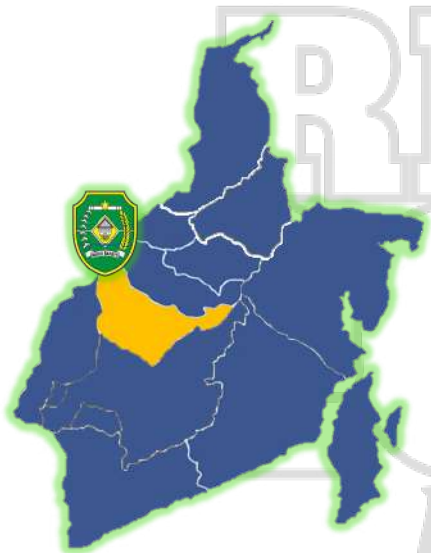
1. Bidang Kelautan dan Perikanan, dengan mengembangkan Sentra Kelautan Terpadu sebagai upaya peningkatan pendapatan nelayan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian secara luas;
2. Bidang industri pengolahan, dengan mendukung pengembangan KEK Mekar Putih;
3. Pengembangan industri karet output penyusunan data *supply-demand* sektor tekstil, kulit dan alas kaki, dan penerapan tingkat komponen dalam negeri - industri kecil, peralatan fasilitas laboratorium/workshop/layanan industri karet, serta pengembangan produk, pendampingan IKM, peningkatan kreativitas, dan informasi pasar, promosi dan pemasaran.
4. Penguatan industri dasar seperti hilirisasi kimia berbasis batubara.
5. Peningkatan investasi hilirisasi besi baja;
6. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
7. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pengembangan Industri di dalam Kawasan Ekonomi khusus dan Pelabuhan Utama untuk mendukung distribusi hasil industri;

2. Peningkatan Jalan akses menuju KEK Mekarputih, Destiniasi Wisata Teluk Tamiang dan Pusat Perikanan Terpadu serta infrastruktur pengaman pantai.
3. Pengembangan bandara, dengan output Pengembangan Bandar Udara Gusti Syamsir Alam.
4. Pengembangan Pelabuhan logistic di Pulau Laut
5. Pengembangan/pembangunan/rehabilitasi pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan;
6. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
7. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat.
8. Pengembangan hilirisasi kelapa sawit;

5.3.7 Kabupaten Tapin



Potensi Ekonomi :

(Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas peningkatan produktifitas komoditas unggulan (Padi, Jagung, Karet, Olahan ikan nila, Kain sasirangan, Anyaman purun, Tikar dalit, Sambal cabai rawit hiyung, dan Kopiah jangang)

2. pengembangan kawasan industri margasari/KI tapin
3. pemanfaatan bedungan tapin untuk wisata dan perikanan

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM.

Pemerataan :

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin.

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tapin tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pendidikan vokasi/SMK pertanian

2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; dan pengembangan budidaya ikan lokal.
2. Pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian untuk bidang koperasi UKM dan perindustrian.
3. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
5. Pengembangan pada kawasan budidaya perkebunan kelapa sawit, kopi, lada dan karet serta mengembangkan kawasan budidaya peternakan unggas, kambing dan sapi.
6. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
7. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
8. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya;

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan dukungan Pengembangan daerah irigasi bendungan tapin; dan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.
2. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan ouput intervensi cetak sawah;
3. Pengembangan pengairan dan irigasi.

5.3.8 Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Potensi Ekonomi :



(Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas

1. peningkatan produktifitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, dan perikanan (ikan gabus, dll)
2. potensi pariwisata alam yang meliputi destinasi wisata Sungai Amandit, air terjun, sumber air panas, loksado
3. wisata kuliner
4. wisata budaya

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan wisausaha
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
2. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
3. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan darurat.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pelaksanaan festival bamboo rafting; pengembangan akomodasi pendukung pariwisata; penyiapan daya Tarik wisata; dan pengusulan taman nasional loksado.
2. Pada bidang koperasi UKM dan perdagangan dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pendukung pariwisata.

3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu, sentra penghasil hutan non kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata.
4. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
5. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk;
6. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
7. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkaran barat; dan peningkatan jalan kandang-lumpangi-batulicin.
2. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah
3. Pengembangan pengairan dan irigasi.

5.3.9 Kabupaten Hulu Sungai Tengah



Potensi Ekonomi :

(Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas

1. produk makanan olahan, kerajinan, dan UKM (anyaman purun, kerajinan eceng gondok, kerajinan bambu, kerajinan rotan, meubel, kue kering, apam hambuku, kerupuk olahan, telur asin, ikan asin, gula batu itik, beras organik,). pengolahan telur asin, pengolahan ikan asin, dan peralatan kerajinan sapu ijuk dan mainan tradisional
2. pengembangan pariwisata

Tenaga Kerja:

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan wisausaha
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

Kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

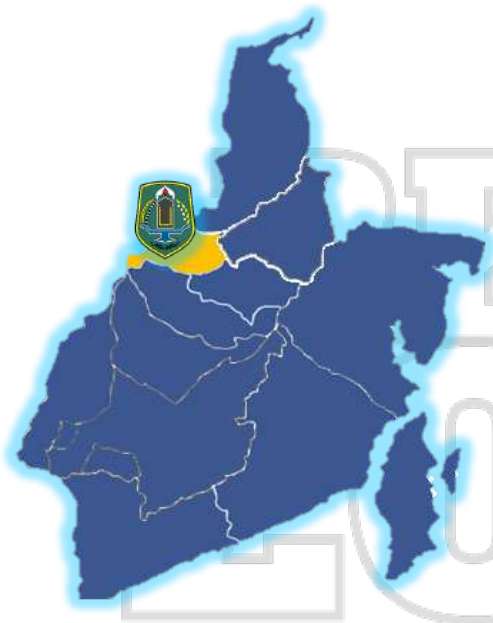
1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
2. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan pertanian.
3. Pada bidang kehutanan dengan pengembangan hutan produksi tetap dan hutan produksi terbatas, sentra penghasil hutan kayu dan kawasan hutan penunjang industri pariwisata;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
5. Peningkatan indeks pertanian (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
6. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
7. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan bendungan batang alai; dan pembangunan pengendali banjir.

2. Pada bidang lingkungan hidup dan kehutanan dengan program/kegiatan perlindungan, rehabilitasi, pemulihan dan konservasi cadangan SDA dan LH.
3. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
4. Pengembangan pengairan dan irigasi;
5. Pelayanan peringatan dini multi-ancaman bencana, dengan output penguatan instrumen peringatan dini bencana;
6. Penyediaan sarana dan prasarana penanganan darurat.

5.3.10 Kabupaten Hulu Sungai Utara



Potensi Ekonomi :

Pengembangan kawasan peruntukan industri serandang 2, kawasan peyangga IKN 3. jalur logistik antara kaltim/IKN ke Kalimantan selatan 4. produk unggulan termasuk anyaman bambu, anyaman purun, dan beragam olahan kreasi seni tangan dari bahan organik seperti kayu limbah, eceng gondok, dan olahan kayu.

5. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; peningkatan produksi daging unggas dan petelur; serta pengendalian pemotongan ternak produktif. 6.

Pada bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; pengembangan budidaya ikan lokal papuyu dan haruan. 7. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan peternakan dan perikanan. 8. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah Kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang kesehatan dengan program/kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pelayanan kesehatan inklusi, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, penurunan angka stunting dan pencegahan pernikahan usia dini.
2. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian; dan program kejar paket b-c.
3. Pada bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat desa dengan program/kegiatan pengentasan kemiskinan dan darah tertinggal.
4. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

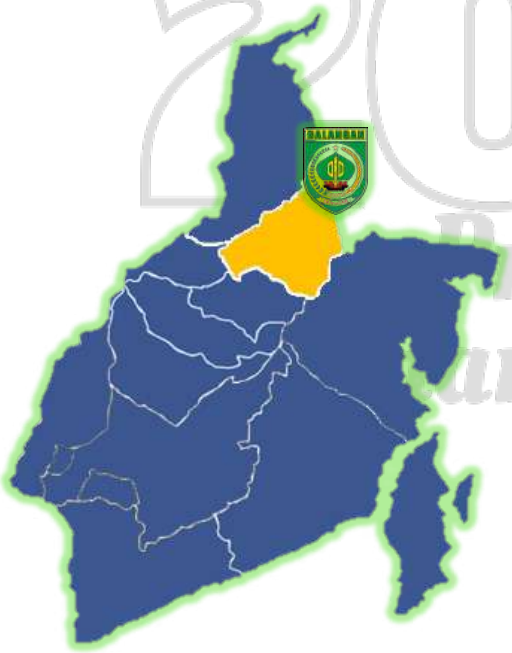
1. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan jumlah ternak bibit; peningkatan produksi daging unggas dan petelur; serta pengendalian pemotongan ternak produktif.
2. Pada bidang kelautan dan perikanan dengan program/kegiatan penyediaan paket budidaya, pembinaan serta pemberian teknologi budidaya; pengembangan budidaya ikan lokal papuyu dan haruan.
3. Pada bidang koperasi UKM dan perindustrian yaitu dengan program/kegiatan pengembangan kawasan industri kecil pengolahan peternakan dan perikanan.
4. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
5. Pada bidang pariwisata dengan program/kegiatan pengembangan ecotourism swimming buffalo dan orang utan.
6. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;

7. Pengembangan korporasi petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak, dengan output: sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat, dan pusat produksi benih dan induk;
8. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
9. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkaran barat Kalsel.
2. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
3. Pengembangan pengairan dan irigasi.

5.3.11 Kabupaten Balangan



Potensi Ekonomi :

1. kerajinan tangan seperti kain Sasirangan, tas anyaman dari bamban dan tirik. Selain itu, Kabupaten Balangan juga memamerkan produk dari alam seperti madu, jahe merah, hanau gula merah, kopi pasak bumi, mandai, dan sirup Batumandi
2. wisata di Kabupaten Balangan adalah Gunung Batu Sumsum, Goa Hantanung, Makam Datuk Kandang Haji, Benteng Tundakan, Air Terjun Manyandar, dan berbagai acara budaya seperti Pesta Panen Raya, Aruh Adat Baharin, Tarian Gintor, dan Balian

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada
3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah / miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi di Kabupaten Balangan pada tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan tenaga kerja dengan pendidikan vokasi/SMK pertanian dan program kejar paket B-C.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
2. Pada bidang pertanian dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman terutama komoditas sayur dan cabai; pembinaan dan pengembangan mekanisasi pertanian; dan perluasan areal lahan.
3. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
4. Pengembangan kawasan unggulan berbasis potensi lokal (pariwisata, pertanian, dan lainnya).

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

Pada bidang pekerjaan umum dengan program/kegiatan rehabilitasi jalan dan jembatan
Pada bidang Pekerjaan umum dengan program/kegiatan pembangunan jalan lingkar barat Kalsel.

5.3.12 Kabupaten Tabalong



Potensi Ekonomi :

1. Pengembangan kawasan peruntukan industri seradang 2, kawasan peyangga IKN 3. jalur logistik antara kaltim/IKN ke Kalimantan selatan 4. madu kelulut, kopi pasak bumi, dan kulinernya seperti paliat. Lain-lain produk unggulan termasuk anyaman bambu, anyaman purun, dan beragam olahan kreasi seni tangan dari bahan organik seperti kayu limbah, eceng gondok, dan olahan kayu. Komoditas perkebunan dan pertanian yang penting di Tabalong adalah karet, kakao, dan kelapa sawit

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan 2. peningkatan spesifikasi tenaga kerja sesuai kebutuhan industri yang ada 3. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kabupaten Tabalong pada tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Bidang pendidikan dan kebudayaan melalui peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan vokasi (SMK dan politeknik).
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.
3. Peningkatan kapasitas tata kelola desa untuk mewujudkan transparansi dan digitalisasi desa;

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

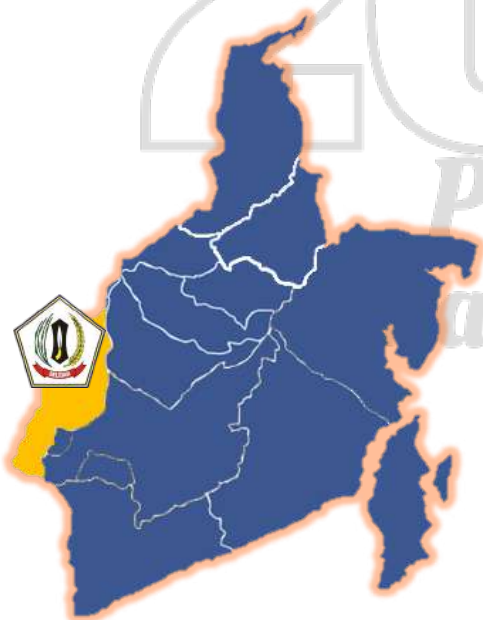
1. Pada Bidang perindustrian dengan mengembangkan kawasan industri Tabalong.
2. Pengembangan kawasan budidaya perkebunan, pertanian, tanaman pangan dan hortikultura.

3. Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan peternakan.
4. Peningkatan indeks pertanaman (intensifikasi), dengan output kawasan karet;
5. Pengembangan *eco-tourism* kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi *global geopark*) di Geopark Geosite Meratus dan di Kawasan Loksado dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja;
6. Pelindungan dan pelestarian warisan budaya melalui pelestarian warisan budaya pada situs-situs cagar budaya di kawasan Geopark Meratus dan Kawasan Loksado dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diplomasi budaya.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Bidang perhubungan dengan dukungan pembangunan jalur kereta api dan dukungan pengembangan bandara Warukin;
2. Bidang Pekerjaan Umum dengan pembangunan jalan lingkar barat, jalan akses Kalsel - Kalteng dan jalur distribusi pusat perikanan ke IKN;
3. Pengembangan industri pengolahan hasil tambangan dan perkebunan.
4. Peningkatan ketersediaan pangan, dengan output intervensi cetak sawah;
5. Pengembangan pengairan dan irigasi.

5.3.13 Kabupaten Barito Kuala



Potensi Ekonomi :

(Prioritas) capaian LPE dan Share Perekonomian **LEBIH RENDAH** dibanding capaian provinsi jadi Prioritas

1. peningkatan produktifitas komoditas unggulan (padi/beras, jeruk, dll)
2. wisata geopark (pulau bekantan/pulau curiak)
3. metropolitan banjarbakula
6. kabupaten pendidikan (UMB dan UNISKA)

Tenaga Kerja :

1. peningkatan produktifitas & Kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja, dan link and match dunia usaha dan pendidikan
2. pelatihan tenaga kerja, UMKM, dan IKM

Pemerataan :

kesempatan kerja pada sektor unggulan daerah dan peningkatan pendidikan untuk masyarakat menengah kebawah/miskin

Arah kebijakan perencanaan pembangunan provinsi pada Kab. Barito Kuala tahun 2026, antara lain:

A. Aspek Pembangunan Sumber Daya Manusia

1. Pada bidang pendidikan dengan program/kegiatan pendidikan vokasi/SMK pertanian/perkebunan.
2. Peningkatan kesesuaian (*link and match*) antara jurusan pada Sekolah Menengah Kejuruan dengan dunia usaha.

B. Aspek Pembangunan Ekonomi

1. Pada bidang tanaman pangan dan hortikultura dengan program/kegiatan pengembangan kawasan sayuran dan aneka tanaman; dan pembinaan pengembangan mekanisasi pertanian.
2. Pengembangan kawasan industri pengolahan hasil pertanian, industri pengolahan hasil hutan, perabot dan kayu.
3. Pada bidang perkebunan dan peternakan dengan program/kegiatan peningkatan produksi dan produktivitas tanaman perkebunan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas input peternakan, dengan output: benih ternak unggul;
5. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, dengan output bantuan sarana produksi pertanian.

C. Aspek Pengembangan Infrastruktur

1. Pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan program/kegiatan dukungan pengembangan jalan lingkar barat kalsel; dan rehabilitasi jalan dan jembatan;
2. Peningkatan Infrastruktur Daerah Irigasi Rawa dan Irigasi Permukaan;
3. Peningkatan industri pengolahan hasil pertanian;
4. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi, dengan output: fasilitasi pengurusan sertifikat hak milik atas tanah transmigrasi.
5. Pengembangan pengairan dan irigasi;
6. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, dengan output pembangunan dan pengembangan jalan non-status, jembatan, sistem drainase, dan sarana permukiman.

Tabel 5.17 Target Indikator Kinerja Makro kabupaten/kota se- Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	TINGKAT KEMISKINAN					INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP					GINI RASIO				
		CAP. 2022	CAP. 2023	CAP. 2024	TARGET 2025	TARGET 2026*	CAP. 2022	CAP. 2023	CAP. 2024	TARGET 2025	TARGET 2026*	CAP. 2022	CAP. 2023	CAP. 2024	TARGET 2025	TARGET 2026*
1	KALIMANTAN SELATAN	4,61	4,29	4,11	3,44 - 3,94	3,23 - 3,46	71,97	73,5	75,7	72,32	72,53	0,317	0,313	0,302	0,29 - 0,301	0,285 - 0,296
2	KAB. TANAH LAUT	3,86	3,73	3,74	2,82 - 3,23	2,96 - 3,46	67,78	68,65	68,57	70,16	70,25	0,263	0,259	-	0,24 - 0,249	0,236 - 0,245
3	KAB. KOTABARU	4,3	4,32	4,45	3,38 - 4,00	3,73 - 4,23	72,2	74,47	76,09	75,72	75,92	0,331	0,316	-	0,293 - 0,304	0,288 - 0,299
4	KAB. BANJAR	2,79	2,44	2,36	1,90 - 2,18	1,72 - 2,22	66,03	71,62	58,72	71,39	71,6	0,3	0,297	-	0,275 - 0,286	0,27 - 0,281
5	KAB. BARITO KUALA	4,75	4,6	4,36	3,41 - 4,25	3,39 - 3,89	63,41	63,12	64,02	66,36	66,57	0,289	0,312	-	0,289 - 0,3	0,284 - 0,295
6	KAB. TAPIN	3,6	3,19	3,33	2,43 - 2,84	2,56 - 3,06	65,25	65,96	66,11	69,87	70,08	0,291	0,281	-	0,26 - 0,27	0,256 - 0,266
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	4,54	4,01	3,38	3,08 - 3,52	2,01 - 2,51	69,4	68,39	67,39	72,86	73,11	0,26	0,293	-	0,271 - 0,282	0,267 - 0,277
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	5,92	5,84	5,81	4,59 - 5,26	4,93 - 5,43	67,33	69,59	71,67	73,26	73,43	0,228	0,225	-	0,208 - 0,216	0,205 - 0,213
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	6,49	6,25	5,75	5,03 - 5,86	4,55 - 5,05	63,12	64,74	66,5	69,16	69,41	0,301	0,271	-	0,251 - 0,261	0,247 - 0,256
10	KAB. TABALONG	5,87	5,77	5,64	4,48 - 5,44	4,74 - 5,24	70,08	74,03	73,89	71,96	72,17	0,337	0,284	-	0,263 - 0,273	0,259 - 0,269
11	KAB. TANAH BUMBU	4,26	4,12	3,41	3,88 - 4,00	2,24 - 2,74	70,19	73,49	74,92	75,06	75,27	0,292	0,28	-	0,259 - 0,269	0,255 - 0,265
12	KAB. BALANGAN	5,83	5,22	4,87	3,92 - 4,89	3,60 - 4,10	67,83	68,24	70,8	72,1	72,31	0,266	0,258	-	0,239 - 0,248	0,235 - 0,244
13	KOTA BANJARMASIN	4,74	4,63	4,58	4,02 - 4,30	3,89 - 4,39	56,38	58,73	58,72	60,88	61,13	0,33	0,37	-	0,343 - 0,356	0,337 - 0,35
14	KOTA BANJARBARU	4,17	3,92	3,79	3,11 - 3,56	3,04 - 3,54	61,83	60,37	66,84	62,94	63,02	0,341	0,321	-	0,297 - 0,309	0,292 - 0,304

Provinsi
Kalimantan Selatan

RKPD 2026
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NO.	PROVINSI / KAB/ KOTA	INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)					TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)					PERTUMBUHAN EKONOMI				
		CAP. 2022	CAP. 2023	CAP. 2024	TARGET 2025	TARGET 2026*	CAP. 2022	CAP. 2023	CAP. 2024	TARGET 2025	TARGET 2026*	CAP. 2022	CAP. 2023	CAP. 2024	TARGET 2025	TARGET 2026*
1	KALIMANTAN SELATAN	74	74,66	75,19	75,48 - 76,18	75,99 - 76,69	4,74	4,31	4,20	3,63 - 4,18	3,56 - 4,14	5,11	4,84	5,05	5,3 - 5,4	5,6 - 6,4
2	KAB. TANAH LAUT	72,33	72,98	73,42	73,64 - 74,34	74,12 - 74,62	4,17	3,58	6,37	2,70 - 3,25	2,63 - 3,21	5,12	4,78	5,01	5,1 - 5,2	5,4 - 6,2
3	KAB. KOTABARU	71,57	72,01	72,42	72,64 - 73,34	73,08 - 73,58	6,7	6,08	6,05	4,81 - 5,36	4,75 - 5,32	4,58	4,29	5,34	4,6 - 4,6	4,8 - 5,5
4	KAB. BANJAR	73,25	74,01	74,41	74,82 - 75,52	75,37 - 75,87	2,72	2,73	2,71	2,25 - 2,81	2,18 - 2,77	4,48	4,35	4,76	4,7 - 4,7	4,9 - 5,7
5	KAB. BARITO KUALA	69,87	70,67	71,40	71,85 - 72,55	72,54 - 73,04	3,63	3,42	3,41	2,27 - 2,82	2,19 - 2,78	3,59	3,91	5,02	4,3 - 4,3	4,5 - 5,2
6	KAB. TAPIN	72,61	73,52	74,06	74,5 - 75,2	75,17 - 75,67	4,15	3,93	3,86	3,16 - 3,71	3,09 - 3,67	4,91	4,88	4,89	5,2 - 5,3	5,5 - 6,4
7	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	72,47	73,21	73,95	74,31 - 75,01	74,97 - 75,47	2,29	2,12	2,11	1,37 - 1,93	1,30 - 1,89	4,02	5,27	5,15	5,6 - 5,7	5,9 - 6,8
8	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	72,32	72,76	73,33	73,63 - 74,33	74,1 - 74,6	3,35	3,26	3,20	2,49 - 3,04	2,42 - 3,00	3,93	4,11	4,95	4,6 - 4,7	4,8 - 5,6
9	KAB. HULU SUNGAI UTARA	70,33	71,12	71,74	72,12 - 72,82	72,78 - 73,28	4,64	3,85	3,73	3,25 - 3,80	3,18 - 3,76	4,09	4,51	4,43	4,8 - 4,9	5,1 - 5,9
10	KAB. TABALONG	74,82	75,43	75,97	76,22 - 76,92	76,71 - 77,21	4,46	3,6	3,44	2,64 - 3,20	2,57 - 3,16	5,3	4,9	4,87	5,4 - 5,5	5,7 - 6,6
11	KAB. TANAH BUMBU	73,34	73,86	74,50	74,87 - 75,57	75,44 - 75,94	6,89	6,56	6,37	5,74 - 6,27	5,67 - 6,24	5,45	4,84	4,82	5,4 - 5,5	5,7 - 6,5
12	KAB. BALANGAN	72,2	72,97	73,83	74,31 - 75,01	75,05 - 75,55	3,98	2,7	2,69	1,84 - 2,40	1,77 - 2,36	5,24	4,17	4,15	4,8 - 4,9	5,1 - 5,9
13	KOTA BANJARMASIN	79,46	79,98	80,53	80,73 - 81,43	81,19 - 81,69	6,96	6,7	6,56	6,57 - 7,11	6,51 - 7,07	5,69	5,62	5,63	6,2 - 6,3	6,5 - 7,5
14	KOTA BANJARBARU	80,82	81,25	81,65	81,79 - 82,49	82,17 - 82,67	5,47	5,01	4,93	4,38 - 4,93	4,31 - 4,89	7,93	6,81	6,71	6,9 - 7	7,3 - 8,4

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

Secara umum, IPM Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, capaian IPM provinsi berada di angka 74,00, naik menjadi 75,19 pada tahun 2024, dengan target tahun 2025 sebesar antara 75,48 – 76,18. Secara rinci:

- Kota dengan IPM tertinggi adalah Kota Banjarbaru, yang mencapai 81,65 pada 2024 dan ditargetkan mencapai 82,17 – 82,67 di 2026.
- Di sisi lain, daerah dengan IPM terendah adalah Kab. Barito Kuala, dengan capaian 2024 sebesar 70,46 dan target 2026 berkisar antara 72,54 - 73,04.
- Kabupaten/kota lain menunjukkan tren peningkatan yang stabil, seperti Kab. Tapin (dari 72,61 di 2022 menjadi 74,06 di 2024) dan Kab. Hulu Sungai Tengah (dari 72,10 ke 73,33).

Secara umum, TPT Kalimantan Selatan mengalami tren penurunan dari 4,74% (2022) ke 4,20% (2024), dengan target 2026 berada pada kisaran 3,56 – 4,14%.

- Daerah dengan TPT tertinggi pada 2024 adalah Kab. Tanah Bumbu (6,37%) dan Kab. Kotabaru (6,02%).
- Sedangkan TPT terendah terdapat di Kab. Tapin sebesar 3,86%, dan ditargetkan bisa ditekan hingga 3,09 - 3,67 di tahun 2026.
- Kota Banjarbaru juga menunjukkan penurunan TPT dari 5,47% (2022) menjadi 4,93% (2024), dengan target 2026 di angka 4,31 – 4,89%.

Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan secara bertahap meningkat dari 5,11% (2022) ke 5,05% (2024), dan ditargetkan tumbuh di kisaran 5,3 – 5,4% (2025) dan 5,6 – 6,4% (2026).

- Pertumbuhan ekonomi tertinggi pada 2024 terdapat di Kota Banjarbaru (6,71%), disusul oleh Kota Banjarmasin (5,55%).
- Kab. Barito Kuala mencatat angka pertumbuhan yang relatif rendah yaitu 4,35% (2024), namun tetap ditargetkan meningkat hingga 4,5 - 5,2 pada 2026.
- Beberapa kabupaten seperti Kab. Tanah Laut dan Kab. Hulu Sungai Utara memperlihatkan pertumbuhan yang stabil di atas 5%.

Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan secara konsisten. Capaian kemiskinan provinsi menurun dari 4,61% pada 2022 menjadi 4,11% di 2024, dengan target tahun 2026 sebesar 3,23 – 3,46%.

- Kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan tertinggi adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara (6,25% pada 2023 dan ditargetkan 4,55 - 5,05 pada 2026), serta Kabupaten Hulu Sungai Tengah (5,81% pada 2023).

- Sementara kabupaten/kota dengan kemiskinan terendah adalah Kabupaten Banjar (2,44% pada 2023, target 2026: 1,72 - 2,22)
- Kota seperti Banjarbaru dan Banjarmasin juga menunjukkan penurunan yang stabil dengan target kemiskinan tahun 2026 masing-masing antara 3,89 - 4,39 dan 3,04 - 3,54.

Indeks ini mencerminkan kondisi dan keberlanjutan lingkungan hidup. Provinsi Kalimantan Selatan mencatat IKLH sebesar 71,97 (2022) yang meningkat menjadi 75,7 (2024), dengan target mencapai 72,53 pada 2026.

- Wilayah dengan IKLH tertinggi adalah Kabupaten Tabalong, dengan capaian 73,89 pada 2024 dan target 2026 sebesar 72,17.
- Sebaliknya, IKLH terendah terdapat di Kota Banjarmasin (60,36 pada 2024), yang menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas lingkungan kota.
- Kabupaten/kota lainnya menunjukkan peningkatan yang moderat, misalnya Kabupaten Tapin meningkat dari 65,65 (2022) menjadi 66,91 (2024).

Gini Rasio mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (0 = merata sempurna; 1 = timpang total). Provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan penurunan ketimpangan dari 0,317 (2022) ke 0,302 (2024), dengan target 2026 berada di kisaran 0,284 – 0,294.

- Kota Banjarmasin memiliki Gini Rasio tertinggi pada 2022 (0,343) dan ditargetkan menurun menjadi 0,285 - 0,296 di 2026.
- Gini Rasio terendah ada di Kab. Hulu Sungai Tengah dengan capaian 0,225 pada 2023 dan target 2026 sebesar 0,205 - 0,213.
- Penurunan juga terlihat di Kab. Balangan dari 0,266 (2022) ke target 0,235 - 0,244 (2026).

Pembangunan makro di Kalimantan Selatan menunjukkan tren positif pada hampir semua indikator: peningkatan IPM, penurunan pengangguran dan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang stabil, perbaikan kualitas lingkungan, serta penurunan ketimpangan pendapatan. Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang memerlukan perhatian khusus, terutama pada daerah-daerah dengan capaian indikator di bawah rata-rata provinsi.

Namun demikian, tantangan masih ada dalam hal disparitas antarwilayah, terutama antara kota dan kabupaten, serta perlunya akselerasi di daerah-daerah dengan capaian indikator yang masih rendah. Seluruh tren positif pada enam indikator makro pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan—yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Pengangguran Terbuka

(TPT), Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Gini Rasio—menunjukkan arah pembangunan yang konsisten dan terukur.

Dipastikan bahwa setiap target yang telah ditetapkan akan memberikan dampak nyata terhadap capaian indikator makro pembangunan, sebagaimana telah disepakati bersama dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2025. Keberhasilan pencapaian indikator makro tersebut memerlukan sinergi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, lembaga vertikal, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan program dan kegiatan prioritas. Hal ini mencerminkan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan yang inklusif, berkelanjutan, serta merata antarwilayah dan kelompok masyarakat.



RKPD 2026

Provinsi Kalimantan Selatan

BAB VI

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat transformasi sosial dan ekonomi menuju daya saing daerah yang lebih tinggi, sejalan dengan posisi strategis Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbang logistik Kalimantan. Tahun ini juga menjadi fondasi pelaksanaan visi dan misi Gubernur serta momentum awal pelaksanaan RPJMD 2025–2029. RKPD Tahun 2026 menjadi instrumen penting dalam menyelaraskan arah pembangunan daerah dengan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN dan RKP 2026.

Berbagai masukan dan aspirasi yang diperoleh melalui Musrenbang, pokok-pokok pikiran DPRD, dan forum lintas perangkat daerah telah dihimpun dan dipadukan dengan hasil analisis isu strategis daerah serta arah kebijakan nasional. Hasil integrasi ini menjadi dasar dalam menetapkan tema pembangunan daerah, prioritas, dan sub prioritas pembangunan tahun 2026 yang akan menjadi pijakan utama dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan, RKPD Tahun 2026 disusun untuk menjabarkan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029. Penyusunan RKPD ini dilakukan dengan mempertimbangkan keterkaitan antara dokumen perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta memperhatikan dinamika pembangunan terkini dan isu strategis yang berkembang. Dalam perumusannya, RKPD 2026 mengacu pada dokumen RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan 2025–2045, RPJMN 2025–2029, serta RKP Tahun 2026 dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), serta pengarusutamaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

6.1 Tema, Prioritas, dan Sub Prioritas Pembangunan Tahun 2026

RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian visi, misi, dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2025–2029. Tahun 2026 menjadi fondasi awal bagi transformasi sosial dan ekonomi daerah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, RKPD memuat tema

pembangunan, prioritas, dan sub prioritas sebagai landasan program dan kegiatan strategis daerah.

Tahun 2026 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, sekaligus menjadi tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2025–2029 dan tahun penting dalam membangun fondasi transformasi sosial dan ekonomi nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Tahun 2026 diarahkan untuk menjamin konsistensi dan sinergi antara rencana pembangunan nasional dan daerah, serta menjawab tantangan pembangunan jangka menengah dan isu-isu strategis daerah.

Penyusunan RKPD ini mengacu pada pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS), dengan penajaman melalui evidence-based planning dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), forum konsultasi publik, serta Pokok-Pokok Pikiran DPRD. Selain itu, pengarusutamaan SDGs, transformasi digital, penguatan data daerah, dan pengembangan kapasitas fiskal turut menjadi bagian penting dalam pengambilan arah kebijakan pembangunan tahun 2026.

6.1.1 Tema Pembangunan Daerah Tahun 2026

Tema pembangunan daerah tahun 2026 disusun untuk menggambarkan arah kebijakan pembangunan tahunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah, tujuan pembangunan jangka menengah daerah dalam RPJMD, serta prioritas pembangunan nasional dalam RKP 2026. Penetapan tema ini memperhatikan tantangan dan isu strategis yang dihadapi daerah, sekaligus menjadi pengarah utama dalam perumusan program dan kegiatan prioritas.

Berdasarkan tema RKP Nasional Tahun 2026 yakni:

❖ **"Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif",** serta memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025–2029:

❖ **"KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan",** maka ditetapkan tema RKPD Tahun 2026:

❖ **"Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah yang Mendukung Pusat Distribusi Regional"**

Tema ini berfungsi sebagai jembatan perencanaan antara visi jangka panjang daerah (RPJPD), tahapan transformasi dalam RPJMD, serta agenda nasional RPJMN dan RKP. Terdapat tiga fokus utama yang ditekankan dalam tema ini:

1. **Penguatan Daya Saing SDM:** Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, produktivitas tenaga kerja, dan reformasi layanan dasar masyarakat;
2. **Pengembangan Sektor Unggulan:** Hilirisasi SDA, pertanian modern, UMKM berbasis digital, pariwisata unggulan, dan industri kreatif;
3. **Distribusi Regional:** Penguatan konektivitas wilayah, logistik regional, dan transformasi pusat pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan menuju hub strategis nasional.

Tema ini juga sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam RKP 2026, yang menekankan pada lima pilar utama:

1. **Swasembada Pangan dan Energi,** melalui pembangunan lumbung pangan nasional, energi baru terbarukan, dan sistem penyediaan air minum (SPAM);
2. **Peningkatan Produktivitas dan Teknologi,** melalui makan bergizi gratis, sekolah unggulan, transformasi digital dan penguatan inovasi daerah;
3. **Percepatan Hilirisasi dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif,** dengan menekankan nilai tambah SDA, hilirisasi industri strategis dan penguatan UMKM koperasi desa;
4. **Penurunan Kemiskinan dan Ketimpangan,** melalui pembangunan rumah rakyat, digitalisasi bansos, dan pemberdayaan kelompok rentan;
5. **Penguatan Ketahanan Iklim dan Tata Kelola Pemerintahan,** melalui pengurangan emisi, pengelolaan lingkungan hidup, serta reformasi birokrasi dan pelayanan publik berbasis SPBE.

Untuk mendukung pencapaian tema pembangunan, serta menjawab isu strategis pembangunan daerah, pokok pikiran DPRD, dan sasaran pembangunan nasional, maka ditetapkan 5 (lima) prioritas pembangunan daerah yang dijabarkan ke dalam 20 (dua puluh) sub prioritas sebagai berikut:

1. PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2026 yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas Pendidikan
- b. Peningkatan Akses dan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Layanan Kesehatan
- c. Peningkatan Prestasi olahraga dan Kepemudaan
- d. Penurunan Prevalensi Stunting
- e. Pelestarian Budaya
- f. Peningkatan Akses Disabilitas dan Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Sosial

2. PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PEREKONOMIAN BERBASIS KEWILAYAHAN

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2026 yaitu:

- a. Peningkatan pelayanan Infrastruktur Dasar
- b. Penguatan Konektivitas antar Wilayah
- c. Pengembangan Moda Transportasi Masal
- d. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi

3. PENINGKATAN SEKTOR UNGGULAN (INDUSTRI, UMKM, PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PARIWISATA) DIDUKUNG OLEH INVESTASI, TENAGA KERJA BERDAYA SAING, DAN ENERGI BERKELANJUTAN

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2026 yaitu:

- a. Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri
- b. Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri
- c. Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan
- d. Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing
- e. Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berdaya Saing

4. PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KAPASITAS MITIGASI SERTA PENANGANAN BENCANA

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2026 yaitu:

- a. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup
- b. Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan

5. PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA PELAYANAN PUBLIK

Dengan Sub Prioritas pada RKPD 2026 yaitu:

- a. Penguatan Reformasi Birokrasi
- b. Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik
- c. Pengembangan Satu Data Kalsel

Berdasarkan tema, sub tema, prioritas, dan sub prioritas di atas maka ditetapkan program-program prioritas sebagai berikut:

PRIORITAS #1 PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA

1. Sub Prioritas Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

- b. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 - c. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
2. Sub Prioritas Peningkatan Kualitas Kesehatan dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - b. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 - c. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
3. Sub Prioritas Peningkatan Prestasi olahraga dan Kepemudaan dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN
4. Sub Prioritas Penurunan Prevalensi Stunting dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - b. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - c. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
 - d. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - g. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - h. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - i. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 - j. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 - k. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 - l. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
 - m. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - n. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
 - o. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
 - p. PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT
 - q. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
5. Sub Prioritas Pelestarian Budaya dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM BUDAYA DAN SASTRA

- b. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - c. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
 - d. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
6. Sub Prioritas Peningkatan Akses Disabilitas dan Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Sosial dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

PRIORITAS #2 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PEREKONOMIAN BERBASIS KEWILAYAHAN

1. Sub Prioritas Peningkatan pelayanan Infrastruktur Dasar dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL
 - d. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
 - e. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
 - g. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - h. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
 - i. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
 - j. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
2. Sub Prioritas Penguatan Konektivitas antar Wilayah dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - b. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
3. Sub Prioritas Pengembangan Moda Transportasi Masal dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
 - c. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
4. Sub Prioritas Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
 - b. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

- c. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
- d. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM
- e. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
- f. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
- g. PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
- h. PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
- i. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
- j. PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

PRIORITAS #3 PENINGKATAN SEKTOR UNGGULAN (INDUSTRI, UMKM, PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PARIWISATA) DIDUKUNG OLEH INVESTASI, TENAGA KERJA BERDAYA SAING, DAN ENERGI BERKELANJUTAN

1. Sub Prioritas Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI TERBARUKAN
 - b. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
 - c. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
 - d. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
 - e. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN DAN DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
 - g. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - i. PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
 - j. PROGRAM PENGENDALIAN IZIN INDUSTRI
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
2. Sub Prioritas Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri dengan program prioritas sebagai berikut:
 - a. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
 - b. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - c. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
 - d. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
 - e. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- f. PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN
 - g. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
 - i. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
 - j. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 - l. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
 - m. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
 - n. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
 - o. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
 - p. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
 - q. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - r. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - s. PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
 - t. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
3. Sub Prioritas Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR
 - b. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
 - c. PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN
 - d. PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
 - e. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - f. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - g. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI
 - h. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI
 - i. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4. Sub Prioritas Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - b. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - c. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- d. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
 - e. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
 - f. PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KOPERASI
 - g. PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA
 - h. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
 - i. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - j. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
5. Sub Prioritas Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berdaya Saing dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
 - b. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - c. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
 - d. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
 - e. PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN
 - f. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
 - g. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

**PRIORITAS #4 PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KAPASITAS MITIGASI SERTA
PENANGANAN BENCANA**

1. Sub Prioritas Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
 - b. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
 - d. PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
 - e. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH
 - f. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - g. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - h. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

- i. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
 - j. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
 - k. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
 - l. PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
 - m. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
 - n. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - o. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
2. Sub Prioritas Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - c. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
 - d. PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA
 - e. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

**PRIORITAS #5 PENINGKATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG FOKUS PADA
PELAYANAN PUBLIK**

1. Sub Prioritas Penguatan Reformasi Birokrasi dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
 - b. PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM
 - c. PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
 - d. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH
 - e. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH
 - f. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
 - g. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
 - h. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
 - i. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 - j. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 - k. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- l. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
 - m. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
 - n. PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG
 - o. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 - p. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (BLUD)
 - q. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
 - r. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
 - s. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
2. Sub Prioritas Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK
 - b. PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA
 - c. PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
 - d. PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
3. Sub Prioritas Pengembangan Satu Data Kalsel dengan program prioritas sebagai berikut:
- a. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL
 - b. PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

6.2 Program Prioritas Daerah

Program prioritas pembangunan daerah tahun 2026 ditetapkan untuk mendukung pencapaian tema, prioritas, dan sub prioritas pembangunan sebagaimana telah dirumuskan sebelumnya. Penetapan program prioritas ini mempertimbangkan keterkaitannya dengan sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029, arah kebijakan nasional dalam RKP Tahun 2026, serta isu-isu strategis yang berkembang di wilayah provinsi.

Program-program prioritas disusun melalui proses perencanaan partisipatif yang mengintegrasikan hasil Musrenbang, forum lintas perangkat daerah, serta masukan dari pokok-pokok pikiran DPRD. Setiap program dirancang untuk memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, satu program dapat mendukung lebih dari satu sub prioritas, dan dapat pula dilaksanakan oleh lebih dari satu perangkat daerah sesuai dengan kewenangan dan

peran masing-masing. Oleh karena itu, dalam matriks program prioritas yang disajikan, beberapa program akan muncul lebih dari satu kali sesuai dengan sub prioritas dan perangkat daerah penanggung jawabnya.

Tabel 6.1 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
PD 1 : PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG UNGGUL DAN BERBUDAYA							
1.1	Peningkatan Kualitas Pendidikan	Rata-Rata Lama Sekolah	8,83	tahun	Program Pengelolaan Pendidikan	888.688.139.283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.964.293.013.841	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
					Program Kesejahteraan Rakyat	84.300.000.000	Biro Kesra
1.2	Peningkatan Akses dan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Layanan Kesehatan	Usia Harapan Hidup (UHH)	72,3	tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	839.114.756.687	Dinas Kesehatan, RS Ulin, RS Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum, RSGM Gusti Hasan Aman
					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	37.006.265.447	Dinas Kesehatan, RS Ansari Saleh, RSJ Sambang Lihum, RSGM Gusti Hasan Aman
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.663.322.500	Dinas Kesehatan
					Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	604.398.100	Dinas Kesehatan
1.3	Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	54,66		Program Pengelolaan Pendidikan	888.688.139.283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	28.170.574.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
		Persentase Masyarakat Usia 7-60 Tahun yang berolahraga	43	%	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	142.555.521.913	Dinas Pemuda dan Olahraga

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
	Jumlah Medali Emas	45	medali	Program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan	142.555.521.913	Dinas Pemuda dan Olahraga
1.4	Penurunan Prevalensi Stunting	19,5		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.585.621.500	Dinas PKP
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.762.922.650	Dislutkan
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	4.719.291.325	Dinas Sosial
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakata n, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	5.602.705.075	DPMD
				Program Kesejahteraan Rakyat	84.300.000.000	Biro Kesra
				Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	2.849.999.100	DP3AKB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	1.199.991.175	DP3AKB
				Program Pengarusutam aan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	1.749.815.000	DP3AKB
				Program Pengendalian Penduduk	2.006.183.900	DP3AKB
				Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	839.114.756.687	Dinas Kesehatan
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya	37.006.265.447	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
					Manusia Kesehatan		
					Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	2.663.322.500	Dinas Kesehatan
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.964.293.013.841	BPKAD
					Program Pengelolaan Persampahan	4.776.844.635	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.409.998.900	
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	149.335.088.600	
1.5	Pelestarian Budaya	Indeks Pembangunan Kebudayaan	66,29		Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	394.011.900	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
					Program Pengembangan Kebudayaan	13.889.136.100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Taman Budaya, Museum
					Program Pembinaan Sejarah	9.379.446.290	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Taman Budaya, Museum
					Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	5.752.255.220	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Taman Budaya, Museum
1.6	Peningkatan Akses Disabilitas dan Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Sosial	Persentase PPKS yang dilayani dan direhabilitasi Sosial	100	%	Program Rehabilitasi Sosial	37.580.716.106	Dinas Sosial
		Persentase penyandang disabilitas terlantar yang	100	%	Program Rehabilitasi Sosial	37.580.716.106	Dinas Sosial

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
	terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti					
PD 2 : PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DASAR DAN PEREKONOMIAN BERBASIS KEWILAYAHAN						
2.1	Peningkatan Akses Pelayanan Infrastruktur Dasar Berbasis Kewilayahan	Indeks Infrastruktur Dasar	0,47	poin	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	149.335.088.600 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	40.455.000.800 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	19.409.998.900 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	8.000.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.944.018.800 Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Pengembangan Perumahan	23.900.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Kawasan Permukiman	14.068.720.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
					Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	24.630.000.000 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.2	Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Ekonomi dan Pendukung Konektivitas Antar Wilayah Berbasis Kewilayahan	Indeks Konektivitas	0,65	poin	Program Penyelenggara an Jalan	1.958.600.000.00 0 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Penyelenggara	16.220.000.000 Dinas Pekerjaan Umum dan

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
					an Penataan Ruang		Penataan Ruang
					Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	201.718.551.500	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2.3	Pengembangan Moda Transportasi Massal	Indeks Konektivitas	0,65	poin	Program Pengelolaan Pelayaran	4.572.996.700	Dinas Perhubungan
					Program Penyelenggara an Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	114.958.727.700	Dinas Perhubungan
PD 3 : PENINGKATAN SEKTOR UNGGULAN (INDUSTRI, UMKM, PERDAGANGAN, PERTANIAN DAN PARIWISATA) DIDUKUNG OLEH INVESTASI, TENAGA KERJA BERDAYA SAING, DAN ENERGI BERKELANJUTAN							
3.1	Peningkatan Investasi Berdampak Pada Daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri	Bauran Energi (%)	16,8	%	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	13.373.678.000	Dinas ESDM
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)	15,67	Triliun Rupiah	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.495.190.800	Dinas PMPTSP
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN non Psertambahan (Triliun Rupiah)	7,8	Triliun Rupiah	Program Promosi Penanaman Modal	2.110.927.600	Dinas PMPTSP
					Program Pelayanan Penanaman Modal	2.689.172.600	Dinas PMPTSP
					Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	1.831.830.200	Dinas PMPTSP
					Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	869.742.900	Dinas PMPTSP

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.295.943.100	Biro Perekonomian
					Program Pengelolaan Hutan	19.897.818.450	Dinas Kehutanan
		LPE Sektor Industri Pengolahan	5,25 - 6,5	%	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	11.905.842.650	Dinas Perindustrian
					Program Pengendalian Izin Usaha Industri	448.529.000	Dinas Perindustrian
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	877.991.400	Dinas Perindustrian
3.2	Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian untuk Mendukung Hilirisasi Industri	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	4,22	%	Program Pengelolaan Hutan	19.897.818.450	Dinas Kehutanan
					Program Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan	1.856.488.100	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	256.032.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		LPE Sektor Pertanian (%)	3,75 - 4,75	%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	93.102.605.750	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	839.114.756.687	Dinas Kesehatan

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
		Persentase peningkatan produktivitas tanaman pangan dan Hortikultura (%)	1,68	%	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	42.523.322.900	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Produktivitas Tanaman Perkebunan (Karet) per Hektar per tahun	77		Program Penyuluhan Pertanian	15.555.626.700	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
		Persentase peningkatan produksi peternakan (%)	9	%	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	1.532.761.800	Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Program Perizinan Usaha Pertanian	448.385.400	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (Ton)	215.500	ton	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	20.111.956.115	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi (Ton)	198.450	ton	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	9.921.537.912	Dinas Kelautan dan Perikanan
					Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	4.762.922.650	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100		Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	6.922.138.400	Dinas Kelautan dan Perikanan

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
		Kawasan konservasi daerah yang operasional	179.659,89		Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil	10.581.000.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai Tukar Petani (%)	103,8	%	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	8.230.169.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	3.585.621.500	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Penanganan Kerawanan Pangan	1.110.549.000	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Pengawasan Keamanan Pangan	1.470.928.300	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
					Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	4.482.893.810	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Dinas Perkebunan dan Peternakan
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.295.943.100	Biro Perekonomian
					Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	4.743.880.400	BIRO HUKUM
3.3	Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan	LPE Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	9,1 - 10	%	Program Pengembangan Ekspor	2.253.626.925	Dinas Perdagangan
		Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	14	%	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	1.632.325.200	Dinas Perdagangan
		Peningkatan Nilai	14	%	Program Perizinan Dan	705.829.825	Dinas Perdagangan

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
		Ekspor Non Migas (%)			Pendaftaran Perusahaan		
					Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	764.347.300	Dinas Perdagangan
		Rasio Pertumbuhan Wirausaha Baru	22,67		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4.771.543.500	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengembangan Umkm	3.003.418.750	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	949.999.800	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.548.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.295.943.100	Biro Perekonomian
3.4	Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing	LPE sektor Penyediaan akomodasi dan makan minum	8,25 - 9,1	%	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	31.528.563.800	Dinas Pariwisata
		Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan (%)	5	%	Program Pemasaran Pariwisata	14.497.255.200	Dinas Pariwisata
		Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi (%)	10	%	Program Pemasaran Pariwisata	14.497.255.200	Dinas Pariwisata
		Tingkat hunian akomodasi (%)	56	%	Program Pemasaran Pariwisata	14.497.255.200	Dinas Pariwisata
		Persentase Peningkatan	5	%	Program Pengembangan	4.000.000.000	Dinas Pariwisata

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
		n Pendapatan Produk Kreatif (%)			Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		
		Pengeluaran Per Kapita (Rp/org/thn)	12.371.414	Rp/org/thn	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	4.771.543.500	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pengembangan Umkm	3.003.418.750	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	1.548.000.000	Dinas Koperasi dan UKM
					Program Peningkatan Kerja Sama Desa	4.167.112.375	DPMD
					Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	28.170.574.000	Dinas Pemuda dan Olahraga
					Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.295.943.100	Biro Perekonomian
					Program Pengelolaan Hutan	19.897.818.450	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.944.018.800	Diskominfo
3.5	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang Berdaya Saing	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,6	%	Program Perencanaan Tenaga Kerja	332.687.000	Disnakertrans
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,71	%	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	9.156.203.080	Disnakertrans
		Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi (%)	21,73	%	Program Penempatan Tenaga Kerja	5.581.884.660	Disnakertrans
		Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah	31,31	%	Program Hubungan Industrial	2.781.200.400	Disnakertrans

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
		Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi (%)					
		Cakupan kepersertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	28,76	%	Program Pengawasan Ketenagakerjaan	6.701.768.500	Disnakertrans
		Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	28,125	%	Program Pengelolaan Pendidikan	888.688.139.283	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52,5	%	Program Pengembangan Kurikulum	300.000.000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
PD 4 : PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN KAPASITAS MITIGASI SERTA PENANGANAN BENCANA							
4.1	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lahan	56,84	poin	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	3.357.445.950	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	865.944.375	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	812.022.875	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Persampahan	4.776.844.635	Dinas Lingkungan Hidup
					Program Pengelolaan Hutan	19.897.818.450	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)	445.494.800	Dinas Kehutanan

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
4.2	Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Daerah	0.66	poin	Program Pengelolaan Hutan	19.897.818.450	Dinas Kehutanan
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	256.032.800.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengembangan Perumahan	23.900.000.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
PD 5 : Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik							
5.1	Penguatan Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	76.84		Program Perekonomian Dan Pembangunan	2.295.943.100	Biro Perekonomian
		Opini BPK	WTP		Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum	4.743.880.400	Biro Hukum
		SAKIP	A		Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	1.483.257.000	Biro Adbang
					Program Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	3.611.183.300	Biro Pemerintahan dan Otda
					Program Kepegawaian Daerah	19.946.871.125	BKD
					Program Penyelenggaraan Pengawasan	12.751.812.700	Inspektorat
					Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	4.903.241.800	Inspektorat
					Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.490.990.500	BAPPEDA
					Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	10.451.281.000	BAPPEDA
					Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.964.293.013.84 1	BPKAD
					Program Pengelolaan	43.601.916.500	BAPENDA

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
					Pendapatan Daerah		
					Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	4.114.211.200	BPKAD
					Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	107.071.891.400	SETWAN
					Program Pelayanan Penghubung	1.021.893.200	BANHUB
					Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	5.915.025.800	BRIDA
					Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi (BLUD)	731.222.229.302,00	RSULIN, RSANSAL, RSJ SAMLIH
					Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	839.114.756.687	RSGM
					Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	10.293.728.100	Bakesbangpol
					Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	24.880.954.675	Satpol PP dan Damkar
5.2	Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,65	poin	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	17.944.018.800	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	2.291.374.150	Dinas Komunikasi dan Informatika

PRIORITAS DAERAH / SUB PRIORITAS		INDIKATOR SASARAN	TARGET 2026	SATUAN	PROGRAM PRIORITAS	PAGU INDIKATIF	SKPD
					Program Kebijakan Dan Pelayanan Pengadaan Barang Dan Jasa	6.273.864.900	Biro PBJ
					Program Pendaftaran Penduduk	2.921.788.600	Disdukcapil
5.3	Pengembangan Satu Data Kalsel	Meningkatnya Data Statistik Sektoral Yang Akurat	255	data	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.466.904.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
					Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6.490.990.500	BAPPEDA

6.3 Rencana Kerja Perangkat Daerah Dan Pendanaan

Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025–2029. Rencana ini mencerminkan hasil penjabaran dari prioritas dan subprioritas pembangunan, serta menjadi panduan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi.

Setiap perangkat daerah menyusun rencana kerja yang mengacu pada arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, serta menyesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi, potensi wilayah, dan kapasitas fiskal yang tersedia. Penyusunan rencana kerja juga memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pengarusutamaan TPB/SDGs, serta mendorong kolaborasi lintas perangkat daerah dan antar level pemerintahan.

Pendanaan program dan kegiatan tidak hanya bersumber dari APBD Provinsi Kalimantan Selatan, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan berbagai sumber pembiayaan yang sah dan potensial guna memperkuat kapasitas fiskal daerah. Diversifikasi pendanaan ini penting untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan keberlanjutan pelaksanaan program prioritas.

Sumber pembiayaan alternatif yang dapat dimobilisasi meliputi:

- Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha, yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan sosial, lingkungan, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat;

- Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembangunan infrastruktur publik dan layanan strategis;
- Hibah dan Bantuan Luar Negeri, baik dalam bentuk teknis maupun pendanaan langsung;
- Dana Transfer Pusat, termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK), insentif fiskal, dan dana tugas pembantuan;
- Pembiayaan inovatif lainnya, seperti obligasi daerah, Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dan model pembiayaan berbasis kinerja (output-based financing).

Berbagai upaya tersebut diarahkan untuk memperluas ruang fiskal tanpa menambah beban APBD secara langsung, serta mendorong partisipasi aktif sektor swasta dan mitra pembangunan dalam mendukung pembangunan daerah.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024, dilakukan pemutakhiran terhadap klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Pemutakhiran ini mencakup koreksi nomenklatur, pembaruan indikator, serta penyesuaian satuan dan target kinerja, dan diberlakukan mulai tahun perencanaan 2025.

Berdasarkan hasil verifikasi akhir, komponen perencanaan dalam RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan mencakup 159 program, 342 kegiatan, dan 1.149 sub kegiatan. Seluruh program dan kegiatan tersebut telah disusun untuk menghasilkan output dan outcome yang terukur dan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Rincian lengkap mengenai rencana kerja masing-masing perangkat daerah dan estimasi pendanaannya dapat dilihat pada Buku II RKPD Tahun 2026 Provinsi Kalimantan Selatan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan target kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 diarahkan dalam upaya pencapaian kinerja pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari penjabaran target kinerja pemerintahan yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Dalam dokumen tersebut, termuat sasaran kinerja daerah yang disusun berdasarkan tujuan pembangunan daerah. Penetapan sasaran kinerja daerah berdasarkan kerangka pendekatan strategis perencanaan dengan melakukan analisis faktor eksternal dan faktor internal. Sasaran kinerja daerah tersebut pada proses pengukurannya diterjemahkan ke dalam indikator kinerja daerah sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja pembangunan dengan penjabaran kinerja jangka menengah ke dalam kinerja tahunan.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun yang akan datang. Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Sehingga untuk pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat dengan ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama yang tetap berlandaskan dengan tinjauan visi dan misi gubernur dan wakil gubernur beserta turunannya.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes/hasil) dari kegiatan (output/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) di mana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (outcomes) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media

perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah telah direncanakan. Berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

7.1 Indikator Makro Daerah

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai indikator kinerja utama (*key performance indicator*). Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut.

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah,
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan,
3. Memfokuskan pada hal-hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah, dan
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Di dalam IKM Daerah terdapat 9 Indikator Makro, berikut secara rinci penetapan indikator kinerja makro pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 - 2029 dapat diuraikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Makro Daerah

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN AWAL (THN 2024)	TARGET TAHUN 2025 (RPJMD 2025-2029)	RKPD TAHUN 2025	TARGET CAPAIAN TAHUN 2026
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,3-5,4	4,97-5,28	5,6 – 6,4
2	PDRB per Kapita (Rp Juta)	60,213	68,940-72,700	69,59-69,65	76,1 – 78,4
3	Kontribusi PDRB Provinsi	1,3	1,3	1,32	1,3

NO	INDIKATOR KINERJA MAKRO DAERAH	KONDISI KINERJA TAHUN AWAL (THN 2024)	TARGET TAHUN 2025 (RPJMD 2025-2029)	RKPD TAHUN 2025	TARGET CAPAIAN TAHUN 2026
4	Tingkat Kemiskinan (%)	4,02	3,94 – 3,94	3,60-3,94	2,46 – 3,46
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,2	3,63 – 4,18	3,86-4,25	3,56-4,10
6	Rasio Gini	0,298	0,290 – 0,301	0,290 - 0,301	0,284 - 0,294
7	Indeks Modal Manusia	0,55	0,56	0,56	0,58
8	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	75,97	75,97 – 80,99	75,97	73,97 – 76,45
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	75,59	72,32	N/A	72,51
10	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	75,19	75,48	75,72	75,99

Sumber: Data BPS 2025, RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029, Desk Rakortekrenbang 2025

* Keterangan : Kondisi dan target N/A karena merupakan Indikator baru

7.2 Indikator Kinerja Utama

Selanjutnya disajikan 22 (dua puluh dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan 36 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025-2029. Target IKU dan IKD pada tahun 2025 menjadi acuan dalam menetapkan target capaian kinerja dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) pada tahun 2026. Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) RKPD 2026 sebagai berikut:

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.2 Penetapan Indikator Kinerja Utama Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,55	0,56	0,58	0,62
2	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,19	75,48	75,99	77,99

	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
3	Indeks Harmoni Indonesia*	Indeks	N/A	6	6,1	6,5
4	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	21,6	19,5	16,83
5	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	44,62	50,12	56,31	89,67
6	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	74,01	74,3	74,7	76,32
7	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	61,65	59,81-59,89	60,38-60,5	62,67-62,94
8	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,02	3,44 - 3,94	2,46 - 3,46	1,89 - 2,39
9	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,9	65,95	69,5	82,2
10	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,58	0,61	0,63	0,71
11	Indeks Konektivitas	Indeks	0,85	0,85	0,91	1,13
12	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3 – 5,4	5,6 - 6,4	6,2 - 8,2
13	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	60,213	68,940-72,700	76,1 – 78,4	110,270-115,580
14	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	53,01	54,73	56,525	63,35
15	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	Indeks	22,67	23,78	24,943	29,35
16	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Persen	10,95	11,68	11,88	12,66
17	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,16	5,4	5,95	8,15
18	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,07	8,08	8,09	8,1
19	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	6,36	6,37	6,37	6,4
20	Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen	4,35	4,79	5	7
21	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rupiah	24,85	25,40	26,40	30,40
22	Persentase Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	67,12	77,74	78,4	80,82
23	Indeks Williamson	Indeks	0,433	0,433	0,433	0,433
24	Rasio Gini	Poin	0,298	0,290 – 0,301	0,284 - 0,294	0,262-0,274
25	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,10	3,20-3,83
26	Indeks Desa	Indeks	77,01	77,5	78,22	80,5
27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,59	72,32	72,53	73,37
28	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,75**	83,79	82,75	80,49
29	Persentase Penurunan Emisi GRK (tahunan)	Persen	26,6	22,95	26,86	40,43
30	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	11,93	15	16,8	25,8
31	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,54	0,56	0,58	0,66
32	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,54	84,68	84,82	85,39
33	Nilai SAKIP	Poin	A (82,04)	82,96	83,88	87,69
34	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	WTP
35	Indeks Integritas	Indeks	71,53	76,36	77,34	81,05
36	Indeks Sistem Merit	Indeks	279	325	330	350
37	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	3	3,16

INDIKATOR		SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
38	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital***	Indeks	3,63	3,63	1,64	2,44
39	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,67

Sumber : RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029

* Keterangan : Kondisi dan target N/A karena merupakan Indikator baru

** Indeks SPBE secara nasional hanya berlaku sampai tahun 2025, selanjutnya diganti dengan Indeks Pemerintahan Digital mulai tahun 2026.

7.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Penyajian indikator kinerja daerah dibagi menjadi 4 (empat) aspek yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan umum, serta indikator kinerja kunci. Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolak ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Untuk indikator kinerja tahun 2026 disusun berdasarkan rencana prioritas pembangunan di mana 5 (lima) prioritas tersebut dilaksanakan secara terintegrasi.

PRIORITAS I – Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Unggul Dan Berbudaya. Pembangunan sumber daya manusia (SDM) selain difokuskan pada penguatan pendidikan dan kesehatan, juga diarahkan pada aspek spiritual dan nilai-nilai hidup yang luhur, berbudaya, dan berakhlak mulia. Sub prioritas terdiri atas : (1) Peningkatan Kualitas Pendidikan; (2) Peningkatan Akses dan Kualitas Sarana, Prasarana, dan Layanan Kesehatan ; (3) Peningkatan Prestasi Olahraga dan Kepemudaan; (4) Penurunan Prevalensi Stunting; (5) Pelestarian Budaya; (6) Peningkatan Akses Disabilitas dan Pemenuhan Layanan Kesejahteraan Sosial. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan Sosial
2. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pendidikan
 - b. Kesehatan
 - c. Sosial
 - d. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- e. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- f. Kepemudaan dan Olahraga
- g. Kebudayaan
- h. Perpustakaan
- i. Kearsipan
- j. Kesatuan Bangsa dan Politik

PRIORITAS II – Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan. Pembangunan di berbagai sektor didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana yang diutamakan untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendorong perekonomian daerah serta posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik. Penyediaan sarana dan prasarana diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan yang menjangkau seluruh wilayah serta tekoneksi dengan wilayah lain. Sub prioritas terdiri atas : (1) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Dasar; (2) Penguatan Konektivitas antar Wilayah; (3) Pengembangan Moda Transportasi Massal; (4) Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan Sdan Pemerataan Ekonomi
2. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Pertanahan
 - d. Lingkungan Hidup
 - e. Perhubungan
 - f. Komunikasi dan Informatika
 - g. Kelautan dan Perikanan
 - h. Pertanian

PRIORITAS III – Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, UMKM, Perdagangan, Pertanian dan Pariwisata) Didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, dan Energi Berkelanjutan. Perekonomian daerah dikembangkan dengan mengelola sumber daya alam didukung dengan sumber daya manusia yang unggul, dan infrastruktur yang handal. Penerapan inovasi serta teknologi informasi dan komunikasi dengan mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan, menjadi keniscayaan untuk menjawab tantangan ekonomi global. Posisi strategis Kalimantan Selatan yang berdampingan dengan IKN menjadi peluang untuk

mewujudkan gerbang logistik yang maju dan unggul. Sub prioritas terdiri atas : (1) Peningkatan Investasi Berdampaka pada daerah dan Pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) Mendukung Hilirisasi Industri; (2) Peningkatan Produksi dan Produktivitas dengan Teknologi Pertanian Untuk Mendukung hilirisasi Industri; (3) Pengembangan Distribusi Logistik dan Penguatan UMKM Berbasis Digital Untuk Menuju Gerbang Logistik Kalimantan; (4) Peningkatan Pariwisata Unggulan Daerah dan Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing; (5) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Transmigran yang Berdaya Saing. Dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
2. Aspek Daya Saing Daerah
3. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pendidikan
 - b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - c. Tenaga Kerja
 - d. Pangan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - f. Komunikasi dan Informatika
 - g. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - h. Penanaman Modal
 - i. Kepemudaan dan Olahraga
 - j. Kelautan dan Perikanan
 - k. Pariwisata
 - l. Pertanian
 - m. Kehutanan
 - n. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - o. Perdagangan
 - p. Perindustrian
 - q. Pengadaan

PRIORITAS IV – Peningkatan Kualitas Lingkungan dan Kapasitas Mitigasi serta Penanganan Bencana Pembangunan daerah dilakukan secara lestari dan berkelanjutan, sehingga akan memperkuat ketahanan daerah terhadap perubahan iklim dan bencana. Sumber daya alam dan potensi wilayah dikelola secara berimbang sehingga selain bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah, juga dapat mempertahankan kualitas lingkungan hidup. Sub prioritas

terdiri atas : (1) Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup; (2) Meningkatkan Ketahanan Daerah yang Berkelanjutan. Program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada :

1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Fokus Kesejahteraan Sosial
2. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - b. Perumahan dan Kawasan Permukiman
 - c. Lingkungan Hidup
 - d. Kehutanan

PRIORITAS V – Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Fokus Pada Pelayanan Publik. Penyelenggaraan pemerintahan daerah mengedepankan prinsip profesional, bersih, dan melayani serta berbasis digital Pelayanan publik yang mudah, cepat, dan transparan menjadi komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus daya tarik bagi peningkatan investasi daerah. Sub prioritas terdiri atas : (1) Penguatan Reformasi Birokrasi; (2) Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Rangka Meningkatkan Pelayanan Publik; (3) Pengembangan Satu Data Kalsel, dengan program-program terkait akan mendukung pencapaian target indikator kinerja daerah pada:

1. Indikator kinerja kunci, terdiri dari :
 - a. Kesehatan
 - b. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
 - c. Komunikasi dan Informatika
 - d. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - e. Kelautan dan Perikanan
 - f. Kehutanan
 - g. Energi dan Sumber Daya Mineral
 - h. Perencanaan dan Keuangan
 - i. Kepegawaian
 - j. Manajemen Keuangan

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini.

Tabel 7.3 Penetapan Indikator Kinerja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
I	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	82,95	83,16	83,83	86,55
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>)	Persen	3,68	3,02	2,48	1,13
3	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	Persen	N/A	45,91	49,29	62,81
4	Kapasitas Air Baku	m3/detik	N/A	5,28	5,3	5,37
5	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks	75,59	72,32	72,51	73,37
6	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,08	70,52	72,72	73,52
7	Indeks Kualitas Udara	Indeks	96,41	70,97	71,27	72,47
8	Indeks Kualitas Air Laut	Indeks	84,27	80,05	80,1	80,32
9	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	52	70,37	70,44	70,72
10	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	0,387	0,398	0,412	0,464
11	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	Persen	N/A	8,7	11,55	22,85
12	Persentase Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	Persen	9,2	9,76	17,32	47,56
13	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	Persen	65,85	66,41	68,56	77,15
14	Persentase Penurunan Intensitas Emisi GRK	Persen	72,52	75,97	73,97 – 76,45	82,88
15	Persentase Penurunan Emisi GRK:					
16	- Kumulatif	Persen	15,26	15,61	16,13	18,44
17	- Tahunan	Persen	26,6	22,95	26,86	40,43
18	Indeks Risiko Bencana	Indeks	103,75	83,79	82,75	80,49
19	Indeks Kapasitas Daerah	Indeks	0,54	0,56	0,58	0,66
II	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	5,05	5,3 - 5,4	5,6 - 6,4	6,2 - 8,2
2	Persentase Penduduk Miskin	Persen	4,02	3,44 - 3,94	2,46 – 3,46	1,89 - 2,39
3	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	60,210	68,940-72,700	76,1 – 78,4	110,270-115,580
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,2	3,63 - 4,18	3,56 - 4,10	3,20-3,83
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	Persen		50	52,5	62,5
6	Rasio Gini	Indeks	0,298	0,290 – 0,301	0,284 – 0,294	0,262-0,274
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,55	0,56	0,58	0,62
8	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	75,19	75,48	75,99	77,99
9	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,18	74,42	74,66	75,64
10	Prevalensi Stunting	Persen	22,9	21,6	19,5	16,83

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
11	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	146	189	172	102
12	Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>)	Persen	90	95	95	95
13	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>)	Persen	75,2	88	88,68	91,4
14	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Persen	N/A	98,9	98,94	99,08
15	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	- Literasi Membaca	Persen	15,38	15,38 - 15,38	25-40,38	63,47-78,85
	- Numerasi	Persen	0	0-7,69	1,92-9,61	9,61-17,3
16	Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:					
	- Literasi Membaca	Persen	52,78	55-57,5	56,39-58,89	61,93-64,43
	- Numerasi	Persen	43,82	45,26-47,76	46,16-48,66	49,76-52,26
17	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	9,02	9,13 - 9,15	9,25-9,27	9,72-9,75
18	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,62	8,71	8,8	9,14
19	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,87	13,33	13,46	13,99
20	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	81,16	82,38	83,61	88,74
21	Indeks Literasi Digital	Indeks	belum rilis	3,88	4,03	4,66
22	Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan	Ribu Rupiah/Ora ng/Tahun	13.399	13.860	14.338	16.417
23	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	Persen	N/A	10,5	10,58	10,89
24	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	Persen	N/A	74,78	75,8	79,89
25	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	Persen	N/A	26	28,13	36,63
26	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	Persen	N/A	39,52	42,17	52,76
27	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	N/A	6	6,1	6,5
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks	74,01	74,3	74,7	76,32
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	61,65	59,81-59,89	60,38-60,5	62,67-62,94
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	62,46	62,48	62,05	63,00
31	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	62,9	65,95	69,5	82,2
32	Indeks Ketimpangan Gender	Indeks	0,486	0,472	0,466	0,417

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
33	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	54,67	61,90	64,80	74,10
34	Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Indeks	N/A	54,05	54,95	58,55
35	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	52,09	58	58,3	59,2
36	Indeks Masyarakat Digital	Indeks	44,62	50,12	56,31	89,67
III	ASPEK DAYA SAING DAERAH					
1	Rasio Ketergantungan	Persen	47,1	47,16	47,12	46,61
2	Indeks Williamson	Indeks	0,433	0,433	0,433	0,433
3	Kontribusi Industri Pengolahan terhadap PDRB	Persen	10,95	11,68	11,88	12,66
4	Kontribusi Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB	Persen	1,98	2,12-2,37	2,21-2,48	2,56-2,89
5	Laju PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Persen	4,16	5,4	5,95	8,15
6	Laju PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	Persen	8,07	8,08	8,09	8,1
7	Laju PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi mobil dan sepeda motor	Persen	6,36	6,37	6,37	6,4
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	Ribu Orang	N/A	12,1	13,24	17,78
9	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi	Persen	N/A	10,72	10,9	11,61
10	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi	Persen	N/A	2,26	2,44	3,15
11	Rasio Kewirausahaan Daerah	Persen	2,95	3,02	3,07	3,26
12	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	N/A	0,78	0,79	0,82
13	Return on Aset (ROA) BUMD	Persen	N/A	0,68	0,75	1,04
14	Persentase Produk Tersertifikasi Halal	Persen	4,348	4,79	5	7
15	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Persen	70,22	70,44	70,44	70,44
16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan	Persen	51,9	52	53,5	55
17	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	51,71	53	54	62
18	Indeks Ekonomi Hijau	Indeks	53,01	54,73	56,525	63,35
19	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	22,67	23,78	24,943	29,35
20	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	6,89	7,21	7,54	8,84
21	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	Poin	10,5	10,3	10,15	9,55
22	Nilai Realisasi Investasi (PMA dan PMDN)	Triliun Rupiah	24,85	25,40	26,40	30,40
23	Kontribusi PDRB Provinsi	Persen	1,3	1,32	1,3	1,39
24	Kontribusi Pembentukan Modal Tetap Bruto terhadap PDRB	Persen	21,35	21,43	21,52	22,8
25	Kontribusi Ekspor Barang dan Jasa terhadap PDRB	Persen	67,12	77,74	78,4	80,82
26	Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi	Persen	11,93	15	16,8	25,8

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
27	Indeks Infrastruktur	Indeks	0,58	0,61	0,63	0,71
28	Indeks Infrastruktur Dasar	Indeks	0,45	0,49	0,51	0,6
29	Indeks Konektivitas	Indeks	0,85	0,85	0,91	1,13
30	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	Persen	60,6	64	66,25	75,25
31	Persentase Desa Mandiri	Persen	33,67	36,61	39,55	49,71
32	Indeks Desa	Indeks	77,01	77,5	78,22	80,5
33	Konsumsi Listrik per Kapita	kWh/kapita	N/A	942	1032	1409
34	Intensitas Energi Primer	SBM/miliar rupiah	N/A	144,29	141,5	130,89
35	Proporsi Kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap Nasional	Persen	N/A	0,52 WM Banjarmasin (terdiri dari Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tanah Laut)	0,52	0,53
36	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	Persen	1,54	1,92	1,91	1,87
37	Tingkat Inflasi	Persen	1,95	3,2-3,9	3,1-3,9	2,6-3,8
38	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	Persen	31,98	32,65	33,41	36,46
39	Aset Dana Pensiun/PDRB	Persen	0,12	0,13	0,14	0,16
40	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Provinsi	Rupiah	N/A	2.302.966,62	2.788.129,64	4.728.781,70
41	Total Kredit/PDRB	Persen	26,92	23,5	23,9	25,5
42	Inklusi Keuangan	Persen	N/A	87,98	88,69	91,54
IV	ASPEK PELAYANAN UMUM					
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	97,46	97,56	97,66	98,05
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	84,54	84,68	84,82	85,39
3	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/ Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	3,63* (nilai Indeks SPBE)	3,63* (nilai Indeks SPBE)	1,64	2,44
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,56	4,58	4,6	4,67
5	Nilai SAKIP	Indeks	A (82,04)	82,96	83,88	87,69
6	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Indeks Integritas	Indeks	71,53	76,36	77,34	81,05
8	Indeks Sistem Merit	Indeks	279	325	330	350
9	Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	2	2	3	3,16

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
10	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	Persen	90,74	100	100	100
11	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Persen	N/A	64,62	66,09	71,97
12	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi	Indeks	N/A	81,11 - 84,37	81,20- 84,45	81,54- 84,78
13	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,56	3,61	3,66	3,86
V	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
	PENDIDIKAN					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	Persen	88,19	73,31	74,31	78,31
2	Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas dalam pendidikan khusus	Persen	75,08	41,59	42,73	47,3
	KESEHATAN					
1	Rasio daya tampung rumah sakit rujukan	Rasio Daya tampung per 1.000 Penduduk	1,49	1,5	1,5	1,5
2	Persentase RS Rujukan provinsi yang terakreditasi	Persen	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	Persen	100	100	100	100
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					
1	Rasio luas kawasan pemukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	Persen	46,44	0,62	3,68	35,59
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengamanan pantai di WS Kewenangan provinsi	Persen	4,53	6,8	15,51	61,36
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi	Persen	56,76	39,08	39,75	42,41
4	Persentase kapasitas yang dapat terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	Persen	82	70	73,33	86,67

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
5	Rasio pelayanan pengolahan limbah domestik oleh SPAL Regional	Persen	0	0	0	0
6	Rasio kemantapan jalan	Persen	82,91	80	81	85
7	Rasio tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Persen	99,61	62,5	62,5	62,5
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Persen	98,67	100	100	100
2	Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Pemerintah Daerah Provinsi yang Memperoleh Fasilitas Penyediaan Rumah yang Layak Huni	Persen	0	100	100	100
3	Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	Persen	39,19	43,62	57,24	79,47
4	Persentase Satuan Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU	Persen	79,02	79,8	80,6	83,8
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	Persen	100	100	100	100
2	Persentase penanganan pra bencana	Persen	100	100	100	100
3	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	Persen	100	100	100	100
4	Persentase gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	Persen	100	100	100	100
5	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	90,74	100	100	100
SOSIAL						
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	94,17	100	100	100
2	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100
4	Persentase Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	Persen	100	100	100	100
5	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana provinsi	Persen	100	100	100	100
TENAGA KERJA						

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
1	Persentase kabupaten / kota yang menyusun rencana tenaga kerja	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	Persen	5,88	5,92	5,96	6,11
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	601.066.4 95,91	643.076.2 50,58	683.828.0 96,84	846.835.4 81,87
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan	Persen	58,58	58,98	59,11	60,96
5	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	Persen	47,11	43,26	43,58	45,09
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundang - undangan bidang ketenagakerjaan	Persen	58,58	58,98	59,11	60,96
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	Persen	32,95	32,97	33	35
2	Rasio kekerasan terhadap anak per 10.000 anak	Rasio	4,16	4,15	4,1	3,94
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Rasio	12,54	12,54	12,34	12,29
PANGAN						
1	Persentase Cadangan Pangan	Persen	214,89	248,45	276,74	276,74
PERTANAHAN						
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	Persen	N/A	100	100	100
2	Persentase pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang selesai tepat waktu.	Persen	4,78	100	100	100
3	Persentase ketersediaan pembangunan lintas kabupaten/kota	Persen	0	100	100	100
LINGKUNGAN HIDUP						
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,59	72,32	72,53	73,37
2	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH Dan PUU LH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persen	3,2	0	0	0
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Persentase informasi kependudukan yang dimanfaatkan	Persen	32,3	40	45	65

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
2	Persentase Kabupaten/Kota yang melaporkan data informasi kependudukan secara tepat waktu	Persen	100	100	100	100
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						
1	Persentase Peningkatan Status Desa Mandiri	Persen	56,28	5,02	5,29	6,71
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Rasio Angka Kelahiran Total	2,24	2,21	2,21	2,19
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (<i>Modern Contraceptive Prevalence Rate/ mCPR</i>)	Persen	75,87	76,37	76,87	78,87
3	Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	Persen	5,08	5,07	5,06	5
PERHUBUNGAN						
1	Rasio Konektivitas Provinsi	Rasio	0,649	0,65	0,66	1
2	V/C Ratio di Jalan Provinsi	Nilai	0,618	0,6	0,6	0,5
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah provinsi	Persen	100	77	78	82
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	Persen	100	100	100	100
3	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100	60	100
4	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (<i>Information on resources available to frontline service delivery units</i>)	Persen	100	100	100	100
5	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (<i>Public access to fiscal information</i>)	Persen	100	100	100	100
KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Persentase Koperasi yang berkualitas	Persen	38,81	40	45	65
2	Persentase Usaha Kecil yang menjadi wirausaha	Persen	0,3	0,4	0,5	0,9
PENANAMAN MODAL						
1	Persentase Peningkatan Investasi	Persen	25,75	34	35	43

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
	KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					
1	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	Persen	13,8	14,8	15	15,1
2	Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan	Persen	20,49	20,49	20,5	20,6
3	Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	182	185	188	200
	STATISTIK					
1	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Persen	100	100	100	100
	PERSANDIAN					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	Persen	84,03	70	73	85
	KEBUDAYAAN					
1	Terlestariannya Cagar Budaya	Persen	9,09	18,18	27,27	63,63
	PERPUSTAKAAN					
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	74,63	75	75.50	77.50
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	81,16	81,5	82	84
	KEARSIPAN					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Persen	83,3	48	48,5	50,5
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	Persen	100	100	100	100
	KELAUTAN DAN PERIKANAN					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) dari seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi	Ton	371.168,3 2	377.627,9 3	383.837,5 9	413.281,0 1
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundangan yang berlaku	Persen	100	100	100	100
	PARIWISATA					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	Persen	6,7	7	7,2	8
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke provinsi	Persen	48,27	10	10,5	12,5
3	Tingkat hunian akomodasi	Persen	40,48	52	54	62

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	Persen	1,93	2,44	2,46	2,61
PERTANIAN						
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	Ton/ha	4,42	4,55	4,55	4,55
2	Persentase Penurunan Kejadian Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (%)	Persen	-31,25	85	95	95
KEHUTANAN						
1	Peningkatan akses Legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Kerusakan Hutan per Tahun (deforestasi)	Persen	0,23	0,25	0,25	0,25
3	Persentase Luas Lahan Kritis Yang di Rehabilitasi	Persen	46,01	48	50	58
ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Perda	Persen	100	100	100	100
2	Persentase Desa Yang Teraliri Listrik	Persen	99,36	99,4	99,45	99,65
PERDAGANGAN						
1	Nilai Ekspor Non Migas	USD	11.357.831.553	11.457.124.553	11.586.124.100	12.056.567.199
2	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen	Persen	100	100	100	100
3	Persentase Komoditi Potensial yang Sesuai Dengan Ketentuan Berlaku	Persen	100	100	100	100
4	Tertib Usaha	Persen	100	100	100	100
6	Persentase Barang Barang Beredar yang Diawasi yang Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-undangan	Persen	100	100	100	100
7	Persentase Stabilitas dan Jumlah Ketersediaan Harga Barang Kebutuhan Pokok	Koefisien Variasi Harga Barang (rata-rata)	0,06	0,05	0,04	0,01
8	Persentase UMKM yang memperoleh fasilitasi promosi	Persen	100	100	100	100
PERINDUSTRIAN						
1	Pertambahan Jumlah Industri Besar di Provinsi	Persen	21,11	4,59	5,26	6,94
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	Persen	90,1	100	100	100
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	75	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI) bagi Industri Besar yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	100	100
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi yang dikeluarkan oleh instansi terkait	Persen	0	100	100	100
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	Persen	125	125	125	125
KEUANGAN						
1	<i>Budget Execution</i> : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Persen	-6,66	8,32	7,5	6,09
2	Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan	Persen	11,32	15,78	16,1	17,42
3	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	Persen	46,53	0,52	0,53	0,57
4	<i>Cash Management</i> : Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Persen	38,60	14,89	14,59	13,46
5	<i>Assets Management</i>	Persen	4	100	100	100
6	<i>Revenue mobilization</i> : Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Persen	16,74	11,17	9,8	4,32
7	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Rasio PAD	Persen	42,84	43,37	46,27	57,87
PENGAWASAN						
1	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2	2	3	3,16
2	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3	3	3,1	3.5
PENGADAAN						
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. yang ditandatangani pada kuartal pertama	Persen	0	0	1	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	Persen	18,57	15	15	15
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	Persen	73,36	30	30	30
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	Persen	81,74	82	84	85
KEPEGAWAIAN						

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE		TARGET	
			2024	Target 2025	2026	2030
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	76,5	77	77,5	80
2	Rasio pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	17,31	17,5	18	20
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	65,64	67	69	77

Sumber: RPJMD Prov. Kalsel Tahun 2025 – 2029, RKPD Prov. Kalsel Tahun 2025, Permendagri No. 59 thn 2021 dan Permendagri 18 thn 2020

* Keterangan : Kondisi dan target N/A karena merupakan Indikator baru

7.4 Asta Cita, Outcome Prioritas Dan Indikator Outcome

Asta Cita merupakan delapan cita-cita utama pembangunan nasional yang menjadi pedoman strategis dalam upaya mencapai Indonesia Emas 2045. Kedelapan cita tersebut mencakup aspek peningkatan kualitas manusia Indonesia, pengentasan kemiskinan, pemerataan ekonomi, ketahanan pangan dan energi, industrialisasi nasional, penguatan birokrasi, supremasi hukum, serta penguatan demokrasi dan kebudayaan. Dalam konteks daerah, *Asta Cita* diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan kapasitas SDM, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dokumen RPJMN 2025–2029 mendefinisikan delapan misi strategis — *Asta Cita* — sebagai arah kebijakan nasional:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2. **Memantapkan pertahanan dan keamanan**, serta mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air
3. **Mendorong infrastrukutr dan lapangan kerja berkualitas**, serta pengembangan kewirausahaan dan ekonomi kreatif
4. Memperkuat SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender
5. Mengakselerasi hilirisasi industri berbasis SDA dan maritim
6. **Membangun dari desa dan dari bawah** untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan
7. Mendorong reformasi politik, hukum, birokrasi, dan pemberantasan korupsi-narkoba-judi-penyelundupan

8. **Menjalin harmoni lingkungan dan budaya**, serta toleransi antarumat beragama untuk masyarakat yang adil dan makmur.



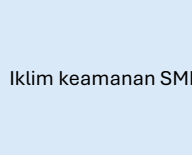
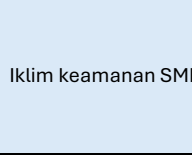
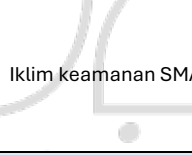
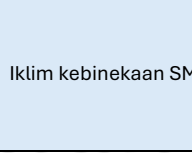
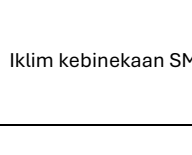
RKPD 2026

*Provinsi
Kalimantan Selatan*

Tabel 7.4 Asta Cita, Outcome Prioritas Dan Indikator Outcome

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
1. BIDANG URUSAN PENDIDIKAN						
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 16-18 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah	%	100	03/01/00 01.59
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	%	100	43,64
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	73,19	76,52
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMA berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,74	66,3
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata Kompetensi Literasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,9	74,98
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata Kompetensi Numerasi SMK berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	61,31	65,22
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan	Rata-rata kompetensi Literasi SDLB	Nilai	68,79	74,03

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	berdasarkan Asesmen Nasional			
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	72,31	78,1
9	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Literasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	69,33	77,45
10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SDLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	63,37	73,86
11	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMPLB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	67,25	74,34
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Rata-rata kompetensi Numerasi SMALB berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	64,34	69,65
13	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	85,83	89,08
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan	Tingkat Kepuasan Dunia Kerja Terhadap Budaya Kerja Lulusan SMK	%	82,84	86,26

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Minimal (SPM) Bidang Pendidikan				
15	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim keamanan SMA	Nilai	73,73	84,76
16	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim keamanan SMK	Nilai	70,68	73,64
17	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim keamanan SDLB	Nilai	77,53	81,47
18	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim keamanan SMPLB	Nilai	74,67	78,17
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim keamanan SMALB	Nilai	73,35	77,48
20	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim kebinekaan SMA	Nilai	73,5	74,41
21	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim kebinekaan SMK	Nilai	71,2	71,96

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
22	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklm kebinekaan SDLB	Nilai	73,55	72,82
23	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklm kebinekaan SMPLB	Nilai	73,07	77,74
24	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklm kebinekaan SMALB	Nilai	73,99	79,19
25	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklm Inklusivitas SMA	Nilai	62,98	65,33
26	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklm Inklusivitas SMK	Nilai	61,23	63,67
27	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklm Inklusivitas SDLB	Nilai	70,26	75,95
28	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	Iklm inklusivitas SMPLB	Nilai	71,51	75,07

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
29	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	 Iklim inklusivitas SMALB	Nilai	70,41	76,89
2. BIDANG URUSAN KESEHATAN						
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (Sdm), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	 Angka Kematian Ibu (AKI)	(per 100.000 kelahiran hidup)	109	128
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	(%)	98,7	100
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta.	Kab/Kota	19	1
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Angka Kematian Balita	Per 100.000 Kelahiran Hidup	13,8	10,5
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek)	Persentase	17,5	19,5
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Kesehatan Untuk Semua	Presentase lanjut usia yang mandiri	Persentase	77	79

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi depresi di umur lebih dari 15 Tahun	Persentase	1,4	0,4
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Pravelensi Merokok pada Penduduk 10-21 Tahun	Persentase	11,4	3,5
9	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Persentase kab/kota yang memiliki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/Kelurahan sesuai standar	Persentase	30	30
10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase rumah sakit pemerintah terakreditasi paripurna	Persentase	45	100
11	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Presentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar	Persentase	71	90
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Persentase Cakupan pemeriksaan kesehatan gratis	Persentase	46	46
13	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Kesehatan Untuk Semua	Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	Persentase	23,4	9,5

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.					
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Kab/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan	Kabupaten/ Kota	100	2
15	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Proporsi fasyankes terintegrasi Sistem Informasi Kesehatan Nasional	Persentase	55	55
16	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Kesehatan Untuk Semua	Insidensi Tuberkulosis	Kasus	252	252
3. BIDANG URUSAN SOSIAL						
1	Membangun Dari Desa Dan Dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi Dan Pemberantasan Kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial Yang Tergraduasi Dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	3000
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	25
3	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	23
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71,01	100

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
6	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
7	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
8	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
9	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
10	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Jumlah Keluarga Miskin Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	Keluarga	1500000	3000
11	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial ASN dan NON ASN yang Mengikuti Sertifikasi	Orang	6850	25
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kelembagaan yang Mengikuti Proses Akreditasi	Lembaga	2261	23
13	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan	Persentase	71,01	100

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
14	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
15	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
16	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
17	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
18	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	Persentase (%) korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Persentase	100	100
4. BIDANG URUSAN KEBUDAYAAN						
1	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71,67	20
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan	%	8,74	14

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,76	1,76
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20,17	27
5	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65,5	25
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian	%	32,46	57,5
7	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0,31	0,2
8	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang menonton pertunjukan seni	%	71,67	20
9	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang mengunjungi	%	8,74	14

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.		tempat/peninggalan sejarah/warisan budaya bersifat kebendaan			
10	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni	%	1,76	1,76
11	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase rumah tangga yang menyelenggarakan atau menghadiri upacara adat dalam setahun terakhir	%	20,17	27
12	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	%	65,5	25
13	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase satuan pendidikan yang mempunyai guru yang mengajar muatan lokal (bahasa daerah atau budaya lokal) dan/atau ekstrakurikuler kesenian	%	32,46	57,5
14	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	Persentase penduduk 15 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatannya itu sebagai sumber penghasilan (dalam setahun terakhir)	%	0,31	0,2
5. BIDANG URUSAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Terwujudnya Manajemen Bencana Yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol Pp, Satlinmas, Dan	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	75

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
		Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar				
2	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham).	Terwujudnya Manajemen Bencana Yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol Pp, Satlinmas, Dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	75
3	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (Ham).	Terwujudnya Manajemen Bencana Yang Terintegrasi, Pelayanan Satpol Pp, Satlinmas, Dan Pelayanan Pemadam Kebakaran Sesuai Standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	75
4	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Bencana	Nilai	76	75
5	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	Nilai	75	75
6	Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam	Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Sub Urusan Kebakaran	Nilai	75	75

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
		kebakaran sesuai standar				
6. BIDANG URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, Dan Perlindungan Anak	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,421	0,48
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase ARG Daerah	%	7	40
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Nilai Penghargaan Parahita Ekapraya Daerah	Nilai	701	801
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase Kabupaten/Kota yang mendapatkan Peringkat dalam KLA	Persentase	73,5	100
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	72,33	67
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85	100
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan,	Meningkatnya Kesenjangan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang	%	85	100

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		Mendapatkan Layanan Komprehensif			
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks		
7. BIDANG URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Persentase Anak Berusia 0 - 4 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran	Persentase	97	99,5
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	Persentase penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam pelayanan Adminduk	Persentase	55	60
8. BIDANG URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLARAHAGA						
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan Dalam Tiga Bulan Terakhir	Persentase	77,56	70
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Mengikuti Kegiatan organisasi dalam Tiga Bulan Terakhir	Persentase	5,91	2,5
3	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Indeks Pembangunan Pemuda	Nilai	67	61
4	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Persentase Pemuda (16-30 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan	Persentase	23,79	17,5

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	Persentase	39,41	42
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Jumlah kampanye olahraga yang terselenggara setahun terakhir	Kegiatan	38	42
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Persentase Tenaga Keolahragaan yang Bersertifikat Nasional/ Internasional	Persentase	99	70
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya Kualitas Pemuda, Budaya Olahraga Yang Inklusif, Dan Prestasi Olahraga	Persentase Olahragawan dalam Pemusatan Latihan (Nasional/ Daerah) yang Berprestasi di Tingkat (Nasional)/ Internasional	Persentase	79	75
9. BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Penduduk tumbuh seimbang (PTS) dan keluarga berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	65,8	67
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 19 20	Kelahiran Per 1000 (WUS 15-19 Tahun)	19	20
3	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) 19 20	Rata-rata Anak per Wanita	2,11	2,2

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Proporsi Kebutuhan KB Yang Terpenuhi Menurut Alat/Cara KB Modern	%	85,3	92,5
5	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Indek	65	65
6	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) Dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Persentase	10,9	9,16
10. BIDANG URUSAN PERPUSTAKAAN						
1	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Dan Literasi Masyarakat	Indek pembangunan literasi masyarakat	Indeks	73,6	80
2	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Dan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	75,4	72
3	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Dan Literasi Masyarakat	Indek Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	73,6	80
4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial Dan Generasi Z), Dan Penyandang Disabilitas.	Meningkatnya Kegemaran Membaca Dan Literasi Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	75,4	72

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
11. BIDANG URUSAN KEARSIPAN						
1	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.	Meningkatnya Tertib Arsip Dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Di Lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70	80,7
12. BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						
1	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik Dan Demokrasi Indonesia Serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,12	80,5
2	Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia (HAM).	Meningkatnya Kualitas Politik Dan Demokrasi Indonesia Serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	66	73
3	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik Dan Demokrasi Indonesia Serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,12	80,5
4	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan Yang Harmonis Dengan Lingkungan, Alam, Dan Budaya Serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama Untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil Dan Makmur.	Meningkatnya Kualitas Politik Dan Demokrasi Indonesia Serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	73
5	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik Dan Demokrasi Indonesia Serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Indeks Demokrasi Indonesia	%	82,12	80,5
6	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Meningkatnya Kualitas Politik Dan Demokrasi Indonesia Serta Implementasi Nilai-Nilai Ideologi Pancasila	Indeks Kinerja Ormas	Nilai	68	73
13. BIDANG URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pencapaian Ketahanan Energi	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17,22	16,8

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pencapaian Ketahanan Energi	Konsumsi Listrik per Kapita	Kwh/Kapita	1497	1132
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pencapaian Ketahanan Energi	Intensitas Energi Prime	(SBM/Rp Milyar)	145,4	171,87
4	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Pencapaian Ketahanan Energi	Rasio Elektrifikasi	%	99,9	99,79
14. BIDANG URUSAN PERTANIAN						
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Jagung	Ton	22704470	84195
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Pad	Ton	57534326	1065416
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Cabai	Ton	3084276	26083
4	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura jenis bawang merah	Ton	2000158	500
5	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kelapa	Ton	2890917	24547

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
6	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya Produksi Pertanian	Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Jenis Kakao	Ton	633290	61
15. BIDANG URUSAN PANGAN						
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	%	90	88
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Rasio jumlah cadangan beras pemerintah daerah (CBPD) terhadap target jumlah CBPD berdasarkan Perbadan 15/2023	%	50	252,47
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	94,5	92,5
4	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatnya ketahanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	15,6	11,69
16. BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN						
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/KAP/TH	25,85	36,1
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Garam	Ton	2500000	-
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	6.470.000	221.500

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
4	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	19.380.000	162.337,61
5	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	83	100
6	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Kawasan konservasi daerah yang operasional	Ha	19.100.000	179.659,89
7	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis perairan pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke dalam RTRW Provinsi	Dokumen	7	1
17. BIDANG URUSAN PARIWISATA						
1	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah devisa sektor pariwisata	Rp	22000000000 0	2500000000
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara	Perjalanan	1176000000	12000000
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Rasio PDB Pariwisata	%	4,7	2,12
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	26.530.000	323.000

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional				
5	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Jumlah Tenaga Kerja Ekonomi Kreatif	Orang	26.060.000	321.000
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	7,4	1,5
18. BIDANG URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						
1	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	1,12	0,5
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Update dan pengumpulan Data UMKM	%	15	7
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Proporsi Jumlah UKM	%	3,15	2
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Rasio Kewirausahaan	%	3,24	1
5	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Proporsi Volume Usaha Koperasi Sektor Produksi	%	8,9	4

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.					
6	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Berkoperasi	%	10	4
19. BIDANG URUSAN PENANAMAN MODAL						
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	Nilai Realisasi Penanaman Modal	triliun rupiah	2175	19,1
20. BIDANG URUSAN PERINDUSTRIAN						
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas (Rp. Triliun)	Rp	880	1,45
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Tercapainya pertumbuhan sektor industri pengolahan nonmigas	Kontribusi ekspor produk industri non migas terhadap total ekspor	%	71	13,96
21. BIDANG URUSAN PERDAGANGAN						
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pertumbuhan Ekspor Barang Provinsi	%	7,1	6,3
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	Pertumbuhan Total Perdagangan dengan Provinsi Lainnya	%	5	5
22. BIDANG URUSAN TENAGA KERJA						
1	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34,99	28,76
2	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan	Orang	15.389.510	205.798

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
		tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial			
3	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283.168	365
4	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Dokumen	38	1
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	34,99	28,76
6	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	15.389.510	205.798
7	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	283.168	365
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja,	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas tenaga kerja	Dokumen	38	1

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
		kesempatan kerja dan perlindungan pekerja				
23. BIDANG URUSAN TRANSMIGRASI						
1	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal Transmigrasi	Persentase Dukungan Kegiatan Pemerintah Daerah yang Dilaksanakan di Kawasan Transmigrasi	%	45	31,31
24. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Rumah tangga dengan akses air minum aman (%)	%	36	30
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	Jumlah luas layanan irigasi yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Hektar	143.897	1059,93
25. BIDANG URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						
1	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	%	68,6	66,39
26. BIDANG URUSAN PERTANAHAN						
1	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah bidang tanah yang didistribusi	Bidang Tanah	197650	6350
2	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah	Jumlah Kepala Keluarga penerima akses Reforma Agraria	Kepala Keluarga	124000	2500
27. BIDANG URUSAN LINGKUNGAN HIDUP						
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air,	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76,67	72,51

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
	ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru					
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	58
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Lingkungan Hidup Berkualitas	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	60
4	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	poin	76.67	03/01/00 00.51
5	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	poin	61	58
6	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	Lingkungan Hidup Berkualitas	Proporsi Rumah Tangga dengan layanan pengumpulan sampah	Persentase	64	60
28. BIDANG URUSAN PERHUBUNGAN						
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,67	0,67
2	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	99,99	99,8

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Rasio Konektivitas Simpul Transportasi Provinsi	Rasio	0,67	0,67
4	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Provinsi	Tingkat Keselamatan Transportasi Daerah Provinsi	Persentase	99,99	99,8
29. BIDANG URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						
1	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan layanan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi	Level	2	3
2	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat kematangan penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah	Level	2	2
3	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Nilai tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Provinsi	Level	2	3
4	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Peningkatan implementasi inovasi Provinsi Cerdas	Persentase	20	15
5	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Nilai	72	72
30. BIDANG URUSAN STATISTIK						
1	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	02.06	02.04

No	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2026	TARGET DAERAH 2026
31. BIDANG URUSAN PERSANDIAN						
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	70
2	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	%	40	70
32. BIDANG URUSAN KEHUTANAN						
1	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Luas akses kelola hutan oleh masyarakat	Ha	1100000	3000
2	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Nilai transaksi ekonomi kelompok masyarakat kehutanan	Rp	2,47E+12	4300000000
3	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Penurunan luas lahan yang terdegradasi atau kritis	Ha	258500	45000
4	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	Meningkatkan pengelolaan hutan lestari sebagai sumber pertumbuhan baru, pengentasan kemiskinan, serta ketahanan pangan, air dan energi	Peningkatan sumbangan PDRB subsektor Kehutanan	Persentase	1	

BAB VIII

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlaku dari tanggal 01 Januari sampai tanggal 31 Desember 2026. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait penyusunan Renja untuk Perangkat Daerah Provinsi dan RKPD untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pelaksanaan dokumen RKPD 2026, baik berupa prioritas maupun sasaran-sasaran pembangunan, wajib dilaksanakan secara professional dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Harapannya kemudian hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan secara lebih nyata bagi seluruh masyarakat.

Dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sebagai wujud dari pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029. Penyusunan dokumen Rancangan ini juga memperhatikan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045.

Dalam penyusunan dokumen ini selain untuk mengejawantahkan muatan-muatan yang terkandung pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029, juga untuk dapat menjamin konsistensi dan menjaga kesinambungan perencanaan yang termuat dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 setelah dipadukan juga dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN).

Berdasarkan analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah, analisis rancangan kerangka ekonomi daerah, penelaahan terhadap prioritas RPJPD, penelaahan terhadap kebijakan pemerintah dan program strategis nasional dalam RPJMN Tahun 2025-2029, maka perencanaan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini adalah untuk mencapai target kinerja pada tahap pertama RPJPD; juga untuk melaksanakan tahun pertama pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 yang mengusung tema pembangunan **Penguatan**

Fondasi Transformasi, sedangkan tema Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 adalah **Peningkatan Daya Saing SDM dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah Mendukung Pusat Distribusi Regional**. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 diarahkan pada: **Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berbudaya; Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Perekonomian Berbasis Kewilayahan; Peningkatan Sektor Unggulan (Industri, Umkm, Perdagangan, Pertanian, dan Pariwisata) didukung oleh Investasi, Tenaga Kerja Berdaya Saing, Dan Energi Berkelanjutan; Peningkatan Kualitas Lingkungan Dan Kapasitas Mitigasi Serta Penanganan Bencana; Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Fokus pada Pelayanan Publik;**

Prioritas pembangunan tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas untuk Tahun 2026 dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kebijakan *money follow program* yang dibuat dengan lebih implementatif melalui pendekatan top down, bottom up, partisipatif, politik, teknokratik yang berorientasi Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini menjadi bahan bagi perangkat daerah dalam merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang dirumuskan dengan prinsip spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dengan memperhatikan waktu yang ada.

Sementara itu dalam rangka pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup daerah provinsi dan antar daerah kabupaten/kota, Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten/Kota. Dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2026 bagi Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan agar dapat menyelaraskan dengan sasaran, prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan provinsi pada Tahun 2026.

Dalam pelaksanaannya, RKPD 2026 memerlukan kaidah dan prinsip pelaksanaan yang harus menjadi komitmen bagi seluruh *stakeholder* yang berperan baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan di provinsi Kalimantan Selatan. Kaidah dan prinsip tersebut adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan melalui forum Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan masyarakat.
2. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta dalam pembangunan, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan.

3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan baik serta efektif dan efisien.
4. RKPD digunakan sebagai pedoman penyusunan APBD untuk itu RKPD perlu dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Provinsi Kalimantan Selatan.
5. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, setiap Organisasi Perangkat Daerah harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang dapat menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
6. Seluruh perangkat daerah melaksanakan tugas dan fungsinya secara professional dan proporsional sehingga semua program pembangunan dapat berjalan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran.

Dengan kaidah dan prinsip seperti disebutkan di atas, diharapkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Akhir kata, implementasi perencanaan pembangunan yang berkelanjutan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 menuntut keterlibatan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk bersama-sama dapat berperan aktif dalam mengawal, melaksanakan serta mewujudkan pelaksanaan arah kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam dokumen ini agar dapat mencapai visi **KALSEL BEKERJA (Berkelanjutan, Berbudaya, Religi, dan Sejahtera) Menuju Gerbang Logistik Kalimantan** dan sebagai tahun pertama RPJMD 2025 -2029 baru akan diberlakukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2025 – 2029.

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. MUHIDIN